

Praktik *Social Disclosure*
(Kajian Komparatif Indonesia – Malaysia)

DANDANG SETYAWANTI*
DJOKO SUHARDJANTO
HANUNG TRIATMOKO
Universitas Widya Dharma

Abstract: The research aims to know: 1) the cooperate measure influences toward social disclosure in Indonesia and Malaysia, 2) the cooperate leverage influences toward social disclosure in Indonesia and Malaysia, 3) the cooperate probability influences toward social disclosure in Indonesia and Malaysia, 4) the cooperate scope influences toward social disclosure in Indonesia and Malaysia, 5) the revelation practices differentiate and social disclosure in Indonesia and Malaysia.

This research is done at Financial Report which published in Indonesia and Malaysia by used 150 cooperates as sample from both of them. The sample of taking method is done proportional allocation row random. The technique of collecting data are collected from annual report in Indonesia and Malaysia, mean while the techniques of analyzing data are used descriptive statistics and hypothesis test which consist of linear regression, classic assumption test consist of multicollinearity test, heteroskedasticity test, autocorrelation test and normality test.

The result of the shows that 1) there are exist the corporate influences toward social disclosure in Indonesia and Malaysia 2) there aren't exist the cooperate leverage influences probability cooperatescope and industrial type toward social in Indonesia and Malaysia., 3) from the result of the differentiate t-test, actually there are not differentiate social disclosure in Indonesia and Malaysia

Keywords : *Social Disclosure, Cooperate Someasure, Leverage, Probability, Corporate Scope, Cooperate Industrial Type*

* Corresponding author: dandang@unwidha.ac.id

A. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang begitu pesat, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih banyak berpihak kepada para pemilik modal. Hal ini tentu saja mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali sehingga hal ini mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan alam yang pada akhirnya bisa mengganggu kehidupan manusia.

Para kaum kapitalis, hanya berorientasi semata pada laba material, dan hal tersebut telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomik yang dimiliki secara berlebihan dan tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial Galtung dan Ikeda (1995) dan Rich (1996) dalam Chwastiak (1999).

Di dalam akuntansi konvensional, pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah hanya kepentingan *stockholders*, sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Namun saat ini tuntutan publik terhadap perusahaan semakin besar, perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan para pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga kepentingan karyawan, konsumen serta masyarakat. Di sini perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pemilik modal dan juga pihak-pihak diluar manajemen. Tetapi seringkali perusahaan melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan, hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu transaksi yang tidak menimbulkan prestasi timbal balik di antara keduanya.

Tekanan dari berbagai pihak muncul terhadap sektor swasta untuk menerima tanggung jawab dampak pengaruh aktivitas bisnis terhadap masyarakat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada investor dan manajemen tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas (Hackston dan Milne, 1996). Oleh karenanya perusahaan diminta agar dapat memberikan informasi mengenai perusahaannya dengan lebih transparan. Sedangkan informasi tersebut tertuang dalam laporan-laporan tahunan perusahaan yang telah *go public*. Dengan demikian laporan tahunan diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan/ *corporate*

social disclosure (CSR) tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi (Anggraini, 2006).

Indonesia mempunyai penduduk sebanyak 222 juta, 17% nya adalah jumlah penduduk yang berpendapatan rendah atau miskin, sedangkan angka pengangguran adalah sebesar 10%, dengan tingkat pendapatan perkapita pada tahun 2005 adalah sebesar \$1660 US (Biro Pusat Statistik, 2006). Indonesia menghadapi masalah sosial yang cukup parah, seperti masalah isu HAM yaitu mempekerjakan anak di bawah umur, gaji rendah, korupsi.

Malaysia mempunyai penduduk sekitar 27,17 juta, juga menghadapi masalah sosial yang serupa dengan Indonesia, walaupun dalam dua dekade terakhir yaitu tahun 1980-an dan tahun 1990-an mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat (mencapai GDP di atas 7%) (www.panda.org, 2008).

Kemajuan perekonomian di kedua negara ternyata membawa dampak terhadap lingkungan sosial. Perusahaan yang selama ini telah menjadi agen pertumbuhan ekonomi tampaknya harus mulai memikirkan para *stakeholder* dan juga lingkungan sosialnya. Namun, sampai dengan tahun 2008 belum ada regulasi mengenai *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan).

Di kedua negara belum ada panduan pelaporan untuk mengungkapkan informasi sosial kepada *stakeholdernya*. Oleh karena tidak adanya standar *disclosure* isu-isu lingkungan sosial, *disclosure* informasi sosial dapat bervariasi/berbeda antar perusahaan maupun antar negara.

Sebagai pedoman pelaporan sosial, penelitian ini akan menggunakan *Global Reporting Initiative's* (2006) sebagai *unweighted* index sosial karena GRI telah digunakan secara luas di dunia internasional (KPMG, 2005). Indikator sosial dari GRI 2006 akan membantu penulis dalam menguji pengungkapan sosial. GRI *guideliness* menitikberatkan pada isi *sustainability reporting* di bawah kategori indikator ekonomi, lingkungan hidup dan sosial (Adam, 2004). Karena belum adanya legal standard untuk pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), penggunaan GRI *guidelines* akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan index pengungkapan sosial. Ketiga indikator kategori ekonomi, lingkungan

hidup dan sosial memuat spesifik kategori yang digolongkan sebagai *core and additional performance indicators* (Loftus dan Purcell, 2006)

Ada 40 indikator sosial yang selayaknya diungkapkan di laporan tahunan perusahaan. Semua isu sosial seperti mempekerjakan anak di bawah umur, korupsi, pelanggaran HAM, ancaman keselamatan pelanggan atas produk dan aspek sosial lainnya telah tercakup dalam GRI 2006. *Guidelines* tersebut dipertimbangkan sebagai sebuah petunjuk pelaporan sosial yang lengkap dalam mengkomunikasikan informasi sosial kepada para *stakeholdernya* dan sebagai petunjuk untuk memahami kontribusi perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (GRI, 2006). Dengan demikian, tujuan perusahaan yang berorientasi laba (*profit*) akan bermanfaat juga terhadap masyarakat dan lingkungan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *study* ini meneliti tentang berbagai faktor maupun karakteristik perusahaan yang mempengaruhi perusahaan baik di Indonesia maupun Malaysia dalam melakukan upaya transparansi lingkungan sosial.

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian di Indonesia dan Malaysia, karena kedua negara tersebut adalah negara serumpun.

Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah ada pengaruh *leverage* perusahaan terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah ada pengaruh *profitabilitas* perusahaan terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah ada pengaruh ruang lingkup perusahaan terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah ada pengaruh tipe industri terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah ada perbedaan praktik *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* perusahaan terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

3. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* perusahaan terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk mengetahui pengaruh ruang lingkup perusahaan terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
5. Untuk mengetahui pengaruh tipe industri terhadap *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
6. Untuk mengetahui perbedaan praktik *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

B. TINJAUAN PUSTAKA, PERUMUSAN HIPOTESIS dan KERANGKA BERFIKIR

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut sebagai *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam kegiatan operasinya, perusahaan sering menimbulkan masalah pada lingkungan dan masyarakat seperti masalah sosial, sumberdaya, limbah, polusi. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), diluar tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Menurut Gray *et.al.* (1987), perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham.

Pengungkapan sosial (*social disclosure*) adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pertanggungjawaban sosial perusahaan, diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* ialah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya.

Pengungkapan sosial dalam tanggung jawab perusahaan sangat perlu dilakukan, karena bagaimanapun juga perusahaan memperoleh nilai tambah dari kontribusi masyarakat di sekitar perusahaan termasuk dari penggunaan sumber-sumber sosial (*social resources*). Jika aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan sumber-sumber sosial maka dapat timbul

adanya biaya sosial (*social cost*) yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedang apabila perusahaan meningkatkan mutu *social resources* maka akan menimbulkan *social benefit* (manfaat sosial).

Ada dua jenis ungkapan di dalam laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal. Yang pertama ialah ungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua ialah ungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), ialah ungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Sedangkan pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang memang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keaneka ragaman di dalam pengungkapan dikarenakan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang mempunyai filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat.

Karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas pengungkapan (Lang dan Lundhlohm, 1993). Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda satu entitas dengan entitas lainnya. Lang dan Lundhlohm (1993) dan Waalance (1994) membagi karakteristik perusahaan menjadi tiga kategori, yaitu variabel struktur, variabel kinerja dan variabel pasar.

Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan sosial diprosikan ke dalam ukuran perusahaan (*firm size*), *lverage*, *profitabilitas*, ruang lingkup perusahaan dan tipe industri.

Indikator-indikator utama dalam standar *corporate governance* di Indonesia adalah *transparency*, *countability* dan *responsibility*. Dengan menerapkan *corporate governance*, suatu perusahaan mampu untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan dengan *stakeholder*. Yang menjadi ciri utama *corporate governance* misalnya adalah *outside (non executive) directors* (komisaris independen) dalam dewan komisarisnya (*board of directors*). Dalam Agrawal dan Knoeber (2001) menjelaskan bahwa komisaris independen berperan penting dalam penyusunan strategi bisnis perusahaan termasuk kebijakan pelaporan sosial perusahaan. Menurut Chau dan Leung, (2006), perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih banyak diharapkan memiliki tata kelola lebih baik. Dalam penelitian Haniffa dan Cooke (2005) menunjukkan bahwa ada hubungan antara *social disclosure* dan penerapan *corporate governance*.

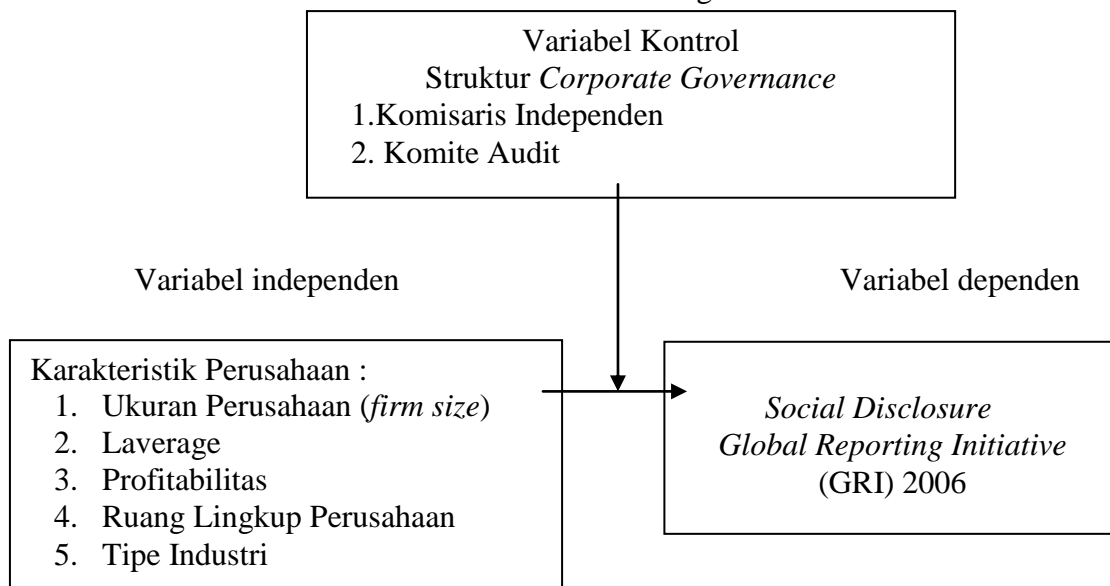
Global Reporting Initiative (GRI) disusun pertama kali pada tahun 1997 oleh *The Boston-based Coalition on Environmentally Responsible Economics* (CERES) bekerjasama dengan *Tellus Institute*. GRI tersedia sebagai sarana internal untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan *sustainability* perusahaan dan strategi yang digunakan, serta kegiatan aktual lainnya.

Maret 1999, GRI mengeluarkan *the Sustainability Reporting Guidelines* sebagai draft pembuka bagi tanggapan dan pengujian publik pada tahun 2000. Ada dua puluh satu perusahaan dari seluruh dunia menjadi proyek percontohan bagi panduan tersebut dan ada ratusan *stakeholders* dari seluruh dunia menyediakan komentar yang substantif. Juni 2000, GRI meluncurkan *the Sustainability Reporting Guidelines* yang telah diadopsi oleh kurang lebih seratus perusahaan di seluruh dunia. Revisinya diluncurkan tahun 2002.

Di tahun 2002 itu pula, GRI diadopsi oleh UN *Global Compact*. GRI sendiri adalah adopsi dari *the UN Environment Programme* (penyandang dana dari UN *Development Fund*) yang saat ini telah menjadi organisasi independen. GRI dibangun di atas dasar pemikiran yang sederhana. GRI menawarkan mekanisme persetujuan pihak ketiga, yaitu proses pencapaian tujuan melalui negosiasi diantara mitra kerja, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan sosial dan standar lingkungan.

Kerangka hubungan antara *variable* independent, *variable* kontrol dan *variable* dependen seperti berikut ini.

Gambar 1. Kerangka Berfikir



C. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kuala Lumpur *Stock Exchange* (KLSE) tahun 2007.

Total *sample* dalam penelitian ini adalah 150 laporan tahunan (*annual report*) tahun 2007. Sampel yang diambil dari BEI adalah 75 perusahaan dari 380 perusahaan yang terdiri dari 19 perusahaan jasa, 23 perusahaan keuangan dan 33 perusahaan manufaktur. Sedangkan *sample* yang diambil dari KLSE juga sebanyak 75 perusahaan dari 523 yang terdiri dari 19 perusahaan jasa, 23 perusahaan keuangan dan 33 perusahaan manufaktur.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *random* berbasis alokasi proporsional untuk meyakinkan *sample* merepresentasikan semua sektor industri (Haniffa dan Cooke, 2005), yaitu jasa, keuangan dan manufaktur termasuk pertambangan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (*annual report*) tahun 2007 di Indonesia dan Malaysia. Data sekunder dari Indonesia dikumpulkan dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD), IDX dan dari situs masing-masing perusahaan *sample*. Sedangkan data sekunder dari Malaysia dikumpulkan dari www.klse.com.my. Laporan tahunan dipilih karena mempunyai kredibilitas yang tinggi, selain itu dalam laporan tahunan digunakan sejumlah *stakeholder* sebagai sumber informasi (Degan dan Rankin, 1997). Dalam laporan tahunan perusahaan sering diakses yang bertujuan untuk penelitian (Wood Ward, 1998).

Variabel Penelitian dan Pengukurannya.

1. Variabel Independen

a) Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan (*firm size*) dipandang sebagai *proxy* untuk salah satu atribut perusahaan dengan ukuran yang berbeda seperti *total assets*, *turnover*, jumlah pemegang saham dan saham biasa yang digunakan dalam penelitian sebelumnya baik sebagai ukuran kombinasi atau ukuran yang berdiri sendiri (Craig dan Diga, 1998; Cooke 1992; Williams 1999).

Mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Haniffa dan Cooke (2005), penelitian ini menggunakan total aktiva sebagai dasar ukuran perusahaan karena total aktiva berisi keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan baik yang lancar maupun tidak lancar, sehingga ini lebih menunjukkan ukuran perusahaan yang sebenarnya.

b) *Leverage*

Merupakan persentase perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar dari total keseluruhan *asset* perusahaan yang diperoleh atau didanai oleh hutang. Hal tersebut adalah sejalan dengan yang dilakukan oleh Kokubu *et.al.*, (2001).

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c) **Profitabilitas**

Dalam penelitian ini, *return on asset* (ROA) digunakan sebagai *rasio profitabilitas*. ROA ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengukur tingkat efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan harta yang dimilikinya (Haniffa dan Cooke, 2005).

$$ROA = \frac{\text{Laba Perusahaan}}{\text{Total Aktiva}}$$

d) **Ruang Lingkup Perusahaan**

Ruang lingkup perusahaan diidentifikasi dengan *dummy variable*, yaitu memberikan angka 1 untuk perusahaan yang mempunyai ruang lingkup internasional dan memberi angka 0 untuk perusahaan domestik (Haniffa dan Cooke, 2005)

e) **Tipe Industri**

Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan biasanya sesuai dengan tipe industrinya (Dye dan Sridhar, 1995 dalam Haniffa dan Cooke, 2005). Dalam penelitian ini, perusahaan dibedakan menjadi tiga tipe industri yaitu:

1. *Service* diberi kode 1
2. *Finance* diberi kode 2
3. *Manufacture* termasuk *mining* diberi kode 3.

2. **Variabel Kontrol**

a) **Komisaris Independen**

Komisaris independen dianggap sebagai alat untuk memonitor perilaku manajemen (Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Ho dan Wong, 2001) yang mendorong perusahaan mengungkapkan informasi sosial perusahaan secara lebih luas. Mengacu pada penelitian Forker (2002) dan Chou dan Leung (2006), komposisi komisaris independen dihitung dengan:

$$\text{Komposisi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{KomisarisIndependen}}{\sum \text{DewanKomisaris}}$$

b) Komite Audit

Proporsi Komite Audit diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.

$$\text{KomposisiKomiteAudit} = \frac{\sum \text{KomiteAudit}}{\sum \text{TotalKomiteAudit}}$$

3. Variabel Dependen

Pengungkapan sosial (*social disclosure*) diukur dengan memberi angka 1 terhadap setiap item *social disclosure* (GRI 2006) yang diungkapkan perusahaan dalam *annual report* dan memberi angka 0 untuk item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Kemudian, untuk mengetahui skor atau nilai *social disclosure* adalah dengan menghitung persentase jumlah item *social disclosure* yang dilaporkan dibagi dengan total keseluruhan item, yang dituliskan dengan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{Social Disclosure (SD)} = \frac{\sum X}{N} \times 100\%$$

Dimana,

X = Item *social disclosure* yang diungkapkan di laporan tahunan, dan

N = Total keseluruhan item.

Sedangkan item SD yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada GRI (2006).

Social disclosure yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan persentase *social disclosure*. Sedangkan item yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada GRI (2006), yaitu sebagai berikut ini.

1. Tenaga Kerja dan Indikator Performa Pekerjaan.
2. Indikator Performa Hak Asasi Manusia.
3. Indikator Performa Masyarakat.
4. Indikator Performa Tanggung Jawab Produk.

Dari masing-masing aspek tersebut di atas mempunyai item-item yang lebih rinci dan kemudian digunakan sebagai acuan dalam penghitungan persentase *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan di kedua negara.

Adapun *sample* yang diuji adalah data sekunder yang dipublikasikan secara resmi di BEI yaitu www.idx.co.id dan di KLSE yaitu www.klse.com.my.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan pengujian *multiple regression* sebagai alat uji untuk menjelaskan karakteristik data dan uji hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *software SPSS release 18*. Penjelasan dari kedua alat uji statistik ini akan disajikan sebagai berikut ini.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum dan minimum dari masing-masing data sampel kedua negara. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut.

2. Regresi Berganda

Regresi berganda merupakan suatu model analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen (*predictor*).

Untuk tujuan pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda, dengan rumus sebagai berikut ini.

$$SD = \beta_0 + \beta_1STA + \beta_2LEV + \beta_3ROA + \beta_4CAKOP + \beta_5IT + \beta_6KOMIND + \beta_7KOMKA + e$$

Keterangan :

Penjelasan Variabel	Pengukuran
<i>Social Disclosure</i>	Memberi angka 1 pada item SD yang diungkapkan perusahaan dan angka 0 pada item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan melalui laporan tahunannya kemudian dihitung persentasenya.
Ukuran Perusahaan (STA)	<i>Proxy</i> yang digunakan adalah total asset.
<i>Leverage</i> (LEV)	$\text{Laba} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Equitas}}$
<i>Profitabilitas</i> (ROA)	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Perusahaan}}{\text{Total Aktiva}}$
Ruang Lingkup Perusahaan/ Cakupan Operasional Perusahaan (CAKOP)	1 = Perusahaan Internasional 0 = Perusahaan Domestik

Type Industri/ <i>Industry Type</i> (IT)	1. Perusahaan Jasa 2. Keuangan 3. Manufaktur termasuk <i>mining</i>
Komposisi Dewan Komisaris (KOMIND)	Membandingkan antara jumlah komisaris independen terhadap keseluruhan dewan komisaris.
Komposisi Komite Audit (KOMKA)	Membandingkan antara jumlah anggota komite audit dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.

c. T-test

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2005). Adapun rumus uji beda t-test adalah sebagai berikut ini.

$$t = \frac{(\text{rata-rata sampel pertama}) - (\text{rata-rata sampel kedua})}{\text{standar error rata-rata kedua sampel}}$$

Alat statistik ini digunakan untuk menguji perbedaan level pengungkapan sosial oleh perusahaan Indonesia dan Malaysia

Kriteria pengujian:

Jika probabilitas > 0.05, maka H₀ tidak dapat ditolak jadi *variance* sama.

Jika probabilitas < 0.05, maka H₀ ditolak jadi *variance* berbeda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Seleksi Sampel.

Sampel yang diuji dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber di laporan tahunan perusahaan yang terdaftar untuk dipublikasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan situs Kuala Lumpur *Stock Exchange* (KLSE) yaitu www.klse.com.my. Atau juga dari situs resmi masing-masing perusahaan di kedua negara (Indonesia dan Malaysia)

Tabel 1
Populasi Perusahaan yang Terdaftar di BEI dan KLSE Tahun 2007

Industri	Indonesia		Malaysia	
	Jml Perush	%	Jml Perush	%
Jasa	66	17,37	68	23
Keuangan	67	17,63	107	20,45
Manufaktur (termasuk pertambangan)	247	65	348	66,53
Total	380	100	523	100

Dalam penelitian ini menggunakan sampel 75 perusahaan untuk masing-masing negara dari 380 untuk jumlah perusahaan yang ada di Indonesia dan 523 jumlah perusahaan yang ada di Malaysia yang terdaftar di BEI dan KLSE tahun 2007 yang terdiri dari 19 perusahaan jasa, 23 perusahaan keuangan dan 33 perusahaan manufaktur termasuk pertambangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jumlah sampel yang sama antara perusahaan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam melakukan komparasi (perbandingan), meskipun jumlah perusahaan di kedua negara berbeda jumlahnya.

Berdasarkan 75 perusahaan tersebut, hampir semua perusahaan mengungkapkan informasi sosialnya melalui *annual report*. Hanya terdapat 4 perusahaan Indonesia dan 3 perusahaan Malaysia yang tidak mengungkapkan informasi sosialnya dalam laporan tahunannya atau sebesar 5,3% untuk Indonesia dan 4% untuk Malaysia dari seluruh sampel yang digunakan (Tabel 2)

Tabel 2
Perusahaan yang Mengungkapkan *Social Disclosure*

No	Tipe Industri	Jumlah			
		Indonesia	%	Malaysia	%
1	Jasa	16	21,33	18	24
2	Keuangan	22	29,33	21	29,33
3	Manufaktur (termasuk pertambangan)	33	44	33	44
Jumlah		71	94,66	72	97,33

Baik di Indonesia dan Malaysia, tipe industri yang memiliki persentase pengungkapan paling tinggi adalah perusahaan manufaktur yaitu sebesar 44%, bila dibandingkan dengan perusahaan dari sektor keuangan yang sebesar 29,33% dan sektor jasa yang hanya sebesar 21,33% untuk perusahaan Indonesia, dan untuk Malaysia perusahaan dari sektor keuangan adalah 29,33% dan hanya 24% untuk sektor jasa. Jadi di kedua negara secara rata-rata sektor jasa memiliki tingkat pengungkapan informasi sosial yang rendah bila dibandingkan dengan sektor keuangan dan manufaktur.

2. Statistik Deskriptif

a) Indonesia dan Malaysia

Pada tabel 3 dijelaskan hasil analisis statistik deskriptif dari kedua negara yang digabung yaitu menghitung rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3
Statistik Deskriptif untuk *Social Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

	N	Minimum (000)	Maximum (000)	Mean (000.000)	Std. Deviation (000.000)
Sdpersentase	150	.00	.50	.2373	.10804
Ukuran Perusahaan	150	70.505	319.085.590	10.004.000	36.382.300
ROA	150	-.85	7.25	.2769	.63405
Leverage	150	-.10	20.77	.7792	2.50416
Komisaris Indep	150	.14	1.00	.4638	.18991
Komite Audit	150	.00	1.00	.3831	.11459
Valid N (listwise)	150				

Tingkat *social disclosure* dalam laporan keuangan di Indonesia dan Malaysia memiliki nilai rata-rata 23,73%, standar deviasi sebesar 10,804%, nilai minimum sebesar 0 dan maksimum 50%.

Ukuran perusahaan dalam laporan keuangan di kedua negara memiliki nilai rata-rata 10.004 milyar, standar deviasi 36.382 milyar, nilai minimum 375.505.000 dan nilai maksimum adalah sebesar 319.085 milyar.

Return on Asset (ROA) memiliki nilai rata sebesar 27,69%, standar deviasi sebesar 53,405%, maksimum 725% dan nilai minimum sebesar 0.85%

Leverage yang dalam penelitian ini diukur dengan total utang dibagi dengan total ekuitas memiliki rata-rata sebesar 77,92% standar deviasi 250,416%, serta nilai minimum sebesar -10% dan nilai maksimum sebesar 2077%.

b) Indonesia

Tabel 4
Statistik Deskriptif Untuk
***Social Disclosure* di Indonesia**

	N	Minimum	Maximum (000.000)	Mean (000.000)	Std. Deviation (000.000)
Sdpersentase	75	.00	.41	.2115	.10287
Ukuran Perush	75	227.421.924	319.085.590	20.086.000	49.606.300
ROA	75	-.10	13.71	.2426	1.57793
Leverage	75	-.02	94.82	4.9963	11.97098
Komisaris Indep	75	.13	1.00	.4055	.16622
Komite Audit	75	.14	1.00	.353	.13219

Tingkat *social disclosure* dalam laporan keuangan di Indonesia memiliki nilai rata-rata 21,15%, standar deviasi sebesar 10,287%, nilai minimum sebesar .00 dan maksimum 41%.

Ukuran perusahaan dalam laporan keuangan di Indonesia memiliki nilai rata-rata 20.086 milyar, standar deviasi 49.6906 milyar, nilai minimum 20.086 milyar dan nilai maksimum adalah sebesar 319.085 milyar.

Return on Asset (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 24,26%, standar deviasi sebesar 157,793%, maksimum 137,1% dan nilai minimum sebesar -10%.

Leverage yang dalam penelitian ini diukur dengan total utang dibagi dengan total ekuitas memiliki rata-rata memiliki rata-rata sebesar 499,63% standar deviasi 119,7098%, serta nilai minimum sebesar 2% dan nilai maksimum sebesar 2077%.

Pada umumnya perusahaan di Indonesia telah memenuhi peraturan BAPEPAM dengan memiliki proporsi komisaris independen dan proporsi komite audit lebih dari 30%.

c) Malaysia

Tabel 5
Statistik Deskriptif untuk
***Social Disclosure* di Malaysia**

	N	Minimum	Maximum (000.000)	Mean (000.000)	Std.Devision (000.000)
Sd persentase	75	.00	.50	.2576	.10577
Ukuran Perush	75	39.939.766	8.430.000	638.970	1.285.000
Leverage	75	.00	20.77	1.3013	3.09438
ROA	75	-.85	7.25	.1583	.86507
Komisaris Indep	75	.25	1.00	.5741	.17457
Komite Audit	75	.00	.50	.4128	.08475

Tingkat *social disclosure* dalam laporan keuangan di Malaysia memiliki nilai rata-rata 25,76 %, standar deviasi sebesar 10,577%, nilai minimum sebesar .00 dan maksimum 50%

Ukuran perusahaan dalam laporan keuangan di Malaysia memiliki nilai rata-rata 638.970 milyar, standar deviasi 1.285 milyar, nilai minimum 39.939.766 dan nilai maksimum adalah sebesar 8.430 milyar.

Return on Asset (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 14,83%, standar deviasi sebesar 86,507%, maksimum 7,25% dan nilai minimum sebesar -85%.

Leverage yang dalam penelitian ini diukur dengan total utang dibagi dengan total ekuitas memiliki rata-rata memiliki rata-rata sebesar 130,13% standar deviasi 309.438%, serta nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 20,77%.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis karena merupakan prasyarat bagi analisis regresi serta hasil analisis regresi dapat dipercaya atau valid. Dalam pengujian ini terlebih dahulu akan diuji secara keseluruhan sampel dari kedua negara, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk masing-masing negara, baik di Indonesia maupun Malaysia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari berikut ini

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh. Untuk pengujian normalitas menggunakan analisis grafik *normal probability plot of standardized residual*.

Hasil pengujian di kedua negara (Indonesia dan Malaysia) dengan *normal probability plot of standardized residual* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas. Hal ini didukung dengan tampilan histogram dan *normal probability plot*.

2. Multikolinearitas

Uji multikoleniaritas digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model yang korelasi antar variabel independennya rendah. Keberadaan multikolinearitas di deteksi dengan *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance*. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menilai nilai *variance inflation faktor* (VIF) di atas nilai 10 atau nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 maka dalam model regresi berganda terjadi multikolinearitas.

Asumsi pertama mengenai ada tidaknya multikolinearitas antar variabel-variabel independen. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode korelasi berpasangan antar variabel. Pengujian dilakukan dengan SPSS *release 18 for windows* menggunakan *covariance matrix* dan *coltinearity diagnostics*. *Default* bagi angka *tolerance* adalah 0,0001. semua variabel yang dimasukkan dalam perhitungan model regresi harus mempunyai toleransi di atas angka ini. Jika VIF lebih besar dari 5 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas yang lain. Jika dilihat pada tabel maka semua variabel bebas telah memenuhi persyaratan ambang toleransi, nilai VIF sekitar 1 dan koefisien korelasi antar variabel independen yang lemah (semuanya di bawah 0,5). Dengan demikian disimpulkan

tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini baik dari Indonesia maupun Malaysia.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. autokorelasi dalam penelitian ini diuji dengan Durbin-Watson. Hasil uji Durbin-Watson disajikan pada tabel berikut ini.

Dari tabel tersebut diatas, nilai d adalah sebesar 1684 dan 2389, hal ini berarti nilai d berada pada kisaran $2d < 4 - 2d$, yang berarti bahwa dalam model regresi tidak ada autokorelasi positif atau negatif antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan *scatterplots*. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini

Hasil uji *scatterplots* pada kedua gambar (Indonesia dan Malaysia) di atas menunjukkan titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi yang menunjukkan signifikansi model regresi dalam memberikan dasar untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian untuk setiap variabel independen dan juga signifikansi koefisien antar variabel, dapat dilakukan dengan Software SPSS *release* 18 sebagai berikut ini.

Tabel 6
Analisis Regresi Linier Berganda (Indonesia)
Coefficient

	B	Std.Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	.118	.055		2.161	.03
Ukuran Perush	8.555E-16	.000	.413	2.820	.006
Leverage	.000	.001	.026	-.185	.854
ROA	-.006	.007	-.087	-.792	.431
Ruang Lingk Perush	-.013	.024	-.062	-.548	.566
Tipe Industri	.027	.014	.218	1.948	.056
Komisaris Independen	.039	.063	.063	.543	.589
Komite Audit	.032	.089	.042	.365	.717

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.454a	.206	.123	.089635

a. Predictors: (Constant), komiteaudit, ROA, komisarisingpenden, tipeindustri, ruanglingkupperusahaan, leverage, ukuranperusahaan

Dari tampilan output SPSS model *summary* untuk Indonesia besarnya *adjusted R2* adalah 0.123. Hal ini berarti 12,3% menjelaskan bahwa kombinasi atau variasi variabel independen seperti ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, tipe industri dan ruang lingkup perusahaan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu luas pengungkapan informasi sosial perusahaan sebesar 12,3%. Sedangkan sisanya sebesar 87,7% pengungkapan informasi sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Standar error of estimate sebesar (SEE) sebesar .09635 milyar.. Makin kecil nilai SEE akan membuat model semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Hipotesis 1: Ada pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) pada tingkat *social disclosure* pada laporan tahunan dari perusahaan yang *listing* di BEI.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap tingkat pengungkapan sosial (tingkat *social disclosure*) dalam laporan tahunan keuangan perusahaan.

Sesuai dengan hasil regresi pada tabel 6, koefisien regresi ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap tingkat pengungkapan sosial (tingkat *social disclosure*) bernilai 2,820, dengan tingkat signifikan 0,006. Hal ini berarti signifikan, karena syarat signifikansinya adalah jika nilai ini lebih kecil dari 0,05. Karena hasil yang diperoleh t signifikan, maka hal ini berarti ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh pada tingkat pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Hipotesis 1 diterima.

Hipotesis 2: Ada pengaruh *leverage* pada tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Hipotesis 2 bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *social disclosure* dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada tabel 6, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara *leverage* dengan tingkat *social disclosure* menunjukkan nilai 0,185 dengan tingkat signifikansi 0,431 (tidak signifikan karena Sig >0,05). Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *social disclosure* dalam laporan tahunan, sehingga hipotesis 2 ditolak.

Hipotesis 3: Ada pengaruh profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROA pada tingkat *disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Hipotesis 3 bertujuan menguji pengaruh ROA terhadap tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Pada tabel 6, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara ROA dengan tingkat *social disclosure* menunjukkan nilai -0,792 dengan tingkat signifikansi 0,431 (berarti tidak signifikan, karena $>0,05$). Hal ini berarti bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga hipotesis ini ditolak.

Hipotesis 4: Ada pengaruh ruang lingkup perusahaan pada tingkat *social disclosure* dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Hipotesis 4 bertujuan untuk menguji pengaruh ruang lingkup perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Sesuai dengan hasil regresi tabel 6, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara ruang lingkup perusahaan terhadap lingkungan sosial menunjukkan nilai 0,548 dengan signifikansi 0,586 (tidak signifikan karena $\text{sig} > 0,05$). Hal ini berarti bahwa ruang lingkup perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga hipotesis 4 ini ditolak.

Hipotesis 5: Ada pengaruh tipe industri pada tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Hipotesis 5 bertujuan untuk menguji pengaruh tipe industri dalam laporan tahunan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Sesuai dengan hasil regresi tabel 6 koefisien regresi yang merupakan interaksi antara tipe industri terhadap lingkungan sosial menunjukkan nilai 0,014 dengan signifikansi 0,056 (tidak signifikan karena $\text{sig} > 0,05$). Hal ini berarti bahwa tipe industri tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga hipotesis 5 ini ditolak.

Tabel 7
Analisis Regresi Linier Berganda (Malaysia)
Coefficient

	B	Std.Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	.179	.088		2.039	.045
Ukuran Perush	3.308E-14	.000	.402	3.649	.001
Leverage	-.006	.004	-.172	-1.442	.154
ROA	-.009	.015	-.072	-.594	.554
Ruang Lingk Perush	-.019	.024	-.089	-.792	.431
Tipe Industri	.000	.014	.003	.025	.98
Komisaris Independen	-.005	.074	-.008	-.062	.951
Komite Audit	.091	.053	.053	1.246	.217

a. Dependent Variable:sd persentase

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Squre	Std.Error of the Estimate
1	.502a	.252	.174	.09614

Dari tampilan output SPSS model *summary* untuk Malaysia besarnya *adjusted R2* adalah 0.174. Hal ini berarti 17,4% menjelaskan bahwa kombinasi atau variasi variabel independent seperti ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, tipe industri dan ruang lingkup perusahaan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu luas pengungkapan informasi sosial perusahaan sebesar 17,4%%. Sedangkan sisanya sebesar 82,6% pengungkapan informasi sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Hipotesis 1: Ada pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) pada tingkat *social disclosure* pada laporan tahunan dari perusahaan yang listing di KLSE

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap tingkat pengungkapan sosial (tingkat *social disclosure*) dalam laporan tahunan keuangan perusahaan.

Sesuai dengan hasil regresi pada tabel 7, koefisien regresi ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap tingkat pengungkapan sosial (tingkat *social disclosure*) bernilai 3.649 dengan tingkat signifikan 0,001. Hal ini berarti signifikan, karena syarat signifikansinya adalah jika nilai ini lebih kecil dari 0,05. Karena hasil yang diperoleh t signifikan, maka hal ini berarti ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh pada tingkat pengungkapan sosial dalam laporan tahunan . Hipotesis 1 ditetima.

Hipotesis 2: Ada pengaruh *leverage* pada tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Hipotesis 2 bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KLSE. Pada tabel 7, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara *leverage* dengan tingkat *social disclosure* menunjukkan nilai 0,004 dengan tingkat signifikansi 0,154 (tidak signifikan karena Sig

$>0,05$. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *social disclosure* dalam laporan tahunan, sehingga hipotesis 2 ditolak.

Hipotesis 3: Ada pengaruh profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROA pada tingkat *disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KLSE

Hipotesis 3 bertujuan menguji pengaruh ROA terhadap tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KLSE. Pada tabel 7, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara ROA dengan tingkat *social disclosure* menunjukkan nilai 0.015 dengan tingkat signifikansi 0,554 (berarti tidak signifikan, karena $>0,05$). Hal ini berarti bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga hipotesis ini di tolak.

Hipotesis 4: Ada pengaruh ruang lingkup perusahaan pada tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KLSE.

Hipotesis 4 bertujuan untuk menguji pengaruh ruang lingkup perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KLSE. Sesuai dengan hasil regresi tabel 7, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara ruang lingkup perusahaan terhadap lingkungan sosial menunjukkan nilai 0,024 dengan signifikansi 0,431 (tidak signifikan karena $\text{sig}>0,05$). Hal ini berarti bahwa ruang lingkup perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di KLSE, sehingga hipotesis 4 ini ditolak.

Hipotesis 5: Ada pengaruh tipe industri pada tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KLSE

Hipotesis 5 bertujuan untuk menguji pengaruh tipe industri dalam laporan tahunan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KLSE. Sesuai dengan hasil regresi tabel 7 koefisien regresi yang merupakan interaksi antara tipe industri terhadap lingkungan sosial menunjukkan nilai 0,014 dengan signifikansi 0,980 (tidak signifikan karena $\text{sig}>0,05$). Hal ini berarti bahwa tipe industri tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di KLSE, sehingga hipotesis 5 ini ditolak

Tabel 7
Analisis Regresi Linier Berganda (Gabungan Indonesia - Malaysia)

	B	Std.Error	Beta	T	Sig.
--	---	-----------	------	---	------

(Constant)	.157	.043		3.659	.000
Ukuran Perush	7.609E-16	.000	.256	3.027	.003
Leverage	-.004	.004	-.102	-1.169	.254
ROA	-.021	.015	-.123	-1.428	.155
Ruang Lingk Perush	-.010	.018	-.048	-.580	.563
Tipe Industri	.014	.011	.108	1.337	.183
Komisaris Independen	-.054	.058	.095	.923	.358
Komite Audit	.083	.083	.088	.874	.384

a. Dependent Variable:sd persentase

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Squqre	Std.Error of the Estimate
1	.324a	.105	.061	.10470

Dari tampilan output SPSS model *summary* untuk perusahaan Gabungan Indonesia dan Malaysia besarnya *adjusted R2* adalah 0,061. Hal ini berarti 6,1% menjelaskan bahwa kombinasi atau variasi variabel independen seperti ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, tipe industri dan ruang lingkup perusahaan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu luas pengungkapan informasi sosial perusahaan sebesar 6,1%. Sedangkan sisanya sebesar 93,9% pengungkapan informasi sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Hipotesis 1: Ada pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) pada tingkat *social disclosure* pada laporan tahunan dari perusahaan yang listing di BEI dan KLSE

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap tingkat pengungkapan sosial (tingkat *social disclosure*) dalam laporan tahunan keuangan perusahaan. Sesuai dengan hasil regresi pada tabel 8, koefisien regresi ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap tingkat pengungkapan sosial (tingkat *social disclosure*) bernilai 3.027 dengan tingkat signifikan 0,003. Hal ini berarti signifikan, karena syarat signifikansinya adalah jika nilai ini lebih kecil dari 0,05. Karena hasil yang diperoleh t signifikan, maka hal ini berarti ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh pada tingkat pengungkapan sosial dalam laporan tahunan . Hipotesis 1 diterima.

Hipotesis 2: Ada pengaruh *leverage* pada tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE

Hipotesis 2 bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. dan KLSE. Pada tabel 8, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara *leverage* dengan tingkat *social disclosure* menunjukkan nilai 0,004 dengan tingkat signifikansi 0,245 (tidak signifikan karena Sig

>0,05). Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *social disclosure* dalam laporan tahunan, sehingga hipotesis 2 ditolak.

Hipotesis 3: Ada pengaruh profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROA pada tingkat *disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE

Hipotesis 3 bertujuan menguji pengaruh ROA terhadap tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE. Pada tabel 8, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara ROA dengan tingkat *social disclosure* menunjukkan nilai 0,015 dengan tingkat signifikansi 0,155 (berarti tidak signifikan, karena >0,05). Hal ini berarti bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga hipotesis 3 ini ditolak.

Hipotesis 4: Ada pengaruh ruang lingkup perusahaan pada tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE

Hipotesis 4 bertujuan untuk menguji pengaruh ruang lingkup perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE. Sesuai dengan hasil regresi tabel 8, koefisien regresi yang merupakan interaksi antara ruang lingkup perusahaan terhadap lingkungan sosial menunjukkan nilai 0,024 dengan signifikansi 0,563% (tidak signifikan karena $\text{sig} > 0,05$). Hal ini berarti bahwa ruang lingkup perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE, sehingga hipotesis 4 ini ditolak.

Hipotesis 5: Ada pengaruh tipe industri pada tingkat *social disclosure* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE

Hipotesis 5 bertujuan untuk menguji pengaruh tipe industri dalam laporan tahunan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sosial dalam perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE. Sesuai dengan hasil regresi tabel 8 koefisien regresi yang merupakan interaksi antara tipe industri terhadap lingkungan sosial menunjukkan nilai 0,014 dengan signifikansi 0,183 (tidak signifikan karena $\text{sig} > 0,05$). Hal ini berarti bahwa tipe industri tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE, sehingga hipotesis 5 ini ditolak.

Hipotesis 6: Ada perbedaan praktik pengungkapan *social disclosure* di Indonesia dan Malaysia

Hipotesis 6 ini bertujuan untuk menguji perbedaan pengungkapan sosial pada laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan KLSE. Dilihat dari masing-masing negara, ternyata tidak ada perbedaan pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun Malaysia.

Sesuai dengan hasil regresi di kedua negara, hanya ukuran perusahaan (*firm size*) saja yang bisa berpengaruh terhadap pengungkapan sosial di kedua negara tersebut.

Logistik Regresi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah profitabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Juga untuk mengetahui independen mana yang dapat diprediksi ada tidaknya *social disclosure* pada *annual repots* perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun Malaysia. Logistik regresi ini dilakukan pada data yang secara dependennya berupa variabel *dummy*. Hasil pengujian logistik regresi ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9
Analisis Logistik Regresi
Variables not in the Equation^a

Step	Variable	Score	Df	Sig.
1	Ukuran Perusahaan	8.955	1	.003
	Leverage	1.118	1	.290
	ROA	2.105	1	.147
	Ruang Lingkup Perush	1.173	1	.279
	Tipe Industri	.103	1	.748
	Komisaris Independen	2.605	1	.107
	Komite Audit	7.393	1	.007

a. Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies

Model Summary

Step	-2Log likelihood	Cox & Snell R. Square	Negelkerke R. Square
1	180.204a	.143	.193

a. Estimation terminated at iteration number 6 because Parameter estimates changed by less than .001

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig
1	3.673	8	.885

Dari pengujian statistik regresi dengan metode enter tersebut menunjukkan nilai *negelkerke R square* sebesar 0.193 sehingga menunjukkan bahwa tingkat variabilitas variabel independen adalah sebesar 19,3%. Ukuran perusahaan dan komite audit

mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosialnya dalam laporan tahunan perusahaan.

Dari analisis statistik (*logistic regression*) diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan dan proporsi komite audit merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan informasi sosial. Ukuran perusahaan (*firm size*) dan proporsi komite audit berpengaruh secara signifikan bagi perusahaan dalam menentukan apakah perusahaan akan mengungkapkan informasi sosialnya atau tidak. Sedangkan tingkat pengungkapan informasi sosial hanya ditentukan oleh variabel ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan akan semakin tinggi pengungkapan informasi sosial perusahaan. Ukuran Perusahaan (*firm size*) menentukan dilaporkannya tingkat pengungkapan informasi sosial. Hasil ini konsisten dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005). Perusahaan besar memiliki kemampuan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya termasuk pengungkapannya ke dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan besar juga berada dalam tekanan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunan untuk melegitimasi bisnisnya karena perusahaan besar melakukan banyak aktivitas, memiliki pengaruh besar kepada *stakeholder*, memiliki pemegang saham mungkin peduli dengan program sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan laporan tahunannya lebih efisien dalam mengkomunikasikan informasi tersebut kepada *stakeholder*. Dengan demikian perusahaan yang lebih besar senantiasa terdorong untuk melakukan pengungkapan sosialnya.

Selain itu proporsi komite audit sebagai variabel kontrolnya juga turut menentukan keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosialnya.

Item yang paling banyak diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan adalah pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja. Item tersebut diungkapkan sebanyak 136 dari kedua perusahaan di kedua negara. Item lain yang banyak diungkapkan adalah tenaga kerja/hubungan manajemen dan ketenagakerjaan. Sedangkan informasi sosial yang sama sekali tidak diungkapkan dalam laporan tahunan di kedua negara adalah item buruh anak-anak, tenaga kerja wajib dan yang dipaksa, anti perilaku kompetitif dan pemenuhan inti.

Uji Beda t-test

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sample. Uji beda t-test yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk untuk menguji perbedaan level pengungkapan sosial oleh perusahaan Indonesia dan perusahaan

Malaysia. Sebagai alat bantu analisa statistik, akan digunakan SPSS *release* 18 untuk perhitungan dan pengujian statistik dalam penelitian ini.

Tabel 10
Uji Beda T *Social Disclosure* Perusahaan Indonesia dan Perusahaan Malaysia
Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
	F	Sig	t	df	Sig.(2-tailed)
Sdpercentase Equal variances assumed	.074	.786	-2.997	148	.003
Equal Variances not assumed			-2.997	147	.003
				703	

Dari tabel 10 di atas terlihat bahwa nilai F hasil *Levene's test for equality of variance* pada ukuran perusahaan sebesar 0.074 dengan probabilitas 0,786 karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi *equal variance assumed*. Dari output SPSS terlihat bahwa nilai t pada *equal variance assumed* adalah -2,997 dengan probabilitas signifikansi 0,003 (*two tail*). Dapat disimpulkan bahwa kedua negara tersebut (Indonesia dan Malaysia) memiliki tingkat *social disclosure* yang sama. Jadi H_0 ini ditolak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Terdapat pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) pada tingkat *social disclosure* pada laporan tahunan dari perusahaan yang *listing* di BEI dan KLSE. Hal ini mengindikasikan perusahaan yang lebih besar memiliki kemampuan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya termasuk pengungkapannya ke dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar berada dalam tekanan untuk mengungkapkan informasi sosialnya dalam laporan tahunan untuk meligitimasi bisnisnya karena perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitasnya lebih banyak, mempunyai pemegang saham yang mungkin peduli dengan program sosialnya yang dilakukan oleh perusahaan, mempunyai pengaruh yang besar kepada *stakeholder*.
2. Tidak terdapat pengaruh *leverage* pada tingkat *social disclosure* pada laporan tahunan dari perusahaan yang *listing* di BEI dan KLSE. Hal ini mengindikasikan semakin besar leverage perusahaan maka pengungkapan sosial semakin kecil. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Jansen dan Meckling (1976) yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan mengurangi informasi sosial perusahaan yang dibuatnya untuk mengurangi sorotan dari *bondholder*.

3. Tidak terdapat pengaruh profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROA pada tingkat *social disclosure* pada laporan tahunan perusahaan yang *listing* di BEI dan KLSE. Hal ini mengindikasikan semakin baik profitabilitas perusahaan maka semakin baik pula pengungkapan sosial perusahaan, karena menurut Haniffa dan Cooke (2005) penjelasan yang paling mungkin tentang hubungan tersebut bahwa manajemen memiliki kebebasan dan fleksibilitas untuk pengungkapan program-program sosialnya ke publik, hal ini untuk menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan komunitas di sekitar perusahaan.
4. Tidak terdapat pengaruh ruang lingkup perusahaan pada tingkat *social disclosure* pada laporan tahunan perusahaan yang *listing* di BEI dan KLSE. Hal ini mengindikasikan semakin luas ruang lingkup perusahaan semakin luas pula pengungkapan informasi sosial perusahaannya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Djakman (2008) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan. Sedangkan menurut Haniffa dan Cooke (2005) yang menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di pasar modal domestik untuk negara berkembang tidak akan mengungkapkan informasi sosialnya dengan baik karena tidak adanya aturan yang pasti dan kurangnya kesadaran politik.
5. Tidak terdapat pengaruh tipe industri pada tingkat *social disclosure* pada laporan tahunan perusahaan yang *listing* di BEI dan KLSE. Hal mengindikasikan
6. Tidak ada perbedaan pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun Malaysia. Dapat dikatakan

Saran dalam penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan komponen *corporate governance* secara lebih luas lagi dan juga ditambah cakupannya, seperti adanya komite-komite lain yang ada di perusahaan dan struktur kepemilikan sehingga ini akan lebih bisa mencerminkan komponen *corporate governance*.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengganti proksi-proksi dalam variabel independennya, misalnya proksi dari total aktiva diganti dengan total penjualan.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan *framework* item-item lain selain dari *Global Reporting Initiative* untuk mengukur *social disclosure* dan juga senantiasa diperbaharui acuan *framework* tersebut sehingga akan lebih sesuai dengan keadaan saat ini.

4. Penelitian selanjutnya bisa membandingkan dengan negara lain yang masih serumpun (studi komparatif)

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C., Hill, W.Y., dan Roberts (1998). *Corporate Social reporting practices in Western Europe: Legitimizing corporate behavior. British Accounting Review*. Vol. 30.pp.1-21.
- Adams, CA, 2004. *The ethical, social & environmental reporting: performance portrayal gap*, Accounting, Auditing & Accountability Journal, volume 17, no. 5, p 731 – 757.
- Anggraini,2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang
- Biro Pusat Statistik (BPS)(2006). *'Selected indicators of Indonesia'*. Retrieved: 20 June 2006, from <http://www.bps.go.id/leaflet-mei-06-eng.pdf>.
- Belkaoui, A. dan Karpik, P. G. (1989). *Determinants of The Corporate Decision To Disclose Social Information, Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2 No. 1, pp. 36-51.
- Cooke, T. E. (1992). *The impact of size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporation, Accounting and Business Research*. Vol.22 No. 87. pp. 229-237.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI).2002. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative 2006, *'Sustainable reporting guidelines'*, GRI, Amsterdam. Retrieved: 12 October 2006, from www.global-reporting.org
- Gray, R; Kouhy R dan Lavers, S. (1995)*Methodological Themes: Constructing A Research Database of Social and Environmental Reporting By UK Companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, pp. 78-101.
- Gujarati, D.N. (2003). *Basic Econometrics. Rorth Edition*. New York: Mc. Graw-Hill.
- Hackston, David and Marcus J Milne, (1996), *"Some determinants of Social Enviromental Disclosure in New Zealand Companies Accounting, Auditing and Accountability journal*, volume 9, No.1, pp 77 – 108.
- Haniffa, RM & Cooke, TE (2005), *'The impact of culture and governance on corporate social reporting'*, *Journal of Accounting and Public Policy*, vol.24, no.5, p 391 -430.
- Ho, S.S.D and Kar S. W. (2001). *A Study of Relationship Between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure Journal of International Accounting, Auditing & Taxation* 10 (2001) pp. 139-156.
- IAS Plus 2006, *'Indonesia'*. Retrieved: 7 April 2006, from <http://www.iasplus.com/country/indonesia.htm>.

- Jensen, M.C dan Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Srtucture. Journal of Financial Economics. Vol. 3. pp. 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (2004) Pedoman Tentang Komisaris Independen. <http://www.governance-indonesia.or.id/main.htm>.
- KPMG 2005, 'KPMG international survey og corporate responsibility reporting 2005', Retrieved: 27 january 2007, from.
- Loftus, JA & Purcell, JA 2006, 'Corporate Social Responsibility-concepts, approaches to regulation and public sector application of the GR', Financial Reportinf, Regulation and Governance, vol. 5, no. 1, in press.
- Suhardjanto D, Tower G and Brown A (2007). *Generating a Uniquely Indonesian Enviromental Reporting Disclosure Index Using Press Coverage as an Important Proxy of Stakeholder Demand*, Asian Academic Accounting Assosiation, Yogyakarta 19-22 August 2007.
- Suhardjanto D, (2008), *Enviromental Reporting Practies: An Evidence from Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 8. No. 1, 33-46.

**Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap
Kualitas Audit dan Manajemen Laba
(Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)**

TITI SUHARTATI *
Politeknik Negeri Jakarta

Abstract: *This research examines the influence of the effectiveness of board and audit committee to auditor choice (audit quality) and earnings management. The model of accruals chosen is based on the step of Siregar (2005) and Purwanti (2011) while Gul and Jaggi model (2009) has been chosen for earnings management measurement. This study uses secondary data taken from manufacture companies quoted in OSIRIS, Reuters, ICMD, and IDX database for 2009 period. Using purposive sampling method, 76 manufacture companies are quoted from IDX. Regression model is used to test the hypothesis with 1%, 5% and 10% level of significance. The result of hypothesis test shows that the effectiveness of board and audit committee is positively correlated with earnings management while audit quality is not. It means that fraud could be minimized by the effectiveness of board and audit committee. The other result shows that the effectiveness of board and audit committee is positively correlated with audit quality, and that means that board and audit committee have a role in choosing auditor.*

Keywords: *board, effectiveness, audit, earnings management*

* Author can be contacted at: b_titis@yahoo.com

1. Introduction

Dari sudut teori keagenan, rendahnya kualitas informasi pada pelaporan keuangan timbul sebagai dampak problem keagenan, yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen (Beneish, 2001). Menurut teori keagenan, untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan melaksanakan *good corporate governance (GCG)* yang merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor untuk mengendalikan tindakan manajer (Dallas, 2004). Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal, yaitu: struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris yang salah satu aspeknya adalah komposisi dewan komisaris. Sedangkan mekanisme eksternal adalah pengendalian oleh pasar, kepemilikan institutional, serta audit oleh auditor eksternal (Babic, 2001). Sedangkan menurut Veronica dan Bachtiar (2004), beberapa mekanisme CG antara lain diwujudkan dengan keberadaan dewan direksi, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris (*board*) berlaku sebagai penasihat (*advisor*) bagi para eksekutif dan manajer perusahaan sangat berperan dalam mengurangi problem keagenan dan menjembatani pengembangan hubungan perusahaan dengan pihak eksternal (Fama & Jensen, 1983).

Tindakan manajemen laba (*earnings management*) yang timbul sebagai akibat adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World Com dan banyak perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett et al., 2006). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk yang melibatkan pelaporan keuangan berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 2005).

Penelitian ini termotivasi atas hasil penelitian Herwiyanti dan Baridwan (2008) yang menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya melakukan manajemen laba; perusahaan yang paling banyak melakukan manajemen laba bergerak dalam bidang industri manufaktur dan industry real estate dan property; dan investor pada umumnya tidak bisa mendeteksi adanya praktik manajemen laba oleh perusahaan. Penelitian mengenai hubungan antara dewan komisaris (*board*) dan manajemen laba telah banyak dilakukan (Beasley,1996; Yermarck,1996; Chtourou et al.,2001; Klein, 2002; Park and Shin,2004; Peasnell et al. 2005; Ebrahim,2007), sedangkan penelitian di Indonesia oleh Widyaningdyah (2001), Midiastuti & Machfoedz (2003), Kusumaning (2004), Darmawati (2003), Siregar dan Utama (2006) dan Siregar (2005). Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan yang beragam

mengenai pengaruh dewan komisaris (komite audit dan komisaris independen) terhadap manajemen laba.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) juga dapat digunakan sebagai *monitoring* terhadap tindakan manajemen yang oportunistik dalam melaporkan kinerja perusahaan. Jasa audit merupakan alat *monitoring* terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer dan antara pemegang saham dengan jumlah kepemilikan yang berbeda serta dapat mengurangi asimetris informasi antara manajer dengan *stakeholder* perusahaan dengan memperbolehkan pihak luar untuk memeriksa validitas laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976).

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor memiliki kualitas yang berbeda. Ardiati (2005) menyatakan bahwa auditing berkualitas tinggi (*high-quality auditing*) dapat bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun apabila pelaporan yang salah ini terdeteksi dan terungkap. Beberapa penelitian terkait kualitas audit dan manajemen laba dilakukan Meutia (2004) dan Nuraini dan Sumarno (2007) yang menyatakan bahwa tindakan manajemen laba terhadap hasil audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* lebih rendah daripada KAP *Non Big Four*. Sedangkan Fan dan Wong (2001) yang melakukan penelitian di Asia Timur menyatakan hasil kontradiktif bahwa kualitas auditor tidak mempengaruhi manajemen laba.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengaruh dewan komisaris (komite audit dan komisaris independen) terhadap manajemen laba, termasuk pemilihan auditor yang berkualitas dengan tujuan untuk mengurangi manajemen laba.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris (*board*) dan efektivitas komite audit terhadap kualitas audit dan manajemen laba pada perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009.

Kontribusi dari penelitian ini adalah pertama, mengembangkan penelitian sebelumnya terkait dewan komisaris (*board*) dan manajemen laba dengan menambahkan variabel mediasi kualitas audit; kedua, menghasilkan bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas dewan komisaris terhadap kualitas audit; ketiga, menggunakan beberapa alternatif ukuran dalam mengestimasi manajemen laba (Gul et al, 2009; Kothari, 2005; Yoon & Miller, 2002) untuk memperoleh estimasi manajemen laba yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia.

2. Theoretical Framework and Hypothesis Development

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan *Corporate Governance*

Perspektif teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance (CG)*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Konflik yang terjadi antara agen dan pemilik menimbulkan *agency problem*. Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Selain itu, Fama (1980) menyatakan bahwa dewan komisaris (*board*) merupakan mekanisme pengendalian utama yang memonitor manajemen. Dimana terdapat tiga karakteristik yang mempengaruhi monitoring yaitu ukuran, komposisi dan struktur kepemimpinan *board* (Jensen, 1993).

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Disisi lain, manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Ketidakeimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) yang dapat menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Richardson, 1998).

CG dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk meminimalisir terjadinya manajemen laba yang dapat merugikan pihak lain. Penelitian mengenai efektifitas *CG* dalam melindungi investor di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain: Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), Sugiarta (2004), Wilopo (2004), Boediono (2005), Veronica dan Utama (2005).

Selain itu *CG* di Indonesia juga terbukti masih lemah berdasarkan penelitian McGee (2008) yang meneliti tentang perbandingan *CG* di Asia. Hasilnya menyatakan bahwa *CG* di Indonesia menempati peringkat kedua terbawah sebelum Vietnam yang menunjukkan bahwa *CG* di Indonesia masih tergolong buruk dibandingkan negara lain di Asia. *CG* juga berkaitan erat dengan kepercayaan, baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Dengan GCG maka perlindungan yang efektif dapat diberikan kepada para pemegang saham dan pihak kreditur terkait perolehan kembali investasi dengan wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus menyadari bahwa sistem *CG* yang baik sangat berarti bagi kepentingan pemegang saham, investor dan *stakeholders* perusahaan secara keseluruhan. Sejalan dengan Chandra dan Sarnianto (2005) yang menjelaskan bahwa

penerapan *GCG* diyakini mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan.

2.2. Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Para manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi. Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola laba. Perilaku manajemen yang mendasari timbulnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* manajer dan *efficient contracting*. Sebagai perilaku *opportunistic*, manajer memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi dan hutang dan *political cost* (Scott, 2000). Perilaku oportunistik ini direfleksikan dengan melakukan rekayasa keuangan dengan menerapkan *income increasing*, *income decreasing* atau *income smoothing*. Sedangkan perilaku *efficient contracting* yaitu dilakukan dengan meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat. Perilaku manajemen yang oportunistik dikenal dengan istilah manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan pertimbangan (*judgement*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy & Wahlen, 1999). Lebih lanjut, Gao dan Shrieves (2002), Bergstresses dan Philippon (2004), Cohen *et al.*, (2004), Cheng dan Warfield (2005) dalam Cornett *et al.*, (2006) menemukan bukti bahwa tindakan manajemen laba akan lebih sering terjadi di perusahaan dimana kompensasi untuk manajemen puncak berhubungan dengan erat dengan nilai saham secara umum.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu proses pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh para manajer (eksekutif) yang secara sengaja mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu sesuai batasan standar akuntansi keuangan.

Penggunaan akrual dalam mendeteksi manajemen laba dalam laporan keuangan merupakan suatu langkah yang selama ini telah digunakan dan dipercaya keakuratannya dalam melakukan deteksi. Pendeteksian manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual* atau *abnormal accrual* dapat diidentifikasi dengan menggunakan beberapa model ekspektasi akrual seperti model Jones (1991), Modified Jones (1995),

Kaszniak (1999), DeFond (2001), Yoon & Miller (2002), Kothari et al.(2005), Gul & Jaggi (2009).

2.3. Hypothesis Development

2.3.1. Efektivitas Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Dewan komisaris yang terdiri dari komisaris wakil dari pemegang saham, komisaris independen dan komite-komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Fungsi dewan komisaris, antara lain; melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikan direksi untuk sementara bila diperlukan (Warsono *et al.*, 2009). Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al., 2001) atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite-komite yang bertanggung jawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek pengelolaan korporasi yang baik (CGC) yang diterapkan perusahaan, bilamana perlu melakukan penyesuaian.

Dewan komisaris memiliki peran dalam pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian terdahulu memperlihatkan beberapa karakteristik dewan komisaris untuk berperan secara efektif dalam mengurangi terjadinya praktik manajemen laba, diantaranya: ukuran (*size*), independensi, aktivitas, pengalaman dan pengetahuan mengenai perusahaan dan laporan keuangan (Peasnell, 2000; Chtourou et al., 2001; Klein, 2002; Xie et al., 2003; Dhaliwal, 2007; Hermawan, 2009).

Jensen (1993) mengusulkan bahwa dewan komisaris (*board*) akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya apabila jumlahnya tidak melebihi tujuh atau delapan orang. Beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang banyak lebih efektif dalam pencapaian kinerja yang lebih baik (Carson, 2002; Chen, *et al.*, 2009; Pfeffer and Salancik, 2003). Beasley (1996), Yermarck (1996), dan Jensen (1993) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini kontradiktif dengan hasil penelitian yang dilakukan Chtourou et al. (2001) dan Klein (2002) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan manajemen laba. Penelitian di Indonesia oleh Kusumawati dan Riyanto (2005) menyatakan bahwa hubungan antara jumlah anggota dewan komisaris dengan nilai perusahaan didukung

oleh perspektif fungsi *service* dan kontrol yang diberikan dewan komisaris. Penelitian mereka menemukan bahwa investor bersedia memberikan premium lebih terhadap perusahaan karena *service* dan kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi manajemen laba. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Chtourou *et al.* (2001), Klein (2002), dan Midiastuty dan Machfoedz (2003).

Penelitian Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap *return* perusahaan

Xie *et al.* (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan.

Jika fungsi independensi dewan direksi cenderung lemah, maka ada kecenderungan terjadinya *moral hazard* yang dilakukan oleh para direktur perusahaan untuk kepentingannya melalui pemilikan perkiraan-perkiraan akrual yang berdampak pada manajemen laba dan konsisten dengan Wedari (2004) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *discretionary accruals*. Perusahaan yang menyelenggarakan system *corporate governance* diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang oportunistik.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan adalah **H1a:** Efektivitas dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.2. Efektivitas Komite Audit dan Manajemen Laba

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia diatur berdasarkan SK Bapepam LK No. Kep. 29/PM/2004, yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. SK tersebut sudah diubah menjadi Peraturan Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Per 1 Januari 2013, regulator

yang menerbitkan peraturan bagi perusahaan publik bukan lagi Bapepam-LK tapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan tersebut antara lain mencakup struktur, keanggotaan, tugas dan tanggung jawab komite audit. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang bersal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Efektivitas komite audit sangat penting dalam membantu dewan komisaris terkait kredibilitas penyusunan laporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas komite audit, mencakup: independensi, jumlah anggota yang memadai, aktivitas, kompetensi dalam bidang keuangan (Zou & Chen, 2004; Anderson et al., 2006, Lin et al., 2006; Dhaliwal et al., 2007, Hermawan, 2009). Dengan sejumlah karakteristik tersebut, komite audit diharapkan dapat memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan dan berperan secara efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian laporan keuangan yang material (Scrabrough et al, 1998 dan Raghunandan et al., 2001).

Klein (2002b) yang menemukan bahwa komite audit independen tidak mengurangi manajemen laba para perusahaan-perusahaan di US. Sementara itu, Xie et al. (2003) berargumen bahwa manajemen laba lebih sedikit kemungkinannya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki komite audit aktif dan memiliki latar belakang korporasi atau *investment banking*. Sejalan dengan, Bédard et al. (2004) yang menyatakan bahwa manajemen laba yang agresif berkurang dalam proporsi komite audit yang memiliki keahlian dan indikator independensi. Sedangkan penelitian di luar US, (Beasley, 1996; Peasnell et al. 2005) menemukan tidak ada bukti bahwa keberadaan komite audit secara langsung mempengaruhi peningkatan atau penurunan manipulasi laba pada perusahaan-perusahaan di Inggris.

Carcello *et al.* (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba.

Sedang penelitian di Indonesia (Siregar dan Utama, 2006) menunjukkan kecenderungan bahwa keberadaan komite audit ternyata tidak berpengaruh terhadap jenis manajemen laba perusahaan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Wedari (2004) dan Parulian (2004) yang menyatakan bahwa dikresionari akrual (proksi manajemen laba) lebih rendah pada

perusahaan-perusahaan yang memiliki komite audit dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Berdasarkan penelitian terdahulu maka masih terjadi perbedaan mengenai pengaruh efektivitas komite audit terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis yang dikembangkan adalah

H1b: Efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.3. Dewan Komisaris dan Kualitas Audit

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang handal (*reliable*). Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al., 2001)

Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistim pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan pengesahan (*ratification*). Fama dan Jensen, (1983) dalam Kusumaning (2004), menyatakan bahwa tujuan dari aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris eksternal adalah untuk memberikan signal kepada pasar mengenai reputasi aktivitas pengawasan yang efektif di dalam perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al., 2001) jadi, semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan. Meutia (2004) menyatakan bahwa kualitas audit bukanlah merupakan suatu yang dapat langsung diamati. Persepsi terhadap kualitas audit berkaitan dengan reputasi auditor. Dalam hal ini reputasi baik dari perusahaan audit merupakan gambaran yang paling penting. Auditor diharapkan dapat membatasi praktek manajemen laba serta membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan

keuangan. Sehingga reputasi auditor merupakan variabel penting yang mempengaruhi manajemen laba.

Penelitian terkait efektivitas dewan komisaris dengan pemilihan auditor belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia, tetapi penelitian mengenai kualitas audit Niemi (2002) menyatakan bahwa kualitas audit dapat diukur dengan melihat reputasi auditor, pengalaman kerja, jumlah klien, total pendapatan KAP. Terkait dengan pemilihan KAP, dewan komisaris yang membentuk komite audit dalam rangka membantu tugas dan fungsinya terkait pelaporan keuangan, maka seyogyanya bertanggung jawab atas pemilihan auditor eksternal (kantor akuntan publik) yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Berdasarkan teori dan argumen tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah

H2a: Efektivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.4. Efektivitas Komite Audit dan Kualitas Audit

Salah satu tanggung jawab komite audit adalah menilai laporan audit dari auditor eksternal. Kedudukan komite audit yang merupakan bagian dari dewan komisaris dan dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) dan Standar Auditing No.380 menjelaskan aturan mengenai komunikasi antara akuntan publik (auditor eksternal) dengan komite audit. Tanggung jawab komite audit meliputi: memilih auditor independen, mengawasi proses audit dan memastikan kualitas laporan keuangan. Komite audit melakukan fungsinya dalam hal pengawasan terhadap laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (Bradbury et al. 2004). Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson et al. 2003). Hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit yang efektif dan independen meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan Raghunandan et al. (2001) meneliti hubungan antara komposisi komite dan interaksi komite terhadap auditor internal. Hasil penelitian adalah komite yang beranggotakan hanya komisaris independen dan salah satu memiliki latar belakang keuangan dan akuntansi cenderung untuk (1) lebih sering bertemu dengan auditor internal, (2) mempunyai akses pribadi dengan auditor internal, (3) mereview proposal internal audit dan hasil dari internal

audit. Turkan et al. (2008) mengemukakan bahwa pemilihan auditor dimotivasi oleh tiga sumber, yaitu: lingkungan audit, karakteristik perusahaan audit dan klien.

Belum ditemukan penelitian mengenai hubungan komite audit dan kualitas auditor (pemilihan auditor) di Indonesia, tetapi Herusetya dan Puspita (2008) melakukan pengujian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan auditor pada perusahaan publik di Indonesia periode 2004-2007 yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *Big Four* dan *Non Big Four*. Hasilnya keputusan pemilihan auditor atau KAP cenderung lebih ditentukan oleh faktor-faktor karakteristik perusahaan seperti, kepemilikan asing dalam perusahaan, jenis sektor industry, dan ukuran (*size*) perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, salah satu tanggung jawab komite audit dalam memilih auditor independen maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H2b: Efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3.5. Kualitas Audit dan Manajemen Laba

Salah satu cara untuk mengukur kualitas hasil pekerjaan auditor adalah melalui kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Bedard dan Michelene (1993) ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah keputusan secara umum, yaitu *outcome oriented* dan *process oriented*. Bagi pendekatan yang berorientasi hasil, Francis (2004) mengukur kualitas audit melalui hasil audit. Untuk pendekatan yang berorientasi proses, O'Keefe *et al.* (1994) dan Li Dang (2004) berpendapat bahwa dalam konteks Amerika Serikat, kualitas keputusan diukur dengan: (i) tingkat kepatuhan auditor terhadap *General Acceptance on Auditing Standards* (GAAS); (ii) tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu. Terkait dengan motif oportunistik dari manajer, kualitas audit seringkali dikaitkan dengan kualitas laba yang dilaporkan. Jika kualitas audit yang dihasilkan rendah, maka laba yang disajikan dalam laporan keuangan yang diaudit akan cenderung mengandung akun-akun yang tidak terlalu tepat menggambarkan hasil operasi serta kondisi keuangan perusahaan (Chen *et al.*, 2004).

Terdapat sejumlah studi yang berusaha menghubungkan antara kualitas dengan masa penugasan audit (DeAngelo, 1981; Bazerman *et al.* 1997; Dopuch *et al.* 2003; Carey dan Simnett, 2006) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan, kurangnya inovasi, kurang kuatnya prosedur audit dan munculnya percaya diri berlebihan terhadap klien cenderung muncul pada saat auditor mempunyai hubungan yang lama dengan klien.

Kualitas audit sering dikaitkan dengan skala auditor (Firth & Liao Tan, 1998), yang dipandang mempunyai kelebihan dalam empat hal, yaitu: (i) besarnya jumlah dan ragam

klien yang ditangani KAP; (ii) banyaknya ragam jasa yang ditawarkan; (iii) luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional; dan (iv) banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, De Angelo (1981), Watts dan Zimmerman (1986) berpendapat bahwa ukuran auditor akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Diperkirakan bahwa KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Keberadaan KAP besar diharapkan bisa memperlihatkan hubungan baik positif maupun negatif dengan manajemen laba. (DeAngelo, 1981; Jensen, 1993; Dechow et al., 1996; Francis & Wang, 2008). Studi lain (Krishnan, 2003; Balsam et al., 2003; Behn et al., 2008; dan Kwon et al., 2007) telah menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi praktik manajemen laba adalah melalui auditor eksternal yang berkualitas (Bauwhede & Willekens 2003). Penelitian di Indonesia oleh Meutia (2004) menguji pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen laba, dan hasilnya menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba.

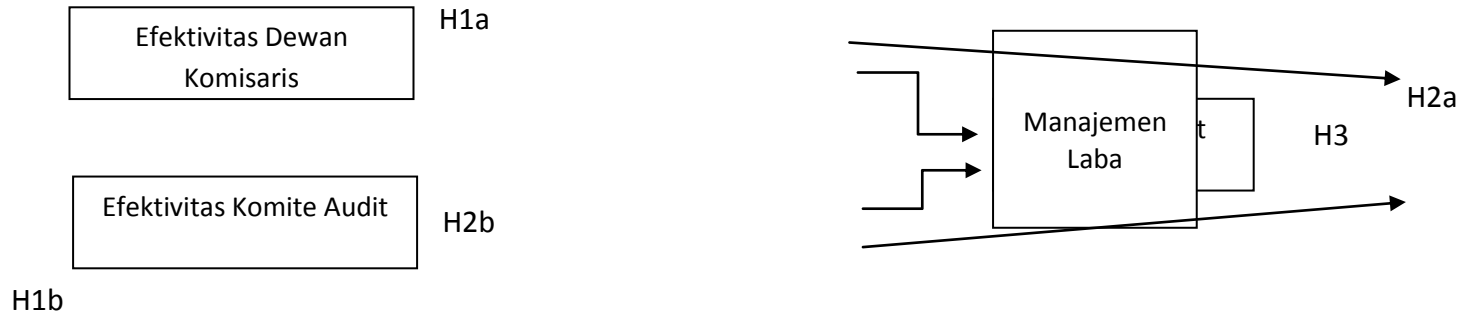
Berdasarkan penelitian empiris terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H3: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4. Rerangka Model Penelitian

Berdasarkan kepada rerangka teoritis, penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis yang disampaikan maka disusun rerangka model penelitian pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Rerangka Model Penelitian



3. Research Method

3.1. Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan unit analisis perusahaan dengan populasi perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempublikasikan laporan keuangan auditan dan laporan tahunan periode 31 Desember tahun 2009 secara konsisten dan lengkap.
- 2) Perusahaan sampel memiliki komponen yang diperlukan sebagai variabel penelitian.

Data penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Auditan dan Laporan Tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.jsx.co.id). Data keuangan lainnya diperoleh dari database OSIRIS tahun 2008-2009, data Reuteurs tahun 2008-2010 dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2009-2010. Hasil pemilihan sampel penelitian diperoleh 76 perusahaan dari total 128 perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap sesuai variabel penelitian. Daftar Perusahaan sampel disajikan pada Lampiran 1.

3.2. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 model untuk menguji hubungan efektivitas dewan komisaris, kualitas audit dan manajemen laba.

Model untuk menguji hipotesis 1a, 1b dan 3:

$$EM_i = \alpha_0 + \alpha_1 Board_i + \alpha_2 Comdit_i + \alpha_3 QAudit_i + \alpha_4 LSize_i + \alpha_6 Grow_i + \alpha_7 Lev_i + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Model untuk menguji hipotesis 2a dan 2b:

$$QAudit_i = \alpha_0 + \alpha_1 Board_i + \alpha_2 Comdit_i + \alpha_3 LSize_i + \alpha_4 Grow_i + \alpha_5 Lev_i + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Board* = Efektivitas dewan komisaris (*checklist*-Hermawan, 2009)
- Comdit* = Efektivitas komite audit (*checklist*-Hermawan, 2009)
- QAudit* = Kualitas audit (KAP *Big Four* dan *Non Big Four*)
- LSize* = Ukuran perusahaan (*log Asset*)
- Grow* = Pertumbuhan perusahaan (*growth*)
- Lev* = Tingkat hutang (*leverage*)

3.3. Definisi Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Manajemen Laba

Penelitian ini menggunakan besarnya *discretionary accruals* sebagai ukuran variabel manajemen laba (*earnings management/EM*). Adapun model yang digunakan adalah 3 model yaitu model pertama Yoon & Miller (2002) berikut:

$$TA_{it}/BTA_{it} = \beta_0 + \beta_1(\Delta REV_{it}-\Delta REC_{it})/BTA_{it} + \beta_2(\Delta EXP_{it}-\Delta PAY_{it})/ BTA_{it} + \beta_3(NCASH_{it-1} \times GPPE_{it})/ BTA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan: *TAit* adalah Total Akruar yang merupakan selisih antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas opsional; ΔREV_{it} adalah perubahan pendapatan; ΔREC_{it} adalah perubahan piutang; ΔEXP_{it} adalah perubahan beban operasi (*excluding noncash expenses*); ΔPAY_{it} adalah perubahan hutang lancar; $NCASH_{it-1}$ adalah beban-beban non kas seperti depresiasi pada periode sebelumnya; *GPPEit* adalah *gross property, plant, and equipment*; *BTAit* adalah total aset awal periode.

Model kedua berdasarkan studi Kothari *et al.*, (2005)

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1(\Delta REV_{it}-\Delta REC_{it})/ASSET_{it-1} + \beta_2 PPE_{it}/ ASSET_{it-1} + \beta_3 ROA_{it} /ASSET_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan: *TA_{it}* adalah selisih antara $\Delta NCA_{it}-\Delta CL_{it}$ (perubahan dalam aset lancar non kas - perubahan hutang lancar); *ASSET_{it-1}* adalah total aset periode sebelumnya (*lag Total Asset*); ΔREV_{it} adalah perubahan pendapatan; ΔAR_{it} adalah perubahan piutang; ΔPPE_{it} adalah perubahan property, plant, and equipment dan *ROA (Return on Asset)*

Model ketiga berdasarkan studi Gul *et al.*, (2009)

$$ACC_t = \alpha_1 + \alpha_2CFO_t + \alpha_3CFO_{t-1} + \alpha_4CFO_{t+1} + \alpha_5 \Delta REV_t + \alpha_6 \Delta PPE_t + \alpha_7ROA_{t-1} + \alpha_8\Delta CFO_t + \alpha_9 Dum\Delta CFO_t + \alpha_{10}\Delta CFO_t * Dum\Delta CFO + \varepsilon_t$$

Keterangan: ACC_t adalah selisih antara $EBIT_t - CFO_t$; CFO_t , CFO_{t-1} , CFO_{t+1} = arus kas dari aktivitas operasi pada periode sebelum, saat ini dan mendatang; ΔREV_t adalah perubahan pendapatan; ΔPPE_t adalah perubahan property, plant, and equipment; ROA_{t-1} adalah Return on Asset pada periode sebelumnya; ΔCFO_t adalah perubahan CFO periode saat ini; $Dum \Delta CFO_t$ adalah Dummy variable 1= perubahan negatif pada CFO dan 0 lainnya. Semua variabel dideflasi dengan rata-rata asset (*average*).

3.3.2. Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

Untuk mengetahui efektivitas dewan komisaris, penelitian ini mengadopsi daftar pernyataan (*checklist*) yang dikembangkan oleh Hermawan (2009) yang mencakup: independensi, aktivitas, jumlah anggota, keahlian dan kompetensi yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Daftar pernyataan ini terdiri dari 17 pernyataan dengan menggunakan tiga kategori, yaitu kategori baik (dinilai 3), kategori sedang (dinilai 2) dan kategori buruk (dinilai 1). Terdapat 6 (enam) pernyataan terkait independensi (*board independence*); 6 (enam) pernyataan terkait aktivitas (*board activities*); 1 (satu) pernyataan terkait ukuran (*board size*) dan 4 (empat) pernyataan terkait keahlian dan kompetensi (*board expertise and competence*).

Sedangkan untuk mengetahui efektivitas komite audit, penelitian mengadopsi daftar pernyataan (*checklist*) yang dikembangkan oleh Hermawan (2009) yang mencakup: aktivitas, jumlah anggota, keahlian dan kompetensi. Daftar pernyataan ini terdiri dari 11 pernyataan dengan menggunakan tiga kategori, yaitu kategori baik (dinilai 3), kategori sedang (dinilai 2) dan kategori buruk (dinilai 1). Terdapat 8 (delapan) pernyataan terkait aktivitas (*board activities*); 1 (satu) pernyataan terkait ukuran (*board size*) dan 2 (dua) pernyataan terkait keahlian dan kompetensi (*board expertise and competence*).

3.3.3. Kualitas Audit

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan ukuran KAP sebagai proksi dari kualitas audit (DeFond & Jiambalvo, 1994; Becker et al., 1998; Francis et al., 1999; Gull et al., 2000, Sanjaya, 2008) dengan asumsi semakin besar ukuran KAP, maka semakin baik kualitas auditnya. Untuk itu, pengukuran variabel QAUDIT ini menggunakan variabel *dummy* untuk perusahaan yang diaudit KAP besar (*Big Four*) = 1, atau 0 untuk lainnya. KAP *Big Four* untuk periode 2009 di Indonesia adalah: KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC); KAP

Osman Bing Satrio (Deloitte Touche Tohmatsu); KAP Purwantono, Sarwoko & Sanjaya (Ernst & Young); KAP Siddharta dan Widjaya (KPMG)

3.3.4. Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan (*LSize*), pertumbuhan perusahaan (*Grow*) dan kewajiban (*Lev*), dengan operasionalisasi sebagai berikut: ukuran perusahaan (*LSize*) juga seringkali mengarah pada biaya politis, jika sebuah perusahaan besar juga memiliki profitabilitas tinggi, maka biaya politisnya juga akan semakin besar (Watts & Zimmerman, 1986, Chung et al., 2005). Untuk mengantisipasi kemungkinan motivasi manajemen laba untuk menghindari biaya politis (*political cost hypothesis*), penelitian ini ukuran perusahaan diestimasi dengan menggunakan *log total aset* (Mitton, 2002; Black et al., 2005). Supaya perusahaan dinilai memiliki prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan, maka dorongan untuk melakukan manajemen laba pun diduga terjadi (Purwanti, 2011). Pertumbuhan perusahaan menggunakan pertumbuhan dalam penjualan (*Growth*) yang dihitung dengan rumus: selisih antara penjualan periode berjalan dikurangi periode sebelumnya dibagi dengan penjualan periode sebelumnya. Menurut Sulistyanto (2008) dalam hipotesis *debt covenant* dinyatakan bahwa motivasi *debt covenant* disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial. Sehingga, perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi, proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi asetnya cenderung melakukan manajemen laba. Penelitian ini memasukkan *leverage* perusahaan sebagai variabel kontrol (Lobo & Zou, 2001; Klein, 2002). Variabel kewajiban (*Lev*) dihitung berdasarkan rasio antara total kewajiban terhadap total aset.

3.4. Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik, hal ini dimaksudkan agar model regresi dapat menghasilkan penduga (*estimator*) yang tidak bias (*BLUE*). Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2009), terdiri dari uji normalitas (analisis grafik), multikolinearitas (analisis matriks korelasi), heterokedastisitas (uji *white*) dan autokorelasi (*Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*)

Selanjutnya, dilakukan pengujian regresi atas model penelitian menggunakan *Least Square* dengan menggunakan metode regresi berganda (persamaan 1) dan metode regresi logistik (persamaan 2) menggunakan software Eviews 7.

4. Hasil dan Analisis Penelitian

4.1. Analisis Penentuan Model Manajemen Laba

Penelitian ini menggunakan tiga model untuk ukuran manajemen laba, yaitu model Yoon & Miller (2002) dari hasil penelitian ukuran manajemen laba di Korea yang asumsinya lebih sesuai untuk kawasan Asia. Model kedua yaitu Kothari (2005) yang sudah memasukkan tambahan variabel ROA yang dianggap mencerminkan diskresi akrual. Model ketiga, yaitu Gul & Jaggi (2009) yang menggabungkan model Jones dengan Kothari dengan menambahkan variabel *CFO* dan *Lag ROA*. Hasil regresi ketiga model tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1- 4.3 (Lampiran 2). Evaluasi hasil regresi dari masing-masing model tersebut disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Evaluasi Model Manajemen Laba

Model	<i>Adjusted R- square</i>	<i>R- square</i>
Yoon (2002)	0.000767	0.039263
Kothari (2005)	0.099449	0.135471
Gull & Jaggi (2009)	0.498364	0.55856

Sumber: data diolah

Dari hasil evaluasi maka hasil secara empiris membuktikan bahwa model Gul & Jaggi (2009) memiliki nilai *adjusted R-squared* lebih tinggi dibandingkan model lainnya sebesar 49,84% dengan nilai *R-squared* sebesar 55,86%. Dengan demikian model Gul & Jaggi secara empiris memperlihatkan bahwa variabel tambahan arus kas hasil aktivitas operasi (*CFO*) dan ROA periode sebelumnya turut mempengaruhi total akrual. Penentuan model akrual yang digunakan mengikuti langkah pada penelitian Siregar (2005) dan Purwanti (2011). Jadi penelitian ini akan menggunakan hasil perhitungan akrual dari model Gul & Jaggi (2009) menjadi ukuran manajemen laba yang digunakan dalam menguji hipotesis persamaan (1). Lebih lengkapnya hasil regresi masing-masing model akan disajikan pada Lampiran 4.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian ini disajikan deskripsi statistik persamaan (1) dan persamaan (2) pada Tabel 4.5 (Lampiran 3) untuk memberikan gambaran karakteristik variabel yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan data berdasarkan Tabel 4.5 sebagai berikut:

- Variabel dependen, yaitu manajemen laba yang diukur dengan akrual diskresioner Gul & Jaggi (2009) memperlihatkan rata-rata akrual yang kecil, yaitu 0,000263. Hal ini menunjukkan bahwa pada secara keseluruhan sampel perusahaan melakukan manajemen laba yang bersifat *income increasing* tetapi relatif kecil. Bila dilihat nilai tengah (median) memperlihatkan nilai positif berarti manajemen melakukan *income increasing* pada nilai tengah sebesar 0,009427.

- Variabel *Board*, yaitu efektivitas dewan komisaris memperlihatkan bahwa nilai rata-rata efektivitas dewan komisaris sebesar 0,790248 dengan median 0,784314. Tingkat efektivitas dewan komisaris bervariasi 47,06 % (terendah) sampai yang tertinggi 96,08%. Kondisi tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa perusahaan sampel memiliki efektivitas dewan komisaris yang relatif baik.
- Variabel *Comdit*, yaitu efektivitas komite audit memperlihatkan bahwa nilai rata-rata efektivitas komite audit sebesar 0,876396 dan median 0,878788. Tingkat efektivitas komite audit bervariasi 78,79 % (terendah) sampai yang tertinggi 96,96%. Kondisi tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa perusahaan sampel memiliki efektivitas komite audit yang relatif baik.
- Variabel *QAudit*, yaitu kualitas audit yang diproksikan dengan pemilihan auditor menunjukkan bahwa sebanyak 55, 26% sampel perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four*. Sedangkan sisanya diaudit oleh KAP lainnya.
- Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu: ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan tingkat hutang. Variabel ukuran perusahaan memperlihatkan rata-rata ukuran perusahaan 9, 24 dan median 9,19. Sedangkan nilai tertinggi adalah 10,94 dan terendah 7,68 menunjukkan bahwa rata-rata sampel adalah perusahaan besar dengan nilai aset yang relatif tinggi.
- Variabel *Grow* yaitu pertumbuhan perusahaan memperlihatkan rata-rata peluang pertumbuhan perusahaan relatif baik dengan 0,320 dan nilai tengah 0,402. Nilai pertumbuhan bervariasi dari -0,275 (terendah) dan tertinggi 0,672.
- Variabel *Lev* yaitu tingkat hutang memperlihatkan rata-rata tingkat hutang perusahaan sampel sebesar 44,38% dan nilai tengah 50,93%. Menunjukkan bahwa hampir 50% aset perusahaan didanai oleh hutang dengan nilai terendah adalah 6% dan tertinggi 71%.

4.3. Analisis Korelasi

Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antar variabel yang digunakan dalam model penelitian, maka dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson yang disajikan pada Tabel 4.6. (Lampiran 4).

Korelasi yang terjadi antara variabel-variabel pada model 1 sebagai berikut:

- Variabel *Board* dan EM berhubungan cukup kuat dan signifikan ($p_value < 10\%$) sebesar 0.0556. Variabel *Comdit* dan EM berhubungan cukup kuat dan signifikan ($p_value < 10\%$) sebesar 0.0635.

- Variabel Comdit dan Board berhubungan kuat dan signifikan ($p_value < 5\%$) sebesar 0.0438. Variabel QAudit dan Board berhubungan kuat dan signifikan ($p_value < 5\%$) sebesar 0.0390.
- Variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berhubungan cukup kuat dan signifikan dengan variabel utama. Sedangkan tingkat hutang sama sekali tidak menunjukkan hubungan dengan variabel utama penelitian, hanya berhubungan dengan variabel control lainnya.

4.4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi atas model penelitian, maka model diteliti terlebih dahulu supaya memenuhi kaidah *BLUE (Best Linear Unbiased Estimate)*, yaitu: melakukan uji normalitas dengan melakukan analisis terhadap hasil statistik deskriptif. Menurut Winarno (2009) nilai probabilitas *Jarque-Bera* yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis nol distribusi normal. Angka *Jarque-Bera* yang merupakan bagian dari Tabel 4.5 statistik deskriptif menunjukkan angka yang semuanya melebihi 0,5 sehingga tidak dapat menolak H_0 bahwa data berdistribusi normal. Uji autokorelasi menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* yang hasilnya memperlihatkan bahwa model tidak mengandung autokorelasi ditunjukkan dengan hasil probability *Chi-Square* 79.32% (melebihi 5%). Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *White* untuk menguji heteroskedastisitas pada model. Hasilnya menunjukkan bahwa model bebas heteroskedastisitas dengan probability *Chi-square* 25.24% (melebihi 5%). Uji Multikolinearitas, karena sebagian besar data korelasi tidak melebihi nilai 0.8 maka diasumsikan tidak terjadi multikolinearitas pada data penelitian. Menurut Gujarati (2003) data *cross section* akan mengalami multikolinearitas maka masalah multikolinearitas dapat diabaikan bila tujuan penelitian hanya untuk tujuan prediksi.

4.6. Analisis Hasil Regresi

4.6.1. Pengujian Hipotesis dengan Model 1

Penelitian ini menggunakan model 1 untuk menguji hipotesis 1a, 1b dan 3 dengan hasil regresi yang disajikan pada Tabel 4.7. (Lampiran 5)

Hasil regresi model 1 yang menguji hipotesis 1a, 1b dan 3 menunjukkan bahwa:

- Hasil pengujian atas variabel *Board* menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris berhubungan secara negatif dan signifikan ($p_value < 10\%$, *two tail*) dengan EM (manajemen laba). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris dapat mengurangi timbulnya manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan temuan Chtourou et al,

(2001), Klein (2002), Wedari (2004), Wilopo (2004), Nasution dan Setiawan (2007). Hasil ini sesuai dengan ekspektasi awal dan mendukung Hipotesis 1a.

- Hasil pengujian atas variabel Comdit menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berhubungan secara negatif dan signifikan ($p_value < 10\%$) dengan EM (manajemen laba). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit dapat mengurangi timbulnya manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan temuan Chtourou et al, (2001), Klein (2002), Wedari (2004), Wilopo (2004), Siregar dan Utama (2006), Nasution dan Setiawan (2007). Hasil ini sesuai dengan ekspektasi awal dan mendukung Hipotesis 1b.
- Hasil pengujian atas variabel QAudit menunjukkan bahwa kualitas audit yang diprosikan auditor dari KAP Big Four tidak berhubungan secara signifikan ($p_value = 0,2506$) dengan EM (manajemen laba). Hal ini menunjukkan bahwa KAP *Big Four* yang paling banyak digunakan sebagai auditor eksternal untuk perusahaan sampel kurang tepat sebagai ukuran kualitas audit. Hasil ini sejalan dengan temuan Fan dan Wong (2001), Veronica dan Bachtiar (2004) dan Rahmawati (2008). Hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi awal dan tidak mendukung Hipotesis 3.
- Hasil pengujian atas variabel kontrol LSize (ukuran) perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berhubungan dengan manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan temuan Nasution dan Setiawan (2007), namun bertentangan dengan temuan Lobo dan Zou (2001); Siregar dan Utama (2006); Chung et al. (2005); Rahmawati dan Baridwan (2006) yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan akan semakin besar pula dorongan untuk melakukan pengelolaan laba karena informasi pada perusahaan besar pada umumnya lebih mudah diakses investor, sehingga laba menjadi salah satu acuan kinerja perusahaan.
- Hasil pengujian atas variabel kontrol Grow (pertumbuhan perusahaan) menunjukkan hasil positif dan signifikan ($p_value < 1\%$). Mengindikasikan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan yang semakin besar di masa mendatang akan meningkatkan dorongan untuk melakukan manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi awal dan sejalan dengan temuan Hermawan (2009).
- Hasil pengujian atas variabel kontrol Lev (tingkat hutang) menunjukkan hasil negatif dan signifikan ($p_value < 5\%$). Mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat hutang maka akan menurunkan dorongan untuk melakukan manajemen laba. Hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi awal dan bertentangan Scott (2000) yang menjelaskan bahwa hutang merupakan suatu alasan dalam praktik pengelolaan laba.

4.6.2. Pengujian Hipotesis dengan Model 2

Penelitian ini menggunakan model 2 untuk menguji hipotesis 2, yaitu mengenai hubungan antara efektivitas dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas audit. Hasil regresi disajikan pada Tabel 4.8. (Lampiran 6)

Hasil regresi model 2 yang menguji hipotesis 2a dan 2b menunjukkan bahwa:

- Hasil pengujian atas variabel *Board* dan *Comdit* menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit berhubungan secara positif dan signifikan ($p_value < 10\%$,) dan ($p_value < 10\%$, two tail) dengan kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit dapat meningkatkan kualitas pemilihan auditor yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Sesuai dengan penjelasan (Chtourou et al., 2001) bahwa dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer jadi, semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, maka dalam mengurangi kemungkinan tingkat kecurangan maka dewan komisaris akan memilih auditor yang berkualitas.
- Hasil pengujian atas variabel kontrol *LSize* (ukuran), *Grow* (pertumbuhan perusahaan) dan *Lev* (tingkat hutang) perusahaan menunjukkan bahwa variabel-variabel ini berhubungan positif dan signifikan dengan kualitas audit.

Dari hasil regresi kedua model tersebut maka dapat ditunjukkan secara empiris bahwa kualitas audit memediasi hubungan antara efektivitas board dan manajemen laba. Hasilnya dapat dilihat pada nilai koefisien masing-masing variabel yang dihubungkan secara langsung (koefisien $\alpha_1 = -0.0514$) maupun tidak langsung (koefisien $\alpha_1 = -0.0666$) sehingga terjadi peningkatan nilai koefisien (Ghozali, 2009).

4.6.3. Pengujian Sensitivitas

Pada pengujian utama variabel efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit masing-masing diuji secara terpisah. Pengujian sensitivitas ini dilakukan mengikuti langkah Purwanti (2011). Dengan dasar bahwa komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris dan ketua komite audit merupakan komisaris independen maka pengujian sensitivitas ini dilakukan dengan merata-ratakan hasil checklist efektivitas dewan komisaris dan komite audit.

Hasil pengujian sensitivitas atas efektivitas dewan komisaris dan komite audit (*board*) disajikan pada Tabel 4.9. (Lampiran 7) yang menunjukkan konsisten dengan hasil pengujian model 1. Variabel utama *board* menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan.

5. Conclusion, Limitation dan Future Research

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit terhadap manajemen laba dengan mediasi kualitas audit. Penelitian ini menyajikan perbandingan beberapa model manajemen laba yaitu Model Yoon (2002), Model Kothari (2005) dan Model Gul dan Jagi (2009). Analisis penentuan pemilihan model akrual menggunakan langkah dari penelitian Siregar (2005) dan Purwanti (2011) dan terpilih model Gul dan Jagi (2009) karena secara empiris memperlihatkan bahwa variabel tambahan arus kas hasil aktivitas operasi (CFO) dan ROA periode sebelumnya turut mempengaruhi total akrual.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: **pertama**, terdapat hubungan negatif dan signifikan antara efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit terhadap manajemen laba, hasil ini menjelaskan bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap tingkat kecurangan yang dilakukan manajemen. **Kedua**, kualitas audit tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba. Meskipun sebagian besar sampel (55, 26%) merupakan klien dari KAP Big Four yang dianggap berkualitas tapi masih terjadi manajemen laba. **Ketiga**, terdapat hubungan positif dan signifikan antara efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit terhadap kualitas audit. Menjelaskan bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh dalam pemilihan auditor. Hasil ini menjadi kontribusi utama dari paper ini. **Keempat**, terbukti bahwa kualitas audit memperkuat hubungan antara efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit terhadap manajemen laba. Hasil ini menjelaskan bahwa efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit diperkuat dengan pemilihan auditor yang berkualitas mempengaruhi tingkat kecurangan (manajemen laba) yang dilakukan oleh manajemen. **Kelima**, hasil pengujian sensitivitas terhadap model penelitian menunjukkan bahwa hasilnya konsisten dengan hasil pengujian model utama.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: menggunakan data penelitian yang terbatas hanya satu periode dengan jumlah sampel yang terbatas perusahaan industri manufaktur; selanjutnya dalam melakukan checklist efektivitas dewan komisaris maupun komite audit karena hanya sebatas mengambil informasi dari laporan tahunan, kemungkinan perusahaan sampel sudah memiliki karakteristik efektivitas dewan komisaris tetapi tidak

mengungkapkan ke dalam laporan tahunan; KAP Big Four kemungkinan sudah tidak tepat menjadi proksi kualitas audit sehingga hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi.

Penelitian mendatang diharapkan memperbanyak jumlah sampel penelitian dengan melibatkan sektor industri yang berbeda dengan perhitungan akrual yang lebih memadai. Selain itu, lebih mengembangkan penelitian terkait kualitas auditor menggunakan proksi yang tepat mencerminkan aktivitas auditor misalnya tenure audit atau spesialisasi auditor berdasarkan spesifikasi industri.

References

- Achmad, Komarudin, Imam Subekti, dan Sari Atmini. 2007. "Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi 10*. Makassar.
- Anderson, R., S. Mansi, and D. Reeb. 2004. "Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and the Cost of Debt", *Journal of Accounting and Economics* 37 (1): 315–42.
- Babic, V., 2001, "The Key Aspects of the Corporate Governance Restructuring in the Transition Process", *Ekonomist*, Vol. 33, No.2, pp.133-143.
- Beasley, Mark S., 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* .Volume 71, No 4, Oktober: 443-465
- Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K. R. (1998). The effect of auditquality on earnings management. *Contemporary Accounting Research*,, 15, 1–24.
- Beneish, M.D. 2001. Earnings management: A perspective, *Managerial Finance* 27 (12): pp. 3-17.
- Carcello, J. V., & Neal, T. L. 2000. Audit committee composition and auditor reporting. *The Accounting Review*, 75, 453–468.
- Chen, G., M Chen, G., Firth, M., Gao, D. N., and Rui, O. M. 2006. "Ownership structure, corporate governance, and fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 12 (3), pp.424-448.
- Chtourou, Sonda Marakchi, Jean Bedard, and Lucie Courteau. 2001. "Corporate Governance and Earnings Management". *Working Paper Series*, <http://papers.ssrn.com>. Diakses tanggal 14 Desember 2011.
- Cornett, M., M., J. Marcuss, Saunders dan Tehranian, H., (2006), EarningsManagement, Corporate Governance and True Financial Performance, *Working Paper Series*, <http://papers.ssrn.com> Diakses tanggal 14 Desember 2011
- Cornett, Marcia Millon, et al., 2006. "Earnings Management, Corporate Governance and True Financial Performance". *Working Paper Series*, <http://papers.ssrn.com>. Diakses tanggal 14 Desember 2011.
- Dallas, G., 2004, *Governance and Risk: An Analytical Handbook for Investors, Managers, Directors and Stakeholders*, New York: McGraw-Hill.
- Darmawati, D. ,2003. Corporate governance dan Manajemen Laba: Suatu Studi Empiris. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 47–68.
- DeAngelo, L. 1981. Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1–36.
- Dhaliwal, D. S., Naiker, V. and Navissi, F.: 2007. Audit committee financial expertise, corporate governance and accruals quality: An empirical analysis. *Working Paper* Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=906690>.
- Fama, E., & Jensen, M. 1983. Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26 (June), 301–326.
- Fan, Joseph P.H and T.J Wong. 2001. "Do External Auditors Perform a Corporate Governance Role in Emerging Markets? Evidence from East Asia". *Working Paper Series*, <http://papers.ssrn.com>. Diakses tanggal 14 Desember 2011.

- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gideon, Boediono, SB. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Artikel yang Dipresentasikan pada *Simposium Nasional Akuntansi 8* Solo tanggal 15 - 16 September 2005
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics. Fourth Edition*. New York: MC. Graw-Hill Inc. Jakarta: Erlangga
- Gul, F. A., Lung, S., & Srinidhi, B. 2000. The effect of investment opportunity set and debt level on earnings–returns relationship and the pricing of iscretionary accruals. Unpublished Working Paper. Gumanti, Tatang Ary. 2000. “Earnings Management: Suatu Telaah Pustaka”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2, No. 2, hal. 104-115.
- Gul, Ferdinand A. and Jaggi Bikki. 2009. Earnings quality: Some Evidence on The Role of Auditor Tenure And Auditors’ industry Expertise, *Journal of Accounting and Economics* ,47 , 265–287.
- Hermawan, Ancella A. 2009, Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Peran Monitoring Bank terhadap Kandungan Informasi Laba, Disertasi PIA FE-Universitas Indonesia.
- Herusetya, Antonius dan Puspita, Ella, 2008, Determinan Pemilihan Auditor *The Big 4* di Indonesia oleh Perusahaan Publik, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Integrity*, Universitas Pelita Harapan, Vol 2 No.3, Desember, pp. 467-486.
- Herwiyanti, Eliada dan Baridwan. Zaki,.2008. Pengaruh Kualitas Laba pada Yields Obligasi dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 10, No.2, Agustus, pp. 59-68.
- IAPI. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat. Jakarta
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. *Journal of Financial Economics* Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jiambalvo, J. 1996. Discussion of causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13, 37–47.
- Jones, J. J. 1991. Earnings management during import relief investigation. *Journal of Accounting Research*, 29, 193–228.
- Kasznik, R. 1999. On the association between voluntary disclosure and earnings management. *Journal of Accounting Research*, 37, 57–81.
- Klein, A., 2002a. Audit committee, board of directors characteristics and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*, 33, 375–400.
- Klein, A., 2002b. Economic determinants of audit committee independence. *The Accounting Review*, 77 (2), 435–452.
- Kothari SP., Leone A., Wasley CE, 2005, Performance Matched Discretionary Accruals Measures, *Journal Accounting and Economics*, 39, 163-197.
- Marihot dan Doddy . 2007. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia, *SNA-X Unhas Makasar*, 26 – 28 Juli.
- Mayangsari, S. 2003. “Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan”. *Simposium Nasional Akuntansi VI* Surabaya, 16 – 17 Oktober 2003, pp. 1255–1273.
- McGee, Robert W. 2008. “Corporate Governance In Asia: A Comparative Study”. *Working Paper Series*, <http://papers.ssrn.com>. Diakses tanggal 14 Desember 2011
- Meutia, Inten. 2004. “Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP *Big 5* dan *Non Big 5*”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 7, No. 3, hal. 333-350.
- Midiastuty, Pratana P., dan Mas’ud Machfoedz. 2003. Analisis Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* dan Indikasi Manajemen Laba. Artikel yang Dipresentasikan pada *Simposium Nasional Akuntansi 6* Surabaya tanggal 16-17 Oktober 2003
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia”. *Simposium Nasional Akuntansi 10*. Makassar.

- Nuraini, A. dan Sumarno Zain. 2007. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba". *Jurnal MAKSI*, Vol. 7, No. 1, hal. 19-32.
- Nuryaman. 2008. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba". *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Pontianak.
- Parulian, S. R. ,2004. Analisis Hubungan antara Komite Audit dan Komisaris Independen dengan Praktek Manajemen Laba: Studi Empiris Perusahaan di BEJ. Unpublished Thesis, FEUI Graduate Program in
- Peasnell , K.V., P.F. Pope, dan S. Young. 1998. "Outside Directors, Board Effectiveness, and Earnings Management". *Working Paper Series*, <http://papers.ssrn.com>. Diakses tanggal 14 Desember 2011.
- Purwanti, Ari. 2011. Pengaruh Insentif Ekspropriasi terhadap Pengelolaan Laba dengan Mempertimbangkan Transaksi Hubungan Istimewa, Keberadaan Pengendali dalam Manajemen, Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta Pemegang Saham Terbesar Kedua, Disertasi PIA FE- Universitas Indonesia
- Raghunandan, K. 2001. Audit Committee composition, gray directors and interaction with internal auditing, *Accounting Horizons*, 15 (2), 105.
- Rahmawati dan Baridwan Zaki. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi, Regulasi Perbankan, dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba dengan Model Akrua Khusus Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Volume 6 No.2 Agustus: 139-150
- Rahmawati. 2008. "Motivasi, Batasan, dan Peluang Manajemen Laba (Studi Empiris pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 23, No. 4, hal. 385-403.
- Rahmawati; Suparno, Y., dan Qomariyah, N., 2006, Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta, *SNA IX Padang*, 23 – 26 Agustus.
- Sands, John, and McPhail, Janelle. 2003. Choice criteria of listed Australian public companies for selecting an auditor: an exploratory study. *International Journal of Business Studies*, 11 (1), pp. 109-133.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. 2008. "Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 11, No. 1, hal. 97-116.
- Scott, R. William. 2000. *Financial Accounting Theory 2nd Edition*. Prentice-Hall, New Jersey
- Siregar, Sylvia Veronica dan Utama, Sidharta. 2006. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 9, No. 3, hal. 307-326.
- SK Ketua Bapepam, No.Kep-29/PM/2004, Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Suaryana, Agung. 2005. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba. Artikel yang Dipresentasikan pada *Simposium Nasional Akuntansi 8* Solo, tanggal 15 - 16 September.
- Subramanyam, K. R. ,1996. The pricing of discretionary accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 22,249–281.
- Sugiarta, I Putu. 2004. *Earnings Management and Information Content of Audit Committee Announcement*. Artikel yang Dipresentasikan pada *Simposium Nasional Akuntansi 7* Denpasar tanggal 2 -3 Desember 2004
- Sulistiyanto, H. Sri. 2008. "*Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris*". Jakarta: Grasindo.
- Teshima, Nobuyuki dan Akinobu Shuto. 2008. "Managerial Ownership and Earnings Management: Theory and Empirical Evidence from Japan". *Working Paper Series*, <http://papers.ssrn.com>. Diakses tanggal 14 Desember 2011.
- Turkan et al, 2008, Auditor Selection in The Istanbul Stock Exchange, *Working Paper Series*, <http://papers.ssrn.com>. Diakses tanggal 14 Desember 2011.
- Utama, Sidharta, dan F. Leonardo Z. 2006. *Audit Committee Composition, Control of Majority Shareholders and Their Impact on Audit Committee Effectiveness: Indonesia Evidence*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Volume 9 No 1 Januari: 21-34
- Utami, W., 2005, Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Modal Ekuitas (Studi pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur), *SNA VIII Solo*, 15 – 16 September.

- Veronica, Sylvia dan Yanivi S Bachtiar. 2004. *Good Corporate Governance Information Asymetry and Earnings Management*. Artikel yang Dipresentasikan pada *Simposium Nasional Akuntansi 7*, Denpasar tanggal 2 -3 Desember 2004.
- Warsono et al. 2009. *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance
- Wedari, Linda Kusumaning. 2004. Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap Aktivitas Manajemen Laba. Artikel yang Dipresentasikan pada *Simposium Nasional Akuntansi 7* Denpasar tanggal 2 -3 Desember 2004
- Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3, No. 2, hal. 89-101.
- Winarno, Wing W, 2009, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wilopo. 2004. *The Analysis of Relationship of Independent Board of Directors, Audit Committee, Corporate Performance, and Discretionary Accruals*. Ventura Volume 7 No. 1 April: 73-83
- Xie, Biao, Wallace N Davidson III, and Peter J. Dadalt. 2003. Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee. *Journal of Corporate Finance*, Volume 9 Juni: 295-316
- Yermack, D. ,1996, "Higher market valuation of companies with a small board of directors", *Journal of Financial Economics*, Vol. 40, pp. 185-213.
- Yoon Soon Y., Miller G, 2002, Earnings Management of Seasones Equity Offering Firms in Korea, *The International Journal of Accounting*, 37, 57-78.

Appendix

Lampiran 1

Daftar Perusahaan Sampel dan KAP Big Four Tahun 2009

No	Stock	Company name	Nama KAP	Dummy
1	ADES	PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK	HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT (Grant Thornton)	0
2	AKRA	PT AKR CORPORINDO TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
3	MYTX	PT APAC CITRA CENTERTEX TBK	MULYAMIN SENSI SURYANTO	0
4	AKPI	PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
5	ARGO	PT ARGO PANTES TBK	RAMA WENDRA (Parker Randal CF)	0
6	ARNA	PT ARWANA CITRA MULIA	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
7	POLY	PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK	HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT (Grant Thornton)	0
8	APLI	PT ASIAPLAST INDUSTRIES	TANUBRATA SUTANTO & REKAN	0
9	ASGR	PT ASTRA GRAPHIA TBK	TANUDIREJJA, WIBISANA & REKAN	1
10	ASII	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	TANUDIREJJA, WIBISANA & REKAN	1
11	AUTO	PT ASTRA OTOPARTS TBK	TANUDIREJJA, WIBISANA & REKAN	1
12	BNBR	PT BAKRIE & BROTHERS TBK	TJIENDRADAJA & HANDOKO TOMO	0
13	BRPT	PT BARITO PACIFIC TBK	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
14	RMBA	PT BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA TBK	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
15	BRNA	PT BERLINA TBK	HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT (Grant Thornton)	0
16	BETON	PT BETONJAYA MANUNGGAL TBK	ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR & SAPTOTO	0
17	BUDI	PT BUDI ACID JAYA	JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN (Baker Tilly Int.)	0
18	BUMI	PT BUMI RESOURCES TBK	TJIENDRADAJA & HANDOKO TOMO	0
19	CEKA	PT CAHAYA KALBAR TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
20	CMPP	PT CENTRIS MULTIPERSADA PRATAMA TBK	DRA. S. GRISELDA & Co	0
21	CTBN	PT CITRA TUBINDO TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
22	DVLA	PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
23	DAVO	PT DAVOMAS ABADI TBK	TANUBRATA SUTANTO & REKAN	0
24	DLTA	PT DELTA DJAKARTA TBK	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
25	DPNS	PT DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK	PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ADE FATMA & REKAN	0
26	EPMT	PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
27	ETWA	PT ETERINDO WAHANATAMA TBK	ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR & SAPTOTO	0
28	FASW	PT FAJAR SURYA WISESA TBK	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
29	FAST	PT FAST FOOD INDONESIA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
30	GJTL	PT GAJAH TUNGGAL TBK	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
31	GDYR	PT GOODYEAR INDONESIA TBK	TANUDIREJJA, WIBISANA & REKAN	1
32	GGRM	PT GUDANG GARAM TBK	SIDDHARTA SIDDHARTA & WIDJAJA	1
33	HMSP	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	TANUDIREJJA, WIBISANA & REKAN	1
34	SMCB	PT HOLCIM INDONESIA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
35	INKP	PT INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION TBK	TJIENDRADAJA & HANDOKO TOMO	0
36	BRAM	PT INDO KORDSA TBK	TANUDIREJJA, WIBISANA & REKAN	1
37	INTP	PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
38	INAF	PT INDOFARMA (PERSERO) TBK	HUSNI, MUCHARAM & RASIDI	0

39	INDF	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
40	INDR	PT INDORAMA SYNTHETICS TBK	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
41	INDS	PT INDOSPRING TBK	SUPOYO, EDDY & REKAN	0
42	INTA	PT INTRACO PENTA TBK	MULYAMIN SENSI SURYANTO	0
43	JKSW	PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LIMITED TBK	ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY	0
44	JPFA	PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	MULYAMIN SENSI SURYANTO	0
45	JPRS	PT JAYA PARI STEEL TBK	ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR & SAPTOTO	0
46	KBLM	PT KABELINDO MURNI	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
47	KLBF	PT KALBE FARMA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
48	KICI	PT KEDAUNG INDAH CAN TBK	PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO & REKAN	0
49	KDSI	PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK	KOSASIH & NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN	0
50	KAEF	PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT (Grant Thorton)	0
51	KSAI	PT KRAKATAU STEEL	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
52	LION	PT LION METAL WORKS TBK	KOSASIH & NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN	0
53	TCID	PT MANDOM INDONESIA TBK	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
54	MART	PT MARTINA BERTO TBK	BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & REKAN	0
55	MYOR	PT MAYORA INDAH TBK.	MULYAMIN SENSI SURYANTO	0
56	MEDC	PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
57	MLBI	PT MULTI BINTANG INDONESIA	SIDDHARTA SIDDHARTA & WIDJAJA	1
58	MRAT	PT MUSTIKA RATU TBK	KOSASIH & NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN	0
59	NIPS	PT NIPRESS TBK	KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN	0
60	TKIM	PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK	TJIENDRADJAJA & HANDOKO TOMO	0
61	ADMG	PT POLYCHEM INDONESIA TBK	OSMAN BING SATRIO & REKAN	1
62	SCPI	PT SCHERING-PLOUGH INDONESIA TBK	TANUDIREDJA, WIBISANA & REKAN	1
63	SMGR	PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
64	BATA	PT SEPATU BATA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
65	STTP	PT SIANTAR TOP TBK	ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR & SAPTOTO	0
66	SIMA	PT SIWANI MAKMUR TBK	BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & REKAN	0
67	IKBI	PT SUMI INDO KABEL TBL	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
68	TOTO	PT SURYA TOTO INDONESIA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
69	TRST	PT TRIAS SENTOSA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
70	TURI	PT TUNAS RIDEAN TBK	TANUDIREDJA, WIBISANA & REKAN	1
71	ULTJ	PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK	TANUDIREDJA, WIBISANA & REKAN	1
72	UNIC	PT UNGGUL INDAH CAHAYA TBK	PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA	1
73	UNVR	PT UNILEVER INDONESIA TBK	TANUDIREDJA, WIBISANA & REKAN	1
74	UNTR	PT UNITED TRACTORS TBK	TANUDIREDJA, WIBISANA & REKAN	1
75	WIKA	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	PIETER, UWAYS & REKAN (Kingston Smith)	0
76	YPAS	PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK	TJAHJADI, PRADHONO & TERAMIHARDJA	0

Lampiran 2. Hasil Regresi Model Manajemen Laba

Tabel 4.1. Hasil Regresi Model Yoon (2002)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.052699	0.008799	-5.989326	0.0000
REVAR	-0.002883	0.018594	-0.155038	0.8772
EXPAY	0.154069	0.103696	1.485778	0.1417
CASHPPE	1.094004	1.218367	0.897926	0.3722
R-squared	0.039263	Mean dependent var		-0.052618
Adjusted R-squared	0.000767	S.D. dependent var		0.076604
S.E. of regression	0.076633	Akaike info criterion		-2.248370
Sum squared resid	0.422834	Schwarz criterion		-2.125700
Log likelihood	89.43805	Hannan-Quinn criter.		-2.199345
F-statistic	0.980834	Durbin-Watson stat		2.276763
Prob(F-statistic)	0.406695			

Tabel 4.2. Hasil Regresi Model Kothari (2005)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.166107	0.041537	3.999047	0.0002
REVAR	-0.143365	0.048754	-2.940601	0.0044
PPE	-0.131928	0.076545	-1.723525	0.0891
ROA	-0.000122	0.001092	-0.112099	0.1911
R-squared	0.135471	Mean dependent var		0.112442
Adjusted R-squared	0.099449	S.D. dependent var		0.205951
S.E. of regression	0.195442	Akaike info criterion		0.375913
Sum squared resid	2.750217	Schwarz criterion		0.253243
Log likelihood	18.28470	Hannan-Quinn criter.		0.326888
F-statistic	3.760794	Durbin-Watson stat		1.740222
Prob(F-statistic)	0.014408			

Tabel 4.3. Hasil Regresi Model Gul & Jaggi (2009)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.009115	0.023711	0.384420	0.7019
CFO_MIN	-2.902127	1.459975	-1.987792	0.0510
CFOT	2.478873	1.466552	1.690273	0.0957
CFO_PLUS	0.180782	0.064714	2.793553	0.0068
DREV	0.005587	0.007575	0.737462	0.4635
PPET	-0.040238	0.021954	-1.832827	0.0713
ROA_MIN	0.000688	0.000260	2.647873	0.0101
DCFO	-2.849680	1.476201	-1.930415	0.0579
DUMCFO	-0.030129	0.022157	-1.359828	0.1785
DCFO*DUMCFO	-0.062392	0.169118	-0.368925	0.7134
R-squared	0.558560	Mean dependent var		-0.054079
Adjusted R-squared	0.498364	S.D. dependent var		0.077446
S.E. of regression	0.054852	Akaike info criterion		-2.846285
Sum squared resid	0.198575	Schwarz criterion		-2.539609
Log likelihood	118.1588	Hannan-Quinn criter.		-2.723722
F-statistic	9.278965	Durbin-Watson stat		2.352795
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran 3

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif

	EM	BOARD	COMDIT	QAUDIT	LSIZE	GROW	LEV
Mean	2.63E-11	0.790248	0.876396	0.552632	9.244289	0.320779	0.443859
Median	0.009427	0.784314	0.878788	1.000000	9.193386	0.402400	0.509350
Maximum	0.090358	0.960784	0.969697	1.000000	10.94509	0.672100	0.713000
Minimum	-0.181385	0.470588	0.787879	0.000000	7.679106	-0.275306	0.065306
Std. Dev.	0.050920	0.082074	0.046622	0.500526	0.768108	0.802366	0.722694
Skewness	-0.917890	-1.024923	-0.043921	-0.211702	0.187175	-0.664208	-0.746630
Kurtosis	4.058314	5.889566	2.314068	11.04481	2.433649	37.91717	58.25191
Jarque-Bera	1.421871	2.974629	1.514361	2.673030	1.459487	1.429421	3.102908
Probability	0.200817	0.185320	0.468987	0.101770	0.482033	0.824500	0.183240
Sum	2.00E-09	60.05882	66.60606	42.00000	702.5660	24.37922	3.333317
Sum Sq. Dev.	0.194460	0.505205	0.163018	18.78947	44.24928	169.2827	131.2140
Observations	76	76	76	76	76	76	76

Keterangan:

EM: manajemen laba diukur dengan akrual diskresioner (Gul&Jaggi, 2009); Board dan Comdit: diukur efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur dengan *checklist* (Hermawan, 2009); Kualitas audit (QAudit): diukur dengan variabel dummy dengan nilai = 1, jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, dan 0 untuk lainnya; LSize: ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma total asset; Grow (pertumbuhan perusahaan): diukur menggunakan selisih penjualan saat ini dikurangi penjualan sebelumnya dibagi dengan penjualan sebelumnya; Lev(Kewajiban) diukur dengan rasio total hutang terhadap total asset.

Lampiran 4. Analisis Korelasi

Tabel 4.6 Korelasi

	EM	BOARD	COMDIT	QAUDIT	LSIZE	GROW	LEV
EM	1						

BOARD	0.021229	1					
	2.182658	-----					
	0.055600 *	-----					
COMDIT	0.106625	0.090718	1				
	1.922483	2.783620	-----				
	0.063500 *	0.043800 **	-----				
QAUDIT	0.005928	0.237315	0.074726	1			
	0.050991	2.101492	0.644619	-----			
	0.959500	0.039000 **	0.521200	-----			
LSIZE	0.062579	0.402137	0.359841	0.358574	1		
	0.539384	3.778277	3.317706	3.304305	-----		
	0.591200	0.000300 ***	0.001400 **	0.001500 **	-----		
GROW	0.213653	0.135729	0.070460	0.196365	0.202048	1	
	1.881352	1.178489	0.607627	1.722733	1.774685	-----	
	0.063900 *	0.242400	0.545300	0.089100 *	0.080100 *	-----	
LEV	0.013610	0.111674	-0.027401	0.080715	0.267569	0.767446	1
	0.117086	0.966707	-0.235799	0.696607	2.388814	10.29744	-----
	0.907100	0.336800	0.814200	0.488200	0.019500 **	0.00000 ***	-----

***Significant at 1%, **significant at 5%, *significant at 10% (two-tail).

Keterangan:

EM: manajemen laba diukur dengan akrual diskresioner (Gul&Jaggi, 2009); Board dan Comdit: diukur efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur dengan *checklist* (Hermawan, 2009); Kualitas audit (QAudit): diukur dengan variabel dummy dengan nilai = 1, jika perusahaan diadit oleh KAP *Big Four*, dan 0 untuk lainnya; LSize: ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma total asset; Grow (pertumbuhan perusahaan): diukur menggunakan selisih penjualan saat ini dikurangi penjualan sebelumnya dibagi dengan penjualan sebelumnya; Lev (Kewajiban) diukur dengan rasio total utang terhadap total asset.

Lampiran 5. Hasil Regresi Model 1 dan Model 2

Model 1

Dependent Variable: EM
 Method: Least Squares
 Date: 01/06/13 Time: 18:33
 Sample: 1 76
 Included observations: 76

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.069022	0.121461	-0.568269	0.5717
BOARD	-0.014822	0.077571	-0.191075	0.1290
COMDIT	-0.036583	0.13663	-2.267755	0.0897
QAUDIT	-0.009718	0.012793	-0.759683	0.2506
LSIZE	0.006387	0.009675	0.660156	0.5114
GROW	0.017687	0.006265	2.82327	0.0062
LEV	-0.015452	0.007229	-2.137406	0.0361

R-squared	0.114561	Mean dependent var	2.63E-11
Adjusted R-squared	0.107566	S.D. dependent var	0.05092
S.E. of regression	0.049954	Akaike info criterion	3.067845
Sum squared resid	0.172183	Schwarz criterion	2.853172
Log likelihood	123.5781	Hannan-Quinn criter.	2.982051
F-statistic	3.487909	Durbin-Watson stat	2.105658
Prob(F-statistic)	0.005235		

Tabel 4.7. Hasil Regresi Model 1

EM _i = α ₀ +α ₁ Board _i +α ₂ Comdit _i +α ₃ QAudit _i +α ₄ LSize _i +α ₆ Grow _i +α ₇ Lev _i +ε				
Variable	Expected Sign	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C		-0.069022	-0.568269	0.5717
BOARD	-	-0.014822	-0.191075	0.1290 *
COMDIT	-	-0.036583	-2.267755	0.0897 *
QAUDIT	-	-0.009718	-0.759683	0.2506
LSIZE	+	0.006387	0.660156	0.5114
GROW	+	0.017687	2.82327	0.0062 ***
LEV	+	-0.015452	-2.137406	0.0361 **

Keterangan:

EM: manajemen laba diukur dengan akrual diskresioner (Gul&Jaggi, 2009); Board dan Comdit: diukur efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur dengan *checklist* (Hermawan, 2009); Kualitas audit (QAudit): diukur dengan variabel dummy dengan nilai = 1, jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, dan 0 untuk lainnya; LSize: ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma total asset; Grow (pertumbuhan perusahaan): diukur menggunakan selisih penjualan saat ini dikurangi penjualan sebelumnya dibagi dengan penjualan sebelumnya; Lev(Kewajiban) diukur dengan rasio total hutang terhadap total asset.

***Significant at 1%, **significant at 5%, *significant at 10% (two-tail).

Lampiran 6

Model 2

Dependent Variable: QAUDIT

Method: Least Squares

Date: 01/06/13 Time: 19:20

Sample: 1 76

Included observations: 76

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.124147	1.126826	0.997622	0.3219
BOARD	0.512321	0.722153	1.769436	0.0804
COMDIT	1.050106	1.270350	0.826627	0.1413
LSIZE	0.240568	0.085694	2.807288	0.0065
GROW	0.113789	0.056930	1.998729	0.0495
LEV	-0.110589	0.066235	-1.669637	0.0995

R-squared	0.188483	Mean dependent var	0.552632
Adjusted R-squared	0.130517	S.D. dependent var	0.500526
S.E. of regression	0.466721	Akaike info criterion	1.389485
Sum squared resid	15.24798	Schwarz criterion	1.573491
Log likelihood	46.80045	Hannan-Quinn criter.	1.463023
F-statistic	3.251639	Durbin-Watson stat	2.093235
Prob(F-statistic)	0.006689		

Tabel 4.8. Hasil Regresi Model 2

QAudit _i = α ₀ +α ₁ Board _i +α ₂ Comdit _i + α ₃ LSize _i +α ₄ Grow _i + α ₅ Lev _i + ε				
Variable	Expected Sign	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C		1.124147	0.997622	0.3219
BOARD	+	0.512321	1.719436	0.0804 *
COMDIT	+	1.050106	0.826627	0.1413 *
LSIZE	?	0.240568	2.807288	0.0065 ***
GROW	?	0.113789	1.998729	0.0495 **
LEV	?	-0.110589	-1.669637	0.0995 *

Keterangan:

Board dan Comdit: diukur efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur dengan *checklist* (Hermawan, 2009); Kualitas audit (QAudit): diukur dengan variabel dummy dengan nilai = 1, jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, dan 0 untuk lainnya; LSize:ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma total asset; Grow(pertumbuhan perusahaan): diukur menggunakan selisih penjualan saat ini dikurangi penjualan sebelumnya dibagi dengan penjualan sebelumnya; Lev(Kewajiban) diukur dengan rasio total hutang terhadap total asset.

***Significant at 1%, **significant at 5%, *significant at 10% (two-tail).

Lampiran 7. Hasil Uji Sensitivitas

Dependent Variable: EM
 Method: Least Squares
 Date: 01/06/13 Time: 19:38
 Sample: 1 76
 Included observations: 76

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.004101	0.103601	-0.039589	0.9685
BOARD	-0.096571	0.145748	-1.662587	0.0998
QAUDIT	-0.009630	0.012598	-0.064390	0.4472
LSIZE	0.010280	0.009827	1.046172	0.2991
GROW	0.018470	0.006150	3.003351	0.0037
LEV	-0.016975	0.007182	-2.363614	0.0209

R-squared	0.118603	Mean dependent var	2.63E-11
Adjusted R-squared	0.095646	S.D. dependent var	0.050920
S.E. of regression	0.049483	Akaike info criterion	3.098735
Sum squared resid	0.171397	Schwarz criterion	2.914730
Log likelihood	123.7519	Hannan-Quinn criter.	3.025198
F-statistic	3.883867	Durbin-Watson stat	2.404843
Prob(F-statistic)	0.008146		

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Sensitivitas

$$EM_i = \alpha_0 + \alpha_1 Board_i + \alpha_2 QAudit_i + \alpha_3 LSize_i + \alpha_4 Grow_i + \alpha_5 Lev_i + \epsilon$$

Variable	Expected Sign	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C		-0.004101	-0.039589	0.9685
BOARD	-	-0.096571	-1.662587	0.0998 *
QAUDIT	-	-0.000963	-0.064039	0.4472
LSIZE	+	0.001028	1.046172	0.2991
GROW	+	0.010847	3.003351	0.0037 *
LEV	+	-0.016975	-2.363614	0.0209 *

Keterangan:

Board: rata-rata efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit diukur dengan *checklist* (Hermawan 2009; Kualitas audit (QAudit): diukur dengan variabel dummy dengan nilai = 1, jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, dan 0 untuk lainnya; LSize: ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma total asset; Grow (pertumbuhan perusahaan): diukur menggunakan selisih penjualan saat ini dikurangi penjualan sebelumnya dibagi dengan penjualan sebelumnya; Lev (Kewajiban) diukur dengan rasio total utang terhadap total asset.

***Significant at 1%, **significant at 5%, *significant at 10% (two-tail).

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Voluntary Disclosure* (Study Pada Perusahaan Bumn Di Indonesia)

DIYAN NURKHAYATI
AGUNG NUR PROBOHUDONO*
Universitas Sebelas Maret

Abstract: *The aim of this study is to determine the extent of corporate governance (CG) which affects the level of voluntary disclosure on State Owned Enterprises (SOEs) companies in Indonesia. This study uses independent variables in the form of independent directors, managerial ownership, government ownership, foreign ownership, and firm size and control variable in the form of profitability, the type of industry, type of independent auditors, and leverage. The sample used in this study are SOEs companies in Indonesia which are produced annual reports for 2009-2011.*

The measurement of the voluntary disclosure level in this study uses an index of voluntary disclosure taken from Vu., et, al., In 2011 as many as 84 voluntary disclosure index which is combined with the index of the Meek., Et, al., 1995 as many as 85 voluntary disclosure index. Both indices were merged and eliminated by the same components and also eliminated mandatory disclosure which listed in the laws of the government. Total 65 indices is utilised in this reaserch. The sample of this study are 45 SOES companies in Indonesia in the period of 2009-2011. The technique used is purposive sampling technique.

The results of this study indicated that the government ownership had a significantly negatively influence voluntary disclosure. This study indicated that there is an indication that SOES companies in Indonesia are still relatively low in doing voluntary disclosure in their annual report. The company size as control variabel is significantly influence the voluntary disclosure of SOEs companies in Indonesia.

Keywords: State Owned Enterprises (SOEs) company, agency theory, voluntary disclosure

* Corresponding author: mustdownnow@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tujuan dari laporan keuangan menurut kerangka konseptual PSAK adalah menyediakan informasi bagi investor dan kreditur, serta calon investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan ekonomisnya. Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan (Sembiring, 2005).

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *Voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan (Prayogi, 2003). Manajemen bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung pengambilan keputusan pemakai yang tertuang dalam pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan sukarela tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparansi oleh pemakai laporan tahunan (Meek, et al. 1995).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1 menjelaskan perseroan terbatas (perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian tersebut dibahas kembali dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN mengenai pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pentingnya *Voluntary disclosure* telah membuat banyak peneliti untuk melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela. Binh (2012), berhasil melakukan penelitian tentang informasi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan negara berkembang yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Penelitian ini mengikuti saran dari Sarikas, et. al (2009), dan karena sebagian besar penelitian tentang informasi

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpusat di negara maju. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi pengungkapan sukarela pada laporan tahunan harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan transparansi atas informasi yang digunakan oleh pemakai laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2009) mengenai informasi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan pada perusahaan di Malaysia.

Penelitian tentang pengungkapan sukarela juga dilakukan oleh Amilia (2008), yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan melalui media website perusahaan merupakan pengungkapan sukarela dan tidak diregulasi oleh badan tertentu pada beberapa negara berkembang, seperti juga di Indonesia. Penelitian Amilia (2008) menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta dan memberikan bukti bahwa *size firm*, profitabilitas perusahaan dan kepemilikan mayoritas merupakan variabel yang menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan yang ditunjukkan dengan peningkatan indeks IFSR (Internet Financial and Sustainability Reporting).

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Eng dan Mak (2003), menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Voluntary disclosure*, sedangkan kepemilikan asing tidak berhubungan signifikan dengan tingkat *Voluntary disclosure*. Penelitian Eng dan Mak (2003) dilakukan pada 158 perusahaan yang terdaftar di Singapore. Penelitian Eng dan Mak (2003) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan El-sahib (2012), Hassan (2013), Huafang dan Jianguo (2007) dan Ntim, et al. (2012).

Penelitian yang dilakukan Vu, et al. (2011) juga bertema mengenai *voluntary disclosure* yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Vietnam. Hasil dari penelitian Vu, et al. (2011) adalah tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada *voluntary disclosure*, meskipun sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Vietnam telah memenuhi standart minimal sepertiga direktur independen. Rendahnya tingkat pelaporan informasi social kemungkinan disebabkan oleh praktek pengungkapan social yang relative baru diterapkan di Vietnam. Penemuan Vu, et al. (2011) sejalan dengan La Porta, et al. (2000) dalam Vu, et al. (2011) yang menyatakan bahwa tingkat *Voluntary disclosure* pada perusahaan di negara berkembang relative rendah.

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN mengenai pengertian perseroan terbatas (persero) yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya berbentuk saham yang seluruh

atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang bertujuan utamanya mengejar keuntungan. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan bahwa ciri khas BUMN adalah pasar saham bukan lah tujuan utama perusahaan BUMN, sehingga BUMN tetap mengabdikan dan bekerja untuk negara. Oleh sebab itu masih banyak BUMN yang Privatisasi dikarenakan pasar saham bukanlah tujuan utamanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat pengaruh antara corporate governance terhadap *voluntary disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan BUMN di Indonesia. Harapan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan motivasi kepada perusahaan di Indonesia agar lebih transparan lagi terutama mengenai *Voluntary disclosure*.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan (2005: 269) adalah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agent) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, principal mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agent tersebut. Dalam suatu korporasi pemegang saham merupakan principal dan CEO (*Chief Executive Officer*) adalah agent mereka. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa principal dan agent memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Kontrak tersebut menyatakan hak dan kewajiban masing-masing principal dan agent, principal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan manajemen (*agent*) mempunyai kewajiban untuk mengelola yang diamanatkan pemegang saham kepadanya.

Menurut Jensen dan Meckling, (1976), hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang

terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

2. Pengungkapan

Pengungkapan berkaitan dengan cara penyampaian atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dinyatakan melalui *statement* keuangan utama (Suwardjono, 2006: 134). Tujuan pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.. Pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, oleh karena itu, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informative, atau melayani kebutuhan khusus (Suwardjono, 2006: 580).

Laporan tahunan biasanya dianggap sebagai sarana penting untuk membebaskan akuntabilitas di sektor korporasi dan pemerintahan dan sebagai salah satu sarana yang dapat meningkatkan persepsi pemangku kepentingan akuntabilitas mereka (pemakai laporan tahunan). Informasi yang tersedia pada kinerja laporan tahunan perusahaan adalah informasi keuangan yang diperlukan oleh berbagai jenis pengguna yang berbeda. Pengungkapan sukarela dianggap sebagai kepentingan utama dari pengungkapan. Pengungkapan sukarela dipahami sebagai informasi keuangan dan non-keuangan melalui laporan tahunan atas dan di atas persyaratan wajib, baik yang berkaitan dengan hukum perusahaan Vietnam, standar akuntansi profesional atau persyaratan peraturan lainnya yang relevan (Binh, 2012).

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan minimal yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku (Rahayu, 2008). Berikutnya adalah pengertian mengenai *voluntary disclosure*, yaitu pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan. Manajemen bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung untuk pengambilan keputusan oleh pemakai dalam pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang

dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Meek, et al. 1995).

Menurut Rahayu (2008), luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu: *adequate disclosure* (pengungkapan cukup), *fair disclosure* (pengungkapan wajar), *full disclosure* (pengungkapan penuh).

Berdasarkan SK No. 236/MBU/2003 bahwa perusahaan BUMN diwajibkan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Strategi pengungkapan sukarela memiliki dampak positif pada perusahaan. Namun, sebagai akibat dari sifat heterogen pengguna, tidak bijaksanamelakukan pengungkapan sukarela tentang kebijakan perusahaan yang bersifat. Idealnya, agen dan principal bersama-sama harus menyusun kerangka kerja konseptual yang dapat memenuhi kebutuhan dari kedua kelompok (Myburgh, 2001).

B. Pengembangan hipotesis

Ukuran komisaris independen

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN mengenai pengertian dewan komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Menurut penjelasan pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 mengenai Pengertian dari Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Lakhall (2007) menyebutkan bahwa pemisahan antara pemegang saham dengan manajer, kepemilikan dengan pengambil keputusan, menyebabkan meningkatnya biaya agency. Akibatnya, pemegang saham mengharapkan beberapa figur tata kelola perusahaan untuk membantu mengurani biaya agensi tersebut. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan oleh sebagian besar pemegang saham untuk mencapai target kinerja perusahaan dan mengawasi perilaku manajer agar tidak terjadi tindak kecurangan, serta meningkatkan tingkat *voluntary disclosure*.

H₁: ukuran komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *voluntary disclosure*

Managerial ownership

Managerial ownership adalah prosentase kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh COE dan dewan direksi, termasuk meraka para pemangku kepentingan (Eng dan Mark, 2003). Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam prinsip teori agency, kepemilikan manajerial dapat mengurangi biaya agency, karena manajer termasuk pemegang saham yang memiliki sebagian saham perusahaan, saham tersebut dapat memberikan konsekuensi dan keuntungan dari manfaat perusahaan. Ketika kepemilikan manajerial rendah, maka kemungkinan terdapat masalah perusahaan yang lebih besar, yaitu manajer mempunyai insentif dalam menerima tunjangan dan insentif dalam memaksimalkan pekerjaan dan kinerjanya (Eng dan Mark., 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Akhtarudin dan Haron (2010), menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan mnejerial yang tinggi dapat mencegah adanya pemberian informasi kepada pihak pesaing. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi menyebabkan rendahnya transparasi informasi terutama pada tingkat *Voluntary disclosure*.

Tingkat *manajerial ownership* yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan insentif manajer dan pemegang saham, dengan demikian perusahaan dapat termotivasi untuk memberikan informasi tambahan secara sukarela (Vu, et al. 2011). Penelitian yang menggunakan proksi manajerial ownership juga dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007),.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat dikembangkan hipotesis:

H₂: managerial ownership berpengaruh signifikan positif terhadap *Voluntary disclosure*

Government ownership

Perusahaan BUMN di China tidak memperdagangkan saham milik perusahaan BUMNnya secara publik, karena kepemilikan perusahaan dimiliki oleh pemerintah, maka tujuan utamanya bukan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, akan tetapi keuntungan yang diperoleh pemerintah (Huafang dan Jianguo, 2007). Pernyataan tersebut didukung oleh Eng dan Mak (2003), dalam penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) juga menyebutkan bahwa perusahaan BUMN mendapatkan dana dari pemerintah sehingga mempunyai akses yang lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan Non-BUMN dalam mencari sumber dana. Berdasarkan pernyataan Eng dan Mak (2003) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh negara, cenderung tidak memaksimalkan keuntungannya dikarenakan perusahaan tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana tambahan dari pemerintah tanpa mementingkan informasi tambahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Vu, et al. (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan BUMN dapat dengan mudah memperoleh dana tambahan dari pemerintah terlepas dari pengungkapan informasi tambahan.

Study di China yang dilakukan oleh Ho dan Taylor (2013), menyebutkan bahwa struktur kepemilikan diharapkan dapat merubah kekuasaan pemangku kepentingan sehubungan dengan berbagai kategori yang ada dalam struktur kepemilikan tersebut, yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan perusahaan. Masalah yang timbul karena adanya kepemilikan negara di China menyebabkan perusahaan yang mempunyai kepemilikan negara yang lebih tinggi, diharapkan dapat mengurangi *Voluntary disclosure*, dengan alasan pemerintah (pemangku kepentingan negara) dapat memperoleh informasi dari pihak internal perusahaan dan diharapkan perusahaan dapat memberikan informasi ekstra untuk pasar saham agar public juga dapat mengetahui perkembangan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat dikembangkan hipotesis:

H₃: governance ownership berpengaruh signifikan negatif terhadap *Voluntary disclosure*

Foreign ownership

Beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara struktur kepemilikan dan pengungkapan perusahaan (Huafang dan Jianguo (2007); Eng dan Mak (2003);

Vu, et al. (2011); Hasan (2013)). Penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007), mengenai pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap *Voluntary disclosure* didasari oleh ruang dan hambatan bahasa, sehingga pemegang saham asing mungkin menghadapi asimetri informasi dalam tingkat lebih tinggi pada perusahaan yang terdaftar dalam bursa China. Pengungkapan sukarela dilakukan agar perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham asing dapat bersaing secara efektif.

Menurut Ho dan Taylor (2013), investor asing yang terdaftar dalam pasar saham China, lembaga keuangan internasional, dan terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan, telah berperilaku sebagai agen pengawas eksternal yang efektif. Perusahaan di China dengan kepemilikan asing cenderung tunduk atau patuh terhadap pegawai eksternal, sehingga perusahaan di China yang memiliki kepemilikan asing mempunyai tingkat *voluntary disclosure* yang relative lebih besar. Penelitian lain yang mengambil kasus pada perusahaan di United Arab Emirates (UAE), menyebutkan bahwa belum ada bukti empiris yang menyebutkan hubungan kepemilikan asing terhadap *voluntary disclosure*. Kehadiran kepemilikan asing sebagai aspek mekanisme pemerintahan dapat diindikasikan menyebabkan meningkatkan tingkat *Voluntary disclosure* di UAE. Peningkatan kepemilikan asing pada perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penyediaan informasi yang berkualitas dan dapat memotivasi managerial untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan *Voluntary disclosure* (Hassan, 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat dikembangkan hipotesis:

H₄: *foreign ownership* berpengaruh signifikan positif terhadap *Voluntary disclosure*

Sizefirm

Sizefirm merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut (Sambirng (2005). Perusahaan-perusahaan besar melakukan kegiatan lebih karena mempunyai sumber daya yang berlebih sehingga membuat dampak yang lebih besar pada masyarakat dan biasanya, memiliki lebih banyak pemegang saham yang mengharuskan perusahaan peduli dengan program-program sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan laporan

tahunan menyediakan sarana efisien untuk berkomunikasi informasi ini (Hackson dan Milne, 1996).

Probahudono et al. (2013) mengadopsi *sizefirm* sebagai factor yang potensial yang dapat menjelaskan hubungan positif dengan resiko pengungkapan. Hal yang sama diungkapkan oleh Haniffa dan Cooke, (2005), yaitu terdapat hubungan positif antara keberadaan social disclosure dengan ukuran perusahaan. Jensen dan Meckling, (1976), menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat *voluntary disclosure* perusahaan dapat di jelaskan melalui teori agenci dimana perusahaan besar juga mempunyai biaya keagenan yang relative lebih besar dari pada perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dalam upaya mengurangi biaya keagenan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat dikembangkan hipotesis:

H₅: *size* berpengaruh signifikan positif terhadap *voluntary disclosure*

Variabel kontrol

Berdasarkan penelitian terdahulu (Vu, et al. (2011); Hackston dan Milne (1996); Hassan (2013); Sembiring (2005); Haniffa dan Cooke, (2005); Probahudono et al. (2013); Meek, et al. 1995; Wardani (2012); dan Amalia (2008)). Terdapat 4 variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Profitabilitas, Tipe industri, Auditor eksternal, Leverage.

III. METODE PENELITIAN

Variabel dependen penelitian ini adalah *Voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela) yang diukur dengan *Voluntary disclosure index* Vu, et al. (2011) dan Meek, et al. 1995. Kedua indek tersebut digabung dan dieliminasi kembali dengan adanya *mandatory disclosure* yang tertuang dalam undang-undang pemerintah. Pengukuran dari variabel dependen ini adalah:

(Insert tabel 1)

$$VDI = b_0 + b_1 komInd_1 + b_2 Man_2 + b_3 Gov_3 + b_4 For_4 + b_5 size_5 + b_6 profit_6 + b_7 industri_7 + b_8 Auditor_8 + b_9 Lev_9$$

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komisaris independen, managerial ownership, governance ownership, *foreign ownership*, *size firm*,

sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas, tipe industri, auditor eksternal, dan leverage. Pengukuran dari variabel independen dan variabel kontrol adalah:

$$\begin{aligned} \text{Ukuran komisaris independen} &= \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \\ \text{Managerial ownership} &= \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang dimiliki perusahaan}} \\ \text{Governance ownership} &= \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang dimiliki perusahaan}} \\ \text{Foreign ownership} &= \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki asing}}{\text{Jumlah saham yang dimiliki perusahaan}} \\ \text{Size firm} &= \text{Log10 asset} \\ \text{Profitabilitas (ROA)} &= \frac{\text{Laba bersih perusahaan}}{\text{Total asset perusahaan}} \\ \text{Tipe Industri} &= \text{Kategorikal 1= high profile, 0 = low profile} \\ \text{Auditor eksternal} &= \text{Kategorikal 1 = big four, 0 = non big four} \\ \text{Leverage} &= \frac{\text{Total utang perusahaan}}{\text{Total asset perusahaan}} \end{aligned}$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

(Insert tabel 3)

Hasil dari statistic deskriptif dengan menggunakan uji ANOVA *post hoc* Tukey (lihat lampiran tabel 3) menjelaskan tentang variabel penjelas pada periode 2009-2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan BUMN dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga jumlah sampel yang terkumpul 135 laporan tahunan perusahaan BUMN. (insert tabel 2)

Hasil penilaian indek *voluntary disclosure* dari masing-masing kategori perusahaan yaitu perusahaan high profile dan low profile, yang tergambar pada lampiran 3 (tabel 3), menunjukkan bahwa perusahaan dengan kategori high profile mempunyai tingkat rata-rata *voluntary disclosure* yang paling tinggi. Hasil tersebut juga ditunjukkan dengan adanya konsistensi dan nilai yang selalu naik dalam tiap tahunnya. Pengungkapan yang

dilakukan oleh perusahaan *lowprofile*, mengalami penilaian yang tidak stabil. Hal tersebut terlihat dari tahun 2009-2010 yang mengalami penurunan namun di tahun 2011 mengalami kenaikan. Meskipun penurunan yang dialami oleh perusahaan low profile tidak lah tinggi namun hal tersebut tetap mempengaruhi suatu penilaian.

Apabila dilihat secara keseluruhan dari waktu ke waktu, tingkat *voluntary disclosure* yang dilakukan oleh kedua kategori perusahaan tersebut mengalami kenaikan dalam tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan BUMN di Indonesia telah menyadari akan pentingnya sebuah *voluntary disclosure*.

Pengujian statistik deskriptif untuk variabel independen menghasilkan rata-rata pada komisaris independen sebesar 0,2179 selama tiga tahun berturut-turut. Hasil penilaian tiap tahun pada variabel komisaris independen mengalami kenaikan dalam periode 2009-2011. *Managerialownership* mengalami penurunan di setiap tahunnya dengan hasil rata-rata 0,0111 dalam 3 periode tersebut. *Governance Ownership* menghasilkan rata-rata sebesar 0,8588 dalam 3 periode dengan hasil tiap tahun yang terus menurun. Meskipun penurunannya tidak begitu besar, namun pengaruh hasil statistic deskriptif tentang *governance ownership* tetap mempengaruhi hasil rata-rata selama 3 periode yaitu 2009-2011. *Foreign ownersip* mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya dengan haasil rata-rata 0,551 dalam 3 periode. Variabel independen yang terakhir adalah *size firm* yang mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 0,9058 selama 3 periode yang diteliti. Profitabilitas, tipe auditor independen, tipe industri, dan leverage adalah variabel kontrol yang berfungsi untuk mengontrol semua variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

Pengujian hipotesis

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai R Square (R_2) sebesar 0,416 dengan *Adjusted R Square* (*Adjusted R₂*) sebesar 0,374. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 37,4% variabel independen dan variabel kontrol mempengaruhi variabel dependen. Sisa dari hasil tersebut sebesar 62,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang ada di luar model.

Nilai F hitung sebesar 9,882 dengan nilai probabilitas 0,000 (*p-value* 0.050). nilai signifikansi yang dihasilkan dalam f hitung tersebut kurang dari 0,050, maka dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari komisaris independen, *managerial ownership*, *governance ownership*, *foreign ownership*, dan *size firm* dan variabel kontrol yang terdiri dari profitabilitas, tipe industri, tipe auditor independen, dan *leverage* secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang berupa *voluntary*

disclosure. Hasil dari uji regresi ini menunjukkan hasil yang baik karena dapat digunakan untuk menilai tingkat *voluntary disclosure* pada perusahaan BUMN di Indonesia.

Hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa Governance Ownership, Leverage, *Size*, dan Tipe industri menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary disclosure*. Variabel independen dan variabel kontrol yang lainnya yaitu komisaris independen, managerial ownership, *foreign ownership*, profitabilitas, dan tipe auditor independen tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*.

Komisaris independen mempunyai p-value 0,174 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien positif sebesar 0,081, sehingga dapat disimpulkan bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hasil uji hipotesis ini tidak sesuai dengan H₂ yang dapat dikatakan bahwa H₂ tidak dapat diterima yang artinya *government ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hasil uji hipotesis ini tidak sesuai dengan H₁ yang dapat dikatakan bahwa H₁ tidak dapat diterima yang artinya ukuran komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary disclosure*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lakhali (2007) yang menyebutkan bahwa terdapat mekanisme lain ketika perusahaan memiliki komisaris independen dalam jumlah yang tinggi dan pegawai yang tinggi pula.

Managerial Ownership mempunyai p-value 0,729 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien negative sebesar 0,063, sehingga dapat disimpulkan bahwa managerial Ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary disclosure*. Hasil uji hipotesis ini tidak sesuai dengan H₂ yang dapat dikatakan bahwa H₂ tidak dapat diterima yang artinya *government ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Menurut Huafang dan Jianguo, (2007) yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *manajerial ownership* tidak berpengaruh signifikan karena kurangnya hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela. Proporsi kepemilikan manajerial terlalu rendah untuk menimbulkan efektifitas untuk manajer senior dalam rangka mengungkapkan informasi tambahan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vu, et al. (2011); Huafang dan Jianguo (2007); dan Akhtarudin dan Haron (2010).

Government ownership mempunyai p-value 0,005 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien negative sebesar 0,270, sehingga dapat disimpulkan bahwa *government ownership* berpengaruh signifikan negative terhadap *Voluntary disclosure*.

Hasil uji hipotesis ini sesuai dengan H_3 yang dapat dikatakan bahwa H_3 diterima, yaitu *government ownership* berpengaruh signifikan negative terhadap *Voluntary disclosure* pada perusahaan BUMN di Indonesia. menurut Vu, et al. (2011), tingkat kepemilikan negara berpengaruh signifikan negative karena biasanya negara telah menunjuk direksi untuk melindungi kekayaan negara dan memenuhi tujuan utama negara. Negara telah mendapatkan memiliki informasi mengenai perusahaan tersebut sehingga pengungkapan informasi termasuk kebutuhan yang tidak mendesak. Disisi lain vu et al. (2011) menyebutkan bahwa tingkat *Voluntary disclosure* di negara berkembang relative rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vu, et al. (2011); Eng dan Mak (2003); Ho dan Taylor (2013).

Foreign ownership mempunyai p-value 0,302 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien negative sebesar 0,136, sehingga dapat disimpulkan bahwa *foreign ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary disclosure*. Hasil uji hipotesis ini tidak sesuai dengan H_4 yang dapat dikatakan bahwa H_4 tidak dapat diterima, yaitu *foreign ownership* berpengaruh signifikan positif terhadap *Voluntary disclosure* pada perusahaan BUMN di Indonesia. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2013). Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan BUMN di Indonesia mendapatkan sumber dana dari pemerintah sehingga tidak perlu mencari keuntungan dari perdagangan saham, termasuk perdagangan saham dengan pihak asing. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh banyak kalangan, yaitu Lakhall (2007); Eng dan Mar (2003); Ho dan Taylor (2013); dan Huafang dan Jianguo (2007).

Size firm mempunyai p-value 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien positif sebesar 0,060, sehingga dapat disimpulkan bahwa *size firm* berpengaruh signifikan positif terhadap *Voluntary disclosure*. Hasil uji hipotesis ini sesuai dengan H_5 yang dapat dikatakan bahwa H_5 dapat diterima yang artinya *size firm* berpengaruh signifikan positif terhadap *Voluntary disclosure*. Hasil ini biasanya dikaitkan oleh dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Menurut Amalia (2008), jika nilai *size firm* meningkat maka akan berdampak pada kenaikan indeks *Internet Financial and Sustainability Reporting (IFSR)* yang berfungsi untuk mengukur pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini maka semakin baik tingkat pengungkapan sukarela

perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meek el al (1995); Wardani (2012); dan Sembiring (2005)

Profitabilitas sebagai variabel kontrol mempunyai p-value 0,627 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien negative sebesar 0,077, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary disclosure*. Tipe industri sebagai variabel kontrol mempunyai p-value 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien positif sebesar 0,074, sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan positif terhadap *Voluntary disclosure*. Auditor eksternal sebagai variabel kontrol mempunyai p-value 0,280 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien negatif sebesar 0,028, sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe auditor independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary disclosure*. Leverage sebagai variabel kontrol mempunyai p-value 0,014 dengan tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien negative sebesar 0,098, sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh signifikan negative terhadap *Voluntary disclosure*.

V. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat pengaruh antara *corporate governance* terhadap *Voluntary disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan BUMN di Indonesia. Harapan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan motivasi kepada perusahaan di Indonesia agar lebih transparan lagi terutama mengenai *Voluntary disclosure*. Penelitian ini menggunakan 45 perusahaan BUMN di Indonesia dengan berbagai sector selama 3 periode yaitu 2009-2011.

Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa ukuran komisaris independen, managerial ownership, *government ownership*, *foreign ownership* dan *size firm*, dengan memakai variabel kontrol yaitu profitabilitas, tipe industri, auditor eksternal dan leverage. Pengukuran variabel dilakukan dengan ANOVA *post hoc* Tukey, dengan jumlah perusahaan 45 dan selama 3 periode.

Hasil dari pengukuran yang dilakukan, menghasilkan *government ownership* dan leverage berpengaruh signifikan negative. *Size firm* dan tipe industri berpengaruh signifikan positif terhadap *Voluntary disclosure* pada perusahaan BUMN di Indonesia. Variabel independen dan variabel kontrol yang lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary disclosure*.

Daftar pustaka

- Akhtaruddin, M., dan Hasnah Haron. 2010. *Board ownership, audit committees' effectiveness, and corporate voluntary disclosures*. www.emeraldinsight.com/1321-7348.htm
- Amalia, Luciana Spica. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela "Internet Financial And Sustainability Reporting"* Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 12 No. 2 Desember 2008
- Binh, Ta Quang. 2012. *Voluntary Disclosure Information in the Annual Reports of Non Financial Listed Companies: The Case of Vietnam*. Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR, 2(2): 69-90 (2012).
- Eng, L.L., dan Y.T.Mak. 2003. *Corporate governance and voluntary disclosure*. Journal of Accounting and Public Policy 22 (2003) 325–345
- Ghozali, imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Nazli Anum Mohd. 2009. *Voluntary Disclosure in Malaysian Corporate Annual Reports*. dari www.mia.org.my/at/at/2009/01/06.pdf 06. (diakses pada 02 juni 2013).
- Govindarajan, V., dan Anthony, R.N. 2001. *Managemen Conrol System*. Jakarta: Salemba Empat
- Hackston, David dan Markus J. Milne. 1996. *Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies*. www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1509110
- Haniffa, R.M., dan T.E.Cooke. 2005. *The impact of culture and governance on corporate social reporting*. Journal of Accounting and Public Policy 24 (2005) 391–430
- Hassan, Mostafa Kamal. 2013. *Corporate Governance Characteristics and Voluntary Disclosure: The Case of UAE Listed Corporations*. The 2013 IBEA, International Conference on Business, Economics, and Accounting.
- Ho, Poh-Ling dan Grantly Taylor. 2013. *Corporate governance and different types of voluntary disclosure Evidence from Malaysian listed firms*. www.emeraldinsight.com/0114-0582.htm
- Huafang, Evidence dan Yuan Jianguo. 2007. *Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure*. www.emeraldinsight.com/0268-6902.htm
- Ismail, Tariq H. dan Nesma M. El-Sahib. 2012. *Impact of market and organizational determinants on voluntary disclosure in Egyptian companies*. www.emeraldinsight.com/2049-372X.htm
- Jensen, Michael C dan Meckling, William H. 1976. *Theory of the Firm: anagerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Lakhal, Faten. 2007. *Voluntary Earnings Disclosures and Corporate Governance: Evidence from France*. Review of Accounting and Finance.
- Meek, Gary K., Clare B Robert dan Sidney J. Gray. 1995. *Faktor influencing voluntary annual report disclosure by U.S., U.K., and continental European*. *Journal of International Business Studies*; Third Quarter 1995; 26, 3; ABI/INFORM Research pg.555
- Myburgh, JE. 2001. *The informativeness of voluntary disclosure in the annual reports of listed industrial companies in South Africa*. *Meditari Accountancy Research* Vol. 9 2001: 199-216
- Ntim, Collins G., et al. 2012. *Voluntary corporate governance disclosures by post-Apartheid South African corporations*. www.emeraldinsight.com/0967-5426.htm
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan

- Prayogi. 2003. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Thesis Universitas Diponegoro.
- Probohudono, A.N., Tower, G. dan Rusmin, R. 2013. *Risk Disclosure During The Global Financial Crisis*. Social Responsibility Journal.
- Rahayu, Sovi Ismawati. 2008. *Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib Dan Luas Pengungkapan Sukarela Terhadap Kualitas Laba (Studi Pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur)*. Jurnal SNA XI.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Bisnis*. Buku 1 dan 2 edisi 4. Jakarta: salemba empat
- Sembering, Eddy Rismanda. 2005. *Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal SNA VIII 2005.
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Vu, Anh Kelly., Greg Tower dan Glennda Scully. 2011. *Corporate communication for Vietnamese listed firms*. www.emeraldinsight.com/1321-7348.htm

Daftar lampiran

Tabel 1 *Voluntary disclosure index*

No	<i>Voluntary disclosure index</i>
1.	Pembahasan dampak dari strategi hasil saat ini dan/atau masa depan
2.	Pernyataan strategi dan tujuan-umum dan marketing
3.	Gambar produk utama
4.	Pembahasan perkembangan produk masa depan
5.	Diskusi tentang keamanan produk
6.	geografis produksi kuantitatif
7.	lini bisnis produksi kuantitatif
8.	Diskusi umum tentang tren industri (masa lalu dan masa mendatang)
9.	Asumsi yang mendasari perkiraan industri
10.	Diskusi faktor eksternal yang mempengaruhi masa depan perusahaan (ekonomi, politik dan teknologi)
11.	Tingkat pengembalian proyek-proyek yang diharapkan
12.	Output fisik dan utilisasi kapasitas
13.	Diskusi kegiatan penelitian dan pengembangan
14.	kebijakan perusahaan pada penelitian dan pengembangan
15.	Nomor yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan
16.	sejarah singkat perusahaan
17.	alasan untuk akuisisi dan pelepasan perusahaan
18.	gearing ratio (DER=hutang /modal)
19.	Return on equity ratio
20.	Rasio return on modal kerja (Modal kerja sendiri/total aktiva)
21.	Rasio lain yang tidak wajib
22.	Rasio arus kas
23.	rasio likuiditas
24.	rasio nilai tambah
25.	analisis pesaing
26.	Analisis pasar saham
27.	Volume saham yang diperdagangkan (trend dan/atau akhir tahun)
28.	Informasi harga saham (trend dan/atau akhir tahun)
29.	ukuran kepemilikan saham
30.	jenis pemegang saham
31.	Kapitalisasi pasar (trend dan/atau akhir tahun)
32.	perdagangan periode berjalan hasil kualitatif dan/atau kualitatif
33.	sejarah keuangan atau ringkasan (enam tahun atau lebih)
34.	Diskusi tentang efek tingkat suku bunga pada hasil saat ini
35.	Diskusi eksposur mata uang asing untuk kegiatan perusahaan oleh manajer
36.	Kurs utama digunakan dalam rekening
37.	Mata uang utang jangka pendek dan jangka panjang
38.	Diskusi dampak mata uang asing pada hasil saat ini dan kegiatan operasi masa depan
39.	indeks (harga jual atau penjualan kuantitas atau harga bahan baku)
40.	Breakdown dan analisis beban usaha dan administrasi
41.	Breakdown dan analisis penjualan dan pendapatan
42.	Breakdown dan analisis beban usaha menjadi tetap atau variabel
43.	Pembahasan pengeluaran modal dimasa depan
44.	Pembahasan dampak inflasi pada hasil saat ini dan/atau kegiatan operasi masa depan
45.	dampak dari inflasi terhadap aset-kualitatif dan/atau kuantitatif
46.	Diskusi periklanan, kegiatan pemasaran – kualitatif dan/atau kuantitatif
47.	perkiraan penjualan – kualitatif dan/atau kuantitatif
48.	Perkiraan keuntungan – kualitatif dan/atau kuantitatif
49.	Perkiraan arus kas – kualitatif dan/atau kuantitatif
50.	Partisipasi dalam kampanye sosial pemerintah
51.	Pernyataan kebijakan lingkungan perusahaan
52.	Gambar direksi / tim manajemen senior
53.	usia direksi

54.	Pengalaman komersial direktur eksekutif
55.	Penghargaan karyawan
56.	Gambar kesejahteraan karyawan
57.	Kategori karyawan berdasarkan gender
58.	Alasan perubahan jumlah karyawan atau kategori
59.	Sifat pelatihan
60.	Jumlah yang dibelanjakan untuk pelatihan
61.	Jumlah karyawan dilatih
62.	Diskusi keselamatan kerja (biaya dan pengukuran)
63.	Data kecelakaan
64.	masalah rekrutmen dan kebijakan terkait
65.	Penghematan / redundansi informasi umum

Indeks *voluntary disclosure* diatas ini diambil dari jurnal Vu, et al. 2011 dan Meek et al. 2003 yang sudah melalui proses eliminasi *mantory rules* dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Coeporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari 14 bab dan 46 pasal
2. Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indicator Atau Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Corporate Governance) pada Badan Umum Milik Negara yang terdiri dari 151 indikator
3. Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek Menteri Keuangan Republik Indonesia
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republic Indonesia Nomor: 525/MPP/XI/1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republic Indonesia
7. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

Tabel 2 Perusahaan yang dipakai

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (perkebunan)	
1.	PT Perkebunan Nusantara 3
2.	PT Perkebunan Nusantara 6
3.	PT Perkebunan Nusantara 7
Pertambangan dan Penggalian	
4.	PT Aneka Tambang (persero)
5.	PT Bukit Asam
6.	PT Timah
Industri	
7.	PT Indo Farma (persero)
8.	PT kimia Farma
9.	PT Krakatau Steel
10.	PT LEN Industri
11.	PT Pupuk Sriwijaya
12.	PT Semen Indonesia
13.	PT Semen baturaja
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (Energi)	
14.	PT Gas Negara
15.	PT Listrik Negara
Konstruksi	
16.	PT Adhi Karya (persero) tbk
17.	PT Hutama Karya (persero)

18.	PT Pembangunan Perumahan
19.	PT Wijaya Karya
20.	PT Waskita Karya
21.	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)
Transportasi dan Pergudangan	
22.	PT Angkasa Pura 1
23.	PT Angkasa pura 2
24.	PT Garuda Indonesia
25.	PT Jasa Marga
26.	PT Pelabuhan Indonesia I
27.	PT Pelabuhan Indonesia II
28.	PT Pelabuhan Indonesia III
Informasi dan Komunikasi	
29.	PT Telekomunikasi Indonesia
Jasa Keuangan dan Asuransi	
30.	Bank Negara Indonesia
31.	Bank Mandiri
32.	Bank Rakyat Indonesia
33.	Bank Tabungan Negara
34.	Perum Jaminan Kredit Umum Indonesia
35.	PT Kliring berjangka indonesia
36.	PT Pegadaian
37.	PT Permodalan Nasional Madani
38.	PT Perusahaan Pengelola Aset
39.	PT Sarana Multi Infrastruktur
40.	PT Asuransi Jasa Indonesia
41.	PT Asuransi Jiwasraya
42.	PT Asuransi kesehatan (ASKES) persero
43.	PT Jaminan Social Tenaga Kerja
Real Estate	
44.	PT Bali Tourism & Development Corporation (Persero)
Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	
45.	PT Surveyor Indonesia (2009-2011)

Tabel 3 statistik deskriptif *voluntary disclosure*

Kategori	n	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
High Profile	25	0,5431	0,5900	0,6146
Low Profile	20	0,5114	0,4948	0,5446
Total	135	0,5255	0,5371	0,5757

Tabel 4 perbandingan antar variabel

Variabel	n	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Komisaris Independen	135	0,2069	0,2070	0,2399
Managerial Ownership	135	0,0176	0,0079	0,0079
Governance Ownership	135	0,8669	0,8566	0,8528
<i>Foreign ownership</i>	135	0,0452	0,0570	0,0632
<i>Size</i>	135	12,8307	12,9125	12,9744
Profitabilitas	135	0,0773	0,0777	0,0813
Tipe Auditor independen	135	0,3300	0,3300	0,3300
Leverage	135	0,5338	0,5414	0,5338

Tabel 5

Variabel	Koefisien	t	p-value
(Constant)	0,033	0,145	0,885
Komisaris Ind	0,81	1,368	0,174
Man ownership	-0,063	-0,347	0,729
Gov own	-0,270	-2,826	0,005
For own	-0,136	-1,037	0,302
Size	0,060	3,651	0,000
Provit	-0,077	-0,487	0,627
Lev	-0,098	-2,495	2,014
Auditor*	-0,028	-1,086	0,280
Tipe industri*	0,074	3,770	0,000
R Square	0,416		
Adjusted R Square	0,374		
F	9.882		
Sig	.000 ^a		

*pengukuran kategorikal

Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Jenis KAP terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan: *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perbankan Yang Terdaftar Di Bei)

**Retnia Wulandari
Djuminah
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Abstract

The aim of study was to examine the effect of ownership structure (concentrated ownership and dispersed ownership), and type of audit firm to compliance level of mandatory financial risk disclosure. This study also examined corporate governance as a moderating variable in relation of ownership structure and type of audit firm to compliance level of mandatory financial risk disclosure.

Sample of the study was taken by purposive sampling method from annual report of banking industry that listed in Indonesian Stock Exchange in period 2010-2011. The statistics methods used here were multiple linier regressions. Compliance level of mandatory financial risk disclosure and corporate governance variable was taken by disclosure index study. We developed checklist item of financial risk disclosure and good corporate governance in Indonesian context from mandatory government rules and accounting standards (PSAK 50 Revisi 2006 before IFRS).

Result showed that average compliance level of mandatory financial risk disclosure was 74,60%. Average score of corporate governance index was 68,45%. Regression found no correlation between concentrated ownership to mandatory financial risk disclosure. Dispersed ownership and type of audit firm had positive correlation to compliance level of mandatory financial risk disclosure. The study also found that corporate governance as moderating variable in relation of ownership structure and type of audit firm to compliance level of mandatory financial risk disclosure.

This research contributed in giving reference of financial risk disclosure and corporate governance's study. Result of research was expected to improve the understanding about financial risk disclosure especially on risk taking entities such as banking industry. Implementation of good corporate governance and understanding of financial risk disclosure can prevent the recurrence of global financial crises.

Keywords: corporate governance, mandatory financial risk disclosure, ownership structure

A. PENDAHULUAN

Keberadaan risiko merupakan suatu implikasi tak terhindarkan dalam suatu bisnis. Pengungkapan risiko yang memadai diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam pengambilan keputusan. Terlebih bagi industri dengan kecenderungan risiko tinggi seperti perbankan. Karakteristik ketidakpastian dalam instrumen keuangan yang dominan dimiliki perbankan harus diimbangi melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Berbagai kasus jatuhnya perusahaan-perusahaan besar dunia mengindikasikan pentingnya pelaksanaan *good corporate governance* (GCG). Runtuhnya *Enron Corporation* pada tahun 2001 serta pembubaran *Arthur Andersen* selanjutnya menjadi pembelajaran (Adekunle dan Taiwo, 2013). Sebelumnya, krisis yang terjadi di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia pada tahun 1997/1998 telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesempatan investasi (Lemmon dan Lins, 2003). Menurut Oorschot (2009) meskipun perbankan merupakan *risk taking entities*, perhatian terhadap pengungkapan risiko perbankan meningkat seiring dengan krisis keuangan yang terjadi.

Penerapan GCG pada industri perbankan memerlukan perhatian tersendiri, karena karakter dan kompleksitas industri perbankan yang berbeda dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang tidak sepadan (*mismatched*), tidak hati-hati (*prudent*), tidak transparan, dan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan jatuhnya beberapa bank (Effendi, 2009). Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 serta Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-134/BL/2006, setiap bank diwajibkan untuk melakukan pengungkapan atas risiko keuangan. Pengungkapan ini bersifat wajib atau disebut *mandatory disclosure*. Namun meski telah dipersyaratkan, masih banyak bank yang belum mengungkapkan secara penuh risiko keuangan yang dimiliki.

Penelitian terkait tingkat kepatuhan pengungkapan risiko keuangan serta implementasi GCG menjadi penting, terlebih bagi industri dengan risiko tinggi seperti perbankan. Hasil penelitian terkait topik tersebut dapat memberikan gambaran faktual dan representatif dalam pengambilan keputusan maupun pembenahan kebijakan terkait bagi *stakeholder* dan pemerintah.

Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan perbankan pada tahun 2007-2009 di Indonesia baru mencapai 46,50% (Suhardjanto dan Dewi, 2011). Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan perbankan di Indonesia dikategorikan masih rendah. Tingkat pengungkapan informasi risiko pada perusahaan di Malaysia juga tercatat masih rendah (Amran *et al.*, 2009), Selain itu, tingkat pengungkapan di negara Ghana juga rendah (Tsamenyi, *et al.*, 2007).

Menelisik lebih jauh, tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan terkait dengan dua hal, yaitu pengendalian dan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dan pengendalian menjadi dua hal penting terkait dengan asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Beberapa penelitian telah meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan (Berle dan Means, 1932, Craswell dan Taylor, 1992, Hossain *et al.*, 1994, Ho dan Wong, 2001, Haniffa dan Cooke, 2002, Barako, 2007, Mitra *et al.*, 2012, serta Fathi, 2013). Karakteristik struktur kepemilikan perusahaan merupakan determinan praktik *corporate governance* yang secara bertahap mempengaruhi pengambilan keputusan permasalahan pengendalian internal serta kualitas informasi keuangan yang dihasilkan (Mitra *et al.*, 2012).

Kajian terkait struktur kepemilikan diawali atas pengkajian konflik kepentingan antara pihak manajerial dengan pemegang saham atau prinsipal (Berle dan Means, 1932). Setelah itu, arah kajian berkembang pada pengkajian atas konflik antara pemegang saham

mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam konsentrasi kepemilikan (La Porta, *et al.*, 1999).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Taylor, Tower, Zahn dan Neilson (2008) pada perusahaan sumber daya alam di Australia. Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa karakteristik *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pengungkapan risiko instrumen keuangan. Terdapat hubungan positif antara pengungkapan risiko instrumen keuangan yang dimiliki dengan kekuatan struktur *corporate governance*, dan variabel kontrol seperti *leverage*, ukuran perusahaan serta industri.

Penulis mengembangkan beberapa variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen struktur kepemilikan yang direpresentasikan melalui variabel kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Mekanisme *monitoring* yang direpresentasikan melalui jenis kantor akuntan publik (KAP) juga menjadi variabel independen dalam penelitian. Meskipun pengungkapan informasi keuangan menjadi tanggung jawab direksi, namun keberadaan audit eksternal secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah informasi yang diungkapkan (Fathi, 2013). Perusahaan audit *Big Four* memiliki insentif yang kuat untuk menjaga independensi mereka dan cenderung mempersyaratkan standar pengungkapan yang lebih ketat guna menjaga reputasi mereka. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh *corporate governance* sebagai variabel moderasi hubungan struktur kepemilikan dan jenis KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Sampel penelitian menggunakan data industri perbankan selama dua periode (2010-2011) dengan kriteria sampel yang berfokus pada perbankan yang menerapkan PSAK 50 revisi 2006 (sebelum IFRS). Metode *disclosure index study* digunakan dalam menentukan

variabel tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan serta variabel *corporate governance*. Amran *et al.* (2009) menyebutkan penelitian terkait pengungkapan risiko keuangan sebaiknya dilakukan lebih mendalam dengan mengidentifikasi beberapa variabel yang berbeda. Pengembangan *checklist* pengukuran risiko keuangan secara lokal akan memudahkan peneliti dalam memahami temuan dalam konteks lokal.

B. RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Rerangka Teoritis

Mandatory Financial Risk Disclosure

Pengertian risiko memiliki dua konteks pengertian, baik secara positif maupun negatif. Dalam konteks negatif, risiko diartikan sebagai kemungkinan akan kehilangan maupun berkurangnya keuntungan atau sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan secara positif, risiko dapat diartikan imbal balik yang secara bersama-sama didapatkan sebagai implikasi suatu kesempatan positif maupun sebagai penghargaan (ICAEW, 2011).

Dalam konteks pengungkapan wajib risiko keuangan, pengertian umumnya mengarah pada pengertian risiko dalam konteks negatif. Risiko merupakan elemen tak terhindarkan dari setiap usaha (Amran *et al.*, 2009). Selain risiko keuangan, perusahaan juga rentan terhadap risiko bisnis atau perubahan iklim ekonomi secara keseluruhan yang dapat merugikan/ mempengaruhi harga sekuritas. Penerapan manajemen risiko serta pengungkapan risiko keuangan merupakan hal wajib yang dipersyaratkan bagi perbankan di Indonesia (*mandatory disclosure*).

Pada tahun 2009, Bank Indonesia melakukan pembaharuan peraturan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi

Bank Umum. Lebih lanjut, perusahaan publik juga diwajibkan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Pengungkapan wajib risiko keuangan diinterpretasikan melalui penerapan PSAK 50 Revisi 2006: Instrumen Keuangan- Penyajian dan Pengungkapan.

Terjadinya krisis keuangan pada negara-negara Eropa maupun Asia tidak terlepas atas kegagalan identifikasi penilaian risiko. Berdasarkan *Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience* dalam ICAEW (2011) terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya krisis tersebut:

1. Sebelum krisis, terdapat sebuah kecenderungan global atas premi risiko yang dan ekspektasi yang rendah terhadap volatilitas.
2. Bank mengambil keputusan yang salah dalam menilai likuiditas dan risiko terkonsentrasi yang pada umumnya akan muncul pada kondisi ekonomi.
3. Bank mengambil keputusan yang salah dalam menilai risiko yang ditimbulkan dari komitmen eksplisit dan implisit (pendanaan *off balance sheet* dan instrumen keuangan lainnya).
4. Bank mengambil keputusan yang salah dalam menilai tingkat risiko pinjaman rumah tangga dan pinjaman bisnis.

Corporate governance

Corporate governance diartikan sebagai seperangkat mekanisme untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dimana terdapat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (Larcker *et al.*, 2007). Asas GCG terdiri atas beberapa komponen yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (KNKG, 2006). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sejumlah penelitian menemukan *corporate governance* merupakan determinan pada pola pengungkapan risiko instrumen keuangan. Taylor *et al.* (2008), Suhardjanto dan Dewi (2011) menemukan hubungan yang positif antara struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan risiko instrumen keuangan. Siagian *et al.* (2005) dan Barako (2007) menemukan praktik GCG merupakan determinan dalam pengungkapan informasi baik pada level *mandatory* maupun *voluntary disclosure*. Rachagan (2010) menambahkan praktik *good corporate governance* merupakan elemen penting bagi kesehatan ekonomi perusahaan dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terlihat pasca krisis keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1997/1998.

Teori Agensi

Konsep teori agensi berkaitan dengan pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Teori agensi timbul karena adanya hubungan keagenan (suatu kontrak di mana satu orang atau lebih sebagai pemilik/ prinsipal melibatkan orang lain/ agen untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pada hubungan tersebut kemudian terjadi pendelegasian otoritas prinsipal kepada agen dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Pihak prinsipal (pemilik) memiliki kepentingan dalam perusahaan yang dikelola oleh agen. Pemilik memerlukan informasi perusahaan sebagai sarana pengawasan. Terdapat tiga terkait dengan biaya dalam teori agensi, yaitu:

1. *The monitoring expenditures by principal.*
2. *The bonding expenditures by the agent.*
3. *The residual cost.*

Asimetri informasi dapat timbul di tengah konflik kepentingan antara manajer dan prinsipal (Berle dan Means, 1932). Agar tidak terjadi asimetri informasi antara prinsipal dan agen maka diperlukan mekanisme *good corporate governance*. Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa asimetri informasi dan permasalahan dengan

agen menyebabkan permintaan pengungkapan oleh investor dari luar kepada manajemen. Dalam konteks perbankan, manajer bank akan memiliki lebih banyak informasi tentang risiko yang akan mempengaruhi hasil di masa depan. Sehingga pengungkapan lebih tentang risiko akan mengurangi asimetri informasi. Ali *et al.* (2007) menjelaskan bahwa pengungkapan merupakan sarana dalam mengurangi asimetri informasi dan seharusnya dapat mengurangi konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi didefinisikan sebagai kepemilikan apabila sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan yang lainnya (Dallas, 2004 dalam Shinta dan Ahmar, 2011). Kepemilikan terkonsentrasi ditandai dengan adanya pengendalian oleh pemilik, pasar modal yang lemah, kendali *private benefit* yang tinggi, tingkat pengungkapan dan standar transparansi pasar yang rendah, dengan hanya ada peran sederhana yang dimainkan oleh pasar dalam pengendalian perusahaan (Coffee, 2001). Selain itu, kepemilikan terkonsentrasi teridentifikasi juga terjadi pada negara-negara dengan perlindungan hukum yang lemah (Bebchuk, 1999).

Kepemilikan Menyebar

Kepemilikan menyebar merupakan kepemilikan saham yang secara relatif merata pada publik, tidak ada pihak yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya (Dallas, 2004 dalam Shinta dan Ahmar, 2011). Kepemilikan menyebar ditandai dengan adanya pasar modal yang kuat, standar pengungkapan yang ketat, dan transparansi pasar yang tinggi, di mana pasar menjadi mekanisme dalam pengendalian perusahaan (Coffee, 2001).

Karakteristik kepemilikan menyebar juga dikaitkan dengan situasi yang ideal. Ali, *et al.*, (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan kepatuhan pengungkapan yang baik tidak dikendalikan oleh kepemilikan keluarga, namun memiliki karakteristik kepemilikan menyebar dan adanya investor institusional.

2. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

Konsentrasi kepemilikan yang tinggi menyebabkan pemegang saham pengendali memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam mengungkapkan informasi. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham yang terkonsentrasi cenderung memperoleh manfaat tertutup yang tidak didapatkan oleh pemegang saham lain (Barclay *et al.*, 1993). Fathi (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung kurang mengungkapkan informasi secara memadai. Mereka cenderung mengungkapkan informasi secara terbatas.

Ali *et al.* (2007) menemukan terdapat hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan dan kualitas pengungkapan. Pengawasan oleh pemilik yang terkonsentrasi akan efektif apabila kepentingan pemilik tersebut konsisten dengan pemilik yang lainnya dan pemilik tersebut independen dari kepentingan manajemen (Pergola dan Verreault, 2009). Sebaliknya, apabila kepemilikan terkonsentrasi yang tidak selaras dengan pemilik lainnya maka akan cenderung merugikan bagi kepentingan pemilik lainnya.

Penelitian Wawo (2010) menunjukkan konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh negatif terhadap daya informasi akuntansi. Fan dan Wong (2002) menemukan hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan pada *voting right* terhadap daya informasi laba. Selain itu, Ali *et al.* (2007) menemukan hubungan

negatif dan signifikan antara kualitas pengungkapan dan konsentrasi kepemilikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₁: Kepemilikan Terkonsentrasi Berpengaruh Negatif terhadap Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

Pengaruh Kepemilikan Menyebar terhadap Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif keberadaan kepemilikan menyebar terhadap pengungkapan informasi. Ali *et al.* (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan kepatuhan pengungkapan yang baik tidak dikendalikan oleh kepemilikan keluarga, namun memiliki karakteristik kepemilikan menyebar dan adanya investor institusional. Labelle dan Schatt (2005) menggunakan sampel 90 perusahaan yang tercatat pada bursa efek di Perancis, menemukan bahwa kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan meningkat ketika kepemilikannya menyebar (proporsi saham yang dimiliki oleh publik cenderung tinggi).

Hal tersebut selaras dengan analisis Jensen dan Meckling (1976) terkait teori agensi yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi oleh pemegang saham minoritas akan meningkatkan biaya agensi yang timbul atas adanya asimetri informasi. Kepemilikan menyebar meningkatkan biaya agensi dan secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pengungkapan (Ali *et al.*, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₂: Kepemilikan Menyebar Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

Pengaruh Jenis KAP terhadap Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

Meskipun pengungkapan informasi keuangan menjadi tanggung jawab direksi, namun keberadaan audit eksternal secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah informasi yang diungkapkan (Fathi, 2013). Perusahaan audit *Big Four* memiliki insentif yang kuat untuk menjaga independensi mereka dan cenderung mempersyaratkan standar pengungkapan yang lebih ketat. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga reputasi mereka. Dewayanto (2010) menemukan mekanisme pemantauan pengungkapan melalui auditor eksternal (*Big Four*) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Singhvi dan Desai (1971), DeAngelo (1981), Craswell dan Taylor (1992), Inchausti (1997), Xiao *et al.*, (2004), Matoussi dan Chakroun (2008), serta Fathi (2013) menunjukkan hubungan yang positif signifikan antara jenis KAP terhadap praktik pengungkapan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₃: Jenis KAP Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

***Corporate Governance* Memoderasi Hubungan Struktur Kepemilikan dan Jenis KAP terhadap Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan**

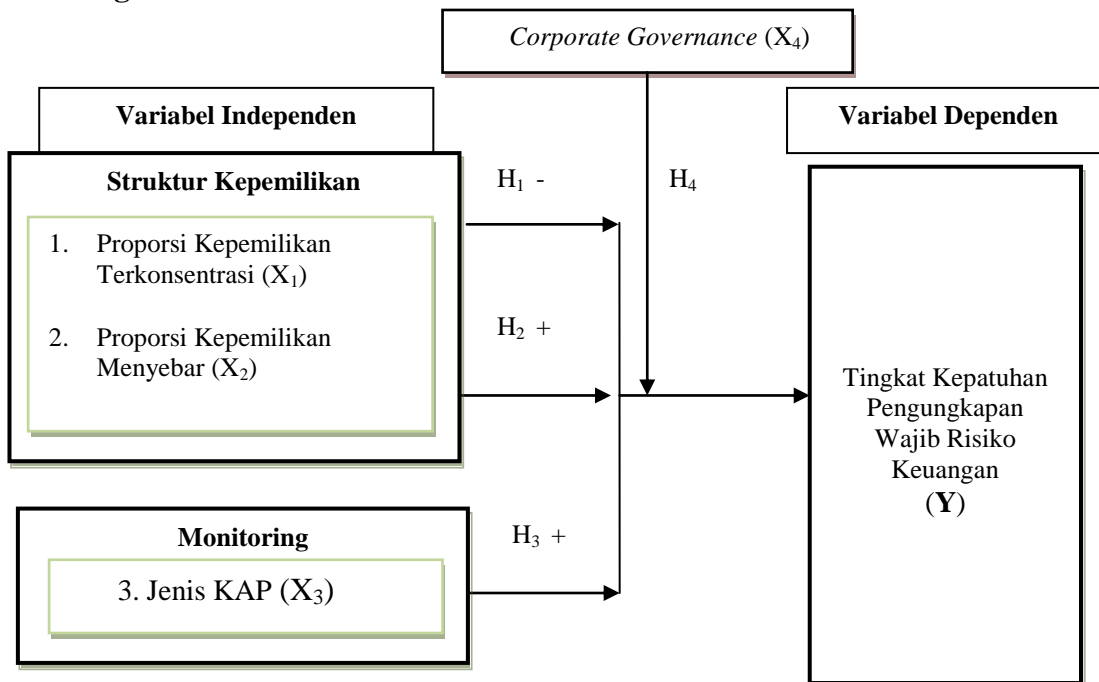
Taylor *et al.* (2008) menemukan bahwa *corporate governance* merupakan determinan pada pola pengungkapan risiko instrumen keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan risiko instrumen keuangan. Siagian, *et al.* (2005) menemukan hubungan interdependensi antara praktik *corporate governance*, kualitas pengungkapan, serta nilai perusahaan. Chau dan Gray (2002) menemukan hubungan

positif antara praktik *corporate governance* dan tingkat pengungkapan pada sampel laporan keuangan perusahaan Hongkong dan Singapura.

Karakteristik struktur kepemilikan pada sebuah perusahaan diyakini mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan. Penelitian Barako (2007) menunjukkan bahwa pengungkapan pada segala jenis informasi dipengaruhi oleh atribut *corporate governance*, struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₄: *Corporate governance* Memoderasi Hubungan antara Struktur Kepemilikan dan Jenis KAP dengan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

Kerangka Pemikiran Penelitian



C. METODE Riset

1. Metode Seleksi dan Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan sampel populasi perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2011. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang tercantum pada laporan tahunan (*annual report*) yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id dan *website* perusahaan. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI selama periode 2010-2011.
- Menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara berturut-turut selama periode 2010-2011.
- Menerapkan PSAK 50 Revisi 2006 dalam pengungkapan wajib risiko keuangannya.

2. Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Mandatory Financial Risk Disclosure

Mandatory Financial Risk Disclosure (tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan) merupakan variabel dependen dalam penelitian. Pengukuran tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan menggunakan metode *disclosure index study*. Klasifikasi pengungkapan wajib risiko keuangan yang digunakan dalam penelitian mengacu pada PBI 11/25/PBI/2009, PSAK 50 (Revisi 2006), dan P3KKEPPBANK (2008). Persamaan untuk menghitung tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan adalah sebagai berikut:

$$DScore_{BY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n SCORE_{iBY}$$

Keterangan:

$DSCORE_{BY}$ = Skor pengungkapan bank B tahun Y

MAX_{BY} = Kemungkinan skor maksimum bank B tahun Y

i = Item pada rerangka pengungkapan

$SCORE_{BY}$ = Skor item pada bank B tahun Y

Skor pengungkapan dapat dihitung dengan menggunakan rumus dan membagi jumlah skor item bank B dengan jumlah skor maksimum yang dapat didapatkan bank B. Hasilnya direpresentasikan dengan angka 1 dan 0. Selanjutnya berdasarkan *score*, kemudian dihitung persentase tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan untuk masing-masing bank. Model *scoring* ini juga digunakan pada penelitian Oorschot (2009) dan penelitian Suhardjanto dan Dewi (2011).

Kepemilikan Terkonsentrasi

Penelitian sebelumnya oleh Nekhli dan Fakhfakh (2005), Bouri dan Khlifi (2007), serta Matoussi dan Chakoun (2008) mengidentifikasi kepemilikan terkonsentrasi melalui persentase kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham yang dinilai paling penting bagi perusahaan. Variabel kepemilikan terkonsentrasi diukur melalui persentase kepemilikan saham terbesar.

$CONC = \text{presentase kepemilikan saham terbesar}$

Kepemilikan Menyebar

Jacoby dan Zheng (2010) mengidentifikasi kepemilikan menyebar melalui dua dimensi, yaitu jumlah pemegang saham dan kepemilikan *block*. Mereka mengkategorikan kepemilikan menyebar melalui persentase kepemilikan dengan

pisah batas sebesar 5%. Penelitian Shinta dan Ahmar (2011) menggunakan variabel kepemilikan masyarakat umum dengan pisah batas 5%.

$$\text{DISP} = \text{presentase kepemilikan saham} < 5 \%$$

Jenis KAP

Variabel jenis KAP direpresentasikan melalui audit oleh *Big Four* dan *Non-Big Four*. Indikator kualitas auditor diukur dengan variabel *dummy* yaitu skor 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh *Big Four* dan skor 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh *Non-Big Four* (Al-Mutawaa dan Hewaidy, 2010). KAP *Big Four* yaitu Deloitte Touche Tohmatsu, PWC (PricewaterhouseCoopers), Ernst & Young dan KPMG (*Klynveld Peat Main Goerdeler*).

$$\text{KAP Big Four} = 1; \text{KAP Non-Big Four} = 0$$

Good Corporate Governance

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah penerapan *corporate governance*. *Disclosure index study good corporate governance* merujuk pada Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 117/M/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Pedoman Umum *Corporate governance* Indonesia (KNKG, 2006), Laporan *Corporate Governance Perception Index*, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003. Pengukuran variabel *Corporate Governance Index* (CGI) mengacu pada penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007) sebagai berikut:

$$CGI = \frac{\text{Total skor item yang diungkapkan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkapkan}}$$

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis regresi berganda melalui SPSS 16. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{FINDISC} = \beta_0 + \beta_1 \text{CONC} + \beta_2 \text{DISP} + \beta_3 \text{KAP} + \varepsilon \dots \text{Persamaan (1)}$$

Keterangan:

FINDISC = *Mandatory Financial Risk Disclosure*

CONC = Kepemilikan Terkonsentrasi

DISP = Kepemilikan Menyebar

KAP = Jenis KAP

β = Koefisien Regresi

ε = Error

Penelitian ini menggunakan pengujian analisis residual dalam menguji variabel moderasi *corporate governance*. Analisis residual bertujuan untuk menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. Fokusnya adalah ketidakcocokan (*lack of fit*) yang dihasilkan dari deviasi hubungan linear antara

variabel independen. *Lack of fit* ditunjukkan oleh nilai residual di dalam regresi. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai b_1 yang signifikan dan negatif (Ghozali, 2006). Persamaan dalam penelitian untuk menguji variabel moderasi adalah sebagai berikut:

$$|e| = \beta_0 + \beta_1 \text{FINDISC} \quad \text{Persamaan 2.2}$$

Keterangan:

FINDISC = *Mandatory Financial Risk Disclosure*

CONC = Kepemilikan Terkonsentrasi

DISP = Kepemilikan Menyebar

KAP = Jenis Kantor Akuntan Publik

CGI = *Corporate Governance Index*

β = Koefisien Regresi

e = Nilai Absolut Residual Persamaan 2.1

D. HASIL

1. Deskriptif Data

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, terkumpul sejumlah 62 sampel dari data 31 perbankan selama dua periode (2010-2011).

-Tabel 1. Statistik Deskriptif-

Variabel proporsi kepemilikan terkonsentrasi (CONC) memiliki rata-rata sebesar 59,90% dengan standar deviasi sebesar 0,2037911. Persentase tertinggi sebesar 100% dan terendah sebesar 15,42% yang dicapai masing-masing oleh Bank

Mutiara Tbk dan Bank Artha Graha Internasional Tbk. Variabel proporsi kepemilikan menyebar (DISP) memiliki rata-rata sebesar 20,09% dengan standar deviasi sebesar 0,1584132. Persentase tertinggi sebesar 49,91% dan terendah sebesar 0,00% yang dicapai masing-masing oleh Bank Central Asia Tbk dan Bank Mutiara Tbk.

Dari 62 sampel perusahaan perbankan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan (FINDISC) memiliki rata-rata sebesar 74,60% dengan standar deviasi sebesar 0,965376. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan terendah sebesar 54,70% oleh Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan tertinggi oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan persentase sejumlah 91,95%. Variabel *corporate governance* (CGI) merupakan variabel moderasi yang merepresentasikan tingkat penerapan GCG. Tingkat kepatuhan penerapan *corporate governance* rata-rata mencapai 68,45% dengan standar deviasi sebesar 0,1473337, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 88,80% oleh Bank Internasional Indonesia Tbk dan nilai minimum sebesar 31,20% oleh Bank Mayapada Tbk.

-Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel *Dummy*-

Pada tahun 2010 terdapat 20 bank atau sejumlah 64,52% yang diaudit oleh KAP *Big Four*, dan 11 bank atau sejumlah 35,48% yang diaudit oleh KAP *Non-Big Four*. Pada tahun 2011 terdapat 22 bank atau sejumlah 70,97% yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan 9 bank atau sejumlah 29,03% yang diaudit oleh KAP *Non-Big Four*.

2. Uji Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data yang digunakan dalam penelitian, dilakukan beberapa pengujian. Uji asumsi klasik dilakukan melalui serangkaian pengujian multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas.

Uji Normalitas

Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,785 dan tingkat signifikansi sebesar 0,569. Tingkat signifikansi pada uji normalitas tersebut lebih dari 0,05 maka berarti asumsi normalitas terpenuhi, dapat diartikan bahwa data residual berdistribusi normal.

-Tabel 3. Hasil Uji Normalitas-

Uji Multikolonieritas

Hasil perhitungan nilai *tolerance* dari model regresi menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 (10%). Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

-Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas-

Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan *runs test* memperlihatkan tingkat signifikansi sebesar 0,200 (lebih dari 0,05). Atas hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi random atau berarti tidak mengandung autokorelasi.

-Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi-

Uji Heteroskedastisitas

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

-Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas-

3. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dalam melakukan pengujian terhadap hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Persamaan regresi yang diperoleh $Y = 0,653 + 0,001 X_1 + 0,193 X_2 + 0,080 X_3$. Pada tabel 4.7 dapat dilihat koefisien determinasi melalui besarnya nilai *adjusted R square* sebesar 0,212. Hal ini berarti bahwa 21,20% tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan/*mandatory financial risk disclosure* dapat dijelaskan oleh variabel independen kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan menyebar dan jenis KAP, sisanya sebesar 79,80% dijelaskan oleh faktor lain diluar model. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kedua variabel independen memiliki kontribusi secara bersama-sama atas pengaruhnya pada *mandatory financial risk disclosure* 21,20%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

-Tabel 6. Hasil Regresi Persamaan Pertama-

Nilai F statistik menunjukkan nilai 6,457 dengan p sebesar 0,001. Dilihat dari $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Selain itu F statistik memiliki nilai sebesar 6,457 (lebih besar dari 4,000), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi menunjukkan tingkatan yang baik (*good overall model fit*) (Ghozali, 2006). Variabel kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan menyebar dan jenis KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan risiko keuangan. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda tersebut, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Pengujian atas hipotesis pertama yaitu: “kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko

keuangan” dilakukan melalui analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda memperlihatkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi (CONC) menghasilkan nilai t sebesar 0,008 dengan p sebesar 0,994, $p > 0,05$ (tidak signifikan). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

Interpretasi dari hasil pengujian pertama adalah bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Struktur kepemilikan perusahaan perbankan di Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi. Penelitian La Porta *et al.* (1999), Claessens *et al.* (2000), Faccio dan Lang (2002), serta Bedo dan Acs (2007) bahwa negara-negara baik di kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan Australia cenderung memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi, kecuali Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. Namun, penelitian ini tidak menemukan pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan pada perusahaan perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan hasil yang tidak jauh berbeda. Penelitian Raffournier (1995) dan Depoers (2000) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara konsentrasi kepemilikan pada tingkat pengungkapan. McKinnon dan Dalimunthe (1993) menemukan hubungan yang lemah antara struktur kepemilikan dengan pengungkapan informasi perusahaan. Selain itu, dalam konteks pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), Craswell dan Taylor (1992) juga tidak menemukan hubungan antara struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan.

Hasil Pengujian Hipotesis 2

Pengujian atas hipotesis kedua yaitu: “kepemilikan menyebar berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan” dilakukan

melalui analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda memperlihatkan bahwa kepemilikan menyebar (DISP) menghasilkan nilai t sebesar 2,398 dengan p sebesar 0,020, $p < 0,05$ (signifikan). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima.

Interpretasi dari hasil pengujian kedua adalah bahwa kepemilikan menyebar berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hal tersebut sejalan dengan beberapa temuan sebelumnya. Perusahaan dengan struktur kepemilikan menyebar cenderung memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan yang baik. Penelitian Labelle dan Schatt (2005) di Perancis menemukan bahwa kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan meningkat ketika kepemilikan perusahaan cenderung menyebar (proporsi saham yang dimiliki oleh publik tinggi). Hasil penelitian ini selaras dengan *agency theory* oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi oleh pemegang saham minoritas akan meningkatkan biaya agensi atas adanya asimetri informasi. Peningkatan biaya agensi tersebut secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas pengungkapan (Ali *et al.*, 2007). Perusahaan dengan tingkat kepatuhan pengungkapan yang baik memiliki karakteristik keberadaan kepemilikan menyebar dan investor institusional.

Hasil Pengujian Hipotesis 3

Pengujian atas hipotesis kedua yaitu: “jenis KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan” dilakukan melalui analisis regresi berganda. Uji statistik terhadap koefisien regresi menghasilkan nilai t sebesar 3,378 dengan p sebesar 0,001, $p < 0,05$ (signifikan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa jenis kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Perusahaan dengan mekanisme *monitoring* yang baik diidentifikasi melalui kualitas audit. Audit yang dilakukan oleh jenis KAP *Big Four* cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pengungkapan wajib risiko keuangan perusahaan. Jenis KAP *Big Four* memiliki kecenderungan untuk menjaga independensi mereka serta mempersyaratkan standar pengungkapan yang lebih ketat. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga reputasi mereka (Fathi, 2013).

Hasil pengujian ini konsisten dengan hipotesis yang dikembangkan dan beberapa penelitian sebelumnya. Singhvi dan Desai (1971), DeAngelo (1981), Craswell dan Taylor (1992), Inchausti (1997), Xiao *et al.* (2004), Matoussi dan Chakroun (2008), serta Fathi (2013) yang menemukan hubungan positif signifikan antara jenis KAP dengan praktik pengungkapan informasi perusahaan. Lebih lanjut, penelitian Dewayanto (2010) menemukan mekanisme pemantauan pengungkapan melalui auditor eksternal (*Big Four*) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

Analisis Residual

Hasil Pengujian Hipotesis 4

Analisis residual dalam penelitian digunakan untuk menguji *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan dan jenis KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

-Tabel 7. Hasil Regresi Persamaan Kedua -

-Tabel 8. Hasil Regresi Persamaan Kedua -

Dari hasil pengujian terlihat bahwa koefisien regresi kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan (FINDISC) memiliki nilai negatif (-0,166) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 (signifikan), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini menemukan *corporate governance* memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan dan jenis KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Penelitian Taylor *et al.* (2008) menemukan bahwa *corporate governance* merupakan determinan pada pola pengungkapan risiko instrumen keuangan. Barako (2007) serta Chau dan Gray (2002) menemukan *corporate governance* sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan menyebar memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa jenis KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh sebagai variabel moderasi antara struktur kepemilikan dan jenis KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

5. Berdasarkan *checklist disclosure index study*, tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan rata-rata mencapai 74,60%, sedangkan tingkat implementasi *good corporate governance* rata-rata mencapai 68,45%.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Sampel penelitian terbatas pada 62 sampel dari 31 bank dalam kurun waktu dua tahun (2010-2011). Hal tersebut dikarenakan penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK 50 Revisi 2006 yang berlaku efektif pada tahun 2010 hingga 2011, sedangkan pada tahun 2012 sudah berlaku efektif PSAK 60 Revisi 2010.
2. Pengukuran tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan dan penerapan *GCG* didasarkan pada beberapa peraturan tertentu, oleh karena itu indikator dalam penilaian masih kurang spesifik.

IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan terhadap sampel penelitian dengan membandingkan penerapan peraturan selanjutnya dapat digunakan untuk menguji konsistensi hasil dari penelitian.
2. Penyusunan item *checklist disclosure index* sebaiknya menggunakan indikator yang lebih spesifik didasarkan pada peraturan terbaru sehingga lebih relevan dalam merepresentasikan kondisi yang kini terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adekunle, A. A., dan A. Taiwo. 2013. An empirical investigation of the financial reporting practices and bank's stability in Nigeria. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2 (5): 157-180.
- Ali, C. B., S. Trabelsi dan M. G. Summa. 2007. *Disclosure quality and ownership structure: evidence from the French stock market*. <http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/470/Ben%20Ali-Trabelsi-Gettler%20Summa.pdf?> (Diakses Tanggal 26 November 2012).
- Al-Mutawaa, A., dan A. M. Hewaidy. 2010. Disclosure level and compliance with IFRS: An empirical investigation of Kuwait companies. *The International Business and Economics Research Journal* 9 (5): 33-50.
- Amran, A., A. M. R. Bin, dan B. C. H. M. Hassan. 2009. Risk reporting: An exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal*, 24 (1): 39-57.
- Bank Indonesia. 2003. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- . 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- . 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Bapepam. 2002. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Peyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- Bapepam. 2006. Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Barako, D. G. 2007. Determinant of voluntary disclosure in Kenyan companies annual reports. *African Journal of Business Management*, 1 (5): 113-128.
- Barclay, M. J., C. G. Holderness, dan J. Pontiff. 1993. Private benefits from concentrated ownership and discounts on closed-end funds. *Journal of Financial Economics*, 33: 263-291.
- Bebchuk, L. A. 1999. *A rent-protection theory of corporate ownership and control*. <http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/nber7203.99.pdf>. (Diakses Tanggal 29 November 2012).
- Bedo, Z., dan B. Acs. 2007. The impact of ownership concentration, and identity on company performance in the US and in Central and Eastern Europe. *Baltic Journal of Management*, 2 (2): 125-139.
- Berle, A., dan G. Means. 1932. *The Modern Corporation and Private Property*. New York: Mac-Millan.
- Bhuiyan, M. H. U., dan P. K. Biswas. 2007. Corporate governance and reporting: An empirical study of the listed companies in Bangladesh. *Journal of Business Studies*, 28 (1): 1-32.
- Bouri, A., dan F. Khelifi. 2007. The impact of corporate governance mechanisms on level of voluntary disclosure: An empirical study in the Tunisian context. Working Paper, University of Sfax.
- Chau, G. K., dan S. J. Gray. 2002. Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hongkong and Singapore. *International Journal Accounting*, 37: 247-265.
- Claessens, S., S. Djankov., dan L. H. P. Lang. 2000. The separation of ownership and control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics*, 58: 81-112.

- Coffee, J. C. Jr. 2001. The rise of dispersed ownership: The role of law in separation of ownership and control. Working paper, Columbia Law School.
- Craswell, A., dan S. Taylor. 1992. Discretionary disclosure of reserves by oil and gas companies: An economic analysis. *Journal of Business Finance and Accounting*, 19: 295-308.
- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3: 183-199.
- Depoers, F. 2000. A cost-benefit study of voluntary disclosure: Some empirical evidence from French listed companies. *The European Accounting Review*, 9 (2): 245-263.
- Dewayanto, T. 2010. Pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan nasional: Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. *Fokus Ekonomi*, 5 (2): 104 – 123.
- Dyck, I. J. A. 2000. *Ownership structure, legal protections and corporate governance*. <http://siteresources.worldbank.org/INTABCDEWASHINGTON2000/Resources/dyck.pdf>. (Diakses Tanggal 19 Februari 2013).
- Effendi, M. A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faccio, M., dan L. H. P. Lang. 2002. The ultimate ownership of Western European corporations. *Journal of Financial Economics*, 65: 365-395.
- Fan, J. P. H., dan T. J. Wong. 2002. Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia. *Journal of Accounting and Economics*: 33: 401-425.
- Fathi, J. 2013. Corporate governance and the level of financial disclosure by Tunisian firm. *Journal of Business Studies Quarterly*, 4 (3): 95-111.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 4*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics*. Edisi 4. New York: McGraw-Hill.
- Haniffa, R. M., dan T. E. Cooke. 2002. Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. *Abacus*, 38 (3): 317-349.
- Ho, S. M. S., dan K. R. Wong. 2001. A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. *Journal International Accounting, Auditing & Taxation*, 10: 139-156.
- Hossain M., L. M. Tan dan M. Adams. 1994. Voluntary disclosure in an emerging capital market: Some empirical evidence from companies listed on Kuala Lumpur Stock Exchange. *International Journal Accounting*. 29(4): 334- 351.
- ICAEW. 2011. *Reporting business risks: Meeting expectations information for better markets initiative*. http://www.iaaer.org/research_reports/files/ICAEW_RBR.pdf. (Diakses Tanggal 20 November 2012).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012*. Cetakan 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Inchausti B. G. 1997. The influence of company characteristics and accounting regulation on information disclosed by Spanish firms. *The European Accounting Review* 6 (1): 45-68.
- Jacoby, G., dan S. X. Zheng. 2010. Ownership dispersion and market liquidity. *International Review of Financial Analysis*, 19: 81-88.
- Jensen, M., dan W. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 305-360.

- Kementerian BUMN. 2002. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf. (Diakses Tanggal 29 November 2012).
- Labelle, R., dan A. Schatt. 2005. Ownership structure and financial reporting of French companies. *Finance Control Strategy*, 8 (3): 77-104.
- La Porta, R., L. D. Silanez, dan A. Shleifer. 1999. Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*, 54: 471-518.
- Larcker, D. F., S. A. Richardson, dan I. Tuna. 2007. Corporate governance, accounting outcomes, and organizational performance. *The Accounting Review*, 82 (4): 963-1008.
- Lemmon, M. L., dan K. Lins. 2003. Ownership structure, corporate governance, and firm value: evidence from the East Asian financial crisis. *The Journal of Finance*. 58 (4): 1445-1468.
- Matoussi, H., dan R. Chakroun. 2008. *Board composition, ownership structure and voluntary disclosure in annual reports: Evidence from Tunisia*. <http://www.anpcont.com.br/site/docs/congressoIII/02/423.pdf>. (Diakses Tanggal 5 Desember 2012).
- McKinnon, J. L., dan L. Dalimunthe. 1993. Voluntary disclosure of segment information by Australian diversified companies. *Accounting Finance*, 33 (1): 33-50.
- Mitra, S., M. Hossain dan B. R. Marks. 2012. Corporate ownership characteristics and timeliness of remediation of internal control weaknesses. *Managerial Auditing Journal*, 27 (9): 846-877.
- Oorschot, L. V. 2009. *Risk reporting: An analysis of German banking industry*. http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/5413/M598-vanOorschot_294874.pdf (Diakses Tanggal 1 Januari 2013).
- Pergola, T. M., dan D. A. Verreault. 2009. Motivaations and potential monitoring effect of large shareholders. *Corporate Governance*, 9 (5): 551-563.
- Raffournier, B. 1995. The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies. *European Accounting Review*, 4 (2): 261-280.
- Shinta, N. P., dan N. Ahmar. 2011. Eksplorasi struktur kepemilikan saham publik di Indonesia tahun 2004-2008. *The Indonesian Accounting Review*, 1 (2): 145 - 154.
- Siagian, F. T., S. V. Siregar dan Y. Rahadian. 2005. *Corporate governance, disclosure quality, ownership structure, and firm value*. <http://staff.ui.ac.id/internal/060603583/publikasi/19110.pdf> (Diakses Tanggal 3 Desember 2012).
- Singhvi, S. S., dan H. B. Desai. 1971. An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure. *The Accounting Review*, 46 (1): 29-138.
- Suhardjanto, D. dan A. Dewi. 2011. Pengungkapan risiko finansial dan tata kelola perbankan: Studi empiris perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15 (1): 105-118.
- Taylor, G., G. Tower, M.V.D. Zahn dan J. Neilson. 2008. Corporate governance determinants on Australian resource companies's financial instrument disclosure practices. *Asian Review of Accounting*, 16 (1): 56-73.
- The Indonesian Institute for Corporate Governance. 2006. *Laporan corporate governance perception index 2005*. http://www.iicg.org/asset/doc/cgpi/Laporan_CGPI2005.pdf (Diakses Tanggal 18 November 2012).

- Tsamenyi, M., E. E. Adu, dan J. Onumah. 2007. Disclosure and corporate governance in developing countries: Evidence from Ghana. *Managerial Auditing Journal*, 22 (3): 319 – 334.
- Wawo, A. 2010. Pengaruh corporate governance dan konsentrasi kepemilikan terhadap daya informasi akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Xiao, J. Z., H. Yang, dan C. W. Chow. 2004. The determinants and characteristics of voluntary internet-based disclosures by listed Chinese companies. *Journal of Accounting and Public Policy*, 23: 191–225.

LAMPIRAN 1

Tabel 1 - Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
CONC	0,1542	1,000	0,599039	0.2037911
DISP	0,0000	0,4991	0,200975	0,1584132
FINDISC	0,5470	0,9195	0,745945	0,965376
CGI	0,3120	0,8880	0,684511	0,1473337

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 2 - Statistik Deskriptif Variabel *Dummy*

Jenis Kantor Akuntan Publik

Uraian	<i>Big Four</i>	<i>Non-Big Four</i>	N
2010	20	11	31
Persentase	64,52	35,48	100
2011	22	9	31
Persentase	70,97	29,03	100

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Parameter yang Diuji	Z	P	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,785	0,569	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel bebas	<i>Collinearity Statistics</i>		Kesimpulan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
CONC	0,719	1,391	Non multikolonieritas
DISP	0,742	1,348	Non multikolonieritas
KAP	0,961	1,040	Non multikolonieritas

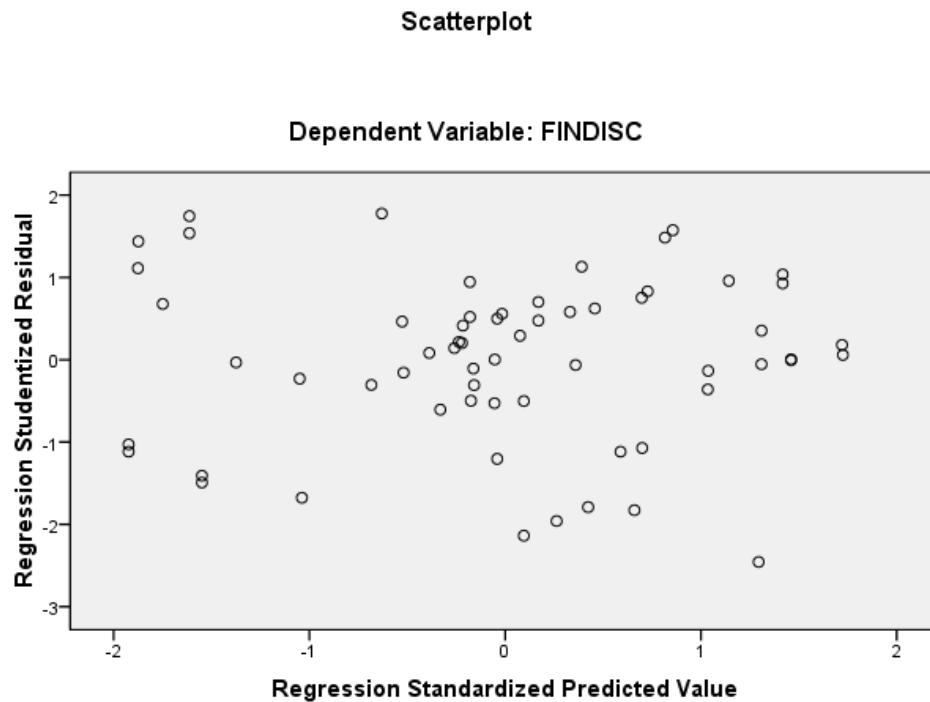
Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Parameter yang Diuji	Z	P	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	1,281	0,200	Bebas Autokorelasi

Sumber: data sekunder, diolah

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 6
Hasil Regresi Persamaan Pertama

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi
Konstanta	0,653	13,253	0,000
CONC	0,001	0,008	0,994
DISP	0,193	2,398	0,020
KAP	0,080	3,378	0,001
R ²	0,250		
Adjusted R ²	0,212		
F Statistic	6,457		
P	0,001		

Sumber: data sekunder, diolah (lampiran)

Tabel 7 - Hasil Regresi Persamaan Kedua
Variabel Struktur Kepemilikan Terhadap *Corporate governance*

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi
Konstanta	0,468	6,516	0,000
CONC	0,134	1,447	0,153
DISP	0,147	1,251	0,216
KAP	0,158	4,551	0,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 8 - Hasil Regresi Persamaan Kedua Variabel Kepatuhan Pengungkapan wajib risiko keuangan terhadap Absolut Residual

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi
Konstanta	0,188	3,772	0,000
FINDISC	-0,166	-2,496	0,015

Sumber: data sekunder, diolah

LAMPIRAN 2

Area Penelitian

PBI Nomor 11/25/PBI/2009	PSAK 50 (Revisi 2006)	P3KKEPPBANK (2008)
Risiko kredit	Risiko kredit	Risiko khusus:
Risiko likuiditas	Risiko suku bunga atas arus kas	Risiko kredit
Risiko pasar:	Risiko pasar:	Risiko pasar:
• Risiko suku bunga	Risiko mata uang	Risiko suku bunga
• Risiko nilai tukar	Risiko suku bunga atas nilai wajar	Risiko nilai tukar rupiah
• Risiko komoditas	Risiko harga	Risiko likuiditas
• Risiko ekuitas	Risiko likuiditas	Risiko solvabilitas
Risiko operasional		Risiko obligasi rekapitalisasi pemerintah
Risiko kepatuhan		Risiko bank penggabungan
Risiko hukum		Risiko teknologi informasi
		Risiko ketergantungan kepada pemerintah
		Risiko tidk dilanjutkannya program penjaminan pemerintah
		Risiko ketergantungan pada deposito berjangka
		Risiko agunan kredit
		Risiko pemulihan krisis sektor perbankan
		Risiko fidusia
		Risiko umum:
		Risiko kepanikan masyarakat
		Risiko pemogokan karyawan
		Risiko kerusakan dan penjarahan
		Risiko operasional
		Risiko investasi
		Risiko penanganan masalah litigasi
		Risiko persaingan
		Risiko investasi

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Kompensasi, dan Asimetri Informasi dalam Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

MOHAMMAD SUHARYADI ARYANTO
TRI HESTI UTAMININGTYAS
RATNA ANGGRAINI ZR*
Universitas Negeri Jakarta

Abstract: *This research aims to examine the influence of internal control systems, compensation systems, and information asymmetry to the tendency of accounting fraud at the State University of Jakarta. Data collection is the primary data using questionnaires given directly to the employee section and subsection of financial Jakarta State University. Data were analyzed using Partial Least Square with SmartPLS software.*

This research proved that internal control system, Compensation system, Information asymmetry have no significant effect on the tendency of the accounting fraud.

Keywords: *Internal Control Systems, Compensation Systems, Information Asymmetry, Tendency of Accounting Fraud.*

* Corresponding author: r.anggrainizr_unj@yahoo.com

PENDAHULUAN

Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) saat ini merupakan suatu permasalahan yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Kasus-kasus KKA yang terus terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor swasta namun kini merambah pada sektor publik. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah dan berbagai organisasi publik lainnya.

Masyarakat menilai bahwa KKA ini perlu diberantas karena dalam kurun waktu yang singkat KKA dapat merugikan sebuah organisasi. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam sebuah negara ikut serta dalam strategi penanggulangan KKA atau korupsi yang diwujudkan dalam peraturan UU No. 28 Tahun 1999, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011, dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2011.

Thoyibatun (2008) menyatakan KKA diindikasikan oleh adanya bentuk tindakan dan kebijakan sengaja untuk tujuan menipu atau manipulasi sehingga merugikan pihak lain. Kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia sangat erat dengan korupsi. Korupsi tersebut merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pertengahan tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan terdapat temuan sebesar Rp 1,6 triliun yang tidak wajar dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011. BPK merincikan 12 temuan yang tidak wajar dalam laporan keuangan Kemendikbud diantaranya terdapat perbedaan hasil rekonsiliasi pendapatan menurut Kemendikbud dengan Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp86 miliar, belanja yang bersumber dari hibah senilai Rp210 miliar pada beberapa universitas dan Dirjen PAUD yang belum diajukan pengesahannya pada DJPU dan belum dilaporkan dalam laporan keuangan, dan piutang pada Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp 338 miliar yang tidak

seluruhnya disajikan dalam laporan keuangan, dan ada juga temuan yang berulang dari laporan keuangan tahun sebelumnya berupa dana bantuan sosial yang belum disalurkan dan masih mengendap di rekening perguruan tinggi senilai Rp 43 miliar (www.tempo.co).

Pada akhir tahun 2012, masyarakat di Indonesia digemparkan oleh kasus korupsi yang melanda beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Berdasarkan telaah Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI terhadap hasil audit BPK RI, negara mengalami kerugian hingga Rp 309,7 miliar. Penyimpangan-penyimpangan tersebut berbentuk beberapa tindakan seperti pengadaan yang tidak sesuai kontrak, *mark up* anggaran, pembangunan fisik yang tak terselesaikan, serta persaingan dalam tender yang tidak sehat.

Sektor pemerintahan menjadi salah satu lahan yang dianggap signifikan bagi praktik korupsi. Hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester I yang memuat pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, selain memuat pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Temuan pemeriksaan BPK tersebut meliputi 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun. Berdasarkan jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sisanya merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari temuan senilai Rp8,92 triliun tersebut, telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp311,34 miliar (www.bpk.go.id). Semakin tingginya anggaran pemerintah menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku tindak kecurangan. Hasil penelitian Sheifer dan Vishny (1993) serta Gaviria (2001) dalam Puspasari dan Suwardi (2012) menunjukkan bahwa tingkat korupsi suatu negara mempengaruhi kecurangan akuntansi.

Menurut Tuanakotta (2007) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar (Hermiyetti, 2011).

Sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat otonomi yang semakin besar. Berdasarkan hasil *KMPG Fraud Survey 2012* ditemukan bahwa *fraud* terjadi karena pelaku internal tidak berfikir mereka akan tertangkap, ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 25% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian internal yang telah ada sebesar 23%, kemudian tidak memadainya pengendalian internal juga menjadi faktor terjadinya *fraud* yaitu sebesar 7%, sehingga dapat dilihat bahwa pengendalian internal memiliki fungsi yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk universitas.

Erickson (2004) menyampaikan bahwa penjelasan yang memunculkan dugaan penipuan terletak pada kompensasi dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dihadapi oleh eksekutif. Sistem kompensasi pada organisasi sektor publik di Indonesia masih menganut sistem tradisional. Penentuan gaji, bonus, remunerasi, tunjangan dan berbagai insentif lainnya masih ditentukan oleh jenjang kepangkatan, golongan dan senioritas.

Menurut Nicholson (1997) yang dicatat dalam Wilopo (2006) bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) dipengaruhi oleh situasi asimetri informasi. Informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena manajer cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini hendak menguji dan memberikan bukti empiris dari pengaruh sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, dan asimetri informasi terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pada bagian keuangan Universitas Negeri Jakarta

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Tunggal (2012) kecurangan sebagai konsep legal yang luas, menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain, sedangkan dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang (*fraudulent financial reporting*) dan penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*).

The Institute of Internal Auditor di Amerika mendefinisikan kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau dalam organisasi.

IAI (2001) dalam SPAP seksi 316 menjelaskan tentang kecurangan akuntansi dalam audit atas laporan keuangan, yaitu :

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pelaporan keuangan, misalnya : a) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. b) Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa transaksi atau informasi signifikan, dan c) salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Sistem Pengendalian internal

SPAP (IAI, 2001) mendefinisikan Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan.
- b. Efektivitas dan efisien operasi.
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Definisi sistem pengendalian internal yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu: sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komponen pengendalian Internal menurut COSO terdiri atas 5, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*).
2. Penaksiran risiko (*risk assessment*).
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*).
4. Informasi dan komunikasi (*informasi and communication*)
5. Pemantauan (*monitoring*).

Sistem Kompensasi

Menurut Cahyani (2009) kompensasi sesungguhnya merupakan pengertian luas dari pengupahan. Kompensasi mencakup pula tunjangan, baik tunjangan berbentuk uang maupun non uang, selain gaji atau upah yang diterima setiap bulan.

Menurut Dallas (2002) dalam Thoyibatun (2008) menjelaskan bahwa sistem kompensasi diadakannya sebuah sistem yang berbasis kinerja fisik dan etika dengan bobot yang sama tidak hanya didasarkan atas kinerja fisik saja yang secara langsung diukur dengan satuan uang saja, dengan harapan para karyawan tidak hanya berorientasi pada nilai uang saja namun tetap melaksanakan nilai etika.

Menurut Mathis and Jackson (2006), program kompensasi yang efektif dalam sebuah organisasi memiliki empat tujuan:

1. Kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku
2. Efektifitas biaya bagi organisasi
3. Keadilan internal, eksternal, dan individual bagi para karyawan
4. Peningkatan kinerja bagi organisasi

Asimetri informasi

Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Wilopo, 2006). Teori keagenan (*agency theory*) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai principal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal.

Dunk (1993) mendefinisikan Asimetri Informasi sebagai suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki oleh atasannya. Anggaran yang disusun secara *Bottom-up* menyebabkan informasi mengenai komponen dalam anggaran lebih diketahui oleh manajemen tingkat bawah (*lower level managers*).

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang yang sudah pasti memiliki tujuan dan pandangan masing-masing dari kerjanya dalam organisasi. Mereka bersaing untuk mencapai kepentingannya masing-masing dalam organisasi tersebut. Hal ini juga ditandai dengan perbedaan yang ada mengenai segala macam sifat anggota di dalam organisasi.

Proses pencapaian tujuan yang partisipatif inilah, sangat dimungkinkan terjadinya benturan antar anggota baik yang bersifat langsung, terbuka, maupun tidak langsung atau tertutup (Utari, 2009). Benturan-benturan tersebut akan menciptakan peluang terjadinya kecurangan dalam mencapai tujuan bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut (Glifandi, 2011), sehingga peluang tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian internal yang efektif. Smith et al., (1997) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sistem pengendalian internal yang baik perlu disesuaikan dengan tujuan keberlangsungannya sebuah organisasi. SPI di perguruan tinggi secara umum telah

dikembangkan sesuai dengan tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa aset organisasi dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi (Thoyibatun, 2008)

H1: sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hubungan Sistem Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Salah satu tugas manajemen yang diberikan *principal* adalah bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, menyejahterakan *principal* dan tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan pada organisasi. Tindakan kecurangan pada organisasi disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi semaksimal mungkin. Kecurangan tersebut didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan.

Principal kemudian membuat sebuah sistem kompensasi yang memadai sesuai dengan teori keagenan yang bertujuan agar manajemen dapat bertindak sesuai dengan keinginan *principal* (Jensen and Meckling, 1976), namun Dallas (2002) mengatakan bahwa uang atau desain sistem kompensasi tidak selalu bisa digunakan untuk memengaruhi munculnya perilaku yang diinginkan.

H2: sistem kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hubungan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori keagenan merupakan teori hubungan antara *principal* dan manajemen pada sebuah organisasi. Model hubungan ini menjadi semakin menjauh dari kontrak yang disepakati ketika kepentingan di antara *principal* dan manajemen sudah tidak selaras lagi (Jensen dan Meckling,

1976). Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Bila agen dan *prinsipal* berupaya memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, dan serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka manajemen tidak akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan *prinsipal*. Perkembangan ini akan menjadi semakin memburuk bagi perusahaan dan mendorong manajemen untuk tidak melaporkan keadaan sebenarnya untuk melindungi kepentingannya.

Keadaan tersebut memunculkan masalah yang umumnya disebut sebagai asimetri informasi. Manajemen memiliki power yang lebih kuat dalam berupaya untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang terdapat di organisasi. Manajemen akan memanipulasi dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi mereka demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain (Khang, 2002 dalam Wilopo, 2006).

H3: asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

METEDOLOGI PENELITIAN

Penentuan Populasi atau Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Universitas Negeri Jakarta, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan, kepala sub bagian monitoring dan evaluasi, kepala sub bagian dana masyarakat, kepala sub bagian anggaran rutin dan pembangunan, bendahara, dan staf administrasi universitas. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menurut Sugiyono (2001) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004), pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu

yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Pemilihan sampel tersebut karena dianggap memiliki tingkat kompleksitas yang besar dalam wewenang dan tanggung jawab untuk terlibat dalam penggunaan dana, penyelenggaraan akuntabilitas, dan pembuatan akuntabilitas pada Universitas Negeri Jakarta.

Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode survey, dimana data penelitian disebarkan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan kepada kepala bagian keuangan dan kepala sub bagian yang terdapat di bawah wewenang kepala bagian keuangan universitas yang mendapat delegasi wewenang dan tanggung jawab untuk terlibat dalam penggunaan dana yang dianggarkan, penyelenggaraan akuntabilitas, dan pembuatan akuntabilitas universitas pada Universitas Negeri Jakarta.

Metode *survey* yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Setiap responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dalam kuesioner yang sesuai dengan persepsinya masing-masing.

Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel, variabel pertama adalah kecenderungan Kecurangan Akuntansi adalah adanya indikasi, arah, perilaku, atau tanda-tanda lain yang membuktikan terjadinya kesalahan tindakan dan kebijakan secara sengaja dalam menyajikan pengungkapan pada laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi untuk tujuan mencapai keuntungan diri sendiri dan menjadikan pihak lain sebagai korban yang dirugikan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi terdiri dari lima indikator pertanyaan yang didapat dari Wilopo (2006) yaitu salah saji, manipulasi, salah penerapan, penggelapan aktiva, dan penyalahgunaan tanda terima.

Variabel kedua penelitian ini adalah pengendalian Internal yang dinyatakan dalam COSO (1992) adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu Keandalan pelaporan keuangan, Efektivitas dan efisien operasi, dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal terdiri dari lima indikator pertanyaan yang didapat dari Thoyibatun (2008) yaitu aplikasi SPI dalam bentuk pengendalian khusus sesuai bidangnya, pemantauan dan evaluasi, pengendalian fisik, peran pemimpin dan pejabat dalam mendukung budaya organisasi, dan peran pemimpin dan pejabat dalam memotivasi karyawan agar mematuhi SPI karena ada pihak independen yang ikut mengawasi.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya.(Wibowo, 2007). Werhet dan Davis (1996) mengatakan bahwa kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. Selanjutnya Werther dan Davis menyatakan bahwa di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja.Instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem kompensasi dikembangkan dari Dallas (2002) yang terdiri dari empat indikator pertanyaan yaitu dasar alokasi kompensasi, dasar promosi jabatan, sosialisasi sistem kompensasi yang berlaku dalam alokasi honorarium dan promosi jabatan, bobot yang seimbang antara standar etika dan kerja fisik.

Variabel terakhir, asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agent mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada agent menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. Dunk (1983 dan 1991) menyatakan

bahwa Asimetri informasi adalah keadaan yang terjadi jika informasi yang dimiliki bawahan mengenai unit yang menjadi tanggungjawabnya lebih baik daripada informasi mengenai hal tersebut yang dimiliki oleh atasannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi dikembangkan dari Dunk (1993) yang terdiri dari enam indikator pertanyaan yaitu penyaji memiliki informasi yang lebih banyak, penyaji lebih mengenal hubungan *input-output*, penyaji lebih mengetahui apa yang sebenarnya dapat dicapai, penyaji lebih mengenal teknis pekerjaan, penyaji lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal, penyaji lebih mengetahui potensi kinerja.

Semua variabel penelitian ini menggunakan skala likert 1-5 (Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju) digunakan untuk mengukur respons dari responden.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta.

Hasil perhitungan SmartPLS 2.0 dalam pengujian hipotesis menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. penelitian ini memberikan hasil dengan nilai *path coefficient* untuk sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar sebesar -0,4453 dan nilai *t statistic* yang lebih kecil dari t tabel 1,96 yaitu 1,4128 hasil ini menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan.

Hasil ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pemahaman responden dalam pengujian ini tentang pernyataan-pernyataan yang diberikan mengenai tugas kerja dan fungsi sistem pengendalian internal dan juga disebabkan karena SPI Universitas Negeri Jakarta belum dibentuk saat pengujian berlangsung sehingga responden tidak mengetahui pernyataan-pernyataan tersebut. Dengan demikian hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem

pengendalian internal tidak mempengaruhi para pegawai keuangan Universitas Negeri Jakarta dalam melakukan tindak kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini meskipun tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal akan tetapi peneliti tetap menyarankan agar Universitas Negeri Jakarta tetap memperhatikan sistem pengendalian internal yang ada karena dari 2 variabel lain yang diujikan yang mendekati angka signifikan yaitu sistem pengendalian internal, kemudian Smith et al (1997) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki korelasi cukup kuat untuk meminimalisir tindak perilaku kecurangan sehingga ada baiknya Universitas Negeri Jakarta tetap memperhatikan sistem pengendalian internal agar dapat mengurangi tindak perilaku kecurangan dan tetap menjaga akuntabilitas keuangan universitas.

Penelitian ini menggunakan instrument alat ukur berdasarkan Indikator dari teori Thoyibatun (2008), kemudian setelah menguji instrument tersebut didapat bahwa instrument yang diterima pada variabel sistem pengendalian internal adalah aplikasi SPI dalam bentuk pengendalian khusus sesuai bidangnya, pemantauan dan evaluasi, pengendalian fisik, dan peran pemimpin dan pejabat dalam memotivasi karyawan agar mematuhi SPI karena ada pihak independen yang ikut mengawasi, sedangkan instrumen yang ditolak adalah peran pemimpin dan pejabat dalam mendukung budaya organisasi.

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah disebar diketahui bahwa Universitas Negeri Jakarta harus meningkatkan perfoma dari sistem pengendalian internal salah satunya ialah meningkatkan peran pemimpin dan pejabat dalam mendukung budaya organisasi. Pada kuesioner yang disebar menunjukkan bahwa pemimpin dan pejabat sering datang bekerja tidak tepat waktu, keadaan tersebut tidak menunjukkan sikap disiplin dan etos kerja pada lingkungan kerja sehingga dapat memberi contoh yang tidak baik terhadap bawahan kemudian juga dapat menimbulkan tindakan kecurangan karena kurangnya pengawasan.

Universitas Negeri Jakarta juga perlu melakukan pengawasan atau inspeksi mendadak untuk lebih meningkatkan akuntabilitas universitas, hal ini dikarenakan para pegawai merasa tidak siap apabila pemeriksaan dilakukan sewaktu-waktu atau tanpa waktu yang ditentukan dan juga perlu sosialisasi yang lebih baik terkait pembuatan pencatatan belanja dan pendapatan hingga dalam pembuatan laporan keuangan akhir. Hasil penelitian di atas mendukung hasil penelitian yang dilakukan Mulyani (2008), yang menyatakan bahwa faktor sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pengaruh Sistem kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta.

Perhitungan SmartPLS 2.0 dalam hipotesis kedua menyatakan bahwa adanya pengaruh antara sistem kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang artinya semakin tinggi sistem kompensasi akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun hasil dalam penelitian ini menolak hipotesis kedua karena nilai *path coefficient* untuk sistem kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar sebesar -0,1551 dan nilai *t statistic* yang lebih kecil dari *t* tabel 1,96 yaitu 0,8686 hasil ini menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan.

Hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem kompensasi tidak mempengaruhi para pegawai keuangan Universitas Negeri Jakarta dalam melakukan tindak kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa keinginan untuk memperoleh peningkatan bonus atau jabatan yang tinggi membuat manajemen berani mengkondisikan kecenderungan kecurangan akuntansi di universitas.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tang et al (2003) yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan komitmen organisasi tetapi sekaligus meningkatkan perilaku kecurangan karyawan, untuk itu universitas negeri jakarta perlu meningkatkan sistem atau budaya organisasi pada universitas untuk terus menjunjung tinggi perilaku etis tidak hanya berorientasi pada materi dan jabatan saja.

Hal ini diindikasikan bahwa selama ini para pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini bekerja sesuai dengan kinerja fisik saja tanpa memperdulikan kesalahan atau kecurangan yang terjadi karena para responden beranggapan bahwa kompensasi yang mereka peroleh hanya berdasarkan prestasi kerja secara fisik saja, kemudian kurangnya pemahaman terkait etika bekerja seharusnya posisi pada bagaiman keuangan dibutuhkan tingkat etika bekerja yang tinggi dan baik sehingga dapat terjuwudnya akuntabilitas keuangan yang baik. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini ada beberapa instrument dari sistem kompensasi yang diterima yaitu dasar alokasi kompensasi, dasar promosi jabatan, bobot yang seimbang antara standar etika dan kerja fisik, sedangkan instrumen yang ditolak adalah sosialisasi sistem kompensasi yang berlaku dalam alokasi honorarium dan promosi jabatan.

Universitas Negeri Jakarta perlu mengevaluasi kinerja setiap pegawainya dan sesekali memberikan sebuah penghargaan atau bonus untuk setiap pegawai yang berprestasi dan tetap menjunjung tinggi berperilaku etis, karena berdasarkan pengujian dari kuesioner yang diperoleh para pegawai tersebut merasa perlu memperoleh biaya tambahan sebagai ongkos lelah setiap kali mereka melakukan kegiatan untuk Universitas Negeri Jakarta diluar gaji yang diperoleh setiap bulannya sehingga kemudian para pegawai melakukan pencatatan bukti transaksi tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi, hal ini memungkinkan para pegawai melakukan pencatatan lebih besar dari transaksi yang semestinya dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang mereka anggap wajar untuk dilakukan.

Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Universitas Negeri Jakarta.

Hasil perhitungan SmartPLS 2.0 dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini karena nilai *path coefficient* untuk asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar sebesar -0,1689 dan nilai *t statistic* yang lebih kecil dari t tabel 1,96 yaitu 0,5644 hasil ini menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan.

Hasil diatas didukung dengan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan staf bagian keuangan UNJ, bahwa adanya kesenjangan informasi antara atasan dan bawahan Salah satu faktor penyebab kesenjangan informasi ini adalah adanya proses seleksi SDM khususnya yang terlibat dalam sistem akuntansi belum dilakukakan dengan baik, sehingga menimbulkan potensi kecurangan dan perilaku tak etis. Lebih lanjut lagi hasil diatas didukung oleh pemahaman terhadap faktor pengaruh faktor eksternal, dan potensi kinerja belum menunjukkan hasil yang baik, hal ini diketahui dari instrumen yang ditanyakan. Nilai *t statistic* untuk asimetri informasi memiliki nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai pada variabel lainnya, kemungkinan ini disebabkan karena responden yang mengisi jawaban pada kuesioner yang diberikan tidak memiliki pengetahuan yang tentang pernyataan-pernyataan yang diberikan pada kuesioner tersebut.

Hasil ini juga didukung oleh analisis instrumen mengenai pelatihan atau pendidikan, yang menunjukkan perlunya sampel dalam hal ini UNJ meningkatkan pelatihan atau pendidikan tambahan mengenai sistem birokrasi dan tata kelola keuangan khususnya untuk di bidang perguruan tinggi negeri. Hal ini juga untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Negeri Jakarta dan juga untuk memperbaharui pemahaman perlunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2008) yang menyatakan bahwa walaupun informasi yang diterima antara atasan dan yang dimiliki bawahan mengenai unit yang menjadi tanggungjawabnya sama namun tidak mengurangi organisasi untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi dengan cara-cara tertentu dikarenakan atasan pada organisasi tersebut

kurang peduli merespon kondisi organisasi dengan alasan bahwa organisasi pemerintah telah terkoordinir dan terorganisasi oleh orang-orang pilihan pemerintah. Namun penelitian ini bertentangan dengan Wilopo (2006) dan Jensen dan Meckling (1976) karena temuan ini bertentangan dengan teori keagenan.

Pada pengujian instrument didapatkan bahwa ada beberapa instrument yang diterima pada variabel asimetri informasi yaitu penyaji memiliki informasi yang lebih banyak, penyaji lebih mengenal hubungan *input-output*, penyaji lebih mengetahui apa yang sebenarnya dapat dicapai, penyaji lebih mengenal teknis pekerjaan, sedangkan instrumen yang ditolak adalah penyaji lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal, penyaji lebih mengetahui potensi kinerja. Nilai *t statistic* untuk asimetri informasi memiliki nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai pada variabel lainnya, kemungkinan ini disebabkan karena responden yang mengisi jawaban pada kuesioner yang diberikan tidak memiliki pengetahuan yang tentang pernyataan-pernyataan yang diberikan pada kuesioner tersebut.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kuesioner, Universitas Negeri Jakarta perlu memberikan pelatihan atau pendidikan tambahan mengenai sistem birokrasi dan tata kelola keuangan khususnya untuk di bidang perguruan tinggi negeri. Hal ini juga untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Negeri Jakarta dan juga untuk memperbaharui sebuah paradigam yang saat ini masih terjaga dan mungkin sangat sulit untuk berubah yaitu sebuah anggapan bahwa universitas sebagai salah satu organisasi sektor publik yang kegiatan kerja pada organisasi tersebut sifatnya rahasia dan belum layak untuk diketahui umum, tersebut juga diperkuat dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa pegawai keuangan Universitas Negeri Jakarta menganggap bahwa pihak luar selain penyaji laporan tidak diperkenankan untuk mengetahui baik isi maupun interpretasi atas tulisan dan atau angka yang tersaji dalam sebuah informasi laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan yang antara lain:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Hal ini diduga karena kurangnya pemahaman responden terkait tugas kerja dari sistem pengendalian internal salah satunya ialah pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kerja Universitas Negeri Jakarta. Serta responden merasa kurangnya peran pemimpin dan pejabat dalam mendukung budaya organisasi.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel sistem kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Hal ini diduga karena selama ini para pegawai di bagian keuangan Universitas Negeri Jakarta bekerja sesuai dengan kinerja fisik saja tanpa memperdulikan kesalahan atau kecurangan yang terjadi dan beranggapan bahwa kompensasi yang mereka peroleh hanya berdasarkan prestasi kerja secara fisik saja serta kurangnya pemahaman terkait etika bekerja.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Hal ini diduga karena masih terdapat sebuah paradigam yang mengenai birokrasi organisasi sektor publik yaitu sebuah anggapan bahwa kegiatan kerja pada organisasi tersebut sifatnya rahasia dan belum layak untuk diketahui umum.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa keterbatasan yang antara lain:

1. Deskripsi responden yang kurang menyeluruh dan kurang memperoleh informasi yang jelas mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan populasi pada Universitas Negeri Jakarta dan sampel di bagian dan sub bagian keuangan saja, sehingga penelitian ini hanya menggambarkan keadaan di Universitas Negeri Jakarta saja.
3. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner saja. Diduga responden kurang memahami pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang diberikan.
4. Variabel dalam penelitian ini hanya membahas tentang sistem pengendalian internal, sistem kompensasi dan asimetri informasi sehingga hasil yang didapat tidak memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Menambah pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh deskripsi responden yang lebih jelas, misalnya jurusan pendidikan tidak hanya pendidikan terakhir.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah luas populasi dan jumlah sampel, misalkan perguruan tinggi negeri se-Jakarta, Banten, Jawa Barat. Diharapkan dengan luas populasi yang luas dan jumlah sampel yang besar dapat memperoleh hasil yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti metode pengumpulan data, misalkan dengan metode observasi. Diharapkan dengan metode observasi penelitian selanjutnya dapat memperoleh data yang lebih menyeluruh.

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan atau mengganti variabel, misalkan dengan variabel etika, budaya organisasi, moral atau pemahaman spritual. Diharapkan dengan variabel tersebut dapat memberikan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses penyelesaian penelitian ini khususnya kepada Bapak Choirul, CPA dan Bapak M. Yasser Arafat, atas saran-saran yang diberikan.

REFERENSI

- _____. 2012. *Fraud Survey. Volume Seven 2012*.
- _____. 2001. Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. SA Seksi 316. Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan.
- AICPA, 2003. "Auditors' Responsibility for Fraud Detection". *Journal of Accountnacy Online*. www.aicpa.org. 13 Maret 2013.
- Aisyah, M.N. 2006. Strategi dan Kinerja dalam Sistem Kompensasi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. Vol.V, No. 2
- Amrizal. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. <http://www.bpkp.go.id>. Diakses tanggal: 3 Maret 2013
- Arman, Rika. Analisis Sistem Kompensasi Dan Pengembangan Karyawan RSI Siti Rahmah. www.pasca.unand.ac.id. Diakses tanggal 9 Maret 2013.
- Cahyani, A. 2005. Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Indeks. Jakarta.
- Dunk, Alan S., 1993. The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation Between Budgetary Participation and Slack. *The Accounting Review* vol. 68 (April), pp: 400-410
- Effendi, Ruslan. 2009. Internal Control Berbasis COSO. <http://ruslan.web.id>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2012.
- Eisenhardt, Kathleem. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of management Review*, 14, hal 57-74
- Erickson, M., Hanlon, M., and May dew. 2004. Is There a link between Eecutive Compensation and Accounting Fraud? www.ssrn.com. 5 Februari 2007.
- Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi*. Jakarta: FEUNJ, 2012
- Ghozali, Prof. Dr. Imam, M.Com., Ak. 2005. *Model Persamaan Struktural*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dionegoro.
- Gusnardi. 2012. *Peran Forensic Accounting dalam Pencegahan Fraud*. *Pekbis Jurnal*. Vol. 4.
- Hermiyetti. 2012. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/23/079418820/BPK-Dana-Janggal-Rp16-Triliun-di-Kemendikbud>
<http://www.bpk.go.id/web/?p=13612>
- Irianto, G. 2012. Integrity, Unethical Behavior, And Tendency Of Fraud. Vol.16 No. 2, p. 144-163
- Jensen and W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Khang, K. and Tao-Hsien Dolly King, 2002. Is Devidend Policy Related to Information Asymmetry? Evidence from Insider Trading Gains. Working Paper. www.ssrn.com.
- Latan, Hengky, SE. & Ghozali, Prof. Dr. Imam, M.Com., Ak. 2012. *Partial Least Squares – Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



- Maharani, D. 2012. Modus Korupsi di Sektor Pendidikan. <http://edukasi.kompas.com>. 1 Maret 2012
- Martani, D., dan Zaelani, F. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, Dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh.
- Martoyo, S. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta.
- Marwansyah. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. CV Alfabeta. Jakarta.
- Mondy .R.Wayne 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia edisi 10. Penerbit Erlangga Jakarta
- Muliyani, S. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. E-journal, Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Puspasari, N., dan Suwardi, E. 2012. Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin, 20-23 September.
- Putra, Y.H.S. Praktik Kecurangan Akuntansi Dalam Perusahaan. El-Muhasaba. Vol 1, No 1; 01-2010
- Schwartz, R., Larson, M and Kranacher, M. 2008. Helping to Prevent University Fraud Deloitte Development LLC.
- Scott, William R. (2000). Financial Accounting Theory. Second edition. Canada: Prentice Hall.
- Soselisa, R. 2008. Pengaruh Faktor Kultur Organisasi, Manajemen, Strategik, Keuangan, dan Auditor Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Spathis, Ch., M. Doumpos, C. Zopoundis, 2002. Detecting Falsified Financial Statement Using Multicriteria Analysis: The Case of Greece. Working Papers. www.ssrn.com.
- Supriyono, R. A. 2003. Peran Asimetri Informasi Dan Peresponan Keinginan Sosial Sebagai Variabel Moderating Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran Dan Kinerja Manajer Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Thoyibatun, S. 2008. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. Ekuitas. Volume 16 No. 2 – 2012
- Tuanakotta, T. M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Tunggal, A. W. 2013. The Internal Control Handbook. Harvindo. Jakarta.
- Ujayantho, M.A., dan Pramuka, B.A. 2007 Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, Dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007
- Ulum, Ihyaul. 2007. Interlectual Capital Dan Kinerja Perusahaan; Suatu Analisis Dengan Pendekatan Partial Least Square. Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang, 23 – 26 Agustus 2006.
- Wirda., dan Darwanis., Abu Bakar, U., 2012. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Serta Pemantauan Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada SKPD di Pemerintah Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, p. 1-20

Peran CSR dalam Penyelesaian Konflik Pencemaran Lingkungan antara Perusahaan dengan Masyarakat Lokal

NENY ANDRIANI*

Alumni Universitas Airlangga

TJIPTOHADI SAWARJUWONO

Universitas Airlangga.

Abstrak: Beberapa penelitian di banyak negara berkembang menyajikan contoh kejadian konflik yang terjadi antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitarnya (Ako, Obokoh & Okonmah 2009; Barnett 2010; Newenham-Kahindi 2010). Perusahaan yang bergerak dalam sektor tambang biasanya banyak disalahkan atas ketidak hati-hatian terhadap lingkungan, pelecehan terhadap hak asasi manusia, manajemen yang diskriminatif, dan kebijakan operasi yang kurang memihak. Kesimpulan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bila perusahaan bersikap lebih “bertanggung jawab” dengan program CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan di wilayah operasi, perlawanan masyarakat terhadap operasinya akan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini mencoba mempertanyakan apakah CSR berperan dalam penyelesaian konflik antara salah satu perusahaan pertambangan besar di Indonesia, Pertamina, dengan masyarakat lokal. Guna menjawabnya, penelitian ini menggunakan pendekatan naratif. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi dari artikel internet maupun majalah mingguan Pertamina. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara teori dengan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR memang berperan dalam penyelesaian konflik dalam kondisi-kondisi tertentu..

Kata Kunci : Penyelesaian Konflik, CSR, penelitian naratif, wawancara dan dokumentasi.

* Corresponding author: ne12ny@yahoo.com

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering disebut Tanggung Jawab Sosial Korporasi adalah sebuah tindakan korektif yang dilakukan oleh perusahaan atas dasar kesadaran pribadi bahwa perusahaan menjadi lebih peduli pada hal-hal di luar laba dan rugi, dan merasa bertanggung jawab terhadap keadaan masyarakat secara keseluruhan (Bakan, 2004: 28-29). Namun dalam kenyataannya, masalah konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal masih saja terjadi. Menurut Heal (2004) hampir semua konflik tersebut dapat ditelusuri antara satu dari dua penyebab, yaitu pertama ketidak-sesuaian kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat lokal, dan kedua yaitu adanya perbedaan persepsi mengenai konsep “adil”.

Bila terjadi konflik tersebut, menurut Ako, Obokoh & Okonmah (2009) perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor tambang biasanya banyak disalahkan atas ketidak-hatian terhadap lingkungan, pelecehan terhadap hak asasi manusia, manajemen yang diskriminatif, dan kebijakan operasi yang kurang memihak. Di Nigeria, kegagalan untuk peduli dapat membawa dampak hingga operasi yang dirintangi secara signifikan.

Program CSR dapat memainkan peran dalam konflik lingkungan maupun distribusional. CSR dapat mereduksi konflik, atau mengkompensasi pihak yang merasa tidak adil. Program CSR yang dilakukan seharusnya bukan cuma bertujuan mengurangi konflik, tapi juga harus sesuai dengan kepentingan masyarakat juga. Heal (2004) banyak memberikan ilustrasi langsung bagaimana program CSR yang dilakukan banyak perusahaan besar dunia untuk mengatasi konflik dengan masyarakat.

Menghindari/mengurangi konflik adalah kontribusi besar dari program CSR perusahaan yang efektif. Sedangkan penelitian Ako, Obokoh & Okonmah (2009) menunjukkan bila perusahaan minyak Shell yang beroperasi di Delta-Region, Nigeria, bersikap lebih “bertanggung jawab” dengan program CSR yang sesuai dengan keadaan di Negara berkembang, perlawanan masyarakat terhadap operasinya akan dapat diminimalisasi.

Penelitian berkaitan dengan konflik dan CSR juga dilakukan pada perusahaan AngloGold Ashanti di Kongo oleh Barnett (2010) dan perusahaan tambang emas Barrick Gold di Tanzania oleh Newenham-Kahindi (2010).

Kelompok organisasi non-pemerintah, koalisi-koalisi masyarakat dan serikat buruh percaya bahwa perusahaan telah menjadi kombinasi berbahaya antara kekuasaan dan institusi tanpa akuntabilitas akibat kemampuannya mengendalikan bidang-bidang masyarakat yang sebelumnya melekat pada wilayah publik. Perusahaan dikhawatirkan telah banyak melakukan kejahatan pada para pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial korporat (CSR) saat ini ditawarkan sebagai jawaban-jawaban atas kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. CSR dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korektif yang dilakukan berdasarkan kesadaran pribadi bahwa perusahaan menjadi lebih peduli pada hal-hal di luar laba dan rugi, serta merasa bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan (Bakan 2004). Demikian pula menurut Westphalen (2012). Dia juga menemukan bahwa konsep CSR menurut masyarakat sekitar operasi pertambangan adalah mekanisme untuk mengkompensasi biaya-biaya sosial dan lingkungan yang terkait dengan pertambangan. Biaya ini antara lain adalah biaya terkait dampak lingkungan dan dampak sosial.

Penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan penelitian Ako, Akoboh & Okonmah (2009), Barnett (2010), dan Newenham-Kahindi (2010) yaitu meneliti CSR dan konflik di negara berkembang. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih sederhana dengan berfokus pada penyelesaian konflik, dalam hal ini apakah penyelesaian konflik dilakukan dengan CSR atau tidak. Jadi bukan mempelajari program-program CSR yang dilakukan perusahaan atau model partisipasi masyarakat yang seperti apa yang digunakan. Demikian pula dengan metode pengumpulan data. Penelitian ini tidak menerapkan metode yang sekompleks pada penelitian yang dilakukan oleh para peneliti asing tersebut. Tetapi

penelitian ini sebagian besar menerapkan dokumentasi berita yang terpublikasi pada berbagai media cetak dan elektronik serta wawancara terbatas.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan CSR juga menjadi semakin umum pada perusahaan pertambangan seperti Pertamina. Pertamina adalah perusahaan pengelola energi. Sejauh ini produksinya adalah minyak bumi dan gas. Sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Pertamina banyak menghadapi konflik lingkungan dan lahan dengan masyarakat sekitar daerah operasi. Namun di lain pihak, Pertamina juga sangat fokus pada program CSR yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mempertanyakan apakah CSR dapat berperan dalam penyelesaian konflik yang muncul.

Untuk mengungkap hal tersebut, penelitian ini menerapkan metode penelitian naratif seperti yang diulas oleh Allen (2006) dan Lyle (2009). Penelitian naratif menekankan pada membaca, memahami, dan menuliskan kembali inti permasalahan (Allen, 2006; Hall dan Long, 2012). Pelaksanaan teknik pencarian datanya, terutama dilakukan melalui media cetak dan internet serta wawancara dengan seorang karyawan Pertamina. Proses analisisnya dilakukan dengan menjodohkan pola antara referensi dan data empiris. Dengan menerapkan proses demikian dapat diketahui bahwa dalam beberapa kasus, CSR memang memiliki peran dalam upaya penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal sekitar daerah operasi.

TINJAUAN PUSTAKA

CSR Sebagai Penyelesaian Konflik Antara Perusahaan dengan Masyarakat

Barnett (2010) membagi masalah konflik yang timbul antara perusahaan dengan masyarakat menjadi 4 kelompok, yaitu pertama hilangnya tanah serta kerugian individual maupun kolektif atas keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Kedua, terjadinya

degradasi lingkungan dan sumber daya alam. Ketiga, terjadinya penyalah-gunaan hak asasi manusia. Keempat, terjadinya kegagalan perusahaan mendapatkan persetujuan dan memenuhi tuntutan masyarakat atas suatu proyek tertentu. Sedangkan Prayogo (2010) melihat masalah konflik tersebut dari sisi anatomi antara pihak perusahaan, di satu sisi, dengan pihak masyarakat dan lingkungannya, di sisi lainnya. Anatomi masalah tersebut telah dipetakan dalam tabel dibawah ini.

Permasalahan Dalam Resolusi Konflik

	Perusahaan	Masyarakat
Posisi dan peran	Pihak defensif, penyebab konflik, namun memiliki <i>power</i> ekonomi	pihak ofensif, dirugikan, namun "tuan rumah", pihak yang tereksplorasi
Masalah dan hambatan	prioritas profit dan filosofi bisnis eksploitasi, masyarakat bukan <i>stakeholder</i> primer, kurangnya pedoman peraturan	kemiskinan, tiadanya keadilan dan pemerataan ekonomi, eksistensi lokal
Persepsi tentang Resolusi	upaya menghilangkan tekanan, kepedulian, temporal, masalah keamanan dan manajemen	keadilan, pemerataan kesejahteraan, pemenuhan hak

Sumber: Prayogo, Dodi. 2010. Anatomi Konflik Antara Perusahaan dan Masyarakat Lokal pada Industri Geothermal di Jawa Barat

Dalam kasus konflik pertambangan, yang sering terabaikan adalah akses masyarakat lokal terhadap proses eksploitasi tersebut. Masyarakat lokal tidak memiliki informasi memadai mengenai proses pengerukan isi perut bumi dan semata-mata berurusan dengan resiko bencana yang nyata dan aktual dari eksploitasi tersebut (Djalong, 2010).

Untuk menyelesaikan konflik, hubungan konstruktif seharusnya diciptakan. Terdiri dari pertimbangan *cost* dan *benefit* proyek secara ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta dengan hati-hati mengintegrasikan kepentingan perusahaan dan *stakeholder* supaya saling menguntungkan. Perusahaan mungkin harus melakukan penilaian risiko sosial dan *stakeholder*, menyusun standar, mengembangkan strategi membangun konsensus, berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena pengaruh, mendapatkan persetujuan masyarakat sebelum memulai operasi atau mendapatkan lisensi sosial. Memikirkan apa yang penting untuk kelangsungan perusahaan, keuntungan jangka-panjang, dan keunggulan kompetitif melalui sistem strategis hubungan dengan *stakeholder*, adalah apa yang harus didesain dan diimplementasikan oleh semua perusahaan di berbagai ukuran (Ore, 2010).

CSR didefinisikan sebagai usaha serius untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang disebabkan oleh seluruh atau bagian-bagian tertentu dari perusahaan (Fitch, 1976 dalam Carroll, 1998). Dalam situasi konflik, biasanya CSR hadir dengan memberikan masyarakat sebuah fantasi kesejahteraan baik dalam formula *Community Development* ataupun bagi hasil dengan pemerintah daerah setempat yang juga tak sepenuhnya diketahui masyarakat lingkaran tambang. Mereka dikonstruksi sebagai konsumen yang tinggal menikmati bagi hasil keuntungan eksploitasi, sementara dibiarkan hidup dengan segala resiko nyata akibat tata kelola SDA yang tertutup antara investor dan elit-elit politik pusat dan daerah. Karena itulah dapat dimaklumi sikap resisten dan protes dengan kekerasan yang dipertunjukkan oleh masyarakat tidak semata-mata disebabkan persoalan adil tidaknya distribusi dana dan proyek *Community Development*, tetapi lebih mendasar lagi, yakni tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan; artinya, tidak ada rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap kehadiran dan praktik perusahaan di wilayah mereka hidup dan bekerja (Djalong, 2010).

Sedangkan menurut Bakan (2007), tanggung jawab sosial mungkin hanyalah cara perusahaan untuk menampilkan diri sebagai sebagai pihak yang penuh kasih dan perhatian terhadap pihak lain, sementara sebenarnya perusahaan tidak punya kemampuan untuk menyayangi siapapun atau apapun kecuali diri mereka sendiri, dan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk mencari laba, CSR hanyalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan utama tersebut. Lagipula penyelesaian konflik melalui CSR dapat dikatakan hanya sebuah penyelesaian jangka pendek, supaya konflik bisa selesai dalam jangka panjang, perusahaan harus menjalin komunikasi dan menganggap masyarakat lokal setara dengan para pemegang saham atau pemilik (Prayogo, 2010). Westphalen (2012) juga menyatakan bahwa CSR adalah kegiatan sukarela, sehingga perjanjian yang dibuat perusahaan dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik tidak bisa disebut CSR.

Dikarenakan peran CSR yang masih samar dalam penyelesaian konflik, penelitian ini mencoba menemukan bukti apakah Pertamina termasuk perusahaan yang menggunakan CSR sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat lokal. Fokus penyelesaian konflik yang diteliti adalah mengenai pencemaran lingkungan dan sengketa lahan, bukan pada kegiatan CSR. Penyelesaian konflik yang diusahakan Pertamina ada yang menggunakan dana CSR dan ada yang tidak. Bila ditemukan bukti bahwa ada konflik yang diselesaikan dengan dana CSR, maka dapat dikatakan bahwa CSR berperan dalam penyelesaian konflik antara Pertamina dengan masyarakat lokal.

Seperti yang telah disinggung di awal, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang Pertamina menggunakan CSR dalam menyelesaikan beberapa konflik di beberapa wilayah.

METODOLOGI PENELITIAN: Naratif

Penelitian ini berfokus pada upaya mengevaluasi kemampuan program CSR dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam praktek terkait dengan keberadaan dan operasi perusahaan. Dalam kenyataannya masalah konflik antara perusahaan dengan masyarakat sangat rumit, kompleks dan penyelesaiannya berkepanjangan. Guna memahami dan mengungkap permasalahan tersebut, peneliti memilih metodologi penelitian naratif versi Allen (2006) dan Lyle (2009). Menurutnya, metodologi penelitian naratif adalah teknik penelitian yang menekankan pada pemahaman kejadian (*state of affair*) dengan cara pencarian dokumen tertulis yang relevan dengan permasalahan, upaya membaca dan memahami informasi yang diperoleh, melakukan analisa dan interpretasi, kemudian menuliskannya kembali dalam bentuk pelaporan kesimpulan (lihat juga Colbourne dan Sque, 2004; Hall dan Long, 2006). Metodologi ini apabila dilakukan dengan benar, diklaim oleh Dowling (2006), Mauthner dan Doucet (2003) dan Freshwater dan Rolfe (2001) mempunyai sifat reflektif. Dengan demikian metodologi ini akan mampu menyampaikan situasinya secara reflektif.

Selaras dengan metodologi tersebut, pengumpulan datanya banyak dilakukan dengan dokumentasi pada berbagai media, baik cetak maupun elektronik, serta melakukan wawancara. Oleh karena keterbatasan akses langsung dan waktu penyelesaian studi, maka peneliti hanya melakukan wawancara dengan seorang informan.

Proses penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan staf humas bagian CSR di bagian *External Relation* PT.Pertamina (Persero) UPMS V, Ibu Alih Wahjuni. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat atas suatu topik penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Ini menjadikan wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur karena

disesuaikan dengan teori dalam landasan teori, namun selama proses, terkadang peneliti menanyakan informasi-informasi lain yang tidak tercatat sebelumnya. Jenis pertanyaan adalah uraian. Wawancara dilakukan pada tanggal 1 dan 8 Agustus 2012. Situasi saat wawancara sangat formal, pertanyaan diajukan di ruang kantor. Dalam menjawab pertanyaan, staf humas sangat tertutup, menjawab dengan singkat, dan sangat tertata.

2. Pengumpulan data Online berupa artikel melalui internet. Metode ini dilakukan sebagai metode selain wawancara dikarenakan kemungkinan topik yang akan diteliti agak sensitif terutama bagi perusahaan dan karena kurangnya informasi yang didapat melalui wawancara. Pengumpulan artikel online dilakukan dengan mencari informasi mengenai konflik dalam berita-berita di internet, karena topik cukup mudah ditemukan dalam media tersebut, tentunya dengan kata kunci yang sesuai. Seluruh pencarian dari internet ini dilakukan pada 15 Agustus 2012 sampai 29 November 2012. Hasil pencarian sebagian besar adalah dari portal berita online.
3. Penelusuran informasi dari majalah Media Pertamina, majalah mingguan yang diterbitkan oleh Pertamina dan dapat diunduh secara gratis oleh publik melalui website resmi Pertamina. Edisi yang diunduh adalah semua edisi mulai tahun 2008 hingga Agustus 2012.
4. Pengumpulan informasi dari Laporan Tahunan Pertamina, yang diunduh dari website resmi Pertamina.

Proses analisa

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka dalam melakukan analisis data, pertama peneliti akan menuliskan seluruh informasi yang didapatkan dan memilah yang seharusnya dijabarkan dan yang tidak. Berdasarkan pada data yang didapatkan melalui internet, Media Pertamina, dan Laporan Keuangan, informasi-informasi dikelompokkan dan dikombinasikan sesuai tanggal kejadian/tanggal berita, tempat dan kejadian kasus.

Kelompok informasi tersebut diurutkan sesuai deret waktunya, tempat, dan kejadiannya. kemudian seluruh informasi tersebut dijabarkan, diinterpretasikan, dan disimpulkan. Penjabaran yang dilakukan adalah membagi apakah penyelesaian konflik menggunakan CSR atau tidak. Informasi dari internet kemudian dicocokkan dengan berita dari media pertamina, laporan keuangan, dan hasil tanya jawab dengan staf Pertamina. Menurut Creswell (1994) dalam melakukan kategorisasi seharusnya tidak hanya berfokus mengenai substansi informasi, tapi arti dan makna yang terkandung di dalamnya, sehingga meskipun ada informasi bahwa Pertamina melakukan kegiatan CSR ketika ada konflik secara sukarela, namun mengindikasikan bahwa Pertamina memang telah berusaha menyelesaikan konflik dengan masyarakat dengan menggunakan dana program CSR.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertamina, khususnya fungsi hubungan masyarakat, selalu memiliki pengetahuan mengenai deteksi bahaya konflik atau potensi konflik di berbagai segmen pemangku kepentingan mengenai beragam isu, sehingga ada upaya menciptakan kondisi antisipasi terhadap potensi yang akan muncul (*preemptive*), upaya pencegahan terhadap potensi yang sudah muncul (*preventive*). Dan upaya mengatasi hal yang sudah terjadi (*curative*) sejauh mungkin sebagai upaya terakhir. Wilayah kerja Hubmas Kantor Pusat, Unit-unit Operasi, dan Anak-anak Perusahaan berbeda-beda luas dan karakteristiknya. Tetapi pentingnya pemetaan *stakeholders* wajib diterapkan di segala tingkatan dan wilayah.

Pada tahap upaya antisipasi terhadap potensi yang akan muncul (*preemptive*) , tampaknya Pertamina masih kurang dapat memanfaatkan fungsi komunikasi. Selama ini dalam permasalahan perijinan lokasi proyek, hak guna bangunan, dan sengketa tanah, peran komunikasi tidak dimasukkan dalam tahap pra-proyek dan pemetaan masalah yang akan timbul, namun hanya sebagai “pemadam kebakaran”.

Pada tahap pencegahan yang sudah muncul (*preventive*), dikarenakan Pertamina adalah pengelola obyek vital nasional, maka tentunya banyak ancaman yang muncul yang dilakukan berbagai pihak, dengan bermacam-macam tujuan mulai dari upaya mendapatkan perhatian pemerintah, terror, menuntut keadilan, hingga pencurian (Media Pertamina No.29, 2012). Ketika terjadi tindakan anarkis dari masyarakat, Pertamina meminta bantuan aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI. Pengamanan dan perlindungan yang diperlukan tidak hanya sekedar pengamanan aset fisik, tapi juga operasional perusahaan agar berjalan lancar. Beberapa permasalahan yang mendapat perhatian dari aparat keamanan dan Pertamina adalah terkait pengamanan jalur distribusi *crude oil* dan BBM untuk menghindari aksi sabotase maupun pencurian yang mungkin muncul, penyelesaian masalah aset (tanah dan bangunan) milik Pertamina, pola pengamanan aksi unjuk rasa, dan forum komunikasi Polisi dan masyarakat. Dalam menghadapi keluhan masyarakat, Pertamina juga memiliki pusat layanan telepon (*contact center*) 500000, yang tersebar dan dapat dihubungi dari kota manapun di Indonesia dengan akses lokal yang akan diterima di wilayah pemasaran terdekat.

Untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi (*curative*), Pertamina tetap melakukan upaya meminimalkan risiko. Bukan berarti dalam meredam suatu konflik Pertamina serta-merta mengeluarkan dana *at all cost*. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam menghadapi klaim dan tuntutan adalah dengan pembuktian atas klaim dengan melibatkan pihak independen. Pada intinya, Pertamina tidak ingin terus-menerus menjadi obyek yang diserang dan disalahkan semata-mata. Pertamina sangat mengharapkan adanya *feedback* positif dari berbagai pihak yang pernah menerima bantuan dari Pertamina baik melalui CSR, PKBL, maupun *sponsorship*. *Feedback* itu adalah hubungan dan komunikasi berkelanjutan dengan semangat persaudaraan, dan hubungan saling menghargai (Media Pertamina No.52, 2010). Pembuktian atas klaim ini sekiranya dilakukan setelah proses negosiasi. Setelah negosiasi, Pertamina melakukan verifikasi kebenaran kepemilikan warga serta meneliti

seberapa besar pengaruh terhadap masyarakat, untuk selanjutnya dilaporkan ke Pertamina pusat.

Meskipun tahapan-tahapan yang dilakukan Pertamina untuk menghadapi konflik telah terencana dengan baik, namun Pertamina masih sering sekali harus menghadapi konflik yang sama pada daerah yang sama dengan waktu yang berbeda, bahkan ada konflik yang belum jelas bagaimana penyelesaiannya.

KONFLIK ANTARA PERTAMINA DENGAN MASYARAKAT

Bagi Pertamina, konflik adalah buah dari ketidakharmonisan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat. Ketidakharmonisan tersebut muncul dari sisi operasional perusahaan, dimana masyarakat merasa terganggu atas operasi perusahaan, maupun hubungan personal. Dalam penelitian ini, dua konflik yang menjadi fokus pembahasan, yaitu konflik lahan dan konflik lingkungan. Peristiwa konflik antara Pertamina dengan masyarakat yang dihimpun dari internet mengenai ketiga penyebab di atas mulai tahun 2001 hingga 2012 beserta tuntutan kepada perusahaan dengan penyempitan tempat di Indramayu (Jawa Barat, Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan), Cilacap (Jawa Tengah, Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap), Tuban (Jawa Timur, PHE Tuban East Java), Tomohon (Sulawesi Utara, Pertamina Geothermal Energy), Papua, serta di beberapa kota lainnya, yang akan dibahas sebagai berikut.

1. KONFLIK DEGRADASI LINGKUNGAN di BERBAGAI DAERAH

1.1 INDRAMAYU

Tahun 2004 dan 2008, Pertamina diprotes masyarakat atas pencemaran lingkungan perairan. Proses ganti rugi yang dilakukan Pertamina terus berjalan bertahap setiap tahun mulai tahun 2009. Hingga 2012, belum tampak selesainya ganti rugi berupa uang. Sementara

itu, Pertamina terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dan masyarakat sekitar melalui program CSR.

Tahun 2010, Pertamina membayar ganti rugi atas pencemaran lahan warga Indramayu yang terjadi sejak tahun 1995 (ganti rugi ini adalah akibat protes oleh masyarakat pada 2004) yang totalnya sebesar Rp. 27 M dan melakukan kesepakatan dengan nilai sebesar Rp. 5,5 M. Untuk protes tahun 2008, Pertamina membayar Rp. 86 M untuk beberapa desa.

Tahun 2011, Pertamina sepakat untuk melakukan Program Pemulihan Kualitas Lingkungan (PPKL). Kesepakatan dalam PPKL, di antaranya perbaikan dan pemulihan infrastruktur laut akibat pencemaran limbah. Selain itu, menyelenggarakan pelatihan pembuatan alat tangkap ikan bagi nelayan, serta budi daya ikan bagi petani tambak, selain itu masyarakat juga berharap agar proses pemulihan lingkungan adalah berupa penanaman pohon *mangrove*, pembuatan jalan di sentra pertambakan, pembuatan saluran, serta upaya pembersihan kawasan pantai. Penanaman pohon *mangrove* dilakukan Pertamina beberapa bulan kemudian, meskipun dalam Laporan Tahunan 2010 disebutkan bahwa sejak tahun 2010, Pertamina telah mencoba memulihkan dan meningkatkan kualitas perairan dengan menjalankan program tersebut.

Namun pada saat yang sama, warga salah satu desa di Indramayu masih juga menagih kompensasi tahap 2 tahun 2008 atas dampak pengolahan, Pertamina melalui program CSR korporat akan memberi fasilitas PDAM dan meningkatkan program pemberdayaan. Namun warga menolak diberi kompensasi melalui program CSR. Inisiatif Pertamina untuk mengkompensasi melalui CSR ini adalah karena Pertamina hanya memberikan kompensasi berupa uang apabila pencemaran itu benar-benar terbukti melampaui ambang batas yang ditetapkan. Pada tahun 2012, Pertamina memulihkan lahan tercemar di Indramayu. Salah satu inisiatif pemulihan adalah dengan menanam bakau.

Dalam kasus konflik antara Pertamina dengan masyarakat Indramayu menunjukkan CSR memang berperan dalam usaha Pertamina menyelesaikan permasalahan, namun peran ini sangat kecil dan terlihat kurang efektif dalam penyelesaian konflik secara tuntas. Ini sesuai dengan teori Prayogo (2010) bahwa CSR merupakan salah satu langkah resolusi konflik jangka pendek.

1.2 CILACAP

Sejak tahun 2001, Pertamina telah dituduh melakukan pencemaran perairan Cilacap akibat kebocoran atau tumpahnya minyak mentah dari kapal saat melakukan distribusi. Ganti rugi yang dilakukan Pertamina adalah dengan uang tunai kepada masyarakat nelayan yang terkena dampak langsung pencemaran tersebut. Dalam permasalahan lingkungan antara Pertamina dengan masyarakat Cilacap ini, sebenarnya ganti rugi diberikan oleh pemilik kapal, Pertamina bertugas melakukan perbaikan lingkungan. Karena ganti rugi adalah melalui pembayaran ganti rugi secara tunai, maka ini artinya CSR sama sekali tidak berperan. Namun Pertamina tetap melakukan usaha perbaikan lingkungan melalui program pelestarian perairan hutan *mangrove* yang termasuk CSR (Laporan Tahunan 2011).

1.3 TUBAN

Operasi Pertamina sering diprotes berkaitan dengan pencemaran lahan pada tahun 2011, serta pencemaran udara pada tahun 2012. Tahun 2011, Pertamina memberi bantuan (ganti rugi) bagi petani, karena kegiatan operasinya merusak lahan pertanian. Ganti rugi tersebut sejumlah Rp. 3500/kg. Pertamina juga mengganti rugi (bagi Pertamina disebut bantuan) dampak operasi yang belum direalisasikan, jumlah ganti rugi adalah sebesar Rp. 125 juta. Tapi pada 2012, saat ada tuntutan pencemaran, kesehatan, dan tenaga kerja, Pertamina mencoba mendamaikan keluhan masyarakat dengan menyatakan bahwa selama ini

sebenarnya tuntutan warga sudah diberikan melalui program CSR. Setelah itu, Pertamina mengadakan pengobatan gratis, ini dilakukan untuk memenuhi permintaan warga atas berbagai keluhan kesehatan. Namun kompensasi berupa uang tidak diberikan. Masalah tenaga kerja, Pertamina sepakat akan merekrut tenaga kerja non-skill sebesar 15%-50 %.

Adanya pengobatan gratis ini dibiayai oleh CSR, serta sebutan bantuan bagi ganti rugi yang dilakukan, menunjukkan bahwa Pertamina memang berusaha menyelesaikan konflik dengan masyarakat melalui CSR.

1.4 TOMOHON

Pada tahun 2011, muncul isu menurunnya kondisi lingkungan sekitar wilayah operasi pengeboran panas bumi Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong yang dilakukan sejak tahun 2005 dan merugikan sekitar 10.000 ribu warga. Pertamina berjanji akan memberikan kompensasi bila terbukti mencemari. Bersamaan dengan itu, Pertamina melakukan serangkaian program CSR, diantaranya penyerahan *ambulance*, namun program ini bagi sebagian orang hanyalah sebagai pengalih perhatian atas isu lingkungan.

Namun Pertamina menyangkal dengan menyatakan bahwa CSR adalah keharusan, bukan program tutup mulut. Tahun 2012, Pertamina dinyatakan tidak melakukan pencemaran, berdasarkan bukti tes yang dilakukan ahli dari Universitas Sam Ratulangi. Tapi meski menyatakan Pertamina tidak bersalah, ahli tersebut menyarankan agar Pertamina membangun irigasi dan bendungan.

Pertamina menggunakan CSR sebagai upaya pencegahan (*preemptive*). Dinyatakan tidak bersalah dalam permasalahan pencemaran. CSR tidak berperan dalam penyelesaian konflik.

2. KONFLIK SENGKETA LAHAN

2.1 PAPUA

Tahun 2012, terjadi sengketa lahan antara pemilik lahan di Nabire dengan Pertamina. Pemilik lahan meminta ganti rugi sebesar Rp. 15 M atau memaksa Pertamina pindah lokasi operasi. Dalam kejadian itu, Pertamina harus membayar ganti rugi senilai Rp.15M. Namun sesuai kesepakatan, Rp.15 M ini dapat diganti dalam bentuk program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam konflik tersebut, Pertamina bersikeras untuk tidak memberikan ganti rugi berupa uang, namun dengan kompensasi kemitraan, pemilik lahan yang awalnya tidak setuju akhirnya mau menerima untuk dibuatkan proyek kemitraan yang nilai nominalnya sesuai besar tuntutan, yaitu Rp.10 M untuk program wirausaha, dan Rp.5 M untuk program beasiswa, apabila tidak sanggup membuat proyek ini, maka warga meminta Pertamina untuk membayar secara tunai. Setelah dilakukan negosiasi, pemilik lahan menyetujui agar Pertamina mengganti rugi dengan program kemitraan dan beasiswa. Ini menunjukkan bahwa CSR berperan.

Selain di Nabire, Pertamina dinyatakan kalah dalam persidangan kepemilikan tanah dan diharuskan membayar ganti rugi pemakaian lahan kepada para pemilik tanah di Bitung senilai Rp. 8,5 M. Pertamina juga dinyatakan kalah dalam persidangan tanah di Dumai dan harus membayar Rp. 125 M pada pemilik lahan yang dinyatakan menang oleh persidangan. Berdasarkan kasus di Bitung dan Dumai, penyelesaian konflik diputuskan oleh pengadilan, dan bila Pertamina kalah harus membayar berupa uang yang sangat besar. CSR tidak berperan dalam penyelesaian konflik sengketa lahan ini, kecuali di Nabire.

PERAN CSR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Hasil wawancara menyatakan bahwa peran CSR bagi Pertamina adalah bukan pada penyelesaian konflik, melainkan pada pencegahan.

CSR yang dilakukan perusahaan bukan untuk menyelesaikan konflik, namun untuk membina hubungan baik serta mencari dukungan dari masyarakat untuk mencegah konflik. Pertamina melakukan CSR sebagai bentuk tanggung jawab. Karena sungguh tidak masuk akal bila baru mengeluarkan dana CSR ketika konflik sedang terjadi, itu membuat perusahaan akan semakin rugi. Dan walaupun ada bantuan setelah konflik, itu bukan untuk penyelesaian, tapi karena sudah diagendakan.

Kesimpulannya, Pertamina bukan melakukan CSR karena terancam (Alih Wahjuni, wawancara tanggal 8 Agustus 2012).

Dalam strategi pengembangan program CSR/TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) terdapat salah satu poin yaitu “Bertanggung jawab terhadap dampak operasi”. Ini berarti bahwa Pertamina dalam mengembangkan program juga didasarkan atas kesadaran bahwa Pertamina memiliki dampak operasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Program CSR yang berkesinambungan juga harus dapat mengidentifikasi potensi dan resolusi (penyelesaian) konflik dalam masyarakat yang terkait (Media Pertamina No.16, 2009). Selain itu, pembahasan di atas menunjukkan bahwa CSR memang berperan dalam penyelesaian konflik antara Pertamina dengan masyarakat lokal sekitar daerah operasi, meskipun hanya dalam lingkup yang terbatas pada konflik tertentu.

Namun peran CSR dalam penyelesaian konflik ini sepertinya masih belum berkelanjutan, dikarenakan di kemudian hari Pertamina masih saja diprotes karena permasalahan yang sama. Ketidakberlanjutan ini sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan Pertamina, masyarakat lokal juga memiliki banyak ketidakpuasan dan terus menuntut Pertamina. Meski sedikit, namun peran CSR Pertamina ini sesuai dengan teori Heal (2004:6) yaitu bahwa Program CSR memiliki peran dalam konflik, dalam konteks bila terdapat perbedaan antara tujuan-tujuan perusahaan dan biaya sosial yang muncul itu berbeda, CSR dapat mengurangi perbedaan atau mengkompensasinya. Perusahaan dengan

kebijakan CSR yang aktif dapat mengantisipasi dan meminimalisasi konflik sebelum membesar.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data-data yang telah dikumpulkan adalah bahwa CSR memiliki peran dalam usaha Pertamina menyelesaikan konflik dengan masyarakat lokal sekitar daerah operasi. Dalam penyelesaian konflik lingkungan, peran CSR muncul ketika dampak operasi Pertamina belum melebihi ambang batas yang ditetapkan Pemerintah/Badan Lingkungan Hidup. Pertamina tidak boleh memberikan ganti rugi berupa uang karena harus dipertanggung jawabkan pada pemerintah. Sebagai gantinya, Pertamina memberikan program CSR/PKBL sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas dampak operasi yang dihasilkan. Sementara dalam konflik lahan, sebagian besar tidak menggunakan CSR dikarenakan sudah masuk dalam lingkungan hukum. Namun terdapat kasus dimana konflik lahan diselesaikan melalui CSR yang dinegosiasikan. Peran CSR dalam penyelesaian konflik ini disanggah oleh karyawan Pertamina yang menyatakan bahwa CSR adalah murni tanggung jawab sosial, dan bukan untuk tujuan lain seperti penyelesai konflik maupun pengalih perhatian.

Namun peran CSR ini sangat kecil dan kurang maksimal dikarenakan di kemudian hari Pertamina masih mengalami konflik dengan masyarakat mengenai kasus yang sama. Hasil kesimpulan ini tidak dapat digeneralisasikan antara satu kasus dengan lainnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti dalam pencarian data, pencarian data sebagian besar dilakukan dengan media internet. Kurangnya akses ke pegawai-pegawai Pertamina lainnya yang justru menangani konflik, juga kemungkinan tidak menemukan berita yang sesuai dari internet, media Pertamina, maupun Laporan Tahunan.

SARAN

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode lain selain dokumentasi, misalnya wawancara yang dilakukan dengan sebanyak mungkin pihak terkait dan observasi langsung bila memungkinkan. Ini karena informasi yang didapat dari dokumentasi saja kurang bisa menggambarkan sifat refleksif, meskipun telah diverifikasi antara dokumen satu dengan lainnya. Wawancara mendalam juga akan menjadi lebih baik bila dapat dilakukan dengan dua pihak berkonflik agar bisa dilakukan pengecekan silang, karena informasi yang didapat dari satu pihak saja terkadang bertolak belakang dengan pihak lain. Observasi juga sebaiknya dilakukan untuk memahami kondisi konflik dan hubungan antar pihak dengan lebih mendalam. Pada dasarnya, semakin banyak metode pengumpulan data yang dilakukan akan semakin baik untuk membuktikan simpulan atas rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, C 2006, 'Narrative Research', *Nurse Researcher*, Vol. 13(3), hal. 4-6.
- Ako, RT, Obokoh, LO, & Okonmah, P 2009, 'Forging Peaceful relationship between oilcompanies and host communities in Nigeria's delta Region', *Journal of Enterprising communities : people & Places in the global Economy*, Vol,3(2), Page : 205-216.
- Bakan, Joel 2004, *The Corporation : Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta*, Terjemahan oleh Sri Isnani Husnayati, 2007, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Barnett, Sarah 2010, 'Company-Community as a conflict management strategy : a case study of AngloGold Ashanti in Mongbwalu, Democratic Republic of the Congo', Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University.
- Carroll, AB 1999, 'Corporate Social Responsibility : Evolution of a definitional Construct', *Business & Society*, Vol.38(3), September 1999, Page : 268-295.
- Colbourne L, dan Sque, M 2004, 'Split personalities: role conflict between the nurse and the nurse researcher'. *NT Research*. Vol 9, No. 4, hal. 297-304.
- Creswell, JW 1994, *Qualitative and Qualitative Methods*, Sage Publication, California.
- Djalong, F 2010, 'Konflik pertambangan ; mengelola paradoks (persepektif Demokrasi politik)', *Materi disampaikan dalam pelatihan dasar konflik dan penanganan konflik industri ekstraktif*, Yogyakarta, 25-28 Oktober.
- Divisi Komunikasi Korporat Pertamina 2009, 'Ciptakan *Blue print* CSR untuk membentuk Humas yang kuat dan berkompeten', *Media Pertamina*, 20 April, Hal.8.
- Divisi Komunikasi Korporat Pertamina 2010, 'Antisipasi dini', *Media Pertamina*, 27 Desember, Hal.3.

- Divisi Komunikasi Korporat Pertamina 2012, 'Menjaga Obvitnas', *Media Pertamina*, 16 Juli, Hal. 3.
- Dowling, M 2006, 'Approaches to Reflexivity in Qualitative Research', *Nurse Researcher*, Vol. 13, No. 3, hal 7-21.
- Freshwater, D dan Rolfe, G 2001, 'Critical reflexivity: a politically and ethically engaged research method for nursing'. *NT Research*, vol 6, No. 1, hal. 526-537.
- Hall, T dan Long, B 2012, 'From Digital Literacy to Digital Narrativity; From Reflective Practice to Narrative Practice: Digital Storytelling in Education', *Position Paper for Workshop: 'Identity and Narratives in the Digital Age', Tuesday May 29, The American University of Paris, 29th May*.
- Heal, G 2004, 'Corporate Social Responsibility—An economic & Financial Framework', Paper disajikan dalam Annual Conference of the Monthe Paschi Vita.
- Lyle, E 2009, 'A Process of Becoming: In Favour of a Reflexive Narrative Approach' *The Qualitative Report* Vol. 14 No: 2 hal. 293-298
- Mauthner, N dan Doucet, A 2003, 'Reflexive accounts and accounts of reflexivity in qualitative data analysis', *Sociology*, Vol. 37, No. 3, hal. 413-431.
- Newenham-Kahindi, AM 2010, 'A Global mining corporation and local communities in the lake Victoria Zone : Th9th case of Barrick Gold multinational in Tanzania', *Journal of Business Ethics*, Vol.99, Page : 253-282.
- Ore, LE 2011, 'Corporate Social Responsibility, Effective Grievance mechanisms, and stakeholders engagement strategies as competitive advantage', *consulting group*, (online), (diakses pada 19 Maret 2012), (www.orasicg.com).
- Prayogo, D 2010, 'Anatomi Konflik Antara perusahaan dan masyarakat lokal Pada Industri Geothermal di Jawa Barat', *Makara, Sosial Humaniora*, Vol.14 (1), Juli 2010, Hal : 25-34.
- PT. Pertamina (Persero) 2010, Laporan Tahunan.
- PT. Pertamina (Persero) 2011, Laporan Tahunan.
- Westphalen, LG 2012, 'Corporate Social Responsibility in the Mining Sector', *Canadian Student Review*, (online) , (<http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraserca/Content/research/news/research/publications/canadian-student-review-spring-2012.pdf>, dikses pada 27 Feb 2013).
- Yin, RK 2003, *Studi Kasus Desain & Metode*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- <http://www.tempo.co/read/news/2004/04/20/05641752/Masyarakat-Pesisir-TuntutPertamina-Bayar-Ganti-Rugi>
- <http://travel.kompas.com/read/2008/05/05/20462883/Semburan.Gas.di.indramayu.Makin.Membesar>
- <http://lipsus.kompas.com/dulmatin/read/2008/12/15/10584616/Ratusan.Nelayan.dan.Peta>
- mbak.Indramayu.Demo <http://www.pikiran-rakyat.com/node/116345>;
- <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=73784> <http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/content/view/378682/>
- <http://ajiinews.blogspot.com/2010/12/pertamina-balongan-program-csr.html>
- <http://redaksigalang.blogspot.com/2012/01/pembayaran-ganti-kerugian-limbah-crude.html>

- <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311821>
- <http://tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2004/09/10/brk.20040910-27 .id.html>
- <http://suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2008/04/05/7769/perairan.cilacap.tercemar>
- <http://okezone.com/read/2008/04/05/19/97819>
- <http://republika.co.id/berita/braking-news/nusantara/10/10/06/138373-rekanan-pertaminatumpahkan-minyak-nelayan-cilacap-tuntut-rp-10-m>
- <http://www.cilacapmedia.com/index.php/rubrik/news/77-pertamina-belum-pernahmemberikan-dana-perbaikan-lingkungan.html>
- <http://seputartuban.com/2012/10/31/tuntutan-kompensasi-warga-tidak-akan-disetujui Pertamina/>
- <http://jurnalberita.com/2011/06/pertamina-ingkar-janji-bayar-ganti-rugi-petani/>
- http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2012-1108/151968/Pertamina_Janji_Penuhi_Tuntutan_Warga <http://kotatuban.com/2012/11/>
- <http://manado.tribunnews.com/2012/09/21/tino-kami-tak-buang-limbah-keluar-perusahaan>
- <http://manado.tribunnews.com/2012/05/27/turang-pertanyakan-tanggungjawab-moral-pge>
- <http://manado.tribunnews.com/2011/10/30/dprd-tomohon-pertamina-tidak-manusiawi>
- <http://www.manadotoday.com/sembel-pge-jangan-alihkan-perhatian-publik/44037.html>
- <http://manado.tribunnews.com/2011/12/13/nova-data-tim-amdal-unsrat-sudah-akurat;>
- <http://manado.tribunnews.com/2011/11/24/kepala-blh-tomohon-seng-berkarat-alamiahbukan-aktivitas-geothermal-pt-pertamina>
- <http://www.metroanjung.com/2011/10/limbah-pertamina-genangi-lahan-warga.html>
- <http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2010/07/31/110219/Pipa-PertaminaBocor-Belasan-Rumah-Tergengang-Minyak> <http://palembang.tribunnews.com/m/index.php/2012/04/24/pipa-pertamina-disabotase>
- [http://news.detik.com/read/2008/04/25/205352/929742/10/pertamina-janji-semburan lumpur-muaraenim-segera-distop?nd992203605](http://news.detik.com/read/2008/04/25/205352/929742/10/pertamina-janji-semburan_lumpur-muaraenim-segera-distop?nd992203605)
- <http://www.riauonline.com/berita/peristiwa/indragiri-hulu/limbah-b3-ub-ep-lirik-bunuhikan-masyarakat.html>
- <http://www.tvberita.com/webdaerah/berita.php?id=1&daerah=Karawang&idberita=786;> <http://www.metropuncaknews.com/read/2012/09/06/15529/warga-tuntut-danakompensasi-explorasi-pertamina>
- <http://news.liputan6.com/read/339439/pertamina-siap-ganti-rugi-kebakaran-langkat>
- <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/27/122480/PertaminaPPGJ-Harus-Jamin-10-Persen-Pasokan-Air> <http://www.bekasiekspresnews.com/?p=9556>
- <http://papuaposnabire.com/index.php/kabardarinabire/2598-7-keluarga-tuntut-ganti-rugihak-garapan-tanah-pertamina-senilai-15-m>
- <http://www.tribunnews.com/2012/08/01/spekulan-lahan-masih-rawan-di-area-kerjapertamina-sangatta>
- http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=48335

<http://www.theindonesianway.com/pertamina-wajib-bayar-ganti-rugi-6-ahli-waris-depotbitung>/<http://www.suaramanado.com/berita/bitung/hukumkriminal/2010/12/25/ganti-rugi-pertamina-belum-terrealisasi> <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/09/18572671>

Memaknai *Corporate Governance* Berbasis Kearifan Lokal

HANIF*

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

UNTI LUDIGDO

AULIA FUAD RAHMAN

ZAKI BARIDWAN

Universitas Brawijaya

Abstrak : Penelitian ini bertujuan memaknai tata kelola (*corporate governance*) dalam organisasi grup restoran Padang X Jakarta. Organisasi restoran Padang dipilih karena memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaan organisasinya (Naim, 1985; Naim et al, 1987). Penelitian ini juga bertujuan menggali nilai-nilai lokal apa saja yang mendasari tata kelola perusahaan sebab pada awalnya, perusahaan tumbuh dengan nilai-nilai tradisional dan bagaimana nilai-nilai tradisional itu bertahan dalam kepungan nilai-nilai modern yang mendominasi kota Jakarta. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan pendekatan grounded. Peneliti langsung ke lapangan menghayati dan merasakan praktik yang terjadi dalam tata kelola grup restoran Padang X.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa grup restoran Padang X memiliki keunikan tersendiri dalam tata kelolanya. Sistem bagi hasil adalah pusat keunikan dari tata kelola, sebab semua tata kelola berhulu dan bermuara dari sistem ini. Sistem bagi hasil terlaksana dengan baik di perusahaan ini karena diselenggarakan dengan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Dengan kata lain, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) merupakan syarat mutlak sistem bagi hasil dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan GCG di grup restoran Padang X juga diwarnai nilai-nilai kearifan lokal. Meskipun telah terjadi perubahan-perubahan seiring berubahnya ruang, waktu, corak organisasi, dan sumber daya manusia, perubahan-perubahan tersebut masih di tataran permukaan saja. Namun secara substansi, keunikan tata kelola perusahaan dengan sistem bagi hasil tetap terlaksana dengan baik. Sebagai satu contoh akuntabilitas keuangan dilakukan secara terbuka, sehingga semua anggota organisasi restoran memiliki informasi yang simetri, artinya mulai dari bagian cuci piring sampai pada jajaran manajemen dan investor, memiliki akses yang sama terhadap informasi keuangan. Hal ini, sesuai pula dengan jargon mereka bahwa piti (uang) satu rupiah adalah milik bersama. Jargon ini mengikat perilaku mereka untuk saling bekerja sama, saling asah, asih dan asuh dalam mencapai tujuan organisasi. Selain hal itu, penelitian ini juga menghasilkan suatu model tata kelola perusahaan.

Kata kunci: Tata Kelola, Bagi Hasil, *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness*.

* Corresponding author: hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id

1. Pendahuluan

Pemberitaan berbagai media akhir-akhir ini menunjukkan semakin meningkatnya praktik korupsi, terutama korupsi di organisasi publik. Tata kelola organisasi yang dilakukan dengan baik (*good corporate governance*) atau GCG dianggap dapat mengurangi tindak kejahatan korupsi tersebut. Adopsi konsep GCG di Indonesia terutama dikaitkan pula dengan upaya menangkal terjadinya tindakan korupsi, yang makin marak di negeri ini. Sidharta (IAI, 2013) mengemukakan, GCG merupakan jurus ampuh menangkal korupsi. Jika GCG diterapkan, tindakan manipulatif dan koruptif akan segera diketahui. Oleh sebab itu, GCG tetap memberi harapan, meskipun tidak menjamin dapat menghilangkan sepenuhnya tindakan korupsi tersebut.

Penelitian tentang *corporate governance* telah banyak dilakukan, terutama dengan paradigma positivistik. Namun, masih sangat jarang menggunakan pendekatan non-positivistik. Misalnya, Naim *et al* (1987) melakukan penelitian tentang manajemen restoran Padang dengan pendekatan sosiologi, walaupun dalam penelitian itu ia tidak secara spesifik menyebut *corporate governance*.

Naim *et al* (1987) menemukan hal yang menarik. Ia menyatakan, manajemen restoran Minang, atau sering juga disebut restoran Padang, memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaannya, yaitu diwarnai dengan kearifan lokal budaya Minangkabau. Penelitian Naim dan kawan-kawan ini dilakukan di restoran Padang di kota Padang pada 1983.

Peneliti mengangkat tata kelola restoran Padang dalam konteks yang sangat berbeda dengan Naim dan kawan-kawan. Mereka melakukan penelitiannya di wilayah budayanya restoran Padang, yaitu Minangkabau. Naim dan kawan-kawan meneliti di 15 restoran Padang yang berbeda, berstatus perusahaan perseorangan, dengan maksimal tenaga kerja hanya 20. Dalam penelitian Naim *et al* (1987), menemukan bahwa *spirit* lebih mendominasi materi dalam manajemen restoran Padang

Sedangkan, penelitian ini dilakukan di arena yang lebih “garang,” yaitu kota bisnis Jakarta. Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang telah didominasi nilai-nilai kapitalis, yaitu yang meletakkan materi di atas segala-galanya. Di kota Jakarta inilah grup restoran Padang X yang akan diteliti, didirikan dan berkembang.

Grup restoran Padang X, saat ini telah berbadan hukum perseroan terbatas (PT), memiliki 105 cabang, dengan 3.600 karyawan, dan telah melibatkan banyak investor dengan latar belakang yang berbeda-beda pula. Grup restoran Padang X, awalnya dimulai dengan usaha kaki lima, dengan sebuah gerobak dorong di tahun 1972. Agaknya, di awal berdiri usaha ini, nilai-nilai tradisional Minangkabau masih kental mewarnai pengelolaan usaha karena pak Udin, sebagai pendiri sampai hari ini masih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Namun, dalam konteks saat ini, di mana grup restoran Padang X sudah berkembang menjadi bisnis dengan skala besar, dengan lingkungan yang sangat kompetitif dan dinamis, dengan tren bisnis restoran waralaba internasional. Dalam lingkungan bisnis seperti itu, masihkah pengelolaannya memiliki keunikan dengan spirit yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya?

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana memaknai tata kelola grup restoran Padang X dalam konteks kekinian, di mana restoran didirikan dan beroperasi di luar budaya Minangkabau, yaitu di kota Jakarta? Nilai-nilai luhur apa saja yang mendasari tata kelola tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan makna tata kelola di grup restoran Padang X tersebut.

2. Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded*. Oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti tidak mendasarkannya pada satu teori tertentu, agar

tidak terjadi pra-konsepsi. Sebaliknya, penelitian ini diharapkan dapat menemukan proposisi tertentu, bahkan konsep baru tentang tata kelola perusahaan.

Namun, untuk memahami konsep *corporate governance* (CG) yang sudah ada perlu penjelasan tentang CG tersebut. Konsep CG yang saat ini banyak menjadi wacana publik di Indonesia diadopsi konsepnya dari luar Indonesia. *Corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* Inggris tahun 1922, sebagaimana yang dikutip Agoes dan Ardana (2009:101), yaitu:

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Definisi tersebut melukiskan mekanisme pengelolaan organisasi yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Konteks mekanisme itu adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan strategi tertentu, agar mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Mekanisme tata kelola tersebut dijalankan dengan prinsip GCG, sebagaimana yang dikemukakan oleh *Indonesia's Code of Good Corporate Governance*. Prinsip itu juga sejalan dengan salah satu isi keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002, yaitu *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independence* (bebas dari pengaruh), dan *fairness* (adil) (Tjager et al, 2003; Agoes & Ardana, 2009:103), yang disingkat dengan "TARIF". Tulisan ini sengaja tidak merujuk pada satu teori tertentu untuk menjelaskan segala hal tentang GCG tetapi GCG digali dari dunia praktik.

3. Metode Riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan metode *grounded*. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak membawa konsep atau teori tertentu dalam mengumpulkan data di lapangan. Peneliti terlibat dan hadir secara langsung di manajemen grup serta di beberapa kedai grup restoran Padang X di Jakarta. Situs penelitian adalah di kantor pusat pengelola restoran, dan satu kedai (cabang) restoran.

Data diperoleh dari observasi partisipatif dan wawancara tidak terstruktur dengan beberapa informan. Di samping itu, peneliti mendeskripsikan suasana yang berkaitan dengan tata kelola grup restoran Padang X. Selanjutnya peneliti juga mengumpulkan dokumen relevan untuk memperkuat hasil wawancara, seperti laporan “keuangan”, yang dibuat setiap 100 hari kerja. Dengan demikian, sumber data terdiri dari wawancara dengan informan, mendeskripsikan perilaku orang dalam kaitan tata kelola, dan dokumen-dokumen yang relevan.

Wawancara dengan informan direkam, kemudian disalin ke dalam manuskrip. dan di-*coding*, dengan membaginya ke dalam beberapa tema dan sub-tema makna tata kelola. Setelah itu, dilakukan triangulasi data, yaitu antara peneliti, informan dan ahli. Ahli yang peneliti pilih adalah yang memiliki pengetahuan tentang manajemen restoran Padang dan pernah menelitinya, yaitu seorang sosiolog Muchtar Naim. Peneliti telah melakukan diskusi dengannya terkait tata kelola grup restoran Padang X ini.

Dalam hal melakukan analisis kemungkinan terjadinya perubahan makna dalam tata kelola karena perbedaan wilayah budaya restoran, peneliti mencoba menganalisisnya dengan hasil penelitian Naim *et al* (1987). Hasil penelitian Naim dan kawan-kawan dipilih karena saat ini hanya ini yang ada, yang terpublikasi dan relevan dengan penelitian ini, yaitu tentang

sosiologi manajemen restoran Padang yang diteliti di kota Padang tahun 1983, dan peneliti anggap dapat dijadikan sebagai pembanding. Meskipun sebetulnya membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian Naim dan kawan-kawan, juga ada kelemahan yaitu dari sisi situs penelitian. Artinya perbandingan ini kurang *apple to apple*, karena situs penelitian Naim dan kawan-kawan 15 jenis merek restoran Padang yang berbeda di kota Padang, sementara situs penelitian ini dilakukan di grup restoran Padang X Jakarta di tahun 2012. Meskipun demikian masih ada persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama dilakukan di restoran Padang.

Alasan memilih grup restoran Padang X Jakarta sebagai situs penelitian ini karena perusahaan ini telah berkembang menjadi bisnis yang sudah cukup besar, 105 cabang dengan jumlah karyawan diperkirakan mencapai 3.600 orang, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sebaran cabangnya ditampilkan pada lampiran 1. Dengan besaran bisnis seperti ini, mungkin akan ditemukan tata kelola yang unik.

4. Analisis Data dan Pembahasan

Mekanisme Tata Kelola

Pengelolaan 105 cabang restoran diatur dari kantor pusat di Jakarta yang disebut Pusat Pengelolaan restoran Padang X, sudah berbadan hukum PT. X. Komisaris utama PT. Grup Restoran Padang X dijabat oleh pendiri, Bapak Udin, dibantu komisaris oleh istri dan seorang putri. Direktur utama dijabat oleh putra pak Udin, kemudian dari 5 posisi direktur, 2 dijabat anak pak Udin yang lain, dan 1 orang oleh sepupu, dan 2 orang profesional. Jajaran direksi memiliki 3 orang anggota dewan penasehat, 1 orang adalah profesional dalam bisnis waralaba, 2 orang masih kalangan kerabat. Pegawai jajaran kantor pusat lebih kurang setengahnya masih kalangan kerabat, dan setengahnya profesional. Di jajaran operasional setiap cabang kedai (pimpinan, tukang masak dan karyawan) asal karyawan tidak hanya

karyawan dari Minang tetapi berasal dari latar belakang, lebih kurang dengan komposisi sepertiga berasal dari sunda, sepertiga dari Padang dan sepertiga lainnya dari Jawa.

Tata kelola perusahaan grup restoran Padang X memiliki mekanismenya sendiri, yang dapat dilihat dalam pengelolaan baik secara formal maupun informal. Hirarki rapat dari yang tertinggi sampai ke rapat operasional secara berturut-turut sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Internal Audit, Rapat Divisi, dan Rapat Operasional Restoran. RUPS adalah pengambil keputusan tertinggi. Rapat Dewan Komisaris adalah dalam rangka pengawasan, memberikan pengarahan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan program kerja. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris atau salah satu Komisaris yang ditunjuk.

Rapat direksi pesertanya adalah Presdir, Para Direktur, Sekertaris perusahaan dan bila diperlukan mengikut sertakan *Business Advisor* dan/atau R & D. Rapat ini dipimpin Presdir atau salah satu Direktur yang ditunjuk. Rapat bersifat koordinatif dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program kerja, serta termasuk keuangan. Melakukan evaluasi program kerja dan evaluasi kinerja keuangan. Mengambil keputusan atau membuat kebijakan baru. Rapat ini biasanya diselenggarakan paling sedikit 1 bulan sekali.

Rapat internal audit diadakan secara periodik pula minimal 1 kali dalam satu bulan pesertanya, Preskom, Komisasis, Presdir, Para Direktur, dan Sekertaris Perusahaan. Rapat divisi terdiri rapat Divisi HRD; Rapat Divisi Operasional; Rapat Divisi Keuangan. Rapat dipimpin oleh masing-masing Divisi Direktur. Rapat bersifat koordinatif dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan atas program kerja termasuk keuangan. Bagian-Bagian dalam masing-masing Divisi, melakukan evaluasi program kerja. Membuat keputusan atau kebijakan baru. Merancang laporan manajemen, laporan keuangan dari setiap Divisi. Rapat biasanya diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali sebulan

Rapat operasional restoran adalah rapat pada tingkat gerai restoran (kedai). Rapat dipimpin oleh Koordinator Wilayah atau Manajer Restoran. Rapat dilaksanakan dalam rangka pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi operasional gerai restoran, evaluasi, memberikan masukan ke atasan dan membahas serta melaksanakan keputusan dari Direksi, khususnya keputusan direktur operasional. Hasil dan keputusan rapat dilaporkan kepada Direktur operasional. Rapat operasional restoran diselenggarakan setiap diperlukan.

Struktur organisasinya terdesentralisasi dan dikendalikan dari kantor pusat di Jakarta. Ia juga berstatus badan hukum perseroan terbatas (PT) dan dikelola oleh tim manajemen. Artinya, telah terdapat unsur-unsur komisaris, direksi, manajer restoran, investor, dan karyawan.

Di samping telah diatur mengenai koordinasi melalui rapat-rapat yang telah dijelaskan tersebut, namun pelaksanaannya, tidaklah kaku. Suasana kumunal tradisional, masih terasa, artinya pertemuan-pertemuan informal bahkan lebih banyak menentukan kebijakan. Misalnya pertemuan yang diadakan secara informal pada saat pembukaan cabang baru, kadang dapat menghasilkan keputusan penting. Lagi pula, karena cabang restoran terbentang di berbagai wilayah Indonesia, kadangkala sulit mencari waktu untuk rapat formal di kantor pusat. Pak Udin, kadang juga lebih senang langsung datang ke lapangan, memantau dan memotivasi karyawan dalam bekerja, sehingga waktu di kantor sangat sedikit. Walaupun telah dibentuk pengurus kantor pusat (tim manajemen), dengan pembagian tugas, tetapi pelaksanaannya tetap fleksibel, bahkan tokoh sentral dari pengelolaan grup restoran Padang X tetap berada di tangan Bapak Udin, sehingga seluruh masalah perusahaan akhirnya baru selesai manakala sudah diputuskan pak Udin. Hal ini juga diakui oleh seluruh tim manajemen perusahaan bahkan menyebut pak Udin sebagai rohnya perusahaan. Artinya, pak Udin telah menjadi pemimpin spiritual grup restoran Padang X Jakarta.

Bagi Hasil Sebagai Inti Keunikan Tata Kelola

Keunikan utama dari grup restoran ini adalah menerapkan bagi hasil. Karyawan tidak menerima gaji dan upah tetap setiap bulan, tetapi karyawan menerima penghasilan setiap 100 hari sekali, bersama-sama dengan “deviden” yang diterima oleh investor. Baik investor maupun karyawan sama-sama menerimanya setiap 100 hari sekali. Sistem bagi hasil tersebut telah berlangsung sejak berdirinya usaha ini, ketika masih berjualan dengan sebuah gerobak dorong di tahun 1972, sampai saat ini setelah memiliki 105 cabang. Tata kelola berdasarkan sistem bagi hasil ini secara substantif tetap bertahan dengan baik selama 41 tahun.

Sistem bagi hasil dalam praktik tersebut, seiring berjalannya waktu telah berkembang pula menjadi dua model. Model pertama adalah bagi hasil antara pemilik (dan juga pendiri) dan karyawan, di mana komposisinya *babagi duo* atau *fifty-fifty* dari laba yang dihasilkan. Model kedua adalah bagi hasil dalam konteks *kerja sama operasi* (KSO) dengan pihak luar (investor). Komposisi bagi hasilnya menjadi: pemilik merek 15%, investor 35%, dan karyawan 50%.

Dalam kasus KSO ini porsi untuk karyawan tetap dipertahankan 50% dari total laba yang diperoleh. Hal ini bermakna posisi karyawan di perusahaan tetap diistimewakan. Selanjutnya di tingkat karyawan dan pengelola, pembagian hasil (setengah dari total laba tersebut) didasarkan pada satu indeks kinerja yang disebut *mato*, yang biasanya diukur dengan skor angka. Penghasilan karyawan bersifat proporsional dengan *mato* yang dimiliki. Semakin besar *mato*, semakin besar pula porsi bagi hasil yang diterimanya, dan sebaliknya.

Laba atau hasil yang diperhitungkan setiap periode 100 hari langsung dibagi tunai ke seluruh pemangku kepentingan, yaitu investor, pengelola/pemilik merek, dan karyawan restoran. Dengan sistem seperti ini, semua karyawan, mulai dari bagian cuci piring sampai pimpinan kedai atau manajer diposisikan sebagai “pemilik” juga. Setoran modal mereka

adalah tenaga dan keahlian yang mereka miliki. Dengan sistem bagi hasil ini, investor, pemilik merek/pengelola, dan karyawan berposisi sebagai mitra yang relatif setara. Ini bisa dinyatakan lewat pepatah *duduk sama rendah dan tegak sama tinggi*, di mana semua pemangku kepentingan memiliki kontribusi, sesuai dengan porsinya masing-masing. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Bapak Udin bahwa:

“...*Kito* memberlakukan karyawan sebagai pemilik *juo*. Walaupun mereka tidak menyettor dalam bentuk modal, tenaga dan keahlian mereka dinilai sebagai modal dari mereka...”

Sebetulnya perlakuan perusahaan terhadap karyawan tersebut juga tercermin dalam pembagian, yang memposisikan hak karyawan 50%. Misalnya, di satu cabang membutuhkan modal investasi Rp 6 miliar rupiah dan cabang tersebut dikelola oleh 40 orang. Dengan hak pembagian laba 50% untuk karyawan, berarti kontribusi karyawan dalam bentuk tenaga dan keahlian sebenarnya juga dihargai sejumlah modal yang ditanamkan di cabang tersebut, yaitu Rp 6 miliar juga. Dengan kata lain, sistem ini bukan mencerminkan hubungan majikan dan buruh, tetapi lebih mencerminkan perkongsian antara pemilik modal dengan karyawan keseluruhan. Agaknya sistem perusahaan mirip *partnership*, tetapi organisasi tidak berbentuk badan hukum *partnership*, karena di setiap cabang yang merupakan perusahaan perseorangan, yaitu biasanya atas nama investor atau manajer cabang tersebut.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik

Prinsip transparansi

Direktur SDM Bapak Mansur lebih kurang mengatakan:

“...Setiap satu rupiah uang yang ada di restoran adalah milik bersama, karena mereka di sini tidak digaji, dan dihitung pembagiannya setiap 100 hari. Modal utama kita untuk menjaga kepercayaan karyawan adalah keterbukaan dalam hal berapa uang yang dihasilkan setiap hari dan berapa belanja harian. Karyawan dapat mengetahuinya... Pemilik, manajer juga tidak bisa seenaknya dalam menggunakan uang, tetapi itu akan dicatat dan diketahui oleh semua orang. Seluruh karyawan dari bagian mana pun sangat “peduli” dengan pendapatan dan pengeluaran perusahaan karena hal itu juga menyangkut uang mereka...”

Oleh sebab itu, mekanisme pengelolaan menjadi sangat berbeda dengan organisasi modern. Pengikat perilaku seluruh pemangku kepentingan di perusahaan (investor, karyawan, dan pemilik merek) adalah sistem bagi hasil ini. Sistem ini akan berjalan dengan baik apabila semua pihak saling percaya dan kepercayaan itu dibangun lewat keterbukaan informasi keuangan.

Keterbukaan informasi tentang keuangan perusahaan bukan hanya pada tingkat wacana tetapi betul-betul diimplementasikan, karena di dalamnya terdapat unsur kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari karyawan pencuci piring sampai pada investor, semua memiliki informasi yang relatif sama atas keuangan perusahaan. Peneliti pernah hadir pada suatu malam, setelah selesai operasi perusahaan, untuk menyaksikan bagaimana pendapatan dan pengeluaran hari itu dihitung bersama-sama. Hadir pada malam itu: wakil karyawan bagian tengah (pelayan), dapur, minuman, kasir, dan bagian cuci piring.

Hasil perhitungan pendapatan dan pengeluaran hari, besok paginya langsung diinformasikan di papan pengumuman agar diketahui seluruh pekerja. Di tingkat karyawan, informasi tersebut akan digunakan untuk memprediksi uang yang akan mereka peroleh ketika perhitungan laba (hasil) dilakukan, dan sekaligus juga untuk ikut mengendalikan keuangan perusahaan.

Bapak Udin membandingkan pelaksanaan sistem bagi hasil di restorannya dengan yang dilakukan di restoran Padang lainnya:

“...Di *siko*, *kito* transparan dalam menetapkan bagi hasil. Setiap karyawan tahu hak-haknya, tahu pendapatan harian restoran dan belanja hariannya, dan tentu juga bisa memprediksi berapa pendapatan yang akan mereka terima dalam periode 100 hari nanti... kalau di rumah makan Padang lain, karyawan langsung saja diberi uang dalam amplop... *ndak tau* dari *mana* perhitungannya”

Kepada seorang karyawan, peneliti menanyakan, apakah hasil yang ia peroleh setiap 100 hari tersebut sesuai dengan prediksinya. Jawabannya:

“...*lai* ‘*Da*, *apo* yang *kito* terimo samolah dengan *apo* yang *kito* kiro-kiro. *Sarupo ambo* punyo catatan sendiri, jadi *ambo* bisa memprediksinyo...”

(“...sesuai ‘Da, apa yang kita terima sama dengan apa yang kita perkirakan. Seperti catatan milik saya sendiri, jadi saya bisa memprediksinya...”

Menjaga kepercayaan karyawan dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Udin selalu menyampaikan pada karyawan, hal utama yang harus menjadi pegangan bagi seluruh karyawan adalah kejujuran. Sehingga tidak ada hak-hak orang lain yang dikurangi.

Akuntabilitas

“Jujur” adalah kata pertama yang diucapkan Bapak Udin, ketika ditanyai tentang kunci keberhasilan dalam mengembangkan bisnis yang dirintis dari bawah. Kejujuran menjadi prinsip Bapak Udin dalam membangun relasi dengan semua pihak. Bapak Udin jujur dengan karyawan. Apa yang telah diucapkannya akan ia laksanakan dengan sepenuh hati. Bapak Udin sangat mendahulukan kepentingan karyawan dan orang lain termasuk investor. Sekretaris korporasi mengemukakan:

“...usaha ini diwarnai oleh jiwa Pak Udin sebagai pendiri dan pemilik... Ia jujur, bahkan terkesan lugu, sehingga kejujurannya itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari keuntungan pribadi. Saya bisa mengatakan, karyawan tidak ada yang takut dengan Bapak Haji, tetapi mereka akan sangat segan dengan Pak Udin. Ia melayani siapa saja. Telepon dari siapa pun selalu dilayani termasuk, dari karyawan bagian cuci piring...”

Kepala bagian zakat organisasi mengemukakan bahwa:

“...apa yang dicapai saat ini adalah karena rasa ikhlasnya pak Udin pada seluruh karyawan dan kejujurannya dalam menjalankan usahanya .. Investor dari berbagai latar belakang, bahkan yang non-Muslim, saudara kita orang Cina, percaya padanya untuk bermitra membuka cabang baru. Tentu, di samping adanya prospek dalam usaha ini, soal keikhlasan dan kejujuran Pak Udin juga dilihat oleh mereka. Hal ini karena untuk membuka satu cabang saat sekarang bukan lagi bernilai kecil, tetapi sudah miliaran, 3 sampai 6 milyar rupiah. Orang percaya ke Bapak Udin karena kerendahhatian dan kejujurannya itu...”

Dalam hal mengelola uang orang lain, Bapak Udin benar-benar bersandar pada keyakinan bahwa semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka, sudah menjadi aturan

tegas yang harus dipatuhi semua pihak bahwa kondisi keuangan harus disampaikan secara jujur dan apa adanya.

Akuntabilitas sangat ditekankan dalam komunitas ini. Laporan keuangan maupun laporan manajemen lainnya bukan sekedar formalitas dan bersifat administratif saja, tetapi bersifat substantif. Sistem bagi hasil tidak akan pernah berjalan maksimal jika akuntabilitas tidak dijadikan praktik sehari-hari di organisasi ini. Perhitungan laba setiap 100 hari menjadi kepentingan bersama. Dengan sistem ini, telah menjadi budaya bahwa *laba (uang) satu rupiah adalah milik bersama*. Hal ini berarti klaim kepemilikan atas laba (hasil) bukan hanya klaim investor (pemegang saham) sebagaimana sistem bisnis modern, melainkan laba adalah milik karyawan, pengelola/pemilik merek, dan investor. Selain itu, sebagian laba juga wajib dizakatkan, sebagaimana ketentuan ajaran Islam. Sistem ini dapat berjalan dengan baik karena adanya kejujuran dan transparansi dalam soal keuangan perusahaan.

Peran akuntansi sebagai wujud *akuntabilitas* dan *informasi* benar-benar diwujudkan. Informasi laba (hasil) dapat bermanfaat untuk semua pihak karena disajikan dengan *spirit* kejujuran, yang menjadi landasan rasa percaya dari semua pihak. Akuntabilitas tersebut juga dilandasi keyakinan agama. Ini terlihat dari dianggarkannya pemotongan zakat sebesar 2,5 persen dari laba kotor tunai, sebelum laba itu dibagikan ke investor, pemilik merek/pengelola, dan karyawan. Dengan kata lain, akuntabilitas di perusahaan ini tidak hanya akuntabilitas horizontal –yaitu, kepada investor, pemilik merek/pengelola, dan karyawan-- tetapi juga akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal ini menggarisbawahi bahwa pekerjaan dilakukan secara jujur, dalam rangka peribadatan dan penghambaan kepada Tuhan, Sang Pemberi Rezeki.

Responsibilitas

Dengan tidak adanya upah dan gaji, maka penghasilan sangat tergantung pada keberhasilan seluruh karyawan dalam bekerja sama, rasa tanggungjawab mereka terhadap

perusahaan, dan terhadap diri mereka sendiri. Tanggungjawab itu datang dengan sendirinya, sebab jika karyawan malas, lalai, tidak disiplin, dan tidak jujur, hal ini akan merugikan diri mereka sendiri. Jika laba yang dihasilkan kecil, penghasilan mereka yang tergantung pada laba tersebut otomatis juga akan kecil.

Tanggungjawab karyawan sehari-hari terhadap pekerjaan tidak terpaku secara kaku pada deskripsi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bagiannya, tetapi lebih fleksibel. Artinya, satu bagian dapat segera membantu bagian lain yang sedang berat pekerjaannya, tanpa menunggu komando. Bahkan pada jam-jam sangat sibuk, pada jam makan siang, pimpinan kedai dan pemilik sering langsung ikut membantu, agar terlaksananya pelayanan yang maksimal terhadap pelanggan.

Responsibilitas terwujud dalam komunitas ini, tidak hanya pada si pemilik Bapak Udin, tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan. Sistem bagi hasil mengikat perilaku membentuk kesadaran komunitas untuk bertindak secara bertanggungjawab (memenuhi aturan main, SOP dan peraturan perundangan). Naik turunnya penghasilan tergantung pada seberapa besar mereka mengambil tanggung jawab secara bersama-sama (prinsip tanggungjawab GCG). Sebagaimana yang disampaikan salah satu pelayan, Masri

“...jika kami lalai melayani pelanggan dan kemudian pelanggan pindah ke restoran lain, maka ini sama saja artinya dengan kami menuangkan periuk nasi kami ke tanah...”

Di samping itu, tanggung jawab itu muncul karena kesempatan yang telah diberikan perusahaan pada karyawan untuk juga diposisikan sebagai “pemilik,” sebagai *entrepreneur*, bukan sebagai buruh upahan. Ini suatu penghargaan kemanusiaan yang tidak dapat ditakar dengan nilai uang. Agaknya, hal ini secara psikologis berdampak pada diri setiap karyawan. Hal itu menimbulkan rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan sehingga mereka lebih bertanggungjawab. Para pekerja lebih cekatan, lebih gesit, tidak saling menunggu, saling

membantu, bekerja dengan semangat dan gembira, sehingga pelayanan semakin baik dan pelanggan bertambah ramai.

Terciptanya hasil (laba) adalah hasil karya kolektif semua pihak dan laba itu juga milik semua pihak. Ikatan kebersamaan untuk mewujudkan laba tersebut berdampak pula ke tanggung jawab dalam bekerja. Pada suatu waktu, peneliti mencatat beberapa hal sebagai berikut:

masing-masing pekerja bergerak cepat tanpa ada supervisi dari atasan. Seorang pelayan laki-laki dengan sigap mengangkat sekumpulan besar kotak-kotak nasi, memindahkannya ke ruang tengah. Pelayan yang lain sibuk membersihkan piring, sendok, dan meja. Ini memberi kesan bahwa semua orang bergerak dan bekerja tanpa menunggu instruksi ini dan itu. Semua dilaksanakan dengan cekatan, sigap, cepat, dan berkualitas. Setelah pekerjaan ini selesai, berikutnya mereka juga membantu merapikan administrasi.

Rasa tanggung jawab yang besar dalam bekerja muncul sebagai umpan balik dari sistem kompensasi, yang didasarkan pada bagi hasil. Kesadaran karyawan dalam bekerja juga sangat dirasakan dalam pelayanan, sebagaimana peneliti mencatatnya, ketika peneliti berposisi sebagai pelanggan.

“...Semua berlangsung cepat...! Penulis berkunjung ke salah satu cabang grup restoran Padang X di Jakarta, di mana peneliti belum pernah makan di situ sebelumnya (artinya, peneliti tidak dikenal) untuk makan siang. Terlihat seorang pelayan laki-laki langsung mendekat dan membawakan satu gelas teh tawar hangat, tanpa diminta sebelumnya. Kemudian, sekelebat, seorang pria pelayan yang lain dengan cekatan membawa berbagai jenis makanan di atas dua telapak tangan sampai di kedua pergelangan tangannya. Berbagai jenis makanan diletakkan bertingkat-tingkat, ditata, disusun rapi di kedua tangan tersebut. Sekitar delapan jenis makanan diletakkan di piring kecil yang berbeda, ditambah satu piring nasi agak besar, dan satu nasi tambahan di piring kecil. Semua itu langsung dibawa sekaligus dengan kedua tangan pelayan laki-laki tadi. Dengan gerakan yang terlatih dan tangkas, seluruh piring yang ada di kedua tangan pelayan, yang dibawa dari *Paluang*, kemudian diletakkan di meja makan dan terhidang rapi di hadapan penulis. Lengkap sudah penyajian cepat berbagai jenis makanan Padang siang itu. Semua terhidang langsung, tanpa diorder sebelumnya, kecuali sebuah kalimat pendek dari penulis: “Makan, ‘Da...” Inilah kekhasan rumah makan Padang, kecepatan dalam melayani plus keramahamtaman pelayanannya. Di samping lezatnya masakan, pelayanan cepat dan sigap, serta semua pekerja dengan semangat tinggi melaksanakan tugasnya...”

Ketika peneliti menanyakan soal rasa tanggungjawab dalam pekerjaan, dalam suasana yang agak santai Pak Rudi (pelayan, terkadang juga merangkap seksi belanja) mengatakan:

Iyolah Pak, kito di siko kan babagi hasil, bukan urang gajian. Rasaki kito tagantuang ka kito di siko bakarajo. Kalau kito maleh bakarajo, nanti akan badampak ka hasil juo, kok rajin kito dampaknyo ka hasil juo untuak kito juo. Jadi kalo kito maleh-malehan bakarajo, itu samo sajo awak mambuang pariuk nasi kito ka tanah, karena awak babagi hasil. Ketek jo gadang hasil tagantuang upayo awak basamo...

(Iyalah, Pak, kita di sini kan berbagi hasil, bukan orang gajian. Rezeki kita tergantung pada kita di sini bekerja. Kalau kita malas bekerja, nanti akan berdampak ke hasilnya juga. Jika rajin, nanti dampak hasilnya ke kita juga. Jadi kalau kita malas-malasan bekerja, itu sama saja kita membuang periuk nasi kita ke tanah, karena kita di sini berbagi hasil. Kecil dan besar hasil tergantung upaya kita bersama)

Indeks kinerja *mato* ini dikendalikan secara ketat. Artinya, nilai *mato* bisa naik dan turun tergantung pada kerajinan, disiplin, dan sikap kerja karyawan. Oleh sebab itu, kinerja karyawan selalu dalam pantauan manajer, sehingga yang rajin dan malas betul-betul berbeda penghasilannya. Hal yang terakhir ini juga memicu rasa tanggungjawab yang lebih tinggi.

Independensi

Prinsip independensi dapat dilihat bahwa setiap orang yang bekerja di restoran adalah manusia merdeka. Penghasilan mereka tergantung pada kreativitas mereka sendiri, tidak ada penghasilan tetap dalam bentuk upah dan gaji. Dalam hal ini, sebetulnya karyawan juga berbagi risiko dengan pemangku kepentingan lain. Desain struktur organisasi adalah bisnis unit dengan desentralisasi, di mana hampir sebagian besar keputusan operasional dilimpahkan ke setiap cabang.

Konsekuensi berbagi hasil sebetulnya juga mencerminkan berbagi kekuasaan di antara pemangku kepentingan. Setiap cabang adalah *profit center* yang mandiri. Maka, setiap cabang restoran dengan budaya *uang satu rupiah milik bersama* mendorong rasa memiliki yang tinggi, dan sekaligus sebagai alat pemersatu atas “diri” cabang tersebut sendiri.

Setiap cabang akan mengendalikan diri mereka sendiri karena diikat oleh rasa bahwa restoran ini adalah milik bersama. Besar dan kecil penghasilan tergantung pada upaya dan kerja keras pengelola dan pekerja, serta peran pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga sekaligus akan mendorong mereka untuk menjaga organisasi dari rongrongan atau pengaruh yang tidak baik dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini, organisasi dan sub-unit organisasi (cabang) seperti memiliki *self-control* tersendiri.

Keadilan

Setiap karyawan memiliki indeks *mato* sesuai dengan keahliannya dan kontribusi keahlian tersebut dalam menciptakan laba (hasil) tadi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif (prinsip keadilan GCG). Misalnya, kepala tukang masak (dapur) adalah pemilik *mato* yang paling tinggi, karena keahliannya dianggap sangat menentukan keberhasilan restoran. Setelah itu, pemilik *mato* tertinggi kedua adalah manajer restoran, dan begitu seterusnya untuk karyawan bagian lain, sampai ke posisi *cleaning service* dan pencuci piring. Semua diberi indeks *mato*. Indeks kinerja *mato* ini dikendalikan secara ketat, artinya nilai *mato* bisa naik dan turun tergantung pada kerajinan, disiplin dan sikap kerja karyawan.

Bu Khodijah sebagai pendiri mengemukakan:

“...untuk karyawan, kita hargai posisi tertentu yang dirasa memiliki kontribusi lebih... Kita menghargai keahlian karyawan, yang menentukan keberhasilan Kedai...Yang rajin kita beri lebih dari yang malas, agar mereka tambah giat lagi...Kalau mau dapat duit, rajinlah...”

Kinerja karyawan selalu dalam pantauan manajer, sehingga yang rajin dan malas betul-betul berbeda penghasilannya. Sudah menjadi *konvensi* di antara sesama karyawan komunitas restoran Padang tentang keberadaan *mato* untuk setiap posisi dan keahlian tadi. Semua diketahui di depan secara transparan oleh semua karyawan. Keadilan lebih dimaknai sebagai keadilan distributif, karena penghasilan yang diperoleh karyawan disesuaikan dengan kontribusinya dalam menciptakan laba perusahaan.

Nilai-nilai Luhur Perekat GCG

Pelaksanaan GCG di grup restoran Padang X Jakarta dilandasi *spirit* kebersamaan, demokratis, egaliter, keikhlasan, menghargai hak orang lain, dan kesadaran bahwa tidak etis mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Ditambah lagi, keyakinan bahwa akuntabilitas tidak hanya sampai pada laporan (keuangan dan non-keuangan) di meja pimpinan, tetapi lebih dari itu. Yakni, akuntabilitas yang hakiki dengan pertanggungjawaban secara vertikal kepada Yang Maha Tahu, sehingga laporan disampaikan dengan jujur, apa adanya. Aturan main dan prosedur operasi standar (SOP) dibuat secara sederhana, bahkan ada yang tidak tertulis, tetapi aturan main dan SOP itu relatif terlaksana secara memadai. Meski belum sempurna dalam pelaksanaannya, secara umum praktik GCG dalam kasus restoran Padang ini memadai. Lima prinsip dari GCG plus *spirit* yang menjadi lem perekatnya, agaknya telah menjadi *collective mental programming* bagi sebagian besar pengelola dan pemangku kepentingan lainnya di restoran Padang.

Pak Udin juga memberikan kesempatan pada siapa saja yang memiliki talenta untuk bekerja di restoran ini, tidak harus orang Minang atau barisan kerabat. Pak Udin juga menerapkan nilai-nilai *di mana bumi diinjak di situ langik dijunjuang*. Artinya, kehadiran organisasi ini juga bermanfaat untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, sejauh ia memenuhi syarat.

Ekonomi yang berkeadilan sosial lebih terasa dengan bagi hasil. Karyawan rajin, kreatif, produktif, efisien, dan pada akhirnya memperoleh laba. Keuntungan tidak hanya dinikmati pemegang saham, tetapi pada akhirnya juga akan dirasakan oleh karyawan karena penghasilan karyawan ditentukan berdasarkan laba tersebut. Nilai-nilai luhur yang memayunginya sesuai pepatah Minangkabau, *duduak samo randah tagak samo tinggi* (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi).

Kepedulian perusahaan terhadap zakat, dibuktikan dengan dimasukkannya zakat dalam laporan laba-rugi bagi hasil, yaitu potongan zakat 2,5% dari laba kotor setiap cabang restoran. Di samping itu, untuk memastikan pemungutan dan penyaluran zakat secara benar, perusahaan telah membentuk satu unit zakat dalam struktur formal organisasinya. Unit zakat ini dipimpin seorang manajer yang bertanggungjawab. Pimpinan spiritual organisasi ini Pak Udin agaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai Minang dan Islam. Memang, di masyarakat Minangkabau berlaku pepatah *adat bersandi syara, syara bersandi Kitabullah*, yaitu nilai yang mendominasi adat Minangkabau ialah nilai-nilai Islam.

Daya Tahan Tata Kelola Dalam Pusaran Perubahan

Hasil penelitian menunjukkan, seiring dengan berubahnya ruang, waktu, dan corak pengelolaan, serta besaran bisnis yang dikelola, terjadi pula perubahan dalam pengelolaan. Naim *et al* (1987) tahun 1983 menemukan bahwa pengelolaan restoran di kota Padang menunjukkan indikasi spirit (nilai-nilai luhur) lebih mengungguli materi, sedangkan dalam penelitian ini di grup restoran Padang X di kota Jakarta, mengalami perubahan dimana kecenderungannya terhadap materi tinggi namun tetap spirit kebersamaan, kekeluargaan terjaga dengan baik. Prinsip-prinsip GCG masih tetap berjalan dengan baik --seperti *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*-- meskipun belum sempurna dan masih terbuka peluang untuk menyempurnakannya. Perubahan tersebut hanyalah bersifat permukaan, sebagai bagian dari penyesuaian dari dinamika perubahan lingkungan.

Makna Tata Kelola di Grup Restoran Padang X

Dari uraian tersebut dapat diringkas makna tata kelola yaitu sebagai aturan main sistem bagi hasil dan *piti* (uang) satu rupiah milik bersama. Artinya memaknai tata kelola sama artinya dengan aturan main dari badi hasil yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berdampak pada rasa memiliki yang tinggi terhadap restoran, motivasi kerja dan motivasi

berprestasi. Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya sistem bagi hasil. Artinya sistem bagi hasil dan jargon *piti* (uang) satu rupiah milik bersama, tidak mungkin terlaksana dengan baik jika tidak diselenggarakan dengan tata kelola yang baik. Grup restoran Padang agaknya telah berhasil melaksanakan sistem bagi hasil dengan tata kelola yang baik, terbukti dengan perkembangan perusahaan yang pesat, yang dimulai dengan sebuah gerobak dorong di tahun 1972 dan sampai saat ini telah memiliki 105 cabang, 3600 orang karyawan dan telah melibatkan lebih kurang 50 orang investor. Sistem bagi hasil dengan tata kelola yang baik, agaknya telah mengundang rasa percaya yang tinggi dari investor dan karyawan. Makna tata kelola grup restoran Padang X dapat dilukiskan dalam Gambar 1 pada lampiran 1. Penggambaran tata kelola dengan lingkaran mencerminkan empat unsur tata kelola yang saling terkait (bagi hasil, *piti* (uang) satu rupiah milik bersama, mekanisme tata kelola, dan prinsip-prinsip tata kelola) merupakan satu kesatuan

5. Simpulan Sementara dan Keterbatasan Penelitian

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa grup restoran Padang X memiliki tata kelola yang unik, dan berhulu dan bermuara pada konsep bagi hasil. Bagi hasil tersebut telah menjadi suatu *collective mental programming* bagi komunitas grup restoran Padang X. Bagi hasil tersebut dimaknai oleh komunitas grup restoran Padang X, sebagai *piti (uang) satu rupiah milik bersama*. Mekanisme tata kelola dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik merupakan syarat mutlak terlaksananya sistem bagi hasil dengan baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, membutuhkan waktu yang panjang di lapangan. Penelitian ini dilakukan di grup restoran Padang X Jakarta yang memiliki 105 cabang, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Karena keterbatasan waktu tersebut, penelitian ini hanya fokus di kantor pusat dan satu cabang saja, meskipun ada juga pengamatan yang tidak terlalu dalam di beberapa cabang. Penelitian ini juga terbatas di grup

restoran Padang X yang ada di Jakarta, belum mengamati grup restoran Padang X yang sama di daerah lain.

Di samping itu, keterbatasan lain terkait dengan situs penelitian adalah peneliti belum mengamati restoran Padang dengan merek yang lain, yang juga telah menggunakan sistem bagi hasil, yang keberadaannya terbentang di seluruh kota di Indonesia, bahkan juga ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura.

Daftar Referensi

- IAI. 2013. *Majalah Akuntan Indonesia*. Edisi Mei.
- Naim, Muchtar. 1985. *Rumah Makan Minang: Prototipe Sistem Ekonomi Pancasila*. Seminar Kebudayaan Minangkabau, dalam rangka Pekan Budaya Minangkabau III, di Bukittinggi
- Naim, Muchtar, Wall Paragoan, Zaili Asril, dan Fachrul Rasyid. 1987. *Jurus Manajemen Indonesia Sistem Pengelolaan Restoran Minang Sebuah Prototipe Sistem Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran

Tabel 1. Daftar Informan

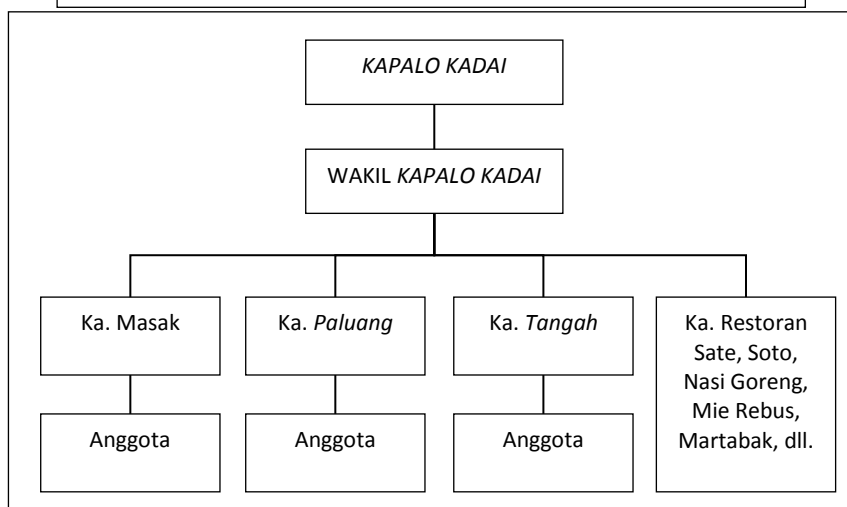
No	Nama	Posisi	Lama bekerja
1	Udin	Pendiri dan pemilik	Bekerja sejak usaha ini berdiri, 1972 sampai sekarang (41 tahun)
2	Mansur	Direktur SDM dan Kepala Cabang Jakarta Timur	15 tahun
3	Mamad	Manajer zakat	10 tahun
4	Rudi	Karyawan	12 tahun
5	Bu Haji Khodijah	Komisaris	41 tahun
6	Mahar	Investor di 7 cabang	12 tahun
7	Ari	Sekretaris Pusat Pengelola	6 tahun

Keterangan: Nama informan dan nama cabang bukanlah nama sebenarnya

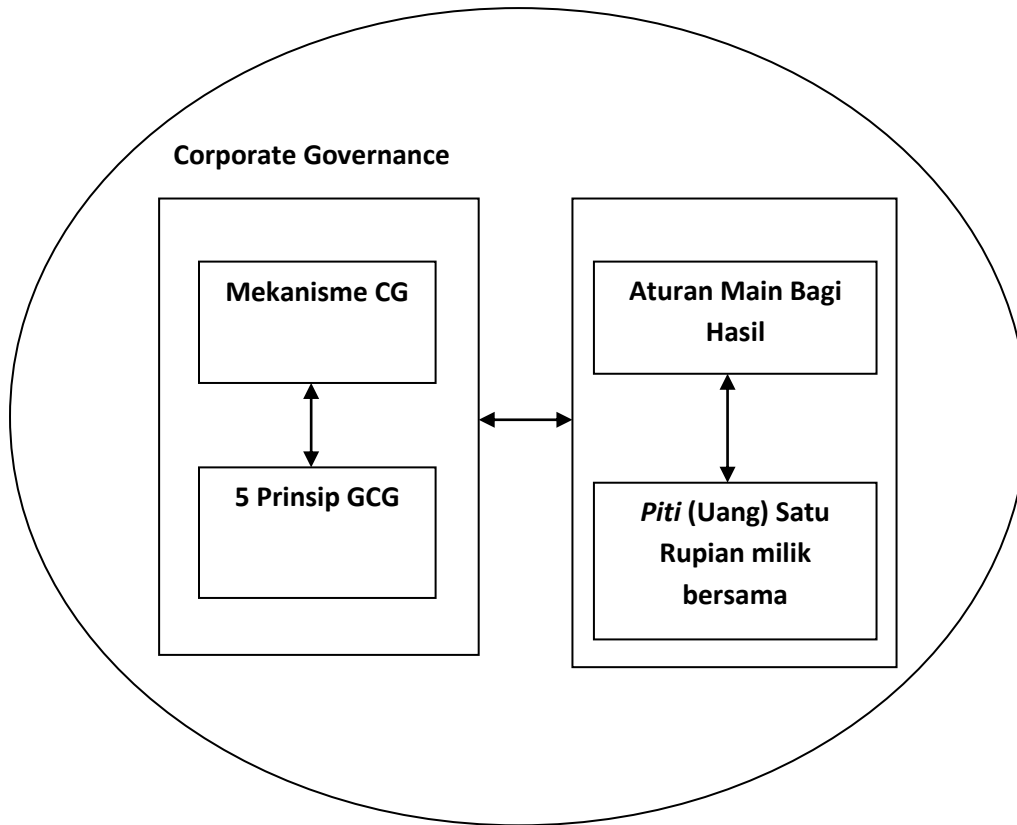
Tabel 2. Sebaran Anak Cabang dari Grup Restoran Padang X

No	WILAYAH CABANG	JUMLAH
1	Jakarta	40
2	Jawa Barat	19
3	Jawa Timur	5
4	Jawa Tengah	4
5	Riau	6
6	Palembang	7
7	Padang	3
8	Banten	5
9	Kalimantan	5
10	Jambi	5
11	Sulawesi	4
12	Medan	1
13	Yogya	1
	TOTAL	105

Struktur Organisasi Kedai Grup Restoran Padang X Jakarta



Gambar 1: Makna Tata Kelola di Grup Restoran Padang X Jakarta



**Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*
Perbankan di Indonesia
(Studi Komparatif Bank Pemerintah dan Bank Swasta)**

**ASMAUL JANAH
ERWIN SARASWATI***
Universitas Brawijaya

Abstract: *This study investigates Corporate Social Responsibility implementation and disclosure of Indonesian state banks and private banks to find evidence of differences among them. Corporate Social Responsibility implementation and disclosure are identified based on Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 guidelines. The population in this study is 31 Indonesian banks listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2011. 20 banks are selected by using nonprobability random sampling. Research method of this study uses mix method research combining quantitative and qualitative approaches. The differences among state banks and private banks are tested using Mann Whitney U statistic. The result indicates that there are significant differences in total disclosure of Corporate Social Responsibility and in each of the GRI indicators among the state and private banks.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Disclosure, Implementation, Private Bank, State Bank.*

* Corresponding author: erwin_saraswati@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu tonggak perekonomian di Indonesia, karena bank memiliki peran penting dalam usaha penyaluran dana untuk berbagai kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan berbagai komunitas lingkungan masyarakat (Djogo, 2005). Hubungan dengan komunitas ini akan memiliki dampak, bank diharuskan tidak hanya menjalankan tugasnya dalam bidang perbankan, namun wajib memberikan bukti kepedulian terhadap komunitas yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasinya. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, perbankan diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, salah satunya berdasarkan *major shareholders* yang membagi perbankan menjadi dua macam yaitu bank pemerintah dan bank swasta (Latumaerissa, 2012). Perbedaan *major shareholders* ini berdampak pada timbulnya perbedaan dalam hal pengambilan keputusan dan kepentingan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan pengungkapan dan pelaksanaan CSR (Yamak dan Suer, 2010).

Wibisono (2007) menyatakan bahwa CSR bank tidak hanya dilihat sebagai tanggungjawab, namun memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan organisasi perbankan itu sendiri. CSR dapat memberikan *image* sosial yang positif pada masyarakat yang penting bagi perusahaan dengan visibilitas publik yang tinggi seperti bank (Branco dan Rodrigues, 2006). Hal ini dikarenakan pengungkapan keterlibatan masyarakat terkait dengan cara perusahaan berhubungan dengan masyarakat akan menjadi daya tarik tersendiri untuk diketahui publik, yang ditujukan untuk mendapatkan perhatian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan masyarakat tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari perusahaan, baik sebagai konsumen maupun investor (Yuniarti, 2007). Hal inilah yang membuat program CSR entitas bank meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut penelitian Dye dan Sridhar (2008), terdapat kecenderungan perbedaan pengungkapan informasi perusahaan termasuk CSR berdasarkan kekhasan industri dan *major shareholders*. Perbedaan *stakeholder* dari sebuah entitas bank akan mempengaruhi ekspektasi dan kompensasi yang ingin didapatkan dari perusahaan (Yamak dan Süer, 2010). *Owners* untuk perusahaan swasta memiliki ekspektasi yang lebih terhadap memaksimalkan keuntungan dan kekayaan dari dividen dan *earning per share* yang direpresentasikan dengan *Net Present Value* (NPV) yang positif. *Government* mempunyai kasus tersendiri dan standar dalam melaksanakan kinerja sebagai *stakeholder*, karena terdapat regulasi dan Undang-Undang. Harapan utama dari keputusan yang diambil bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan, namun lebih kepada menjaga stabilitas ekonomi negara. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan antara swasta yang menjadi *major shareholder* dan pemerintah yang menjadi *major shareholder* ketika melakukan tindakan dalam perusahaan, termasuk pelaksanaan CSR. Demikian pula untuk perbankan akan mempunyai dampak yang sama.

Selain perbedaan kepentingan *major shareholders*, fenomena lain yang berbeda antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta adalah Undang-Undang. Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur seluruh Perseroan Terbatas termasuk bank, Undang-Undang lain yang bersifat spesifik mengatur tentang CSR perusahaan milik pemerintah (BUMN). Adanya perbedaan penegasan Undang-Undang ini akhirnya menyebabkan perbedaan pelaksanaan CSR pada perusahaan milik swasta dan BUMN, termasuk untuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Pelaksanaan CSR bank swasta Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian Undang-Undang ini menjadi pedoman kewajiban PT

untuk melaksanakan CSR. Berbeda dengan bank swasta, bank milik pemerintah telah memiliki Undang-Undang lebih terperinci untuk kegiatan CSR, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Peraturan ini mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh BUMN termasuk besaran prosentase yang harus disisihkan dari laba perusahaan untuk kegiatan CSR tersebut. PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

Isu mengenai variasi pengungkapan CSR sudah mulai didiskusikan di Amerika Serikat sejak tahun 1960. Akhirnya pada tahun 2000, *Global Reporting Initiative* (GRI) yang merupakan program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat pedoman tentang *Sustainability Reporting* yang dapat digunakan perusahaan dalam pengungkapan kegiatan CSR-nya. Program GRI ini dibentuk untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR, sehingga dapat diperbandingkan, serta dapat dievaluasi. Pelaksanaan dan pengungkapan kegiatan CSR dituangkan dalam bentuk laporan yaitu *Sustainability Reporting* yang mengikuti *guideline* GRI.

Penelitian ini akan mengkomparasikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan menggunakan indikator penilaian berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). *Guideline* yang digunakan adalah GRI G.3 yang meliputi 6 aspek, yaitu *Environmental, Human Rights, Labor Practices and Decent Work, Society, Product Responsibility*, dan *Economic* (GRI, 2011).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan dan pengungkapan CSR yang dilakukan perbankan Indonesia pada laporan keberlanjutan dan laporan keuangan sesuai *Global Reporting Initiative* (GRI) *guideline*. Kontribusi dalam penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial, khususnya pengungkapan CSR pada perbankan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Teori yang Mendasari Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Menurut *National Association of Accountant* (NAA) akuntansi pertanggungjawaban sosial semata-mata tidak untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan sosial dan telah ikut berperan serta dalam masalah sosial, tetapi untuk mengevaluasi *social performance* perusahaan, karena dengan *social performance* masyarakat dapat membentuk *image* positif atau negatif. Menurut Wibisono (2007) terdapat tiga macam tujuan perusahaan dalam menyajikan informasi akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu untuk mengukur kontribusi sosial bersih perusahaan terhadap lingkungan dan untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan terhadap tujuan sosial. Dalam hal ini, akuntansi sosial berperan dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa bisnis yang mengakomodasi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh perusahaan.

Stakeholder theory dan *legitimacy theory* merupakan teori yang sering digunakan untuk mendasari penelitian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Deegan (2004), teori *stakeholder* erat kaitannya dengan teori *legitimacy*. Keduanya menjelaskan alasan pengungkapan suatu informasi oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

Teori Legitimasi berdasar pada pernyataan bahwa terdapat sebuah "kontrak sosial" antara perusahaan dengan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah sebuah cara untuk menjelaskan banyaknya ekspektasi yang dimiliki masyarakat mengenai bagaimana seharusnya perusahaan menjalankan operasinya (Deegan, 2004). Jadi, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan *stakeholders*, jika

perusahaan memenuhi kontrak implisit dengan *stakeholder*, maka *stakeholder* akan bertindak sebagaimana yang diinginkan perusahaan. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Tujuan utama teori *stakeholder* adalah membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan.

Konsep *Corporate Social Responsibility*

Menurut Wood (2000), ide dasar CSR adalah bisnis dan masyarakat saling terkait dan bukan entitas yang terpisah. Secara lebih umum, terdapat perbedaan antara memperlakukan CSR sebagai sebuah bentuk kedermawanan dengan CSR yang dianggap sebagai bisnis inti (*core business*). Awalnya perusahaan melakukan aktivitas bisnis tanpa menghiraukan lingkungan sosial, namun belakangan perusahaan melakukan operasi bisnis intinya dengan cara bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan daya saing bisnis dan memaksimalkan nilai kesejahteraan masyarakat.

Sampai saat ini memang tidak ada definisi yang tunggal mengenai CSR, namun dari semua definisi yang ada, dapat disimpulkan CSR merupakan bagian strategi bisnis korporasi yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, semua konsep CSR menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial, serta lingkungan. CSR mencakup seluruh aktivitas perusahaan dalam berbagai topik sosial dan lingkungan yang biasanya mencakup isu keberagaman, *philanthropy*, *socially responsible investment* (SRI), lingkungan, hak asasi manusia, tempat kerja, etika bisnis, *sustainability*, pengembangan masyarakat dan *corporate governance*.

Perusahaan Sektor Perbankan Indonesia

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, Perbankan adalah salah satu bentuk perusahaan yang memiliki peran strategis untuk memberikan pemberdayaan masyarakat. Bank memiliki visibilitas yang tinggi, karena operasionalnya yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Masing-masing negara memiliki karakteristik dan bentuk bank yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan negara tersebut. Di Indonesia sendiri memiliki karakteristik bank yang ditujukan untuk membantu lancarnya peredaran moneter dan menunjang kemajuan masyarakat.

Pelaksanaan CSR bank swasta Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT), sedangkan bank pemerintah diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods research*, yang merupakan suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metode inkuiri. *Mixed Methods Research* disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data, serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa

fase proses penelitian (Creswell dan Clark, 2011).

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), yaitu sebanyak 31 bank. Penentuan sampel dilakukan secara nonrandom (*nonprobability sampling*) dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). Sampel yang sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 20 bank. Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Metode Analisis Data

Analisis data yang pertama adalah analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data dokumenter untuk analisis kualitatif, sehingga metode yang digunakan adalah metode *content analysis* dengan menelusuri *annual report* dan *sustainability report* perusahaan sampel. Berdasarkan hasil penelusuran akan dipetakan pengungkapan sosial yang telah dilakukan perusahaan dengan *instrument* penelitian. Hasil penelitian ini diinterpretasikan secara deskriptif. Analisis laporan tahunan dan *sustainability report* perusahaan menggunakan indikator pengungkapan CSR berdasarkan *guideline GRI* yang terdiri dari enam indikator utama yaitu *Environmental, Human Rights, Labor Practices and Decent Work, Society, Product Responsibility*, dan *Economic*.

Analisis statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat kecenderungan perbedaan dari pengungkapan CSR perbankan swasta dan pemerintah, dalam penelitian ini dilakukan dengan metode uji dua rata-rata non parametrik *Mann-Whitney U Test*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kualitatif Deskriptif

Berdasarkan *content analysis* indikator GRI, diperoleh tabel hasil *coding* yang menunjukkan penilaian peneliti terhadap masing-masing indikator pada perusahaan sampel beserta nilainya (lampiran tabel 3). Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa indikator CSR GRI G3.1 yang paling banyak diungkapkan adalah *economic performance indikator* yang menggambarkan kinerja ekonomi perusahaan, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan oleh perusahaan (termasuk pendapatan, biaya operasi dan lain sebagainya), *market presence*, dan dampak ekonomi tidak langsung sebanyak 340 poin atau sebesar 41,3%. Selain itu, hasil *coding* menunjukkan bahwa seluruh bank sampel mengungkapkan *economic performance indikator* paling banyak dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurkhin (2012) yang menemukan bahwa kelompok perusahaan perbankan, manufaktur, dan telekomunikasi adalah kelompok perusahaan yang paling banyak mengungkapkan kegiatan CSR untuk indikator *economic performance* GRI. Paramita (2008) menemukan bahwa perusahaan *finance* termasuk bank memenuhi pengungkapan indikator *economic performance* paling banyak dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini disebabkan oleh komponen kinerja ekonomi adalah suatu kewajiban yang mutlak untuk diungkapkan perusahaan karena dapat menunjukkan nilai perusahaan (*corporate value*) yang penting untuk penilaian investor maupun *stakeholders* lainnya.

Indikator berikutnya yang banyak diungkapkan oleh bank sampel adalah *Product Responsibility Performance Indicator* sebanyak 208 poin (25,2%), *Labor Practices & Decent Work Indicator* sebesar 148 (18%), kemudian *Environment Performance Indikator* sebanyak 70 poin (8,5%), *Society Performance Indikator* sebanyak 51 poin (6,2%), dan indikator terakhir dengan poin pengungkapan paling kecil adalah *Human Rights Performance Indikator*

sebanyak 7 poin (0,8%). Kecilnya pengungkapan indikator *Human Rights* tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan belum banyak melakukan atau mengungkapkan kegiatan dan tindakan perusahaan yang secara khusus berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Adapun yang mengungkapkan indikator ini, rata-rata hanya menyebutkan tentang kesetaraan *gender*, sehingga poin yang didapatkan juga hanya sedikit. Hal ini juga ditemukan oleh penelitian Paramita (2008) bahwa *Human Rights Performance Indicator* merupakan indikator terkecil yang diungkapkan perusahaan dikarenakan terdapat perbedaan tindakan hak asasi manusia antara perusahaan dengan yang dimaksudkan dalam indikator *Human Rights G3.1 GRI*.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada masing-masing indikator GRI yang dianalisis, semakin besar nilainya, artinya perusahaan tersebut semakin banyak mengungkapkan CSR dalam *annual report* maupun *sustainability report*. Selain itu, standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa indikator pengungkapan mempunyai variasi yang kecil antar perusahaan sampel. *Economic performance indicator*, *Labor Practices & Decent Work Indicator*, dan *Product Responsibility Performance Indicator* memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini menunjukkan rentang pengungkapan ketiga indikator ini untuk masing-masing bank adalah rendah. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada lampiran tabel 4.

Analisis Statistik Analitik dan Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil *output* statistik *Mann Whitney U Test* untuk keseluruhan total CSR maupun masing-masing indikator bank swasta dan bank pemerintah dapat dilihat pada lampiran tabel 5. Berdasarkan hasil pengujian *Mann Whitney U Test* dengan menggunakan alat bantu SPSS

18.0 tersebut, berikut akan dilakukan pembahasan terkait dengan perumusan hipotesis yang telah diajukan. Pertama, hasil *coding* menunjukkan rata-rata hasil pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta, hasil tersebut dirangkum dalam lampiran grafik 1.

Hasil dari rata-rata *coding* tersebut didukung oleh hasil uji statistik *Mann Whitney U Test*, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta untuk total keseluruhan, maupun untuk tiap indikator. Hal ini dikarenakan bank pemerintah yang diwajibkan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bakti Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007, menimbulkan luasnya pengungkapan CSR dalam indikator *Environment Performance Indicator* dan *Society Performance Indicator*. Selain itu, bank pemerintah kini sedang berlomba untuk menjadi *icon* perbankan yang berbasis kerakyatan, karena PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tujuan merangkul masyarakat Indonesia secara luas membuat bank pemerintah melaksanakan CSR lebih banyak.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa bank pemerintah memiliki tingkat inefisiensi yang tinggi dalam hal kinerja. Penelitian Bonin et. Al (2003) di negara-negara yang sedang mengalami transisi menyebutkan bahwa bank yang dimiliki oleh pemerintah kurang efisien dibandingkan dengan bank yang dimiliki oleh swasta ataupun asing. Di Indonesia, Jasmina dan Goeltom (1995) juga menyimpulkan bahwa bank pemerintah memiliki tingkat inefisiensi teknis yang lebih besar dari bank swasta. Hal tersebut menyebabkan bank pemerintah akan melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja serta CSR dalam rangka memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari *stakeholders*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dye dan Sridhar (2008) yang

menyatakan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan pengungkapan informasi perusahaan termasuk CSR berdasarkan kekhasan industri dan *major shareholders*. Yamak dan Süer (2010) juga mendukung pendapat tersebut dengan penelitiannya yang mengungkapkan bahwa perbedaan *stakeholder* dari sebuah entitas bank akan mempengaruhi ekspektasi dan kompensasi yang ingin didapatkan dari perusahaan. *Government* mempunyai kasus tersendiri dan standar dalam melaksanakan kinerja sebagai *stakeholder* adalah regulasi dan Undang-Undang. Harapan utama dari keputusan yang diambil bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan, namun lebih kepada menjaga stabilitas ekonomi negara. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan antara swasta yang menjadi *major shareholder* dan pemerintah yang menjadi *major shareholder* ketika melakukan *action* dalam perusahaan, termasuk pelaksanaan CSR. Apabila diaplikasikan terhadap perbankan Indonesia yang memiliki *major shareholders* yang berbeda, akan menyebabkan perbedaan pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk keputusan pelaksanaan dan pengungkapan CSR.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk timbal balik dari organisasi entitas kepada lingkungan sosial dapat dituangkan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perspektif ini berlaku pula untuk bank, yang merupakan bentuk dari organisasi. Namun, di Indonesia terdapat dua bentuk bank yang sangat dominan berdasarkan klasifikasi *major shareholders*, yaitu bank swasta dan bank pemerintah. Keduanya memiliki perbedaan, kecenderungan perbedaan pengungkapan informasi perusahaan termasuk CSR berdasarkan kekhasan industri dan *major shareholders* dan Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan keduanya. Perbedaan *stakeholder* dari sebuah entitas bank akan mempengaruhi ekspektasi dan kompensasi yang ingin didapatkan dari perusahaan, swasta lebih berekspektasi pada penambahan laba, sedangkan pemerintah

berekspektasi untuk menjaga stabilitas ekonomi Negara dan mensejahterakan rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata *coding content analysis* didukung oleh hasil uji statistik *Mann Whitney U Test*, dalam arti terdapat perbedaan yang signifikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta. Perbedaan ini terjadi untuk keseluruhan total pengungkapan maupun untuk masing-masing dari enam indikator GRI G3.1.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini, periode pengamatan hanya satu tahun, sehingga hasil penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pada tahun 2011; dan *content analysis* dengan melakukan *coding* terhadap masing-masing aspek indikator GRI G3.1 dilakukan dengan justifikasi subjektif yang tinggi, dikarenakan tidak adanya pedoman.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menciptakan sistem bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan atas setiap poin dalam indikator GRI secara seragam untuk melakukan *coding*, sehingga tidak terjadi bias dan alpa dalam menilai satu bank dengan bank yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Baker, N. and Naser, K. 2000. Empirical evidence on corporate social disclosure (CSD) practices in Jordan, *International Journal of Commerce and Management*, Vol. 10 Nos 3/4, pp. 18-34.
- Aria, Arief. 2009. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Branco, M.C. and Rodrigues, L.L. 2006. Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks; a legitimacy theory perspective. *Corporate Communications: An International Journal*. Vol 11 No. 3. pp. 232-248.
- Dechow, Sloan, dan Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review* Vol. 70, No. 2 April 1995, pp. 193-225.

- Deegan, C. 2004. The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure – A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 15, No. 3
- Deegan, C. 2004. *“Financial Accounting Theory”*. MCgRAW-Hill Australia Pty Limited: Australia.
- Deegan, Craig. 2002. The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol. 15 No.3, pp.282-311.
- Djogo, T. 2005. *“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)”*. <http://www.beritabumi.com>. Diakses 5 November 2012.
- Douglas, A., Doris, J., and Johnson, B. 2004. Corporate social reporting in Irish financial institutions, *The TQM Magazine*, Vol. 16 No. 6, pp. 387-95.
- Dye, R.A. dan S. Sridhar. 2008. Industry-wide disclosure dynamics, *Journal of Accounting Research* 33, 157–174
- Eisehardt, Kathleen. 2002. Agency Theory: An Assesment and Review, *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 01. (Jan., 2002), pp. 57-74.
- Frankental, P. 2001. Corporate social responsibility – a PR invention?, *Corporate Communication, An International Journal*, Vol. 6 No. 1, pp. 18-23.
- Gaffikin, M. 2008. *“Accounting Theory: Research, Regulation and Accounting Practice”*. Pearson Education: Australia.
- Ghozali, Imam. 2005. *“Aplikasi analisis multivariate Dengan Program SPSS”*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hackston, D. dan Milne, J. M. 1996. Some determinants of social and environmental disclosure in New Zealand companies, *Accounting, Auditing and Accountability Journal* Vol. 18, No. 1, pp. 77-108.
- Hamid, F.Z.A. 2004. Corporate social disclosure by banks and finance companies: Malaysian evidence, *Corporate Ownership and Control*, Vol. 1 No. 4, pp. 118-30.
- Hayati, Diana. 2011. Pattern of corporate social responsibility programs: a case study, *Social Responsibility Journal*, Vol. 7 Iss: 1 pp. 104 – 117.
- Healy, Paul M dan Khrisna G Palepu. 2001. Information asymetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*: 31.
- Hermana, Budi. 2008. *“Kepercayaan dan Keberpihakan pada Kepentingan Masyarakat: Muara Akhir dari Integritas Perbankan Nasional?”*. Artikel Ilmiah. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hinson, Robert. 2010. Corporate social responsibility activity reportage on bank websites in Ghana. *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 28 Iss: 7 pp. 498 – 518.
- <http://www.bi.go.id/>. *“Apa dan Mengapa Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia”*. Diakses tanggal 15 Oktober 2012.
- <https://www.globalreporting.org/> *“Global Reporting Initiative Guideline”*. Diakses tanggal 28 November 2012.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *“Standar Akuntansi Keuangan”*. Buku Satu, Salemba Empat: Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1998. *“Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”*. Edisi Pertama, BPFE: Yogyakarta.
- Jamali, D. 2006. Insight into triple bottom line integration from a learning organization perspective. *Business Process Management Journal*, Vol. 12 No. 6, pp. 809-21.
- Jones, P. dan Comfort, D. 2005. Corporate social responsibility and the UK’s top ten retailers. *International Journal of Retail Distribution Management*, Vol. 33 No. 12, pp. 882-892.
- Kiroyan. 2006. Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab social: study empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Seminar Nasional Akuntansi*, VIII Solo, pp. 379-395.
- Kostyuk. 2011. Corporate Social Responsibility In Banks: An International Overview. *Emerald’s The International Journal of Accounting*.
- Latumaerissa, Julius. 2012. *“Bank dan Lembaga Keuangan Lain”*. Salemba Empat: Jakarta.
- Nuraini, Icha. 2012. *Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Pertambangan Umum di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2010*. Artikel Ilmiah. Universitas Brawijaya, Malang.
- Nurkhin, Ahmad. 2009. *“Corporate Governance dan Profitabilitas: Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)”*. Tesis. Pasca Sarjana Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro. www.eprints.undip.ac.id. Diakses tanggal 09 Januari 2012.
- O’Donovan, Garry. 2002. Environmental Disclosure in The Annual Report: Extending The Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 15, No. 3, pp. 344-371.
- Parker, Lee D, Kenneth R. Ferrish dan David T. Otley. 1993. *“Accounting for the Human Factor”*. Prentice Hall Pty Ltd: Australia.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
- Scott, W.R. 2009. *“Financial Accounting Theory”*. Prentice-Hall: Toronto, Canada.
- Sitepu, Andre Christian. 2008. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera.
- Sugiyono. 2001. *“Metode Penelitian Bisnis”*. CV Alfabeta: Bandung.
- Suardjono. 2010. *“Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan”*. BPFE: Jogjakarta.
- Tarna, K. 2009. Reporting on the environment: current practice in the financial services sector, *Greener Management International*, Vol. 26, pp. 49-64.

- The World Bank Group. 2012. "Corporate Social Responsibility", akses web: www.worldbank.org/developmentcommunications/where1/environment/csr.htm. Diakses tanggal 29 November 2012.
- Thompson, P. and Cowton, C.J. 2004. Bringing the environment into bank lending: implications for environmental reporting, *The British Accounting Review*, Vol. 36, pp. 197-218.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
- Wibisono, Y. 2007. "Membedah Konsep dan Aplikasi CSR". Fascho Publishing: Gresik.
- Wood, D.J. 1991. Corporate social performance revisited, *Academy of Management Review*, Vol. 16, pp. 691-718.
- Yamak, Sibel. 2010. State as a stakeholder, *Corporate Governance, Emerald International Journal Publishing*, Vol. 5 Iss: 2 pp. 111 – 120
- Yuniarti, Ety. 2007. "Analisis Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial pada Sektor Perbankan di Indonesia". Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Diponegoro, Semarang.
- Ze'ghal, D. and Ahmed, S.A. 2002. Comparison of social responsibility information disclosure media used by Canadian firms, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 3 No. 1, pp. 38-53

LAMPIRAN

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

Total Populasi		31
Kriteria Penentuan Sampel		
<i>Annual report</i> tidak dapat diakses melalui <i>website</i> BEI maupun <i>website</i> resmi perusahaan, serta tidak menerbitkan <i>sustainability report</i>	6	
<i>Annual report</i> tidak mengandung laporan CSR dan tidak menerbitkan <i>sustainability report</i>	5	
Jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria sampel		(11)
Total Sampel		20

Tabel 2
Data Perusahaan Sampel

NO	NAMA BANK	KODE SAHAM	STATUS
1	PT Bank Artha Graha International Tbk	INPC	Swasta
2	PT Bank Bukopin Tbk	BBKP	Swasta
3	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	Swasta
4	PT Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA	Swasta
5	PT Bank Danamon Tbk	BDMN	Swasta
6	PT Bank International Indonesia Tbk	BNII	Swasta
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	BUMN
8	PT Bank Mega Tbk	MEGA	Swasta
9	PT Bank Mutiara Tbk	BCIC	Swasta
10	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	BUMN
11	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP	Swasta
12	PT Bank OCBC NISP Tbk	NISP	Swasta
13	PT Bank of India Indonesia Tbk	BSDW	Swasta
14	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	BJBR	Swasta
15	PT Bank QNB Kesawan Tbk	BKSW	Swasta
16	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	BUMN
17	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	AGRO	Swasta
18	PT Bank Sinarmas Tbk	BSIM	Swasta

19	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	BUMN
20	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	BTPN	Swasta

Tabel 3
Hasil Tabulasi Pemenuhan Indikator GRI G3.1

NAMA PERUSAHAAN	EC	EN	LA	HR	SO	PR	Σ
BANK PEMERINTAH							
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62	12	11	2	14	23	124
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	29	15	16	0	4	21	85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	34	11	12	2	8	25	92
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11	5	11	0	4	10	41
Σ UNTUK BANK BUMN	136	43	50	4	30	79	342
RATA-RATA	34	10,8	12,5	1	7,5	19,8	85,5
BANK SWASTA							
PT Bank Artha Graha International Tbk	12	0	3	0	0	7	22
PT Bank Bukopin Tbk	9	1	5	0	0	5	20
PT Bank Central Asia Tbk	25	4	7	0	1	14	51
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20	9	12	3	2	12	58
PT Bank Danamon Tbk	14	7	9	0	9	8	47
PT Bank International Indonesia Tbk	17	3	14	0	5	5	44
PT Bank Mega Tbk	12	0	5	0	0	12	29
PT Bank Mutiara Tbk	19	1	3	0	1	9	33
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	13	0	6	0	0	6	25
PT Bank OCBC NISP Tbk	11	1	8	0	1	9	30
PT Bank of India Indonesia Tbk	5	0	3	0	0	8	16
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	7	0	3	0	0	6	16
PT Bank QNB Kesawan Tbk	8	0	3	0	0	5	16
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	9	0	8	0	0	9	26
PT Bank Sinarmas Tbk	12	1	5	0	1	8	27
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	11	0	4	0	1	6	22
Σ UNTUK BANK SWASTA	204	27	98	3	21	129	482
RATA-RATA	12,8	1,7	6,1	0,2	1,3	8,1	30,2
Σ KESELURUHAN	340	70	148	7	51	208	824
Prosentase (dalam %)	41,3	8,5	18	0,8	6,2	25,2	100

Keterangan Tabel:

EC: *Economic Performance Indicator*

EN: *Environment Performance Indicator*

LA: *Labor Practices and Decent Work Performance Indicator*

SC: *Society Performance Indicator*

HR: *Human Rights Performance Indicator*
 PR: *Product Responsibility Performance Indicator*

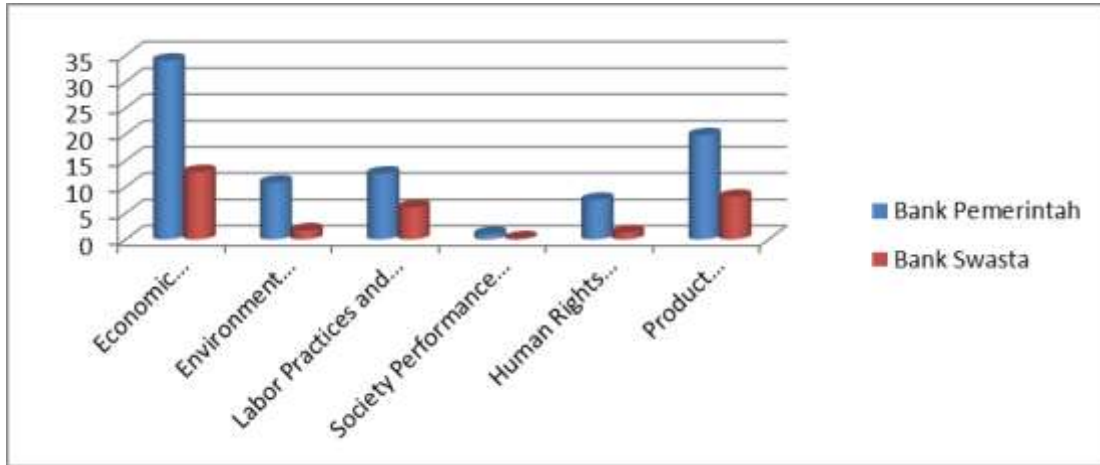
Tabel 4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Economic	20	5	62	17,00	12,970
Environment	20	0	15	3,50	4,752
Labour	20	3	16	7,40	4,083
Human Right	20	0	3	,35	,875
Society	20	0	14	2,55	3,818
Product	20	5	25	10,40	5,995
Total CSR	20	16	124	41,20	28,931

Tabel 5
Perbandingan Pengungkapan CSR Bank Pemerintah dan Bank Swasta

NO	VARIABEL	NILAI <i>Asym. Sig. (2-tailed)</i>
1	Total Pengungkapan CSR	***0,008
2	<i>Economic performance indicator</i>	**0,037
3	<i>Environment Performance Indicator</i>	***0,003
4	<i>Society Performance Indicator</i>	***0,008
5	<i>Labor Practices & Decent Work Indicator</i>	***0,011
6	<i>Human Rights Performance Indicator</i>	**0,048
7	<i>Product Responsibility Performance Indicator</i>	***0,006
Keterangan: *** signifikan pada level 1% ** signifikan pada level 5%		

Grafik 1 Perbandingan Rata-Rata Pengungkapan Masing-Masing Indikator G3.1 GRI oleh Bank Pemerintah dan Bank Swasta



Studi Empiris Pembentukan Portofolio Saham Multifaktor di Bursa Efek Indonesia

RENNY NUR'AINY*
BUDI ERIANDA
BAGUS NURCAHYO
ROWLAND PASARIBU
Universitas Gunadarma

Abstract: Ability to estimate an individual security returns is very important and needed by investors. Therefore the presence of Capital Asset Pricing Model (CAPM) which can be used to estimate the return of a security is considered very important in the field of finance. However, Fama and French showed that the CAPM is not accurate and they proposed a three-factor model as a better asset pricing model. This study aims to provide an overview of the establishment of a stock portfolio with a multifactor approach to Fama and French Three Factor to predict expected stock returns in Indonesia Stock Exchange. The population is a company listed on the Stock Exchange in 2007-2011. This study uses stock price during the observation period, and the stock return, risk free rate, high minus big (HMB), small minus low (SML) and market risk as variables. Multiple linear regression with the *t* test and *F* test statistics are used to demonstrate the influence and significance level of each variable. The results showed that the model of Fama and French is more superior than CAPM. Market risk factor is the dominant factor to quantify the risk when compared with HML and SMB. With the addition of SMB factors can increase the coefficient of determination in each portfolio is formed.

Keywords: Fama and French Three Factor, Capital Asset Pricing Model, Market Capitalization, Book-to-Market Ratio, Expected Return, Market Risk.

* Corresponding author: renny@staff.gunadarma.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu bagian terpenting dalam mempelajari investasi adalah bagaimana mengukur risiko dan *return* saham. Penelitian dibidang ini berkaitan dengan pengujian bagaimana pasar modal menetapkan harga sekuritas dengan mempelajari perilaku investor individu dalam memilih berbagai aset keuangan berdasarkan tingkat pengembalian (*return*) dan risiko yang diharapkan. Dalam konteks investasi, keuntungan dimasa mendatang mencerminkan harapan yang belum tentu terealisasi. Oleh karena itu, keuntungan dimasa mendatang, yang dikenal dengan istilah *return* yang diharapkan (*expected return*) merupakan *return* yang diharapkan dari suatu investasi terjadi dimasa yang akan datang dan bersifat tidak pasti.

Disamping *return*, dalam konsep investasi juga perlu dipelajari risiko. Harry Markowitz (1952) yang mengemukakan teori portofolio modern menyatakan bahwa risiko investasi dapat diperkecil melalui pembentukan portofolio yang efisien, sehingga risikonya lebih rendah daripada risiko masing-masing instrument investasi (misalnya saham) yang membentuk portofolio tersebut.

Melakukan estimasi tingkat pengembalian saham yang diharapkan (*expected return*) adalah penting untuk keputusan keuangan seperti prediksi biaya ekuitas/biaya modal pada keputusan investasi, manajemen portofolio, penganggaran modal, dan evaluasi kinerja. Model yang sering digunakan untuk mengestimasi biaya modal rata-rata tertimbang adalah dengan menggunakan versi klasik *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dari Sharpe (1964), Lintner (1965) dan Mossin (1966) seperti yang dilaporkan oleh Graham dan Harvey (2001). Dalam perkembangannya ditahun 70-an selain digunakan untuk mengkalkulasi biaya modal, CAPM juga digunakan untuk mengukur kinerja portofolio. Kemudian tahun 1990-an, Fama

dan French menunjukkan bahwa CAPM tidak akurat dan mereka mengusulkan model tiga faktor (Three Factor Model/TFM) yang lebih baik sebagai model penilaian aset.

Sejak pertama diperkenalkan sampai saat ini, pengujian CAPM terus dilakukan dan memberikan hasil yang tidak mendukung. Ketidaksesuaian ini menurut Miller dan Scholes (1972) dikarenakan adanya penggunaan *market model*, yaitu hasil pada *return* bebas risiko yang berfluktuasi dan berkorelasi dengan *return market* sehingga terjadi bias dalam penaksiran. Hal lain yang tidak mendukung model CAPM atau CAPM kurang baik dalam menjelaskan *return* adalah adanya beta yang merupakan satu-satunya faktor yang menerangkan *return* sekuritas berisiko. Dalam model CAPM, beta merupakan pengukuran risiko sistematis dari sekuritas terhadap risiko pasar. Permasalahannya adalah dalam mengestimasi beta pada pasar modal yang kecil, beta yang diestimasi kemungkinan menjadi bias karena terjadi *infrequent trading* dimana beberapa sekuritas tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu (Dismon, 1979 dalam Pasaribu, 2009).

Fama dan French (1993, 1996) dalam Pasaribu (2009) mengusulkan model tiga faktor untuk pengembalian saham yang diharapkan. Faktor yang dimaksud adalah *excess-return* pada portofolio saham dengan *size* kecil atas portofolio saham dengan *size* besar, dan *excess-return* pada portofolio saham dengan rasio B/M yang tinggi terhadap portofolio saham dengan rasio B/M yang rendah. Fama dan French (1996) berpendapat bahwa hasil empiris pada portofolio yang dibentuk berdasarkan *size* dan B/M menunjukkan secara rata-rata absolut *pricing* CAPM cukup tinggi (3-5) jika dibandingkan dengan model tiga faktor. Fama dan French (1996) menggunakan portofolio yang dibentuk berdasarkan industri untuk menguji dua model *asset pricing* (CAPM dan TFM) dan mereka tidak mengubah posisi superioritas atas model TFM. Bahkan Fama dan French menginterpretasikan model tiga faktor sebagai bukti untuk premi risiko atau premi *distress*. Saham emiten dengan *size* kecil dan rasio B/M tinggi merupakan perusahaan yang memiliki kinerja buruk dan cenderung

mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), sehingga investor mengajukan kompensasi premi risiko untuk alasan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai portofolio multifaktor dengan pendekatan Fama dan French di Bursa Efek Indonesia untuk mengukur *return* yang diharapkan oleh investor.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Apakah *Three Factor Fama and French* dan *Capital Asset Pricing Model* dapat menjelaskan tingkat *return* saham yang diharapkan? dan 2) Model *asset pricing* mana yang memberikan tingkat *return* saham yang terbaik di Bursa Efek Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui apakah *Three Factor Fama and French* dan *Capital Asset Pricing Model* dapat menjelaskan tingkat *return* saham yang diharapkan, dan 2) Pemilihan model *asset pricing* yang terbaik dalam menjelaskan tingkat estimasi dari pengembalian saham yang diharapkan di Bursa Efek Indonesia.

RERANGKA TEORITIS

Risiko dan Return

Risiko investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara *return* aktual/realisasi (*realized return*) dan *return* yang diharapkan/ekspektasi (*expected return*). Ini menunjukkan bahwa dalam berinvestasi disamping menghitung *return* yang diharapkan, investor juga harus memperhatikan risiko yang harus ditanggungnya. *Return* aktual adalah *return* yang telah terjadi berdasarkan data historis. *Return* aktual ini penting karena

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Selain itu *return* historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan *return* yang diharapkan/ekspektasi dan risiko dimasa mendatang. *Return* yang diharapkan adalah *return* yang memang diharapkan diperoleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan *return* aktual yang sifatnya sudah terjadi, *return* yang diharapkan sifatnya belum terjadi.

Risiko didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil yang diharapkan dan realisasinya. Semakin besar penyimpangan, semakin tinggi risikonya. Harry Markowitz (1952) menyatakan bahwa keputusan investasi yang dibuat investor didasarkan pada *return* yang diharapkan dan varian dari *return* (sebagai ukuran risiko). Investor bersedia menerima risiko yang lebih besar tetapi harus dikompensasi dengan kesempatan mendapatkan *return* yang juga besar. Risiko juga sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi. Van Horne dan Wachowich, Jr. (1992) mendefinisikan risiko sebagai variabilitas *return* terhadap *return* yang diharapkan. Metode yang banyak digunakan untuk mengukur risiko investasi adalah deviasi standar (*standard deviation*) yang mengukur absolut penyimpangan nilai yang sudah terjadi dengan nilai rata-ratanya (sebagai nilai yang diekspektasi).

Return Total

Return total merupakan keseluruhan investasi dalam suatu periode. *Return* total disebut dengan *return* saja. *Return* total terdiri dari *capital gain (loss)* dan *yield*:

$$\text{Return} = \text{Capital Gain (Loss)} + \text{Yield}$$

Capital gain (loss) merupakan selisih harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu:

$$\text{capital gain (loss)} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Jika harga investasi sekarang (P_t) lebih tinggi dari harga investasi periode lalu (P_{t-1}) berarti terjadi keuntungan modal (*capital gain*), dan sebaliknya. *Yield* merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. *Yield* saham adalah persentase dividen terhadap harga saham sebelumnya.

$$Return = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} + Yield$$

Asset Pricing Model

Model *asset pricing* menyediakan alat untuk mengestimasi *return* yang diharapkan suatu instrumen aset yang berisiko, dan merupakan faktor penting dalam penentuan nilai aset atau portofolio. Menurut Cochrane (2001) teori penilaian aset mencoba memahami harga atau nilai pembayaran klaim yang tidak pasti. Harga aset yang rendah mengimplikasikan tingkat pengembalian yang tinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan teori, serta menjelaskan alasan beberapa aset mendapatkan pengembalian rata-rata yang lebih tinggi daripada aset lain. Nilai aset perlu memperhitungkan keterlambatan risiko pembayaran. Cochrane (2001) menyebutkan bahwa hasil penelitian empiris dan teoritis dalam literatur *asset pricing* lebih sering merujuk pada pengembalian aset.

Model penilaian harga aset juga dapat digunakan untuk pemetaan harga aset keuangan, seperti saham dan obligasi. Dalam model penilaian aset ini, harga selalu dilihat sebagai variabel endogen, bukan sebaliknya. Burton (1998) menyebutkan beberapa jenis umum model yang dibahas dalam literatur penelitian, antara lain *Capital Asset Pricing Model*/CAPM (1996), *Arbitrage Pricing Theory*/APT (1976), dan Model Tiga Faktor Fama dan French/TFMFF (1992).

Capital Asset Pricing Model dan Asumsi

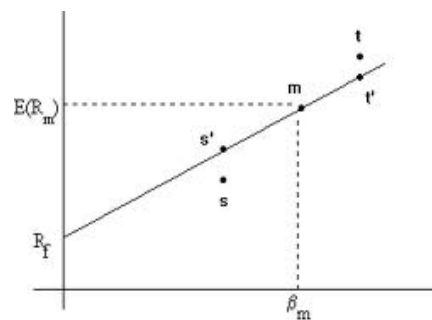
Bentuk standar *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) pertama kali dikembangkan secara terpisah dari Sharpe (1964), Lintner (1965) dan Mossin (1969), dan dikenal sebagai CAPM bentuk Sharpe-Lintner-Mossin. Beberapa ahli menganggap bahwa asumsi yang digunakan dalam CAPM kurang realistis. Kemudian beberapa penelitian mencoba melepaskan asumsi yang digunakan CAPM supaya model ini lebih realistis mewakili kenyataannya. Hasil pelepasan asumsi ternyata tidak banyak merubah hasil prediksi dari CAPM (lihat Elton dan Gruber, 1995).

Asumsi yang digunakan CAPM adalah 1) Semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode; 2) Semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai *return* ekspektasi dan deviasi standar *return* dari portofolionya; 3) Semua investor mempunyai harapan yang seragam (*homogeneous expectation*) terhadap faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio; 4) Semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya (*lending*) atau meminjam (*borrowing*) sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko; 5) Penjualan pendek (*short sale*) diijinkan; 6) Semua aktiva dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas; 7) Semua aktiva dapat dipasarkan secara likuid sempurna; 8) Tidak ada biaya transaksi; 9) Tidak terjadi inflasi; 10) Tidak ada pajak pendapatan pribadi, sehingga investor mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan *capital gain* atau dividen; 11) Investor adalah penerima harga (*price takers*); 12) Pasar modal dalam posisi ekuilibrium.

Ekuilibrum Pasar Modal

Ekuilibrum pasar dalam CAPM digambarkan dalam dua bentuk hubungan antara *expected return* dan risiko investasi, yaitu *capital market line* (CML) dan *security market line* (SML). CML adalah garis lurus yang menggambarkan hubungan *expected return* portofolio yang efisien dengan deviasi standarnya. Deviasi standar yang valid digunakan untuk

mengukur risiko portofolio yang dipegang oleh semua investor, yaitu portofolio yang terdiri dari *market portfolio* dan aset bebas risiko, karena deviasi standar merupakan dispersi atau penyebaran *return* portofolio disekitar nilai reratanya. *Security Market Line* (SML) adalah garis lurus yang menggambarkan hubungan *expected return* sekuritas atau portofolio dengan beta. Ukuran relevan risiko suatu aset atau portofolio adalah beta, yaitu kontribusi varian *return* aset portofolio terhadap varian *return* pasar, karena *covarian return* aset atau portofolio terhadap *return* pasar tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi.

Gambar 2.1 *Capital Market Line*Gambar 2.2 *Security Market Line*

Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa titik M menunjukkan portofolio pasar dengan beta senilai m dan *return* yang diharapkan sebesar $E(R_M)$. Beta yang bernilai 0 atau aktiva yang tidak mempunyai risiko sistematis adalah beta dengan aktiva bebas risiko. Aktiva ini mempunyai *return* yang diharapkan sebesar R_F yang merupakan *intercept* dari SML. Dengan asumsi SML adalah garis linier, maka persamaan garis linear dapat dibentuk dengan *intercept* R_F dan *slope* sebesar: $[E(R_M) - R_F] / \beta_M$. Karena β_M bernilai 1, maka *slope* SML sebesar $[E(R_M) - R_F]$. Persamaan SML untuk sekuritas ke- i adalah:

$$E(R_i) = R_F + \beta_i \cdot [E(R_M) - R_F]$$

Keterangan:

$E(R_i)$ = *Return* yang diharapkan asset i

R_F = *Return* aset bebas risiko

β_i = Beta aset i

$E(R_M)$ = *Return* pasar

Persamaan matematika ini dikenal sebagai *Capital Asset Pricing Model* (CAPM).

Garis Pasar Modal

Garis lurus R_{BR-Q} pada Gambar 2.1 adalah garis pasar modal. Garis pasar modal menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Jika portofolio pasar hanya berisi aktiva tidak berisiko, maka risikonya sama dengan nol ($\sigma_p = 0$) dan *return* yang diharapkan sama dengan R_F . Jika portofolio terdiri dari semua aktiva yang ada, maka risikonya sebesar σ_M dengan *return* yang diharapkan dari $E(R_M)$ lebih besar dibandingkan *return* yang diharapkan portofolio dari aktiva tidak berisiko (R_F). Selisih kedua *return* ini sebesar $[E(R_M) - R_F]$ yang merupakan premium portofolio pasar, karena menanggung risiko lebih besar yaitu sebesar σ_M . Dengan demikian *slope* CML adalah harga pasar dari risiko sebesar:

$$\text{Harga pasar dari risiko} = \frac{[E(R_M) - R_F]}{\sigma_M}$$

Slope dari CML merupakan harga pasar dari risiko untuk portofolio efisien. Harga pasar dari risiko menunjukkan tambahan *return* yang dituntut oleh pasar karena adanya kenaikan risiko portofolio relatif terhadap risiko pasar

Model Tiga Faktor Fama dan French

Bukti empiris membantah prediksi model CAPM dari Sharpe (1964), Lintner (1965) dan Black (1972) yang menyatakan bahwa tingkat *expected return* secara lintas sektor adalah linier didalam beta. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa penyimpangan risiko *trade-off* dan tingkat pengembalian CAPM memiliki hubungan dengan variabel ukuran perusahaan (Banz, 1981), *earning yield* (Basu, 1977 dan 1983), *leverage* (Bhandari, 1988) dan rasio nilai buku perusahaan terhadap nilai pasar-nya (Stattman, 1980; Rosenberg *et al.* 1985; Chan, *et al.* 1991). Model ini diperkenalkan oleh Eugene F. Fama dan Kenneth R. French pada tahun 1992.

Dalam perkembangan selanjutnya Fama dan French memperluas model CAPM dengan menambahkan faktor *firm size* dan *book to market ratio* (B/M) selain faktor risiko pasar dalam CAPM. Model ini mempertimbangkan fakta bahwa nilai dan saham perusahaan kecil dapat mengungguli pasar secara teratur (Aaker dan Jacobson, 1994). Dengan memasukkan dua faktor tambahan diyakini dapat menjelaskan kecenderungan keunggulan pasar sehingga menjadi alat yang baik untuk mengevaluasi kinerja manajer keuangan.

Secara umum, telah ditemukan suatu hubungan positif antara tingkat *return* dengan *earning yield*, arus kas *yield* dengan rasio B/M, serta hubungan negatif antara tingkat pengembalian saham dan ukuran perusahaan. Secara khusus, Basu (1977, 1983), Banz (1981), Reinganum (1981), Lakonishok dan Shapiro (1986), Kato dan Shallheim (1985) dan Ritter (2003), melakukan studi empiris mengenai pengaruh *earning yield* dan ukuran perusahaan terhadap *return*.

Fama dan French mengembangkan CAPM dalam *three factor model* untuk mengakumulasi bukti empiris bahwa CAPM kurang baik digunakan dalam menganalisis hubungan risiko dengan *return*. Mereka menambahkan dua faktor risiko, yaitu *size* dan *value* (*Book to Market ratio* B/M) atau *Book Equity to Market Equity* (BE/ME). Untuk *size* dan

value memiliki hubungan signifikan dengan *return*. Fama dan French menegaskan bahwa model ini mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada CAPM.

Bukti tentang proksi perusahaan dan B/M untuk sensitivitas faktor risiko dalam tingkat pengembalian adalah konsisten dengan *rational-pricing* untuk peran ukuran perusahaan dalam tingkat pengembalian rata-rata. Ukuran perusahaan dapat menjadi proksi untuk risiko kelalaian dan B/M dapat menjadi indikator pada prospek relatif perusahaan. Menurut Cochrane (1996 dan 2001) model *asset pricing* yang menggunakan *return* portofolio sebagai suatu faktor mungkin dapat menjelaskan *return* aset secara memadai tetapi tidak mampu menjelaskan faktor tersebut secara parsial, karena model ini tetap meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab perihal *return* berdasarkan faktor tersebut.

Fama dan French (1993) menyajikan beberapa tes yang menyatakan bahwa rasio BE/ME dan ukuran perusahaan adalah proksi untuk *loading* perusahaan atas faktor risiko yang memiliki harga tertentu. Tes pertama, mereka menunjukkan bahwa harga saham yang memiliki rasio B/M tinggi dan ukuran perusahaan kecil cenderung bergerak keatas dan kebawah secara bersamaan dengan cara *suggestive* dari suatu faktor risiko yang umum. Tes kedua, mereka menemukan bahwa factor *loading* biaya nol portofolio berdasarkan ukuran (SMB) dan rasio *book to market* (HML) bersama dengan suatu nilai tertimbang portofolio pasar (Mkt) menjelaskan kelebihan *return* pada suatu kumpulan portofolio *book to market* dan *size*. Pendek kata, mereka membantah adanya asosiasi antara karakteristik ini (*size*, rasio B/M) dan tingkat pengembalian meningkat, sebab karakteristik tersebut adalah proksi untuk faktor yang tidak bisa didiversifikasi.

Fama and French Three Factor Model dibentuk dengan dilatarbelakangi untuk menguji CAPM. Penelitian tersebut diawali oleh penelitian sebelumnya yang menemukan adanya faktor selain beta yang dapat mempengaruhi *return* saham. Gagasan Fama dan French

(1993) adalah *market*, *size*, dan rasio BE/ME harus dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi *stock return* selain beta. Hal ini bila diformulasikan dalam sebuah persamaan:

$$R_{i_t} - R_{f_t} = \alpha_i + \beta_i (R_{m_t} - R_{f_t}) + s_i \text{SMB}_t + h_i \text{HML}_t + e_{i_t}$$

Keterangan:

R_{i_t} = *stock return*

R_{f_t} = *return* tingkat bebas risiko

R_{m_t} = *return* portofolio pasar

SMB_t = *small minus big*: perbedaan setiap bulan rata-rata *return* pada tiga portofolio saham kecil (S/L, S/M, S/H) dengan rata-rata *return* pada tiga portofolio saham besar (B/L, B/M, B/H).

HML_t = *high book to market minus low book to market*: perbedaan setiap bulan rata-rata pada dua portofolio yang BE/ME-nya tinggi (S/H dan B/H) dan rata-rata *return* pada dua portofolio yang BE/ME-nya rendah (S/L dan B/L).

Ajili (2002) mencoba menguji model tiga faktor Fama dan French (*market*, *size* dan BE/ME) dengan model CAPM di *Paris Stock Exchange* selama periode Juli 1976 hingga Juni 2001. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model tiga faktor Fama dan French lebih baik dalam menjelaskan *stock return* dibandingkan CAPM. Menurut Fama dan French (1992, 1993) ukuran perusahaan dan rasio B/M memainkan peran dominan dalam menjelaskan perbedaan *return* yang diharapkan secara *cross-sectional* untuk perusahaan non-financial. Namun, Barber dan Lyon (1997) menyatakan bahwa hubungan ukuran perusahaan, rasio B/M, dan *stock return* sama untuk perusahaan keuangan dan non-keuangan. Mereka mengusulkan model alternatif yang memasukkan terlepas dari faktor pasar, faktor berhubungan dengan B/M.

Size Effect

Penelitian empiris tentang bagaimana *size* memiliki efek terhadap pembentukan portofolio dilakukan Banz (1981). Banz memperlihatkan adanya kecenderungan saham perusahaan kecil yang mempunyai *return* lebih tinggi dibandingkan saham perusahaan besar. Banz menemukan adanya *abnormal return* yang diperoleh investor ketika memiliki saham perusahaan kecil, selama 1936 – 1977. Reinganum (1981) menemukan *abnormal return* pada saham perusahaan kecil. Tetapi hasil penelitian tersebut banyak mendapatkan kritik terutama mengenai penggunaan CAPM dalam menentukan besarnya *return* yang diharapkan. CAPM dianggap tidak tepat untuk menghitung *abnormal return*, karena model ini terlalu bergantung kepada beta. Padahal seperti kebanyakan kritik terhadap CAPM, variabel beta dianggap banyak kelemahannya, karena dihitung dengan menggunakan data historis, serta adanya perbedaan beta yang signifikan antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar (Tandelilin, 2010).

Chanm Chen dan Hsieh (1985) dalam Tandelilin (2010), mencoba menggunakan model APT, dan menemukan adanya perbedaan *return* antara portofolio perusahaan besar dan portofolio perusahaan kecil sebesar 1,5% per tahun. Perusahaan kecil umumnya mempunyai beta yang relatif lebih rendah sehingga estimasi *return* yang diharapkan dengan menggunakan CAPM juga menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, perbedaan *return* yang diharapkan dengan *return* aktual cenderung positif.

Dari penjelasan tersebut, variabel ukuran perusahaan dalam model penetapan harga aset adalah *excess return* saham, yaitu selisih *return* portofolio saham yang memiliki ukuran kapitalisasi pasar kecil dengan portofolio saham yang memiliki kapitalisasi pasar besar, sehingga variabel ukuran perusahaan dapat disesuaikan dengan *Small Minus Big* (SMB).

Book to Market Equity

Fama dan French (1991), Lakonishok, Shleifer dan Vishny (1993), serta Cahn, Hamao dan Lakonishok (1991) melakukan penelitian nilai *book to market equity* dengan *return* saham. Mereka menemukan ada perbedaan *return* saham yang mempunyai *book to market equity* yang tinggi dibandingkan dengan yang rendah. Penelitian Lakonishok, Shleifer dan Vishny juga menemukan adanya perbedaan sebesar 7,8% per tahun. Menurut mereka saham yang mempunyai *book to market equity* tinggi cenderung mempunyai tingkat *return* lebih besar dibandingkan saham yang mempunyai *book to market equity* rendah.

Rasio *book to market* merupakan salah satu faktor *distress-risk* (Fama dan French, 1991). Rasio tersebut didapat dengan membandingkan nilai buku perusahaan dengan nilai pasar saham. Rasio *book to market* yang kecil menggambarkan nilai buku perusahaan lebih rendah dari nilai pasar saham. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen perusahaan tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penilaian perusahaan selain dapat menggunakan model valuasi berdasarkan *cash flow* perusahaan kepada pemegang saham, dapat juga menggunakan pendekatan *relative valuation* yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan yaitu *price earning ratio*, *book to market*, *price to growth*. Penilaian harga saham yang diperdagangkan dinilai terlalu tinggi (*overvalue*) dan terlalu rendah (*undervalue*) jika nilai yang didapat diatas 1 dan dibawah 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa *asset* perusahaan dinilai kurang dari nilai pasarnya.

Apabila *Book to market equity* dijadikan proxy dari risiko, maka perusahaan yang memiliki nilai *book to market equity* besar (perusahaan cenderung mengalami *distress-financial*) menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan *book to market equity* yang rendah. Bertambah besarnya risiko yang ditanggung, maka investor mengisyaratkan *return* yang lebih besar. Faktor *distress-risk* dimasukkan kedalam persamaan

model penetapan harga aset menjadi *High Minus Low* (HML). Ini dilakukan untuk menunjukkan adanya selisih tingkat pengembalian portofolio emiten yang memiliki rasio *book to market* tinggi terhadap portofolio emiten yang memiliki rasio *book to market* yang rendah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian empiris Black *et.al* (1972) serta Fama dan MacBeth (1973) menguji CAPM dengan menginvestigasi apakah intersep pada hasil regresi secara *cross-section* dan *time series* pada *excess return to beta* (ERB) adalah nol. CAPM juga memprediksi perbedaan dalam *expected-return* beragam saham yang secara keseluruhan dijelsakan oleh perbedaan dalam beta pasar.

Hasil empiris lain menemukan deviasi atau anomali dari CAPM pada periode 1980-an dan 1990-an. Temuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai tantangan validitas CAPM dengan menganggap beta pasar tidak cukup memadai dalam menjelaskan *return* saham yang diharapkan. Basu (1977) menunjukkan bahwa saat saham dikelompokkan berdasarkan rasio E/P, *return* saham dengan rasio E/P yang tinggi menghasilkan *return* yang lebih besar dibandingkan hasil estimasi CAPM. Banz (1981) berpendapat *size-effect* saham dengan nilai kapitalisasi pasar yang rendah menghasilkan *return* yang lebih tinggi dibandingkan hasil estimasi CAPM.

Fama dan French (1992) menyatakan emiten yang memiliki rasio B/M tinggi memiliki rata-rata *return* yang tinggi dan tidak dapat dijelaskan oleh beta pasar. Kemudian Fama dan French kembali mengkaji penelitian terdahulu dengan menggunakan pendekatan *time-series*, dan menghasilkan kesimpulan yang sama. Fama dan French (1993) juga mengusulkan model tiga faktor untuk *return* saham yang diharapkan. Menurut Fama dan French (1996) portofolio yang dibentuk berdasarkan *size* dan rasio B/M menunjukkan secara

rata-rata kesalahan absolut *pricing* pada CAPM yang cukup tinggi (3-5 kali) dibanding model tiga faktor.

Pasaribu (2009) melakukan penelitian pembentukan portofolio saham di Indonesia dengan menggunakan model Fama dan French. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan signifikan antara *market*, *size*, dan *book-to-market equity* dengan *return* saham di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, ditemukan bahwa model tiga faktor Fama dan French (1993) dapat diterima di Bursa Efek Indonesia dan lebih kuat dari CAPM untuk emiten non-keuangan, namun portofolio yang terbentuk memiliki kinerja yang buruk.

Dede dan Umi (2008) melakukan penelitian untuk menguji kemampuan model Fama dan French tiga faktor dalam menjelaskan *return* portofolio dibandingkan CAPM. Dengan menggunakan emiten yang terdaftar dalam LQ-45 hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAPM lebih mampu menjelaskan *return* portofolio dibandingkan model Fama dan French tiga faktor.

METODE RISET

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh secara sekunder melalui situs resmi BEI, BI dan Yahoo Finance. Data yang dibutuhkan adalah *size*, *book-to-market equity*, *small minus big* (SMB), *high minus low* (HML), tingkat bunga bebas risiko, *return* pasar, dan *return* saham tahun 2007-2011 yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, data harga saham dan indeks, serta Suku Bunga Bank Indonesia (SBI).

Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yang bertujuan mendapatkan sampel representatif dengan kriteria 1) Terdaftar di BEI pada tahun 2007–2011; 2) Menyajikan laporan keuangan setiap periode amatan; 3) Termasuk 50 perusahaan

berkapitalisasi besar, minimal terdaftar tiga kali selama periode amatan; 4) Tidak memiliki rasio B/M negatif.

Variabel yang dibutuhkan adalah *SMB* (*Small Minus Big*), *HML* (*High Minus Low*) dan *Market risk* sebagai independen. Portofolio B/H (*Big Market Caps – High B/M*), S/H (*Small Makret Caps – High B/H*), B/L (*Big Market Caps – Low B/H*), dan S/L (*Small Market Caps – Low B/H*) sebagai variabel dependen. Masing-masing variabel tersebut secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. ***Small Minus Big (SMB)***: dirancang untuk mengukur *return* yang diperoleh investor secara historis diterima dari investasi dalam saham perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang relatif kecil (Allen, Singh dan Powell, 2009). Saputra dan Murtini (2008) mendefinisikan *SMB* sebagai perbedaan setiap bulan antara rata-rata dari *return* pada dua portofolio saham kecil (S/L dan S/H) dan rata-rata *return* pada dua portofolio saham besar (B/L dan B/H).

$$SMB = (S/L + S/H) - (B/L + B/H)$$

Dimana:

SMB = Perbedaan setiap bulan antara rata-rata dari *return* pada dua portofolio saham kecil (S/L dan S/H) dan rata-rata *return* pada dua portofolio saham besar (B/L dan B/H).

S/L = *return* portofolio dengan kriteria *Small size Low B/M*.

S/H = *return* portofolio dengan kriteria *Small size High B/M*.

B/L = *return* portofolio dengan kriteria *Big size Low B/M*.

B/H = *return* portofolio dengan kriteria *Big size High B/M*.

2. ***High Minus Low (HML)***: *High Minus Low* dirancang untuk mengukur “nilai premi” yang diberikan kepada investor untuk berinvestasi dalam perusahaan dengan nilai buku yang tinggi (Allen, Singh dan Powell, 2009). *High Minus Low* merupakan perbedaan setiap

bulan antara rata-rata pada dua portofolio dengan rasio B/M yang tinggi (S/H dan B/H) dan rata-rata dari *return* pada dua portofolio dengan rasio B/M yang rendah (S/L dan B/L).

$$HML = (S/H + B/H) - (S/L + B/L)$$

Dimana:

HML= Perbedaan setiap bulan antara rata-rata dari *return* pada dua portofolio saham kecil (B/H dan S/H) dan rata-rata *return* pada dua portofolio saham besar (S/L dan B/L).

S/L= *return* portofolio dengan kriteria *Small size Low B/M*.

S/H= *return* portofolio dengan kriteria *Small size High B/M*.

B/L= *return* portofolio dengan kriteria *Big size Low B/M*.

B/H = *return* portofolio dengan kriteria *Big size High B/M*.

3. **Market Risk:** *Market risk* merupakan risiko pasar yang tidak dapat dihilangkan. Portofolio pasar dalam hal ini adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai indeks yang mencerminkan keseluruhan emiten di Bursa Efek Indonesia.

$$Return (R_m) = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Dimana:

R_m = *Market Return*

P_t = Indeks Harga Saham Gabungan pada bulan t

P_{t-1} = Indeks Harga Saham Gabungan pada bulan t-1

a. Variabel Dependen

1. **Portofolio Size Big Low B/M:** Portofolio dengan pengukuran kriteria berdasarkan *firm size* dan rasio B/M. Portofolio terbentuk dengan kriteria *big size* dan *low* rasio B/M.

2. **Portofolio Size Small High B/M:** Portofolio dengan pengukuran kriteria berdasarkan *firm size* dan rasio B/M. Portofolio terbentuk dengan kriteria *small size* dan *high* rasio B/M.

3. **Portofolio Size Big High B/M:** Portofolio dengan pengukuran kriteria berdasarkan *firm size* dan rasio *B/M*. Portofolio terbentuk dengan kriteria *big size* dan *high* rasio *B/M*.
4. **Portofolio Size Small Low B/M:** Portofolio dengan pengukuran kriteria berdasarkan *firm size* dan rasio *B/M*. Portofolio terbentuk dengan kriteria *small size* dan *low* rasio *B/M*.

Penelitian ini membentuk portofolio saham berdasarkan klasifikasi ukuran perusahaan dan rasio *B/M* sesuai hasil penelitian Fama dan French (2003). Nilai median keseluruhan sampel digunakan sebagai *breakpoint* untuk menetapkan perbedaan antara dua kategori. Emiten dengan kapitalisasi pasar kurang dari nilai median dianggap sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar yang kecil dan sebaliknya mereka yang lebih besar dari nilai median dianggap sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar besar (Pasaribu, 2009).

Klasifikasi saham berdasarkan rasio *B/M* juga membagi saham ke dalam dua kategori yang didasarkan nilai median keseluruhan sampel per tahun yaitu kategori *B/M* tinggi dan kategori *B/M* rendah. Sampel yang memiliki nilai *book value equity* (*BE*) negatif tidak diikutsertakan dalam perhitungan *breakpoint* untuk klasifikasi portofolio pada kedua proksi (*SMB* dan *HML*). Dengan menggunakan jenis klasifikasi portofolio tersebut, maka dimungkinkan untuk membentuk empat formasi portofolio, yaitu: *S/H* (Small Mkt cap-High *B/M*), *B/H* (Big mkt cap-High *B/M*), *S/L* (Small mkt cap-Low *B/M*) dan *B/L* (Big mkt cap-Low *B/M*).

Dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda maka data yang tersedia selanjutnya diklasifikasikan dalam bentuk tabel. Setelah hasil diketahui maka hasil tersebut dimasukan dalam persamaan regresi linier berganda, kemudian dapat diketahui hasil tersebut. Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut, (Duwi Priyatno, 2008)

$$R_{i_t} - R_{f_t} = \alpha + \beta[[R_{m_t} + R_{f_t}] + sSMB_t + hHML_t + e_t$$

Dimana:

$R_{i_t} - R_{f_t}$ = nilai rata-rata *excess return* dikurang *risk free rate* periode t

$R_{m_t} + R_{f_t}$ = *excess return* portofolio pasar untuk periode ke t

SMB_t = *return* portofolio SMB periode ke t

HML_t = *return* portofolio HML periode ke t

$b, s,$ dan h = koefisien regresi

e = error term, diasumsikan 0

Dengan menggunakan model regresi, dilakukan uji t (parsial) dan uji F (simultan) pada model Fama dan French tiga faktor dan CAPM (hanya faktor pasar yang dimasukkan sebagai variabel independen) serta perhitungan koefisien determinasi (R^2). Angka dari *R square* didapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model *summary* kolom *R square*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif *return* saham bulanan digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi sampel selama periode penelitian. Tabel 1 menggambarkan statistik deskriptif *return* saham bulanan periode 2007 – 2011.

Tabel 1
Statistik Dekskriptif
Tingkat *Return* Saham Bulanan

Emite n	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviatio n	Emite n	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviatio n
AALI	-3.87%	1.90%	0.07 %	0.81%	UNVR	-0.69%	1.13%	0.11 %	0.34%
ANT M	-3.27%	1.77%	- 0.01 %	0.84%	BBRI	-2.85%	1.57%	0.07 %	0.65%
ASII	-3.06%	1.50%	0.15 %	0.67%	BBCA	-2.32%	1.43%	0.07 %	0.56%
BUMI	-32.03%	3.26%	- 0.36 %	4.32%	BMRI	-2.76%	6.10%	0.17 %	1.02%
EXCL	-4.25%	2.06%	0.19 %	0.89%	BDM N	-3.22%	1.22%	0.00 %	0.69%
GGR M	-1.53%	2.23%	0.19 %	0.61%	BBNI	-3.35%	2.93%	0.09 %	0.82%
HMSP	-1.33%	1.49%	0.12 %	0.48%	MED C	-2.69%	1.31%	0.00 %	0.67%
INCO	-4.93%	2.14%	0.00 %	1.00%	LSIP	-2.07%	1.91%	0.10 %	0.73%
INDF	-3.04%	1.76%	0.13 %	0.71%	TINS	-4.37%	2.92%	0.10 %	0.98%
INTP	-2.90%	1.54%	0.12 %	0.66%	BNII	-1.52%	3.45%	0.12 %	0.85%
ISAT	-1.40%	1.35%	0.03 %	0.47%	PNBN	-1.81%	1.69%	0.06 %	0.62%
LPKR	-2.87%	2.17%	0.00 %	0.71%	SMCB	-3.25%	2.17%	0.13 %	0.79%
PGAS	-1.53%	14.30%	0.30 %	1.92%	KLBF	-3.22%	1.95%	0.11 %	0.71%
PTBA	-2.34%	1.77%	0.17 %	0.76%	BNGA	-1.66%	2.30%	0.08 %	0.65%
SMAR	-5.04%	3.03%	0.15 %	1.11%	BNBR	-40.82%	3.93%	- 0.72 %	5.48%
SMGR	-4.22%	1.35%	0.06 %	0.74%	BRPT	-4.76%	4.23%	0.10 %	1.27%
TLKM	-1.05%	0.85%	- 0.01 %	0.36%	BNLI	-2.70%	1.85%	0.07 %	0.65%
UNTR	-5.80%	1.60%	0.14 %	0.95%	IHSG	-1.85%	0.94%	0.07 %	0.41%

Sumber: Output SPSS (2012)

Tabel 1 menggambarkan tingkat *return* rata-rata bulanan, tingkat *return* rata-rata tertinggi dan terendah serta standar deviasi dari semua sampel penelitian. Nilai terendah - 32,03% dimiliki BUMI pada Oktober 2008 dan -40,82% untuk BNBR pada Oktober 2008.

Tahun 2008 merupakan awal terjadinya krisis ekonomi dunia dan perusahaan group Bakrie merupakan salah satu perusahaan yang mengalami kemerosotan harga saham yang tertinggi.

Rata-rata *return* saham menunjukkan *return* positif, kecuali saham TLKM (0,01%), ANTM (-0,01%), BUMI (-0,36%) dan BNRB (-0,72%). Pengembalian rata-rata tertinggi berada disaham PGAS (0,30%), EXCL dan GGRM sebesar (0,19%) dan PTBA (0,17%). Tingkat *return* saham tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertambangan (*mining*) memberikan rata-rata *return* saham yang tinggi.

Return tertinggi berasal dari saham PGAS 14,30%, BMRI 6,10% dan BRPT 4,23%. Industri pertambangan merupakan salah satu primadona selama periode amatan. Rata-rata *return* dari Indeks Harga Saham Gabungan 0,07% dengan nilai terendah -1,85% dan tertinggi 0,94% serta standar deviasi 0,41%.

Tabel 2 menyajikan hasil statistik deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rm – Rf	59	-.1126	-.0490	-.074337	.0139548
SMB	59	-.0113	.0069	.000086	.0028659
HML	59	-.0052	.0066	.000390	.0025806
B/H - Rf	59	-.1081	-.0511	-.074147	.0135691
S/H - Rf	59	-.1094	-.0491	-.073847	.0137378
B/L - Rf	59	-.1175	-.0479	-.074158	.0143491
S/L - Rf	59	-.1099	-.0509	-.074705	.0145915
Valid N (listwise)	59				

Sumber: Output SPSS (2012)

Berdasarkan Tabel 2 tingkat rata-rata *return* portofolio yang terbentuk adalah negatif. *Return* rata-rata terendah sebesar -7,47% yaitu pada portofolio dengan kriteria *small market caps – low rasio B/M*. Rata-rata *return* portofolio tertinggi -7,38% yaitu pada portofolio yang terbentuk dengan kriteria *small market caps – high rasio B/M*. Nilai terendah selama periode amatan dari portofolio *big market caps – low rasio B/M* sebesar -11,75%. Nilai tertinggi sebesar -4,79% pada portofolio *big market caps – low rasio B/M*. Portofolio pasar

mempunyai rata-rata *return* sebesar -7,43%, terendah -11,26%, tertinggi -4,90% dan standar deviasi 1,39%.

Banz (1981) dalam Pasaribu (2009) menyatakan bahwa portofolio saham dengan kriteria *small market caps* menghasilkan tingkat *return* yang lebih tinggi. Portofolio yang terbentuk berdasarkan proxy *size effect* masih negatif, bahkan portofolio S/L merupakan portofolio dengan tingkat pengembalian terendah dengan rata-rata pengembalian -7,47% yang merupakan terendah dari portofolio lain. Portofolio lain berdasarkan kriteria *size effect* yang juga memiliki rata-rata *return* yang masih negatif, yaitu portofolio S/H sebesar -7,38%. Penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan Fama dan French (1996) dalam Pasaribu (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kriteria kapitalisasi pasar yang rendah dan rasio B/M yang tinggi memiliki probabilitas *distress* yang tinggi. Oleh karena itu, investor mengisyaratkan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun, pengembalian dari portofolio tersebut masih negatif dengan rata-rata -7,38%.

Tabel 3
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)

	Dependen	Independen	R^2	adj. R^2
Model 1:	B/H-Rf	Mkt	0.957	0.956
	S/H-Rf		0.976	0.976
	B/L-Rf		0.966	0.965
	S/L-Rf		0.964	0.963
MODEL 2	B/H-Rf	Mkt	0.979	0.978
	S/H-Rf	SMB	0.987	0.987
	B/L-Rf	HML	0.984	0.983
	S/L-Rf		0.985	0.984

Sumber: Output SPSS (2012)

Adjusted R² memperlihatkan bahwa Tiga Faktor Fama dan French yang diwakili oleh *Small Minus Big* dan *High Minus Low* lebih dapat menjelaskan *return* yang diharapkan. Portofolio dengan kriteria *Big Caps – High* rasio B/M pada model 1 menjelaskan bahwa

proxy *market risk* hanya menjelaskan sebesar 95,6% dari risiko yang ada. Model 2 dengan penambahan dua faktor lain yaitu proxy *size effect* dan rasio B/M pada portofolio *Big Caps – High* rasio B/M lebih dapat menjelaskan risiko yang ada yaitu sebesar 97,8% sedangkan portofolio dengan kriteria *Small Caps – High* rasio B/M pada model CAPM, nilai $adj.R^2$ lebih rendah jika dibandingkan dengan model Tiga Faktor Fama dan French. Nilai $adj.R^2$ pada model 1 sebesar 97,6% lebih rendah jika dibandingkan dengan Tiga Faktor Fama dan French sebesar 98,7%. Tiga faktor tersebut menjelaskan 98,7% variabel dependennya yang jika dibandingkan hanya dengan variabel *market risk* yang hanya sebesar 97,6% menjelaskan variabel dependeny. Portofolio *Big Caps – Low* rasio B/M dan *Small Caps – Low* rasio B/M untuk masing-masing model nilai $adjusted R^2$ yaitu sebesar 96,5% dan 96,3% untuk model CAPM dan 98,3% dan 98,4% untuk Fama dan French.

Nilai korelasi simultan (R) memiliki nilai pada kisaran 0,957 – 0,987. Nilai $adjusted R^2$ memiliki pengaruh yang kuat antara variabel terikat dan variabel bebas dengan kisaran 0,956 – 0,987. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil ini adalah secara rata-rata nilai $adjusted R^2$ diperoleh nilai 0,983 atau 98,3% yang artinya bahwa *excess return* portofolio dipengaruhi oleh *market risk*, *firm size* dan *book to market equity* sedangkan 1,7% *excess return* portofolio dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model ini.

Hasil ini mendukung penelitian Homsud, Wasunsakul, Phuangnark dan Joongpong (2009), Pasaribu (2009), Bundoo (2006), Charitou dan Constantinidis (2004) dan Rogers dan Securato (2007) bahwa Tiga Faktor Fama dan French lebih dapat menjelaskan *excess return*.

Tabel 4
Uji F Statistik

Portofolio	F	Sig. F
B/H-Rf	850.692	0.0000
S/H-Rf	1415.070	0.0000
B/L-Rf	1153.207	0.0000
S/L-Rf	1220.951	0.0000

Sumber: Output SPSS (2012)

Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh bukti bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal tersebut dibuktikan dari nilai probabilitas untuk setiap variabel pada setiap portofolio sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *return* atau dapat dikatakan bahwa variabel dependen yang meliputi *market risk*, *size effect (SMB)* dan rasio B/M (*HML*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *return* portofolio B/H, S/H, B/L dan S/L. Oleh karena itu, penelitian ini menerima hipotesis H_{04} yaitu *SMB*, *HML* dan *market risk* mempengaruhi tingkat *return* portofolio saham *Big/High*, *Small/High*, *Big/Low* dan *Small/Low*.

Tabel 5
Uji t Statistik

	Dependen	Independen	A	β_1	β_2	β_3	sig t- β_1	sig t- β_2	sig t- β_3
Model 1:	B/H-Rf	Mkt	-0.003	0.951			0.000		
	S/H-Rf		-0.002	0.973			0.000		
	B/L-Rf		0.001	1.011			0.000		
	S/L-Rf		0.002	1.027			0.000		
MODEL 2	B/H-Rf	Mkt	0.000	1.003	0.752	1.051	0.000	0.000	0.000
	S/H-Rf	SMB	0.092	0.987	0.314	0.282	0.000	0.002	0.014
	B/L-Rf	HML	0.000	0.989	0.390	-0.416	0.000	0.001	0.002
	S/L-Rf		-0.001	0.994	0.982	-0.672	0.000	0.000	0.000

Sumber: Output SPSS (2012)

Tabel 5 memperlihatkan hasil persamaan regresi linier berganda tersebut. Nilai konstanta untuk sebesar -0,003 dan -0,002 mengindikasikan bahwa *excess return* portofolio B/H dan S/H mempunyai nilai sebesar -0,003 dan -0,002 dengan tidak dipengaruhi oleh variabel independen yaitu *market risk*. Hal tersebut artinya jika tidak terjadi perubahan terhadap variabel *market risk* untuk model CAPM maka mengalami kerugian sebesar nilai konstantanya.

Model 2 yaitu model Fama dan French (1996) pada portofolio B/H dan B/L mendapatkan nilai konstanta sebesar 0,000, yang artinya jika faktor *market risk*, *SMB* dan *HML* tidak mengalami perubahan maka tingkat pengembalian dari portofolio saham B/H dan B/L tetap sebesar 0,000. Portofolio S/H memiliki nilai konstanta sebesar 0,092 yang artinya jika variabel *risk market*, *SMB* dan *HML* tidak mengalami perubahan maka pengembalian portofolio akan tetap sebesar 0,092.

Berdasarkan Tabel 5 di atas diperoleh bukti empiris bahwa secara umum ketiga variabel yaitu *market risk*, *SMB* dan *HML* secara sendiri-sendiri dapat untuk menjelaskan dari naik atau turunnya tingkat pengembalian portofolio B/H, S/H, B/L dan S/L. Hasil tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi dimana pada tingkat $\alpha=0,05$ semua variabel independen yaitu *market risk*, *SMB* dan *HML* pada kisaran 0.000 sampai dengan 0,014. Dengan kata lain, variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *return* portofolio.

Tabel 6
Uji t Statistik SMB dan HML

	Dependen	Independen	A	β_1	β_2	β_3	sig t- β_1	sig t- β_2	sig t- β_3
Model 1:	B/H-Rf	Mkt	-0.003	0.951	-0.154		0.000	0.240	
	S/H-Rf	SMB	-0.002	0.973	0.474		0.000	0.000	
	B/L-Rf		0.001	1.011	-0.626		0.000	0.000	
	S/L-Rf		0.002	1.027	0.6		0.000	0.000	
MODEL 2	B/H-Rf	Mkt	-0.002	0.975		0.484	0.000		0.001
	S/H-Rf	HML	0.000	0.998		0.519	0.000		0.000
	B/L-Rf		-0.001	0.975		-0.71	0.000		0.000
	S/L-Rf		0.002	1.030		0.07	0.000		0.642

Sumber : Output SPSS (2012)

Tabel 6 memperlihatkan bahwa faktor *SMB* dan *HML* pada tingkat signifikan sebesar $\alpha = 0,05$ tidak signifikan pada portofolio B/H untuk *SMB* dan portofolio S/L untuk *HML* karena nilai signifikan untuk masing-masing variabel tersebut sebesar 0,240 dan 0,642. Variabel *SMB* tidak dapat menjelaskan tingkat pengembalian saham pada portofolio B/H

sedangkan variabel HML tidak dapat menjelaskan tingkat pengembalian saham pada portofolio S/L. Penelitian ini mendapatkan bahwa faktor risiko pasar memiliki kekuatan untuk menjelaskan tingkat pengembalian pada setiap portofolio B/H, S/H, B/L dan S/L.

Tabel 7
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2) SMB dan HML

	Dependen	Independen	R^2	adj. R^2
Model 1:	B/H-Rf	Mkt	0.979	0.958
	S/H-Rf	SMB	0.986	0.985
	B/L-Rf		0.981	0.981
	S/L-Rf		0.978	0.977
MODEL 2	B/H-Rf	Mkt	0.965	0.963
	S/H-Rf	HML	0.985	0.984
	B/L-Rf		0.981	0.980
	S/L-Rf		0.964	0.963

Sumber: Output SPSS (2012)

Tabel 7 menyajikan nilai koefisien determinasi R^2 . Nilai R^2 meningkat pada setiap portofolio dengan menambahkan faktor SMB. Hasil ini tidak mendukung penelitian Pasaribu (2009) dan Fama dan French (1992) yang mendapatkan bahwa rasio B/M (HML) lebih kuat jika dibandingkan dengan ukuran perusahaan (SMB) dalam menjelaskan tingkat pengembalian portofolio pasar. Hal tersebut dilihat dari nilai R^2 dengan penambahan proxy SMB yaitu sebesar 0,979; 0,986; 0,981 dan 0,978 untuk portofolio B/H, S/H, B/L dan S/L. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Charitou dan Constantinidis (2004) yang mengatakan bahwa penambahan faktor HML akan meningkatkan koefisien determinasi portofolio berkapitalisasi besar karena pada portofolio B/H dengan menambahkan variabel SMB koefisien determinasi meningkat menjadi 0,979 lebih besar jika dibandingkan dengan menambahkan variabel HML sebesar 0,965.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah Tiga Faktor Fama dan French lebih dapat menjelaskan tingkat pengembalian pasar dibandingkan dengan model *Capital Asset Pricing Model*. Penelitian ini juga memperlihatkan pengaruh *firm size* dan rasio B/M sebagai proxy untuk tingkat risiko pada model Tiga Faktor Fama dan French pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007 – 2011 menunjukkan bahwa dengan melihat nilai *adj R²* didapat bahwa *Three Factor Fama and French* dan *Capital Asset Pricing Model* dapat menjelaskan tingkat *return* yang diharapkan. Selain itu model *Three Factor Fama and French* lebih baik dalam menjelaskan tingkat *return* saham yang diharapkan.

Model *Three Factor Fama and French* dapat diimplementasikan pada Bursa Efek Indonesia maka model tersebut dapat diimplikasikan oleh pihak-pihak 1) Model *Three Factor Fama and French* sebagai model dalam pengukuran *return* dan penyusunan portofolio saham oleh investor individual dan manajer investasi. 2) Proxy HML dan SMB dapat dijadikan pertimbangan dalam perhitungan risiko, *return* dan pemilihan saham oleh investor individual dan manajer investasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu periode penelitian lima tahun (2007 – 2011) perlu dibandingkan dengan periode waktu yang lebih panjang. Sampel penelitian perlu dibandingkan dengan sampel yang lebih banyak. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 1) Menambahkan periode penelitian yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang dapat mendukung penelitian ini. 2) Menambahkan sampel penelitian yang lebih banyak agar dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 3) Menambahkan variabel PER, P/B, *Price to Growth*, dan leverage untuk menjadikan pembanding dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Banz, Rolf W. 1981. *The Relationship Between Return and Market Value of Common Stock*. *Journal of Financial Economics*. Vol. 9, pp. 3-18.
- Barber, Bard M dan John D. Lyon. 1997. *Firm Size, Book-to-Market Ratio and Security Returns: A Holdout Sampel of Financial Firms*. *The Journal of Finance*, Vol. 52, No. 2: 875-883.
- Basu, S. 1977. *Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price Earning Ratio: A Test of the Efficient Market Hypothesis*. *Journal of Finance*, 12: 129-156.
- _____. 1983. *The Relationship between Earnings Yield, Market Value, and Return for NYSE Common Stock: Further Evidence*. *Journal of Finance Economics* 12, 129-156.
- Bhatnagar, Chandra Shekhar and Riad Ramlogan. *The Capital Asset Pricing Model Versus The Three Factor Model: A United Kingdom Perspective*.
- Black, Fischer. 1972. *Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing*. *The Journal of Business*, Vol. 45, No.3: 444-455.
- Bodie, Kane, and Marcus. 1996. *Investment: Third Edition*. USA: McGraw-Hill
- Bollerslev, Tim, Robert F. Engle, Jeffrey M. Wooldrige. 1988. *A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances*. *The Journal of Political Economy*, Vol. 96, No. 1: 116-131.
- Bundoo, Sunil K. 2006. *An Augmented Fama and French Three Factor Model: New Evidence From An Emerging Stock Market*. *Department of Economics & Statistics, University of Mauritius*. Reudit, Mauritius.
- Chariou, Andreas and Eleni Constantinidis. 2004. *Size and Book-to-Market Factors in Earning and Stock Returns*. University of Cyprus.
- Chou, Pin Huang, Robin K. Chou and Jane Sue Wang. 2004. *On the Cross-Section of Expected Stock Returns: Fama-French Ten Years Later*. *Finance Letters*. Vol. 2: 18-22.
- Chung, Y. Peter, et.al. 2004. *Asset Pricing When Returns Are Nonnormal: Fama French Factors vs. Higher Order Systematic Co-Moments*. *Journal of Business*.
- Eltonm Edwin J., and Martin J Gruber. 1991. *Modern Portofolio Theory and Investment Analysis*. USA: John Wiley & Son.
- Fama, Eugene F. 1997. *Market Efficiency, Long Term Returns, and Behavioral Finance*. *Journal of Financial Economics* 49: 283-306.
- Fama, Eugene F and Kenneth R. French. 1992. *Common Risk Factors in the Return on Stock and Bonds*. *Journal of Finance Economics* 33, page. 3-56.
- _____. 2004. *The Capital Asset Pricing Model : Theory and Evidence*. *Journal of Economic Perspective*, Vol. 18, No. 3: 25-46.
- _____. 1988. *Permanent and Temporary Components of Stock Prices*. *The Journal of Political Economy*, Vol. 99, No. 2: 246-273.
- _____. 1988. *Dividend Yields and Expected Stock Return*. *Journal of Financial Economisc*, Vol. 22: 3-25
- _____. *Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies*. *Journal of Finance*, Vol. 51, Issue 1 : 55-84.
- Griffin, John M and Michael L. Lemmon. 2002. *Book-tomarket Equity, Distress Risk, and Stock Returns*. *The Journal of Finance*, October: 2317-2336.
- Hardianto, Damar dan Suherman. 2009. *Pengujian Fama-French Three Factor Model Di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 13, No. 2, Mei: 198-208.
- Homsud, Nopphanon, et.al. 2009. *A Study of Fama and French Three Factors Model and Capital Asset Pricing Model in The Stock Exchange of Thailand*. *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 25: 31-40
- Indraseno, Jimmy. 2006. *Validasi Penggunaan Fama and French Three Factor Model pada Bursa Efek Jakarta*. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 3, No. 3, Desember: 219-224.
- Jogiyanto, 2008. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Krause, Andreas. 2001. *An Overview of Asset Pricing Models*. University of Bath: UK.
- Markowitz, Harry. 1952. *Portofolio Selection*. *The Journal of Finance*, Vol.7, No.1: 77-91.
- McElroy, Marjorie B and Edwin Burneister. 1988. *Arbitrage Pricing Theory as a Restricted Nonlinear Multivariate Regression Model*. *Journal of Business & Economic Statistics*, Vol. 6, No. 1: 29-42
- Merton, Robert C. 1973. *An Intertemporal Capital Asset Pricing Model*. *Econometrica*, Vol. 41, No. 5: 867-887.
- Michailidis, Grigoris, et.al. 2006. *Testing the Capital Asset Pricing Model (CAPM): The Case of the Emerging Greek Securities Market*. *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 4: 78-91.
- Pasaribu, Rowland B.F.P. 2009. *Model Fama dan French Sebagai Pembentukan Portofolio Saham di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 9, No.1: 1-12.
- _____. 2010. *Pemeilihan Model Asset Pricing*. *Jurnal Akuntansi dan & Manajemen*, Vol. 21, No. 3: 217-230.
- Ross, Stephen. 1976. *The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing*. *Journal of Economic Theory* 13, 341-360.

- Saputra, Dede Irawan dan Umi Murtini. 2008. *Perbandingan Fama and French Three Factor Model dengan Capital Asset Pricing Model*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 2: Hal. 132-145.
- Sharpe, William F. 1964. *Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk*. *The Journal of Finance*, Vol. 19, No. 3: 425-442.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tsuji, Chikashi. 2010. *In Search of the Economic Meaning and Role of the Fama-French Factors in Japan: Implications for Investment Managemen*. *The Open Management Journal*, 3: 1-15.
- Yuningshi, Isna dan Rizky Yudaruddin. 2007. *Pengaruh Model Tiga Faktor terhadap Return Saham*. Jurnal Akuntabilitas. Vol. 7, No. 1, September: 79-84.
- <http://finance.yahoo.com/> [diakses tanggal 15 Juli 2012]

**Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap
Kinerja Perusahaan dengan Mempertimbangkan
Strategi Bisnis sebagai Variabel Pemoderasi
(Studi pada Industri Manufaktur Perusahaan Publik
di Bursa Efek Indonesia)**

SABAR WARSINI
Politeknik Negeri Jakarta

HILDA ROSSIETA
Universitas Indonesia

Abstract: *This study investigates the influence of family ownership on firm performance by considering the business strategy implemented by the company. Three research questions that seek to answer in this study were: first, how the effect of family ownership on firm performance, secondly, is there a tendency of family firms to implement specific business strategies, and the third is question whether the company's business strategy applied moderates the influence of family ownership on firm performance . This study used a sample of manufacturing companies listed on Indonesia stock exchanges which has family ownership of at least 20%. By using a model of multiple regression equation, it is found out that family ownership has a significant positive effect on firm performance and business strategy did not significantly moderate the relationship. Then using the binomial test it is revealed that 67% of the sample firms tend to have the innovation strategy and 33% tend to be on the low cost strategy, and this difference proved statistically significant, but with compare-mean test it is found that the average performance of the company does not differ significantly in both strategies. This study has contributed to the development of business strategy and performance literature of family firms.*

Keywords: *business strategy, corporate performance, family ownership, manufacturing companies*

¹ Corresponding author: sabarwarsini@yahoo.com

1. Pendahuluan

Seperti halnya negara pada *emerging market* lainnya, struktur kepemilikan saham perusahaan publik di Indonesia adalah kepemilikan terkonsentrasi dengan pemegang saham terbesar ada pada kepemilikan keluarga (Claessens et al., 2000; Siregar, 2006; Anggraini et al., 2010). Pada umumnya perusahaan dimana keluarga sebagai pemegang saham pengendali akan mengangkat/memilih anggota keluarga untuk duduk dalam jajaran manajemen/dewan direksi atau bahkan sebagai anggota dewan komisaris. Data *Asian Development Bank* (2000) menunjukkan bahwa 85 % dari perusahaan *public* yang dikendalikan oleh kepemilikan keluarga di Indonesia menempatkan anggota keluarga sebagai anggota dari dewan direksi dan dewan komisaris. Fenomena ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah kebijakan dan strategi bisnis yang dijalankan oleh manajemen benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atautkah hanya memihak kepada kepentingan kelompok mayoritas yakni kepentingan keluarga.

Studi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan tetapi belum diperoleh hasil yang konklusif. Sebagian penelitian menemukan hasil bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga akan menimbulkan adanya keselarasan kepentingan (*alignment*) antara manajemen, pemilik dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, sehingga kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Anderson dan Reeb, 2003; Ali et al., 2007; Silva dan Majluf, 2008; Heng, 2009; Vilalonga dan Amit, 2011; Chu, 2009; 2011; Shyu, 2011).

Akan tetapi penelitian yang lain menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga menimbulkan adanya dampak *entrenchment*. Manajemen yang biasanya juga anggota keluarga atau pihak yang terafiliasi cenderung memilih kebijakan dan menjalankan strategi yang menguntungkan bagi kepentingan pengendali, sehingga mengabaikan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh

negatif terhadap kinerja perusahaan, (Morch dan Yeung, 2004; Teguh, 2005; Martinez et al., 2008; King dan Santor, 2008; Atmaja et al., 2009; Braun dan Uhlaner, 2012).

Adanya dualisme hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang belum diperhitungkan dalam penelitian seperti strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam literatur *family business*, Moores, (2009) menyatakan bahwa jika kepemilikan saham perusahaan terkonsentrasi khususnya pada kepemilikan keluarga maka pengaruh dinamika keluarga terhadap kebijakan perusahaan sangat besar. Perusahaan keluarga tidak sekedar memenuhi tujuan keuangan tetapi lebih berorientasi pada reputasi dan keberlangsungan jangka panjang, sehingga strategi bisnis perusahaan keluarga berbeda dengan strategi bisnis perusahaan non keluarga (Astrachan, 2010).

Lindow et al. (2010) menemukan bahwa karena pengaruh keluarga maka terjadi keragaman strategi bisnis yang dijalankan diantara perusahaan keluarga. Dan ketepatan strategi bisnis yang dijalankan akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan (Lena, 2007).

Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Tiga pertanyaan penelitian yang diangkat sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni: (1). Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan publik di Indonesia?, (2). Apakah terjadi keberagaman strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan publik di Indonesia yang kepemilikannya didominasi kepemilikan keluarga?, dan (3). Apakah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan ditentukan (dimoderasi) oleh strategi bisnis yang dijalankan perusahaan ?

Dengan menggunakan sampel perusahaan publik kelompok industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris guna menjawab ketiga pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan tersebut diatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan literature peran strategi bisnis dalam mencapai kinerja pada perusahaan publik yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Keluarga dan Kinerja Perusahaan

Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan telah lama menjadi kontroversi. Sebagian penelitian menemukan hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, sebagian penelitian lainnya menemukan bukti adanya pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan (Silva dan Majluf, 2008).

Chu (2009) mengemukakan ada dua kategori penelitian yang mengemukakan hasil pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan yakni : kategori pertama, penelitian yang menekankan pada masalah keagenan yang timbul sebagai konsekuensi adanya kepemilikan terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga. Sebagai pengendali, kepemilikan keluarga dapat mengarahkan manajemen untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan baginya dan sering terjadi ekspropriasi terhadap pemegang saham non pengendali (Claessens dan Fan, 2002; Morch dan Yeung, 2004; Du dan Dai, 2005; Atmaja et al., 2009). Kategori kedua, menekankan adanya '*institutional overlap*' pada perusahaan keluarga. Perusahaan sebagai institusi bisnis tetapi juga institusi keluarga menyebabkan adanya dilema. Pemilik perusahaan yang juga manajer perusahaan sering mendahulukan tujuan keluarga sebelum tujuan bisnis atau tujuan ekonomis (Martinez et al., 2008; King dan Santor, 2008).

Pendekatan yang lebih moderat menyatakan bahwa perusahaan keluarga mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan perusahaan non-keluarga dan memungkinkan untuk menciptakan nilai perusahaan. Chu (2009) mengelaborasi adanya lima keunggulan *competitive* perusahaan keluarga yaitu: 1). adanya kombinasi kepemilikan dan kontrol, 2). berkurangnya kesenjangan informasi, 3). keberadaan pemegang saham keluarga yang berkesinambungan, 4). perusahaan keluarga sebagai sumber utama *entrepreneurship* dan inovasi dan ke 5). efisiensi investasi, sehingga pendekatan ini mengemukakan adanya pengaruh positif dari kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan.

Chu (2011) melakukan pengujian pengaruh kepemilikan keluarga terhadap 786 perusahaan publik keluarga di Taiwan selama kurun 2002-2007 menemukan bukti bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan pengaruh positif lebih kuat pada perusahaan yang melibatkan keluarga sebagai CEO. Vilalonga dan Amit (2011) dengan menggunakan data Fortune 500 juga menemukan hasil yang sejalan dengan Chu (2011).

Anderson dan Reeb (2003) menemukan bahwa keluarga menginvestasikan sebagian besar kekayaannya pada perusahaan, jika nilai perusahaan turun maka kepemilikan keluarga yang paling besar menanggung kerugian, sebaliknya jika nilai perusahaan meningkat maka pemilik keluargalah yang paling besar keuntungannya. Oleh karena itu kepemilikan keluarga mempunyai insentif yang kuat untuk mengawasi dan mendorong manajemen untuk bekerja memaksimalkan nilai perusahaan.

Dengan menggunakan data perusahaan publik di US, Ali et al. (2007) menemukan bahwa perusahaan keluarga mempunyai kualitas laba yang lebih baik, lebih terbuka terhadap berita-berita buruk, lebih banyak menyampaikan disclosure dan lebih banyak diikuti oleh analis sehingga mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan non-keluarga.

keberadaan pemegang saham keluarga yang berkesinambungan juga menciptakan potensi keunggulan.

Dari perspektif *resource-based*, Poza (2007) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga yang berkesinambungan merepresentasikan sumber daya *intangible* dan spesifik yang dapat membangun hubungan jangka panjang dengan *stakeholders* seperti pembeli, pekerja, pemasok, bank serta pihak-pihak lain yang terkait secara transaksional, sehingga tercipta saling kepercayaan diantara perusahaan dengan *stakeholders*, maka akan memperoleh keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Astrachan (2010) sejalan dengan Poza (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga merupakan sumber utama dari *entrepreneurship* dan inovasi, manajer yang juga pemilik atau keluarga pemilik diekspektasikan dapat mendukung inovasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Penelitian di *emerging market* diperoleh hasil yang beragam. Arifin (2003) menguji masalah keagenan pada perusahaan publik di Indonesia menemukan bahwa pada perusahaan publik yang dikendalikan oleh keluarga mempunyai masalah keagenan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang dikendalikan oleh negara atau institusi keuangan. Siregar dan Utama (2008) menemukan bahwa perusahaan publik dengan kepemilikan keluarga yang tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih banyak melakukan manajemen laba yang bersifat efisien. Kedua penelitian tersebut konsisten dengan pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan.

Shyu (2011) menggunakan sampel perusahaan publik kategori menengah di Taiwan menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan nilai Tobin's Q dan ROA. Akan tetapi pengaruh positif menurun ketika kepemilikan keluarga menjadi sangat besar yakni diatas 50%. Selanjutnya Chung dan Chan (2012) menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan publik di

Taiwan, dan menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, pengaruh positif ini lebih kuat pada perusahaan yang dipimpin oleh keluarga pendiri perusahaan.

Berkebalikan dengan hasil kedua penelitian diatas adalah Bae et al. (2012) yang menguji kinerja perusahaan publik di Asia pada periode krisis keuangan tahun 1997-1998 menemukan bukti bahwa perusahaan publik dengan kepemilikan terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga terbukti melakukan ekspropriasi terhadap minoritas sehingga mengalami penurunan harga saham yang lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya. Penelitian lainya tidak dapat membuktikan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan seperti yang ditemukan oleh Chen dan Ho (2000) untuk perusahaan publi di singapura, begitu juga Chang dan Shin (2007) untuk perusahaan publik di Korea.

Mengacu pada pandangan yang lebih moderat dan hasil penelitian di Indonesia maka hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan*

Strategi Bisnis dan Kepemilikan Keluarga

Triton (2010) menyatakan, strategi adalah arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus dengan pasarnya, dengan pelanggan dan kliennya untuk memenuhi harapan *stakeholders*. Sedangkan strategi bisnis dimaknai sebagai cara yang digunakan oleh perusahaan untuk bersaing meliputi pencapaian, prestasi dan pemeliharaan keuntungan kompetitif dalam industrinya (Haryadi, 2008).

Porter (1985) berpendapat bahwa dalam rangka mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar, setiap organisasi harus memilih tiga strategi generic yaitu: (1). *Cost leadership*, dimana organisasi melakukan strategi biaya murah untuk mendapatkan keuntungan

kompetitif dan memperluas pangsa pasar, (2). *Differentiation*, yaitu organisasi mengedepankan pemberian benefit kepada pelanggannya dengan cara menawarkan identitas yang berbeda seperti kualitas yang superior, fitur yang inovatif sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen dan memungkinkan organisasi memberi harga premium pada konsumennya, (3). *Focus*, yaitu strategi yang fokus berkonsentrasi untuk menawarkan satu jenis produk atau melayani satu segmen pasar dalam rangka mencapai dominasi pada pangsa pasar tertentu.

Lindow et al. (2010) berpendapat bahwa strategi perusahaan yang berbeda muncul dari cara perusahaan untuk mengatasi tiga masalah yaitu: masalah *entrepreneurship*, operasional dan administratif. Lindow et al. (2010) mengutip dari Miles dan Snow (1978) yang mengemukakan adanya empat jenis strategi yakni: (1). *Prospector*, memprioritaskan pengembangan produk baru dan mengembangkan pelayanan inovasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan baru serta menciptakan pelanggan baru, (2). *Defender*, berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar yang stabil sehingga solusinya adalah *cost leadership* dan spesialisasi pada bidang tertentu, (3). *Analyzer*, merupakan perpaduan antara *prospector* dan *defender* sehingga berusaha untuk bagaimana mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada tetapi juga memanfaatkan peluang pasar dan produk baru, (4). *Reactor*, dimana organisasi tidak memiliki strategi, desain atau struktur yang sistematis, sehingga tidak membuat rencana jangka panjang karena menganggap perubahan lingkungan yang terlalu cepat.

Apakah perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga memilih strategi tertentu? Lindow et al. (2010) menemukan bukti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara strategi yang diterapkan oleh perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga. Pada perusahaan keluarga dimana pada umumnya merupakan kepemilikan yang terkonsentrasi, pengaruh keluarga sangat kuat, maka perusahaan keluarga mempunyai

karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya (Moore, 2009), menerapkan strategi yang berbeda dengan perusahaan non keluarga (Kotey, 2005).

Astrachan (2010) juga menyatakan pada perusahaan keluarga, keluarga merupakan kelompok tertentu yang terikat oleh pertalian kekerabatan, norma dan azas mengutamakan orang lain (*altruism*). Hubungan seperti ini tidak bersifat *financial, transactional* atau *market-based* tetapi lebih bersifat *relationship* dan *systemic*, sehingga keluarga dan dinamika keluarga lebih berpengaruh pada penerapan strategi dibandingkan pengaruh individual. Pada akhirnya Astrachan (2010) menyimpulkan bahwa perusahaan keluarga perlu diperlakukan sebagai objek yang unik karena benar-benar ada saling ketergantungan antara perusahaan dan keluarga. Secara lebih khusus, keunikan karakter perusahaan keluarga berasal dari pola kepemilikan, tata kelola perusahaan (*governance*) dan suksesi seperti halnya pada tujuan dan kultur keluarga yang telah diidentifikasi sebagai pengaruh keluarga yang dapat menentukan pilihan strategi dan proses penerapan pada perusahaan keluarga.

Studi empiris mengenai strategi bisnis pada perusahaan keluarga tidak memperoleh hasil yang konklusif. Salim (2007) mengidentifikasi orientasi strategi bisnis pada perusahaan keluarga. Dengan menggunakan sampel perusahaan di Prancis, Salim (2007) menemukan bahwa strategi perusahaan keluarga terkonsentrasi pada strategi *defender* sebanyak 42% dan terkonsentrasi pada strategi *prospector* sebanyak 40%, akan tetapi mereka juga tidak dapat membuktikan perbedaan tersebut secara signifikan. Begitu juga Lindow et al. (2010) mengidentifikasi penerapan strategi *defender* pada perusahaan keluarga tetapi tidak menemukan bukti adanya perbedaan yang signifikan antara jenis strategi pada perusahaan keluarga dengan jenis strategi pada perusahaan non-keluarga.

Breton dan Miller (2008) melakukan identifikasi strategi bisnis pada perusahaan keluarga di frontier market, dan menemukan bukti bahwa perusahaan keluarga lebih suka melakukan diversifikasi usaha dan diversifikasi lebih kuat pada perusahaan keluarga yang

dipimpin oleh generasi kedua. Hasil penelitian Breton dan Miller (2008) ini sejalan dengan temuan Haque dan Hassan (2001) pada perusahaan keluarga di Bangladesh.

Jika dilihat dari perspektif *resource-based* perusahaan keluarga adalah sumber utama adanya *entrepreneurship* dan inovasi maka seharusnya perusahaan keluarga lebih melakukan diversifikasi. Ducassy dan Prevot (2010) dengan menggunakan kontek perusahaan keluarga di Prancis menemukan bahwa perusahaan keluarga lebih banyak melakukan diversifikasi produk dibandingkan perusahaan non-keluarga, akan tetapi level diversifikasi sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Karena keunikan dan kekhususan karakteristik perusahaan keluarga dan kuatnya pengaruh keluarga dalam menentukan strategi bisnis ini, maka tidak dapat disimpulkan jenis strategi bisnis tertentu yang sesuai dengan kepemilikan keluarga. Strategi bisnis pada perusahaan keluarga bersifat dikotomi (Ibrahim et al., 2008). Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : *Tidak ada kecenderungan untuk menerapkan strategi bisnis tertentu pada perusahaan publik yang kepemilikannya terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga .*

Strategi Bisnis, Kepemilikan Keluarga dan Kinerja Perusahaan

Berdasarkan literature pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan diperoleh hasil yang tidak konklusif (Silva dan Majluf, 2008). Sebagian penelitian menemukan hasil pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan (Anderson dan Reeb, 2003; Ali et al., 2007; Silva dan Majluf, 2008; Chu, 2009; 2011; Vilalongo dan Amit, 2011; Shyu, 2011; Chung dan Chan, 2012). Dan sebagian lainnya menemukan hasil pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan (Morch dan Yeung, 2004; Teguh, 2005; Martinez et al., 2008; King dan Santor, 2008; Atmaja et al., 2009; Braun dan Uhlaner, 2012).

Penelitian strategi bisnis pada perusahaan keluarga juga diperoleh hasil yang tidak konklusif disebabkan karena keunikan dari perusahaan keluarga (Astrachan, 2010). Sebagian penelitian menemukan bahwa perusahaan keluarga lebih memilih strategi *defender* dan yang lainnya lebih memilih strategi *prospector*. Dan ketepatan strategi yang dipilih dan dijalankan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan (Lena, 2007) .

Heng (2009) melakukan pengujian pada perusahaan publik di Canada, menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga akan mengurangi adanya masalah agensi antara pemilik dengan manajemen sehingga dapat menciptakan nilai perusahaan. Heng (2009) juga menemukan bahwa penciptaan nilai semakin besar pada perusahaan dengan tata kelola yang baik dan strategi yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Lamin (2007) mengeksplorasi strategi bisnis pada perusahaan afiliasi yang dikendalikan oleh keluarga di India dan menemukan bukti bahwa perusahaan yang terafiliasi berdasarkan sumber daya cenderung melakukan diversifikasi bisnis secara luas. Lamin (2007) juga melakukan pengujian apakah strategi bisnis perusahaan memoderasi pengaruh afiliasi bisnis berdasarkan sumber daya terhadap kinerja perusahaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa strategi bisnis menentukan pengaruh afiliasi bisnis berdasarkan sumber daya terhadap kinerja perusahaan.

Ketepatan memilih strategi akan meningkatkan kinerja pada perusahaan keluarga dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : *Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan dipengaruhi (dimoderasi) oleh strategi bisnis yang diterapkan.*

3. Metodologi Penelitian

Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik industri manufacture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2011. Jumlah perusahaan publik industri manufaktur berdasarkan data IDX Factbook 2011 sebanyak 131 perusahaan. Kemudian dikeluarkan 14 perusahaan karena tidak mempunyai laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap untuk tahun 2009-2011, sehingga diperoleh 117 perusahaan. Dari jumlah ini dikeluarkan perusahaan yang mempunyai kepemilikan keluarga kurang dari 20% dan data pencilan sehingga sampel akhir diperoleh sebanyak 81 perusahaan. Dengan menggunakan unit analisis tahun 2010 dan 2011 diperoleh 162 tahun perusahaan. Data laporan keuangan dan laporan tahunan diperoleh dari *Thompson Reuters Knowledge* dan Biro Risti Bapepam-LK.

Model Pengujian Hipotesis

- a. Model persamaan regresi berganda (1) berikut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini.

$$\text{PERFOM}_{jt} = \beta_0 + \beta_1\text{FAM}_{jt} + \beta_2\text{SIZE}_{jt} + \beta_3\text{LEV}_{jt} + \beta_4\text{GROWTH}_{jt} + \varepsilon_{jt} \quad \dots\dots\dots (1)$$

Dihipotesakan nilai koefisien β_1 bernilai positif dan signifikan secara statistik

- b. Uji Binomial digunakan membuktikan hipotesis kedua

Menurut Walpole (1993; p.259) , Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis tentang proporsi suatu populasi/sampel. Dalam penelitian ini uji binomial digunakan untuk mengetahui apakah ada kecenderungan atau preferensi perusahaan publik yang mempunyai kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga untuk menerapkan strategi bisnis tertentu.

- c. Model persamaan regresi berganda (2) berikut digunakan untuk menguji hipotesis ketiga dalam penelitian ini.

$$\text{PERFOM}_{jt} = \lambda_0 + \lambda_1 \text{FAM}_{jt} + \lambda_2 \text{dSTRA}_{jt} + \lambda_3 \text{FAM} * \text{dSTRA}_{jt} + \lambda_4 \text{SIZE}_{jt} + \lambda_5 \text{LEV}_{jt} + \lambda_6 \text{GROWTH}_{jt} + \varepsilon_{jt} \quad \dots\dots\dots(2)$$

Dihipotesakan nilai λ_3 positif dan signifikan secara statistik

Keterangan untuk model (1) dan (2)

PERFOM _{jt}	:	Kinerja perusahaan j periode t
FAM _{jt}	:	Kepemilikan keluarga perusahaan j periode t,
dSTRA _{jt}	:	Strategi perusahaan j periode t, merupakan variabel dummy = 1 jika strategi diferensiasi, = 0 jika <i>low cost</i> .
FAM _{jt} * dSTRA _{jt}	:	Interaksi antara nilai FAM _{jt} dengan dSTRA _{jt}
SIZE _{jt}	:	Ukuran perusahaan j periode t yang dihitung dengan logaritma normal dari total asset perusahaan j periode t
LEV _{jt}	:	Leverage perusahaan j periode t
GROWTH _{jt}	:	Pertumbuhan perusahaan j periode t
ε _{jt}	:	Error perusahaan j periode t

Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Kinerja perusahaan (PERFOM) merupakan variabel dependen. Dalam penelitian ini ROE dan ROA digunakan sebagai ukuran kinerja. ROE dan ROA merupakan ukuran kinerja fundamental sehingga lebih mencerminkan kinerja manajemen dibandingkan ukuran kinerja pasar (*market-based measurement* seperti: return saham). Penggunaan ROE dan ROA sebagai ukuran kinerja juga banyak digunakan dalam penelitian tentang pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja sebelumnya (Silva dan Majluf, 2008; Wenyi Chu, 2009, 2011) maupun pada penelitian tentang strategi bisnis (Jermias dan Gani, 2006; Lindow et al., 2010). ROE setiap perusahaan dihitung dengan cara membagi laba bersih

sesudah pajak dengan total ekuitas. Sedangkan ROA setiap perusahaan dihitung dengan cara membagi laba bersih sesudah pajak dengan total asset.

b. Variabel Independen

1. Variabel kepemilikan keluarga

Kepemilikan keluarga (FAM) diukur dengan besarnya prosentase (%) kepemilikan individu ditambah prosentase (%) kepemilikan perusahaan selain perusahaan publik, pemerintah, manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing (Claessens et al., 2000). Pengukuran ini juga telah digunakan dalam penelitian di Indonesia sebelumnya seperti: Arifin (2003); Khomsiyah (2005), Siregar dan Utama (2008).

2. Variabel strategi bisnis

Strategi bisnis (STRA) yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan strategi Porter (1980) yaitu strategi diferensiasi dan *low cost*. Gani dan Jermias (2006) untuk menentukan strategi bisnis yang diterapkan perusahaan maka digunakan 2 ukuran yaitu *asset utilization efficiency* yang merupakan rasio antara total penjualan dibagi *total asset* dan *premium price capability* yang merupakan rasio antara *gross margin* terhadap penjualan. Pada penelitian ini penentuan jenis strategi bisnis hanya menggunakan satu ukuran yakni nilai rasio *premium price capability*. Perusahaan yang mempunyai angka rasio *premium price capability* dibawah rata-rata diidentifikasi sebagai perusahaan yang cenderung menggunakan strategi *low cost* (efisiensi), dan perusahaan yang mempunyai nilai rasio *premium price capability* diatas rata-rata diidentifikasi sebagai perusahaan yang cenderung menggunakan strategi diferensiasi (inovasi).

c. Variabel kontrol

Ada 3 variabel kontrol yang digunakan dalam model penelitian ini yaitu: ukuran perusahaan, leverage perusahaan dan pertumbuhan perusahaan dimana ketiga variabel ini

merupakan variabel karakteristik perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

1. Ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan nilai logaritma natural dari total aset perusahaan j periode t
2. Leverage perusahaan (LEV) diukur dengan rasio perbandingan antara total hutang terhadap total aset perusahaan j periode t.
3. Pertumbuhan perusahaan (GROWTH) perusahaan diukur dengan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan j periode t, yang dihitung dengan membagi selisih penjualan tahun t dikurangi penjualan tahun t-1 dengan penjualan tahun t-1.

Pengolahan data menggunakan bantuan *soft ware* pengolahan data statisti SPSS.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.

Statistik deskriptif dari masing masing variabel yang digunakan dalam pengujian hipotesis terangkum pada tabel 1. Rata rata kinerja perusahaan sampel secara berurutan dilihat dari nilai mean ROE sebesar 0.090165 dengan standar deviasi 0.158983, dan nilai mean ROA 0.136503 dengan standar deviasi 0.872977. Dapat dikatakan bahwa penyebaran nilai ROA jauh lebih besar daripada penyebaran ROE, dari sudut pandang normalitas data penggunaan ROE akan lebih baik.

Rata-rata besarnya kepemilikan keluarga pada perusahaan sampel sebesar 47,0165% tidak jauh dari nilai median 49,32% dengan standar deviasi 26,1149%. Dengan menggunakan *cut off* kepemilikan keluarga minimal 20% ditemukan kepemilikan keluarga tertinggi sebesar 97,99% dan terendah 24,1%. Deskripsi ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya (Arifin, 2003, Siregar, 2006; Anggraini et la., 2010) bahwa kepemilikan keluarga pada perusahaan publik di Indonesia relatif tinggi.

Ukuran perusahaan sampel sangat beragam, nampak pada statistik deskriptif untuk total asset (TA) maksimum sebesar 54.839.260 juta rupiah dan nilai aset minimum 901.049 juta rupiah. Jika dilihat dari nilai leverage (LEV) menunjukkan bahwa perusahaan sampel mempunyai tingkat utang yang cukup tinggi dengan rata rata sebesar 0.421171 dengan penyimpangan 0,285514. Apabila tingkat leverage menggambarkan tinggi rendahnya risiko perusahaan maka dapat dikatakan risiko perusahaan beragam.

Statistik deskriptif tingkat pertumbuhan perusahaan rata-rata sebesar 0.129507 tidak begitu jauh dengan nilai median sebesar 0.136133 , tetapi keragamannya cukup tinggi ditunjukkan dengan nilai standar deviasi 0.323619.

Hasil Pengujian Analisis Regresi Model (1)

Hasil regresi empiris pengujian pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan disajikan pada tabel 2. Panel A tabel 2, menggunakan ROE sebagai ukuran kinerja perusahaan dapat dibuktikan bahwa nilai β_1 positif dan signifikan, hasil ini membuktikan bahwa kepemilikan keluarga (FAM) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, semakin besar dominasi kepemilikan keluarga semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Secara statistik ditunjukkan dengan besaran koefisien FAM (β_1) sebesar 0.156932 dengan angka t-statistik 1.750971 dan probabilitas 0.0840* (signifikan pada α 10%). Hasil ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga mempunyai efek *alignment* terhadap kinerja perusahaan. Panel B dengan menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja tidak dapat membuktikan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja karena koefisien β_1 tidak signifikan secara statistik.

Hasil Pengujian Binomial

Dari hasil uji binomial terhadap 162 tahun perusahaan sampel yang disajikan pada tabel 3 ditemukan sebanyak 108 tahun perusahaan (67%) diindikasikan cenderung menerapkan strategi diferensiasi/inovasi (kategori 1.000) dan 54 tahun perusahaan (33%) diidentifikasi

cenderung menerapkan strategi *low cost*. Dan perbedaan proporsi kecenderungan ini signifikan secara statistik yang ditunjukkan pada nilai *Asymp.Sig* sebesar $0.004 <$ dari nilai $\alpha = 1\%$. Dengan demikian hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu : tidak ada kecenderungan untuk menerapkan strategi bisnis tertentu pada perusahaan publik yang kepemilikannya terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga tidak terbukti, yang berarti bahwa strategi bisnis perusahaan public yang mempunyai kepemilikan terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga tidak beragam tetapi cenderung menerapkan strategi diferensiasi/inovasi.

Hasil penelitian ini lebih mendukung perspektif *resource based* yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga adalah sumber dari entrepreneurship dan inovasi maka cenderung melakukan diversifikasi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, hasil penelitian ini sejalan dengan Breton dan Miller (2008) juga Ducassy dan Prevot (2010),

Hasil Pengujian Analisis Regresi Model (2)

Model regresi (2) digunakan untuk menguji hipotesis ketiga yakni: pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan dipengaruhi (dimoderasi) oleh strategi bisnis yang diterapkan perusahaan. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4. Panel A, menggunakan ROE sebagai ukuran kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien λ_3 tidak signifikan, yang ditunjukkan pada t-statistik sebesar -0.457175 dengan probabilitas (p-value) sebesar 0.6489 (lebih besar dari alpha 10%). Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE tidak dipengaruhi oleh strategi bisnis (STRA) yang dilakukan perusahaan. Panel B dengan menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja juga tidak dapat membuktikan hipotesis ketiga. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan Lena (2007) dan Lamin (2007).

Untuk memperkuat hasil pengujian maka dilakukan uji beda terhadap rata-rata kinerja (ROE) pada kedua kelompok perusahaan yang diindikasikan menerapkan strategi yang berbeda. Hasil *compare mean test* disajikan pada tabel 5. Diperoleh hasil bahwa rata-rata

kinerja (ROE) pada kelompok perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi/inovasi berbeda secara signifikan dengan rata-rata kinerja (ROE) pada kelompok perusahaan yang menerapkan strategi *low cost*.

Pengaruh Variabel Kontrol

Dari ketiga variabel kontrol yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan terbukti bahwa ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan leverage (LEV) dan pertumbuhan perusahaan (GROWTH) keduanya berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

5. Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Simpulan

Dengan menggunakan *cut off* kepemilikan keluarga sebesar 20%, hasil pengujian analisis regresi membuktikan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE, hasil ini sejalan dengan perspektif teori keagenan bahwa semakin besar kepemilikan keluarga akan mengurangi masalah keagenan antara pemilik dan manajemen sehingga kepemilikan keluarga yang semakin besar mempunyai pengaruh yang bersifat *aligment*, manajemen bekerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Pengujian kedua ditemukan bahwa perusahaan publik dengan kepemilikan terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga cenderung menerapkan strategi bisnis berupa strategi diferensifikasi/inovasi. Hasil ini sejalan dengan perspektif *resource based* yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga adalah sumber *entrepreneurship* sehingga cenderung melakukan diversifikasi guna memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi hasil pengujian ketiga tidak dapat membuktikan bahwa strategi bisnis yang

diterapkan perusahaan menentukan pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan.

Implikasi Penelitian

Dengan menggunakan sampel perusahaan yang mempunyai kepemilikan keluarga sekurang-kurangnya 20%, hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga untuk perusahaan publik di Indonesia justru menimbulkan keselarasan antara pemilik dengan manajemen sehingga meningkatkan kinerja perusahaan, hal ini dapat dimaknai bahwa penempatan manajemen yang juga keluarga pada perusahaan public di Indonesia bukanlah hal yang buruk.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dari penelitian ini adalah: pertama, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan secara umum. Penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan sampel lintas industri sehingga hasilnya dapat digeneralisir. Kedua, pengelompokan perusahaan yang diidentifikasi menerapkan strategi diferensiasi/inovasi atau *low cost* hanya berdasarkan pengelompokan jika nilai *premium price capability* diatas nilai rata-ratanya maka perusahaan diidentifikasi menerapkan strategi inovasi dan dibawah rata-rata akan diidentifikasi menerapkan strategi *low cost*. Pengukuran ini sangat lemah sehingga hasil pengujian akan sangat bias. Keterbatasan yang lain dari penelitian ini belum dilakukan uji sensitivitas seperti menggunakan ukuran kinerja pasar atau menggunakan *cut-off* kepemilikan keluarga yang lain (misalnya 30% atau 50%), sehingga hasil pengujian lebih dapat dipertanggung-jawabkan.

Daftar Referensi

- Ali Ashiq, Tai-Yuan Chen dan Suresh Radhakrishnan, 2007, Corporate Disclosures by Family Firms, *Journal of Accounting and Economics*, 44: 238-286
- Anderson, R., dan Reeb D.,2003, Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500, *Journal of Finance*, 49:1301-1328
- Anggraini, Francisca dan N. Harjanto, 2010, Pengujian Peran Perlindungan Investor dan Kultur terhadap Perilaku Manajemen Laba pada Perusahaan Keluarga: Studi Internasional, *SNA XIII*, Purwokerto
- Arifin, Z.,2003, Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia, *Disertasi Pascasarjana FEUI*
- Astrachan, Joseph H.,2010, Strategy in Family Business: Toward a Multidimensional Research Agenda, *Journal of Family Business Strategy*, 1: 6-14
- Atmaja,L., J. Haman dan G. Tanewski, 2009, Earnings Management, Board Independence and Family Ownership, working paper, *SSRN*.
- Bae Kee-Hong, Jae-Seung Baek , Jun-Koo kang dan Wei Lin Liu, 2012, Do Controlling Shareholders' Expropriation Incentives Imply a Link between Corporate Governance and Firm value? Theory and Evidence, *Journal of Financial Economics*, 105: 412-435
- Braun, N. M. Berent dan Lorainne M. Uhlener, 2012, Responsible on Behaviours and Financial Performance in Family Ownership and Business, *Journal of Small Business and Enterprice Development*, 19,1: 20-38
- Breton-Miller, I. dan Miller D., (2008) Why Do Some Family Businesses Out Compete? : Governance, Long Term Orientation and Sustainable Capability, *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol 30, p.731-746
- Chang, James Jinho dan Hyun-Han Shin, 2007, Family Ownership and Performance in Korean Conglomerates, *Pacific-Basin Finance Journal*, 15 : 329-352
- Chen, Sheng-Syam dan Kim Wai Ho, 2000, Corporate Diversification, Ownership Structure and Firm Value: The Singapore Evidence, *International Review of Financial Analysis*, 9 : 315-326
- Chu, Wenyi, 2009, The Influence of family Ownership on SME Performance: Evidence from Public Firm in China, *Small Business Economics*, 33: 353-373
- , 2011, Family Ownership and Firms Performance: Influence of Family Management, Family Control and Firm Size, *Asia Pacific Journal Management*, 28: 833-851
- Chung, Hi-mei dan Shu Ting Chan, 2012, Ownership Structure, Family Leadership and Performance of Affiliate Firms in Large from Business Groups, *Asia Pacific Journal Management*, 29: 303-329
- Claessens, S., S.Dajnkov dan Larry H.P.Lang, 2000, The Separation of Ownership in East Asia Corporation, *Journal of Finance Economics*, 58: 81-112
- Claessnes, S., dan J.P.H. Fan, 2002, Corporate Governance in Asia: A Survey, *International Review of Finance*, 3: 71-103
- Du,J., dan Y. Dai, 2005, Ultimate Corporate Ownership Structures and Capital Structures: Evidence from East Asian Economics, *Corporate Governance*, 13:60-71
- Ducassy, I., dan F. Prevot, 2010, The Effects of Family Dynamics on Diversification Strategy: Empirical Evidence from French Companies, *Journal of Family Business Strategy*, 1:224-235

- Gani, Lindawati dan Johnny Jermias, 2006, Investigating the Effect of Board Independence on Performance Across Different Strategies, *The International Journal of Accounting*, 41: 295-314
- Haque, Adeg dan Hassan Omotta, 2001, Strategic Marketing Practice Considerations in Family Business in Bangladesh, *New England Journal of Entrepreneurship*, 42: 102-111
- Haryadi, Budi, 2008, Strategic Alignment antara Strategi Bisnis dan Strategi Sistem Informasi, *Telaah Manajemen*, 3:127-144
- Heng, Dis-Do, 2009, Does Family Ownership Create or Destroy Value: Evidence from Canada, *Dissertation Proquest*, SSRN.
- Ibrahim N.,A.,Angelidis J.,p. dan Parsa F., 2008, Strategic Management of Family Business: Current Findings and Directions for Future Research, *International Journal of Management*, 25: 95-110
- King, Michael, R dan E. Santor, 2008, Family Values: Ownership Structure, Performance and Capital Structure of Canadian Firms, *Journal of banking & Finance*, 32: 2423-2432
- Khomsiyah, 2005, Analisis Hubungan Struktur dan Indeks Corporate Governance dengan Kualitas Pengungkapan, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11: 471-516
- Kotey, B . 2005, Goals, Management Practices and Performance of Family SMEs, *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 11: 3-24
- Lamin, Anna, 2007, The Effect of Business Group Affiliation on Firms Strategy, *Disertation*, Proquest, University of Minnesota
- Lena, 2007, Keselarasan Teknologi, Strategi Operasi dan Kinerja Perusahaan: Sebuah Studi explorasi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Usahawan*, 04 April, XXXVI : 43-55
- Lindow, C.M.,S. Stubner dan T. Wuft , 2010, Strategic Fit Within Family Firms: The Role of Family Influence and The Effect on Performance, *Journal of Family Business Strategy*,1:167-178
- Martinez, J., Stohr B.,dan Quiroga, B, 2008, Family Ownership and Firm Performance: Evidence from Public Companies in Chile, *Family Business Review*, 20: 83-94
- Moores, K.,2009, Paradigm and Theory Building in the Domain of Business Families, *Family Business Review*, 22: 167-180
- Morck, R., dan Yeung, B., 2004, Family Control and The Rent-Seeking Society-Etrepreneurship, *Family Business Review*, 22:167-180
- Porter, Michael, E., 1985, *Competitive Advantage*, New York: Free Press
- Poza, E.J.,Alfred, T., dan Maheshwari A., 2007, Stakeholders Perceptions of Culture and Management Practices in Family Firms-A Preliminary Report, *Family Business Review*, 10: 135-155
- Salim, Chaline, 2007, Blockholder Ownership, Family Control and Business Strategy, *International Journal of Management Finance*, 33,6: 388-400
- Shyu, Jonchi, 2011, Family Ownership and Firms Performance: Evidence from Taiwanese Firms, *International Journal of Management Finance*, 7, 4: 397-411
- Silva, Francisca dan Nicolas Majluf, 2008, Does Family Ownership Shape Performance Outcomes, *Journal of Business Research*, 61: 609-614
- Siregar, B.,2006, Pemisahan Hak aliran Kas dan Hak Kontrol dalam Strukur Kepemilikan Ultimat, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11 : 237-263

- Siregar, S. Veronica dan S. Utama (2008) Type of Earnings Management and the Effect of Ownership Structure, Firm Size and Corporate Governance Practice: Evidence from Indonesia, *The International Journal of Accounting*, 43: 1-27
- Teguh, 2005, Reaksi Harga saham terhadap Pengumuman Perubahan Dividen pada Perusahaan Publik yang dikendalikan oleh Keluarga, *Thesis, Magister Akuntansi UI*.
- Triton, P.,B., 2011, *Manajemen Strategis Terapan Perusahaan dan Bisnis*, Oriza, Jakarta
- Villalonga, B. dan R. Amit, 2011, How Do Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value ?, *Journal of Finance Economics*, 80: 385-417
- Walpole, Ronald, E., 1993, *Introduction to statistics*, 5rd Edition, Terjemahan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Wijaya, Toni, 2009, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- _____ dan Asian Development Bank (ADB), 2000, Penilaian Mandiri (Self Assessment) Praktik Corporate Governance Suatu Perusahaan, <http://www.fcgi.or.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Statistik Diskriptif

	ROE	ROA	FAM	TA	LEV	GROWTH
Mean	0.090165	0.136503	0.470165	3.19E+09	0.421171	0.129507
Median	0.110000	0.042102	0.493200	9.84E+08	0.318269	0.136133
Maximum	0.428600	0.865097	0.979900	5.48E+10	0.862068	0.763755
Minimum	-0.489300	-0.346430	0.241000	901048.0	0.066200	-0.608685
Std.Dev	0.158983	0.872977	0.261149	7.63E+09	0.285514	0.323619

Keterangan:

ROE adalah return on equity yang merupakan rasio antara laba bersih sesudah pajak dibagi dengan jumlah ekuitas, ROA adalah return on asset yang merupakan rasio antara laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total asset, keduanya digunakan untuk mengukur kinerja FAM adalah kepemilikan keluarga yang diukur dengan % kepemilikan individu ditambah % kepemilikan perusahaan selain perusahaan public, pemerintah, manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing. TA adalah total asset perusahaan sampel yang digunakan sebagai ukuran besarnya perusahaan. LEV adalah tingkat leverage yang merupakan rasio antara total hutang dengan total asset, variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko perusahaan. GROWTH adalah tingkat pertumbuhan perusahaan, yang dihitung dengan membagi selisih penjualan periode sekarang (t) dengan periode lalu (t-1) dibagi dengan penjualan periode lalu (t-1).

Tabel 2. Hasil Pengujian Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Kinerja Perusahaan

Model (1) untuk menguji hipotesis 1				
$PERFORM_{jt} = \beta_0 + \beta_1FAM_{jt} + \beta_2SIZE_{jt} + \beta_3LEV_{jt} + \beta_4GROWTH_{jt} + \epsilon_{jt} \dots\dots(1)$				
Panel A : ROE sebagai variabel dependen				
Variabel Independen	Hipotesis	Koefisien	t-statistik	Prob
C		-0.245729	-1.145303	0.2557
FAM	+	0.156932	1.750971	0.0840*
SIZE		0.024948	1.074880	0.2858
LEV		0.005140	2.380527	0.0198**
GROWTH		0.133527	2.244861	0.0277**
R-square	0.132007			
Adjusted R-square	0.086323			
F-statistik	2.889580			
Prob (F-statistik)	0.027730**			
Panel B : ROA sebagai variabel dependen				
Variabel Independen	Hipotesis	Koefisien	t-statistik	Prob
C		-0.202005	-1.619985	0.1094
FAM	+	0.0366960	0.704487	0.4833
SIZE		0.022933	1.700071	0.0932*
LEV		0.012037	9.591702	0.0000***
GROWTH		0.061242	1.771552	0.0805*
R-square	0.601824			
Adjusted R-square	0.580867			
F-statistik	28.71758			
Prob (F-statistik)	0.000000***			

*** signifikan pada α 1%, ** signifikan pada α 5% dan * signifikan pada α 10%

Keterangan:

PERFORM adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE yaitu return on equity yang merupakan rasio antara laba bersih sesudah pajak dibagi dengan jumlah ekuitas, dan ROA yaitu return on asset yang merupakan rasio antara laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total asset, keduanya digunakan untuk mengukur kinerja FAM adalah kepemilikan keluarga yang diukur dengan % kepemilikan individu ditambah % kepemilikan perusahaan selain perusahaan public, pemerintah, manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing. SIZE adalah ukuran perusahaan yang dihitung dengan menggunakan nilai logaritma natural dari total asset perusahaan sampel. LEV adalah tingkat leverage yang merupakan rasio antara total hutang dengan total asset, variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko perusahaan. GROWTH adalah tingkat pertumbuhan perusahaan, yang dihitung dengan membagi selisih penjualan periode sekarang (t) dengan periode lalu (t-1) dibagi dengan penjualan periode lalu (t-1)

Tabel 3 . Hasil Binomial Test terhadap kecenderungan penerapan strategi bisnis

	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
dSTRA Group 1	1.0000	108	.67	.50	.004 ^a
Group 2	.0000	54	.33		
Total		162	1.00		

a. Based on Z Approximation

Prosedur pengujian adalah sebagai berikut:

H₀ : jumlah perusahaan yang diindikasikan cenderung menerapkan strategi diferensiasi tidak berbeda dengan jumlah perusahaan yang diindikasikan cenderung menerapkan strategi *low cost*.

H₁ : jumlah perusahaan yang diindikasikan cenderung menerapkan strategi diferensiasi berbeda dengan jumlah perusahaan yang diindikasikan cenderung menerapkan strategi *low cost*.

Dari hasil uji binomial diperoleh hasil bahwa dari 162 perusahaan sampel ditemukan sebanyak 108 perusahaan (67%) diindikasikan cenderung menerapkan strategi diferensiasi/inovasi (kategori 1.000) dan 54 perusahaan (33%) diidentifikasi cenderung menerapkan strategi *low cost*. Dan perbedaan proporsi kecenderungan ini signifikan secara statistic yang ditunjukkan pada nilai *Asymp.Sig* sebesar $0.004 < \alpha$ dari nilai $\alpha = 1\%$. Oleh karena itu H₀ ditolak.

Tabel 4. Hasil Pengujian Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Kinerja Perusahaan dimoderasi oleh strategi bisnis yang diterapkan

Model (3) untuk menguji H3				
$\text{PERFORM}_{jt} = \lambda_0 + \lambda_1\text{FAM}_{jt} + \lambda_2\text{dSTRA}_{jt} + \lambda_3\text{FAM}*\text{dSTRA}_{jt} + \lambda_4\text{SIZE}_{jt} + \lambda_5\text{LEV}_{jt} + \lambda_6\text{GROWTH}_{jt} + \varepsilon_{jt}$				
(2)				
Panel A : ROE sebagai variabel dependen				
Variabel Independen	Hipotesis	Koefisien	t-statistik	Prob
C		-0.586456	-2.535563	0.0133**
FAM	+	0.119829	1.721786	0.0893*
dSTRA		0.123648	0.774861	0.4409
FAM*dSTRA	+	-0.049762	-0.457175	0.6489
SIZE		0.072728	1.285799	0.2025
LEV		0.004456	2.203212	0.0307**
GROWTH		0.053831	2.432739	0.0174**
R-square	0.308495			
Adjusted R-square	0.252427			
F-statistik	5.502172			
Prob (F-statistik)	0.000094***			
Panel B : ROA sebagai variabel dependen				
Variabel Independen	Hipotesis	Koefisien	t-statistik	Prob
C		-0.145524	-1.119843	0.2664
FAM	+	0.093837	0.545205	0.5873
dSTRA		-0.049874	-0.736015	0.4640
FAM*dSTRA	+	0.127810	1.112877	0.2694
SIZE		0.021093	1.538820	0.1281
LEV		0.012251	9.446104	0.0000***
GROWTH		0.069498	1.994955	0.0497**
R-square	0.615685			
Adjusted R-square	0.584525			
F-statistik	19.75843			
Prob (F-statistik)	0.000000***			

*** signifikan pada α 1%, ** signifikan pada α 5% dan * signifikan pada α 10%

Keterangan:

PERFORM adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE yaitu *return on equity* yang merupakan rasio antara laba bersih sesudah pajak dibagi dengan jumlah ekuitas, dan ROA yaitu *return on asset* yang merupakan rasio antara laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total asset, keduanya digunakan untuk mengukur kinerja FAM adalah kepemilikan keluarga yang diukur dengan % kepemilikan individu ditambah % kepemilikan perusahaan selain perusahaan public, pemerintah, manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing. dSTRA adalah strategi bisnis perusahaan merupakan variabel dummy, bernilai = 1 untuk kecenderungan kepada strategi diferensiasi/inovasi, 0 untuk kecenderungan strategi *low cost*/efisiensi. FAM*dSTRA adalah interaksi antara variabel FAM dengan dSTRA. SIZE adalah ukuran perusahaan yang dihitung dengan menggunakan nilai logaritma natural dari total asset perusahaan sampel. LEV adalah tingkat

leverage yang merupakan rasio antara total hutang dengan total asset, variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko perusahaan. GROWTH adalah tingkat pertumbuhan perusahaan, yang dihitung dengan membagi selisih penjualan periode sekarang (t) dengan periode lalu (t-1) dibagi dengan penjualan periode lalu (t-1).

Tabel 5. Hasil Compare-Mean test terhadap kinerja perusahaan (ROE)

dSTRA	N	Mean	Std.Dev	Std.Error Mean	F	Sig	t-test	df	Sig (2-tailed)
ROE 1	108	.193505	1.06509	.1449413	1.213	.274	.829	79	.409
0	54	.022497	.110222	.0212123					

Prosedur pengujian H_0 : mean ROE 1 = mean ROE 0

H_1 : mean ROE 1 \neq mean ROE 0

Hasil pengujian t-test menunjukkan angka sebesar 0.829 dimana angka ini lebih besar dari 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka H_0 tidak ditolak yang berarti mean ROE pada strategi 1 (diferensiasi) dan mean ROE pada strategi 0 (*low cost*) berbeda

Investigasi Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap *International Financial Reporting Standards*

ROSITA ADI KRISTANTI
PASKAH IKA NUGROHO*
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract: *This study aims to describe the level of knowledge and students' opinion toward IFRS, either its adoption or its impact, also as an evaluation and consideration for academics and educational institutions related to the integration of IFRS at the curriculum and decisions regarding offering classes about these standards. Samples on this study was taken from undergraduate and graduate accounting students using disproportionate random sampling method. Testing in this study using independent sample t-test, analysis of variance, and multiple regression. The findings of this research are, first, there is no difference between the level of knowledge between male and female students. Second, there is no difference level of knowledge between the age groups. Third, there is a significant difference between the level of knowledge on the groups of school year. Last, it was found that the level of knowledge and interests have an important role to students' decision to take an IFRS class if faculty offered it.*

Keywords: *Age, Gender, Interest, International Financial Reporting Standards, Level Of Knowledge, Perception, , School Year, Students.*

* Corresponding author: paskah@staff.uksw.edu

Pendahuluan

Pelaporan keuangan di Indonesia mulai bergerak dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menuju *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Dalam kurun waktu 2008-2012 konvergensi dilakukan dengan cara mengurangi perbedaan secara bertahap antara PSAK dan IFRS, sehingga pada akhirnya pelaporan keuangan perusahaan publik akan menggunakan IFRS. Ketika hal tersebut terjadi, Indonesia akan bergabung dengan lebih dari 120 negara yang telah memperbolehkan atau mengharuskan penggunaan IFRS untuk pelaporan keuangan.

Pengetahuan akan IFRS penting bagi mahasiswa program studi akuntansi. Menurut James (2011) pengetahuan yang baik akan IFRS akan memberikan berbagai keuntungan seperti: (1) performa yang lebih baik pada ujian sertifikasi *Certified Public Accountant (CPA exam)*, dimana pertanyaan mengenai IFRS akan dimuat pada test tersebut. (2) kesempatan yang lebih besar bekerja pada perusahaan multinasional, baik *accounting firms* maupun *non accounting firms*. Kroll (2009) dalam Bandyopadhyay dan McGee (2012) menyatakan bahwa KAP *big four* bahkan mensyaratkan karyawan yang baru untuk paham IFRS, sedangkan KAP regional juga mengharapkan karyawan tahu tentang standar tersebut pada suatu level tertentu. Lulusan akuntansi yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap IFRS memiliki keunggulan kompetitif saat rekrutmen karyawan.

Mahasiswa akuntansi harus memiliki kemampuan untuk membedakan proses pelaporan keuangan antara *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan standard internasional lainnya (*The National Business Education Association Standards*, 2007). Khususnya di Indonesia mahasiswa akuntansi perlu memahami perbedaan PSAK dan IFRS karena saat ini Indonesia sedang berada pada tahap konvergensi.

Sekolah bisnis, program studi akuntansi maupun fakultas berperan penting dalam pengintegrasian IFRS pada kurikulum. Kurikulum dan metode pembelajaran yang baik akan membantu mahasiswa memahami IFRS. Universitas maupun sekolah bisnis yang menerapkan IFRS dalam kurikulumnya akan meningkatkan kualitas pendidikannya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lulusan yang mereka hasilkan.

Penelitian yang dilakukan James dan Blaszczynski (2010), menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai IFRS rendah, meskipun mereka setuju bahwa pengetahuan tentang IFRS adalah hal yang penting. Mahasiswa tersebut lebih memilih US GAAP daripada IFRS sebagai standar yang sebaiknya digunakan di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia.

Cultural diversity berpengaruh terhadap interpretasi pada IFRS. Pada penelitian yang dilakukan pada mahasiswa universitas di Inggris dan Afrika Selatan terdapat perbedaan signifikan mengenai interpretasi IFRS. Universitas dengan dominasi mahasiswa Eropa lebih dapat menerima prinsip dalam IFRS dan siap dengan adopsi secara global. Sedangkan universitas dengan dominasi mahasiswa Afrika masih harus belajar bahwa transparansi dibutuhkan untuk mengadopsi standar akuntansi global, dan menerapkan profesionalisme dan fleksibilitas yang berkenaan dengan prinsip IFRS (Buys et al., 2012).

Dari latar belakang masalah tersebut, akan dilakukan penelitian serupa dengan responden yang berbeda. Responden akan diambil dari mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW dengan dominasi responden adalah orang Indonesia, dan demografi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran informasi pengetahuan dan opini mahasiswa terhadap IFRS baik adopsi maupun dampaknya, juga sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi akademisi dan institusi pendidikan yang berkaitan dengan pengintegrasian IFRS pada kurikulum dan penawaran kelas tentang IFRS. Maka yang menjadi masalah penelitian adalah bagaimana persepsi mahasiswa prodi

Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW terhadap IFRS. Berdasarkan masalah tersebut maka terdapat persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan *gender*, tahun masuk universitas, dan usia?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS apabila fakultas menawarkannya?

Telaah Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penggunaan IFRS secara Global

IFRS sebagai standar pelaporan keuangan global telah digunakan lebih dari 120 negara dalam satu dekade terakhir. Sebagai contoh Uni Eropa mengadopsi IFRS pada tahun 2005, Rusia dan Jepang mengadopsi tahun 2011.

Epstein (2008), menegaskan bahwa penggunaan IFRS akan mempermudah likuiditas pasar, membuat *cost of capital* lebih rendah, mengurangi biaya transaksi investor, dan mempermudah pembentukan modal maupun arus modal internasional. Pertumbuhan perdagangan internasional, bursa saham asing dan investor maupun kreditor asing menimbulkan keperluan terhadap satu set standar akuntansi global. Untuk menjawab keperluan tersebut, adopsi IFRS pada perusahaan multinasional akan mengurangi biaya untuk mempersiapkan laporan keuangan yang sama dalam standar akuntansi yang berbeda untuk setiap negara.

Adopsi IFRS berdampak pada pengukuran akuntansi. Di Australia, entitas pemerintahan lokal menunjukkan peningkatan signifikan pada liabilitas setelah penerapan IFRS (Ahmed dan Alam, 2012). Hal yang sama terjadi di New Zealand, rata-rata total aset, total liabilitas dan laba bersih lebih tinggi setelah dilakukan adopsi (Kabir et al., 2010). Ini terjadi karena diadakan penilaian ulang menurut nilai pasar yang berlaku. Terzi et al., (2013)

juga menemukan perbedaan pada rasio-rasio keuangan antara sebelum dan sesudah adopsi. Perbedaan tersebut signifikan pada *current ratio*, perputaran piutang, perputaran aset, perputaran aset tetap dan perputaran ekuitas.

Dengan mengadopsi IFRS, profesi akuntan diharuskan menguasai standar baru tersebut, sekolah bisnis maupun universitas harus merevisi kurikulumnya, dan harus dilakukan pelatihan mengenai IFRS bagi karyawan di perusahaan-perusahaan (Fosbre et al., 2009).

Perbedaan Fundamental antara US GAAP dan IFRS

Perbedaan signifikan antara US GAAP dan IFRS adalah bidang pendekatan umum. IFRS didasari prinsip dasar akuntansi (*principle based*) dengan panduan pengaplikasian yang terbatas sedangkan US GAAP didasari aturan (*rule based*) dengan panduan aplikasi yang spesifik (Bohusova dan Nerudova, 2009). Perbedaan selanjutnya ada pada metode arus kos persediaan, IFRS mengizinkan untuk menggunakan metode FIFO (*first in first out*) dan metode rata-rata (*average*) tetapi tidak memperbolehkan penggunaan LIFO (*last in first out*) (Smith, 2012).

Pada laporan keuangan konsolidasi, apabila perusahaan induk dan anak memiliki periode keuangan yang berbeda maka terdapat perbedaan perlakuan terhadap transaksi yang terjadi pada *gap period*. Menurut GAAP, transaksi hanya membutuhkan pengungkapan (*disclosure*) tetapi menurut IFRS diperlukan adanya penyesuaian (*recognition*) (Kaiser, 2012).

Menurut GAAP, PPE (*Property, Plant and Equipment*) dicatat senilai kos akuisisi dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan kerugian akibat *impairment*. GAAP juga melarang adanya revaluasi PPE. Sebaliknya IFRS memperbolehkan dilakukan revaluasi, dan mencatatnya senilai *fair market value* (Persons, 2013).

Perbedaan lain terletak pada pengujian adanya potensi *impairment* pada aset jangka panjang. IFRS mengharuskan penggunaan *discounted cash flow* dari entitas atau *fair value* untuk mengukur recoverabilitas suatu aset. Sebagai pembandingnya, GAAP menggunakan dua langkah pengujian yang diawali dengan penggunaan *discounted cash flow*. Perbedaan-perbedaan mendasar pada model *impairment* dapat mengakibatkan perbedaan nilai apabila dilakukan *impairment* pada suatu aset (Kaiser, 2012).

Akademisi meyakini perbedaan pendekatan tersebut akan mempengaruhi keputusan mereka dalam penentuan kurikulum (Zhu et al., 2011). Di sisi lain investor sebagai pengguna laporan keuangan terbiasa dengan IFRS, tetapi perubahan standar akuntansi tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi. Mereka lebih percaya pada performa perusahaan dan gambaran perusahaan yang biasanya diperlihatkan melalui iklan (Rohini, 2011).

Dampak IFRS pada Kurikulum Akuntansi

Saat ini mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dan auditor dituntut untuk dapat memahami IFRS dan GAAP, sehingga pengintegrasian IFRS pada kurikulum perlu untuk menghasilkan lulusan yang mampu menyusun maupun mengaudit laporan keuangan. Terlebih lagi di Indonesia termasuk dalam negara dengan ekonomi berkembang. Pada beberapa tahun terakhir, negara dengan ekonomi berkembang menjadi peluang investasi yang penting dan implementasi IFRS menjadi sarana penarik investor baru (Albu et al., 2012).

Integrasi IFRS pada kurikulum merupakan suatu keharusan. Sebagian besar universitas di Amerika Serikat mengintegrasikan IFRS pada kurikulum pengajaran mereka, meliputi materi pada *introductory financial accounting*, *intermediate financial accounting* dan *advanced financial accounting* (Weiss, 2011). Di Indonesia konvergensi dapat dilakukan

pada seluruh grade akuntansi keuangan, manajemen keuangan, dan analisis laporan keuangan.

Akademisi bidang akuntansi harus mampu mengajarkan IFRS sebaik mereka mengajarkan tentang GAAP, tetapi terdapat hambatan karena mereka tidak terlatih tentang IFRS selama bersekolah dan opini mereka yang menganggap IFRS tidak lebih baik dari GAAP (Miller dan Becker, 2010). Akademisi bahkan tidak terlalu menaruh simpati pada proses penyusunan IFRS. Setelah 55 standar dipublikasikan hingga akhir tahun 2008, IASB hanya menerima 12 surat komentar dari akademisi di Amerika Serikat (Larson et al., 2011). Akademisi berpengaruh besar dalam pengintegrasian IFRS pada kurikulum, yang nantinya akan mempengaruhi kualitas pendidikan di universitas. Bagaimanapun IFRS adalah konsep yang baru, yang membutuhkan implementasi secara tepat.

Perumusan Hipotesis

Di Hong Kong, penelitian yang dilakukan pada mahasiswa akuntansi tahun ketiga menunjukkan bahwa gender berpengaruh secara signifikan terhadap performa mahasiswa akuntansi dalam studi pada tingkat strata 1 (Ho, 2008). Menurut Stivers dan Onifade (2011), perempuan memiliki *technical skill* dalam bidang akuntansi lebih baik daripada laki-laki, sehingga terdapat kemungkinan lebih tinggi untuk lebih mudah mengadopsi IFRS sebagai standar yang baru. Cudia (2009) melakukan penelitian tentang performa mahasiswa pada matakuliah akuntansi manajemen. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan lebih teliti sehingga memiliki nilai yang lebih baik dari pada mahasiswa laki-laki, walaupun IQ pada mahasiswa laki-laki memiliki rata-rata yang lebih tinggi. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap IFRS.*

Penelitian yang dilakukan Koh & Koh (1999) menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh signifikan terhadap performa di bidang akuntansi. Terdapat koefisien negatif yang mengindikasikan bahwa mahasiswa dengan usia yang lebih muda memiliki performa yang lebih baik. Akan tetapi Kim (2011) membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan kelompok usia. Dari hasil yang tidak konsisten tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H₂: *Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap IFRS berdasarkan usia.*

Kim (2011) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan berkaitan dengan pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan tahun masuk universitas. Sebaliknya, di UKSW pengintegrasian IFRS pada materi akuntansi keuangan baru dimulai pada semester genap tahun ajaran 2010/2011, sehingga dapat diasumsikan mahasiswa dengan tahun masuk 2010,2011 dan 2012 mendapat materi yang bermuatan IFRS lebih banyak dibanding dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dapat mendorong perbedaan tingkat pengetahuan berdasarkan tahun masuk universitas, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap IFRS berdasarkan tahun masuk universitas.*

Kim (2011) melakukan penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan mahasiswa mengambil kelas tentang IFRS apabila universitas menawarkannya. Pertama, ditemukan pengaruh negatif mengenai tingkat pengetahuan terhadap keinginan mengambil kelas. Mahasiswa yang merasa telah menguasai materi tentunya merasa tidak perlu mengambil kelas khusus. Kedua, minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan mengambil kelas. Semakin tinggi minat semakin tinggi pula rasa ingin tahu, yang pada akhirnya dilakukan pengambilan kelas sebagai salah satu cara untuk memenuhi

keingintahuan. Ketiga, ditemukan persepsi mengenai pengaruh standar tersebut pada kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan pada keputusan pengambilan kelas. Sebaliknya, ditemukan pengaruh positif pada persepsi mengenai pengaruh IFRS pada kinerja operasi dan *stakeholder*. Ketika mahasiswa menyadari bahwa standar tersebut memiliki banyak pengaruh, maka terdapat dorongan untuk menguasainya. Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_{4a}: *Tingkat pengetahuan berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

H_{4b}: *Minat pada IFRS berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

H_{4c}: *Persepsi mengenai pengaruh IFRS terhadap kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

H_{4d}: *Persepsi mengenai pengaruh IFRS terhadap kinerja operasi berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

H_{4e}: *Persepsi mengenai pengaruh IFRS terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *disproportionate stratified random sampling* yaitu mahasiswa secara acak diambil dari kategori-kategori tertentu berdasarkan usia, tahun masuk, dan gender tanpa memperhatikan proporsi dari setiap kategori tersebut. Hal tersebut didasarkan pada asumsi mahasiswa angkatan 2008 dan 2009 sebagian telah menyelesaikan studinya.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui penelitian survey yaitu melalui penyebaran kuesioner yang diambil dari instrumen yang dikembangkan oleh Kim (2011) dalam "*Investigating Perceptions Concerning the Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) Among College Students*". Pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tersebut akan terdiri dari 3 bagian, yaitu: data diri para responden, tingkat pengetahuan terhadap IFRS, dan persepsi terhadap adopsi dari IFRS. Untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa diminta untuk memberikan penilaian pada prinsip-prinsip yang ada dalam IFRS. Selanjutnya untuk menilai persepsi akan disediakan pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala likert 1-5 dengan "1" menunjukkan "sangat tidak setuju", "2" menunjukkan "tidak setuju", "3" menunjukkan "netral", "4" menunjukkan "setuju" dan "5" menunjukkan "sangat setuju".

Teknik Analisis

Pertama dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk melihat apakah data yang telah didapatkan valid dan handal. Dalam menguji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6 maka data bisa dikatakan reliabel. Sedangkan uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara indikator empirik dan total skor dari indikator empirik.

Kedua, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui demografi responden berdasarkan karakteristik gender, usia dan tahun masuk. Pada bagian ini akan dihitung frekuensi dan persentase responden.

Ketiga, digunakan uji beda menggunakan T-test untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan tingkat pengetahuan berdasarkan gender. Uji beda dilakukan pada tingkat α 0.05.

Untuk mengukur perbedaan varians tingkat pengetahuan pada karakteristik dengan beberapa populasi digunakan ANOVA (*Analysis of Variance*). ANOVA dilakukan pada karakteristik usia dan tahun masuk. ANOVA juga diuji pada tingkat α 0.05.

Terakhir akan dilakukan uji asumsi klasik dan regresi berganda. Uji asumsi klasik meliputi multikolinearitas, heterokedastisitas dan normalitas residu. Uji regresi berganda bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS apabila fakultas menyediakannya. Adapun model regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{INTENT} = \beta_0 + \beta_1 \text{KNOWLEDGE} + \beta_2 \text{INTEREST} + \beta_3 \text{PERCEPTION}_1 + \beta_4 \text{PERCEPTION}_2 + \beta_5 \text{PERCEPTION}_3 + \varepsilon$$

Keterangan variabel:

- 1) INTENT: variabel yang menunjukkan keinginan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS.
- 2) KNOWLEDGE: tingkat pengetahuan terhadap IFRS yang diukur berdasarkan mahasiswa mempersepsikan tingkat pengetahuannya sekarang.
- 3) INTEREST: variabel yang menunjukkan minat mahasiswa terhadap IFRS.
- 4) PERCEPTION 1: persepsi mahasiswa tentang apakah IFRS memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
- 5) PERCEPTION 2: persepsi mahasiswa tentang apakah IFRS memiliki pengaruh terhadap kinerja operasi.
- 6) PERCEPTION 3: persepsi mahasiswa tentang apakah IFRS mempengaruhi pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor dan pemegang saham.

Analisis dan Pembahasan

Deskriptif Statistik

Sampel pada penelitian ini berjumlah 242 orang. Pada Tabel 1 ditunjukkan mengenai frekuensi dan persentase responden berdasarkan demografi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa responden didominasi oleh wanita 67.4% dan sisanya adalah pria 32.6%. Berdasarkan usia, 61.6% responden berusia 20 tahun atau kurang, 33.9% responden berusia 21-30 tahun, 3.7% responden berusia 31-40 tahun, dan sisanya sebesar 0.8% berusia lebih dari 40 tahun.

Tabel 2 menjelaskan tentang karakteristik demografi responden berdasarkan ukuran dan penyebaran. Pada karakteristik berdasarkan gender, ditemukan mean sebesar 1.67, ini artinya sebagian besar responden adalah wanita. Berdasarkan karakteristik usia nilai minimum adalah 1 dan maksimum 4 berarti responden ada pada kelompok usia dibawah 20 tahun hingga kelompok 41-50 tahun. Mean yang dihasilkan adalah 1.44, maka dapat disimpulkan sebagian besar responden berada pada usia di bawah 30 tahun. Menurut karakteristik tahun masuk ditemukan nilai maksimal 6 yang berarti terdapat responden yang berasal dari strata 2. Mean yang didapat adalah 2.77 sehingga dominasi responden berada pada jenjang strata 1.

Persepsi Mahasiswa Mengenai Perbedaan IFRS dan GAAP

Responden diberikan beberapa pernyataan yang menggambarkan perbedaan dari IFRS dan GAAP. Pertama, responden diminta untuk menandai perbedaan yang mereka ketahui. Tabel 3 menjelaskan tentang frekuensi responden yang mengetahui prinsip-prinsip tersebut. LIFO tidak digunakan lagi menjadi perbedaan yang paling banyak dimengerti (91.3%), selanjutnya disusul oleh *principle based accounting* (74.4%), *impairment* (69%), *fair market*

value (52.5%) dan yang paling sedikit diketahui adalah perbedaan mengenai periode keuangan (49.2%).

Kedua, responden diminta untuk mengurutkan perbedaan yang menurutnya paling penting hingga paling tidak penting. Tabel 4 menunjukkan mean setiap poin perbedaan, mean yang paling kecil menunjukkan yang paling penting sebaliknya yang paling besar adalah yang paling tidak penting. *Principle based accounting* menjadi poin yang paling penting dengan mean 1.75, selanjutnya *fair market value* dengan mean 2.95, periode keuangan dengan mean 3.03, impairment dengan mean 3.55, terakhir LIFO tidak digunakan lagi dengan mean 3.76.

T-test dan ANOVA (*Analysis of Variance*)

Untuk membandingkan tingkat pengetahuan pada dua populasi yaitu karakteristik gender digunakan metode t-test, dan untuk melihat perbedaan varians tingkat pengetahuan untuk variabel usia dan tahun masuk digunakan ANOVA (*Analysis of Variance*). Untuk kedua metode tersebut dibandingkan berdasarkan rata-rata skor setiap populasi juga dilihat melalui tingkat signifikansi sehingga dapat diketahui apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5, ditemukan hasil rata-rata tingkat pengetahuan pada pria adalah 3.557 sedikit lebih rendah daripada wanita yang hanya sebesar 3.592. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan ($p\text{-value} > 0.05$). Hasil tersebut sekaligus menolak H_1 dimana tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap IFRS berdasarkan gender.

Penelitian ini memiliki hasil yang tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ho (2008), Stivers dan Onifade (2011) dan Cudia (2009). Hal ini diperkuat dengan membandingkan komentar yang diberikan oleh responden pria maupun wanita. Komentar

yang diberikan hampir sama yaitu pemahaman IFRS adalah hal yang penting untuk mahasiswa akuntansi. Kesamaan tingkat pengetahuan ini kemungkinan dipengaruhi oleh input pengetahuan terhadap IFRS dalam porsi yang sama, karena baik pria dan wanita diwajibkan mengambil kelas akuntansi keuangan yang sama.

Tabel 6 menunjukkan hasil ANOVA untuk variabel usia dan tahun masuk. Berdasarkan usia ditemukan tingkat pengetahuan tertinggi sebesar 3.5872 ada pada kelompok usia 20 tahun ke bawah, dan tingkat pengetahuan terendah pada kelompok usia 41-50 tahun sebesar 3.5000. Pada uji tersebut ditemukan nilai $F=0.563$ dan $p\text{-value}>0.05$, sehingga varians antar populasi dianggap sama. Hasil tersebut sekaligus menolak H_2 , dimana tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antar kelompok usia. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Kim (2011).

Pada variabel tahun masuk ditemukan perbedaan tingkat pengetahuan yang signifikan ($p\text{-value}<0.05$), di mana rata-rata tingkat pengetahuan yang paling tinggi berada pada mahasiswa strata 2 sebesar 3.7679 kemudian yang terendah ada pada mahasiswa angkatan 2009 sebesar 3.3548 disusul angkatan 2008 sebesar 3.4615. Hasil ANOVA ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya dan sekaligus menerima H_3 . Hal ini dikarenakan pada masa angkatan 2008 dan 2009 berkuliah, pengajar tidak banyak menyinggung IFRS. Sebagai akibatnya, angkatan 2008 dan 2009 tidak memiliki kemampuan yang cukup mengenai standar ini. Seorang responden dari angkatan 2009 bahkan berpendapat bahwa dia dan beberapa temannya yang akan lulus sering mendengar tentang IFRS. Akan tetapi latar belakang, implementasi, perbedaan dengan standar sebelumnya dan hal-hal lain yang lebih dalam belum mereka ketahui secara penuh. Hal ini mengakibatkan kekuatiran ketika mahasiswa tersebut berharap akan bekerja pada *multinational company* atau *accounting firm*.

Regresi Berganda

Untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS dilakukan analisis regresi berganda. Selanjutnya untuk menguji hipotesis (H_4) disusunlah model sebagai berikut:

$$\text{INTENT} = \beta_0 + \beta_1 \text{KNOWLEDGE} + \beta_2 \text{INTEREST} + \beta_3 \text{PERCEPTION1} + \beta_4 \text{PERCEPTION2} + \beta_5 \text{PERCEPTION3} + \varepsilon$$

Tabel 7 menunjukkan hasil analisis regresi berganda. Pada variabel KNOWLEDGE ditemukan nilai $t=4.257$ dan $p\text{-value}<0.05$, temuan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya sekaligus menerima H_{4a} . Artinya tingkat pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS. Hasil ini didukung oleh responden yang menyatakan bahwa ketika seorang mahasiswa merasa menguasai materi IFRS maka akan timbul rasa percaya diri bahwa mahasiswa tersebut dapat memiliki performa yang baik apabila mengambil kelas mengenai standar tersebut sehingga berpeluang mendapat nilai yang baik.

Hal ini juga berlaku untuk variabel INTEREST, didapat nilai $t=4.934$ dan $p\text{-value}<0.05$. Minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan mengambil kelas. Semakin tinggi minat mahasiswa terhadap IFRS semakin tinggi keinginan mahasiswa mengambil kelas terhadap IFRS. Hasil statistik menunjukkan konsistensi terhadap Kim (2011) dan menerima H_{4b} . Minat menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan tersebut, mahasiswa yang tertarik akan memiliki keinginan belajar yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki minat.

Persepsi mahasiswa mengenai dampak IFRS terhadap kinerja keuangan (PERCEPTION1) berpengaruh positif terhadap keinginan mengambil kelas ($\beta=0.167$), namun pengaruh ini tidak signifikan ($t=1.558$ dan $p\text{-value}>0.05$). Pernyataan ini tidak konsisten dengan penelitian Kim (2011) dan menolak H_{4c} . Selanjutnya ditemukan nilai

$\beta=0.043$ pada variabel PERCEPTION2, sehingga setiap kenaikan 1 level dari persepsi tentang kinerja finansial akan mengakibatkan kenaikan sebesar 4.3% pada keinginan untuk mengambil kelas terhadap IFRS, kenaikan tersebut dianggap tidak signifikan ($t=0.566$ dan $p\text{-value}>0.05$). Hasil ini konsisten dengan penelitian Kim (2011) dan menolak H_{4d} . Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh variabel PERCEPTION3, ditemukan koefisien negatif pada variabel ini ($\beta= -0.067$). Secara parsial variabel persepsi mahasiswa mengenai pengaruh terhadap *stakeholder* tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Kim (2011) dan menolak H_{4d} . Pada ketiga variabel PERCEPTION didapat hasil yang tidak signifikan secara parsial. Meskipun mahasiswa tahu akan pengaruh yang ditimbulkan akibat konvergensi standar yang baru, tidak menjadikan motivasi untuk mengambil kelas. Kemungkinan hal ini terjadi karena mahasiswa kurang peduli dengan pengaruh IFRS di luar ranah pendidikan akan membawa dampak besar pada mahasiswa.

Menurut ANOVA dalam regresi berganda ditemukan nilai $F=13.522$ dan $p\text{-value}=0.00$, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel KNOWLEDGE, INTEREST, PERCEPTION1, PERCEPTION2 dan PERCEPTION3 berpengaruh signifikan terhadap keinginan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS. Pada persamaan regresi ini, ditemukan nilai Adjusted R^2 sebesar 0.206. ini berarti 20,6% keinginan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas. Sedangkan 79,4% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Kesimpulan

Penelitian ini telah melihat bagaimana persepsi dan kondisi tingkat pengetahuan mahasiswa FEB UKSW terhadap IFRS. Pertama, ditemukan tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara mahasiswa pria dan wanita. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya dan membatalkan hipotesis (H_1). Kedua, juga tidak ditemukan perbedaan tingkat

pengetahuan antara kelompok umur sehingga menolak hipotesis (H_2). Ketiga, ditemukan perbedaan tingkat pengetahuan yang signifikan pada kelompok tahun masuk. Hasil ini menjadikan hipotesis (H_3) terbukti. Menurut mean tiap angkatan, angkatan 2008 dan 2009 memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah daripada angkatan setelahnya. Terakhir, ditemukan bahwa tingkat pengetahuan dan minat memiliki peran penting terhadap keputusan mahasiswa mengambil kelas tentang IFRS apabila fakultas menawarkannya.

Implikasi

Dengan melihat hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan informasi sebagai pertimbangan dan evaluasi terkait kebijakan kurikulum maupun penawaran kelas mengenai standar tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat batasan yang ditemukan. Pertama, dari sisi responden dengan angkatan 2008 dan 2009 sangat minim jumlahnya, dikarenakan telah banyak yang lulus dan tidak mengikuti kelas perkuliahan lagi. Hal ini menyebabkan sampel dari angkatan tersebut tidak proporsional dan kurang representatif. Kedua, pada pengukuran tingkat pengetahuan dan persepsi tentang IFRS digunakan kuesioner yang hanya berupa pernyataan, sehingga tidak memiliki patokan yang jelas.

Saran Untuk Penelitian Mendatang

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan saran bagi penelitian-penelitian mendatang. Pertama, sebaiknya bila dilakukan penelitian mengenai persepsi dan pengukuran tingkat pengetahuan dilakukan dengan metode wawancara dan tes karena hasilnya lebih reliabel. Kedua, sulit untuk menyamaratakan persepsi mahasiswa akuntansi dengan hanya

mengambil sampel dari satu universitas. Sehingga ada baiknya penelitian mendatang menggunakan sampel dari beberapa universitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, K., and M. Alam. 2012. The Effect of IFRS Adoption on the Financial Reports of Local Government Entities, *Australasian Accounting Business & Finance Journal* 6(3): 109-120.

Albu, N., C. N. Albu., and M. M. Girbina. 2012. Educating Accounting Students in an Emerging Market Economy – An Analysis of the Importance of Stereotypes in Teaching IFRS, *International Journal of Academic Research* 4(3): 51-57.

Bandyopadhyay, J., and P. F. McGee. 2012. A Progress Report: IFRS-U.S. GAAP Convergence and Its Curriculum Impact, *Advances in Competitiveness Research* 20(1/2): 78-89.

Bohusova, H., and D. Nerudova. 2009. US GAAP and IFRS Convergence in the Area of Revenue Recognition, *Economics & Management* : 12-19.

Buyss, P. W., D. Schutte., and P. Andrikopoulos. 2012. Understanding Accounting Students Cultural Diversity and Its Implication of the Interpretation of IFRS, *International Business & Economics Research Journal* 11(4): 451-466.

Cohen, S., and S. Karatzimas. 2012. Has IFRS Adoption Affected Management Accounting System? Empirical Evidence from Greece, *Social Science Research Network* Maret.

Cudia, C. P. 2009. Factors That Influence The Final Grades of Students in Managerial Accounting Course in De La Salle University, *Journal of International Business Research* 8(1): 39-59.

Epstein, B. J. 2008. The Economic Effect of IFRS Adoption, *The CPA Journal* : 26-31.

Fosbre, A. B., E. M. Kraft., and P. B. Fosbre. 2009. The Globalization of Accounting Standards: IFRS Versus US GAAP, *Global Journal of Business Research* 3(1): 61-71.

Girbina, M., M. Minu, S. Bunea., and M. Sacarin. 2012. Perceptions of Prepares from Romanian Banks Regarding IFRS Application, *Accounting and Management Information Systems* 11(22): 191-208.

Himawan, R. 2010. *Persepsi Analisis Laporan Keuangan pada Perusahaan Sekuritas terhadap Penerapan IFRS Secara Penuh*. (Tidak Dipublikasikan).

Ho, H. 2008. Spialing Effect of Prior Knowledge in Accounting Studies, *The International Journal of Learning* 15(4): 25-29.

Ionascu, M., and I. Ionascu. 2012. The Use of Accounting Information by Financial Analysts in Emergent Markets: The Case of Romania, *Accounting and Management Information Systems* 11(2): 174-186.

James, M. L., and C. Blaszczyński. 2010. Accounting Students Perceptions of International Financial Reporting Standards, *Journal for Global Business Education* 10: 37-49.

James, M. L. 2011. Integrating International Financial Reporting Standard Into Accounting Curriculum : Strategies, Benefits and Challenges, *Academy of Educational Leadership Journal* 15: 127-141.

Kabir, M. H., F. Laswad., and M. A. Islam. 2010. Impact of IFRS in New Zealand on Accounts and Earning Quality, *Australian Accounting Review* 20(4): 343-357.

Larson, R. K., P. J. Herz, S. Y. Kenny. 2011. Academics and the Development of IFRS: An Invitation to Participate, *Journal of International Accounting Research* 10(2): 97-103.

Kaiser, J. G. 2012. IFRS and US GAAP: Similarities and Differences, *PricewaterhouseCoopers LLP*.

Kim, H. P. 2011. *Investigating Perceptions Concerning the Adoption of International financial Reporting Standards (IFRS) Among College Students*. Thesis. Texas Tech University.

Koh, M. Y., and H. C. Koh. 1999. The Determinants of Performance in an Accountancy Degree Programme, *Accounting Edcation* 8(1): 13-29.

Miller, W. F., and D'A. A. Becker. 2010. Why Are Accounting Professors Hesitant to Implement IFRS?, *The CPA Journal* August: 63-67.

National Business Education Association. 2007. *National standards for business education: What America's students should know and be able to do in business*. Reston, VA: Author.

Persons, O. 2013. A Principle-Based Case for Teaching International Financial Reporting Standards (IFRS), *Global Conference on Business and Finance Proceedings* 8(1): 154-157.

Rohini, D. 2011. Are Indian Investor Aware of IFRS Standards? – A Study on the Investor's Attitude Toward the Implementation of IFRS in India, *International Journal OF Global Business* 4(2): 28-40.

Smith, L. M. 2012. IFRS and U.S. GAAP: Some Key Differences Accountants Should Know, *Management Accounting Quarterly* 14(1): 19-26.

Stivers, B. P., and E. Onifade. 2011. Knowledge, Skills, and Abilities for Accounting: An Investigation of Student Perceptions, *Review of Business Research* 11(1): 46-56.

Terzi, S., R. Oktem., and I. K. Sen. 2013. Impact of Adopting International Financial Reporting Standards: Empirical Evidence from Turkey, *International Business Research* 6(4): 55-66.

Weiss, J. M. 2011. Implementing IFRS Curriculum into Accounting Programs, *The CPA Journal* April: 62-63.

Zhu, H., K. T. Rich, A. R. Michenzi., and J. Cherubini. 2011. *Issues in Accounting Education* 26(4): 725-750.

Tabel 1: Frekuensi Responden

Variabel	Kelompok	Frekuensi	Persentase
Gender	Pria	79	32.6
	Wanita	163	67.4
	TOTAL	242	100
Usia	≤ 20 tahun	149	61.6
	21-30 tahun	82	33.9
	31-40 tahun	9	3.7
	41-50 tahun	2	0.8
	TOTAL	242	100
Tahun Masuk	2008	13	5.4
	2009	31	12.8
	2010	32	13.2
	2011	79	32.6
	2012	59	24.4
	Strata 2	28	11.6
	TOTAL	242	100.0

Tabel 2: Deskriptif Statistik

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Gender	1	2	1.67	0.470
Usia	1	4	1.44	0.610
Tahun Masuk	1	6	2.77	1.626

Keterangan:

- 1) Gender: Pria=1 dan Wanita=2
- 2) Usia: ≤20 tahun=1, 21-30 tahun=2, 31-40 tahun=3 dan ≥41 tahun=4
- 3) Tahun Masuk: 2012=1, 2011=2, 2010=3, 2009=4, 2008=5 dan Strata 2=6

Tabel 3: Pengetahuan mahasiswa tentang perbedaan IFRS dan GAAP

Perbedaan	Frekuensi	Persentase
LIFO tidak digunakan lagi	221	91.3
Fair Market Value	127	52.5
Periode Keuangan	119	49.2

Principle Based Accounting	180	74.4
Impairment	167	69.0

Tabel 4: Persepsi mahasiswa tentang perbedaan IFRS dan GAAP yang paling penting

Perbedaan	Mean
LIFO tidak digunakan lagi	3.76
Fair Market Value	2.95
Periode Keuangan	3.03
Principle Based Accounting	1.75
Impairment	3.55

Tabel 5: T-test tingkat pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan variabel gender

Gender	N	Mean	Standar Deviasi	t	p-value
Pria	79	3.557	0.53701	-0.478	0.633
Wanita	163	3.592	0.53356		

Tabel 6: Hasil ANOVA dari tingkat pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan karakteristik usia dan tahun masuk

Variabel	Kelompok	N	Mean	Standar Deviasi	F	p-value
Usia	<=20	149	3.5872	0.54131	0.563	0.640
	21-30	82	3.5427	0.51641		
	31-40	9	3.7778	0.66667		
	41-50	2	3.5000	0.00000		
Tahun Masuk	2012	59	3.7119	0.53501	2.935	0.014
	2011	79	3.5506	0.52863		
	2010	32	3.5000	0.52363		
	2009	31	3.3548	0.58014		
	2008	13	3.4615	0.43116		
	Strata 2	28	3.7679	0.46112		

Tabel 7: Analisis regresi berganda

Variabel	Koefisien beta	Standard error	t	Sig.
Constant	0.401	0.483	0.831	0.407
Knowledge	0.463	0.109	4.257	0.000
Interest	0.250	0.051	4.934	0.000
Perception 1	0.167	0.107	1.558	0.120
Perception 2	0.043	0.075	0.566	0.572
Perception 3	-0.067	0.082	-0.813	0.417
Adjusted R ²		0.206		
F		13.522		
Sig.		0.000		

Investigasi Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap *International Financial Reporting Standards*

ROSITA ADI KRISTANTI
PASKAH IKA NUGROHO*
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract: *This study aims to describe the level of knowledge and students' opinion toward IFRS, either its adoption or its impact, also as an evaluation and consideration for academics and educational institutions related to the integration of IFRS at the curriculum and decisions regarding offering classes about these standards. Samples on this study was taken from undergraduate and graduate accounting students using disproportionate random sampling method. Testing in this study using independent sample t-test, analysis of variance, and multiple regression. The findings of this research are, first, there is no difference between the level of knowledge between male and female students. Second, there is no difference level of knowledge between the age groups. Third, there is a significant difference between the level of knowledge on the groups of school year. Last, it was found that the level of knowledge and interests have an important role to students' decision to take an IFRS class if faculty offered it.*

Keywords: *Age, Gender, Interest, International Financial Reporting Standards, Level Of Knowledge, Perception, , School Year, Students.*

* Corresponding author: paskah@staff.uksw.edu

Pendahuluan

Pelaporan keuangan di Indonesia mulai bergerak dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menuju *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Dalam kurun waktu 2008-2012 konvergensi dilakukan dengan cara mengurangi perbedaan secara bertahap antara PSAK dan IFRS, sehingga pada akhirnya pelaporan keuangan perusahaan publik akan menggunakan IFRS. Ketika hal tersebut terjadi, Indonesia akan bergabung dengan lebih dari 120 negara yang telah memperbolehkan atau mengharuskan penggunaan IFRS untuk pelaporan keuangan.

Pengetahuan akan IFRS penting bagi mahasiswa program studi akuntansi. Menurut James (2011) pengetahuan yang baik akan IFRS akan memberikan berbagai keuntungan seperti: (1) performa yang lebih baik pada ujian sertifikasi *Certified Public Accountant (CPA exam)*, dimana pertanyaan mengenai IFRS akan dimuat pada test tersebut. (2) kesempatan yang lebih besar bekerja pada perusahaan multinasional, baik *accounting firms* maupun *non accounting firms*. Kroll (2009) dalam Bandyopadhyay dan McGee (2012) menyatakan bahwa KAP *big four* bahkan mensyaratkan karyawan yang baru untuk paham IFRS, sedangkan KAP regional juga mengharapkan karyawan tahu tentang standar tersebut pada suatu level tertentu. Lulusan akuntansi yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap IFRS memiliki keunggulan kompetitif saat rekrutmen karyawan.

Mahasiswa akuntansi harus memiliki kemampuan untuk membedakan proses pelaporan keuangan antara *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan standard internasional lainnya (*The National Business Education Association Standards*, 2007). Khususnya di Indonesia mahasiswa akuntansi perlu memahami perbedaan PSAK dan IFRS karena saat ini Indonesia sedang berada pada tahap konvergensi.

Sekolah bisnis, program studi akuntansi maupun fakultas berperan penting dalam pengintegrasian IFRS pada kurikulum. Kurikulum dan metode pembelajaran yang baik akan membantu mahasiswa memahami IFRS. Universitas maupun sekolah bisnis yang menerapkan IFRS dalam kurikulumnya akan meningkatkan kualitas pendidikannya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lulusan yang mereka hasilkan.

Penelitian yang dilakukan James dan Blaszczynski (2010), menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai IFRS rendah, meskipun mereka setuju bahwa pengetahuan tentang IFRS adalah hal yang penting. Mahasiswa tersebut lebih memilih US GAAP daripada IFRS sebagai standar yang sebaiknya digunakan di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia.

Cultural diversity berpengaruh terhadap interpretasi pada IFRS. Pada penelitian yang dilakukan pada mahasiswa universitas di Inggris dan Afrika Selatan terdapat perbedaan signifikan mengenai interpretasi IFRS. Universitas dengan dominasi mahasiswa Eropa lebih dapat menerima prinsip dalam IFRS dan siap dengan adopsi secara global. Sedangkan universitas dengan dominasi mahasiswa Afrika masih harus belajar bahwa transparansi dibutuhkan untuk mengadopsi standar akuntansi global, dan menerapkan profesionalisme dan fleksibilitas yang berkenaan dengan prinsip IFRS (Buys et al., 2012).

Dari latar belakang masalah tersebut, akan dilakukan penelitian serupa dengan responden yang berbeda. Responden akan diambil dari mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW dengan dominasi responden adalah orang Indonesia, dan demografi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran informasi pengetahuan dan opini mahasiswa terhadap IFRS baik adopsi maupun dampaknya, juga sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi akademisi dan institusi pendidikan yang berkaitan dengan pengintegrasian IFRS pada kurikulum dan penawaran kelas tentang IFRS. Maka yang menjadi masalah penelitian adalah bagaimana persepsi mahasiswa prodi

Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW terhadap IFRS. Berdasarkan masalah tersebut maka terdapat persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan *gender*, tahun masuk universitas, dan usia?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS apabila fakultas menawarkannya?

Telaah Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penggunaan IFRS secara Global

IFRS sebagai standar pelaporan keuangan global telah digunakan lebih dari 120 negara dalam satu dekade terakhir. Sebagai contoh Uni Eropa mengadopsi IFRS pada tahun 2005, Rusia dan Jepang mengadopsi tahun 2011.

Epstein (2008), menegaskan bahwa penggunaan IFRS akan mempermudah likuiditas pasar, membuat *cost of capital* lebih rendah, mengurangi biaya transaksi investor, dan mempermudah pembentukan modal maupun arus modal internasional. Pertumbuhan perdagangan internasional, bursa saham asing dan investor maupun kreditor asing menimbulkan keperluan terhadap satu set standar akuntansi global. Untuk menjawab keperluan tersebut, adopsi IFRS pada perusahaan multinasional akan mengurangi biaya untuk mempersiapkan laporan keuangan yang sama dalam standar akuntansi yang berbeda untuk setiap negara.

Adopsi IFRS berdampak pada pengukuran akuntansi. Di Australia, entitas pemerintahan lokal menunjukkan peningkatan signifikan pada liabilitas setelah penerapan IFRS (Ahmed dan Alam, 2012). Hal yang sama terjadi di New Zealand, rata-rata total aset, total liabilitas dan laba bersih lebih tinggi setelah dilakukan adopsi (Kabir et al., 2010). Ini terjadi karena diadakan penilaian ulang menurut nilai pasar yang berlaku. Terzi et al., (2013)

juga menemukan perbedaan pada rasio-rasio keuangan antara sebelum dan sesudah adopsi. Perbedaan tersebut signifikan pada *current ratio*, perputaran piutang, perputaran aset, perputaran aset tetap dan perputaran ekuitas.

Dengan mengadopsi IFRS, profesi akuntan diharuskan menguasai standar baru tersebut, sekolah bisnis maupun universitas harus merevisi kurikulumnya, dan harus dilakukan pelatihan mengenai IFRS bagi karyawan di perusahaan-perusahaan (Fosbre et al., 2009).

Perbedaan Fundamental antara US GAAP dan IFRS

Perbedaan signifikan antara US GAAP dan IFRS adalah bidang pendekatan umum. IFRS didasari prinsip dasar akuntansi (*principle based*) dengan panduan pengaplikasian yang terbatas sedangkan US GAAP didasari aturan (*rule based*) dengan panduan aplikasi yang spesifik (Bohusova dan Nerudova, 2009). Perbedaan selanjutnya ada pada metode arus kos persediaan, IFRS mengizinkan untuk menggunakan metode FIFO (*first in first out*) dan metode rata-rata (*average*) tetapi tidak memperbolehkan penggunaan LIFO (*last in first out*) (Smith, 2012).

Pada laporan keuangan konsolidasi, apabila perusahaan induk dan anak memiliki periode keuangan yang berbeda maka terdapat perbedaan perlakuan terhadap transaksi yang terjadi pada *gap period*. Menurut GAAP, transaksi hanya membutuhkan pengungkapan (*disclosure*) tetapi menurut IFRS diperlukan adanya penyesuaian (*recognition*) (Kaiser, 2012).

Menurut GAAP, PPE (*Property, Plant and Equipment*) dicatat senilai kos akuisisi dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan kerugian akibat *impairment*. GAAP juga melarang adanya revaluasi PPE. Sebaliknya IFRS memperbolehkan dilakukan revaluasi, dan mencatatnya senilai *fair market value* (Persons, 2013).

Perbedaan lain terletak pada pengujian adanya potensi *impairment* pada aset jangka panjang. IFRS mengharuskan penggunaan *discounted cash flow* dari entitas atau *fair value* untuk mengukur recoverabilitas suatu aset. Sebagai pembandingnya, GAAP menggunakan dua langkah pengujian yang diawali dengan penggunaan *discounted cash flow*. Perbedaan-perbedaan mendasar pada model *impairment* dapat mengakibatkan perbedaan nilai apabila dilakukan *impairment* pada suatu aset (Kaiser, 2012).

Akademisi meyakini perbedaan pendekatan tersebut akan mempengaruhi keputusan mereka dalam penentuan kurikulum (Zhu et al., 2011). Di sisi lain investor sebagai pengguna laporan keuangan terbiasa dengan IFRS, tetapi perubahan standar akuntansi tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi. Mereka lebih percaya pada performa perusahaan dan gambaran perusahaan yang biasanya diperlihatkan melalui iklan (Rohini, 2011).

Dampak IFRS pada Kurikulum Akuntansi

Saat ini mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dan auditor dituntut untuk dapat memahami IFRS dan GAAP, sehingga pengintegrasian IFRS pada kurikulum perlu untuk menghasilkan lulusan yang mampu menyusun maupun mengaudit laporan keuangan. Terlebih lagi di Indonesia termasuk dalam negara dengan ekonomi berkembang. Pada beberapa tahun terakhir, negara dengan ekonomi berkembang menjadi peluang investasi yang penting dan implementasi IFRS menjadi sarana penarik investor baru (Albu et al., 2012).

Integrasi IFRS pada kurikulum merupakan suatu keharusan. Sebagian besar universitas di Amerika Serikat mengintegrasikan IFRS pada kurikulum pengajaran mereka, meliputi materi pada *introductory financial accounting*, *intermediate financial accounting* dan *advanced financial accounting* (Weiss, 2011). Di Indonesia konvergensi dapat dilakukan

pada seluruh grade akuntansi keuangan, manajemen keuangan, dan analisis laporan keuangan.

Akademisi bidang akuntansi harus mampu mengajarkan IFRS sebaik mereka mengajarkan tentang GAAP, tetapi terdapat hambatan karena mereka tidak terlatih tentang IFRS selama bersekolah dan opini mereka yang menganggap IFRS tidak lebih baik dari GAAP (Miller dan Becker, 2010). Akademisi bahkan tidak terlalu menaruh simpati pada proses penyusunan IFRS. Setelah 55 standar dipublikasikan hingga akhir tahun 2008, IASB hanya menerima 12 surat komentar dari akademisi di Amerika Serikat (Larson et al., 2011). Akademisi berpengaruh besar dalam pengintegrasian IFRS pada kurikulum, yang nantinya akan mempengaruhi kualitas pendidikan di universitas. Bagaimanapun IFRS adalah konsep yang baru, yang membutuhkan implementasi secara tepat.

Perumusan Hipotesis

Di Hong Kong, penelitian yang dilakukan pada mahasiswa akuntansi tahun ketiga menunjukkan bahwa gender berpengaruh secara signifikan terhadap performa mahasiswa akuntansi dalam studi pada tingkat strata 1 (Ho, 2008). Menurut Stivers dan Onifade (2011), perempuan memiliki *technical skill* dalam bidang akuntansi lebih baik daripada laki-laki, sehingga terdapat kemungkinan lebih tinggi untuk lebih mudah mengadopsi IFRS sebagai standar yang baru. Cudia (2009) melakukan penelitian tentang performa mahasiswa pada matakuliah akuntansi manajemen. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan lebih teliti sehingga memiliki nilai yang lebih baik dari pada mahasiswa laki-laki, walaupun IQ pada mahasiswa laki-laki memiliki rata-rata yang lebih tinggi. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap IFRS.*

Penelitian yang dilakukan Koh & Koh (1999) menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh signifikan terhadap performa di bidang akuntansi. Terdapat koefisien negatif yang mengindikasikan bahwa mahasiswa dengan usia yang lebih muda memiliki performa yang lebih baik. Akan tetapi Kim (2011) membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan kelompok usia. Dari hasil yang tidak konsisten tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H₂: *Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap IFRS berdasarkan usia.*

Kim (2011) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan berkaitan dengan pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan tahun masuk universitas. Sebaliknya, di UKSW pengintegrasian IFRS pada materi akuntansi keuangan baru dimulai pada semester genap tahun ajaran 2010/2011, sehingga dapat diasumsikan mahasiswa dengan tahun masuk 2010,2011 dan 2012 mendapat materi yang bermuatan IFRS lebih banyak dibanding dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dapat mendorong perbedaan tingkat pengetahuan berdasarkan tahun masuk universitas, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap IFRS berdasarkan tahun masuk universitas.*

Kim (2011) melakukan penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan mahasiswa mengambil kelas tentang IFRS apabila universitas menawarkannya. Pertama, ditemukan pengaruh negatif mengenai tingkat pengetahuan terhadap keinginan mengambil kelas. Mahasiswa yang merasa telah menguasai materi tentunya merasa tidak perlu mengambil kelas khusus. Kedua, minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan mengambil kelas. Semakin tinggi minat semakin tinggi pula rasa ingin tahu, yang pada akhirnya dilakukan pengambilan kelas sebagai salah satu cara untuk memenuhi

keingintahuan. Ketiga, ditemukan persepsi mengenai pengaruh standar tersebut pada kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan pada keputusan pengambilan kelas. Sebaliknya, ditemukan pengaruh positif pada persepsi mengenai pengaruh IFRS pada kinerja operasi dan *stakeholder*. Ketika mahasiswa menyadari bahwa standar tersebut memiliki banyak pengaruh, maka terdapat dorongan untuk menguasainya. Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_{4a}: *Tingkat pengetahuan berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

H_{4b}: *Minat pada IFRS berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

H_{4c}: *Persepsi mengenai pengaruh IFRS terhadap kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

H_{4d}: *Persepsi mengenai pengaruh IFRS terhadap kinerja operasi berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

H_{4e}: *Persepsi mengenai pengaruh IFRS terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS.*

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *disproportionate stratified random sampling* yaitu mahasiswa secara acak diambil dari kategori-kategori tertentu berdasarkan usia, tahun masuk, dan gender tanpa memperhatikan proporsi dari setiap kategori tersebut. Hal tersebut didasarkan pada asumsi mahasiswa angkatan 2008 dan 2009 sebagian telah menyelesaikan studinya.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui penelitian survey yaitu melalui penyebaran kuesioner yang diambil dari instrumen yang dikembangkan oleh Kim (2011) dalam "*Investigating Perceptions Concerning the Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) Among College Students*". Pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tersebut akan terdiri dari 3 bagian, yaitu: data diri para responden, tingkat pengetahuan terhadap IFRS, dan persepsi terhadap adopsi dari IFRS. Untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa diminta untuk memberikan penilaian pada prinsip-prinsip yang ada dalam IFRS. Selanjutnya untuk menilai persepsi akan disediakan pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala likert 1-5 dengan "1" menunjukkan "sangat tidak setuju", "2" menunjukkan "tidak setuju", "3" menunjukkan "netral", "4" menunjukkan "setuju" dan "5" menunjukkan "sangat setuju".

Teknik Analisis

Pertama dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk melihat apakah data yang telah didapatkan valid dan handal. Dalam menguji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6 maka data bisa dikatakan reliabel. Sedangkan uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara indikator empirik dan total skor dari indikator empirik.

Kedua, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui demografi responden berdasarkan karakteristik gender, usia dan tahun masuk. Pada bagian ini akan dihitung frekuensi dan persentase responden.

Ketiga, digunakan uji beda menggunakan T-test untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan tingkat pengetahuan berdasarkan gender. Uji beda dilakukan pada tingkat α 0.05.

Untuk mengukur perbedaan varians tingkat pengetahuan pada karakteristik dengan beberapa populasi digunakan ANOVA (*Analysis of Variance*). ANOVA dilakukan pada karakteristik usia dan tahun masuk. ANOVA juga diuji pada tingkat α 0.05.

Terakhir akan dilakukan uji asumsi klasik dan regresi berganda. Uji asumsi klasik meliputi multikolinearitas, heterokedastisitas dan normalitas residu. Uji regresi berganda bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS apabila fakultas menyediakannya. Adapun model regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{INTENT} = \beta_0 + \beta_1 \text{KNOWLEDGE} + \beta_2 \text{INTEREST} + \beta_3 \text{PERCEPTION1} + \beta_4 \text{PERCEPTION2} + \beta_5 \text{PERCEPTION3} + \varepsilon$$

Keterangan variabel:

- 1) INTENT: variabel yang menunjukkan keinginan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS.
- 2) KNOWLEDGE: tingkat pengetahuan terhadap IFRS yang diukur berdasarkan mahasiswa mempersepsikan tingkat pengetahuannya sekarang.
- 3) INTEREST: variabel yang menunjukkan minat mahasiswa terhadap IFRS.
- 4) PERCEPTION 1: persepsi mahasiswa tentang apakah IFRS memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
- 5) PERCEPTION 2: persepsi mahasiswa tentang apakah IFRS memiliki pengaruh terhadap kinerja operasi.
- 6) PERCEPTION 3: persepsi mahasiswa tentang apakah IFRS mempengaruhi pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor dan pemegang saham.

Analisis dan Pembahasan

Deskriptif Statistik

Sampel pada penelitian ini berjumlah 242 orang. Pada Tabel 1 ditunjukkan mengenai frekuensi dan persentase responden berdasarkan demografi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa responden didominasi oleh wanita 67.4% dan sisanya adalah pria 32.6%. Berdasarkan usia, 61.6% responden berusia 20 tahun atau kurang, 33.9% responden berusia 21-30 tahun, 3.7% responden berusia 31-40 tahun, dan sisanya sebesar 0.8% berusia lebih dari 40 tahun.

Tabel 2 menjelaskan tentang karakteristik demografi responden berdasarkan ukuran dan penyebaran. Pada karakteristik berdasarkan gender, ditemukan mean sebesar 1.67, ini artinya sebagian besar responden adalah wanita. Berdasarkan karakteristik usia nilai minimum adalah 1 dan maksimum 4 berarti responden ada pada kelompok usia dibawah 20 tahun hingga kelompok 41-50 tahun. Mean yang dihasilkan adalah 1.44, maka dapat disimpulkan sebagian besar responden berada pada usia di bawah 30 tahun. Menurut karakteristik tahun masuk ditemukan nilai maksimal 6 yang berarti terdapat responden yang berasal dari strata 2. Mean yang didapat adalah 2.77 sehingga dominasi responden berada pada jenjang strata 1.

Persepsi Mahasiswa Mengenai Perbedaan IFRS dan GAAP

Responden diberikan beberapa pernyataan yang menggambarkan perbedaan dari IFRS dan GAAP. Pertama, responden diminta untuk menandai perbedaan yang mereka ketahui. Tabel 3 menjelaskan tentang frekuensi responden yang mengetahui prinsip-prinsip tersebut. LIFO tidak digunakan lagi menjadi perbedaan yang paling banyak dimengerti (91.3%), selanjutnya disusul oleh *principle based accounting* (74.4%), *impairment* (69%), *fair market*

value (52.5%) dan yang paling sedikit diketahui adalah perbedaan mengenai periode keuangan (49.2%).

Kedua, responden diminta untuk mengurutkan perbedaan yang menurutnya paling penting hingga paling tidak penting. Tabel 4 menunjukkan mean setiap poin perbedaan, mean yang paling kecil menunjukkan yang paling penting sebaliknya yang paling besar adalah yang paling tidak penting. *Principle based accounting* menjadi poin yang paling penting dengan mean 1.75, selanjutnya *fair market value* dengan mean 2.95, periode keuangan dengan mean 3.03, impairment dengan mean 3.55, terakhir LIFO tidak digunakan lagi dengan mean 3.76.

T-test dan ANOVA (*Analysis of Variance*)

Untuk membandingkan tingkat pengetahuan pada dua populasi yaitu karakteristik gender digunakan metode t-test, dan untuk melihat perbedaan varians tingkat pengetahuan untuk variabel usia dan tahun masuk digunakan ANOVA (*Analysis of Variance*). Untuk kedua metode tersebut dibandingkan berdasarkan rata-rata skor setiap populasi juga dilihat melalui tingkat signifikansi sehingga dapat diketahui apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5, ditemukan hasil rata-rata tingkat pengetahuan pada pria adalah 3.557 sedikit lebih rendah daripada wanita yang hanya sebesar 3.592. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan ($p\text{-value} > 0.05$). Hasil tersebut sekaligus menolak H_1 dimana tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap IFRS berdasarkan gender.

Penelitian ini memiliki hasil yang tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ho (2008), Stivers dan Onifade (2011) dan Cudia (2009). Hal ini diperkuat dengan membandingkan komentar yang diberikan oleh responden pria maupun wanita. Komentar

yang diberikan hampir sama yaitu pemahaman IFRS adalah hal yang penting untuk mahasiswa akuntansi. Kesamaan tingkat pengetahuan ini kemungkinan dipengaruhi oleh input pengetahuan terhadap IFRS dalam porsi yang sama, karena baik pria dan wanita diwajibkan mengambil kelas akuntansi keuangan yang sama.

Tabel 6 menunjukkan hasil ANOVA untuk variabel usia dan tahun masuk. Berdasarkan usia ditemukan tingkat pengetahuan tertinggi sebesar 3.5872 ada pada kelompok usia 20 tahun ke bawah, dan tingkat pengetahuan terendah pada kelompok usia 41-50 tahun sebesar 3.5000. Pada uji tersebut ditemukan nilai $F=0.563$ dan $p\text{-value}>0.05$, sehingga varians antar populasi dianggap sama. Hasil tersebut sekaligus menolak H_2 , dimana tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antar kelompok usia. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Kim (2011).

Pada variabel tahun masuk ditemukan perbedaan tingkat pengetahuan yang signifikan ($p\text{-value}<0.05$), di mana rata-rata tingkat pengetahuan yang paling tinggi berada pada mahasiswa strata 2 sebesar 3.7679 kemudian yang terendah ada pada mahasiswa angkatan 2009 sebesar 3.3548 disusul angkatan 2008 sebesar 3.4615. Hasil ANOVA ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya dan sekaligus menerima H_3 . Hal ini dikarenakan pada masa angkatan 2008 dan 2009 berkuliah, pengajar tidak banyak menyinggung IFRS. Sebagai akibatnya, angkatan 2008 dan 2009 tidak memiliki kemampuan yang cukup mengenai standar ini. Seorang responden dari angkatan 2009 bahkan berpendapat bahwa dia dan beberapa temannya yang akan lulus sering mendengar tentang IFRS. Akan tetapi latar belakang, implementasi, perbedaan dengan standar sebelumnya dan hal-hal lain yang lebih dalam belum mereka ketahui secara penuh. Hal ini mengakibatkan kekuatiran ketika mahasiswa tersebut berharap akan bekerja pada *multinational company* atau *accounting firm*.

Regresi Berganda

Untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS dilakukan analisis regresi berganda. Selanjutnya untuk menguji hipotesis (H_4) disusunlah model sebagai berikut:

$$\text{INTENT} = \beta_0 + \beta_1 \text{KNOWLEDGE} + \beta_2 \text{INTEREST} + \beta_3 \text{PERCEPTION1} + \beta_4 \text{PERCEPTION2} + \beta_5 \text{PERCEPTION3} + \varepsilon$$

Tabel 7 menunjukkan hasil analisis regresi berganda. Pada variabel KNOWLEDGE ditemukan nilai $t=4.257$ dan $p\text{-value}<0.05$, temuan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya sekaligus menerima H_{4a} . Artinya tingkat pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan untuk mengambil kelas tentang IFRS. Hasil ini didukung oleh responden yang menyatakan bahwa ketika seorang mahasiswa merasa menguasai materi IFRS maka akan timbul rasa percaya diri bahwa mahasiswa tersebut dapat memiliki performa yang baik apabila mengambil kelas mengenai standar tersebut sehingga berpeluang mendapat nilai yang baik.

Hal ini juga berlaku untuk variabel INTEREST, didapat nilai $t=4.934$ dan $p\text{-value}<0.05$. Minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan mengambil kelas. Semakin tinggi minat mahasiswa terhadap IFRS semakin tinggi keinginan mahasiswa mengambil kelas terhadap IFRS. Hasil statistik menunjukkan konsistensi terhadap Kim (2011) dan menerima H_{4b} . Minat menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan tersebut, mahasiswa yang tertarik akan memiliki keinginan belajar yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki minat.

Persepsi mahasiswa mengenai dampak IFRS terhadap kinerja keuangan (PERCEPTION1) berpengaruh positif terhadap keinginan mengambil kelas ($\beta=0.167$), namun pengaruh ini tidak signifikan ($t=1.558$ dan $p\text{-value}>0.05$). Pernyataan ini tidak konsisten dengan penelitian Kim (2011) dan menolak H_{4c} . Selanjutnya ditemukan nilai

$\beta=0.043$ pada variabel PERCEPTION2, sehingga setiap kenaikan 1 level dari persepsi tentang kinerja finansial akan mengakibatkan kenaikan sebesar 4.3% pada keinginan untuk mengambil kelas terhadap IFRS, kenaikan tersebut dianggap tidak signifikan ($t=0.566$ dan $p\text{-value}>0.05$). Hasil ini konsisten dengan penelitian Kim (2011) dan menolak H_{4d} . Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh variabel PERCEPTION3, ditemukan koefisien negatif pada variabel ini ($\beta= -0.067$). Secara parsial variabel persepsi mahasiswa mengenai pengaruh terhadap *stakeholder* tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Kim (2011) dan menolak H_{4d} . Pada ketiga variabel PERCEPTION didapat hasil yang tidak signifikan secara parsial. Meskipun mahasiswa tahu akan pengaruh yang ditimbulkan akibat konvergensi standar yang baru, tidak menjadikan motivasi untuk mengambil kelas. Kemungkinan hal ini terjadi karena mahasiswa kurang peduli dengan pengaruh IFRS di luar ranah pendidikan akan membawa dampak besar pada mahasiswa.

Menurut ANOVA dalam regresi berganda ditemukan nilai $F=13.522$ dan $p\text{-value}=0.00$, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel KNOWLEDGE, INTEREST, PERCEPTION1, PERCEPTION2 dan PERCEPTION3 berpengaruh signifikan terhadap keinginan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS. Pada persamaan regresi ini, ditemukan nilai Adjusted R^2 sebesar 0.206. ini berarti 20,6% keinginan mahasiswa untuk mengambil kelas tentang IFRS dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas. Sedangkan 79,4% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Kesimpulan

Penelitian ini telah melihat bagaimana persepsi dan kondisi tingkat pengetahuan mahasiswa FEB UKSW terhadap IFRS. Pertama, ditemukan tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara mahasiswa pria dan wanita. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya dan membatalkan hipotesis (H_1). Kedua, juga tidak ditemukan perbedaan tingkat

pengetahuan antara kelompok umur sehingga menolak hipotesis (H_2). Ketiga, ditemukan perbedaan tingkat pengetahuan yang signifikan pada kelompok tahun masuk. Hasil ini menjadikan hipotesis (H_3) terbukti. Menurut mean tiap angkatan, angkatan 2008 dan 2009 memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah daripada angkatan setelahnya. Terakhir, ditemukan bahwa tingkat pengetahuan dan minat memiliki peran penting terhadap keputusan mahasiswa mengambil kelas tentang IFRS apabila fakultas menawarkannya.

Implikasi

Dengan melihat hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan informasi sebagai pertimbangan dan evaluasi terkait kebijakan kurikulum maupun penawaran kelas mengenai standar tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat batasan yang ditemukan. Pertama, dari sisi responden dengan angkatan 2008 dan 2009 sangat minim jumlahnya, dikarenakan telah banyak yang lulus dan tidak mengikuti kelas perkuliahan lagi. Hal ini menyebabkan sampel dari angkatan tersebut tidak proporsional dan kurang representatif. Kedua, pada pengukuran tingkat pengetahuan dan persepsi tentang IFRS digunakan kuesioner yang hanya berupa pernyataan, sehingga tidak memiliki patokan yang jelas.

Saran Untuk Penelitian Mendatang

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan saran bagi penelitian-penelitian mendatang. Pertama, sebaiknya bila dilakukan penelitian mengenai persepsi dan pengukuran tingkat pengetahuan dilakukan dengan metode wawancara dan tes karena hasilnya lebih reliabel. Kedua, sulit untuk menyamaratakan persepsi mahasiswa akuntansi dengan hanya

mengambil sampel dari satu universitas. Sehingga ada baiknya penelitian mendatang menggunakan sampel dari beberapa universitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, K., and M. Alam. 2012. The Effect of IFRS Adoption on the Financial Reports of Local Government Entities, *Australasian Accounting Business & Finance Journal* 6(3): 109-120.

Albu, N., C. N. Albu., and M. M. Girbina. 2012. Educating Accounting Students in an Emerging Market Economy – An Analysis of the Importance of Stereotypes in Teaching IFRS, *International Journal of Academic Research* 4(3): 51-57.

Bandyopadhyay, J., and P. F. McGee. 2012. A Progress Report: IFRS-U.S. GAAP Convergence and Its Curriculum Impact, *Advances in Competitiveness Research* 20(1/2): 78-89.

Bohusova, H., and D. Nerudova. 2009. US GAAP and IFRS Convergence in the Area of Revenue Recognition, *Economics & Management* : 12-19.

Buys, P. W., D. Schutte., and P. Andrikopoulos. 2012. Understanding Accounting Students Cultural Diversity and Its Implication of the Interpretation of IFRS, *International Business & Economics Research Journal* 11(4): 451-466.

Cohen, S., and S. Karatzimas. 2012. Has IFRS Adoption Affected Management Accounting System? Empirical Evidence from Greece, *Social Science Research Network* Maret.

Cudia, C. P. 2009. Factors That Influence The Final Grades of Students in Managerial Accounting Course in De La Salle University, *Journal of International Business Research* 8(1): 39-59.

Epstein, B. J. 2008. The Economic Effect of IFRS Adoption, *The CPA Journal* : 26-31.

Fosbre, A. B., E. M. Kraft., and P. B. Fosbre. 2009. The Globalization of Accounting Standards: IFRS Versus US GAAP, *Global Journal of Business Research* 3(1): 61-71.

Girbina, M., M. Minu, S. Bunea., and M. Sacarin. 2012. Perceptions of Prepares from Romanian Banks Regarding IFRS Application, *Accounting and Management Information Systems* 11(22): 191-208.

Himawan, R. 2010. *Persepsi Analisis Laporan Keuangan pada Perusahaan Sekuritas terhadap Penerapan IFRS Secara Penuh*. (Tidak Dipublikasikan).

Ho, H. 2008. Spialing Effect of Prior Knowledge in Accounting Studies, *The International Journal of Learning* 15(4): 25-29.

Ionascu, M., and I. Ionascu. 2012. The Use of Accounting Information by Financial Analysts in Emergent Markets: The Case of Romania, *Accounting and Management Information Systems* 11(2): 174-186.

James, M. L., and C. Blaszczyński. 2010. Accounting Students Perceptions of International Financial Reporting Standards, *Journal for Global Business Education* 10: 37-49.

James, M. L. 2011. Integrating International Financial Reporting Standard Into Accounting Curriculum : Strategies, Benefits and Challenges, *Academy of Educational Leadership Journal* 15: 127-141.

Kabir, M. H., F. Laswad., and M. A. Islam. 2010. Impact of IFRS in New Zealand on Accounts and Earning Quality, *Australian Accounting Review* 20(4): 343-357.

Larson, R. K., P. J. Herz, S. Y. Kenny. 2011. Academics and the Development of IFRS: An Invitation to Participate, *Journal of International Accounting Research* 10(2): 97-103.

Kaiser, J. G. 2012. IFRS and US GAAP: Similarities and Differences, *PricewaterhouseCoopers LLP*.

Kim, H. P. 2011. *Investigating Perceptions Concerning the Adoption of International financial Reporting Standards (IFRS) Among College Students*. Thesis. Texas Tech University.

Koh, M. Y., and H. C. Koh. 1999. The Determinants of Performance in an Accountancy Degree Programme, *Accounting Edcation* 8(1): 13-29.

Miller, W. F., and D'A. A. Becker. 2010. Why Are Accounting Professors Hesitant to Implement IFRS?, *The CPA Journal* August: 63-67.

National Business Education Association. 2007. *National standards for business education: What America's students should know and be able to do in business*. Reston, VA: Author.

Persons, O. 2013. A Principle-Based Case for Teaching International Financial Reporting Standards (IFRS), *Global Conference on Business and Finance Proceedings* 8(1): 154-157.

Rohini, D. 2011. Are Indian Investor Aware of IFRS Standards? – A Study on the Investor's Attitude Toward the Implementation of IFRS in India, *International Journal OF Global Business* 4(2): 28-40.

Smith, L. M. 2012. IFRS and U.S. GAAP: Some Key Differences Accountants Should Know, *Management Accounting Quarterly* 14(1): 19-26.

Stivers, B. P., and E. Onifade. 2011. Knowledge, Skills, and Abilities for Accounting: An Investigation of Student Perceptions, *Review of Business Research* 11(1): 46-56.

Terzi, S., R. Oktem., and I. K. Sen. 2013. Impact of Adopting International Financial Reporting Standards: Empirical Evidence from Turkey, *International Business Research* 6(4): 55-66.

Weiss, J. M. 2011. Implementing IFRS Curriculum into Accounting Programs, *The CPA Journal* April: 62-63.

Zhu, H., K. T. Rich, A. R. Michenzi., and J. Cherubini. 2011. *Issues in Accounting Education* 26(4): 725-750.

Tabel 1: Frekuensi Responden

Variabel	Kelompok	Frekuensi	Persentase
Gender	Pria	79	32.6
	Wanita	163	67.4
	TOTAL	242	100
Usia	≤ 20 tahun	149	61.6
	21-30 tahun	82	33.9
	31-40 tahun	9	3.7
	41-50 tahun	2	0.8
	TOTAL	242	100
Tahun Masuk	2008	13	5.4
	2009	31	12.8
	2010	32	13.2
	2011	79	32.6
	2012	59	24.4
	Strata 2	28	11.6
	TOTAL	242	100.0

Tabel 2: Deskriptif Statistik

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Gender	1	2	1.67	0.470
Usia	1	4	1.44	0.610
Tahun Masuk	1	6	2.77	1.626

Keterangan:

- 1) Gender: Pria=1 dan Wanita=2
- 2) Usia: ≤20 tahun=1, 21-30 tahun=2, 31-40 tahun=3 dan ≥41 tahun=4
- 3) Tahun Masuk: 2012=1, 2011=2, 2010=3, 2009=4, 2008=5 dan Strata 2=6

Tabel 3: Pengetahuan mahasiswa tentang perbedaan IFRS dan GAAP

Perbedaan	Frekuensi	Persentase
LIFO tidak digunakan lagi	221	91.3
Fair Market Value	127	52.5
Periode Keuangan	119	49.2

Principle Based Accounting	180	74.4
Impairment	167	69.0

Tabel 4: Persepsi mahasiswa tentang perbedaan IFRS dan GAAP yang paling penting

Perbedaan	Mean
LIFO tidak digunakan lagi	3.76
Fair Market Value	2.95
Periode Keuangan	3.03
Principle Based Accounting	1.75
Impairment	3.55

Tabel 5: T-test tingkat pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan variabel gender

Gender	N	Mean	Standar Deviasi	t	p-value
Pria	79	3.557	0.53701	-0.478	0.633
Wanita	163	3.592	0.53356		

Tabel 6: Hasil ANOVA dari tingkat pengetahuan terhadap IFRS berdasarkan karakteristik usia dan tahun masuk

Variabel	Kelompok	N	Mean	Standar Deviasi	F	p-value
Usia	<=20	149	3.5872	0.54131	0.563	0.640
	21-30	82	3.5427	0.51641		
	31-40	9	3.7778	0.66667		
	41-50	2	3.5000	0.00000		
Tahun Masuk	2012	59	3.7119	0.53501	2.935	0.014
	2011	79	3.5506	0.52863		
	2010	32	3.5000	0.52363		
	2009	31	3.3548	0.58014		
	2008	13	3.4615	0.43116		
	Strata 2	28	3.7679	0.46112		

Tabel 7: Analisis regresi berganda

Variabel	Koefisien beta	Standard error	t	Sig.
Constant	0.401	0.483	0.831	0.407
Knowledge	0.463	0.109	4.257	0.000
Interest	0.250	0.051	4.934	0.000
Perception 1	0.167	0.107	1.558	0.120
Perception 2	0.043	0.075	0.566	0.572
Perception 3	-0.067	0.082	-0.813	0.417
Adjusted R ²		0.206		
F		13.522		
Sig.		0.000		

Dampak Adopsi IFRS Pada PSAK terhadap Relevansi Nilai *Goodwill*: Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia

*NICO ISWARAPUTRA**

ARIA FARAHMITA

Universitas Indonesia

Abstract: *This research is aimed to identify the value relevance of goodwill in Indonesia and how the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) affects the value relevance of goodwill. The important changes from PSAK 19 (2010 revision) about intangible assets were the elimination of goodwill amortization and the obligation of regular goodwill impairment test at least once a year. The research uses non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange from 2009-2011 as research samples. The result shows goodwill value, which is regressed using the Ohlson model (1995), has significant negative association with the firm stock market price. The result also indicates that the value relevance of goodwill is increased after PSAK 19 adopted IAS 38.*

Keywords: *Goodwill; Intangible Asset; Value Relevance*

* Corresponding author: nico.iswaraputra@hotmail.com

1. Pendahuluan

Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari informasi-informasi akuntansi disusun dengan tujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan mengevaluasi kinerja perusahaan, mengestimasi kemampuan perusahaan menciptakan nilai di masa depan dan menghasilkan sebuah keputusan bisnis. Salah satu komponen informasi akuntansi adalah informasi aset takberwujud. Pertumbuhan sektor jasa, perkembangan inovasi teknologi informasi yang intensif serta peningkatan jumlah dan besar merger dan akuisisi internasional telah membuat dampak akuntansi untuk aset takberwujud menjadi sangat signifikan (Lev, 2001). Aset takberwujud merupakan faktor yang penting bagi perusahaan karena aset takberwujud memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan seperti penghematan biaya operasional, efisiensi produksi dan peningkatan *market share*. Ribeiro dan Tironi (2006) menyatakan bahwa dalam 25 tahun terakhir aset takberwujud telah melampaui aset berwujud sebagai penentu nilai perusahaan yang paling relevan dalam lingkungan yang kompetitif.

Lev dan Zarowin (1999) menyatakan beberapa dekade terakhir kegunaan informasi laba, arus kas dan nilai buku ekuitas memburuk. Kondisi tersebut terjadi karena perubahan operasional dan kondisi ekonomis perusahaan, sebagai dampak dari inovasi, kompetisi, deregulasi dan lingkungan bisnis yang berubah cepat, tidak cukup tercermin dalam sistem atau standar laporan keuangan. Salah satu indikasi perubahan signifikan dari lingkungan bisnis adalah semakin banyak proses *merger* dan akuisisi pada akhir 1990-an yang berdampak pada semakin tinggi dan materialnya nilai *goodwill* (Riedl, 2012). Terkait *goodwill*, salah satu tujuan IASB menerbitkan IAS 38 tentang aset takberwujud adalah untuk menyelesaikan kontroversi mengenai umur ekonomis dan amortisasi *goodwill*. Sebelum IAS 38 terbit dan diadopsi, *goodwill* diklasifikasikan sebagai aset takberwujud dengan umur terbatas dan

diamortisasi selama umur ekonomis lima tahun dan dapat diperpanjang hingga dua puluh tahun dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dipandang kurang tepat karena *goodwill* bukan aset yang terus terbuang secara konstan, melainkan aset yang diharapkan dapat mempertahankan nilainya (Hadjiloucas dan Winter, 2005). Penurunan nilai *goodwill* (*impairment*) hanya terjadi ketika nilai wajar atau nilai pakai dari aset bersih (*net asset*) lebih kecil daripada nilai tercatat di laporan posisi keuangan perusahaan.

Alasan penghapusan amortisasi *goodwill* dijelaskan oleh *Financial Accounting Standard Board* (2001) yang menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan tidak mempertimbangkan beban amortisasi *goodwill* sebagai informasi yang berguna dalam menganalisis alternatif investasi. Amortisasi *goodwill* tidak bisa dihubungkan secara langsung dengan manfaat ekonomis yang diberikan aset perusahaan pada periode akuntansi berjalan. Dibandingkan dengan informasi amortisasi *goodwill*, investor dan pengguna laporan keuangan lebih memperhatikan informasi rugi penurunan nilai (*impairment*) *goodwill* karena perusahaan dapat memberikan alasan yang logis, wajar dan dapat diandalkan terkait penurunan kemampuan menghasilkan nilai perusahaan di masa depan. Investor menangkap sinyal-sinyal penurunan kinerja perusahaan di masa depan melalui pengungkapan rugi penurunan nilai *goodwill* saat mengevaluasi dan membuat keputusan ekonomis terkait perusahaan (Horton dan Serafeim, 2010).

Penelitian relevansi nilai aset takberwujud yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2010) menyimpulkan bahwa laba perusahaan, *goodwill* dan aset takberwujud lain memiliki hubungan positif yang signifikan dengan harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa investor mempertimbangkan informasi aset takberwujud dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan menciptakan nilai di masa depan. Oliveira et al. (2010) meneliti lebih lanjut mengenai perubahan relevansi nilai aset takberwujud sebelum dan sesudah GAAP Portugal mengadopsi

IFRS di tahun 2005. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa relevansi nilai aset takberwujud secara keseluruhan tidak banyak berubah setelah adopsi IFRS. Tetapi ketika komponen aset takberwujud diteliti secara terpisah (dengan subkelas *goodwill*, properti intelektual, biaya penelitian dan pengembangan, dan aset takberwujud lain), relevansi nilai informasi *goodwill* menjadi lebih tinggi setelah GAAP Portugal mengadopsi IFRS. Oliveira et al. berargumen bahwa relevansi nilai *goodwill* meningkat karena IAS 38 tidak memberlakukan sistem amortisasi *goodwill* yang informasinya tidak relevan bagi investor dan lebih mendorong perusahaan untuk melakukan uji penurunan nilai secara periodik karena informasi penurunan nilai lebih relevan dan dapat diandalkan bagi investor.

Penelitian dalam jurnal ini akan menguji bagaimana relevansi nilai informasi *goodwill* di Indonesia dan bagaimana pengaruh adopsi IAS 38 pada PSAK 19 revisi 2010 tentang aset takberwujud terhadap relevansi nilai *goodwill*. Pengujian hipotesis menggunakan model Ohlson (1995) yang telah dimodifikasi oleh Oliveira et al. (2010) dimana harga pasar saham/ekuitas dapat dijelaskan sebagai fungsi linear dari laba, nilai buku ekuitas dan informasi *goodwill*. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 80 perusahaan nonkeuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian ini akan memberikan bukti yang empiris mengenai relevansi nilai *goodwill* di Indonesia, memberikan tambahan pengetahuan kepada investor mengenai informasi *goodwill* sebagai faktor yang menentukan kemampuan perusahaan menciptakan nilai di masa depan dan memberikan bukti empiris bagaimana dampak adopsi IAS 38 pada PSAK 19 revisi 2010 terhadap kualitas informasi *goodwill*.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Penelitian Relevansi Nilai

Penelitian relevansi nilai dijelaskan Barth, Beaver, dan Landsman (2001), “*Value relevance research examines the association between accounting amounts and equity market values*” (p. 95). Definisi lebih lanjut oleh Holthausen dan Watts (2001), “*Value-relevance studies determine whether an accounting number is useful for valuing the firm by investigating whether the accounting number is associated with stock prices*” (p. 28). Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian relevansi nilai merupakan penelitian yang bertujuan untuk memeriksa dan mengukur hubungan atau asosiasi antara nilai pasar ekuitas suatu perusahaan dengan informasi akuntansi tertentu di dalam laporan keuangan perusahaan. Agar suatu informasi keuangan memiliki relevansi nilai, angka akuntansi harus berhubungan signifikan dengan nilai perusahaan. Jika tidak ada hubungan atau asosiasi yang signifikan antara angka akuntansi dengan nilai perusahaan maka informasi akuntansi tidak dapat dikatakan memiliki relevansi nilai dan dapat disimpulkan juga bahwa laporan keuangan tidak dapat memenuhi tujuan untuk mencapai kualitas fundamental relevan (Holthausen dan Watts, 2001).

Model penelitian relevansi nilai yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model *Ohlson* (1995) yang menyatakan harga pasar saham/ekuitas dapat dijelaskan sebagai fungsi linear dari pendapatan dan nilai buku ekuitas, memperhatikan model valuasi dividen dan akuntansi surplus bersih (perubahan nilai buku ekuitas sama dengan laba dikurang dividen ditambah/dikurang transaksi modal) (Holthausen dan Watts, 2001). Namun valuasi dan asumsi yang digunakan hanya merupakan alat. Penelitian relevansi nilai juga

membutuhkan argumen akuntansi kontekstual untuk memprediksi bagaimana hubungan antara variabel dan nilai pasar ekuitas (Beaver, 2002).

2.2 *Goodwill* dan Revisi PSAK 19

Definisi *goodwill* berdasarkan PSAK 22 (revisi 2009) adalah aset yang mencerminkan manfaat ekonomis masa depan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Standar akuntansi untuk aset takberwujud dan *goodwill* sudah diatur sejak PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) 1984 di Bab IV pasal 5. Peraturan tersebut kemudian direvisi menjadi PSAK 19 revisi tahun 1994, direvisi kembali menjadi PSAK nomor 19 revisi 2000 dan revisi terakhir menjadi PSAK 19 revisi 2010 yang telah mengadopsi IAS 38 (Iskandar, 2011). *Goodwill* berdasarkan PSAK 19 revisi 2010 diklasifikasikan sebagai aset takberwujud dengan umur takterbatas. Konsekuensi dari reklasifikasi tersebut adalah dihapusnya amortisasi *goodwill*. Perubahan perlakuan akuntansi ini dikarenakan *goodwill* dipandang bukan aset yang terus terbuang secara konstan, melainkan aset yang diharapkan dapat mempertahankan nilainya (Hadjiloucas dan Winter, 2005). Selain itu FASB (2001) menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan tidak mempertimbangkan beban amortisasi *goodwill* sebagai informasi yang berguna dalam menganalisis alternatif investasi. Tabel 1 meringkas perubahan penting perlakuan akuntansi PSAK sebelum mengadopsi dan setelah mengadopsi IAS/IFRS terkait *goodwill*.

===== Tabel 1 =====

2.3 Penelitian Terdahulu

Kompetisi bisnis yang intensif, pemakaian teknologi informasi yang luas dan penemuan inovasi-inovasi baru dalam teknologi informasi telah membuat aset takberwujud menjadi determinan utama nilai perusahaan (Lev, 2001). Perubahan lingkungan bisnis ditandai dengan semakin banyaknya langkah *merger* dan akuisisi yang membuat informasi *goodwill* menjadi material bagi pengambilan keputusan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa informasi *goodwill* memiliki relevansi nilai terhadap nilai perusahaan seperti penelitian Oliveira et al. (2010) yang menunjukkan bahwa aset takberwujud dalam bentuk *goodwill* memiliki relevansi nilai positif dan signifikan pada level 1%. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Dahmash et al. (2009) yang mengindikasikan informasi *goodwill* dan aset takberwujud lain memiliki relevansi nilai walaupun kurang bisa diandalkan. Manondang (2010) melakukan penelitian untuk menguji relevansi dari pelaporan *goodwill* dalam laporan keuangan. Objek penelitian adalah 76 perusahaan terdaftar di BEI pada tahun 2007. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Manondang adalah *goodwill* relevan bagi pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi nilai perusahaan dan dilaporkan secara andal.

Oliveira et al. (2010) menginvestigasi lebih lanjut bagaimana relevansi nilai dari aset takberwujud dan *goodwill* sebelum dan sesudah Portugal GAAP mengadopsi IFRS. Hasil penelitian Oliveira et al. menunjukkan informasi *goodwill* setelah adopsi IFRS memiliki relevansi nilai yang lebih baik dan signifikan. Oliveira et al. berargumen peningkatan relevansi nilai *goodwill* dikarenakan perubahan standar dimana *goodwill* tidak diamortisasi lagi dan pengujian penurunan nilai *goodwill* minimal satu tahun sekali. Beban amortisasi *goodwill* tidak meningkatkan relevansi nilai *goodwill*, tetapi justru mengurangi relevansi nilainya. Temuan hasil penelitian Oliveira et al. konsisten dengan argumen bahwa *goodwill* yang ditinjau penurunan nilainya akan dinilai lebih realistis dan semakin berhubungan dengan harga pasar.

Goodwin et al. (2008) meneliti dampak konvergensi *Australian Generally Accepted Accounting Principle* (AGAAP) menuju IFRS terhadap perubahan kualitas akuntansi dari 1,065 perusahaan terdaftar di bursa. Hasil uji statistik dari penelitian Goodwin et al. menunjukkan relevansi nilai dari *goodwill* terhadap nilai pasar meningkat signifikan setelah perubahan standar akuntansi. *Goodwill* memiliki asosiasi positif dan signifikan terhadap laba dan tingkat pengembalian. Hasil asosiasi positif dan signifikan dari *goodwill* konsisten dengan model tingkat harga yang dikembangkan dari Ohlson (1995). Goodwin et al. menjelaskan dihapusnya amortisasi *goodwill* menjadi pendorong utama kenaikan relevansi nilai. Kewajiban pelaksanaan uji penurunan nilai setiap tahun juga berkontribusi pada kenaikan relevansi nilai *goodwill*.

Horton dan Serafeim (2010) meneliti reaksi pasar dan relevansi nilai dari informasi-informasi yang dihasilkan oleh *United Kingdom GAAP* yang telah mengadopsi IFRS. Hasil penelitian Horton dan Serafim mengindikasikan adanya kenaikan relevansi nilai dari informasi *goodwill* akibat pembalikan amortisasi *goodwill* dengan tingkat signifikansi lima persen. Horton dan Serafim berargumen dengan diubahnya standar terkait amortisasi *goodwill*, perusahaan memiliki kesempatan untuk memberikan sinyal kepada investor dan pasar bahwa perusahaan belum mengalami penurunan kemampuan menghasilkan nilai di masa depan atau sinyal bahwa telah terjadi penurunan kemampuan menghasilkan nilai melalui informasi penurunan nilai (*impairment*) *goodwill*.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Fenomena semakin ketatnya kompetisi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat yang ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas *merger* dan akuisisi (Lev, 2001) telah membuat informasi aset takberwujud termasuk *goodwill* menjadi material dan menjadi salah

satu determinan penting dalam menilai perusahaan. Pembuktian empiris mengenai relevansi nilai *goodwill* telah dilakukan oleh Oliveira et al. (2010), Dahmash et al. (2009) dan Manondang (2010) dengan hasil yang mengindikasikan bahwa *goodwill* memiliki relevansi nilai. Berdasarkan fenomena perubahan lingkungan bisnis dan penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis pertama yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₁ : *Goodwill* memiliki relevansi nilai terhadap harga pasar saham perusahaan.

Adopsi IFRS dan IAS pada PSAK dipandang akan meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi (Ball, 2006). Terdapat tiga alasan mengapa relevansi nilai *goodwill* berubah setelah PSAK 19 mengadopsi IAS 38: (1) adanya beban amortisasi dan akumulasi amortisasi *goodwill* membuat laporan keuangan neraca dan laba rugi komprehensif tidak cukup baik dalam mencerminkan nilai ekonomis perusahaan sehingga penghapusan amortisasi *goodwill* membuat informasi *goodwill* menjadi lebih relevan dan *faithfull representation* bagi investor (FASB, 2001); (2) Investor dan pengguna laporan keuangan lebih memperhatikan informasi pengungkapan penurunan nilai (*impairment*) *goodwill* (Horton dan Serafeim, 2010); dan (3) Pelarangan pembalikan rugi penurunan nilai dapat mencegah tindakan diskresioner manajemen perusahaan untuk mengubah nilai total aset (PSAK 48 revisi 2009). Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian empiris yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2010), Goodwin et al. (2008) dan Horton dan Serafeim (2010) yang menemukan bahwa adopsi IFRS pada PSAK meningkatkan relevansi nilai *goodwill*, maka hipotesis kedua yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₂ : Revisi PSAK 19 meningkatkan relevansi nilai *goodwill* terhadap harga pasar saham perusahaan.

3. Metode Penelitian

Populasi dari penelitian adalah semua perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI selama 2009-2011. Pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive judgment sampling*. Dari total 451 perusahaan yang terdaftar di BEI, dikeluarkan perusahaan-perusahaan keuangan, perusahaan yang tidak melaporkan nilai *goodwill* dan perusahaan yang memiliki nilai buku ekuitas negatif pada periode 2009-2011 sehingga terdapat 80 perusahaan yang siap untuk menjadi sampel penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data sekunder. Sumber data diperoleh dari *database Reuters Knowledge* dan *Datastream* yang tersedia di Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEUI. Untuk memeriksa validitas, data yang diperoleh dari *Reuters Knowledge* akan dibandingkan dengan data laporan keuangan yang berasal dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) atau *website* perusahaan.

Untuk menguji hipotesis pertama model penelitian yang digunakan merupakan model valuasi Ohlson (1995) yang dimodifikasi pada penelitian Oliveira et al. (2010) sebagai rujukan penulis:

$$\text{Model 1: } P_{it+1} = a_0 + a_1 BV_{it} + a_2 EPS_{it} + a_3 EPS_{it} + a_4 GW_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

P_{it+1} = harga pasar per lembar saham perusahaan i , tiga bulan setelah akhir tahun t (harga pasar saham telah merefleksikan reaksi pasar setelah laporan keuangan auditan diterbitkan)

$BVminGW_{it}$ = nilai buku ekuitas dikurang jumlah *goodwill* bersih per lembar saham dari perusahaan i pada akhir tahun t

EPS_{it} = laba bersih per lembar saham dari perusahaan i pada akhir tahun t

GW_{it} = *goodwill* per lembar saham yang diidentifikasi dalam laporan posisi keuangan perusahaan i di akhir tahun t

e_{it} = *error*

Untuk menguji hipotesis 2, model penelitian memasukkan variabel indikator (PSAK) untuk meneliti perubahan relevansi nilai sebelum dan sesudah PSAK no. 19 revisi 2010 berbasis IFRS diterapkan (efektif 1 Januari 2011). Variabel PSAK merupakan variabel *dummy* yang bernilai 0 pada periode sebelum PSAK 19 revisi 2010 berlaku dan bernilai 1 pada periode setelah PSAK 19 revisi 2010 berlaku. Model penelitian untuk menguji hipotesis 2 konsisten dengan model penelitian Oliveira et al. (2010) dan Davis-Friday et al. (2006) dalam hal penggunaan variabel *dummy* sebagai variabel indikator untuk melihat perubahan relevansi nilai informasi akuntansi. Berikut adalah model penelitian untuk menguji hipotesis 2:

Model

2:

$$P_{it+1} = \beta_0 + \beta_1 PSAK + \beta_2 BVminGW_{it} + \beta_3 PSAK * BVminGW_{it} + \beta_4 EPS_{it} + \beta_5 PSAK * EPS_{it} + \beta_6 GW_{it} + \beta_7 PSAK * GW_{it} + n_{it}$$

Variabel PSAK berinteraksi dengan variabel independen dan variabel kontrol untuk melihat perbedaan koefisien *slope* antara dua periode (Gujarati, 2003). Berdasarkan interaksi antara variabel PSAK dengan variabel BVminGW, EPS dan GW, hasil penelitian dapat menunjukkan dampak adopsi IFRS pada PSAK terhadap relevansi nilai informasi akuntansi

termasuk informasi *goodwill*. Perubahan relevansi nilai *goodwill* tidak hanya dapat diidentifikasi melalui perbedaan koefisien tetapi juga melalui perbedaan signifikansi variabel GW dan PSAK*GW. Jika koefisien β_6 signifikan secara statistik dan koefisien β_7 tidak signifikan secara statistik maka dapat disimpulkan adopsi IFRS pada PSAK tidak mempengaruhi relevansi nilai *goodwill*. Jika koefisien β_6 dan β_7 signifikan secara statistik maka adopsi IFRS pada PSAK terbukti mempengaruhi relevansi nilai *goodwill*. Selanjutnya, untuk melihat perubahan relevansi nilai *goodwill* di kedua periode dilakukan dengan melihat tanda koefisien β_7 . Jika tanda koefisien β_7 positif maka adopsi IFRS pada PSAK memberikan dampak positif yang signifikan pada relevansi nilai *goodwill* dan begitu pula sebaliknya.

4. Hasil

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2 menjelaskan statistik deskriptif dari setiap variabel yang digunakan pada model statistik penelitian Variabel harga pasar saham (P) memiliki nilai minimum Rp50 per lembar dan maksimum Rp53.500 per lembar. Rata-rata harga pasar saham adalah Rp2.182,667 dengan standar deviasi mencapai 5.062,639. Harga pasar saham PT HM Sampoerna (Rp53.500) merupakan *outlier* dalam penelitian ini sehingga dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Untuk pengujian selanjutnya data-data perusahaan PT HM Sampoerna akan dikeluarkan sehingga sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian menjadi 80 perusahaan.

===== Tabel 2 =====

Rata-rata nilai BVminGW pada sampel perusahaan adalah Rp954,463 per lembar saham dengan standar deviasi 2.345,714. Angka tersebut menunjukkan variabel BVminGW memiliki persebaran data yang relatif lebih luas bila dibandingkan variabel EPS dan *goodwill*. Nilai variabel EPS menunjukkan angka minimum Rp-194,75 per lembar saham dan angka maksimum Rp6.203,08 per lembar saham. Angka minimum EPS yang bernilai negatif menunjukkan terdapat perusahaan yang mengalami kerugian. Rata-rata nilai *goodwill* (GW) adalah Rp116,981 per lembar saham dengan standar deviasi 752,995. Hal tersebut mengindikasikan lebih banyak perusahaan (dengan *rule of thumb* 68%) yang memiliki nilai *goodwill* yang relatif kecil dibandingkan perusahaan yang memiliki nilai *goodwill* besar.

4.2 Analisis Hasil Regresi

Model penelitian diuji dengan pendekatan *fixed effect* setelah dilakukan pengujian *Chow*, *Lagrange Multiplier* dan *Hausman* sebelumnya. Pengujian asumsi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) mengindikasikan model statistik dalam penelitian ini mengalami permasalahan multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Multikolinieritas dan heteroskedastisitas menyebabkan hasil regresi tidak dapat mencerminkan informasi yang sesungguhnya atau menjadi bias. Penelitian ini tidak melakukan apa-apa terhadap masalah multikolinieritas karena model Ohlson (1995) terkait penelitian relevansi nilai sudah baku dan teruji sehingga penambahan variabel yang belum pernah dibuktikan sebelumnya dapat menyebabkan hasil estimasi variabel independen menjadi tersamarkan. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas, model regresi statistik diuji dengan menggunakan *Generalized Least Square* (GLS).

Tabel 3 menampilkan hasil regresi model hipotesis 1 dengan menggunakan software STATA. Uji signifikansi model penelitian untuk hipotesis 1 memiliki *p-value* untuk *F-stat*

0,0023 yang bernilai lebih kecil dari α 1%. Sehingga dengan tingkat kepercayaan 99% dapat dinyatakan bahwa variabel independen BVminG, EPS dan GW pada model hipotesis 1 secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi atau memprediksi nilai variabel dependen P. Model hipotesis 1 memiliki nilai R^2 0,0877 yang berarti 8,77% varian pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh varian dari variabel-variabel independen dalam penelitian. Sedangkan 91,23% variasi pada variabel dependen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

Variabel GW memiliki nilai koefisien -8,1881 yang berarti nilai *goodwill* berhubungan negatif dengan variabel harga pasar saham. Variabel GW memiliki p-value dari z-stat 0,0000 yang lebih kecil dari α 1%. Artinya dengan tingkat kepercayaan 99%, nilai *goodwill* perusahaan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi nilai pasar saham perusahaan. Nilai buku ekuitas dikurangi *goodwill* berhubungan positif dengan harga pasar saham perusahaan dan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi nilai pasar saham perusahaan. Nilai laba per saham perusahaan berhubungan positif dengan harga pasar saham dan signifikan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Kesimpulan dari analisis regresi pada model hipotesis 1 adalah variabel *goodwill* (GW) berhubungan negatif dan signifikan secara statistik, dengan koefisien tidak sama dengan nol, mempengaruhi nilai perusahaan yang direpresentasikan dengan harga pasar saham (P) dan bersama dengan variabel EPS dan BVminGW dapat menjelaskan 8,77% varian dari harga pasar saham. Hasil penelitian tersebut membuktikan secara empiris bahwa hipotesis 1, yang menduga bahwa nilai variabel *goodwill* memiliki relevansi nilai dalam menjelaskan atau mempengaruhi nilai perusahaan, didukung oleh hasil penelitian.

===== Tabel 3 =====

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi model hipotesis 2 mengenai perubahan relevansi nilai *goodwill* setelah PSAK mengadopsi IAS/IFRS. Regresi model penelitian menggunakan metode *Least Square Dummy Variables* (LSDV) karena penggunaan variabel PSAK sebagai variabel yang mengontrol efek waktu. Model penelitian untuk hipotesis 2 masih memiliki permasalahan heteroskedastisitas sehingga pengujian dengan metode LSDV perlu dimodifikasi dengan metode GLS untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas agar informasi hasil regresi tidak bias.

===== Tabel 4=====

Uji signifikansi model penelitian untuk hipotesis 2 memiliki *p-value* untuk *F-stat* 0,0000 yang bernilai lebih kecil dari *alpha* 1%. Sehingga dengan tingkat kepercayaan 99% dapat dinyatakan bahwa variabel independen pada model hipotesis 2 secara bersama-sama mempengaruhi atau memprediksi nilai variabel dependen P dengan signifikan. Model hipotesis 2 memiliki nilai R^2 0,3198 yang berarti 31,98 % varian pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam penelitian. Sedangkan 68,02% variasi pada variabel dependen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model penelitian. Dibandingkan dengan model hipotesis 1 yang memiliki R^2 8,77%, model hipotesis 2 memiliki nilai R^2 yang lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa adopsi IFRS pada PSAK meningkatkan *explanatory power* dari variabel-variabel independen dalam model.

Informasi nilai *goodwill* kurang relevan bagi investor pada periode sebelum PSAK mengadopsi IFRS. Hal ini ditandai dengan *p-value* variabel GW yang lebih besar dari *alpha* 10%. Perubahan standar PSAK 19 setelah mengadopsi IAS 38 meningkatkan relevansi nilai *goodwill* terhadap harga pasar saham perusahaan yang ditandai dengan koefisien positif dari variabel PSAK*GW dan *p-value* lebih kecil dari *alpha* 5%. Artinya informasi *goodwill* yang

disusun berdasarkan PSAK 19 revisi 2010 lebih berguna bagi investor dibandingkan sebelum PSAK 19 mengadopsi IAS 38.

Koefisien PSAK*EPS yang positif dan signifikan mengindikasikan bahwa relevansi nilai EPS dalam mempengaruhi harga pasar saham perusahaan meningkat setelah revisi PSAK 19 tahun 2010 efektif berlaku. Nilai EPS setelah revisi PSAK 19 menjadi lebih informatif bagi investor dalam menjelaskan nilai perusahaan. Nilai BVminGW memiliki *p-value* lebih kecil dari *alpha* 1% yang mengindikasikan nilai buku ekuitas yang dipisahkan dengan nilai *goodwill* memiliki relevansi nilai terhadap harga pasar saham sebelum PSAK mengadopsi IFRS. Hasil regresi kemudian menunjukkan setelah revisi PSAK 19 tahun 2010 diimplementasikan, relevansi nilai BVminGW menurun yang ditunjukkan dengan koefisien negatif dan *p-value* yang lebih kecil dari *alpha* 1%.

Kesimpulan dari hasil regresi model hipotesis 2 adalah terdapat peningkatan relevansi nilai dari informasi nilai buku ekuitas, laba dan *goodwill* setelah revisi PSAK 19 tahun 2010. Hasil penelitian tersebut membuktikan secara empiris bahwa hipotesis 2, yang menduga bahwa revisi PSAK 19 setelah mengadopsi IAS 38 akan meningkatkan relevansi nilai *goodwill*, diterima. Bukti tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2010), Goodwin et al. (2008) dan Horton dan Serafeim (2010). Eliminasi amortisasi *goodwill*, kewajiban uji penurunan nilai secara berkala dan pelarangan pembalikan rugi penurunan nilai *goodwill* menjadi faktor utama yang meningkatkan relevansi nilai *goodwill* terhadap harga pasar saham perusahaan.

Terkait dengan nilai koefisien *goodwill* yang negatif pada dua model penelitian, hasil penelitian konsisten dengan argumen Sari (2004) dan Davis-Friday et al. (2006) yang menyatakan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi akan mengalami penurunan di periode setelah terjadinya krisis. Investor memandang informasi akuntansi setelah terjadi krisis

keuangan tidak merefleksikan kemampuan perusahaan menghasilkan nilai di masa depan. Henning et al. (2000) menyatakan terdapat empat komponen dari *goodwill* yang menyebabkan nilai *goodwill overvalued*. Yang pertama adalah nilai pasar *acquiree* yang *overstated*. Komponen kedua adalah nilai *going concern* dari *acquiree*. Komponen ketiga adalah nilai sinergis yang terbentuk dari kombinasi bisnis yang tidak mudah untuk dinilai dan keandalannya tidak selalu konsisten. Komponen keempat adalah kelebihan (residual) pembayaran terhadap *acquiree*. Hasil penelitian Henning et al. menunjukkan komponen keempat *goodwill* yaitu nilai residual *goodwill* berhubungan negatif dan signifikan dengan harga pasar saham. Hal ini mengindikasikan investor dan pasar tidak mempertimbangkan nilai residual *goodwill* sebagai informasi yang berguna dan bahkan mengurangi nilai perusahaan.

5. Uji Sensitivitas

Uji sensitivitas tambahan dilakukan seperti penelitian Oliveira et al. (2010) untuk menguji konsistensi model utama. Uji sensitivitas pertama dilakukan dengan meregresi model hipotesis 1 dan 2 terhadap variabel harga pasar saham perusahaan pada tanggal 31 Desember pada tahun t . Kesimpulan yang diperoleh dari hasil regresi tidak berbeda dengan hasil regresi yang menggunakan harga pasar saham tiga bulan setelah tanggal 31 Desember pada tahun t .

Uji sensitivitas kedua dilakukan dengan mengontrol perbedaan pengaruh variabel EPS positif dan EPS negatif[†]. Model utama akan diuji kembali dengan menambahkan variabel indikator (DLOSS) yang akan diinteraksikan dengan variabel independen. DLOSS bernilai 1

[†]Model 1:

$$P_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BVminGW_{it} + \alpha_2 DLOSS * BVminGW_{it} + \alpha_3 EPS_{it} + \alpha_4 DLOSS * EPS_{it} + \alpha_5 GW_{it} + \alpha_6 DLOSS * GW_{it} + e_{it};$$

Model 2:

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 PSAK + \beta_2 BVminGW_{it} + \beta_3 PSAK * BVminGW_{it} + \beta_4 DLOSS * PSAK * BVminGW_{it} + \beta_5 EPS_{it} + \beta_6 PSAK * EPS_{it} + \beta_7 DLOSS * PSAK * EPS_{it} + \beta_8 GW_{it} + \beta_9 PSAK * GW_{it} + \beta_{10} DLOSS * PSAK * GW_{it} + n_{it}$$

untuk EPS negatif dan bernilai 0 untuk EPS positif. Hasil regresi pada model hipotesis 1 menunjukkan koefisien dari interaksi antara EPS negatif dan *goodwill* adalah positif dan tidak signifikan. Artinya bagi perusahaan yang melaporkan laba negatif, *goodwill* tidak memiliki relevansi nilai dengan harga pasar saham perusahaan. Hasil regresi untuk model hipotesis 2 menunjukkan koefisien dari interaksi antara EPS negatif, revisi PSAK 19 dan *goodwill* adalah positif dan tidak signifikan. Hasil tersebut mengindikasikan relevansi nilai *goodwill* pada perusahaan yang melaporkan laba negatif tidak berubah setelah revisi PSAK 19.

6. Kesimpulan, Implikasi dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi nilai dari informasi *goodwill* di Indonesia dan bagaimana dampak revisi PSAK 19 tahun 2010 setelah mengadopsi IAS 38 mempengaruhi relevansi nilai *goodwill*. Sehubungan dengan hipotesis pertama yang menduga bahwa nilai informasi *goodwill* relevan dalam menjelaskan atau menentukan nilai perusahaan, hasil penelitian menunjukkan informasi *goodwill* berhubungan negatif dan signifikan secara statistik terhadap harga pasar saham. Artinya investor dan analis investasi menggunakan informasi nilai *goodwill* untuk mengevaluasi nilai perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2010), Dahmash et al. (2009) dan Manondang (2010).

Terkait dengan hipotesis kedua yang menduga bahwa adopsi IAS 38 pada PSAK 19 revisi 2010 meningkatkan relevansi nilai *goodwill*, hasil penelitian membuktikan bahwa adopsi IFRS pada PSAK 19 memang meningkatkan relevansi nilai *goodwill* terhadap harga pasar saham perusahaan. Peningkatan relevansi nilai *goodwill* terjadi karena eliminasi amortisasi *goodwill*, kewajiban melakukan uji penurunan nilai minimal satu tahun sekali dan larangan pembalikan rugi penurunan nilai pada *goodwill*. Hasil penelitian relevansi nilai

goodwill ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2010), Goodwin et al. (2008) dan Horton dan Serafeim (2010).

Meskipun hasil penelitian menunjukkan *goodwill* relevan dalam menjelaskan nilai perusahaan dan revisi PSAK 19 tahun 2010 memberikan dampak pada relevansi nilai *goodwill*, terdapat inkonsistensi antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini ditemukan nilai *goodwill* berhubungan negatif dengan harga pasar saham. Sementara penelitian terdahulu termasuk penelitian Oliveira et al. (2010), Dahmash et al. (2009), Goodwin et al. (2008) dan Horton dan Serafeim (2010) menemukan bahwa nilai *goodwill* berhubungan positif dengan harga pasar saham. Hubungan negatif nilai *goodwill* terhadap harga pasar ekuitas ini dimungkinkan karena beberapa alasan. Alasan pertama adanya krisis keuangan global pada tahun 2009 yang membuat hasil penelitian berpotensi bias. Alasan kedua adalah keterbatasan penelitian dalam penggunaan data penelitian yang terbatas pada tiga tahun. Alasan ketiga adalah pandangan investor dan analis investasi terhadap *goodwill* yang menganggap *goodwill* sebagai aset yang *overvalued*. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini.

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan mahasiswa

Menjadi pembelajaran di dalam kelas maupun forum akuntansi mengenai relevansi nilai *goodwill* di Indonesia dan dampak adopsi IFRS terhadap relevansi nilai *goodwill*. Hasil penelitian bisa menjadi tambahan ilmu dan referensi dalam mata kuliah Teori Akuntansi Keuangan (TAK) ketika membahas mengenai teori aset, riset pasar modal dan isu-isu kontemporer akuntansi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam

mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi terkait desain penelitian untuk melihat dampak adopsi IFRS dan penerapan model Ohlson (1995).

2. Bagi perusahaan terdaftar di BEI

Memberikan bukti empiris bahwa investor di pasar modal memandang *goodwill* sebagai aset yang *overvalued* yang berarti semakin tinggi nilai *goodwill* semakin rendah nilai perusahaan bagi investor. Bukti tersebut mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati menyajikan informasi *goodwill* yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian juga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam merencanakan strategi *merger* dan akuisisi terkait jumlah *goodwill* yang akan diakui.

3. Bagi DSAK

Hasil penelitian menjadi salah satu indikator bagi DSAK bahwa implementasi PSAK 19 revisi 2010 yang sudah mengadopsi IFRS efektif meningkatkan relevansi nilai *goodwill*. Eliminasi amortisasi *goodwill* dan kewajiban uji penurunan nilai menjadi faktor yang menyebabkan relevansi nilai *goodwill* meningkat.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan rentang waktu yang lebih panjang untuk mengidentifikasi relevansi nilai suatu informasi akuntansi terhadap nilai perusahaan. Misalnya untuk melihat relevansi nilai dari informasi rugi penurunan nilai *goodwill* perlu rentang waktu sepuluh tahun. Sehingga tujuan penelitian relevansi nilai sebagai *association studies* tercapai.

2. Dalam pemilihan rentang waktu untuk data penelitian sebaiknya menghindari periode yang terdapat kejadian luar biasa di dalamnya yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Jika terdapat kejadian luar biasa seperti krisis ekonomi maka penelitian perubahan relevansi nilai lebih tepat dilakukan untuk membandingkan relevansi nilai sebelum dan sesudah terjadi krisis.
3. Membagi *goodwill* menjadi empat komponen seperti pada penelitian Henning et al. (2000). Komponen-komponen tersebut antara lain: (1) nilai pasar *acquiree* yang dihitung dari perbedaan antara nilai wajar aset dengan nilai buku *acquiree* sebelum diakuisisi; (2) nilai perusahaan sebagai entitas yang berkelanjutan (*going concern*) yang dihitung dari perbedaan antara nilai pasar aset enam hari sebelum akuisisi dengan nilai pasar aset sekarang; (3) valuasi dari sinergi yang tercipta melalui akuisisi yang dihitung berdasarkan *abnormal return* kumulatif dari *acquiree* dan *acquirer* pada saat pengumuman akuisisi; dan (4) setiap pertimbangan kelebihan pembayaran terhadap *acquiree* yang dihitung dari perbedaan antara harga pembelian dengan nilai buku aset dari *acquiree*. Dengan membagi *goodwill* menjadi beberapa komponen maka dapat diinvestigasi alasan *goodwill* memiliki hubungan yang negatif dengan harga pasar saham perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboody, D., dan Lev, B. 1998. The Value Relevance of Intangibles: The Case of Software Capitalization. *Journal of Accounting Research* 36: 161-191.
- Al-Jifri, K., dan Citron, D. 2009. The Value Relevance of Financial Statement Recognition Versus Note Disclosure: Evidence From Goodwill Accounting. *European Accounting Review*: 123-140.
- Ball, R. 2006. International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros And Cons For Investors. *Accounting and Business Research* 36: 5-27.

- Barth, M. 2000. Valuation-Based Accounting Research: Implications For Financial Reporting And Opportunities For Future Research. *Accounting and Finance* 40: 7-31.
- Barth, M., Beaver, W. dan Landsman, W. 2001. The Relevance of The Value Relevance Literature For Financial Accounting Standard Setting: Another View. *Journal of Accounting and Economics* 31: 77-104.
- Beaver, W. 2002. Perspective On Recent Capital Market Research. *The Accounting Review* 77(2): 453-474.
- Beisland, L. 2009. A Review of The Value Relevance Literature. *The Open Business Journal* 2: 7-27.
- Chalmers, K., Clinch, G. dan Godfrey, J. 2008. Adoption of International Financial Reporting Standards: Impact On The Value Relevance of Intangible Assets. *Australian Accounting Review*: 237-247.
- Churyk, N. 2005. Reporting Goodwill: Are The New Accounting Standards Consistent With Market Valuations?. *Journal of Business Research* 58:1353-1361.
- Dahmash, F., Durand, R. dan Watson, J. 2009. The Value Relevance And Reliability of Reported Goodwill And Identifiable Intangible Assets. *The British Accounting Review* 41: 120-137.
- Davis-Friday, P., Eng, L. dan Liu, C.-S. 2006. The Effects of The Asian Crisis, Corporate Governance and Accounting System On The Valuation of Book Value And Earnings. *The International Journal of Accounting* 41: 22-40.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Aset tidak berwujud. Dalam: *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19*. Jakarta: Ikatan Akuntan Inodnesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Kombinasi bisnis. Dalam: *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 48*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Materi Public Hearing. Dalam: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Penurunan nilai aset. Dalam: *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 48 Revisi 2009*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia .
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. Aset takberwujud. Dalam: *Pernyataan Standar Akuntansi No. 19 Revisi 2010*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. Kombinasi bisnis. Dalam: *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 revisi 2010*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Feltham, G. dan Ohlson, J. 1995. Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. *Contemporary Accounting Research*: 689-731.
- Financial Accounting Standard Board. 2001. Goodwil And Other Intangible Assets. Dalam: *Statement of Financial Accounting Standards no. 142*. Financial Accounting Standard Boards.
- Godfrey, J. et al.2010. *Accounting Theory 7th Edition*. John Wiley.
- Goodwin, J., Ahmed, K. dan Heaney, R.. 2008. The Effects Of International Financial Reporting Standards On The Accounts And Accounting Quality Of Australian Firms: A Retrospective Study. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*: 89-119.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics*. 4th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Hadjiloucas, T. dan Winter, R.. 2005. *Reporting The Value Of Acquired Intangible Assets*. PricewaterhouseCoopers London.

- Hariandy, P. 2011. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tingkat Diversifikasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela. Depok: *Skripsi Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia Program Studi Akuntansi*.
- Harini, A. 2012. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Dan Cost Of Equity. Depok: *Skripsi Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia Program Studi Akuntansi*.
- Henning, S., Lewis, B. dan Shaw, W. 2000. Valuation Of Components Of Purchased Goodwill. *Journal of Accounting Research* 2(38): 375-386.
- Holthausen, R. dan Watts, R. 2001. The Relevance Of Value Relevance Literature For Financial Accounting Standard Setting. *Journal of Accounting and Economics* 31: 3-75.
- Iskandar, F. 2011. Dampak Konfirmasi PSAK Pada IFRS Terhadap Kualitas Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Tahun 2007 - 2009. Depok: *Skripsi Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia Program Studi Akuntansi*.
- Kieso, D., Weygandt, J. dan Warfield, T. 2011. *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
- Lee, C. 2011. The Effect Of SFAS142 On The Ability Of Goodwill To Predict Future Cash Flows. *Journal of Accounting Public Policy*: 236-255.
- Lev, B. 2001. *Intangibles: Management, Measurement And Reporting*. Washington DC: Brooking Institution Press.
- Lev, B. dan Zarowin, P.1999. The Boundaries Of Financial Reporting And How To Extend Them. *Journal of Accounting Research*: 352-385.
- Li, Z., Shroff, P. Venkataraman, R. danZhang, I. 2010. Causes And Consequences Of Goodwill Impairment Losses.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1429615.
- Manondang, S. 2010. Pengujian Relevansi, Keandalan Dan Perilaku Pelaporan Goodwill Dan Aset Takberwujud Yang Dapat Diidentifikasi Dalam Laporan Keuangan. Depok: *Skripsi Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia Program Studi Akuntansi*.
- Ohlson, J. 1995. Earnings, Book Values And Dividends In Equity Valuation. *Contemporary Accounting Research* 11: 661-687.
- Oliveira, L., Rodrigues, L. dan Craig, R.. 2010. Intangible Assets And Value Relevance: Evidence From Portuguese Stock Exchange. *The British Accounting Review* 42: 241-252.
- Ribeiro, L. dan Tironi, F. 2006. The Roleof Venture Capitalists In The Identification And Measurement of Intangible Assets.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=965594.
- Riedl, E., Neamtiu, M. dan Muller, K. 2012. Do Managers Benefit From Delayed Goodwill-Impairments?. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1429615.
- Sekaran, U. & Bougie, R. 2010. *Research Methods For Business*. 5th Edition.John Wiley & Sons Ltd.
- Serafim, G. dan Horton, J. 2010. Market Reaction to And Valuation of Ifrs Reconciliation Adjustments: First Evidence From The UK. *Review of Accounting Studies*: 725-751.
- Suardi, A. 2011. *Modul Stata: Tahapan Dan Perintah Data Panel*. Depok: Laboratorium Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi FEUI.

Wyatt. 2008. What Financial And Non-Financial Information On Intangibles Is Value Relevant? A Review of The Evidence. *Accounting and Business Research* 38(3): 217-256.

LAMPIRAN

Tabel 1 Perbandingan Standar Sebelum dan Sesudah PSAK Mengadopsi IAS/IFRS Terkait *Goodwill*

Isu	Sebelum Adopsi IAS/IFRS	Setelah Adopsi IAS/IFRS
Umur ekonomis <i>goodwill</i> .	<i>Goodwill</i> diklasifikasikan sebagai aset takberwujud dengan umur terbatas lima tahun dan dapat diperpanjang hingga dua puluh tahun dengan pengungkapan yang tepat (PSAK 19 revisi 2000).	<i>Goodwill</i> dipertimbangkan sebagai aset takberwujud dengan umur ekonomis tidak terbatas (PSAK 19 revisi 2010).
Amortisasi <i>goodwill</i> .	<i>Goodwill</i> diamortisasi sepanjang umur ekonomis (PSAK 19 revisi 2000).	<i>Goodwill</i> sebagai aset takberwujud dengan umur ekonomis tidak terbatas tidak diamortisasi (PSAK 19 revisi 2010).
Penurunan Nilai <i>Goodwill</i> .	Pengujian penurunan nilai <i>goodwill</i> dilakukan pada saat terdapat indikasi penurunan nilai (PSAK 48 revisi 1998).	<i>Goodwill</i> yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diuji setiap tahun (PSAK 48 revisi 2009).
Pembalikan rugi penurunan nilai <i>goodwill</i> .	Mengharuskan pembalikan rugi penurunan <i>goodwill</i> pada situasi tertentu (PSAK 48 revisi 1998).	Pembalikan rugi penurunan nilai atas <i>goodwill</i> dilarang (PSAK 48 revisi 2009).

Sumber: PSAK 19 revisi 2010; PSAK 48 revisi 2009; dan materi *public hearing* IAI

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Median	Standar Deviasi
P	81	33,00	53.500	2.182,667	670,00	5.062,639
BVminGW	81	8,61	24.167,8	954,463	350,23	2.345,714
EPS	81	-194,75	6.203,08	184,620	42,91	583,492
GW	81	0	7.293,48	116,981	5,18	752,995

Sumber: keluaran *software* statistik Stata yang telah diolah

Tabel 3 Hasil Regresi Model Hipotesis 1

Model Hipotesis 1			
$P_{it} = a_0 + a_1BVminGW_{it} + a_3EPS_{it} + a_4GW_{it} + e_{it}$			
H1: Goodwill memiliki relevansi nilai terhadap harga pasar saham perusahaan.			
Variabel	Coefficient ^b	Z-Stat ^b	Prob > z ^b
BVminGW	0,0998	1,36	0,087*
EPS	3,3409	4,51	0,000***
GW	-8,1881	-3,73	0,000***
R-Squared ^a	0,0877	No. Observation	240
F-Stat ^a	5,03	Wald chi-square ^b	4791,42
Prob (F-Stat)	0,0023***	Prob (chi-square)	0,0000***
<p>P= harga penutupan pasar saham tiga bulan setelah 31 Desember; BVminGW= nilai buku ekuitas dikurangi nilai <i>goodwill</i>; EPS= laba per lembar saham; GW= nilai <i>goodwill</i> tercatat di laporan keuangan perusahaan; ***signifikan pada α 1%; **signifikan pada α 5%; *signifikan pada α 10%.</p> <p>^adiuji pada model regresi <i>Fixed Effect</i> (perintah STATA: xtreg depvar indepvar, fe); ^bdiuji dengan metode <i>Generalized Least Square</i> untuk model <i>Fixed Effect</i> (perintah STATA: xtgls depvar indepvar i.individu).</p>			

Sumber: keluaran *software* statistik Stata yang telah diolah

Tabel 4 Hasil Regresi Model Hipotesis 2

Variabel	Coefficient ^b	z-Stat ^b	Prob > z ^b
PSAK	472,8319	4,24	0,000***
BVminGW	1,3893	4,53	0,000***
PSAK*BVminGW	-0,6522	-5,32	0,000***
EPS	0,8234	1,09	0,1375
PSAK*EPS	3,0505	4,79	0,000***
GW	1,1980	0,52	0,302
PSAK*GW	1,7743	2,27	0,0115**
R-Squared ^a	0,3198	No. Observation	240
F-Stat ^a	10,27	Wald chi-square ^b	6507,92
Prob (F-Stat) ^a	0,0000***	Prob (chi-square)	0,0000***

Model Hipotesis 2

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 PSAK + \beta_2 BVminGW_{it} + \beta_3 PSAK * BVminGW_{it} + \beta_4 EPS_{it} + \beta_5 PSAK * EPS_{it} + \beta_6 GW_{it} + \beta_7 PSAK * GW_{it} + n_{it}$$

H2:Revisi PSAK 19 meningkatkan relevansi nilai goodwill terhadap harga pasar saham perusahaan.

P= harga penutupan pasar saham tiga bulan setelah 31 Desember; **PSAK**= variabel dummy PSAK 19, 0 untuk periode sebelum PSAK 19 revisi 2010 berlaku dan 1 untuk periode setelah PSAK 19 revisi 2010 berlaku; **BVminGW**= nilai buku ekuitas dikurangi nilai goodwill; **EPS**= laba per lembar saham; **GW**= nilai goodwill tercatat di laporan keuangan perusahaan; ***signifikan pada α 1%; **signifikan pada α 5%; *signifikan pada α 10%.

^adiuji pada metode regresi LSDV untuk model FE (perintah STATA: xtreg depvar indepvar, fe); ^bdiuji pada metode regresi LSDV yang dimodifikasi dengan metode GLS untuk model FE (perintah STATA: xi: xtgls depvar indepvar i.individu).

Sumber: keluaran software statistik Stata yang telah diolah

Penjelasan Keperilakuan untuk Anomali Akrua: Sebuah Pendekatan Eksperimental

DWI RATMONO*
Universitas Diponegoro

Abstract: *The objective of this study is to examine (1) whether investors provide less accurate earnings forecasts when operating cash flows and accruals are differentially persistent relative to when these components are equally persistent, and (2) how decomposing the forecasting task and altering the presentation format combine to enable investors to acquire and accurately process financial statement information when operating cash flows and accruals are differentially persistent. Based on cognitive load theory, this study proposes hypotheses that investors' acquisition and processing of financial statement information affects their forecast accuracy when operating cash flows and accruals are differentially persistent. This study used a 2 x 2 x 2 mixed model experimental design. Within subjects, it is manipulated whether participants provide forecasts for a firm with differentially persistent or equally persistent operating cash flows and accruals. Both task decomposition and presentation variables are manipulated between subjects. 60 undergraduate accounting students served as surrogates for nonprofessional investors. To test the hypotheses, this study performs a mixed model analysis of variance (ANOVA). This study find that the forecasts are less accurate when operating cash flows and accruals are differentially persistent relative to when these components are equally persistent. In addition, manipulations that alter investors' acquisition of information and the ease with which this information can be accurately processed improve investors' forecasting accuracy when operating cash flows and accruals are differentially persistent.*

Keywords: *anomaly accrual, persistence of earnings components, task decomposition, disclosure format, forecast accuracy*

* Author can be contacted at: dwi_ratmono@yahoo.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Beaver (2002) menyatakan bahwa salah satu topik penting penelitian *efficient market hypothesis* adalah pengujian lebih jauh tentang fenomena anomali akrual yang dibuktikan oleh Sloan (1996). Dengan mengikuti saran Beaver (2002) tersebut, beberapa penelitian terkini seperti Nam (2012), Xu dan Lacina (2009), Dechow *et al.* (2008), dan Khan (2008) mencoba meneliti lebih jauh fenomena anomali akrual tersebut. Bahkan Pincus *et al.* (2007) mencoba menggunakan data antarnegara (*cross-country*) untuk meneliti apakah anomali akrual merupakan sebuah fenomena global.

Anomali akrual menunjukkan return tidak normal (*abnormal return*) positif yang diperoleh melalui sebuah strategi perdagangan yang mencoba mengeksploitasi kegagalan investor untuk memprediksi secara akurat laba ketika komponen-komponen laba tersebut (akrual dan kas) mempunyai persistensi yang berbeda (Sloan, 1996; Xie, 2001). Persistensi dapat didefinisikan sebagai implikasi-implikasi komponen-komponen laba saat ini pada laba masa mendatang. Persistensi laba karenanya menunjukkan pola runtun waktu laba dan komponen-komponennya (Pincus *et al.*, 2007; Hewitt, 2007; Nam 2012).

Ketika komponen-komponen laba mempunyai pola runtun waktu yang berbeda, agregasi komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan sebuah pola runtun waktu yang lebih kompleks. Dalam kondisi tersebut, prediksi laba menjadi lebih sulit untuk ditentukan dari pola runtun waktu yang diagregasi daripada dari pola runtun waktu setiap komponen laba. Sloan (1996) menyatakan bahwa fiksasi pada pola runtun waktu laba yang diagregasi menyebabkan investor gagal untuk memprediksi laba masa mendatang secara akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda. Dengan menggunakan data sekunder (*archival data*), riset-riset sebelumnya menunjukkan bahwa investor tidak secara akurat mengestimasi komponen-komponen laba (misalnya Sloan, 1996; Xie 2001; Bradshaw *et al.*, 2001; Dechow dan Dichev, 2002; Hirshleifer dan Teoh, 2003). Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian Irawan dan Ratmono (2004) juga menunjukkan terjadinya bias fiksasi investor yang disebabkan oleh anomali akrual

tersebut. Riset-riset sebelumnya juga menyatakan bahwa pengetahuan investor berhubungan dengan kesalahan penentuan harga (*misppricing*) saham (Collins *et al.*, 2003; Balsam *et al.*, 2002).

Meskipun riset-riset terdahulu yang menggunakan data sekunder laporan keuangan telah mencoba mengeksplorasi fenomena anomali akrual, namun mereka gagal memberikan penjelasan tentang faktor-faktor keperilakuan apa yang menyebabkan investor terfiksasi pada laba dan tidak memperhatikan persistensi masing-masing komponennya. Riset-riset tersebut juga gagal memberikan solusi bagi penyusun laporan keuangan dan investor bagaimana upaya untuk mengurangi bias tersebut. Hirshleifer *et al.* (2007) menyatakan penjelasan keperilakuan nampaknya lebih tepat untuk fenomena anomali akrual.

Rumusan Masalah

Pentingnya faktor-faktor keperilakuan yang mempengaruhi terjadinya fenomena anomali akrual menyebabkan perlunya riset dengan pendekatan eksperimental untuk menjelaskan fenomena tersebut. Libby *et al.* (2002) menyarankan agar riset mendatang untuk menguji secara eksperimental temuan Sloan (1996) dengan melihat secara keperilakuan mudah tidaknya informasi perbedaan persistensi komponen-komponen laba dianalisa oleh investor dan pengaruh pengetahuan dan pelatihan terhadap proses pemrosesan informasi yang dilakukan investor. Penelitian dengan data sekunder laporan keuangan (*archival data*) belum dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terjadinya fiksasi investor pada laba serta bagaimana upaya untuk mengurangi bias tersebut (Hirshleifer *et al.*, 2007).

Hewitt (2007, 2009) mencoba merespon saran Libby *et al.* (2002) tersebut dengan menguji secara eksperimental proses keperilakuan yang menyebabkan terjadinya anomali akrual. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian Hewitt (2007, 2009) tersebut. Hewitt (2007, 2009) menyatakan bahwa partisipan dalam eksperimennya mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas prediksi laba masa mendatang karena material eksperimennya tidak menyediakan beberapa informasi yang mungkin penting dalam tugas prediksi. Informasi yang relevan tersebut antara lain tentang industri, umur, dan pertumbuhan penjualan perusahaan. Terbatasnya informasi yang diberikan kepada partisipan eksperimen tersebut mungkin menyebabkan efek utama dan efek

interaksi variabel dekomposisi tugas dan format penyajian laporan keuangan menjadi tidak signifikan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor keperilakuan yang menyebabkan akurasi prediksi laba masa mendatang yang dilakukan investor menjadi berkurang ketika komponen-komponen laba tidak persisten. Dengan menggunakan teori beban kognitif, penelitian ini bertujuan menganalisis apakah dekomposisi tugas dan format pengungkapan laporan keuangan dapat memperbaiki ketepatan prediksi investor ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda. Penelitian ini dimotivasi oleh banyaknya literatur akuntansi yang mengangkat isu anomali akrual dan menunjukkan bahwa investor tidak memperhatikan komponen-komponen laba. Literatur-literatur secara implisit mengasumsikan bahwa informasi dalam komponen-komponen laba mempunyai relevansi nilai sehingga model penilaian investor harus memasukkan informasi tersebut.

Penelitian ini memperluas Hewitt (2007, 2009) dengan menguji aspek keperilakuan yang terjadi dalam fenomena anomali akrual. Sesuai dengan teori beban kognitif (*cognitive load theory*), perluasan dilakukan dengan menambahkan variabel treatment dekomposisi tugas yang menurut Hirshleifer dan Teoh (2003) mungkin dapat memperbaiki akurasi prediksi investor. Perluasan juga dilakukan dengan perbaikan material eksperimen berupa penambahan beberapa informasi kinerja perusahaan yang mungkin mempengaruhi akurasi prediksi laba mendatang oleh partisipan eksperimen. Penelitian ini melakukan perbaikan dalam material eksperimen yang digunakan Hewitt (2007) dilakukan antara lain dengan menambahkan beberapa informasi di atas.

Kontribusi Penelitian

Dengan mengikuti saran Libby *et al.* (2002) untuk menguji secara eksperimental fenomena anomali akrual, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang proses keperilakuan yang menyebabkan terjadinya anomali akrual. Penelitian dengan data sekunder laporan keuangan (*archival data*) belum dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengapa terjadi fiksasi investor pada informasi laba. Selain itu, penelitian dengan data sekunder belum dapat memberikan

masukannya bagaimana upaya mengurangi bias fiksasi tersebut. Penelitian ini mengusulkan dua upaya untuk memitigasi bias tersebut dalam rangka meningkatkan keakuratan prediksi investor. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi khususnya literatur *market efficiency* berbasis psikologi yang menjelaskan fenomena pasar yang tidak efisien (Libby *et al.*, 2002; Nam, 2012).

Penelitian ini menekankan pentingnya peran dekomposisi tugas dan format pengungkapan laporan keuangan dalam mengurangi terjadinya bias fiksasi investor yang disebabkan oleh fenomena anomali akrual. Upaya memitigasi bias fiksasi ini penting karena dapat meningkatkan peran informasi akuntansi dalam pasar yang efisien (Xu dan Lacina, 2009; Dechow *et al.*, 2008; Khan, 2008). Dengan menekankan pentingnya peran dekomposisi tugas, hasil penelitian ini dapat berguna bagi investor dalam melakukan tugas prediksi yang kompleks. Dengan menekankan pentingnya peran format pengungkapan laporan keuangan dalam mengurangi bias fiksasi investor, hasil penelitian ini mempunyai implikasi penting bagi penyusun laporan keuangan, manajemen perusahaan, dan regulator. Sesuai dengan argumen Maines dan McDaniel (2000), penelitian ini menekankan pentingnya penyusun laporan keuangan dan regulator untuk mengembangkan sebuah format pengungkapan laporan keuangan yang dapat membantu investor dalam meningkatkan akurasi prediksinya.

Tinjauan Pustaka

Teori Beban Kognitif (*Cognitive Load Theory*)

Teori beban kognitif menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara beban kognitif (*cognitive load*) dan proses pembelajaran (*learning*) serta pengambilan keputusan (Sweller, 1988). Teori ini menyatakan bahwa sebuah tugas tidak akan dapat diselesaikan dengan baik ketika individu menghadapi beban kognitif yang berlebihan. Oleh karena itu, proses *learning* dan pengambilan keputusan harus selaras dengan struktur kognitif manusia.

Teori ini juga menyatakan bahwa dalam aktivitas pengambilan keputusan yang kompleks, jumlah informasi yang harus diproses secara simultan dapat di bawah (*under-load*) atau di atas

(*over-load*) jumlah memori yang dimiliki seseorang (Sweller, 1988). Teori ini dikembangkan untuk memberikan panduan bagaimana penyajian informasi yang dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan seseorang. Teori ini menekankan pentingnya struktur kognitif seseorang yang disebut sebagai skema (*schema*). Skema dapat mengatasi keterbatasan kognitif seseorang dengan meringkas berbagai elemen informasi menjadi satu elemen saja.

Anomali Akrua

Ketika investor mengestimasi nilai sebuah perusahaan, mereka seharusnya membedakan antara dua komponen laba yaitu komponen arus kas dari operasi dan komponen penyesuaian akuntansi (akrua). Karena komponen arus kas operasi dapat memprediksi profitabilitas masa depan lebih kuat daripada komponen akrua, maka pengabaian terhadap perbedaan tersebut akan menyebabkan investor menjadi terlalu optimis terhadap prospek perusahaan yang mempunyai akrua yang tinggi, dan menjadi terlalu pesimis dengan prospek perusahaan dengan akrua yang rendah. Akibatnya terjadi harga saham yang tinggi dan tidak rasional untuk perusahaan-perusahaan dengan akrua yang tinggi dan harga yang rendah untuk perusahaan-perusahaan dengan akrua yang rendah (Hirshleifer *et al.*, 2007).

Perusahaan-perusahaan dengan akrua yang tinggi akan memperoleh abnormal return masa depan yang lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan dengan akrua yang rendah. Pola tersebut dikenal sebagai hipotesis anomali akrua.

Pengembangan Hipotesis

Untuk mengestimasi persistensi komponen-komponen laba, Sloan (1996) dan Xie (2001) meregres laba masa depan pada dua komponen laba periode sekarang (komponen akrua dan komponen kas):

$$Laba_{t+1} = \lambda_0 + \lambda_{akrua} Akrua_t + \lambda_{kas} Kas_t + \varepsilon_{t+1} \quad (1)$$

λ_{akrua} dan λ_{kas} masing-masing menunjukkan persistensi komponen akrua dari laba dan komponen kas dari laba. Sloan (1996) dan Xie (2001) memprediksi bahwa persistensi komponen akrua relatif lebih rendah dari persistensi komponen kas ($\lambda_{akrua} < \lambda_{kas}$). Hal ini disebabkan

diskresi manajerial lebih besar dalam mengukur dan melaporkan akrual daripada diskresi manajerial dalam mengukur dan melaporkan arus kas dari operasi. Bukti empiris mendukung dugaan tersebut (Sloan 1996; Xie 2001). Sloan (1996) juga menguji apakah harga saham merefleksikan estimasi investor tentang persistensi komponen-komponen laba. Temuan Sloan (1996) menunjukkan bahwa investor membobot terlalu tinggi (terlalu rendah) persistensi komponen akrual (kas).

Sloan (1996) mengatributkan anomali akrual tersebut karena fiksasi investor pada laba. Karena fiksasi tersebut, investor gagal membedakan komponen-komponen laba periode sekarang. Asumsinya adalah investor terfiksasi pada laba runtun waktu yang teragregasi dan kurang memperhatikan komponen-komponen laba. Dalam hal ini, investor menggunakan rangkaian informasi laba agregat untuk memprediksi laba masa mendatang:

$$\psi^{fix} = (Laba_t, Laba_{t-1}, \dots, Laba_{t-n})$$

Di mana t menunjukkan jumlah tahun dari data laba tahunan yang tersedia untuk investor. Sloan (1996) menunjukkan bahwa kurangnya akurasi perkiraan investor terjadi ketika investor mendasarkan pada ψ^{fix} untuk memprediksi laba masa depan ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda.

Untuk meningkatkan akurasi prediksi investor, Hirshleifer dan Teoh (2003) merekomendasikan agar investor memperhatikan komponen-komponen laba (kas dan akrual) ketika masing-masing komponen tersebut mempunyai persistensi yang berbeda:

$$\psi^* = (Akrual_t, Akrual_{t-1}, \dots, Akrual_{t-n}; Kas_t, Kas_{t-1}, \dots, Kas_{t-n})$$

Hirshleifer dan Teoh (2003) menyatakan bahwa akurasi prediksi investor akan kurang akurat jika komponen-komponen laba mempunyai perbedaan persistensi (yaitu $\lambda_{akrual} \neq \lambda_{kas}$). Sebagai contoh, asumsikan bahwa:

- (a) Komponen akrual mempunyai pola runtun waktu berikut: 2,3,5,8,12,?
- (b) Komponen arus kas operasi mempunyai pola runtun waktu: 2,3,2,3,2?

(c) Laba mempunyai pola runtun waktu (agregat dari akrual dan arus kas operasi):
4,6,7,11,14,?

Dari pola runtun waktu di atas, nampak bahwa komponen-komponen laba (akrual dan arus kas operasi) mempunyai persistensi yang berbeda. Pola runtun waktu akrual adalah penambahan +1,+2,+3,+4, dan seterusnya (pola *triangular*). Sedangkan pola runtun waktu arus kas operasi adalah +1,-1,+1,-1, dan seterusnya (pola *oscillating*). Menurut Hirshleifer dan Teoh (2003), perbedaan persistensi akan menyulitkan investor dalam memprediksi pola runtun waktu laba yang merupakan agregasi akrual dan arus kas operasi (pola c). Investor akan lebih mudah memprediksi pola a dan b dibandingkan pola c. Investor juga akan lebih mudah memprediksi pola runtun waktu laba ketika komponen-komponennya mempunyai persistensi yang sama.

Kita asumsikan:

(d) Komponen akrual mempunyai pola runtun waktu berikut: 2,3,5,8,12,?

(e) Komponen arus kas operasi mempunyai pola runtun waktu: 3,4,6,9,13?

(f) Laba mempunyai pola runtun waktu (agregat dari akrual dan arus kas operasi):
5,7,11,17,25,?

Pola runtun waktu akrual dan arus kas operasi adalah sama yaitu +1,+2,+3,+4,dan seterusnya atau mempunyai persistensi yang sama (sama-sama pola linier). Menurut Hirshleifer dan Teoh (2003), pola laba (f) akan lebih akurat diprediksi daripada pola (c). Pola (f) dapat ditebak secara mudah yaitu +2,+4,+6+8, dan seterusnya, karena merupakan penjumlahan dari pola komponen-komponennya yang mempunyai persistensi yang sama.

H1: *Tingkat akurasi prediksi laba mendatang menjadi kurang akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda dibandingkan ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang sama.*

Teori beban kognitif memberikan sebuah penjelasan berperilaku tentang mengapa individu membuat prediksi yang kurang akurat. Teori ini menyatakan bahwa sebuah tugas tidak akan dapat diselesaikan dengan baik ketika individu menghadapi beban kognitif yang berlebihan.

Terdapat dua sumber beban kognitif yang berlebihan yaitu beban kognitif intrinsik dan beban kognitif ekstraneus (Sweller, 1988; Sweller *et al.*, 1990).

Beban kognitif intrinsik terjadi karena banyaknya jumlah petunjuk (*cues*) yang ada dalam ingatan ketika menyelesaikan sebuah tugas. Petunjuk dalam hal ini adalah pola runtun waktu laba dan komponen-komponennya. Ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda (pola a dan b), investor yang diminta memprediksi laba masa mendatang dengan mendasarkan pada pola laba agregat (pola c) akan mengalami beban kognitif intrinsik yang berlebihan. Hal ini disebabkan investor harus memproses dua petunjuk (dua pola runtun waktu) yang berbeda. Untuk mengatasi beban kognitif intrinsik yang berlebihan ini, riset-riset sebelumnya telah menunjukkan perlunya dekomposisi tugas untuk mengurangi jumlah petunjuk ada dalam memori (misal Wilks dan Zimelman, 2004). Dalam hal ini, masalah pengambilan keputusan yang kompleks harus didekomposisi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih dapat terpecahkan.

Dalam kondisi terjadinya perbedaan persistensi komponen-komponen laba (pola a dan b), agregasi komponen-komponen laba (pola c) akan mengaburkan pola komponen laba. Dengan hanya memperhatikan pola c (ψ^{fix}), investor akan menghadapi beban kognitif intrinsik yang berlebihan sehingga ketepatan prediksinya akan berkurang. Sesuai dengan teori beban kognitif dan saran Hirshleifer dan Teoh (2003), investor seharusnya melakukan dekomposisi tugas dengan memperhatikan komponen-komponen laba (kas dan akrual) ketika masing-masing komponen tersebut mempunyai persistensi yang berbeda atau menggunakan ψ^* . Dengan kata lain, investor seharusnya melakukan dekomposisi tugas dengan mendasarkan pada pola a dan pola b agar menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dengan memperhatikan pola a dan b, investor tidak akan mengalami beban kognitif yang berlebihan karena hanya diminta memproses satu petunjuk saja ketika melakukan prediksi laba. Oleh karena itu, diajukan hipotesis kedua berikut:

H2: *Ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, tugas prediksi yang didekomposisi akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan tugas prediksi yang tidak didekomposisi.*

Beban kognitif ekstranus terjadi karena kompleksitas format petunjuk (dalam kasus ini adalah format pengungkapan laporan keuangan) yang diterima investor sebagai dasar melakukan prediksi laba. Karena harus memperhatikan komponen-komponen laba agar tidak terjadi beban kognitif intrinsik yang berlebihan, investor harus melihat laporan laba rugi dan laporan arus kas secara sekaligus. Hodder *et al.* (2007) menemukan bahwa investor mengalami kesulitan ketika menginterpretasikan bagian aktivitas operasi dalam laporan aliran kas karena kompleksitasnya. Hodder *et al.* (2007) menemukan bahwa akurasi prediksi investor menjadi kurang akurat ketika laporan aliran kas disajikan menggunakan metode tidak langsung. Investor dalam hal ini harus mengatasi beban kognitif ekstranus yang terjadi karena format penyajian laporan aliran kas.

Hewitt (2007) menyatakan bahwa perubahan dalam format pengungkapan laporan keuangan diperlukan untuk mengurangi beban ekstranus. Maines dan McDaniel (2002) menyatakan tiga saran untuk perubahan penyajian laporan keuangan dalam konteks komponen-komponen akrual dan arus kas yang mempunyai persistensi yang berbeda yaitu: (1) memecah (*disaggregate*) laba menjadi komponen akrual dan kas; (2) menghubungkan komponen akrual dan kas; dan (3) meletakkan komponen-komponen tersebut dalam laporan keuangan. Berdasarkan saran Maines dan McDaniel (2002) tersebut, Hewitt (2007) mengembangkan format *disaggregated disclosure format* di mana dalam laporan laba rugi disajikan komponen-komponen laba yaitu akrual dan arus kas (lihat tabel 1). Dengan *disaggregated disclosure format* tersebut, Hewitt (2007) berargumen bahwa beban kognitif ekstranus akan berkurang dibanding ketika investor menggunakan *traditional disclosure format*.

-----Tabel 1-----

Format tersebut dapat meminimalkan beban pemrosesan informasi karena investor tidak harus melihat laporan aliran kas yang sering menyulitkan investor (terutama laporan aliran kas dengan metoda tidak langsung). Dengan pengurangan beban pemrosesan informasi tersebut, beban kognitif ekstranus investor akan berkurang sehingga akurasi prediksi investor akan menjadi lebih baik. Temuan empiris Hewitt (2007) mendukung dugaan bahwa efektivitas *disaggregated*

disclosure format dapat mengurangi beban ekstranus yang berlebihan. Berdasar argumentasi di atas, maka diajukan hipotesis berikut:

H3: *Ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, disaggregated disclosure format akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan traditional disclosure format.*

Metode Penelitian

Disain Eksperimen

Disain eksperimen yang digunakan adalah $2 \times 2 \times 2$ *mixed model design*. Dalam eksperimen ini terdapat tiga variabel independen yang dimanipulasi yaitu: (1) persistensi komponen-komponen laba (persisten vs. tidak persisten), (2) tugas prediksi laba masa mendatang (didekomposisi vs. tidak didekomposisi), dan (3) format pengungkapan laporan keuangan (*disaggregated vs traditional*). Variabel persistensi komponen-komponen laba dimanipulasi dengan *within subject design* sedangkan dua variabel independen lainnya dimanipulasi *between subject design*. Disain eksperimen penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

-----Tabel 2-----

Variabel-variabel Penelitian

a. Variabel persistensi komponen-komponen laba

Variabel persistensi komponen-komponen laba dimanipulasi pada dua level yaitu persisten dan tidak persisten. Dalam kondisi “Persisten”, partisipan akan menerima informasi laporan keuangan selama lima tahun (2003-2007) dari sebuah perusahaan yang menunjukkan persistensi dalam komponen akrual dan arus kas. Persistensi yang sama ditunjukkan dengan pola runtun waktu akrual, arus kas, dan laba yang sama (seperti pola d, e, dan f di atas). Dalam kondisi “Tidak persisten”, partisipan akan memperoleh informasi laporan keuangan selama lima tahun (2003-2007) dari sebuah perusahaan yang menunjukkan tidak persistennya komponen-komponen akrual dan arus kas. Persistensi yang tidak sama ditunjukkan dengan pola runtun waktu akrual, arus kas, dan laba yang tidak sama (seperti pola a, b, dan c di atas).

b. Variabel tugas prediksi laba mendatang

Manipulasi variabel tugas prediksi laba dilakukan dengan menginformasikan partisipan dalam kondisi “dekomposisi” bahwa laba terdiri dari komponen kas dan non kas (akrual) dan

meminta mereka untuk memprediksi komponen kas dan non kas tersebut untuk periode mendatang (tahun 2008). Partisipan dalam kondisi “tidak didekomposisi” tidak diberi informasi bahwa laba terdiri dari komponen kas dan non kas dan diminta memprediksi laba periode mendatang saja (tahun 2008).

c. Variabel format pengungkapan

Variabel format pengungkapan dimanipulasi pada dua level yaitu *disaggregate disclosure format* dan *traditional disclosure format* (lihat gambar 1). Partisipan dalam kondisi “*disaggregated disclosure format*” menerima format *disaggregate* sedangkan partisipan dalam kondisi “*traditional disclosure format*” menerima format *traditional*.

d. Variabel dependen: Akurasi Prediksi Laba

Penelitian ini menggunakan akurasi prediksi laba periode selanjutnya (tahun 2008) sebagai variabel dependen. Mengikuti beberapa riset yang menguji akurasi prediksi, pengukuran akurasi prediksi menggunakan formula:

$$\text{Akurasi prediksi laba (\%)} = 1 - \frac{|\text{prediksi} - \text{aktual}|}{\text{aktual}}$$

Sesuai dengan formula di atas, akurasi prediksi laba dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan 100% dikurangi persentase kesalahan prediksi laba. Kesalahan prediksi laba dihitung sebagai nilai absolut dari perbedaaan antara nilai prediksi laba partisipan dan nilai aktual laba. Nilai aktual laba ditentukan berdasar pola runtun waktu laba periode-periode sebelumnya.

Partisipan Eksperimen

Dengan mengacu pada argumen Fredericson *et al.* (2006) partisipan dalam eksperimen ini adalah mahasiswa S1 akuntansi yang telah menyelesaikan mata kuliah akuntansi keuangan menengah dan analisis laporan keuangan. Fredericson *et al.* (2006) berargumen bahwa partisipan mahasiswa tersebut memenuhi kriteria penting yaitu: (1) mereka telah memiliki pemahaman yang *reasonable* tentang aktivitas bisnis dan ekonomi, dan (2) mereka telah memiliki pengetahuan dasar tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Prosedur Eksperimen

Setelah menerima penjelasan tentang tujuan eksperimen, partisipan menerima secara random (*random assignment*) salah satu dari enam material eksperimental. Setelah menerima material kasus, partisipan diminta membuat prediksi untuk laba periode mendatang (tahun 2008). Partisipan juga diminta untuk menyatakan berapa besar keyakinan mereka terhadap akurasi yang dilaporkan (0-100%). Riset-riset sebelumnya menunjukkan hubungan antara keyakinan terhadap akurasi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan investor (Hirshleifer 2001; Bloomfield et al. 1999). **Material Eksperimen**

Material eksperimen dikembangkan dari kasus eksperimen yang digunakan Hewitt (2007). Setiap partisipan menerima material berupa gambaran umum sebuah perusahaan (aktivitas utama, industri dimana perusahaan berkompetisi, dan umur perusahaan), pertumbuhan penjualan produk utama perusahaan, dan laporan keuangan (terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan aliran kas) tahun 2003-2007. Setiap partisipan menerima format neraca dan laba aliran kas yang sama. Partisipan dalam kondisi “Tidak Persisten” menerima laporan laba rugi yang menunjukkan: (1) pola runtun waktu komponen kas dari laba dengan pola *triangular number series*, (2) pola runtun waktu komponen akrual dari laba dengan pola *oscillating*, dan (3) pola runtun waktu laba dengan pola *oscillating* dan *triangular number series*. Pola runtun waktu tersebut merupakan sebuah skenario dimana komponen kas (akrual) dari laba mempunyai persistensi yang relatif lebih tinggi (rendah). Partisipan dalam kondisi “Persisten” menerima laporan laba rugi yang menunjukkan pola linier untuk komponen kas, akrual, dan laba. Hewitt (2007) telah memasukkan *stochastic percentage errors* dalam data komponen-komponen laba sehingga laba tidak dapat diprediksi secara sempurna dari laporan keuangan.

Laporan keuangan telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga komponen akrual dari laba merupakan perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Oleh karena itu, partisipan dalam kondisi “*Traditional Disclosure Format*” tetap dapat menghitung besarnya komponen akrual dari laba meskipun laporan laba rugi tidak mencantumkan besarnya komponen akrual tersebut.

Cek Manipulasi

Cek manipulasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan tentang format pengungkapan laporan keuangan yang diberikan. Partisipan dalam kondisi “*disaggregated disclosure format*” seharusnya menyadari bahwa mereka menerima laporan laba rugi yang menunjukkan adanya “pemecahan” laba menjadi komponen kas dan non kas. Sebaliknya, partisipan dalam kondisi “*traditional disclosure format*” seharusnya menyadari bahwa mereka menerima laporan laba rugi yang menunjukkan laba agregasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan *mixed model analysis of variance* (ANOVA). Hipotesis 1 didukung jika rata-rata akurasi prediksi partisipan dalam sel/kondisi “Persistensi Berbeda” lebih rendah secara signifikan dibandingkan rata-rata akurasi prediksi partisipan dalam kondisi “Persistensi Sama”. Selain itu, *main effect* variabel persistensi dalam hasil ANOVA juga harus signifikan secara statistis. Pengujian hipotesis 2 dan 3 menggunakan *between subject design* ANOVA. Hipotesis 2 didukung jika rata-rata akurasi prediksi partisipan pada sel “dekomposisi” (sel A dan B) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan rata-rata akurasi prediksi partisipan pada sel “tidak dekomposisi” (sel C dan D). Hipotesis 3 didukung jika rata-rata akurasi prediksi partisipan pada sel “*disaggregated*” (sel A dan C) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan rata-rata akurasi prediksi partisipan pada sel “tradisional” (sel B dan D).

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Partisipan eksperimen penelitian ini terdiri atas 60 orang mahasiswa S1 akuntansi. Setiap sel terdiri atas 15 orang yang dimasukkan secara random (*random assignment*) ke setiap sel eksperimen. Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif yaitu rata-rata dan deviasi standar akurasi prediksi untuk setiap sel eksperimen. Dengan disain *within subject* untuk variabel persistensi maka setiap partisipan membuat prediksi untuk laporan keuangan yang komponen-komponen laba mempunyai persistensinya sama dan berbeda. Statistik deskriptif pada tabel 3 menunjukkan bahwa

rata-rata akurasi prediksi lebih tinggi untuk sel persistensi sama (83,17%) dibandingkan sel persistensi berbeda (72,60%). Perbedaan rata-rata akurasi prediksi ini signifikan dengan t-hitung 10,57 sehingga mengindikasikan dukungan terhadap hipotesis pertama. Statistik deskriptif dan uji t pada tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat akurasi prediksi laba mendatang menjadi lebih rendah ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda dibandingkan ketika mempunyai persistensi yang sama.

-----Tabel 3-----

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama menggunakan *mixed model ANOVA* karena variabel persistensi menggunakan *within subject design* sedangkan variabel tugas prediksi dan format pengungkapan menggunakan *between subject design*. Hasil pengujian hipotesis pertama disajikan pada tabel 4. Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan bahwa efek utama (*main effect*) variabel persistensi adalah signifikan dengan nilai F sebesar 165,219. Hasil ini konsisten dengan hasil pada tabel 3 yang menunjukkan dukungan terhadap hipotesis pertama. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu tingkat akurasi prediksi laba mendatang menjadi kurang akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda dibandingkan ketika mempunyai persistensi yang sama didukung oleh bukti empiris.

-----Tabel 4-----

Gambar 1 merupakan grafik plot hasil pengujian H1 dengan menggunakan *mixed model ANOVA*. Grafik tersebut juga menunjukkan dukungan terhadap hasil pengujian sebelumnya yaitu bahwa tingkat akurasi prediksi laba mendatang lebih tinggi untuk kondisi persistensi sama (panel A) dibandingkan kondisi persistensi berbeda (panel B). Selain itu, plot tersebut juga mengindikasikan bahwa metoda terbaik untuk meningkatkan akurasi prediksi laba adalah dengan dekomposisi tugas dan format pengungkapan *disaggregated*. Metoda tersebut efektif untuk kondisi persistensi sama maupun persistensi berbeda.

-----Gambar 1-----

Hasil Pengujian Hipotesis 2 dan 3

Hipotesis 2 dan 3 memfokuskan pada metoda atau strategi untuk meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda. Terdapat dua metoda yang dihipotesiskan dapat meningkatkan akurasi prediksi mendatang yaitu dekomposisi tugas (H2) dan *disaggregated disclosure* (H3). Pengujian H2 dan H3 menggunakan *between subject design ANOVA* dengan hasilnya disajikan pada tabel 5. Hipotesis 2 menyatakan bahwa, ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, tugas prediksi yang didekomposisi akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan tugas prediksi yang tidak didekomposisi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efek utama (*main effect*) variabel tugas prediksi signifikan secara statistis ($F=19,300$, nilai $p=0,000$, uji dua arah). Hasil ini menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 2. Pengujian lebih lanjut dilakukan dengan membandingkan rata-rata akurasi prediksi sel tugas prediksi yang didekomposisi dengan tugas prediksi yang tidak didekomposisi. Hasil pada tabel 6 panel A menunjukkan bahwa rata-rata akurasi prediksi laba mendatang sel tugas didekomposisi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sel tugas didekomposisi (75,10% vs. 70,11%, perbedaan rata-rata signifikan dengan $t\text{-hitung}=3,173$ dan nilai $p=0,003$). Kedua hasil pengujian ini menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 2.

-----Tabel 5-----

Hipotesis 3 menyatakan bahwa, ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, *disaggregated disclosure format* akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan *traditional disclosure format*. Hasil pengujian pada tabel 5 menunjukkan bahwa efek utama (*main effect*) variabel format pengungkapan signifikan secara statistis ($F=44,285$, nilai $p=0,000$, uji dua arah). Hasil pada tabel 6 panel B menunjukkan bahwa rata-rata akurasi prediksi laba mendatang sel *disaggregated* adalah sebesar 76,38% dan lebih tinggi dibandingkan dengan *traditional* sebesar 68,82%. Hasil pengujian *independent sample t-test* menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata ini signifikan ($t\text{-hitung}=7,173$, nilai $p=0,003$, uji dua arah). Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 3. Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan *disaggregated format disclosure* dapat meningkatkan akurasi prediksi laba dibandingkan *traditional format disclosure*.

-----Tabel 6-----

Analisis Tambahan

Hasil pengujian dengan ANOVA pada tabel 5 menunjukkan bahwa efek interaksi (*interaction effect*) antara variabel tugas prediksi dan format pengungkapan adalah signifikan secara statistik (nilai $F=10,925$, nilai $p=0,002$). Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut saling memperkuat dalam meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang. Pengujian lebih lanjut dilakukan dengan *multiple comparison* untuk membandingkan rata-rata akurasi prediksi laba antarsel. Hasil pengujian *mutiple comparison* ANOVA dengan Tukey HSD, Scheffe, dan LSD disajikan pada tabel 7.

Hasil pada tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata prediksi laba sel interaksi tugas prediksi-didekomposisi dan format pengungkapan-*disaggregated* sebesar 80,76% lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sel-sel lain. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akurasi prediksi laba memerlukan penggunaan kedua metoda (tugas prediksi-didekomposisi dan format pengungkapan-*disaggregated*) secara bersama-sama. Penggunaan kedua metoda tersebut lebih efektif dibandingkan hanya penggunaan salah satu metoda. Sebagai contoh, penggunaan metoda tugas prediksi didekomposisi dengan format pengungkapan tradisional hanya mempunyai rata-rata akurasi prediksi laba mendatang sebesar 69,44% dan tidak berbeda signifikan dengan sel-sel lainnya. Rata-rata sebesar 69,44% tersebut juga tidak berbeda signifikan dengan tanpa *treatment* apapun (sel tidak didekomposisi-tradisional) sebesar 68,21%.

-----Tabel 7-----

Gambar 2 menyajikan plot interaksi variabel tugas prediksi dan format pengungkapan. Plot tersebut memperkuat hasil pada tabel 6 yaitu bahwa peningkatan akurasi prediksi laba memerlukan penggabungan kedua strategi. Rata-rata akurasi prediksi laba mendatang dengan menginteraksikan metoda dekomposisi dan *disaggregated disclosure* adalah paling tinggi dibanding sel-sel lain yaitu sebesar 80,76%. Dalam gambar 2 tersebut nampak bahwa kedua

treatment yang lain (dekomposisi-tradisional dan tidak didekomposisi-*disaggregated*) menghasilkan rata-rata akurasi prediksi laba mendatang yang hampir sama dengan sel tanpa *treatment* (tidak didekomposisi-tradisional).

-----Gambar 2-----

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 1 yaitu bahwa tingkat akurasi prediksi laba mendatang menjadi kurang akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda dibandingkan ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang sama. Temuan ini mendukung teori beban kognitif (*cognitive load theory*) yang menyatakan bahwa sebuah tugas tidak akan dapat diselesaikan dengan baik ketika individu menghadapi beban kognitif yang berlebihan. Ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, individu yang membuat prediksi laba mendatang akan menghadapi beban kognitif yang berlebihan yaitu beban kognitif intrinsik dan beban kognitif ekstrinsik (Sweller, 1988; Sweller *et al.*, 1990). Beban ini menyebabkan akurasi prediksi menjadi kurang akurat. Temuan penelitian ini juga mendukung argumen Sloan (1996) yang menyatakan bahwa anomali akrual tersebut karena fiksasi investor pada laba. Karena fiksasi tersebut, investor gagal membedakan komponen-komponen laba periode sekarang sehingga akurasi prediksi menjadi tidak akurat. Temuan ini juga konsisten dengan riset-riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa investor tidak akurat mengestimasi komponen-komponen laba yang tidak persisten (misalnya Sloan, 1996; Xie 2001; Bradshaw *et al.*, 2001; Dechow dan Dichev, 2002; Hirshleifer dan Teoh, 2003; Irawan dan Ratmono, 2004).

Hasil pengujian juga menunjukkan dukungan terhadap hipotesis kedua yaitu bahwa ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, tugas prediksi yang didekomposisi akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan tugas prediksi yang tidak didekomposisi. Temuan ini mendukung teori beban kognitif dan argumen Hirshleifer dan Teoh (2003) bahwa investor seharusnya melakukan dekomposisi tugas dengan memperhatikan komponen-komponen laba (kas dan akrual) ketika masing-masing komponen

tersebut mempunyai persistensi yang berbeda. Dengan memperhatikan pola komponen-komponen laba (kas dan akrual), investor tidak akan mengalami beban kognitif intrinsik yang berlebihan sehingga prediksi laba mendatang menjadi lebih akurat.

Hipotesis ketiga yaitu bahwa ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, *disaggregated disclosure format* akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan *traditional disclosure format* didukung oleh bukti empiris penelitian ini. Temuan ini mendukung argumen Hewitt (2007) yang menyatakan bahwa *disaggregated disclosure format* diperlukan untuk mengurangi beban kognitif ekstraneus. Format tersebut dapat meminimalkan beban pemrosesan informasi karena investor tidak harus melihat laporan aliran kas yang sering menyulitkan investor (terutama laporan aliran kas dengan metoda tidak langsung).

Hasil pengujian juga menunjukkan adanya efek interaksi antara variabel tugas prediksi dan format pengungkapan adalah signifikan secara statistik. Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut saling memperkuat dalam meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata prediksi laba sel tugas prediksi-didekomposisi dan format pengungkapan-*disaggregated* lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sel-sel lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akurasi prediksi laba memerlukan penggunaan kedua metoda (tugas prediksi-didekomposisi dan format pengungkapan-*disaggregated*) secara bersama-sama. Penggunaan kedua metoda secara bersama-sama tersebut lebih efektif dalam meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan hanya penggunaan salah satu metoda saja. Meskipun hipotesis *main effect* (hipotesis 2 dan 3) didukung namun interpretasinya menjadi kurang relevan. Pengaruh dari setiap *treatment* yaitu tugas prediksi dan format pengungkapan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Temuan penelitian ini mendukung argumentasi Hewitt (2009) bahwa diperlukan penggabungan dua solusi yaitu (1) akuisisi informasi dengan dekomposisi tugas, dan (2) pemrosesan informasi dengan pengungkapan informasi laba secara *disaggregated*.

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Kesimpulan

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung teori beban kognitif yaitu bahwa prediksi laba mendatang menjadi akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda. Subjek eksperimen mengalami beban kognitif intrinsik dan ekstranas yang berlebihan dalam membuat prediksi laba mendatang ketika komponen arus kas operasi dan akrual mempunyai persistensi yang berbeda. Fenomena ini disebut sebagai anomali akrual yang disebabkan oleh bias fiksasi investor. Temuan penelitian eksperimental ini juga mendukung temuan penelitian terdahulu yang menggunakan data arsip laporan keuangan (*archival data* bahwa investor tidak secara akurat mengestimasi komponen-komponen laba (misalnya Sloan, 1996; Xie 2001; Bradshaw *et al.*, 2001; Dechow dan Dichev, 2002; Hirshleifer dan Teoh, 2003).

Hasil eksperimen penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa, ketika komponen-komponen laba tidak persisten, strategi meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang memerlukan penggabungan dua *treatment* yaitu dekomposisi tugas dan format pengungkapan laporan keuangan *disaggregated*. Hasil pengujian menunjukkan adanya efek interaksi yang signifikan dari kedua variabel tersebut sehingga penggunaan salah satu teknik saja tidak cukup untuk meningkatkan akurasi prediksi laba.

Keterbatasan dan Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran format pengungkapan laporan keuangan dalam mengurangi bias fiksasi investor dan meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi pentingnya penyusun laporan keuangan dan regulator untuk mengembangkan sebuah format pengungkapan laporan keuangan yang dapat membantu investor dalam meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang. Hasil penelitian ini mendukung argumentasi Hewitt (2007) bahwa format laporan keuangan tradisional harus diubah menjadi *disaggregated format* dalam upaya meningkatkan peran informasi akuntansi dalam pasar yang efisien (Xu dan Lacina, 2009; Dechow *et al.*, 2008; Khan, 2008). Hasil penelitian

menunjukkan bukti empiris bahwa dekomposisi tugas dapat mengurangi terjadinya bias fiksasi investor yang disebabkan oleh fenomena anomali akrual. Dengan menekankan pentingnya peran dekomposisi tugas, hasil penelitian ini dapat berguna bagi investor dalam melakukan tugas prediksi yang kompleks.

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian ini yang dapat menjadi saran bagi penelitian mendatang. Pertama, penelitian ini menggunakan disain eksperimen laboratorium yang mempunyai kelebihan dalam validitas internal namun terbatas dalam validitas eksternal. Penggunaan disain penelitian seperti eksperimen lapangan atau survei kuesioner pada penelitian mendatang dapat menguji generalisasi temuan penelitian ini. Kedua, disain eksperimen dalam penelitian ini juga mempunyai keterbatasan yaitu tidak semua informasi yang relevan dalam membuat prediksi laba diberikan kepada subjek. Meskipun demikian, telah dilakukan beberapa penambahan informasi yang relevan dalam material eksperimen penelitian ini seperti yang disarankan oleh Hewitt (2007). Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penambahan informasi lain yang mungkin relevan dalam eksperimen prediksi laba.

Daftar Pustaka

- Balsam, S., E. Bartov, & C. Marquardt. 2002. Accruals management, investor sophistication, and equity valuation: evidence from 10-Q filings. *Journal of Accounting Research* 40 (4): 987-1012
- Beaver, W.H. 2002. Perspective on recent capital market research. *The Accounting Review* 77(2): 453-474
- Bloomfield, R., R. Libby, & M.W. Nelson. 1999. Confidence and the welfare of less-informed investors. *Accounting, Organizations and Society* 24: 623-647
- Bradshaw, M.T., S.A. Richardson, & R.G. Sloan. 2001. Do analysts and auditors use information on accruals? *Journal of Accounting Research* 39(1): 45-75
- Collins, D.W. G.Gong, & P. Hribar. 2003. Investor sophistication and the mispricing of accruals. *Review of Accounting Studies* 8 (2-3): 251-276
- Dechow, P. S. Richardson. dan R. Sloan. 2008. The Persistence and Pricing of the Cash Component of Earnings. *Journal of Accounting Research* 46(3): 537-566.
- Fredericson, J.R., F.D. Hodge & J.H. Pratt. 2006. The evolution of stock option accounting: disclosure, voluntary, recognition, mandated recognition, and management disavowals. *The Accounting Review* 81(5): 1073-1093
- Hewitt, M. 2007. Cognitive load theory and accrual anomaly. *Disertasi*, University of Washington.
- Hewitt, M. 2009. Improving Investors' Forecast Accuracy when Operating Cash Flows and Accruals Are Differentially Persistent. *The Accounting Review* 84(6): 1913-1931
- Hirshleifer, D., K. Hou & S.H. Teoh. 2007. The Accrual anomaly: risk or mispricing? Working paper, The Ohio State University
- Hirshleifer, D. & S.H. Teoh. 2003. Limited attention, information disclosure, and financial reporting. *Journal of Accounting and Economics* 36: 337-386
- Hodder, L., P.E. Hopkins, & D.A. Wood. 2007. The effects of financial statement and information complexity on cash flow forecasts. Working paper, Indiana University.
- Irawan, D. & D. Ratmono. 2004. Anomali Pasar Berbasis *Earnings*, Persistensi Akrua, dan *Earnings Management*. *Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi VII, Universitas Udayana, Bali.*
- Khan, M. 2008. Are accruals mispriced? Evidence from tests of an Intertemporal Capital Asset Pricing Model. *Journal of Accounting and Economics* 45: 55-77.
- Libby, R. R.J. Bloomfield, & M.W. Nelson. 2002. Experimental research in financial accounting. *Accounting, Organizations and Society* 27 (8): 775-810
- Maines, L.A. & L.S. McDaniel. 2000. Effects of comprehensive income characteristics on nonprofessional investor's judgment: The role of financial statement format. *The Accounting Review* 75(2): 179-207
- Nam, S. F. Brochet., dan J. Ronen. 2012. The Predictive Value of Accruals and Consequences for Market Anomalies. *Journal of Accounting, Auditing & Finance* 27(2): 151-176
- Pincus, M., S. Rajgopal, dan M.Venkatachalam. 2007. The Accrual Anomaly: International Evidence. *The Accounting Review* 82(1): 169-203
- Sloan, R.G. 1996. Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flow about future earnings? *The Accounting Review* 71(3): 289-315
- Sweller, J. 1988. Cognitive load during problem solving: effects on learning. *Cognitive Sciences* 12: 257-285
- Sweller, J. P. Chandler, & M. Cooper. 1990. Cognitive load as a factor in the structuring of technical material. *Journal of Experimental Psychology* 2: 176-192
- Wilks, T.J. & M.F. Zimbelman. 2004. Decomposition of fraud-risk assessments and auditors' sensitivity to fraud cues. *Contemporary Accounting Research* 21 (3): 719-745
- Xie, H. 2001. The mispricing of abnormal accruals. *The Accounting Review* 76(3): 357-373
- Xu, R. dan M. Lacina. 2009. Explaining the accrual anomaly by market expectations of future returns and earnings. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 25: 190-199

Lampiran A

Tabel 1

*Traditional vs. Disaggregated Disclosure Format****Traditional Disclosure Format***

	Tahun berakhir 31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007
Penjualan	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Kos Barang Terjual	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Laba Kotor	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi:					
Depresiasi	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Lainnya	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Laba Bersih	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx

Disaggregated Disclosure Format

	Tahun berakhir 31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007
Penjualan	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Kos Barang Terjual	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Laba Kotor	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi:					
Depresiasi	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Lainnya	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Laba Bersih	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Komponen-Komponen Laba Bersih:					
Aliran kas dari aktivitas operasi	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Komponen non kas (akrual)	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Laba Bersih	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx

Tabel 2
Disain Eksperimen

Tugas Prediksi Laba	Format Pengungkapan LK (Disclosure)	
	<i>Disaggregated</i> (1)	Tradisional (2)
Didekomposisi (1)	A (1,1)	B (1,2)
Tidak didekomposisi (2)	C (2,1)	D (2,2)

Tabel 3
Statistik Deskriptif Akurasi Prediksi (dalam persen)

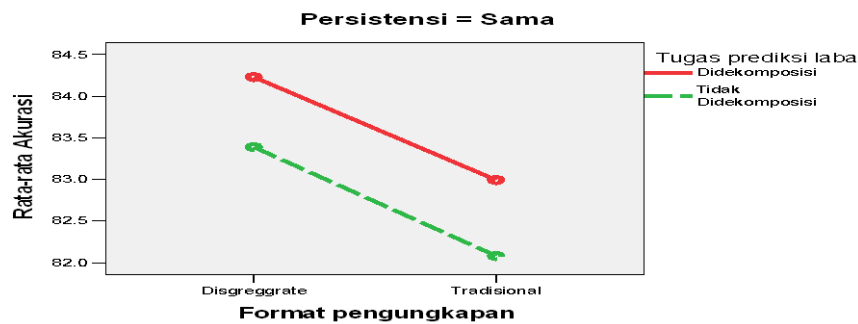
Sel	N	Rata-rata (deviasi standar)	
		Persistensi Sama	Persistensi Berbeda
A (Didekomposisi, <i>Disaggregated</i>)	15	84,23 (5,25)	80,76 (5,04)
B (Didekomposisi, Tradisional)	15	82,99 (5,37)	69,44 (3,74)
C (Tidak Didekomposisi, <i>Disaggregated</i>)	15	83,39 (3,99)	72,01 (4,18)
D (Tidak Didekomposisi, Tradisional)	15	82,08 (4,26)	68,21 (4,52)
Keseluruhan	60	83,17 (4,70)	72,60 (6,54)
Perbedaan Rata-rata t- hitung (nilai p)		10,57 10,890 (0,000)	

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis 1 dengan *Mixed Model Design ANOVA*

Variabel	Df	F-statistik	Nilai p
Efek Utama:			
Persistensi	1	165,219	0,000
Tugas Prediksi	1	11,876	0,001
Format Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	1	26,911	0,000
Efek Interaksi:			
Persistensi*Tugas Prediksi	1	6,261	0,015
Persistensi* <i>Disclosure</i>	1	14,622	0,000
Tugas Prediksi* <i>Disclosure</i>	1	4,771	0,033
Persistensi*Tugas Prediksi* <i>Disclosure</i>	1	5,315	0,025

Gambar 1
Grafik Plot Akurasi Prediksi Laba Mendatang

Panel A: Kondisi Persistensi Komponen Laba Sama



Panel B: Kondisi Persistensi Komponen Laba Berbeda



Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis 2 dan 3

Variabel	Df	Mean Square	F-statistik	Nilai p
Efek Utama:				
Tugas Prediksi	1	373,701	19,300	0,000
Format Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	1	857,455	44,285	0,000
Efek Interaksi:				
Tugas Prediksi* <i>Disclosure</i>	1	211,538	10,925	0,002
Sumber Variasi				
Model	3	480,898	24,837	0,000
Error	56	19,362		
Adjusted R Square	0,548			

Tabel 6
Perbedaan Rata-rata Akurasi Prediksi Antarsel (dalam persen)

Panel A: Hasil Pengujian Hipotesis 2

Keterangan	Sel Tugas Prediksi	
	Didekomposisi (sel A dan B)	Tidak Didekomposisi (Sel C dan D)
Rata-rata (deviasi standar)	75,10 (7,22)	70,11 (4,69)
Perbedaan Rata-rata t- hitung (nilai p)	4,99 3,173 (0,003)	

Panel B: Hasil Pengujian Hipotesis 3

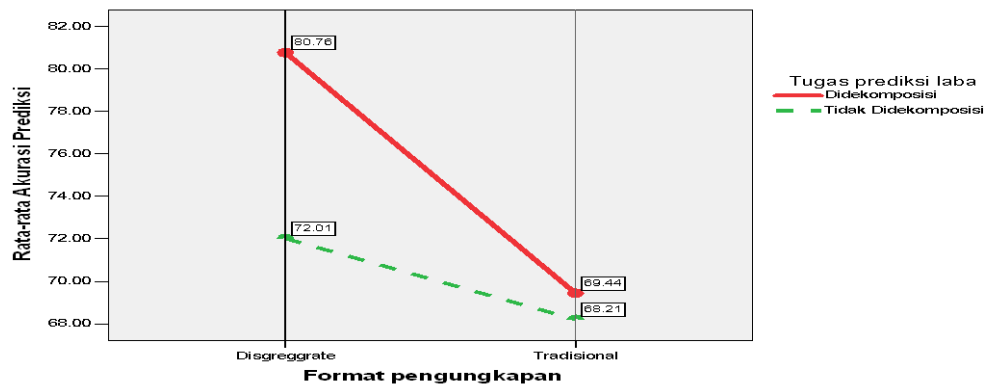
Keterangan	Sel Format Pengungkapan	
	Disaggregated (sel A dan C)	Tradisional (Sel B dan D)
Rata-rata (deviasi standar)	76,38 (6,36)	68,82 (4,12)
Perbedaan Rata-rata t- hitung (nilai p)	7,56 5,458 (0,000)	

Tabel 7
Rata-rata Akurasi Prediksi Laba:
Interaksi antara Tugas Prediksi dan Format Pengungkapan Laporan Keuangan
 (dalam persen; deviasi standar dalam tanda kurung)

Tugas Prediksi Laba	Format Pengungkapan	
	<i>Disaggregated</i>	Tradisional
Didekomposisi	80,76** (5,04)	69,44 (3,74)
Tidak didekomposisi	72,01 (4,18)	68,21 (4,52)

Keterangan= ** berbeda signifikan dengan sel/kondisi eksperimental lain pada tingkat 0,05 dengan tiga pengujian *mutiple comparison* yaitu Tukey HSD, Scheffe, dan LSD

Gambar 2
Plot Interaksi antara Tugas Prediksi dan Format Pengungkapan



Lampiran B

Ringkasan Material Eksperimen

Dalam eksperimen ini anda diminta berperan sebagai analisis laporan keuangan yang bertugas membuat prediksi laba bersih sebuah perusahaan untuk tahun 2008. Untuk membantu penyusunan prediksi, anda akan diberikan informasi tentang: (i) Gambaran umum perusahaan, (ii) Laporan keuangan yang meliputi Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Aliran Kas tahun 2003-2007. Anda harus memberikan perhatian pada informasi-informasi tersebut sebelum membuat prediksi. Tugas prediksi seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit.

Instruksi:

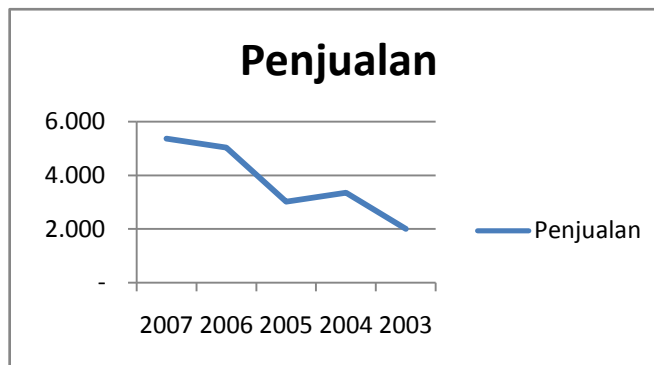
1. Peserta tidak diperkenankan saling berdiskusi dalam proses pembuatan prediksi.
2. Peserta tidak diperkenankan menggunakan material lain selain yang diberikan (misal catatan, buku teks, paket software, dan sebagainya).
3. Peserta tidak diperkenankan kembali ke tugas sebelumnya.

Jawaban anda akan dijaga kerahasiannya dan akan dianalisa secara kolektif hanya setelah digabungkan dengan jawaban dari peserta lain. Berikut adalah informasi tentang gambaran umum perusahaan yang akan anda prediksi laba bersihnya untuk tahun 2008.

Gambaran Umum Perusahaan

Untuk Kondisi: “ Tidak Persisten”:

Perusahaan “Megafood” merupakan perusahaan yang menghasilkan berbagai produk makanan dan berkompetisi pada industri barang konsumen. Perusahaan ini telah beroperasi selama 15 tahun dan terus mengalami peningkatan dalam pertumbuhan penjualan. Grafik pertumbuhan penjualan selama tahun 2003-2007 adalah sebagai berikut:



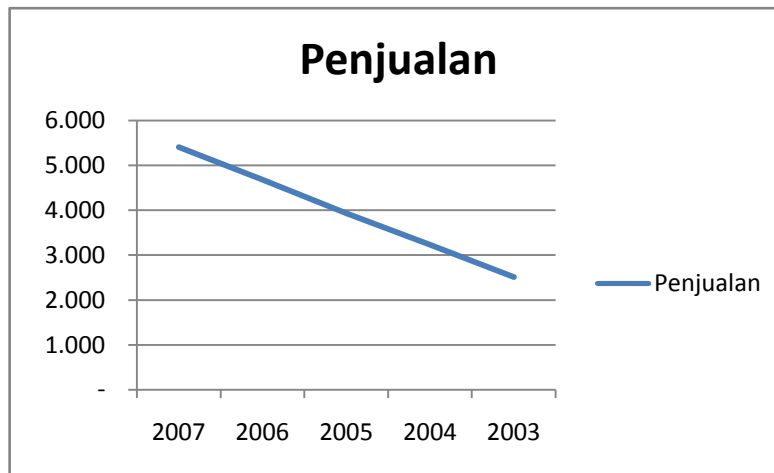
Penjualan yang terus meningkat seperti ditunjukkan dalam grafik di atas disebabkan oleh strategi pengembangan berbagai produk sesuai dengan riset selera konsumen. Pada periode 2003-2007 perusahaan “ Megafood” tidak melakukan aktivitas merger dan akuisisi. Industri barang konsumen merupakan industri yang menarik karena terus mengalami peningkatan penjualan. Namun, industri barang konsumen saat ini mengalami tekanan karena kenaikan harga bahan baku dan bahan bakar. “Megafood” merespon tantangan tersebut dengan mencoba melakukan efisiensi dalam proses produksinya.

Gambaran Umum Perusahaan

Untuk Kondisi: “ Persisten”:

Perusahaan “Akbarfood” merupakan perusahaan yang menghasilkan berbagai produk makanan dan berkompetisi pada industri barang konsumen. Perusahaan ini telah beroperasi selama 15 tahun dan

terus mengalami peningkatan dalam pertumbuhan penjualan. Grafik pertumbuhan penjualan selama tahun 2003-2007 adalah sebagai berikut:



Penjualan yang terus meningkat seperti ditunjukkan dalam grafik di atas disebabkan oleh strategi pengembangan berbagai produk sesuai dengan riset selera konsumen. Pada periode 2003-2007 perusahaan “Akbarfood” tidak melakukan aktivitas merger dan akuisisi. Industri barang konsumen merupakan industri yang menarik karena terus mengalami peningkatan penjualan. Namun, industri barang konsumen saat ini mengalami tekanan karena kenaikan harga bahan baku dan bahan bakar. “Akbarfood” merespon tantangan tersebut dengan mencoba melakukan efisiensi dalam proses produksinya.

Laporan Keuangan Perusahaan

Informasi untuk Kondisi “Tugas Tidak Didekomposisi”:

Pada bagian ini, anda akan memperoleh informasi tentang laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Aliran Kas.

Informasi untuk Kondisi “Tugas Didekomposisi”:

Pada bagian ini, anda akan memperoleh informasi tentang laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Aliran Kas. Perhatikan bahwa laba bersih terdiri dari komponen kas dan komponen non kas (akrual)

Untuk kondisi “Tidak Persisten/Disaggregated Disclosure Format”:

Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007
 (dalam jutaan rupiah)

	Tahun berakhir 31 Desember				
	2007	2006	2005	2004	2003
Penjualan	5.369	5.033	3.017	3.353	2.009
Kos Barang Terjual	2.685	2.517	1.509	1.677	1.004
Laba Kotor	2.684	2.516	1.508	1.676	1.005
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi:					
Depresiasi	334	309	302	303	363
Lainnya	773	704	374	374	13
Laba Bersih	1577	1.503	832	999	629
Komponen-Komponen Laba Bersih:					
Aliran kas dari aktivitas operasi	2.022	1.622	1.256	1.122	1.073
Komponen non kas (akrual)	(445)	(119)	(424)	(123)	(444)
Laba Bersih	1.577	1.503	832	999	629

Untuk kondisi “Tidak Persisten/*Traditional Disclosure Format*”:

Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007
 (dalam jutaan rupiah)

	Tahun berakhir 31 Desember				
	2007	2006	2005	2004	2003
Penjualan	5.369	5.033	3.017	3.353	2.009
Kos Barang Terjual	2.685	2.517	1.509	1.677	1.004
Laba Kotor	2.684	2.516	1.508	1.676	1.005
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi:					
Depresiasi	334	309	302	303	363
Lainnya	773	704	374	374	13
Laba Bersih	1.577	1.503	832	999	629

Penjelasan Keperilakuan untuk Anomali Akrua: Sebuah Pendekatan Eksperimental

DWI RATMONO*
Universitas Diponegoro

Abstract: *The objective of this study is to examine (1) whether investors provide less accurate earnings forecasts when operating cash flows and accruals are differentially persistent relative to when these components are equally persistent, and (2) how decomposing the forecasting task and altering the presentation format combine to enable investors to acquire and accurately process financial statement information when operating cash flows and accruals are differentially persistent. Based on cognitive load theory, this study proposes hypotheses that investors' acquisition and processing of financial statement information affects their forecast accuracy when operating cash flows and accruals are differentially persistent. This study used a 2 x 2 x 2 mixed model experimental design. Within subjects, it is manipulated whether participants provide forecasts for a firm with differentially persistent or equally persistent operating cash flows and accruals. Both task decomposition and presentation variables are manipulated between subjects. 60 undergraduate accounting students served as surrogates for nonprofessional investors. To test the hypotheses, this study performs a mixed model analysis of variance (ANOVA). This study find that the forecasts are less accurate when operating cash flows and accruals are differentially persistent relative to when these components are equally persistent. In addition, manipulations that alter investors' acquisition of information and the ease with which this information can be accurately processed improve investors' forecasting accuracy when operating cash flows and accruals are differentially persistent.*

Keywords: *anomaly accrual, persistence of earnings components, task decomposition, disclosure format, forecast accuracy*

* Author can be contacted at: dwi_ratmono@yahoo.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Beaver (2002) menyatakan bahwa salah satu topik penting penelitian *efficient market hypothesis* adalah pengujian lebih jauh tentang fenomena anomali akrual yang dibuktikan oleh Sloan (1996). Dengan mengikuti saran Beaver (2002) tersebut, beberapa penelitian terkini seperti Nam (2012), Xu dan Lacina (2009), Dechow *et al.* (2008), dan Khan (2008) mencoba meneliti lebih jauh fenomena anomali akrual tersebut. Bahkan Pincus *et al.* (2007) mencoba menggunakan data antarnegara (*cross-country*) untuk meneliti apakah anomali akrual merupakan sebuah fenomena global.

Anomali akrual menunjukkan return tidak normal (*abnormal return*) positif yang diperoleh melalui sebuah strategi perdagangan yang mencoba mengeksploitasi kegagalan investor untuk memprediksi secara akurat laba ketika komponen-komponen laba tersebut (akrual dan kas) mempunyai persistensi yang berbeda (Sloan, 1996; Xie, 2001). Persistensi dapat didefinisikan sebagai implikasi-implikasi komponen-komponen laba saat ini pada laba masa mendatang. Persistensi laba karenanya menunjukkan pola runtun waktu laba dan komponen-komponennya (Pincus *et al.*, 2007; Hewitt, 2007; Nam 2012).

Ketika komponen-komponen laba mempunyai pola runtun waktu yang berbeda, agregasi komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan sebuah pola runtun waktu yang lebih kompleks. Dalam kondisi tersebut, prediksi laba menjadi lebih sulit untuk ditentukan dari pola runtun waktu yang diagregasi daripada dari pola runtun waktu setiap komponen laba. Sloan (1996) menyatakan bahwa fiksasi pada pola runtun waktu laba yang diagregasi menyebabkan investor gagal untuk memprediksi laba masa mendatang secara akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda. Dengan menggunakan data sekunder (*archival data*), riset-riset sebelumnya menunjukkan bahwa investor tidak secara akurat mengestimasi komponen-komponen laba (misalnya Sloan, 1996; Xie 2001; Bradshaw *et al.*, 2001; Dechow dan Dichev, 2002; Hirshleifer dan Teoh, 2003). Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian Irawan dan Ratmono (2004) juga menunjukkan terjadinya bias fiksasi investor yang disebabkan oleh anomali akrual

tersebut. Riset-riset sebelumnya juga menyatakan bahwa pengetahuan investor berhubungan dengan kesalahan penentuan harga (*mispiricing*) saham (Collins *et al.*, 2003; Balsam *et al.*, 2002).

Meskipun riset-riset terdahulu yang menggunakan data sekunder laporan keuangan telah mencoba mengeksplorasi fenomena anomali akrual, namun mereka gagal memberikan penjelasan tentang faktor-faktor keperilakuan apa yang menyebabkan investor terfiksasi pada laba dan tidak memperhatikan persistensi masing-masing komponennya. Riset-riset tersebut juga gagal memberikan solusi bagi penyusun laporan keuangan dan investor bagaimana upaya untuk mengurangi bias tersebut. Hirshleifer *et al.* (2007) menyatakan penjelasan keperilakuan nampaknya lebih tepat untuk fenomena anomali akrual.

Rumusan Masalah

Pentingnya faktor-faktor keperilakuan yang mempengaruhi terjadinya fenomena anomali akrual menyebabkan perlunya riset dengan pendekatan eksperimental untuk menjelaskan fenomena tersebut. Libby *et al.* (2002) menyarankan agar riset mendatang untuk menguji secara eksperimental temuan Sloan (1996) dengan melihat secara keperilakuan mudah tidaknya informasi perbedaan persistensi komponen-komponen laba dianalisa oleh investor dan pengaruh pengetahuan dan pelatihan terhadap proses pemrosesan informasi yang dilakukan investor. Penelitian dengan data sekunder laporan keuangan (*archival data*) belum dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terjadinya fiksasi investor pada laba serta bagaimana upaya untuk mengurangi bias tersebut (Hirshleifer *et al.*, 2007).

Hewitt (2007, 2009) mencoba merespon saran Libby *et al.* (2002) tersebut dengan menguji secara eksperimental proses keperilakuan yang menyebabkan terjadinya anomali akrual. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian Hewitt (2007, 2009) tersebut. Hewitt (2007, 2009) menyatakan bahwa partisipan dalam eksperimennya mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas prediksi laba masa mendatang karena material eksperimennya tidak menyediakan beberapa informasi yang mungkin penting dalam tugas prediksi. Informasi yang relevan tersebut antara lain tentang industri, umur, dan pertumbuhan penjualan perusahaan. Terbatasnya informasi yang diberikan kepada partisipan eksperimen tersebut mungkin menyebabkan efek utama dan efek

interaksi variabel dekomposisi tugas dan format penyajian laporan keuangan menjadi tidak signifikan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor keperilakuan yang menyebabkan akurasi prediksi laba masa mendatang yang dilakukan investor menjadi berkurang ketika komponen-komponen laba tidak persisten. Dengan menggunakan teori beban kognitif, penelitian ini bertujuan menganalisis apakah dekomposisi tugas dan format pengungkapan laporan keuangan dapat memperbaiki ketepatan prediksi investor ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda. Penelitian ini dimotivasi oleh banyaknya literatur akuntansi yang mengangkat isu anomali akrual dan menunjukkan bahwa investor tidak memperhatikan komponen-komponen laba. Literatur-literatur secara implisit mengasumsikan bahwa informasi dalam komponen-komponen laba mempunyai relevansi nilai sehingga model penilaian investor harus memasukkan informasi tersebut.

Penelitian ini memperluas Hewitt (2007, 2009) dengan menguji aspek keperilakuan yang terjadi dalam fenomena anomali akrual. Sesuai dengan teori beban kognitif (*cognitive load theory*), perluasan dilakukan dengan menambahkan variabel treatment dekomposisi tugas yang menurut Hirshleifer dan Teoh (2003) mungkin dapat memperbaiki akurasi prediksi investor. Perluasan juga dilakukan dengan perbaikan material eksperimen berupa penambahan beberapa informasi kinerja perusahaan yang mungkin mempengaruhi akurasi prediksi laba mendatang oleh partisipan eksperimen. Penelitian ini melakukan perbaikan dalam material eksperimen yang digunakan Hewitt (2007) dilakukan antara lain dengan menambahkan beberapa informasi di atas.

Kontribusi Penelitian

Dengan mengikuti saran Libby *et al.* (2002) untuk menguji secara eksperimental fenomena anomali akrual, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang proses keperilakuan yang menyebabkan terjadinya anomali akrual. Penelitian dengan data sekunder laporan keuangan (*archival data*) belum dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengapa terjadi fiksasi investor pada informasi laba. Selain itu, penelitian dengan data sekunder belum dapat memberikan

masukannya bagaimana upaya mengurangi bias fiksasi tersebut. Penelitian ini mengusulkan dua upaya untuk memitigasi bias tersebut dalam rangka meningkatkan keakuratan prediksi investor. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi khususnya literatur *market efficiency* berbasis psikologi yang menjelaskan fenomena pasar yang tidak efisien (Libby *et al.*, 2002; Nam, 2012).

Penelitian ini menekankan pentingnya peran dekomposisi tugas dan format pengungkapan laporan keuangan dalam mengurangi terjadinya bias fiksasi investor yang disebabkan oleh fenomena anomali akrual. Upaya memitigasi bias fiksasi ini penting karena dapat meningkatkan peran informasi akuntansi dalam pasar yang efisien (Xu dan Lacina, 2009; Dechow *et al.*, 2008; Khan, 2008). Dengan menekankan pentingnya peran dekomposisi tugas, hasil penelitian ini dapat berguna bagi investor dalam melakukan tugas prediksi yang kompleks. Dengan menekankan pentingnya peran format pengungkapan laporan keuangan dalam mengurangi bias fiksasi investor, hasil penelitian ini mempunyai implikasi penting bagi penyusun laporan keuangan, manajemen perusahaan, dan regulator. Sesuai dengan argumen Maines dan McDaniel (2000), penelitian ini menekankan pentingnya penyusun laporan keuangan dan regulator untuk mengembangkan sebuah format pengungkapan laporan keuangan yang dapat membantu investor dalam meningkatkan akurasi prediksinya.

Tinjauan Pustaka

Teori Beban Kognitif (*Cognitive Load Theory*)

Teori beban kognitif menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara beban kognitif (*cognitive load*) dan proses pembelajaran (*learning*) serta pengambilan keputusan (Sweller, 1988). Teori ini menyatakan bahwa sebuah tugas tidak akan dapat diselesaikan dengan baik ketika individu menghadapi beban kognitif yang berlebihan. Oleh karena itu, proses *learning* dan pengambilan keputusan harus selaras dengan struktur kognitif manusia.

Teori ini juga menyatakan bahwa dalam aktivitas pengambilan keputusan yang kompleks, jumlah informasi yang harus diproses secara simultan dapat di bawah (*under-load*) atau di atas

(*over-load*) jumlah memori yang dimiliki seseorang (Sweller, 1988). Teori ini dikembangkan untuk memberikan panduan bagaimana penyajian informasi yang dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan seseorang. Teori ini menekankan pentingnya struktur kognitif seseorang yang disebut sebagai skema (*schema*). Skema dapat mengatasi keterbatasan kognitif seseorang dengan meringkas berbagai elemen informasi menjadi satu elemen saja.

Anomali Akrua

Ketika investor mengestimasi nilai sebuah perusahaan, mereka seharusnya membedakan antara dua komponen laba yaitu komponen arus kas dari operasi dan komponen penyesuaian akuntansi (akrua). Karena komponen arus kas operasi dapat memprediksi profitabilitas masa depan lebih kuat daripada komponen akrua, maka pengabaian terhadap perbedaan tersebut akan menyebabkan investor menjadi terlalu optimis terhadap prospek perusahaan yang mempunyai akrua yang tinggi, dan menjadi terlalu pesimis dengan prospek perusahaan dengan akrua yang rendah. Akibatnya terjadi harga saham yang tinggi dan tidak rasional untuk perusahaan-perusahaan dengan akrua yang tinggi dan harga yang rendah untuk perusahaan-perusahaan dengan akrua yang rendah (Hirshleifer *et al.*, 2007).

Perusahaan-perusahaan dengan akrua yang tinggi akan memperoleh abnormal return masa depan yang lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan dengan akrua yang rendah. Pola tersebut dikenal sebagai hipotesis anomali akrua.

Pengembangan Hipotesis

Untuk mengestimasi persistensi komponen-komponen laba, Sloan (1996) dan Xie (2001) meregres laba masa depan pada dua komponen laba periode sekarang (komponen akrua dan komponen kas):

$$Laba_{t+1} = \lambda_0 + \lambda_{akrua} Akrua_t + \lambda_{kas} Kas_t + \varepsilon_{t+1} \quad (1)$$

λ_{akrua} dan λ_{kas} masing-masing menunjukkan persistensi komponen akrua dari laba dan komponen kas dari laba. Sloan (1996) dan Xie (2001) memprediksi bahwa persistensi komponen akrua relatif lebih rendah dari persistensi komponen kas ($\lambda_{akrua} < \lambda_{kas}$). Hal ini disebabkan

diskresi manajerial lebih besar dalam mengukur dan melaporkan akrual daripada diskresi manajerial dalam mengukur dan melaporkan arus kas dari operasi. Bukti empiris mendukung dugaan tersebut (Sloan 1996; Xie 2001). Sloan (1996) juga menguji apakah harga saham merefleksikan estimasi investor tentang persistensi komponen-komponen laba. Temuan Sloan (1996) menunjukkan bahwa investor membobot terlalu tinggi (terlalu rendah) persistensi komponen akrual (kas).

Sloan (1996) mengatributkan anomali akrual tersebut karena fiksasi investor pada laba. Karena fiksasi tersebut, investor gagal membedakan komponen-komponen laba periode sekarang. Asumsinya adalah investor terfiksasi pada laba runtun waktu yang teragregasi dan kurang memperhatikan komponen-komponen laba. Dalam hal ini, investor menggunakan rangkaian informasi laba agregat untuk memprediksi laba masa mendatang:

$$\psi^{fix} = (Laba_t, Laba_{t-1}, \dots, Laba_{t-n})$$

Di mana t menunjukkan jumlah tahun dari data laba tahunan yang tersedia untuk investor. Sloan (1996) menunjukkan bahwa kurangnya akurasi perkiraan investor terjadi ketika investor mendasarkan pada ψ^{fix} untuk memprediksi laba masa depan ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda.

Untuk meningkatkan akurasi prediksi investor, Hirshleifer dan Teoh (2003) merekomendasikan agar investor memperhatikan komponen-komponen laba (kas dan akrual) ketika masing-masing komponen tersebut mempunyai persistensi yang berbeda:

$$\psi^* = (Akrual_t, Akrual_{t-1}, \dots, Akrual_{t-n}; Kas_t, Kas_{t-1}, \dots, Kas_{t-n})$$

Hirshleifer dan Teoh (2003) menyatakan bahwa akurasi prediksi investor akan kurang akurat jika komponen-komponen laba mempunyai perbedaan persistensi (yaitu $\lambda_{akrual} \neq \lambda_{kas}$). Sebagai contoh, asumsikan bahwa:

- (a) Komponen akrual mempunyai pola runtun waktu berikut: 2,3,5,8,12,?
- (b) Komponen arus kas operasi mempunyai pola runtun waktu: 2,3,2,3,2?

(c) Laba mempunyai pola runtun waktu (agregat dari akrual dan arus kas operasi):
4,6,7,11,14,?

Dari pola runtun waktu di atas, nampak bahwa komponen-komponen laba (akrual dan arus kas operasi) mempunyai persistensi yang berbeda. Pola runtun waktu akrual adalah penambahan +1,+2,+3,+4, dan seterusnya (pola *triangular*). Sedangkan pola runtun waktu arus kas operasi adalah +1,-1,+1,-1, dan seterusnya (pola *oscillating*). Menurut Hirshleifer dan Teoh (2003), perbedaan persistensi akan menyulitkan investor dalam memprediksi pola runtun waktu laba yang merupakan agregasi akrual dan arus kas operasi (pola c). Investor akan lebih mudah memprediksi pola a dan b dibandingkan pola c. Investor juga akan lebih mudah memprediksi pola runtun waktu laba ketika komponen-komponennya mempunyai persistensi yang sama.

Kita asumsikan:

(d) Komponen akrual mempunyai pola runtun waktu berikut: 2,3,5,8,12,?

(e) Komponen arus kas operasi mempunyai pola runtun waktu: 3,4,6,9,13?

(f) Laba mempunyai pola runtun waktu (agregat dari akrual dan arus kas operasi):
5,7,11,17,25,?

Pola runtun waktu akrual dan arus kas operasi adalah sama yaitu +1,+2,+3,+4,dan seterusnya atau mempunyai persistensi yang sama (sama-sama pola linier). Menurut Hirshleifer dan Teoh (2003), pola laba (f) akan lebih akurat diprediksi daripada pola (c). Pola (f) dapat ditebak secara mudah yaitu +2,+4,+6+8, dan seterusnya, karena merupakan penjumlahan dari pola komponen-komponennya yang mempunyai persistensi yang sama.

H1: *Tingkat akurasi prediksi laba mendatang menjadi kurang akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda dibandingkan ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang sama.*

Teori beban kognitif memberikan sebuah penjelasan keperilakuan tentang mengapa individu membuat prediksi yang kurang akurat. Teori ini menyatakan bahwa sebuah tugas tidak akan dapat diselesaikan dengan baik ketika individu menghadapi beban kognitif yang berlebihan.

Terdapat dua sumber beban kognitif yang berlebihan yaitu beban kognitif intrinsik dan beban kognitif ekstraneus (Sweller, 1988; Sweller *et al.*, 1990).

Beban kognitif intrinsik terjadi karena banyaknya jumlah petunjuk (*cues*) yang ada dalam ingatan ketika menyelesaikan sebuah tugas. Petunjuk dalam hal ini adalah pola runtun waktu laba dan komponen-komponennya. Ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda (pola a dan b), investor yang diminta memprediksi laba masa mendatang dengan mendasarkan pada pola laba agregat (pola c) akan mengalami beban kognitif intrinsik yang berlebihan. Hal ini disebabkan investor harus memproses dua petunjuk (dua pola runtun waktu) yang berbeda. Untuk mengatasi beban kognitif intrinsik yang berlebihan ini, riset-riset sebelumnya telah menunjukkan perlunya dekomposisi tugas untuk mengurangi jumlah petunjuk ada dalam memori (misal Wilks dan Zimelman, 2004). Dalam hal ini, masalah pengambilan keputusan yang kompleks harus didekomposisi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih dapat terpecahkan.

Dalam kondisi terjadinya perbedaan persistensi komponen-komponen laba (pola a dan b), agregasi komponen-komponen laba (pola c) akan mengaburkan pola komponen laba. Dengan hanya memperhatikan pola c (ψ^{fix}), investor akan menghadapi beban kognitif intrinsik yang berlebihan sehingga ketepatan prediksinya akan berkurang. Sesuai dengan teori beban kognitif dan saran Hirshleifer dan Teoh (2003), investor seharusnya melakukan dekomposisi tugas dengan memperhatikan komponen-komponen laba (kas dan akrual) ketika masing-masing komponen tersebut mempunyai persistensi yang berbeda atau menggunakan ψ^* . Dengan kata lain, investor seharusnya melakukan dekomposisi tugas dengan mendasarkan pada pola a dan pola b agar menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dengan memperhatikan pola a dan b, investor tidak akan mengalami beban kognitif yang berlebihan karena hanya diminta memproses satu petunjuk saja ketika melakukan prediksi laba. Oleh karena itu, diajukan hipotesis kedua berikut:

H2: *Ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, tugas prediksi yang didekomposisi akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan tugas prediksi yang tidak didekomposisi.*

Beban kognitif ekstranus terjadi karena kompleksitas format petunjuk (dalam kasus ini adalah format pengungkapan laporan keuangan) yang diterima investor sebagai dasar melakukan prediksi laba. Karena harus memperhatikan komponen-komponen laba agar tidak terjadi beban kognitif intrinsik yang berlebihan, investor harus melihat laporan laba rugi dan laporan arus kas secara sekaligus. Hodder *et al.* (2007) menemukan bahwa investor mengalami kesulitan ketika menginterpretasikan bagian aktivitas operasi dalam laporan aliran kas karena kompleksitasnya. Hodder *et al.* (2007) menemukan bahwa akurasi prediksi investor menjadi kurang akurat ketika laporan aliran kas disajikan menggunakan metode tidak langsung. Investor dalam hal ini harus mengatasi beban kognitif ekstranus yang terjadi karena format penyajian laporan aliran kas.

Hewitt (2007) menyatakan bahwa perubahan dalam format pengungkapan laporan keuangan diperlukan untuk mengurangi beban ekstranus. Maines dan McDaniel (2002) menyatakan tiga saran untuk perubahan penyajian laporan keuangan dalam konteks komponen-komponen akrual dan arus kas yang mempunyai persistensi yang berbeda yaitu: (1) memecah (*disaggregate*) laba menjadi komponen akrual dan kas; (2) menghubungkan komponen akrual dan kas; dan (3) meletakkan komponen-komponen tersebut dalam laporan keuangan. Berdasarkan saran Maines dan McDaniel (2002) tersebut, Hewitt (2007) mengembangkan format *disaggregated disclosure format* di mana dalam laporan laba rugi disajikan komponen-komponen laba yaitu akrual dan arus kas (lihat tabel 1). Dengan *disaggregated disclosure format* tersebut, Hewitt (2007) berargumen bahwa beban kognitif ekstranus akan berkurang dibanding ketika investor menggunakan *traditional disclosure format*.

-----Tabel 1-----

Format tersebut dapat meminimalkan beban pemrosesan informasi karena investor tidak harus melihat laporan aliran kas yang sering menyulitkan investor (terutama laporan aliran kas dengan metoda tidak langsung). Dengan pengurangan beban pemrosesan informasi tersebut, beban kognitif ekstranus investor akan berkurang sehingga akurasi prediksi investor akan menjadi lebih baik. Temuan empiris Hewitt (2007) mendukung dugaan bahwa efektivitas *disaggregated*

disclosure format dapat mengurangi beban ekstranus yang berlebihan. Berdasar argumentasi di atas, maka diajukan hipotesis berikut:

H3: *Ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, disaggregated disclosure format akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan traditional disclosure format.*

Metode Penelitian

Disain Eksperimen

Disain eksperimen yang digunakan adalah $2 \times 2 \times 2$ *mixed model design*. Dalam eksperimen ini terdapat tiga variabel independen yang dimanipulasi yaitu: (1) persistensi komponen-komponen laba (persisten vs. tidak persisten), (2) tugas prediksi laba masa mendatang (didekomposisi vs. tidak didekomposisi), dan (3) format pengungkapan laporan keuangan (*disaggregated vs traditional*). Variabel persistensi komponen-komponen laba dimanipulasi dengan *within subject design* sedangkan dua variabel independen lainnya dimanipulasi *between subject design*. Disain eksperimen penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

-----Tabel 2-----

Variabel-variabel Penelitian

a. Variabel persistensi komponen-komponen laba

Variabel persistensi komponen-komponen laba dimanipulasi pada dua level yaitu persisten dan tidak persisten. Dalam kondisi “Persisten”, partisipan akan menerima informasi laporan keuangan selama lima tahun (2003-2007) dari sebuah perusahaan yang menunjukkan persistensi dalam komponen akrual dan arus kas. Persistensi yang sama ditunjukkan dengan pola runtun waktu akrual, arus kas, dan laba yang sama (seperti pola d, e, dan f di atas). Dalam kondisi “Tidak persisten”, partisipan akan memperoleh informasi laporan keuangan selama lima tahun (2003-2007) dari sebuah perusahaan yang menunjukkan tidak persistennya komponen-komponen akrual dan arus kas. Persistensi yang tidak sama ditunjukkan dengan pola runtun waktu akrual, arus kas, dan laba yang tidak sama (seperti pola a, b, dan c di atas).

b. Variabel tugas prediksi laba mendatang

Manipulasi variabel tugas prediksi laba dilakukan dengan menginformasikan partisipan dalam kondisi “dekomposisi” bahwa laba terdiri dari komponen kas dan non kas (akrual) dan

meminta mereka untuk memprediksi komponen kas dan non kas tersebut untuk periode mendatang (tahun 2008). Partisipan dalam kondisi “tidak didekomposisi” tidak diberi informasi bahwa laba terdiri dari komponen kas dan non kas dan diminta memprediksi laba periode mendatang saja (tahun 2008).

c. Variabel format pengungkapan

Variabel format pengungkapan dimanipulasi pada dua level yaitu *disaggregate disclosure format* dan *traditional disclosure format* (lihat gambar 1). Partisipan dalam kondisi “*disaggregated disclosure format*” menerima format *disaggregate* sedangkan partisipan dalam kondisi “*traditional disclosure format*” menerima format *traditional*.

d. Variabel dependen: Akurasi Prediksi Laba

Penelitian ini menggunakan akurasi prediksi laba periode selanjutnya (tahun 2008) sebagai variabel dependen. Mengikuti beberapa riset yang menguji akurasi prediksi, pengukuran akurasi prediksi menggunakan formula:

$$\text{Akurasi prediksi laba (\%)} = 1 - \frac{|\text{prediksi} - \text{aktual}|}{\text{aktual}}$$

Sesuai dengan formula di atas, akurasi prediksi laba dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan 100% dikurangi persentase kesalahan prediksi laba. Kesalahan prediksi laba dihitung sebagai nilai absolut dari perbedaaan antara nilai prediksi laba partisipan dan nilai aktual laba. Nilai aktual laba ditentukan berdasar pola runtun waktu laba periode-periode sebelumnya.

Partisipan Eksperimen

Dengan mengacu pada argumen Fredericson *et al.* (2006) partisipan dalam eksperimen ini adalah mahasiswa S1 akuntansi yang telah menyelesaikan mata kuliah akuntansi keuangan menengah dan analisis laporan keuangan. Fredericson *et al.* (2006) berargumen bahwa partisipan mahasiswa tersebut memenuhi kriteria penting yaitu: (1) mereka telah memiliki pemahaman yang *reasonable* tentang aktivitas bisnis dan ekonomi, dan (2) mereka telah memiliki pengetahuan dasar tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Prosedur Eksperimen

Setelah menerima penjelasan tentang tujuan eksperimen, partisipan menerima secara random (*random assignment*) salah satu dari enam material eksperimental. Setelah menerima material kasus, partisipan diminta membuat prediksi untuk laba periode mendatang (tahun 2008). Partisipan juga diminta untuk menyatakan berapa besar keyakinan mereka terhadap akurasi yang dilaporkan (0-100%). Riset-riset sebelumnya menunjukkan hubungan antara keyakinan terhadap akurasi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan investor (Hirshleifer 2001; Bloomfield et al. 1999). **Material Eksperimen**

Material eksperimen dikembangkan dari kasus eksperimen yang digunakan Hewitt (2007). Setiap partisipan menerima material berupa gambaran umum sebuah perusahaan (aktivitas utama, industri dimana perusahaan berkompetisi, dan umur perusahaan), pertumbuhan penjualan produk utama perusahaan, dan laporan keuangan (terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan aliran kas) tahun 2003-2007. Setiap partisipan menerima format neraca dan laba aliran kas yang sama. Partisipan dalam kondisi “Tidak Persisten” menerima laporan laba rugi yang menunjukkan: (1) pola runtun waktu komponen kas dari laba dengan pola *triangular number series*, (2) pola runtun waktu komponen akrual dari laba dengan pola *oscillating*, dan (3) pola runtun waktu laba dengan pola *oscillating* dan *triangular number series*. Pola runtun waktu tersebut merupakan sebuah skenario dimana komponen kas (akrual) dari laba mempunyai persistensi yang relatif lebih tinggi (rendah). Partisipan dalam kondisi “Persisten” menerima laporan laba rugi yang menunjukkan pola linier untuk komponen kas, akrual, dan laba. Hewitt (2007) telah memasukkan *stochastic percentage errors* dalam data komponen-komponen laba sehingga laba tidak dapat diprediksi secara sempurna dari laporan keuangan.

Laporan keuangan telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga komponen akrual dari laba merupakan perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Oleh karena itu, partisipan dalam kondisi “*Traditional Disclosure Format*” tetap dapat menghitung besarnya komponen akrual dari laba meskipun laporan laba rugi tidak mencantumkan besarnya komponen akrual tersebut.

Cek Manipulasi

Cek manipulasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan tentang format pengungkapan laporan keuangan yang diberikan. Partisipan dalam kondisi “*disaggregated disclosure format*” seharusnya menyadari bahwa mereka menerima laporan laba rugi yang menunjukkan adanya “pemecahan” laba menjadi komponen kas dan non kas. Sebaliknya, partisipan dalam kondisi “*traditional disclosure format*” seharusnya menyadari bahwa mereka menerima laporan laba rugi yang menunjukkan laba agregasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan *mixed model analysis of variance* (ANOVA). Hipotesis 1 didukung jika rata-rata akurasi prediksi partisipan dalam sel/kondisi “Persistensi Berbeda” lebih rendah secara signifikan dibandingkan rata-rata akurasi prediksi partisipan dalam kondisi “Persistensi Sama”. Selain itu, *main effect* variabel persistensi dalam hasil ANOVA juga harus signifikan secara statistis. Pengujian hipotesis 2 dan 3 menggunakan *between subject design* ANOVA. Hipotesis 2 didukung jika rata-rata akurasi prediksi partisipan pada sel “dekomposisi” (sel A dan B) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan rata-rata akurasi prediksi partisipan pada sel “tidak dekomposisi” (sel C dan D). Hipotesis 3 didukung jika rata-rata akurasi prediksi partisipan pada sel “*disaggregated*” (sel A dan C) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan rata-rata akurasi prediksi partisipan pada sel “tradisional” (sel B dan D).

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Partisipan eksperimen penelitian ini terdiri atas 60 orang mahasiswa S1 akuntansi. Setiap sel terdiri atas 15 orang yang dimasukkan secara random (*random assignment*) ke setiap sel eksperimen. Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif yaitu rata-rata dan deviasi standar akurasi prediksi untuk setiap sel eksperimen. Dengan disain *within subject* untuk variabel persistensi maka setiap partisipan membuat prediksi untuk laporan keuangan yang komponen-komponen laba mempunyai persistensinya sama dan berbeda. Statistik deskriptif pada tabel 3 menunjukkan bahwa

rata-rata akurasi prediksi lebih tinggi untuk sel persistensi sama (83,17%) dibandingkan sel persistensi berbeda (72,60%). Perbedaan rata-rata akurasi prediksi ini signifikan dengan t-hitung 10,57 sehingga mengindikasikan dukungan terhadap hipotesis pertama. Statistik deskriptif dan uji t pada tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat akurasi prediksi laba mendatang menjadi lebih rendah ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda dibandingkan ketika mempunyai persistensi yang sama.

-----Tabel 3-----

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama menggunakan *mixed model ANOVA* karena variabel persistensi menggunakan *within subject design* sedangkan variabel tugas prediksi dan format pengungkapan menggunakan *between subject design*. Hasil pengujian hipotesis pertama disajikan pada tabel 4. Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan bahwa efek utama (*main effect*) variabel persistensi adalah signifikan dengan nilai F sebesar 165,219. Hasil ini konsisten dengan hasil pada tabel 3 yang menunjukkan dukungan terhadap hipotesis pertama. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu tingkat akurasi prediksi laba mendatang menjadi kurang akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda dibandingkan ketika mempunyai persistensi yang sama didukung oleh bukti empiris.

-----Tabel 4-----

Gambar 1 merupakan grafik plot hasil pengujian H1 dengan menggunakan *mixed model ANOVA*. Grafik tersebut juga menunjukkan dukungan terhadap hasil pengujian sebelumnya yaitu bahwa tingkat akurasi prediksi laba mendatang lebih tinggi untuk kondisi persistensi sama (panel A) dibandingkan kondisi persistensi berbeda (panel B). Selain itu, plot tersebut juga mengindikasikan bahwa metoda terbaik untuk meningkatkan akurasi prediksi laba adalah dengan dekomposisi tugas dan format pengungkapan *disaggregated*. Metoda tersebut efektif untuk kondisi persistensi sama maupun persistensi berbeda.

-----Gambar 1-----

Hasil Pengujian Hipotesis 2 dan 3

Hipotesis 2 dan 3 memfokuskan pada metoda atau strategi untuk meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda. Terdapat dua metoda yang dihipotesiskan dapat meningkatkan akurasi prediksi mendatang yaitu dekomposisi tugas (H2) dan *disaggregated disclosure* (H3). Pengujian H2 dan H3 menggunakan *between subject design ANOVA* dengan hasilnya disajikan pada tabel 5. Hipotesis 2 menyatakan bahwa, ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, tugas prediksi yang didekomposisi akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan tugas prediksi yang tidak didekomposisi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efek utama (*main effect*) variabel tugas prediksi signifikan secara statistis ($F=19,300$, nilai $p=0,000$, uji dua arah). Hasil ini menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 2. Pengujian lebih lanjut dilakukan dengan membandingkan rata-rata akurasi prediksi sel tugas prediksi yang didekomposisi dengan tugas prediksi yang tidak didekomposisi. Hasil pada tabel 6 panel A menunjukkan bahwa rata-rata akurasi prediksi laba mendatang sel tugas didekomposisi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sel tugas didekomposisi (75,10% vs. 70,11%, perbedaan rata-rata signifikan dengan $t\text{-hitung}=3,173$ dan nilai $p=0,003$). Kedua hasil pengujian ini menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 2.

-----Tabel 5-----

Hipotesis 3 menyatakan bahwa, ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, *disaggregated disclosure format* akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan *traditional disclosure format*. Hasil pengujian pada tabel 5 menunjukkan bahwa efek utama (*main effect*) variabel format pengungkapan signifikan secara statistis ($F=44,285$, nilai $p=0,000$, uji dua arah). Hasil pada tabel 6 panel B menunjukkan bahwa rata-rata akurasi prediksi laba mendatang sel *disaggregated* adalah sebesar 76,38% dan lebih tinggi dibandingkan dengan *traditional* sebesar 68,82%. Hasil pengujian *independent sample t-test* menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata ini signifikan ($t\text{-hitung}=7,173$, nilai $p=0,003$, uji dua arah). Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 3. Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan *disaggregated format disclosure* dapat meningkatkan akurasi prediksi laba dibandingkan *traditional format disclosure*.

-----Tabel 6-----

Analisis Tambahan

Hasil pengujian dengan ANOVA pada tabel 5 menunjukkan bahwa efek interaksi (*interaction effect*) antara variabel tugas prediksi dan format pengungkapan adalah signifikan secara statistik (nilai $F=10,925$, nilai $p=0,002$). Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut saling memperkuat dalam meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang. Pengujian lebih lanjut dilakukan dengan *multiple comparison* untuk membandingkan rata-rata akurasi prediksi laba antarsel. Hasil pengujian *mutiple comparison* ANOVA dengan Tukey HSD, Scheffe, dan LSD disajikan pada tabel 7.

Hasil pada tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata prediksi laba sel interaksi tugas prediksi-didekomposisi dan format pengungkapan-*disaggregated* sebesar 80,76% lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sel-sel lain. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akurasi prediksi laba memerlukan penggunaan kedua metoda (tugas prediksi-didekomposisi dan format pengungkapan-*disaggregated*) secara bersama-sama. Penggunaan kedua metoda tersebut lebih efektif dibandingkan hanya penggunaan salah satu metoda. Sebagai contoh, penggunaan metoda tugas prediksi didekomposisi dengan format pengungkapan tradisional hanya mempunyai rata-rata akurasi prediksi laba mendatang sebesar 69,44% dan tidak berbeda signifikan dengan sel-sel lainnya. Rata-rata sebesar 69,44% tersebut juga tidak berbeda signifikan dengan tanpa *treatment* apapun (sel tidak didekomposisi-tradisional) sebesar 68,21%.

-----Tabel 7-----

Gambar 2 menyajikan plot interaksi variabel tugas prediksi dan format pengungkapan. Plot tersebut memperkuat hasil pada tabel 6 yaitu bahwa peningkatan akurasi prediksi laba memerlukan penggabungan kedua strategi. Rata-rata akurasi prediksi laba mendatang dengan menginteraksikan metoda dekomposisi dan *disaggregated disclosure* adalah paling tinggi dibanding sel-sel lain yaitu sebesar 80,76%. Dalam gambar 2 tersebut nampak bahwa kedua

treatment yang lain (dekomposisi-tradisional dan tidak didekomposisi-*disaggregated*) menghasilkan rata-rata akurasi prediksi laba mendatang yang hampir sama dengan sel tanpa *treatment* (tidak didekomposisi-tradisional).

-----Gambar 2-----

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 1 yaitu bahwa tingkat akurasi prediksi laba mendatang menjadi kurang akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda dibandingkan ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang sama. Temuan ini mendukung teori beban kognitif (*cognitive load theory*) yang menyatakan bahwa sebuah tugas tidak akan dapat diselesaikan dengan baik ketika individu menghadapi beban kognitif yang berlebihan. Ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, individu yang membuat prediksi laba mendatang akan menghadapi beban kognitif yang berlebihan yaitu beban kognitif intrinsik dan beban kognitif ekstrinsik (Sweller, 1988; Sweller *et al.*, 1990). Beban ini menyebabkan akurasi prediksi menjadi kurang akurat. Temuan penelitian ini juga mendukung argumen Sloan (1996) yang menyatakan bahwa anomali akrual tersebut karena fiksasi investor pada laba. Karena fiksasi tersebut, investor gagal membedakan komponen-komponen laba periode sekarang sehingga akurasi prediksi menjadi tidak akurat. Temuan ini juga konsisten dengan riset-riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa investor tidak akurat mengestimasi komponen-komponen laba yang tidak persisten (misalnya Sloan, 1996; Xie 2001; Bradshaw *et al.*, 2001; Dechow dan Dichev, 2002; Hirshleifer dan Teoh, 2003; Irawan dan Ratmono, 2004).

Hasil pengujian juga menunjukkan dukungan terhadap hipotesis kedua yaitu bahwa ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, tugas prediksi yang didekomposisi akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan tugas prediksi yang tidak didekomposisi. Temuan ini mendukung teori beban kognitif dan argumen Hirshleifer dan Teoh (2003) bahwa investor seharusnya melakukan dekomposisi tugas dengan memperhatikan komponen-komponen laba (kas dan akrual) ketika masing-masing komponen

tersebut mempunyai persistensi yang berbeda. Dengan memperhatikan pola komponen-komponen laba (kas dan akrual), investor tidak akan mengalami beban kognitif intrinsik yang berlebihan sehingga prediksi laba mendatang menjadi lebih akurat.

Hipotesis ketiga yaitu bahwa ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda, *disaggregated disclosure format* akan dapat meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan *traditional disclosure format* didukung oleh bukti empiris penelitian ini. Temuan ini mendukung argumen Hewitt (2007) yang menyatakan bahwa *disaggregated disclosure format* diperlukan untuk mengurangi beban kognitif ekstraneus. Format tersebut dapat meminimalkan beban pemrosesan informasi karena investor tidak harus melihat laporan aliran kas yang sering menyulitkan investor (terutama laporan aliran kas dengan metoda tidak langsung).

Hasil pengujian juga menunjukkan adanya efek interaksi antara variabel tugas prediksi dan format pengungkapan adalah signifikan secara statistik. Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut saling memperkuat dalam meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata prediksi laba sel tugas prediksi-didekomposisi dan format pengungkapan-*disaggregated* lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sel-sel lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akurasi prediksi laba memerlukan penggunaan kedua metoda (tugas prediksi-didekomposisi dan format pengungkapan-*disaggregated*) secara bersama-sama. Penggunaan kedua metoda secara bersama-sama tersebut lebih efektif dalam meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang dibandingkan hanya penggunaan salah satu metoda saja. Meskipun hipotesis *main effect* (hipotesis 2 dan 3) didukung namun interpretasinya menjadi kurang relevan. Pengaruh dari setiap *treatment* yaitu tugas prediksi dan format pengungkapan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Temuan penelitian ini mendukung argumentasi Hewitt (2009) bahwa diperlukan penggabungan dua solusi yaitu (1) akuisisi informasi dengan dekomposisi tugas, dan (2) pemrosesan informasi dengan pengungkapan informasi laba secara *disaggregated*.

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Kesimpulan

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung teori beban kognitif yaitu bahwa prediksi laba mendatang menjadi akurat ketika komponen-komponen laba mempunyai persistensi yang berbeda. Subjek eksperimen mengalami beban kognitif intrinsik dan ekstranas yang berlebihan dalam membuat prediksi laba mendatang ketika komponen arus kas operasi dan akrual mempunyai persistensi yang berbeda. Fenomena ini disebut sebagai anomali akrual yang disebabkan oleh bias fiksasi investor. Temuan penelitian eksperimental ini juga mendukung temuan penelitian terdahulu yang menggunakan data arsip laporan keuangan (*archival data* bahwa investor tidak secara akurat mengestimasi komponen-komponen laba (misalnya Sloan, 1996; Xie 2001; Bradshaw *et al.*, 2001; Dechow dan Dichev, 2002; Hirshleifer dan Teoh, 2003).

Hasil eksperimen penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa, ketika komponen-komponen laba tidak persisten, strategi meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang memerlukan penggabungan dua *treatment* yaitu dekomposisi tugas dan format pengungkapan laporan keuangan *disaggregated*. Hasil pengujian menunjukkan adanya efek interaksi yang signifikan dari kedua variabel tersebut sehingga penggunaan salah satu teknik saja tidak cukup untuk meningkatkan akurasi prediksi laba.

Keterbatasan dan Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran format pengungkapan laporan keuangan dalam mengurangi bias fiksasi investor dan meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi pentingnya penyusun laporan keuangan dan regulator untuk mengembangkan sebuah format pengungkapan laporan keuangan yang dapat membantu investor dalam meningkatkan akurasi prediksi laba mendatang. Hasil penelitian ini mendukung argumentasi Hewitt (2007) bahwa format laporan keuangan tradisional harus diubah menjadi *disaggregated format* dalam upaya meningkatkan peran informasi akuntansi dalam pasar yang efisien (Xu dan Lacina, 2009; Dechow *et al.*, 2008; Khan, 2008). Hasil penelitian

menunjukkan bukti empiris bahwa dekomposisi tugas dapat mengurangi terjadinya bias fiksasi investor yang disebabkan oleh fenomena anomali akrual. Dengan menekankan pentingnya peran dekomposisi tugas, hasil penelitian ini dapat berguna bagi investor dalam melakukan tugas prediksi yang kompleks.

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian ini yang dapat menjadi saran bagi penelitian mendatang. Pertama, penelitian ini menggunakan disain eksperimen laboratorium yang mempunyai kelebihan dalam validitas internal namun terbatas dalam validitas eksternal. Penggunaan disain penelitian seperti eksperimen lapangan atau survei kuesioner pada penelitian mendatang dapat menguji generalisasi temuan penelitian ini. Kedua, disain eksperimen dalam penelitian ini juga mempunyai keterbatasan yaitu tidak semua informasi yang relevan dalam membuat prediksi laba diberikan kepada subjek. Meskipun demikian, telah dilakukan beberapa penambahan informasi yang relevan dalam material eksperimen penelitian ini seperti yang disarankan oleh Hewitt (2007). Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penambahan informasi lain yang mungkin relevan dalam eksperimen prediksi laba.

Daftar Pustaka

- Balsam, S., E. Bartov, & C. Marquardt. 2002. Accruals management, investor sophistication, and equity valuation: evidence from 10-Q filings. *Journal of Accounting Research* 40 (4): 987-1012
- Beaver, W.H. 2002. Perspective on recent capital market research. *The Accounting Review* 77(2): 453-474
- Bloomfield, R., R. Libby, & M.W. Nelson. 1999. Confidence and the welfare of less-informed investors. *Accounting, Organizations and Society* 24: 623-647
- Bradshaw, M.T., S.A. Richardson, & R.G. Sloan. 2001. Do analysts and auditors use information on accruals? *Journal of Accounting Research* 39(1): 45-75
- Collins, D.W. G.Gong, & P. Hribar. 2003. Investor sophistication and the mispricing of accruals. *Review of Accounting Studies* 8 (2-3): 251-276
- Dechow, P. S. Richardson. dan R. Sloan. 2008. The Persistence and Pricing of the Cash Component of Earnings. *Journal of Accounting Research* 46(3): 537-566.
- Fredericson, J.R., F.D. Hodge & J.H. Pratt. 2006. The evolution of stock option accounting: disclosure, voluntary, recognition, mandated recognition, and management disavowals. *The Accounting Review* 81(5): 1073-1093
- Hewitt, M. 2007. Cognitive load theory and accrual anomaly. *Disertasi*, University of Washington.
- Hewitt, M. 2009. Improving Investors' Forecast Accuracy when Operating Cash Flows and Accruals Are Differentially Persistent. *The Accounting Review* 84(6): 1913-1931
- Hirshleifer, D., K. Hou & S.H. Teoh. 2007. The Accrual anomaly: risk or mispricing? Working paper, The Ohio State University
- Hirshleifer, D. & S.H. Teoh. 2003. Limited attention, information disclosure, and financial reporting. *Journal of Accounting and Economics* 36: 337-386
- Hodder, L., P.E. Hopkins, & D.A. Wood. 2007. The effects of financial statement and information complexity on cash flow forecasts. Working paper, Indiana University.
- Irawan, D. & D. Ratmono. 2004. Anomali Pasar Berbasis *Earnings*, Persistensi Akrua, dan *Earnings Management*. *Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi VII, Universitas Udayana, Bali.*
- Khan, M. 2008. Are accruals mispriced? Evidence from tests of an Intertemporal Capital Asset Pricing Model. *Journal of Accounting and Economics* 45: 55-77.
- Libby, R. R.J. Bloomfield, & M.W. Nelson. 2002. Experimental research in financial accounting. *Accounting, Organizations and Society* 27 (8): 775-810
- Maines, L.A. & L.S. McDaniel. 2000. Effects of comprehensive income characteristics on nonprofessional investor's judgment: The role of financial statement format. *The Accounting Review* 75(2): 179-207
- Nam, S. F. Brochet., dan J. Ronen. 2012. The Predictive Value of Accruals and Consequences for Market Anomalies. *Journal of Accounting, Auditing & Finance* 27(2): 151-176
- Pincus, M., S. Rajgopal, dan M.Venkatachalam. 2007. The Accrual Anomaly: International Evidence. *The Accounting Review* 82(1): 169-203
- Sloan, R.G. 1996. Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flow about future earnings? *The Accounting Review* 71(3): 289-315
- Sweller, J. 1988. Cognitive load during problem solving: effects on learning. *Cognitive Sciences* 12: 257-285
- Sweller, J. P. Chandler, & M. Cooper. 1990. Cognitive load as a factor in the structuring of technical material. *Journal of Experimental Psychology* 2: 176-192
- Wilks, T.J. & M.F. Zimbelman. 2004. Decomposition of fraud-risk assessments and auditors' sensitivity to fraud cues. *Contemporary Accounting Research* 21 (3): 719-745
- Xie, H. 2001. The mispricing of abnormal accruals. *The Accounting Review* 76(3): 357-373
- Xu, R. dan M. Lacina. 2009. Explaining the accrual anomaly by market expectations of future returns and earnings. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 25: 190-199

Lampiran A

Tabel 1

*Traditional vs. Disaggregated Disclosure Format****Traditional Disclosure Format***

	Tahun berakhir 31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007
Penjualan	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Kos Barang Terjual	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Laba Kotor	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi:					
Depresiasi	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Lainnya	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Laba Bersih	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx

Disaggregated Disclosure Format

	Tahun berakhir 31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007
Penjualan	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Kos Barang Terjual	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Laba Kotor	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi:					
Depresiasi	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Lainnya	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Laba Bersih	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Komponen-Komponen Laba Bersih:					
Aliran kas dari aktivitas operasi	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Komponen non kas (akrual)	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx
Laba Bersih	Xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx

Tabel 2
Disain Eksperimen

Tugas Prediksi Laba	Format Pengungkapan LK (Disclosure)	
	<i>Disaggregated</i> (1)	Tradisional (2)
Didekomposisi (1)	A (1,1)	B (1,2)
Tidak didekomposisi (2)	C (2,1)	D (2,2)

Tabel 3
Statistik Deskriptif Akurasi Prediksi (dalam persen)

Sel	N	Rata-rata (deviasi standar)	
		Persistensi Sama	Persistensi Berbeda
A (Didekomposisi, <i>Disaggregated</i>)	15	84,23 (5,25)	80,76 (5,04)
B (Didekomposisi, Tradisional)	15	82,99 (5,37)	69,44 (3,74)
C (Tidak Didekomposisi, <i>Disaggregated</i>)	15	83,39 (3,99)	72,01 (4,18)
D (Tidak Didekomposisi, Tradisional)	15	82,08 (4,26)	68,21 (4,52)
Keseluruhan	60	83,17 (4,70)	72,60 (6,54)
Perbedaan Rata-rata t- hitung (nilai p)			10,57 10,890 (0,000)

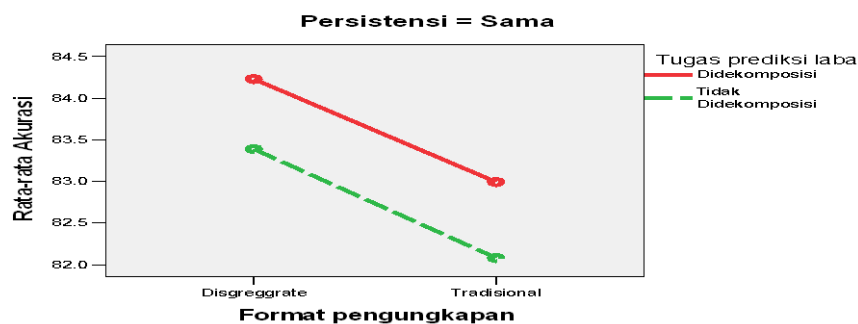
Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis 1 dengan *Mixed Model Design ANOVA*

Variabel	Df	F-statistik	Nilai p
Efek Utama:			
Persistensi	1	165,219	0,000
Tugas Prediksi	1	11,876	0,001
Format Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	1	26,911	0,000
Efek Interaksi:			
Persistensi*Tugas Prediksi	1	6,261	0,015
Persistensi* <i>Disclosure</i>	1	14,622	0,000
Tugas Prediksi* <i>Disclosure</i>	1	4,771	0,033
Persistensi*Tugas Prediksi* <i>Disclosure</i>	1	5,315	0,025

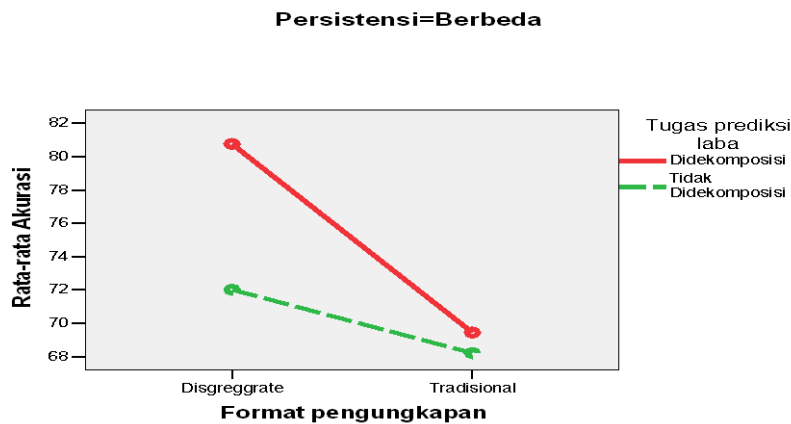
Gambar 1

Grafik Plot Akurasi Prediksi Laba Mendatang

Panel A: Kondisi Persistensi Komponen Laba Sama



Panel B: Kondisi Persistensi Komponen Laba Berbeda



Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis 2 dan 3

Variabel	Df	Mean Square	F-statistik	Nilai p
Efek Utama:				
Tugas Prediksi	1	373,701	19,300	0,000
Format Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	1	857,455	44,285	0,000
Efek Interaksi:				
Tugas Prediksi* <i>Disclosure</i>	1	211,538	10,925	0,002
Sumber Variasi				
Model	3	480,898	24,837	0,000
Error	56	19,362		
Adjusted R Square	0,548			

Tabel 6
Perbedaan Rata-rata Akurasi Prediksi Antarsel (dalam persen)

Panel A: Hasil Pengujian Hipotesis 2

Keterangan	Sel Tugas Prediksi	
	Didekomposisi (sel A dan B)	Tidak Didekomposisi (Sel C dan D)
Rata-rata (deviasi standar)	75,10 (7,22)	70,11 (4,69)
Perbedaan Rata-rata t- hitung (nilai p)	4,99 3,173 (0,003)	

Panel B: Hasil Pengujian Hipotesis 3

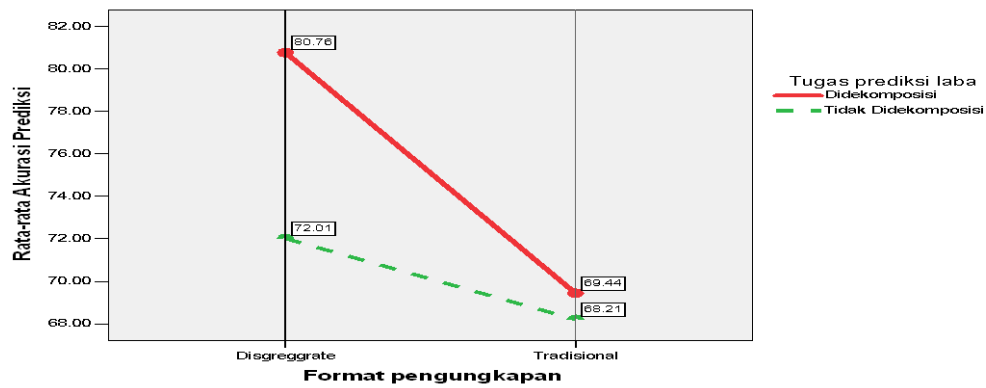
Keterangan	Sel Format Pengungkapan	
	Disaggregated (sel A dan C)	Tradisional (Sel B dan D)
Rata-rata (deviasi standar)	76,38 (6,36)	68,82 (4,12)
Perbedaan Rata-rata t- hitung (nilai p)	7,56 5,458 (0,000)	

Tabel 7
Rata-rata Akurasi Prediksi Laba:
Interaksi antara Tugas Prediksi dan Format Pengungkapan Laporan Keuangan
 (dalam persen; deviasi standar dalam tanda kurung)

Tugas Prediksi Laba	Format Pengungkapan	
	<i>Disaggregated</i>	Tradisional
Didekomposisi	80,76** (5,04)	69,44 (3,74)
Tidak didekomposisi	72,01 (4,18)	68,21 (4,52)

Keterangan= ** berbeda signifikan dengan sel/kondisi eksperimental lain pada tingkat 0,05 dengan tiga pengujian *mutiple comparison* yaitu Tukey HSD, Scheffe, dan LSD

Gambar 2
Plot Interaksi antara Tugas Prediksi dan Format Pengungkapan



Lampiran B

Ringkasan Material Eksperimen

Dalam eksperimen ini anda diminta berperan sebagai analisis laporan keuangan yang bertugas membuat prediksi laba bersih sebuah perusahaan untuk tahun 2008. Untuk membantu penyusunan prediksi, anda akan diberikan informasi tentang: (i) Gambaran umum perusahaan, (ii) Laporan keuangan yang meliputi Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Aliran Kas tahun 2003-2007. Anda harus memberikan perhatian pada informasi-informasi tersebut sebelum membuat prediksi. Tugas prediksi seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit.

Instruksi:

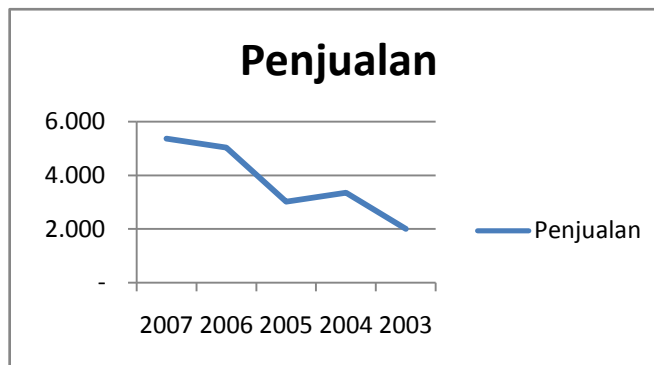
1. Peserta tidak diperkenankan saling berdiskusi dalam proses pembuatan prediksi.
2. Peserta tidak diperkenankan menggunakan material lain selain yang diberikan (misal catatan, buku teks, paket software, dan sebagainya).
3. Peserta tidak diperkenankan kembali ke tugas sebelumnya.

Jawaban anda akan dijaga kerahasiannya dan akan dianalisa secara kolektif hanya setelah digabungkan dengan jawaban dari peserta lain. Berikut adalah informasi tentang gambaran umum perusahaan yang akan anda prediksi laba bersihnya untuk tahun 2008.

Gambaran Umum Perusahaan

Untuk Kondisi: “ Tidak Persisten”:

Perusahaan “Megafood” merupakan perusahaan yang menghasilkan berbagai produk makanan dan berkompetisi pada industri barang konsumen. Perusahaan ini telah beroperasi selama 15 tahun dan terus mengalami peningkatan dalam pertumbuhan penjualan. Grafik pertumbuhan penjualan selama tahun 2003-2007 adalah sebagai berikut:



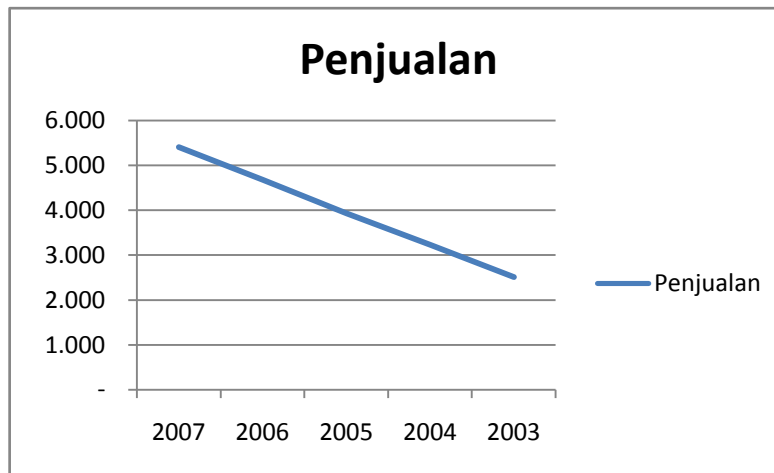
Penjualan yang terus meningkat seperti ditunjukkan dalam grafik di atas disebabkan oleh strategi pengembangan berbagai produk sesuai dengan riset selera konsumen. Pada periode 2003-2007 perusahaan “ Megafood” tidak melakukan aktivitas merger dan akuisisi. Industri barang konsumen merupakan industri yang menarik karena terus mengalami peningkatan penjualan. Namun, industri barang konsumen saat ini mengalami tekanan karena kenaikan harga bahan baku dan bahan bakar. “Megafood” merespon tantangan tersebut dengan mencoba melakukan efisiensi dalam proses produksinya.

Gambaran Umum Perusahaan

Untuk Kondisi: “ Persisten”:

Perusahaan “Akbarfood” merupakan perusahaan yang menghasilkan berbagai produk makanan dan berkompetisi pada industri barang konsumen. Perusahaan ini telah beroperasi selama 15 tahun dan

terus mengalami peningkatan dalam pertumbuhan penjualan. Grafik pertumbuhan penjualan selama tahun 2003-2007 adalah sebagai berikut:



Penjualan yang terus meningkat seperti ditunjukkan dalam grafik di atas disebabkan oleh strategi pengembangan berbagai produk sesuai dengan riset selera konsumen. Pada periode 2003-2007 perusahaan “Akbarfood” tidak melakukan aktivitas merger dan akuisisi. Industri barang konsumen merupakan industri yang menarik karena terus mengalami peningkatan penjualan. Namun, industri barang konsumen saat ini mengalami tekanan karena kenaikan harga bahan baku dan bahan bakar. “Akbarfood” merespon tantangan tersebut dengan mencoba melakukan efisiensi dalam proses produksinya.

Laporan Keuangan Perusahaan

Informasi untuk Kondisi “Tugas Tidak Didekomposisi”:

Pada bagian ini, anda akan memperoleh informasi tentang laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Aliran Kas.

Informasi untuk Kondisi “Tugas Didekomposisi”:

Pada bagian ini, anda akan memperoleh informasi tentang laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Aliran Kas. Perhatikan bahwa laba bersih terdiri dari komponen kas dan komponen non kas (akrual)

Untuk kondisi “Tidak Persisten/Disaggregated Disclosure Format”:

Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007
(dalam jutaan rupiah)

	Tahun berakhir 31 Desember				
	2007	2006	2005	2004	2003
Penjualan	5.369	5.033	3.017	3.353	2.009
Kos Barang Terjual	2.685	2.517	1.509	1.677	1.004
Laba Kotor	2.684	2.516	1.508	1.676	1.005
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi:					
Depresiasi	334	309	302	303	363
Lainnya	773	704	374	374	13
Laba Bersih	1577	1.503	832	999	629
Komponen-Komponen Laba Bersih:					
Aliran kas dari aktivitas operasi	2.022	1.622	1.256	1.122	1.073
Komponen non kas (akrual)	(445)	(119)	(424)	(123)	(444)
Laba Bersih	1.577	1.503	832	999	629

Untuk kondisi “Tidak Persisten/*Traditional Disclosure Format*”:

Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007
(dalam jutaan rupiah)

	Tahun berakhir 31 Desember				
	2007	2006	2005	2004	2003
Penjualan	5.369	5.033	3.017	3.353	2.009
Kos Barang Terjual	2.685	2.517	1.509	1.677	1.004
Laba Kotor	2.684	2.516	1.508	1.676	1.005
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi:					
Depresiasi	334	309	302	303	363
Lainnya	773	704	374	374	13
Laba Bersih	1.577	1.503	832	999	629

Harga Transfer Negosiasi: Apakah Pembingkai Mempengaruhi Upaya Manager?

*ANTONIUS GRIVALDI SONDAKH**
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ABSTRACT: A common approach to set transfer prices is via intra-firm negotiation. This research purposed to examine the framing effect described by prospect theory, against the manager's effort that involved determining the negotiated transfer pricing. Forthly undergraduated students who participated as experiments respondents, play a role as division manager both seller and buyer, given the information that was positive frame (to get benefit) and negative frame (loss suffered). They have to finished an assignment form as their negotiations real effort.

The results showed that the framing of an element of individual cognition, in two different ways of perceived both disappointment and fairness, motivating individual (managers) to give the best effort. Efforts caused by the negative-framed information will be greater than efforts caused by positive-framed information. This study also proved that buyer division manager, according to their inclination at the time of negotiations, will provide a higher level of effort than seller division manager. With this understanding, the role of management accountants who provide information to consider the decision to sell or buy products through transfer pricing, will becomes increasingly important.

Keywords: Framing, prospect theory, negotiated transfer pricing, effort, perceived both fairness and disappointment

* Author can be contacted at: sondakh.anton@gmail.com

PENDAHULUAN

Negosiasi merupakan sebuah metoda yang umum digunakan oleh banyak perusahaan dalam menetapkan harga transfer (Ghosh, 2000). Ghosh (1994) menemukan bahwa metoda harga transfer negosiasi menghasilkan laba perusahaan yang lebih tinggi dan konflik managerial yang lebih kecil dibandingkan dengan metoda harga transfer tersentralisasi. Kachelmeier dan Towry (2002) bahkan menyebutkan bahwa, meski harga pasar eksternal tersedia, penetapan harga transfer negosiasi berpotensi digunakan sebagai mekanisme kontrol (pengendalian manajemen terutama pada organisasi yang terdesentralisasi), serta dapat memberikan keseimbangan antara pertimbangan ekonomik dan pertimbangan sosial oleh divisi-divisi yang terkait dalam negosiasi. Penetapan harga transfer negosiasi penting bagi para manager yang bernegosiasi, karena dapat berpengaruh pada profit divisi sebagai ukuran kinerja divisi yang dipimpin, maupun bagi profit perusahaan.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) menguji pengaruh pembingkai dan teori prospek terhadap upaya manager dalam harga transfer negosiasi. Penelitian ini ditujukan untuk memverifikasi dugaan penulis bahwa pembingkai (positif/keuntungan dan negatif/kerugian) yang merupakan unsur kognisi individu, melalui dua cara yang berbeda (persepsi kecewa dan adil), akan memotivasi individu (para manager divisi yang terlibat dalam negosiasi harga transfer) untuk memberikan upaya yang terbaik; (2) apabila dugaan tersebut terdukung, apakah hasilnya akan sesuai dengan yang dijelaskan melalui teori prospek, bahwa upaya yang diakibatkan oleh informasi dengan bingkai negatif akan lebih besar dibandingkan upaya yang diakibatkan oleh informasi dengan bingkai positif. Hal ini tentu disebabkan oleh adanya bias kognisi individu karena pengaruh dari pembingkai yang diberikan; (3) penelitian ini juga ingin membandingkan tingkat upaya yang diberikan para manager, sesuai kecenderungan yang mereka miliki pada saat negosiasi.

Penelitian ini berkontribusi memperluas beberapa penelitian sebelumnya terkait topik proses negosiasi dalam penentuan harga transfer. Pertama, terhadap penelitian Ghosh dan Boldt (2006), penulis melakukan perluasan melalui tiga cara, yaitu: (1) Menguji variabel yang diduga dapat melengkapi serta menjelaskan fenomena yang ditunjukkan dalam hasil mereka. Penulis menduga upaya sebagai variabel intervening, dapat memediasi hubungan antara pembingkai informasi dengan perolehan hasil, yaitu, bagaimana seorang manager yang dibingkai dengan informasi negatif cenderung tidak fleksibel dalam proses tawar me-

nawar, serta justru memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan jika dibingkai dengan informasi positif. (2) Ingin mengetahui dengan pasti apakah pembingkaiian sendiri dapat mempengaruhi upaya yang diberikan manager. Dalam penelitian mereka, pembingkaiian dimanipulasi bersama dengan struktur kompensasi yang sudah pasti memiliki pengaruh pada upaya, yang serta merta justru mendistorsi kemampuan pembingkaiian dalam mempengaruhi upaya para manager. (3) Penelitian ini mengukur upaya bukan hanya untuk manager divisi penjual saja, melainkan juga diperluas untuk manager divisi pembeli. Kedua, memperluas penelitian terdahulu terkait dengan *fairness* (Luft dan Libby, 1997; Kachelmeier dan Towry, 2002; serta Chang dkk., 2008) yang jika diselidiki dapat memberikan upaya melalui dua cara yang berlawanan bagi para manager yang bernegosiasi. Penelitian yang dilakukan Chang dkk. (2008) memprediksi bahwa kesenjangan penilaian harga transfer antara pembeli dan penjual akan lebih besar di bawah bingkai kerugian daripada kondisi bingkai positif. Dari hal ini dapat diduga bahwa pada bingkai kerugian, negosiasi akan berjalan alot dan masing-masing pihak akan memberikan upaya yang lebih besar dibandingkan pada kondisi bingkai positif. Penelitian ini akan menguji pengaruh pembingkaiian secara khusus, dengan melepaskan pengaruh yang ditimbulkan dari unsur *social concern* yaitu *concern-for-others* sebagaimana dilakukan dalam penelitian mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memurnikan efek pembingkaiian terhadap upaya (motivasi) individu yang terdistorsi oleh manipulasi bersama *concern-for-others* tersebut. Ketiga, penelitian ini juga akan membuktikan secara empiris buah pikiran Bazerman (1994) bahwa pembeli akan lebih cenderung menerima resiko (*risk seeking*), sementara penjual akan lebih cenderung menghindari resiko (*risk averse*). Dengan kondisi tersebut, apakah upaya kedua manager divisi akan sesuai dengan yang diprediksi oleh teori prospek (*prospect theory*).

Dampak lanjutan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pada tataran praktek. Dengan memahami bahwa pembingkaiian akan mempengaruhi upaya manager dalam proses negosiasi harga transfer, peran para akuntan manajemen yang memahami dan menyediakan informasi akuntansi untuk keputusan menjual ataupun membeli produk melalui harga transfer, dapat semakin baik dalam memberikan analisis dan pertimbangannya. Sebagaimana dijelaskan Chang dkk. (2008), secara khusus pembingkaiian yang dilakukan dalam penentuan harga transfer dapat langsung dikontrol oleh akuntan manajemen. Sebagai contoh, akuntan manajemen dapat menghasilkan laporan berdasarkan negosiasi alternatif titik referensi untuk mendukung manajer divisi penjual yang terlibat dalam negosiasi harga transfer. Ketika harga pasar digunakan sebagai titik acuan, pengelolaan laporan akuntansi cenderung menyoroti po-

tensi kehilangan keuntungan sebagai harga transfer yang dinegosiasikan turun di bawah harga pasar (Perera dkk., 2003). Hal ini akan mengarahkan manajer negosiasi untuk mengadopsi bingkai kerugian (negatif). Sebaliknya jika laporan menggunakan kos produk sebagai titik acuan, fokus keuntungan sebagai harga transfer yang dinegosiasikan bergerak di atas kos produk (Colbert & Spicer, 1995). Hal ini mungkin menyebabkan manajer yang bernegosiasi akan mengadopsi bingkai keuntungan (positif).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Harga transfer Negosiasi

Harga transfer (*transfer pricing*) adalah merupakan harga produk atau jasa yang ditransfer secara internal oleh pusat-pusat pertanggungjawaban (divisi) dalam sebuah perusahaan yang terdesentralisasi (Sugiri, 2009). Harga transfer mempunyai pengaruh terhadap laba divisi pembeli maupun penjual serta laba perusahaan sebagai satu kesatuan. Selain pengaruhnya terhadap laba, harga transfer juga memiliki dampak pada autonomi divisi. Ketika laba perusahaan terpengaruh, maka top manajemen akan terdorong untuk melakukan intervensi terhadap keputusan membeli dari pihak eksternal ataupun memproduksi secara internal. Bentuk intervensi ini berpeluang untuk mengurangi autonomi dari tiap divisi yang terlibat dalam harga transfer. Untuk menjaga autonomi divisi yang ada, perusahaan tidaklah menentukan berapa rupiah besarnya harga transfer, melainkan menetapkan kebijakan (aturan) yang secara wajar dapat diterima oleh masing-masing manager divisi. Salah satu kebijakannya adalah penetapan harga transfer negosiasi (*negotiated transfer pricing*).

Ghosh (2000) menegaskan bahwa negosiasi merupakan sebuah metoda yang umum digunakan oleh banyak perusahaan dalam menetapkan harga transfer. Kachelmeier dan Towry (2002) menyebutkan bahwa meski harga pasar eksternal tersedia, harga transfer negosiasi berpotensi digunakan sebagai mekanisme kontrol, serta memberikan keseimbangan antara pertimbangan ekonomik dan perhatian sosial yang luas oleh divisi-divisi yang independen. Ghosh (1994) menemukan bahwa metoda harga transfer negosiasi menghasilkan laba perusahaan yang lebih tinggi dan konflik managerial yang lebih kecil dibandingkan dengan metoda harga transfer tersentralisasi. Watson dan Baumler (1975) menyatakan bahwa model harga transfer negosiasi menguntungkan organisasi karena berpotensi sebagai wahana untuk

mengintegrasikan tujuan organisasi dari berbagai tujuan divisi, meski memiliki kelemahan dapat menimbulkan distorsi pengukuran kinerja yang melihat fungsi kekuatan negosiasi lebih dominan daripada kinerja berbasis ekonomi. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penentuan harga transfer dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti harga pasar eksternal dan faktor-faktor perilaku termasuk keadilan (*fairness*) dan pembingkaiian (*framing*) (lihat Luft & Libby, 1997; Kachelmeier dan Towry, 2002; Ghosh dan Boldt, 2006; Chang dkk, 2008).

Chang dkk. (2008) mengatakan bahwa literatur tentang negosiasi sebelumnya telah menunjukkan pentingnya keadilan (*fairness*) selama proses negosiasi dan bahwa perkiraan harga yang adil dari negosiator akan menunjukkan *self-serving bias* (atau *egocentrism*). *Self-serving bias* mengacu pada bias kognitif yang timbul dari kecenderungan individu untuk melihat hasil yang lebih menguntungkan mereka sebagai sebuah keadilan ketika menyelesaikan konflik (Thompson dan Loewenstein, 1992). Baik Luft dan Libby (1997) serta Kachelmeier dan Towry (2002) menemukan bahwa penjual dan pembeli meletakkan bobot yang berbeda pada kedua titik referensi saat merumuskan penilaian. Karena *self-serving bias*, ekspektasi harga transfer penjual akan lebih dekat dengan harga pasar, sementara harapan pembeli akan lebih dekat dengan harga yang memberi keuntungan yang sama. Konflik ini dalam negosiasi bentuk distributif (*distributive "fixed pie" negotiation*) bisa jadi akan menghasilkan situasi persepsian kalah dan menang. Persepsian kalah dan menang disini dalam arti akan menimbulkan kekecewaan di satu pihak karena harga transfer yang diharapkannya akan tidak terwujud, dan persepsi mendapat keadilan dipihak lain karena harga transfer yang diharapkan akan terwujud. Hannah dkk. (2005), menjelaskan bahwa kedua kondisi ini sama-sama akan menghasilkan upaya dengan 2 arah yang berlawanan.

Dalam penelitian Ghosh dan Boldt (2006) terkait pembingkaiian informasi sebagai laba yang diperoleh/*made profit* (bingkai positif) dan laba dikorbankan/*profit foregone* (bingkai negatif) pada konteks penentuan harga transfer negosiasi, mereka menggunakan teori pembingkaiian untuk dapat membuktikan bahwa bagian laba yang didapatkan manager divisi penjual akan lebih besar ketika informasi dibingkai negatif dibandingkan dibingkai positif. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori prospek yang menyebutkan bahwa ketika informasi kepada seseorang dibingkai negatif, orang tersebut cenderung untuk lebih bersedia berkorban (*risk seeking*). Atau dengan kata lain, orang tersebut akan memberikan upaya yang lebih besar untuk jangan sampai kehilangan keuntungan (*profit foregone*).

Penelitian Ghosh dan Boldt (2006), serta Chang dkk. (2008), jika dikaitkan dengan bias kognisi yang terjadi sehingga mempengaruhi motivasi individu, cenderung mengalami distorsi. Ghosh dan Boldt (2006) dalam penelitiannya, memberi manipulasi pembingkai terhadap subjek bersama dengan struktur kompensasi. Kompensasi sendiri dalam banyak studi dapat dipastikan memiliki pengaruh pada motivasi individu untuk memberikan upaya yang optimal, sehingga dengan serta merta, justru mendistorsi pembingkai sendiri dalam mempengaruhi upaya para manager yang bernegosiasi. Demikian halnya dengan yang dilakukan Chang dkk. (2008). Mereka memanipulasi pembingkai bersama dengan unsur *sosial concern* yaitu *concern-for-others*. Hal ini tentunya juga akan membuat efek pembingkai terhadap upaya (motivasi) individu menjadi tidak murni.

Pembingkai dan Teori Prospek

Dalam teori psikologi kognitif, teori keputusan keprilakuan memperkenalkan adanya pembingkai dan teori prospek. Teori pembingkai menjelaskan tentang penyajian informasi yang secara substansi sama namun dalam bingkai yang berbeda (positif dan negatif). Pengaruh pembingkai adalah merupakan studi bias kognisi paling populer dalam literatur bias dan heuristik kognisi (Levin dkk., 1998; Kühberger, 1998). Birnberg dkk. (2007) mengatakan penelitian heuristik dan bias biasanya dihubungkan dengan perbedaan antara nilai subyektif dari hasil alternatif suatu keputusan dan nilai yang diasumsikan oleh teori utilitas ekspektasian (*expected utility theory*). Teori ini berasumsi bahwa individu akan menilai secara subyektif setiap kemungkinan hasil dari suatu keputusan yang berisiko berdasarkan pada total kemakmuran/kekayaan mereka, jika hasil tersebut terjadi. Sementara, teori prospek berasumsi bahwa individu akan menilai secara subyektif setiap hasil sebagai keuntungan (*gain*) dan kerugian (*losses*) terhadap titik referensi (*status quo*) dalam 2 fase proses yaitu *editing* dan *evaluating*. Teori prospek yang diperkenalkan oleh Kahneman and Tversky (1979) menjelaskan efek dari pembingkai ini melalui fungsi nilai berbentuk S yang menggambarkan bahwa pembuat keputusan akan cenderung *risk averse* saat kondisi untung (bingkai positif), dan *risk taker* saat kondisi rugi (bingkai negatif) dengan tingkat titik referensi yang sama.

Penelitian tentang pembingkai tujuan dalam harga transfer negosiasi telah dilakukan oleh Ghosh dan Boldt (2006) terhadap divisi penjual, serta Chang dkk. (2008) pada kondisi negosiasi antara dua divisi. Keterkaitan langsung diantara pembingkai tujuan dengan upaya yang ditunjukkan para manager yang bernegosiasi sebagaimana merupakan tujuan dari riset ini memang tidak diungkapkan secara jelas. Namun, sebagaimana disampaikan se-

belumnya, dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, indikasi adanya hubungan antara unsur kognitif seperti pembingkaian dan juga persepsi keadilan, dengan motivasi individu (upaya) dapat diidentifikasi.

Kondisi Pembingkaian Untuk Para Manager Divisi

Baik Luft dan Libby (1997), Kachelmeier dan Towry (2002), serta Chang dkk. (2008) menjelaskan bahwa ketika terdapat harga pasar eksternal produk yang dinegosiasikan, dan harga pasar tersebut lebih besar daripada harga yang akan menyebabkan kedua divisi menerima keuntungan yang sama, divisi penjual biasanya akan mempertimbangkan harga pasar sebagai harga transfer yang lebih adil karena menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk divisinya. Namun, pembeli akan melihat harga transfer yang adil sebagai harga yang memberikan keuntungan yang sama bagi kedua divisi. Pernyataan ini akan semakin jelas, jika dikaitkan dengan kondisi pembingkaian dari kedua divisi yang bernegosiasi dalam penentuan harga transfer sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Bagi divisi penjual, harga transfer merupakan bagian dari pendapatan, sehingga ketika biaya terkait ditandingkan dengan pendapatan selama satu perioda akuntansi akan mempengaruhi labanya. Harga yang cenderung mendekati atau sama dengan harga pasar merupakan pendapatan terbesar bagi mereka. Mereka akan membingkai secara positif informasi harga yang bergerak dari titik referensi kos produk ke harga pasar, karena persepsi yang terbentuk adalah keuntungan akibat bertambahnya penghasilan. Mereka akan membingkai negatif informasi harga yang bergerak sebaliknya dari titik referensi harga pasar ke kos produk karena dipersepsikan sebagai kerugian akibat berkurangnya penghasilan. Sementara bagi divisi pembeli, harga transfer merupakan bagian dari kos produk, sehingga ketika kos tersebut ditandingkan (setelah produk terjual) dengan pendapatan selama satu perioda akuntansi yang sama, akan mempengaruhi laba. Harga yang cenderung mendekati atau sama dengan kos produk (harga terendah yang dapat diberikan oleh divisi penjual) merupakan kos terendah bagi mereka. Mereka akan membingkai negatif informasi harga yang bergerak dari titik referensi kos produk ke harga pasar, karena persepsi yang terbentuk adalah kerugian akibat bertambahnya pembayaran. Mereka akan membingkai positif informasi harga yang bergerak sebaliknya dari titik referensi harga pasar ke kos produk karena dipersepsikan sebagai keuntungan akibat berkurangnya pembayaran.

Karakteristik Situasional: Persepsi Kekecewaan dan Persepsi Keadilan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa karena adanya *self-serving bias*, para manager yang bernegosiasi untuk menetapkan harga transfer memiliki persepsi yang berbeda terhadap *fairness*. Konflik ini dalam negosiasi bisa jadi menghasilkan situasi persepsian kalah dan menang. Persepsian kalah dan menang disini dalam arti akan menimbulkan kekecewaan di satu pihak karena harga transfer yang diharapkannya akan tidak terwujud, dan persepsi mendapat keadilan dipihak lain karena harga transfer yang diharapkan akan terwujud.

Persepsi Kekecewaan. Konstruk teoritis dari *loss aversion* memprediksi bahwa persepsi kekecewaan akan lebih besar di bawah bingkai negatif dibandingkan bingkai positif (Hannah dkk., 2005). *Loss aversion* menjelaskan bahwa individu akan lebih menghindari menderita suatu kerugian dibandingkan mereka menderita karena gagal mendapatkan tambahan keuntungan (Kahneman dan Tversky, 1979). Ini artinya, jika para manager berhadapan dengan bingkai negatif, mereka akan merasa sangat kecewa karena akan menderita suatu kerugian. Sebaliknya, jika berhadapan dengan bingkai positif, mereka akan merasakan sedikit kekecewaan karena menderita kegagalan mendapatkan tambahan keuntungan. Kondisi pengaruh pembedaan seperti ini membawa pada hipotesis sebagai berikut:

H1a: Manager divisi penjual yang menderita kerugian karena berkurangnya penghasilan (bingkai negatif), akan merasa lebih kecewa karena kerugian yang diderita lebih besar dibandingkan ketika dia tidak mendapat tambahan penghasilan (bingkai positif).

H1b: Manager divisi pembeli yang menderita kerugian karena harus menambah pembayaran (bingkai negatif), akan merasa lebih kecewa karena kerugian yang diderita lebih besar dibandingkan ketika dia tidak mendapat pengurangan pembayaran (bingkai positif).

Persepsi Keadilan. Dalam penelitian Luft (1994), hasil kuesioner pasca eksperimen menunjukkan, hampir semua partisipan mereka berpikir bahwa kebanyakan partisipan akan merasakan kontrak bonus akan lebih adil dibandingkan kontrak pinalti yang setara secara ekonomis. Luft (1994) menyebutkan bahwa persepsi semacam itu bisa disebabkan oleh sebuah konstruksi yang mengacu kepada keengganan untuk menerima konsekwensi dari bingkai negatif (*penalty aversion*). Misal, ketika manager divisi penjual menentang konsekwensi kerugian dari kehilangan keuntungan, maka mereka cenderung untuk melihat bingkai negatif ini tidak adil. Sebaliknya, jika mendapatkan keuntungan dipandang lebih positif karena seba-

gai manager divisi, mereka akan mendapatkan laba yang potensial, mereka akan cenderung menganggap hal ini lebih adil dibandingkan harus menderita kerugian kehilangan keuntungan. Dengan kata lain, para manager menganggap dalam bernegosiasi, tujuan untuk mendapatkan keuntungan akan lebih adil (*fairness*) dibandingkan mereka harus mengorbankan keuntungannya. Kondisi pengaruh pembingkaiian seperti ini membawa pada hipotesis berikut:

H2a: Manager divisi penjual yang mendapatkan keuntungan melalui tambahan penghasilan (bingkai positif), akan merasa diperlakukan lebih adil dibanding ketika dia mendapatkan kondisi yang justru mengurangi penghasilan (bingkai negatif).

H2b: Manager divisi pembeli yang mendapatkan keuntungan melalui pengurangan pembayaran (bingkai positif), akan merasa diperlakukan lebih adil dibanding ketika dia mendapatkan kondisi yang justru harus menambahkan pembayaran (bingkai negatif).

Tingkat Upaya Manager Akibat Persepsi Kekecewaan dan Keadilan

Teori ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa manager dengan utilitas tambahan yang lebih besar untuk hasil moneter yang lebih tinggi (yaitu, menerima keuntungan akhir yang lebih tinggi tanpa harus membayar lebih atau mengabaikan keuntungan) akan memberikan upaya lebih besar, untuk memastikan bahwa mereka menerima hasil tersebut. Hal ini senada dengan yang dikatakan Church dkk. (2008) tentang teori prospek. Teori prospek berargumen bahwa ketakbergunaan subjektif (*subjective disutility*) dari persepsi rugi (penurunan kekayaan), akan melampaui kebergunaan subjektif (*subjective utility*) dari persepsi untung (peningkatan kekayaan), meski ketika secara ekonomis sama untuk suatu berian tingkat upaya.

Secara khusus, Ghosh dan Boldt (2006). Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketika informasi kepada seseorang dibingkai negatif, orang tersebut cenderung untuk lebih bersedia berkorban (*risk seeking*). Atau dengan kata lain, orang tersebut akan memberikan upaya yang lebih besar untuk jangan sampai kehilangan keuntungan (*profit foregone*). Dalam penelitiannya, Chang dkk. (2008) meneliti peran pembingkaiian informasi akuntansi, dan bagaimana hal ini berdampak pada *judgment* harga transfer manajer. Mereka mengusulkan bahwa karena manajer lebih peduli dengan menghindari kerugian daripada meningkatkan keuntungan, maka baik divisi pembeli ataupun penjual lebih cenderung berfokus pada memaksimalkan keuntungan divisi mereka ketika diberi bingkai kerugian dibandingkan dengan bingkai keuntungan. Selain itu, manajer yang dibingkai negatif, akan menjadi lebih termoti-

vasi untuk mencapai hasil yang lebih baik, mereka akan rela mengeluarkan biaya tawar-menawar yang lebih besar dibandingkan manajer yang mendapatkan bingkai positif. Dalam hal tidak adanya informasi tentang bingkai pasangan negosiasi mereka (demikian halnya dengan tingkat motivasi pasangan mereka), manajer yang di bingkai negatif juga cenderung bersedia untuk menanggung biaya tawar-menawar yang lebih besar yang akan mengakibatkan hasil yang lebih baik. Dari pemaparan di atas, penulis mengajukan hipotesis terkait persepsi kekecewaan adalah sebagai berikut:

H3a: Para manager yang mempersepsikan kekecewaan yang lebih besar akan memberikan upaya yang lebih besar pula.

Hipotesis selanjutnya terkait dengan pengaruh persepsi keadilan terhadap upaya. *Loss aversion* yang menjelaskan bahwa individu akan lebih menghindari menderita suatu kerugian dibandingkan mereka menderita karena gagal mendapatkan tambahan keuntungan (Kahneman dan Tversky, 1979). Sebagai lawan dari *loss aversion*, teori timbal balik/*reciprocity* (Rabin, 1993) memprediksi bahwa jika seseorang mempersepsikan bingkai positif sebagai sesuatu yang adil, mereka akan membalasnya dengan mengeluarkan lebih banyak upaya. *Reciprocity* memprediksi bahwa manager yang menganggap kondisi yang diterimanya memberikan keuntungan, merupakan kondisi yang lebih adil dan mereka akan memilih tingkat upaya yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menganggap menerima kondisi yang kurang adil. Dari pemaparan ini, penulis mengajukan hipotesis terkait persepsi keadilan adalah sebagai berikut:

H3b: Para manager yang mempersepsikan keadilan yang lebih besar akan memberikan upaya yang lebih besar pula.

Perbandingan Tingkat Upaya yang Diberikan Manager dalam Bernegosiasi

Karena pengaruh pembingkai pada upaya individu, ini bekerja dengan dua arah yang berlawanan (persepsi kecewa dan adil), penulis tidak dapat memprediksi perbedaan pengaruh total pembingkai tujuan terhadap upaya. Oleh karenanya, keinginan untuk mengetahui perbandingan perbedaan upaya yang ditunjukkan akibat dua persepsi ini penulis rumuskan melalui pertanyaan penelitian pertama. Penulis juga mempertimbangkan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Hannah dkk. (2005) menguji preferensi individu untuk kontrak berbingkai bonus dan pinalti terhadap pilihan upaya dan menggunakan teori prospek pada

setting penelitian kontrak insentif mereka. Konsisten dengan teori prospek, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa individu akan memilih upaya pada level yang lebih tinggi, dan karenanya, akan memberi kos yang lebih besar untuk mengurangi probabilitas mendapatkan pinalti, dibandingkan meningkatkan probabilitas mendapatkan bonus. Penelitian Hannah dkk. (2005) ini dikembangkan oleh Church dkk. (2008) dengan setting yang berbeda. Mereka menguji hasil penemuan Luft (1995) serta Hannah dkk. (2005) menggunakan setting eksperimen dengan hasil upaya yang lebih nyata (*real effort*). Hasil penelitian merekapun mendukung hasil sebelumnya, yaitu konsisten dengan teori prospek. Dari pemaparan tadi, pertanyaan penelitian pertama yang penulis rumuskan, adalah:

RQ1: Apakah para manager dengan bingkai kerugian (negatif) dan persepsi kekecewaan yang besar, akan menggunakan upaya yang lebih besar dibanding para manager dengan bingkai keuntungan (positif) dan persepsi keadilan yang besar?

Proses tawar menawar adalah suatu interaksi ekonomis yang fundamental dalam organisasi. Kecenderungan mengambil resiko dari para manager yang bernegosiasi harga transfer adalah merupakan ciri individu yang penting, karena keefektifan negosiator (dalam hal meraih laba divisinya) adalah merupakan sebuah fungsi dari preferensi risiko yang mereka miliki (Osborne, 1985; Ghosh, 1996). Secara alamiah, sebagaimana disebutkan Bazerman (1994), aturan baik sebagai penjual ataupun pembeli dalam suatu negosiasi (tawar menawar dalam jual beli), akan membentuk suatu kecenderungan pembingkai tujuan dari masing-masing pihak dengan cara yang berbeda. Neale dkk. (1987) menemukan bahwa dalam situasi negosiasi, penjual akan berpikir tentang suatu transaksi penjualan sebagai sumber keuntungannya (seberapa besar si penjual memperoleh keuntungan dari menjual produknya). Sementara itu dari transaksi tersebut, pembeli akan melihat sebagai suatu kerugian (seberapa besar si pembeli harus menyerah). Sebagai hasilnya, para pembeli akan cenderung menjadi menyukai risiko (*risk seeking*), sementara para penjual akan cenderung menghindari risiko (*risk averse*). Dari kondisi yang dipaparkan di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian kedua sebagai berikut:

RQ2: Apakah pada saat negosiasi, manager divisi pembeli akan memiliki tingkat upaya yang lebih besar dibandingkan manager divisi penjual?

METODA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain eksperimen laboratorium dengan desain faktorial 2 X 2 antar subjek. Variabel independen yang dimanipulasi adalah, 2 peran manager divisi yaitu sebagai manager divisi penjual dan manager divisi pembeli, serta 2 pembingkaiian tujuan yaitu positif (keuntungan) dan negatif (kerugian). Sementara variabel dependennya adalah tingkat pilihan upaya. Tingkat persepsi yaitu keadilan dan kekecewaan diukur dengan 7 skala numerik. Tabel 1. di bawah merupakan visualisasi perlakuan atau manipulasi yang dilakukan terhadap variabel independen dalam setiap kondisi.

Sisipkan Tabel 1 di sini

Subjek dalam penelitian ini adalah 40 orang mahasiswa yang sedang menempuh program kesarjanaan (S1) di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM). Subjek yang menjadi partisipan merupakan mahasiswa program studi akuntansi yang sedang mengikuti mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen sehingga dapat memahami kasus yang diberikan terkait fenomena harga transfer.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini diadopsi dari kasus yang ada pada penelitian Luft dan Libby (1997), Kachelmeier dan Towry (2002), serta Chang dkk. (2008), dengan penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan penelitian Ghosh dan Boldt (2004; 2006), Ghosh (2000), Hannah dkk. (2005), serta Church dkk. (2008).

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. **Peran Manager.** Pada penelitian ini partisipan ditempatkan pada dua peran yang berbeda secara acak. Partisipan diminta mempersepsikan diri sebagai manager divisi penjual ataupun manager divisi pembeli yang sedang menegosiasikan harga transfer. kinerja mereka diukur dengan ukuran laba divisi yang membuat mereka sebagai manager sebuah pusat laba (pusat pertanggungjawaban), harus mengupayakan untuk mendapat laba yang optimal bagi divisinya.
2. **Pembingkaiian Tujuan.** Manipulasi pembingkaiian baik positif ataupun negatif ditekankan pada tujuan yang sama untuk mencapai keuntungan dari dinegosiasikannya harga transfer. Para partisipan yang mendapat bingkai positif diminta untuk memikirkan berapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan dari menegosiasikan harga

transfer, baik dengan menambah penghasilan (penjual), dan mengurangi pembayaran (pembeli). Sementara untuk bingkai negatif, partisipan diminta untuk memikirkan berapa banyak kerugian yang diderita baik dengan berkurangnya penghasilan (penjual), ataupun bertambahnya pembayaran (pembeli).

Dalam skenario, pembingkai diberikan melalui informasi yang didapat dari akuntan manajemen masing-masing. Akuntan manajemen memberikan informasi terkait hal-hal yang diminta manager divisi penjual atau pembeli (peran partisipan) ketika akan menghadapi negosiasi. Untuk manipulasi bingkai positif, partisipan yang berperan sebagai manager divisi penjual/pembeli diberikan informasi bahwa lawan negosiasinya (divisi pembeli/penjual) akan menawar dengan harga yang telah memberikan keuntungan, sehingga dengan upaya yang dilakukan ada kemungkinan mendapatkan tambahan keuntungan. Sementara untuk bingkai negatif, akuntan manajemen menyarankan agar partisipan yang berperan sebagai manager divisi penjual/pembeli menawar dengan harga dengan keuntungan tertinggi, sehingga upaya yang dilakukan adalah untuk dapat menghindari kerugian.

3. **Persepsi Kekecewaan dan Persepsi Keadilan.** Persepsi kekecewaan dan persepsi keadilan diukur dengan menanyakannya pada partisipan sesaat setelah mereka mendapatkan perlakuan dari tiap kondisi. Skala yang digunakan adalah 7 skala numerik dengan poin 1 untuk sangat tidak adil/sangat tidak kecewa, hingga poin 7 untuk sangat adil sekali/sangat kecewa sekali.

Persepsi keadilan ditanyakan untuk kondisi yang mereka dapatkan. Bentuk pertanyaannya adalah, “adilkah kondisi yang Anda dapatkan, yaitu Anda berpeluang untuk mendapatkan tambahan keuntungan (bingkai positif) atau mengalami kerugian (bingkai negatif) bagi divisi yang Anda pimpin?” Sementara persepsi kekecewaan ditanyakan untuk kondisi seandainya partisipan gagal mendapatkan apa yang terbaik bagi divisi yang mereka pimpin. Bentuk pertanyaannya adalah, “jika ternyata Anda gagal untuk mendapatkan tambahan keuntungan (bingkai positif) atau menghindari kerugian (bingkai negatif), kecewakah anda?”

4. **Upaya.** Operasionalisasi upaya konsisten dengan definisi menurut *agency theory* (Baiman, 1982), yaitu: 1. Partisipan memiliki kontrol terhadap pilihan level upaya; 2. Upaya yang lebih besar akan meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan, yaitu tar-

get hasil yang tinggi; dan 3. Partisipan memperoleh ketakbergunaan (*disutility*) dari memilih suatu level upaya yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, upaya diprosikan dengan seberapa besar partisipan memiliki kemauan untuk mengerjakan penugasan yang diberikan (dalam 7 level) untuk meraih kesempatan yang lebih baik dalam mencapai tujuan mereka yaitu optimalisasi laba divisi yang dipimpinnya. Partisipan diberi kebebasan untuk memilih berhenti pada sebuah level yang menurutnya telah sesuai dengan tingkat peluang pencapaian tujuan yang diinginkan, ataupun melanjutkan pada level yang lebih tinggi dengan tingkat kesulitan tugas yang lebih tinggi pula, dan peluang memperoleh tujuan yang lebih baik pula. Penugasan yang dilakukan adalah proses berhitung, dengan modifikasi pada level 3 dan 4 dengan menambahkan translasi dari huruf ke angka lalu dihitung, serta level 5 dan 6 dengan menambahkan lagi translasi dari simbol ke huruf, kemudian translasi dari huruf tadi ke angka, lalu dihitung. Pada level 7, partisipan diminta untuk menghitung total keseluruhan hasil yang didapat dari keenam level sebelumnya.

Validitas internal dari penelitian ini diperkuat dengan melakukan cek manipulasi (*manipulation check*), kuesioner penutup (*exit questionnaire*) serta *pilot test*. Cek manipulasi untuk kondisi peran manager dilakukan dengan memberi pertanyaan apakah peran partisipan dalam negosiasi tadi. Partisipan diminta untuk memilih salah satu jawaban yaitu peran sebagai manager divisi penjual atau manager divisi pembeli. Sementara cek manipulasi untuk kondisi pbingkaiian adalah dengan memberikan pertanyaan benarkah Anda berupaya untuk mendapatkan tambahan keuntungan atau menghindari kerugian. Partisipan diminta untuk memilih salah satu jawaban yaitu benar atau salah. Dari hasil cek manipulasi yang dilakukan, semua responden telah menjawab 2 pertanyaan cek manipulasi dengan benar. Kuesioner penutup diberikan untuk mengetahui pemahaman subjek atas kasus yang diberikan. Pada tahap pertama diberikan 4 pertanyaan untuk memastikan partisipan memahami konteks cerita harga transfer yang diberikan. Jika ditabulasikan, rata-rata pertanyaan yang dijawab benar adalah 60%. Pada tahap terakhir, selain cek manipulasi partisipan diminta mengisi identitas responden. *pilot test* dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh dan mengumpulkan masukan serta saran demi perbaikan, sehingga pada saat eksperimen utama dilakukan, kesalahan dan segala kekurangan dapat diminimalisir. *Pilot test* pada eksperimen ini, dilakukan 2 kali. *Pilot test* pertama (17 orang partisipan) dinilai gagal oleh peneliti. Disamping instrumen yang kurang merepresentasikan maksud penelitian, upaya yang dilakukan partisipan cenderung ter-

distorsi oleh keinginan mereka untuk mendapatkan hadiah yang diberikan sebagai kompensasi dari kinerja mereka. *Pilot test* kedua dilakukan dengan 17 orang partisipan yang berbeda, dinilai cukup berhasil sehingga dapat dilanjutkan pada tahap eksperimen utama.

Berikut langkah-langkah proses eksperimen yang telah dilakukan:

1. Partisipan masuk ke sebuah ruangan kelas dan diberikan material eksperimen berupa buku utama dan buku penugasan yang terdistribusi secara acak sesuai sel kondisi yang ada (4 sel eksperimen).
2. Peneliti menyampaikan protokol awal eksperimen. Pada bagian ini, peneliti menekankan perlunya partisipan untuk mengerjakan seluruh tahapan yang ada dengan keseriusan dan kesungguhan hati. Sebagai penghargaan dari keseriusan dan kesungguhan hati tersebut, partisipan akan diberikan insentif hadiah (*doorprize*) berupa sejumlah uang (pulsa) dalam amplop. Setiap akhir tahapan, peneliti mengundi partisipan yang beruntung, asisten akan melakukan koreksi hasil pekerjaan tiap tahapan untuk menentukan kelayakan partisipan mendapatkan hadiah. Hadiah ini dimaksudkan untuk memotivasi partisipan agar bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap tahapan yang ada dalam rangkaian eksperimen.
3. Eksperimen dilakukan dalam 3 babak dengan total durasi waktu selama 45 menit. Di akhir pertemuan, peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tulus dan menjelaskan tentang eksperimen yang telah berlangsung.

ANALISIS DATA DAN HASIL

Secara umum mengenai gambaran 40 orang responden (terbagi dalam 4 kondisi perlakuan) yang mengikuti eksperimen dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.

Sisipkan Tabel 2 di sini

Penulis melakukan analisis variansi dan hasilnya adalah tidak ada perbedaan yang secara statistik signifikan diantara setiap kondisi perlakuan untuk jenis kelamin ($F = 0,001$; $p > 0,970$) dan pengalaman kerja ($F = 0,161$; $p > 0,690$), sementara untuk usia dan latar belakang pendidikan sudah jelas tidak ada perbedaan diantara setiap kondisi perlakuan. Dari hasil ini, penulis menyakini bahwa responden yang ditempatkan secara acak ke dalam setiap kondisi

eksperimen, memiliki kesepadanan (ciri-ciri yang ekuivalen). Hal ini penting untuk memastikan bahwa ancaman terhadap validitas internal yaitu seleksi telah dapat dikendalikan, sehingga peneliti menyakini bahwa hasil yang didapat benar-benar berasal dari perlakuan/treatment yang diberikan.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis 1a, 1b, 2a, dan 2b, penulis menggunakan *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan memperhatikan signifikansi perbedaan antara dua mean kondisi yang diperbandingkan menggunakan uji *Post Hoc Multiple Comparisons*. Tabel 3. merupakan resume yang memperlihatkan hasil uji ANOVA dengan *Post Hoc Multiple Comparisons* menggunakan metoda scheffe untuk tiap kondisi pada persepsi kecewa dan persepsi adil.

Sisipkan Tabel 3 di sini

Hipotesis 1a dan 1b (H1a dan H1b) memprediksi bahwa para manager (baik divisi penjual ataupun pembeli) yang diberi bingkai negatif, akan merasa lebih kecewa dibandingkan dengan para manager yang diberi bingkai positif. Pada Tabel 3. kondisi Penjual/Negatif (peran=1 dan bingkai=2) jika dibandingkan dengan Penjual/Positif (peran=1 dan bingkai=1) memiliki perbedaan mean positif sebesar 3,000 yang secara statistis signifikan ($p < 0,000$). Ini artinya hasil tersebut mendukung H1a. Kemudian kondisi Pembeli/Negatif (peran=2 dan bingkai=2) jika dibandingkan dengan Pembeli/Positif (peran=2 dan bingkai=1) memiliki perbedaan mean positif sebesar 2,100 yang secara statistis signifikan ($p < 0,002$). Ini artinya hasil tersebut mendukung H1b.

Sementara itu, Hipotesis 2a dan 2b (H2a dan H2b) memprediksi bahwa para manager (baik divisi penjual ataupun pembeli) yang diberi bingkai positif, akan merasa diperlakukan lebih adil dibandingkan dengan para manager yang diberi bingkai negatif. Pada Tabel 3. kondisi Penjual/Positif (peran=1 dan bingkai=1) jika dibandingkan dengan Penjual/Negatif (peran=1 dan bingkai=2) memiliki perbedaan mean positif sebesar 2,500 yang secara statistis signifikan ($p < 0,000$). Ini artinya hasil tersebut mendukung H2a. Kemudian kondisi Pembeli/Positif (peran=2 dan bingkai=1) jika dibandingkan dengan Pembeli/Negatif (peran=2 dan bingkai=2) memiliki perbedaan mean positif sebesar 2,400 yang secara statistis signifikan ($p < 0,000$). Ini artinya hasil tersebut mendukung H2b.

Pengujian hipotesis 3a dan 3b (H3a dan H3b) menggunakan korelasi pearson dan regresi sederhana. Korelasi pearson digunakan karena data berskala interval dan bersifat parametrik. Sementara regresi sederhana digunakan untuk membuktikan adanya hubungan antara persepsi kekecewaan dan keadilan partisipan dalam mempengaruhi upaya yang mereka berikan dalam proses negosiasi. Untuk menjawab H3a dan H3b, Tabel 4. Memperlihatkan hasil pengujian hubungan antara persepsi kecewa dan adil dengan level upaya.

Sisipkan Tabel 4 di sini

H3a memprediksi bahwa para manager yang mempersepsikan kekecewaan lebih besar, akan memberikan upaya yang lebih besar pula. Telah diketahui melalui hasil pengujian terhadap H1a dan H1b, para manager akan mempersepsikan kekecewaan lebih besar ketika dibingkai negatif dibandingkan ketika dibingkai positif. Karena pada saat eksperimen, semua responden mendapatkan pertanyaan untuk mengidentifikasi tingkat persepsian kecewa dan adil secara bersama, Tabel 4. menunjukkan level upaya manager berbingkai negatif (grup rugi), hanya berkorelasi tinggi secara positif dengan persepsi kecewa (0,715) yang secara statistis signifikan ($p < 0,000$), serta tidak dengan persepsi adil. Hasil regresi yang secara statistis signifikan ($t = 4,339$; $p < 0,000$), menunjukkan bahwa persepsi kecewa yang dimiliki para manager yang dibingkai negatif akan mempengaruhi tingkat upaya yang mereka berikan. Hasil ini menunjukkan bahwa para manager (penjual dan pembeli) yang saat mendapat bingkai negatif, mempersepsikan kekecewaan lebih besar, akan memberikan upaya yang lebih besar pula. Dengan demikian H3a dapat didukung.

H3b memprediksi bahwa para manager yang mempersepsikan keadilan yang lebih besar akan memberikan upaya yang lebih besar pula. Telah diketahui melalui hasil pengujian terhadap H2a dan H2b, para manager akan mempersepsikan keadilan lebih besar ketika dibingkai positif dibandingkan ketika dibingkai negatif. Karena pada saat eksperimen, semua responden mendapatkan pertanyaan untuk mengidentifikasi tingkat persepsian kecewa dan adil secara bersama, Tabel 4. menunjukkan level upaya manager berbingkai positif (grup untung), hanya berkorelasi secara positif dengan persepsi adil (0,530) yang secara statistis signifikan ($p < 0,008$), serta tidak dengan persepsi kecewa. Hasil regresi yang secara statistis signifikan ($t = 2,649$; $p < 0,016$), menunjukkan bahwa para manager (penjual dan pembeli) yang saat mendapat bingkai positif, mempersepsikan keadilan lebih besar, akan memberikan upaya yang lebih besar. Dengan demikian H3b dapat didukung.

Jawaban *Research Question*

Untuk menjawab *research question* 1 dan 2 (RQ1 dan RQ2), peneliti melakukan pengujian T beda dua mean antara grup yang diberi bingkai positif dan grup yang diberi bingkai negatif (RQ1) dan grup penjual serta grup pembeli (RQ2) terhadap level upaya yang mereka berikan. Resume hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5. Berikut ini.

Sisipkan Tabel 5 di sini

Tabel 5. menunjukkan bahwa, para manager yang mendapat bingkai negatif (rugi) memiliki tingkat level upaya (Mean=5,1500; SD.=1,34849) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat level upaya dari para manager yang mendapat bingkai positif (Mean=4,1500; SD.=1,72520). Sementara hasil uji t memberikan keyakinan bahwa perbedaan Mean antara level upaya yang diberikan manager dengan bingkai negatif dan bingkai positif adalah secara statistis signifikan ($t=-2,042$; $p < 0,049$). Dari hasil ini, dapat dikatakan bahwa sesuai dengan dugaan teori prospek, para manager yang mendapatkan bingkai negatif, dalam negosiasi akan memberikan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan para manager yang mendapatkan bingkai positif.

Tabel 5. menunjukkan bahwa, para manager yang mendapat peran sebagai manager divisi pembeli memiliki tingkat level upaya (Mean = 5,1500; SD. = 1,87153) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat level upaya dari para manager yang mendapat bingkai positif (Mean = 4,1500; SD. = 1,13671). Sementara hasil uji t memberikan keyakinan bahwa perbedaan Mean antara level upaya yang diberikan oleh manager divisi pembeli dan manager divisi penjual adalah secara statistis signifikan ($t = -2,042$; $p < 0,048$). Dari hasil ini menunjukkan bahwa, dugaan Bazerman (1994), yang menyatakan bahwa pembeli secara alamiah akan cenderung *risk seeking* dan penjual akan cenderung *risk averse*, telah sesuai dengan teori prospek. Pembeli yang *risk seeking* memiliki tingkat upaya yang lebih besar dibandingkan dengan penjual yang *risk averse*.

DISKUSI DAN SIMPULAN

Berikut diskusi hasil penelitian yang telah ditunjukkan melalui analisis data serta pengujian statistis terhadap hipotesis dan *research question* yang dirumuskan.

1. Hasil pengujian H1a dan H1b berhasil membuktikan bahwa para manager yang mendapat informasi sebagai bingkai negatif, akan mempersepsikan kekecewaan lebih besar dibandingkan para manager yang mendapat bingkai informasi positif dalam negosiasi harga transfer. Hal ini tentu telah sesuai dengan apa yang diprediksi oleh konstruk teoritis dari *loss aversion* yang menjelaskan bahwa individu akan lebih menghindari menderita suatu kerugian dibandingkan mereka menderita karena gagal mendapatkan tambahan keuntungan (Kahneman dan Tversky, 1979).
2. Hasil pengujian H2a dan H2b berhasil membuktikan bahwa para manager yang mendapat informasi sebagai bingkai positif, akan mempersepsikan keadilan lebih besar dibandingkan para manager yang mendapat bingkai informasi negatif dalam negosiasi harga transfer. Luft (1994) menyebutkan bahwa hal ini bisa disebabkan oleh sebuah konstruksi yang mengacu kepada keengganan untuk menerima konsekuensi dari bingkai negatif (*penalty aversion*). Dengan kata lain, para manager menganggap dalam bernegosiasi, tujuan untuk mendapatkan keuntungan akan lebih adil (*fairness*) dibandingkan mereka harus mengorbankan keuntungannya (dirugikan).
3. Hasil pengujian H3a dan H3b berhasil membuktikan bahwa kedua persepsi tersebut akan menciptakan upaya yang lebih besar, seiring dengan besarnya tingkat persepsian baik kecewa ataupun adil, yang dirasakan oleh para manager. Hasil H3a menunjukkan bahwa hal ini telah sesuai dengan teori ekonomi konvensional dan teori prospek. Teori ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa manager dengan utilitas tambahan yang lebih besar untuk hasil moneter yang lebih tinggi, akan memberikan upaya lebih besar, untuk memastikan bahwa mereka menerima hasil tersebut. Teori prospek berargumen bahwa ketakbergunaan subjektif (*subjective disutility*) dari persepsi rugi (penurunan kekayaan), akan melampaui kebergunaan subjektif (*subjective utility*) dari persepsi untung (peningkatan kekayaan), meski ketika secara ekonomis sama untuk suatu brian tingkat upaya. Sementara hasil H3b telah sesuai dengan apa yang disampaikan teori timbal balik/*reciprocity* (Rabin, 1993) yang memprediksi bahwa, jika seseorang mempersepsikan bingkai positif sebagai sesuatu yang adil, mereka akan membalasnya dengan mengeluarkan lebih banyak upaya.
4. Hasil yang ditunjukkan untuk menjawab RQ1, telah sesuai dengan apa yang diprediksi oleh teori prospek. Sehingga dapat dipahami bahwa, para manager dengan bingkai kerugian (negatif) dan persepsi kekecewaan yang besar, akan menggunakan upaya yang lebih besar dibanding para manager dengan bingkai keuntungan (positif) dan persepsi keadilan yang besar. Sementara hasil yang ditunjukkan untuk menjawab RQ2, berhasil membuktikan secara empiris buah pikiran Bazerman (1994) bahwa pembeli akan lebih cenderung

menerima resiko (*risk seeking*), sementara penjual akan lebih cenderung menghindari resiko (*risk averse*). Sebagaimana yang diprediksi oleh teori prospek, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat negosiasi, manager divisi pembeli akan memiliki tingkat upaya yang lebih besar dibandingkan manager divisi penjual.

Lima simpulan penting yang dapat diambil pada penelitian ini, yaitu: (1) Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pembingkaiian yang dijelaskan melalui teori prospek, memiliki pengaruh terhadap upaya manager dalam menentukan harga transfer negosiasi. (2) Penelitian ini dapat membuktikan dugaan penulis bahwa pembingkaiian (positif/keuntungan dan negatif/kerugian) yang merupakan unsur kognisi individu, melalui dua cara yang berbeda (persepsi kecewa dan adil), akan memotivasi individu (para manager divisi yang terlibat dalam negosiasi harga transfer) untuk memberikan upaya yang terbaik. (3) Hasil yang ditunjukkan penelitian ini, telah sesuai dengan yang dijelaskan melalui teori prospek, bahwa upaya yang diakibatkan oleh informasi dengan bingkai negatif akan lebih besar dibandingkan upaya yang diakibatkan oleh informasi dengan bingkai positif. Hal ini disebabkan oleh adanya bias kognisi individu karena pengaruh dari pembingkaiian yang diberikan. (4) Penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa manager divisi pembeli, sesuai kecenderungan yang mereka miliki pada saat negosiasi, akan memberikan tingkat upaya yang lebih tinggi dibandingkan manager divisi penjual. (5) Dengan memahami bahwa pembingkaiian akan mempengaruhi upaya manager dalam proses negosiasi harga transfer, peran akuntan manajemen yang menyediakan informasi akuntansi untuk keputusan menjual ataupun membeli produk melalui harga transfer, baik dalam memberikan analisa dan pertimbangannya, menjadi semakin penting.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pilihan disain untuk mengukur level upaya dengan upaya nyata (*real effort*). Mengerjakan tugas tiap level dengan berhitung, dapat menjadi bahan perdebatan dalam menentukan apakah cukup relevan untuk menggambarkan kondisi negosiasi pada dunia nyata, meski penulis memiliki argumen sendiri untuk menyatakan bahwa disain ini dapat merepresentasi apa yang diinginkan. Saran yang dapat diberikan untuk menjadi pertimbangan bagi pengembangan penelitian ini adalah, perlu dilakukan penelitian ulang dengan disain yang dapat merepresentasi kondisi nyata dari suatu negosiasi, untuk dapat semakin memberikan validasi hasil penelitian ini. Ini mungkin saja dilakukan dengan pilihan disain eksperimen lapangan atau dengan disain eksperimen laboratorium dengan alternatif pilihan upaya (*chosen effort*) sebagaimana yang dilakukan oleh Bruggen dan Strobel (2007).

DAFTAR LITERATUR

- Baiman, S. (1982). Agency research in managerial accounting: A survey. *Journal of Accounting Literature* 1 (Spring): 161–213.
- Bazerman, Max H. (1994). *Judgment in Managerial Decision Making*, 3rd edition. John Wiley & Sons. Inc
- Birnberg, J. G., J. Luft., dan M. D. Shields. (2007). Psychology Theory in Management Accounting Research, In *Handbook of Management Accounting Research*, edited by Chapman C. S., Hopwood A. G., dan Shields M. D., vol 1: Elsevier Ltd
- Bruggen, Alexander., dan M. Strobel. (2007). Real effort versus chosen in experiments. *Economics letters* 96: 232 - 236
- Chang, L., M. Cheng., dan K.T. Trotman. (2008). The effect of framing and negotiation partner's objective on judgments about negotiated transfer prices. *Accounting, Organizations and Society* 33: 704-717
- Church, B. K., T. Libby., dan P. Zhang. (2008). Contracting Frame and Individual Behavior: Experimental Evidence. *Journal of Management Accounting Research*. Vol 20: 153-168
- Colbert, G., dan B. Spicer (1995). A multi-case investigation of a theory of the transfer pricing process. *Accounting, Organizations and Society*, 20(6), 423–456.
- Ghosh, D. (1994). Organization Intra-Firm Pricing: Experimental valuation of Alternative Mechanisms. *Journal of Management Accounting Research*, vol 6.
- _____(1996). "Nonstrategic Delay in Bargaining." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 67: 312-325
- _____(2000). Organization Design and Manipulative Behavior: Evidence from a Negotiated Transfer Pricing Experiment. *Behavioral Research in Accounting*, vol 12.
- ____ dan M. Boldt. (2006). The Effect of Framing and Compensation Structure on Seller's Negotiated Transfer Price. *Journal of Managerial Issues* 18 (4): 456-467.
- Hannah, R. L., V. B. Hoffman, dan D. V. Moser. (2005). Bonus versus Penalty: Does contract frame affect employee effort? In *Experimental Business Research*, edited by. A. Rappaport dan R. Zwick., Vol II, Warren, MI: Springer Science and Business Media.

- Kachelmeier, S. J., dan K. L. Towry. (2002). Negotiated transfer pricing: Is fairness easier said than done?. *The Accounting Review* 77, 571–593.
- Kahneman, D., dan A. Tversky. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under risk. *Econometrica*, 47, 263–291.
- Kühberger, A. (1998). The influence of framing on risky decisions: A metaanalysis. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 75,1, 23-55.
- Levin, I. P., S. L. Schneider, dan G. J. Gaeth. (1998). All frames are not created equal: A typology and critical analysis of framing effects. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 76, 2, 149-188.
- Luft, J. 1994. Bonus and penalty incentives: Contract choice by employees. *Journal of Accounting and Economics* 18: 181–206.
- Luft, J. L., dan R. Libby. (1997). Profit comparisons, market prices and managers' judgments about negotiated transfer prices. *The Accounting Review*, 72(2), 217–229.
- Neale, M. A., V. Huber, dan G. B. Northcraft. (1987). The framing of negotiations: Contextual versus task frame. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 38, 305-317
- Osborne, M. J. 1985. "The Role of Risk Aversion in a Simple Bargaining Model." In *Game Theoretic Models of Bargaining*. Ed. A. Roth. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Perera, S., J. L. McKinnon, dan G. L. Harrison. (2003). Diffusion of transfer pricing innovation in the context of commercialization – A longitudinal case study of a government trading enterprise. *Management Accounting Research*, 14(2), 140–164.
- Rabin, M. (1993). Incorporating fairness into game theory and economics. *American Economic Review*, 83(5), 1281–1302.
- Sugiri, Slamet. (2009). *Akuntansi Managemen: sebuah pengantar*. UPP STIM, Yogyakarta.
- Thomson, L., dan G. Loewenstein, (1992). Egocentric interpretations of fairness and interpersonal conflict. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 5/(2), 176-197.
- Watson, D.J.H., dan J.V. Baumler. (1975). Transfer Pricing: A Behavioral Context, *The Accounting Review*, (July): hal. 466-474.

LAMPIRAN TABEL

Tabel 1. Desain eksperimen 2 X 2 antar subjek

Variabel independen manipulasi		Pembingkaiian	
		Keuntungan	Kerugian
Peran Manager	Penjual	A	B
	Pembeli	C	D

Tabel 2. Profil Responden

No	Keterangan	Jumlah	Per-senta-si	Kondisi tiap Perlakuan				Hasil uji F	
				Penjual/Positif	Penjual/Negatif	Pembeli/Positif	Pembeli/Negatif	F	Nilai P
1	Jenis Kelamin Pria	18 Org	45%	4 Org	5 Org	3 Org	6 Org	0,001	0,970
	Wanita	22 Org	55%	6 Org	5 Org	7 Org	4 Org		
2	Usia < 25 tahun	40 Org	100%	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org		
3	Latar Belakang Pendidikan Akuntansi	40 Org	100%	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org		
4	Memiliki pengalaman Kerja < 1 tahun	8 Org	22,5%	3 Org	2 Org	1 Org	2 Org	0,161	0,690
	Tidak	32 Org	77,5%	7 Org	8 Org	9 Org	8 Org		

Tabel 3. Perbandingan Persepsi Kecewa dan Adil untuk Tiap Kondisi

Scheffe	ANOVA		(I) sel	(J) sel	Beda Mean (I - J)	Std. Error	Nilai P
	F	Nilai P					
Persepsi Kecewa	19,395	0,000	Peran=1 dan bingkai=2	Peran=1 dan bingkai=1	3,00000*	0,49497	0,000
			Peran=2 dan bingkai=2	Peran=2 dan bingkai=1	2,10000*	0,49497	0,002
Persepsi Adil	16,628	0,000	Peran=1 dan bingkai=1	Peran=1 dan bingkai=2	2,50000*	0,49160	0,000
			Peran=2 dan bingkai=1	Peran=2 dan bingkai=2	2,40000*	0,49160	0,000

*. Perbedaan mean adalah signifikan pada level 0,05

Tabel 4. Hubungan Persepsi Kecewa dan Adil dengan Level Upaya

Pool	Korelasi			Regresi	
Grup Rugi	Pearson	Persepsi Kecewa (VI)	Persepsi adil	t	Nilai P
	Level Upaya (VD)	0,715**	-0,167	4,339	0,000
	<i>Sig (1-tailed)</i>	0,000	0,241		
	N	20	20		
Grup Untung	Pearson	Persepsi Kecewa	Persepsi adil (VI)	t	Nilai P
	Level Upaya (VD)	0,343	0,530**	2,649	0,016
	<i>Sig (1-tailed)</i>	0,069	0,008		
	N	20	20		

** . Korelasi adalah signifikan pada level 0,01 (1-sisi)

Tabel 5. Hasil Uji t Beda 2 Mean

GRUP		LEVEL UPAYA			t-test	
		N	Mean	SD	T	Nilai P
Bingkai Responden	Untung	20	4,1500	1,72520	-2,042	0,049
	Rugi	20	5,1500	1,34849		
Peran Responden	Penjual	20	4,1500	1,13671	-2,042	0,048
	Pembeli	20	5,1500	1,87153		

Dampak Insentif Moneter terhadap Kinerja Individu: Peran dari Kompleksitas Tugas dan Target Kinerja¹

OKTAVIA

Universitas Kristen Krida Wacana

HILDA ROSSIETA

LINDAWATI GANI

Universitas Indonesia

Abstract: *This study uses laboratory experiments with 2x2x2 experimental design, include two levels of task complexity (complex and less complex), two performance targets (performance targets and have no performance targets/ do your best target), and two types of incentive scheme (flat-rate and piece-rate). The purpose of this study was: (1) To investigate whether the increased of task complexity may reduce the effectiveness of incentive schemes (piece-rate scheme and flat-rate scheme) on individual performance; (2) Comparing the performance of individuals who receive piece-rate incentives scheme with the performance of individuals who receive a flat-rate incentives; (3) To investigate whether the performance targets make monetary incentives to be more effective in improving the individual performance, and; (4) Comparing the individual performance before and after the introduction of performance targets.*

The results of experiments were: (1) The interaction between task complexity and monetary incentive schemes, making the effectiveness of monetary incentive schemes on individual performance was ineffective; (2) Without existence of performance target, the performance of individuals who receive piece-rate incentives are higher than the performance of individuals who receive flat-rate, but the difference was not significant; (3) When target performance interact with incentive scheme, the effectiveness of incentive scheme in improving individual performance was increasing; (4) When the individual tasks are less complex, the performance of individuals who have performance targets is greater than the performance of individuals who do not have a target the performance. The same findings are also present in the complex task; (5) When there is a target performance, the performance of individuals who receive a flat-rate incentives higher than the performance of individuals who receive flat-rate incentives flat-rate, but the difference was not significant, and; (6) Three-way interaction between task complexity, performance targets and incentive schemes do not significantly affect the performance of individuals.

Keywords: *Individual Performance, Monetary Incentives, Task Complexity, Performance Target, Incentives Scheme.*

¹Penelitian ini telah dipresentasikan dalam kelas Seminar Doktor Akuntansi Manajemen sebagai tugas kuliah di Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA), Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Menurut Bonner *et al.* (2000), peranan penting dari akuntansi manajemen pada praktik kompensasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kinerja individu dan memotivasi individu agar meningkatkan kinerjanya. Peranan ini dilaksanakan dengan cara menghubungkan kompensasi terhadap kinerja individu, khususnya melalui pemberian insentif moneter. Secara teoritis, pemberian insentif moneter dapat meningkatkan upaya individu dalam melaksanakan tugas dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dari individu tersebut. Beberapa literatur juga menyarankan penggunaan insentif moneter sebagai suatu metode untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja individu yang menggunakan dan dipengaruhi oleh informasi akuntansi (Atkinson *et al.*, 2001; Horngren, Foster, dan Datar, 2000; Zimmerman, 2000).

Terkait dengan uraian di atas, banyak penelitian di bidang akuntansi yang berupaya untuk menginvestigasi apakah benar insentif moneter efektif dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja individu (Bailey dan Fessler, 2011; Chong dan Eggleton, 2007; Bonner *et al.*, 2000; Sprinkle, 2000; Bonner, 1999; Young dan Lewis, 1995; Libby dan Lipe, 1992; Ashton, 1990; Awasthi dan Pratt, 1990), namun hasil yang ditemukan masih sangat bervariasi dan saling bertentangan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Menurut Bonner dan Sprinkle (2002) maupun Bailey dan Fessler (2011), hasil penelitian yang bervariasi tersebut timbul karena adanya pengaruh dari faktor-faktor lain selain insentif, misalnya kompleksitas tugas.

Dalam *setting* akuntansi, kompleksitas tugas merupakan salah satu determinan penting dari kinerja. Kompleksitas tugas dapat berinteraksi dengan insentif moneter untuk mempengaruhi kinerja individu (Bonner dan Sprinkle, 2002; Bailey dan Fessler, 2011). Bailey dan Fessler (2011) menemukan bahwa insentif moneter lebih efektif dalam meningkatkan kinerja ketika tugas individu kurang kompleks. Namun ketika kompleksitas

tugas meningkat, kebutuhan akan pengetahuan dan *skill* yang lebih baik juga meningkat, sehingga menyebabkan kinerja individu menjadi kurang sensitif terhadap kinerja (Bonner *et al.*, 2000; Bailey dan Fessler, 2011). Kinerja individu tidak mungkin meningkat meskipun telah dimotivasi oleh pemberian insentif moneter, karena individu tidak dibekali dengan pengetahuan dan *skill* yang baik ketika terjadi peningkatan kompleksitas dalam pekerjaannya (Bonner dan Sprinkle, 2002).

Selain kompleksitas tugas, *environmental* juga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kinerja individu (Bonner *et al.*, 2000). Faktor *environmental* yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah target kinerja (*performance target*). Hal ini dikarenakan target kinerja seringkali digunakan sebagai *benchmark* dalam mengevaluasi kinerja karyawan, sehingga dapat pula digunakan untuk memotivasi kinerja dari karyawan (Merchant, 1998; Shields, 2001). Lebih lanjut, Bonner dan Sprinkle (2002) mengemukakan bahwa target kinerja merupakan komplemen (pelengkap) dari pemberian insentif moneter kepada karyawan. Dengan adanya penetapan target kinerja yang harus dicapai oleh individu, insentif moneter yang diberikan kepada individu menjadi lebih efektif dalam memotivasi kinerja individu tersebut.

Temuan Lock dan Latham (1990) mengindikasikan bahwa adanya target yang spesifik menyebabkan insentif moneter lebih efektif dalam meningkatkan kinerja individu, daripada ketika tidak ada target yang ditetapkan (seringkali diasumsikan secara implisit sebagai target “*do your best*”). Namun, jika target kinerja menjadi terlalu sulit untuk dicapai, maka efektivitas dari pemberian insentif moneter dalam rangka meningkatkan kinerja individu, menjadi semakin semakin berkurang (Latham dan Locke, 1991; Locke dan Latham, 1990). Target kinerja yang terlalu sulit dicapai membuat individu menyerah (*giving up*), dan pada gilirannya insentif yang diberikan menjadi tidak efektif lagi dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja individu (Bonner dan Sprinkle, 2002).

Apabila kompleksitas tugas dikaitkan dengan skema insentif, Bonner dan Sprinkle (2002) berargumen bahwa kinerja individu yang menerima insentif dengan skema *piece-rate* lebih tinggi dibandingkan individu yang menerima insentif berskema *flat-rate* ketika tugas yang dikerjakan kurang kompleks. Hal ini didukung pula oleh temuan penelitian Bailey dan Fessler (2011) bahwa individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* memiliki kinerja yang lebih baik ketika tugas yang dilakukannya kurang kompleks.

Apabila skema insentif dikaitkan dengan target kinerja, Fatseas dan Hirst (1992), serta Lee *et al.* (1997) mengemukakan bahwa kinerja individu yang menerima insentif berskema *flat-rate* lebih rendah dibandingkan dengan kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* ketika target mudah dicapai atau target berupa “*do your best target*”. Namun ketika target semakin sulit untuk dicapai, Fatseas dan Hirst (1992) serta Lee *et al.* (1997) menemukan bahwa skema insentif *flat-rate* secara signifikan menyebabkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema insentif lainnya.

Karena hasil yang ditemukan oleh penelitian-penelitian terdahulu masih sangat bervariasi, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menginvestigasi apakah peningkatan kompleksitas tugas dapat mengurangi efektivitas dari skema insentif (skema *piece-rate* maupun skema *flat-rate*) dalam meningkatkan kinerja individu; (2) Membandingkan kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* dengan kinerja individu yang menerima insentif *flat-rate*, baik pada saat tugas yang dilakukan kurang kompleks maupun pada saat tugas yang dilakukan lebih kompleks; (3) Menginvestigasi apakah dengan adanya target kinerja membuat upaya pemberian insentif moneter menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kinerja individu, dan; (4) Membandingkan kinerja dari individu antar sebelum dan setelah adanya target kinerja.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan skema insentif manakah yang paling efektif untuk memotivasi kinerja individu, dikaitkan dengan kompleksitas tugas yang dihadapi oleh individu tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya penetapan target kinerja yang harus dicapai oleh individu, ketika insentif moneter diberikan kepada individu dengan maksud untuk memotivasi kinerja dari individu tersebut. Dalam melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini akan menggunakan eksperimen laboratorium dengan desain eksperimen $2 \times 2 \times 2$, meliputi 2 (dua) tingkat kompleksitas tugas (*complex* dan *less complex*), 2 (dua) target kinerja (*have target performance* dan *no target performance/do your best target*), dan 2 (dua) jenis skema insentif (*flat-rate* dan *piece-rate*). Karena durasi eksperimen pada penelitian ini pendek/singkat, maka faktor *person*, yaitu *skill* dan pengetahuan, tidak diperlukan dalam mengerjakan *experimental task*.

Kontribusi dari penelitian ini, yaitu: (1) Menguji apakah dengan adanya penetapan target kinerja membuat upaya pemberian insentif moneter menjadi lebih efektif dalam memotivasi kinerja individu. Saat ini, belum ada penelitian yang menguji apakah penetapan mengenai target kinerja yang harus dicapai oleh individu, membuat upaya pemberian insentif moneter menjadi lebih efektif dalam memotivasi kinerja individu; (2) Menginteraksikan variabel kompleksitas tugas, target kinerja, dan skema insentif (*three-way interaction*), lalu mengaitkannya dengan kinerja individu. Belum ada penelitian yang menguji interaksi *three-way* dari variabel kompleksitas tugas, target kinerja, dan skema insentif, ketika menginvestigasi efektif atau tidaknya pemberian insentif moneter dalam memotivasi karyawan.

Penelitian Bailey dan Fessler (2011) menginteraksikan variabel kompleksitas tugas maupun tingkat keatraktifan tugas dengan skema insentif (*three-way interaction*), ketika menginvestigasi dampak dari insentif moneter terhadap kinerja individu. Namun, kelemahan

dari penelitian Bailey dan Fessler (2011) adalah tidak mempertimbangkan adanya faktor target kinerja (*performance target*) ketika menginvestigasi efektivitas dari insentif moneter dalam meningkatkan kinerja individu. Padahal, target kinerja merupakan suatu elemen penting dari sistem pengendalian organisasi dan seringkali digunakan sebagai *benchmark* dalam mengevaluasi kinerja karyawan, sehingga membuatnya dapat digunakan untuk memotivasi kinerja dari karyawan (Merchant, 1998; Shields, 2001).

2. Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pemberian insentif moneter dapat memotivasi individu untuk berupaya lebih giat lagi, dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dari individu tersebut (Atkinson *et al.*, 2001; Horngren, Foster, dan Datar, 2000; Zimmerman, 2000). Namun, efektivitas dari pemberian insentif ini terhadap kinerja individu sangat bervariasi. Menurut Bonner dan Sprinkle (2002), selain insentif moneter, masih ada faktor-faktor penting lain yang dapat mempengaruhi kinerja individu, antara lain: *person* (misalnya, pengetahuan dan *skill*), kompleksitas tugas, dan *environmental* (misalnya, target kinerja). Penelitian ini difokuskan pada faktor kompleksitas tugas dan target kinerja saja. Faktor *person* tidak dimasukkan dalam pengujian karena *experimental task* pada penelitian ini tidak memerlukan pengetahuan dan skill khusus. Skema yang akan digunakan pada penelitian ini hanya dibatasi pada 2 (dua) skema, yaitu *flat-rate* dan *piece-rate*.

2.1. Peran Kompleksitas Tugas Dalam Mempengaruhi Efektivitas dari Skema Insentif Moneter terhadap Kinerja Individu

Menurut Bonner dan Sprinkle (2002), kompleksitas tugas merupakan variabel kunci dalam menentukan kinerja individu, dan dapat mempengaruhi efektivitas dari pemberian insentif moneter. Pelham dan Netter (1995) menemukan bahwa insentif moneter berpengaruh

positif terhadap kinerja individu yang memiliki tugas yang mudah. Konsisten dengan temuan Pelham dan Netter (1995) tersebut, Bonner *et al.* (2000) juga mengemukakan bahwa insentif moneter dapat meningkatkan kinerja individu apabila tugas yang dilakukan oleh individu tersebut tidak terlalu kompleks. Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Bailey dan Fessler (2011) yang menemukan bahwa insentif lebih efektif dalam meningkatkan kinerja individu ketika tugas yang dilakukannya kurang kompleks dan relatif tidak menarik.

Bailey dan Fessler (2011) menemukan bahwa insentif moneter lebih efektif dalam meningkatkan kinerja ketika tugas individu kurang kompleks. Namun ketika kompleksitas tugas meningkat, kebutuhan akan pengetahuan dan *skill* yang lebih baik juga meningkat, sehingga menyebabkan kinerja individu menjadi kurang sensitif terhadap kinerja (Bonner *et al.*, 2000; Bailey dan Fessler, 2011). Kinerja individu tidak mungkin meningkat meskipun telah dimotivasi oleh pemberian insentif moneter, karena individu tersebut tidak dibekali dengan pengetahuan dan *skill* yang baik ketika terjadi peningkatan kompleksitas dalam pekerjaannya (Bonner dan Sprinkle, 2002). Di samping itu, peningkatan kompleksitas tugas yang tidak diiringi dengan peningkatan *skill*, menyebabkan tingkat stress karyawan semakin meningkat, dan pada akhirnya dapat membuat kinerja individu menurun (Bonner dan Sprinkle, 2002). Lebih lanjut, Bonner dan Sprinkle (2002) juga mengemukakan bahwa pada studi dengan durasi yang pendek dimana subyek penelitiannya memiliki sedikit/tidak memiliki pengalaman dengan tugas yang diberikan, efektivitas dari insentif moneter semakin menurun apabila tugas yang dilakukan oleh subyek penelitian (partisipan) semakin kompleks.

Apabila dikaitkan dengan skema insentif, Bonner dan Sprinkle (2002) mengemukakan bahwa ketika tugas yang dilakukan oleh individu kurang kompleks, maka kinerja dari individu yang menerima insentif moneter berskema *piece-rate* lebih tinggi dibandingkan individu yang menerima insentif moneter berskema *flat-rate*. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian Bailey dan Fessler (2011) yang menemukan bahwa insentif moneter dengan skema

piece-rate lebih efektif dalam meningkatkan kinerja individu yang memiliki tugas kurang kompleks. Selain itu, Bailey dan Fessler (2011) juga menemukan bahwa pada pengerjaan tugas yang kompleks, kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* lebih tinggi daripada individu yang menerima insentif berskema *flat-rate*. Berdasarkan uraian di atas, (sebelum memasukkan faktor target kinerja) dikembangkan hipotesis penelitian berikut:

- H1:** *Pada saat kompleksitas tugas meningkat, skema insentif moneter menjadi tidak efektif dalam memotivasi kinerja individu*
- H2:** *Pada saat tugas individu bersifat kurang kompleks maupun kompleks, kinerja individu yang menerima insentif berskema **piece-rate lebih tinggi** daripada kinerja individu yang menerima insentif berskema *flat-rate**

2.2. Peran target kinerja dalam mempengaruhi efektivitas dari skema insentif moneter terhadap kinerja individu

Banyak studi yang menyebutkan bahwa target kinerja merupakan suatu elemen penting dari sistem pengendalian organisasi dan selalu dikembangkan dan direvisi secara berkelanjutan (Locke dan Latham, 1990; Merchant, 1998; Shields, 2001; Bonner dan Sprinkle, 2002). Target kinerja juga seringkali digunakan sebagai *benchmark* dalam mengevaluasi kinerja karyawan, dan pada akhirnya dapat digunakan untuk memotivasi kinerja dari karyawan (Merchant, 1998; Shields, 2001). menurut Bonner dan Sprinkle (2002), organisasi harus menggunakan target kinerja sebagai komplemen (pelengkap) dari pemberian insentif moneter yang bertujuan untuk memotivasi kinerja karyawan. Dengan kata lain, target kinerja harus diberikan bersamaan dengan pemberian insentif moneter agar insentif yang diberikan tersebut menjadi lebih efektif dalam memotivasi kinerja individu.

Temuan Lock dan Latham (1990) mengindikasikan bahwa dengan adanya target yang spesifik menyebabkan efektivitas dari insentif moneter terhadap kinerja individu menjadi lebih besar daripada ketika tidak ada target kinerja yang ditetapkan (seringkali diasumsikan secara implisit sebagai target “*do your best*”). Dengan adanya target kinerja yang harus dicapai oleh individu, maka efektivitas dari insentif moneter terhadap kinerja individu akan semakin besar. Namun, jika target kinerja yang harus dicapai menjadi terlalu sulit, maka efektivitas dari insentif moneter terhadap kinerja individu justru semakin berkurang, bahkan menjadi tidak efektif (Latham dan Locke, 1991; Locke dan Latham, 1990). Target kinerja yang terlalu sulit dicapai membuat individu menyerah (*giving up*), dan kemudian membuat insentif moneter menjadi tidak efektif lagi dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja individu (Bonner dan Sprinkle, 2002).

Apabila target kinerja dikaitkan dengan skema insentif, Fatseas dan Hirst (1992), serta Lee *et al.* (1997) mengemukakan bahwa ketika tujuan mudah dicapai, kinerja individu yang menerima insentif berskema *flat-rate* lebih rendah dibandingkan dengan kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate*. Namun, ketika tujuan menjadi lebih sulit, baik Fatseas dan Hirst (1992), maupun Lee *et al.* (1997) mengemukakan bahwa skema insentif *flat-rate* secara signifikan menyebabkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema insentif lainnya. Belum ada penelitian yang meneliti interaksi dari ketiadaan target (*do your best target*) dengan skema insentif moneter. Berdasarkan uraian di atas, maka dikembangkan hipotesis berikut ini:

- H3:** *Target kinerja mempengaruhi efektivitas dari skema insentif moneter (piece-rate maupun flat-rate) terhadap kinerja individu*
- H4:** *Pada saat tugas individu bersifat kurang kompleks maupun kompleks, kinerja individu yang ditetapkan target kinerjanya (have target performance) lebih tinggi daripada*

kinerja individu yang tidak ditetapkan target kinerjanya (no target performance/do your best target)

H5: *ketika ada target kinerja yang ditetapkan kepada individu (have target performance), kinerja individu yang menerima insentif berskema flat-rate **lebih tinggi** daripada kinerja individu yang menerima insentif berskema piece-rate*

H6: *Terdapat interaksi three-way yang signifikan antara kompleksitas tugas, target kinerja, dan skema insentif*

3. METODE PENELITIAN

3.1. Experimental Task

Experimental task pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *less complex task* dan *complex task*. Ide pembuatan *experimental task* pada penelitian ini berasal dari *experimental task* yang dikembangkan dalam penelitian Libby (2001), dimana simbol-simbol ditranslasikan ke dalam huruf alphabet, dengan menggunakan suatu *translation key*. Namun demikian, bentuk simbol yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan simbol yang digunakan oleh Libby (2001).

Pada *less complex task* (tugas kurang kompleks), partisipan hanya diminta untuk mentranslasikan simbol-simbol ke dalam bentuk huruf alphabet, dimana kumpulan huruf alphabet tersebut akan membentuk satu kata yang tidak memiliki makna apapun baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing lainnya. *Complex task* pada penelitian ini sebenarnya merupakan pengembangan dari *less complex task*, dimana perbedaannya adalah partisipan tidak hanya diminta untuk mentranslasikan simbol-simbol tersebut ke dalam bentuk huruf alphabet saja, namun juga diminta untuk mentranslasikannya ke dalam bentuk angka.

Sebelum *experimental task* pada penelitian ini digunakan untuk eksperimen, maka prosedur *pretest* terlebih dahulu dilakukan kepada 5 (lima) orang mahasiswa program S1 Kelas Karyawan, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana. Prosedur ini

dilakukan untuk melihat apakah *experimental task* layak untuk digunakan dalam eksperimen dan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, yaitu 4 menit untuk masing-masing *task* (*less complex* maupun *complex*). Setelah *pre test* dilakukan, maka ditetapkan penggunaan *task* dalam eksperimen penelitian ini dan waktu pengerjaan *task* adalah 4 (empat) menit. Secara rinci, bentuk *experimental task* pada penelitian ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

3.2. Desain dan Prosedur Eksperimen

Dalam melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan eksperimen laboratorium dengan desain eksperimen $2 \times 2 \times 2$, yang terdiri dari: 2 (dua) tingkatan kompleksitas tugas (*less complex task* dan *complex task*), 2 (dua) target kinerja (*have target performance* dan *no target performance / do your best target*), dan 2 (dua) skema insentif (*piece-rate* dan *flat-rate*). Karena durasi eksperimen pada penelitian ini relatif pendek, maka faktor *skill* dan pengetahuan tidak dibutuhkan ketika mengerjakan *experimental task*.

Gambar 1. *Cell* penelitian

		Flat-rate	Piece-rate
Less Complex Task	No Target Performance/ Do your best (NT)	Cell 1 (n = 22 orang)	Cell 2 (n = 17 orang)
	Have Target Performance (HT)	Cell 3 (n = 17 orang)	Cell 4 (n = 22 orang)

Complex Task	No Target Performance/ Do your best (NT)	Cell 5 <i>(n = 22 orang)</i>	Cell 6 <i>(n = 17 orang)</i>
	Have Target Performance (HT)	Cell 7 <i>(n = 17 orang)</i>	Cell 8 <i>(n = 21 orang)</i>

Dengan desain eksperimen di atas, maka terbentuk 8 (delapan) *cell* yang dapat dilihat pada gambar 1. Setiap *cell* terdiri sekelompok partisipan yang ditempatkan di ruangan yang berbeda. Karena ada 8 (delapan) *cell* pada penelitian ini, maka digunakan 8 (delapan) ruangan yang berbeda, dimana setiap ruangan dipandu dan diawasi oleh 2 (dua) asisten penelitian. Sebelum waktu pengerjaan dimulai, asisten penelitian di setiap ruangan menjelaskan cara pengerjaan soal dan menginformasikan mengenai honor pengerjaan *task* kepada seluruh partisipan. Selain itu, asisten juga akan membagikan amplop tertutup kepada masing-masing partisipan, yang isinya terdiri dari 1 (satu) berkas *task* (terdiri dari 10 rangkaian simbol yang hendak ditranslasikan), dan 1 (satu) lembar kertas jawaban. Setelah pembagian amplop tersebut selesai dilakukan, pengerjaan *task* di seluruh ruangan dimulai secara serentak pada waktu yang sama (tidak ada yang lebih cepat ataupun yang lebih lambat). Waktu pengerjaan soal untuk setiap ruangan adalah sama, yaitu 4 (empat) menit.

3.3. Partisipan

Partisipan dari eksperimen ini adalah mahasiswa S1 Kelas Karyawan, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana. Kriteria partisipan pada penelitian ini adalah: (1) Mahasiswa yang telah menempuh lebih dari setengah masa studi normal (sesuai ketentuan Universitas adalah 4 tahun), dan; (2) Diasumsikan memiliki kemampuan yang sama, karena

experimental task tidak memerlukan pengetahuan atau *skill* yang khusus. Untuk kriteria ini, maka mahasiswa pindahan yang merupakan mahasiswa *drop-out* dari Universitas lain, maupun mahasiswa yang masa studinya telah lebih dari 4 tahun, tidak diikuti-sertakan dalam eksperimen ini. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, diperoleh total partisipan final sebanyak 155 orang. Rincian honor yang diterima oleh partisipan penelitian dijelaskan pada bagian 3.5.

3.4. Variabel Dependen

Kinerja individu pada penelitian ini diukur dari jumlah pengerjaan *task* yang benar (jumlah jawaban benar). Setiap partisipan akan mengerjakan suatu *task* yang terdiri dari 10 rangkaian simbol. Bagi partisipan yang mendapatkan *less complex task*, rangkaian simbol harus ditranslasikan menjadi huruf alphabet saja, sedangkan bagi partisipan yang mendapatkan *complex task*, diminta untuk mentranslasikan simbol ke dalam bentuk huruf alphabet maupun angka. Banyaknya rangkaian simbol yang berhasil ditranslasikan dengan benar dalam waktu 4 menit, menunjukkan kinerja dari individu.

3.5. Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) faktor yang diduga dapat mempengaruhi hubungan antara insentif moneter dan kinerja individu, yaitu:

a. Kompleksitas tugas

Kompleksitas tugas pada penelitian ini dimanipulasi dengan membagi *task* ke dalam 2 (dua) tingkatan kompleksitas, yaitu: *less complex* dan *complex*. Pada *less complex task*, partisipan diminta mentranslasikan simbol ke dalam bentuk huruf alphabet dalam waktu 4 menit. Namun untuk *complex task*, partisipan diminta mentranslasikan simbol ke dalam bentuk huruf alphabet maupun angka dalam waktu 4 menit.

b. Target kinerja

Target kinerja dimanipulasi menjadi 2 (dua) target, yaitu: *have target performance* dan *no target performance/ do your best target*. Pada kondisi dimana tidak ada target kinerja yang ditetapkan, partisipan diminta melakukan “*do your best*”, dan berapapun jumlah *task* yang benar, honor partisipan tetap dibayar. Namun, pada kondisi ada target kinerja yang ditetapkan, maka honor partisipan akan dibayar hanya jika jumlah *task* yang dikerjakan dengan benar adalah minimal 70% dari total *task* yang diberikan.

c. Skema insentif

- Skema insentif yang digunakan pada penelitian ini adalah *flat-rate* dan *piece-rate*. Pada skema insentif *flat-rate*, honor pengerjaan *task* yang tidak memiliki target kinerja adalah Rp10.000,- (tidak peduli berapapun jumlah *task* yang benar) dan honor pengerjaan *task* yang memiliki target kinerja sebesar Rp 12.000,- (dibayar hanya jika jumlah *task* yang dikerjakan dengan benar adalah minimal 70% dari total *task* yang diberikan).
- Pada skema insentif *piece-rate*, honor pengerjaan *task* yang tidak memiliki target kinerja adalah Rp1000,- per 1 (satu) rangkaian simbol yang berhasil ditranslasikan dengan benar. Di samping itu, berdasarkan skema insentif *piece-rate* ini, honor pengerjaan *task* yang memiliki target kinerja adalah Rp 1200,- per 1 (satu) rangkaian simbol yang berhasil ditranslasikan dengan benar. Namun honor ini hanya akan dibayar jika jumlah *task* yang dikerjakan dengan benar adalah minimal 70% dari total *task* yang diberikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran kompleksitas tugas dalam mempengaruhi efektivitas skema insentif moneter terhadap kinerja individu (sebelum ada faktor target kinerja)

Tabel 1 menyajikan hasil Anova yang menunjukkan bahwa peningkatan kompleksitas tugas secara signifikan mempengaruhi kinerja individu (dilihat nilai *p-value* atas dampak *complexity* terhadap kinerja individu yang kurang dari α (1%). Dari Tabel 1, dapat dilihat pula bahwa sebelum skema insentif diinteraksikan dengan kompleksitas tugas, nilai signifikansi (*p-value*) dari skema insentif adalah 0,111. Kemudian, setelah skema insentif diinteraksikan dengan kompleksitas tugas, nilai *p-value* dari interaksi skema insentif dan kompleksitas tugas (Complexity x Incentive Scheme) menjadi semakin tidak signifikan, yaitu 0,615. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika kompleksitas tugas semakin meningkat, insentif moneter menjadi semakin tidak efektif dalam memotivasi kinerja individu. Temuan ini membuktikan hipotesis H1 bahwa pada saat kompleksitas tugas meningkat, skema insentif moneter menjadi tidak efektif dalam memotivasi kinerja individu.

Tabel 1. Pengaruh dari kompleksitas tugas dan skema insentif terhadap kinerja individu (sebelum ada faktor target kinerja) – Menggunakan 4 Cell (Cell1 –Cell4)

Factor	df	Sum of Squares	F-value	p-value
Complexity	1	232.621	114.383	0.000*
Incentive Scheme	1	5.294	2.603	0.111
Complexity x Incentive Scheme	1	0.519	0.255	0.615
Error	74	150.495		
$R^2 = 0.614$ (Adjusted $R^2 = 0.598$)				
*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$				

Tabel 2 menunjukkan deskriptif statistik dari 8 (delapan) *cell* pada penelitian ini. Dari Tabel 2 diketahui bahwa pada saat tugas individu kurang kompleks dan tidak ada target kinerja yang ditetapkan kepada individu, rata-rata kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* lebih tinggi daripada rata-rata kinerja individu yang menerima insentif *flat-rate* ($cell\ 2 > cell\ 1$). Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian Bailey dan Fessler (2011) bahwa insentif moneter dengan skema *piece-rate* menghasilkan kinerja individu yang lebih tinggi daripada insentif moneter dengan skema *flat-rate*, ketika tugas yang dikerjakan oleh individu bersifat kurang kompleks. Namun, jika dilihat dari nilai *Bonferroni t-statistics*, perbedaan rata-rata kinerja *cell 1* dengan rata-rata kinerja *cell 2* tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 tidak terbukti.

Dari Tabel 2, diketahui pula bahwa pada saat tugas individu lebih kompleks dan tidak ada target kinerja yang ditetapkan kepada individu, rata-rata kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* lebih tinggi daripada rata-rata kinerja individu yang menerima insentif berskema *flat-rate* ($cell\ 6 > cell\ 5$). Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian Bailey dan Fessler (2011), namun jika dilihat dari nilai *Bonferroni t-statistics* yang disajikan pada tabel 2, maka diketahui bahwa perbedaan rata-rata kinerja *cell 5* dengan rata-rata kinerja *cell 6* tidak signifikan. Temuan ini kembali menunjukkan bahwa hipotesis H2 tidak terbukti.

Tabel 2. Deskriptif Statistik

	Flat-rate	Piece-rate	Total	Description

Less Complex Task	No Target Performance/ Do your best (NT)	<u>Cell 1</u> Mean = 8.5455 S.D = 1.4385 (n = 22)	<u>Cell 2</u> Mean = 9.2353 S.D = 0.9701 (n = 17 orang)	<u>Cell 1 + Cell 2</u> Mean = 8.8904 S.D = 1.2043 (n = 39 orang)	<i>p-value</i> of mean difference (cell 1 + cell 2) versus (cell 3 + cell 4) adalah 0.013*
	Have Target Performance (HT)	<u>Cell 3</u> Mean = 9.7059 S.D = 0.5879 (n = 17 orang)	<u>Cell 4</u> Mean = 9.3182 S.D = 1.0861 (n = 22 orang)	<u>Cell 3 + Cell 4</u> Mean = 9.5120 S.D = 0.8370 (n = 39 orang)	
Complex Task	No Target Performance/ Do your best (NT)	<u>Cell 5</u> Mean = 5.2273 S.D = 1.4119 (n = 22 orang)	<u>Cell 6</u> Mean = 5.5882 S.D = 1.7698 (n = 17 orang)	<u>Cell 5 + Cell 6</u> Mean = 5.4078 S.D = 1.5909 (n = 39 orang)	<i>p-value</i> of mean difference (cell 5 + cell 6) versus (cell 7 + cell 8) adalah 0.011*
	Have Target Performance (HT)	<u>Cell 7</u> Mean = 6.7647 S.D = 1.5624 (n = 17 orang)	<u>Cell 8</u> Mean = 5.9524 S.D = 1.5322 (n = 21 orang)	<u>Cell 7 + Cell 8</u> Mean = 6.3586 S.D = 1.5473 (n = 38 orang)	
<i>Bonferroni t-statistic</i>					
Difference		Mean Diff.	Std. Error	<i>p-value</i>	
Cell 1 dan Cell 2		-0.690	0.461	0.830	
Cell 3 dan Cell 4		0.388	0.435	1.000	
Cell 5 dan Cell 6		-0.361	0.461	1.000	
Cell 7 dan Cell 8		0.812	0.440	1.000	
*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$					

4.2. Peran dari kompleksitas tugas dan target kinerja dalam mempengaruhi efektivitas skema insentif moneter terhadap kinerja individu

Pada Tabel 2 diketahui bahwa pada saat tugas individu kurang kompleks (*less complex*), rata-rata kinerja dari individu yang ditetapkan target kinerjanya (*have target performance*) lebih besar signifikan daripada rata-rata kinerja individu yang tidak ditetapkan target kinerjanya (*no target performance / do your best*). Hal ini dilihat dari rata-rata kinerja individu dari *cell 3 + cell 4* (9,5120) yang lebih besar signifikan daripada rata-rata kinerja individu dari *cell 1 + cell 2* = 8,8904 (nilai signifikansi dari *mean difference* = $0.013 < \alpha$ (0.05)). Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis H4 terbukti.

Dari Tabel 2, dapat dilihat pula bahwa saat tugas individu bersifat kompleks (*complex*), rata-rata kinerja individu yang ditetapkan target kinerjanya (*have target performance*) juga lebih besar signifikan daripada rata-rata kinerja individu yang tidak ditetapkan target kinerjanya (*no target performance / do your best*). Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kinerja individu dari *cell 7 + cell 8* (6,3586) yang lebih besar signifikan daripada rata-rata kinerja individu dari *cell 5 + cell 6* = 5,4078 (nilai signifikansi dari *mean difference* = $0.011 < \alpha$ (0.05)). Temuan ini kembali menunjukkan bahwa hipotesis H4 terbukti.

Di samping itu, berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui pula bahwa ketika ada target kinerja yang ditetapkan kepada individu, rata-rata kinerja dari individu yang menerima insentif berskema *flat-rate* lebih tinggi daripada rata-rata kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* (*cell 3 > cell 4, cell 7 > 8*). Temuan ini konsisten temuan Fatseas dan Hirst (1992), maupun Lee *et al.* (1997) yang mengindikasikan bahwa skema insentif *flat-rate* menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema insentif lainnya. Namun, jika dilihat dari nilai *Bonferroni t-statistics* di tabel 2, maka dapat diketahui bahwa rata-rata kinerja individu *cell 3* dengan rata-rata kinerja individu *cell 4* tidak berbeda signifikan, begitu pula dengan rata-rata kinerja individu *cell 7* dengan rata-rata kinerja individu *cell 8*. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis H5 yang menyatakan bahwa ketika ada target kinerja yang ditetapkan kepada individu, kinerja individu yang menerima insentif

berskema *flat-rate* lebih tinggi daripada kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate*, tidak terbukti.

Hasil pengujian hipotesis H3 dan H6 yang menggunakan uji Anova disajikan di Tabel 3. Berdasarkan hasil uji Anova di Tabel 3, diketahui bahwa nilai *p-value* dari interaksi skema insentif dan target kinerja (Incentive Scheme x Target) sebesar 0,011 yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika target kinerja diinteraksikan dengan skema insentif moneter, maka skema insentif moneter menjadi semakin efektif dalam meningkatkan kinerja individu. Dengan kata lain, target kinerja harus diberikan bersamaan dengan pemberian insentif moneter agar insentif moneter yang diberikan kepada karyawan menjadi lebih efektif dalam memotivasi kinerja karyawan tersebut. Temuan ini membuktikan hipotesis H3.

Tabel 3. Pengaruh dari kompleksitas tugas, target kinerja, dan skema insentif terhadap kinerja individu – Menggunakan 8 (delapan) Cell

Factor	df	Sum of Squares	F-value	p-value
Complexity	1	420.132	231.475	0.000*
Incentive Scheme	1	0.053	0.029	0.864
Target	1	23.589	12.997	0.000*
Complexity x Incentive Scheme	1	1.354	0.746	0.389
Complexity x Target	1	1.033	0.569	0.452
Incentive Scheme x Target	1	12.083	6.657	0.011**
Complexity x Incentive Scheme x Target	1	0.022	0.012	0.913
Error	147	266.808		
$R^2 = 0.636$ (Adjusted $R^2 = 0.619$)				

*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$

***) Signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$

Dari Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *p-value* dari interaksi antara kompleksitas tugas, target kinerja, dan skema insentif (Complexity x Incentive Scheme x Target) tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis H6 tidak terbukti. Hasil ini konsisten dengan argumen dari Bonner dan Sprinkle (2002) bahwa peningkatan kompleksitas tugas yang tidak diiringi dengan peningkatan *skill*, dan adanya target kinerja yang semakin sulit, membuat individu menjadi frustrasi dan menyerah (*giving up*), dan pada akhirnya dapat membuat insentif moneter menjadi tidak efektif lagi dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja individu.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah peningkatan kompleksitas tugas dapat mengurangi efektivitas dari skema insentif moneter dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompleksitas tugas secara signifikan mempengaruhi kinerja individu. Apabila kompleksitas tugas dikaitkan dengan skema insentif, maka efektivitas dari skema insentif moneter dalam memotivasi kinerja individu menjadi semakin tidak efektif. Di samping itu, ditemukan pula bahwa ketika tidak ada target kinerja yang ditetapkan kepada individu, baik pada tugas yang kompleks maupun kurang kompleks, kinerja dari individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* lebih tinggi daripada kinerja individu yang menerima insentif berskema *flat-rate*, namun perbedaan kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate* dengan kinerja individu yang menerima insentif berskema *flat-rate* tidak signifikan.

Penelitian ini juga menginvestigasi apakah dengan adanya target kinerja membuat pemberian insentif moneter menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kinerja individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika target kinerja diinteraksikan dengan skema insentif moneter, maka efektivitas dari skema insentif dalam meningkatkan kinerja individu menjadi semakin meningkat. Ditemukan pula bahwa ketika tugas yang dikerjakan individu kurang kompleks (*less complex*), rata-rata kinerja individu yang ditetapkan target kerjanya (*have target performance*) lebih besar daripada rata-rata kinerja individu yang tidak ditetapkan target kerjanya (*no target performance / do your best*). Temuan yang sama juga terdapat pada tugas individu yang kompleks (*complex*).

Di samping temuan-temuan di atas, ditemukan pula bahwa ketika ada target kinerja yang ditetapkan kepada individu, kinerja dari individu yang menerima insentif berskema *flat-rate* lebih tinggi daripada kinerja individu yang menerima insentif berskema *piece-rate*, namun perbedaan rata-rata kinerja individu dari kedua kelompok tersebut tidak signifikan. Terakhir, ditemukan pula bahwa interaksi *three-way* antara kompleksitas tugas, target kinerja, dan skema insentif tidak signifikan mempengaruhi kinerja individu. Peningkatan kompleksitas tugas yang tidak diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan *skill*, serta adanya target kinerja membuat individu menjadi frustrasi dan menyerah (*giving up*), dan pada akhirnya dapat membuat insentif moneter menjadi tidak efektif lagi dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja individu.

Keterbatasan dari penelitian ini, antara lain: (1) Durasi eksperimen pendek, dimana faktor *person*, yaitu pengalaman dan *skill* khusus tidak diperhitungkan keberadaannya; (2) Partisipan pada eksperimen penelitian ini merupakan mahasiswa dari kampus yang sama, sehingga hasil penelitian mungkin tidak bisa digeneralisasi, dan; (3) Target kinerja yang dimanipulasi pada penelitian ini sangat sederhana, hanya berupa eksistensi dari target kinerja (ada target atau tidak ada target). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengakomodasi

keterbatasan-keterbatasan tersebut, dengan cara: (i) Memperpanjang durasi penelitian dan memasukkan faktor *person* (misalnya, *skill* dan pengetahuan) dalam melakukan pengujian; (ii) Partisipan diperluas, tidak hanya dari satu kampus saja, dan; (iii) Memperluas spesifikasi dari target kinerja, misalnya menggunakan target kinerja yang *low*, *medium*, dan *high*.

DAFTAR REFERENSI

- Ashton, R. H. 1990. Pressure and performance in accounting decision settings: Paradoxical effects of incentives, feedback, and justification. *Journal of Accounting Research* 28 (Supplement): 148–180.
- Atkinson, A. A., Banker, R., Kaplan, R. S., & Young, S. M. 2001. *Management accounting* (3rd edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Awasthi, V., & J. Pratt. 1990. The effects of monetary incentives on effort and decision performance: The role of cognitive characteristics. *The Accounting Review* 65: 797–811.
- Bailey, C. D., & N. J. Fessler. 2011. The moderating effects of task complexity and task attractiveness on the impact of monetary incentives in repeated task. *Journal of Management Accounting Research* 23: 189–210.
- Bailey, C. D., L. D. Brown, & A. F. Cocco. 1998. The effects of monetary incentives on worker learning and performance in an assembly task. *Journal of Management Accounting Research* 10: 119–131.
- Banker, R. D., & Datar, S. M. 1989. Sensitivity, precision, and linear aggregation of signals for performance evaluation. *Journal of Accounting Research* 27: 21–39.
- Bonner, S. E., & G. B. Sprinkle. 2002. The effects of monetary incentives on effort and task performance: Theories, evidence, and a framework for research. *Accounting, Organizations and Society* 27: 303–345.
- Bonner, S. E., R. Hastie, G. B. Sprinkle, & S. M. Young. 2000. A review of the effects of financial incentives on performance in laboratory tasks: Implications for management accounting. *Journal of Management Accounting Research* 12: 19–64.
- Bonner, S. E. 1999. Judgment and decision-making research in accounting. *Accounting Horizons* 13: 385–398.

- Bull, C., Schotter, A., & Weigelt, K. 1987. Tournaments and piece rates: an experimental study. *Journal of Political Economy* 95: 1–33.
- Campbell, D. J. 1988. Task complexity: A review and analysis. *Academy of Management Review* 13: 40–52.
- Campbell, D. J. 1984. The effects of goal-contingent payment on the performance of a complex task. *Personnel Psychology* 37: 23–40.
- Chong, V. K., & Ian R.C. Eggleton. 2007. The impact of reliance on incentive-based compensation schemes, information asymmetry and organisational commitment on managerial performance. *Management Accounting Research* 18: 312-342.
- Chow, C. W. 1983. The effects of job standard tightness and compensation scheme on performance: an exploration of linkages. *The Accounting Review* 58: 667–685.
- Fatseas, V. A., & Hirst, M. K. 1992. Incentive effects of assigned goals and compensation schemes on budgetary performance. *Accounting and Business Research* 22: 347–355.
- Feltham, G. A., & Xie, J. 1994. Performance measure congruity and diversity in multi-task principal/agent relations. *The Accounting Review* 69: 429–453.
- Fessler, N. J. 2003. Experimental evidence on the links among monetary incentives, task attractiveness, and task performance. *Journal of Management Accounting Research* 15: 159–174.
- Foster, G., & L. Sjoblom. 1996. Quality improvement drivers in the electronics industry. *Journal of Management Accounting Research* 8: 55–86.
- Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. 2000. *Cost accounting: a managerial emphasis* (10th edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Jenkins, G. D. Jr., N. Gupta, A. Mitra, & J. D. Shaw. 1998. Are financial incentives related to performance? A meta-analytic review of empirical research. *Journal of Applied Psychology* 83: 777–787.

- Johnson, E. N., Kaplan, S. E., & Reckers, P. M. J. 1998. An examination of potential gender-based differences in audit managers' performance evaluation judgments. *Behavioral Research in Accounting* 10: 47–75.
- Kessler, L., & Ashton, R. H. 1981. Feedback and prediction achievement in financial analysis. *Journal of Accounting Research* 19: 146–162.
- Klein, H. J., & Wright, P. M. 1994. Antecedents of goal commitment: an empirical examination of personal and situational factors. *Journal of Applied Social Psychology* 24: 95–114.
- Kluger, A. N., & DeNisi, A. 1996. The effects of feedback interventions on performance: a historical review, a metaanalysis, and a preliminary feedback intervention theory. *Psychological Bulletin* 119: 254–284.
- Kohn, A. 1993. Why incentive plans cannot work. *Harvard Business Review* 71: 54–63.
- Latham, G., & Locke, E. A. 1991. Self-regulation through goal-setting. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50: 212–247.
- Lee, T. W., Locke, E. A., & Phan, S. H. 1997. Explaining the assigned goal-incentive interaction: the role of self-efficacy and personal goals. *Journal of Management* 23: 541–559.
- Libby, R., Bloomfield, R., & Nelson, M. W. 2001. Experimental research in financial accounting. *Accounting, Organizations and Society* (in press).
- Libby, T. 2001. Referent cognitions and budgetary Fairness: A Research Note. *Journal of Management Accounting Research* 13: 91–105.
- Libby, R., & Tan, H-T. 1999. Analysts' reactions to warnings of negative earnings surprises. *Journal of Accounting Research* 37: 415–435.

- Libby, R., & Luft, J. 1993. Determinants of judgment performance in accounting settings: ability, knowledge, motivation, and environment. *Accounting, Organizations and Society* 5: 425–450.
- Libby, R., & M. G. Lipe. 1992. Incentives, effort, and the cognitive processes involved in accounting-related judgments. *Journal of Accounting Research* 30: 249–273.
- Lipe, M. G. 1993. Analyzing the variance investigation decision: the effects of outcomes, mental accounting, and framing. *The Accounting Review* 68: 748–764.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. 1990. *A theory of goal setting and task performance*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. 1990. *A theory of goal setting and task performance*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Locke, E. A., Shaw, K., Saari, L., & Latham, G. 1981. Goal setting and task performance: 1969–1980. *Psychological Bulletin* 90: 125–152.
- Luft, J. 1994. Bonus and penalty incentives: contract choice by employees. *Journal of Accounting and Economics* 18: 181–206.
- Merchant, K. A. 1998. *Modern management control systems*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Nembhard, D. A. 2000. The effects of task complexity and experience on learning and forgetting: A field study. *Human Factors* 42: 272–286.
- Payne, J. W., Bettman, J. R., & Johnson, E. J. 1990. *The adaptive decision maker*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Pelham, B. W., & Neter, E. 1995. The effect of motivation of judgment depends on the difficulty of the judgment. *Journal of Personality and Social Psychology* 68: 581–594.

- Scott, W. E. Jr., & J. A. Erskine. 1980. The effects of variations in task design and monetary reinforcers on task behavior. *Organizational Behavior and Human Performance* 25: 311–335.
- Shields, M. D. 2001. Operating budgeting systems. Workingpaper, Michigan State University.
- Smith, V. L., & Walker, M. 1993. Monetary rewards and decision cost in experimental economics. *Economic Inquiry* 31: 245–261.
- Sprinkle, G. B. 2000. The effect of incentive contracts on learning and performance. *The Accounting Review* 75: 299–326.
- Sprinkle, G. B. 2001. Perspectives on experimental research in managerial accounting. *Accounting, Organizations and Society* (in press).
- Stone, D. N., & Ziebart, D. A. 1995. A model of financial incentive effects in decision making. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 61: 250–261.
- Tan, H., & Libby, R. 1997. Tacit managerial versus technical knowledge as determinants of audit expertise in the field. *Journal of Accounting Research* 35: 97–113.
- Wood, R. E., Mento, A. J., & Locke, E. A. 1987. Task complexity as a moderator of goal effects: a meta-analysis. *Journal of Applied Psychology* 72: 416–425.
- Wright, P. M. 1992. An examination of the relationships among monetary incentives, goal level, goal commitment, and performance. *Journal of Management* 18: 677–693.
- Wright, P. M. 1990. Monetary incentives and task experience as determinants of spontaneous goal setting, strategy development, and performance. *Human Performance* 3: 237–258.
- Young, S. M. 2001. The effects of earnings predictability on optimism and accuracy in forecasts of financial analysts. Workingpaper, Emory University.

- Young, S. M., & Lewis, B. L. 1995. Experimental incentivecontractingresearch in managerial accounting. *Judgment and decisionmaking research in accounting and auditing* (pp. 55–75). NewYork, NY: Cambridge University Press.
- Young, S. M. 1985. Participative budgeting: the effects of risk aversion and asymmetric information on budgetary slack. *Journal of Accounting Research* 23: 829–842.
- Zimmerman, J. L. 2000. *Accounting for decision making and control* (3rd edition). Boston: McGraw-Hill.

LAMPIRAN 1. OUTPUT SPSS UJI ANOVA

Hasil ANOVA sebelum ada target kinerja (Menggunakan 4 cell: Cell 1, 2, 3, 4)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Performance

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	239.467 ^a	3	79.822	39.250	.000
Intercept	3920.987	1	3920.987	1927.996	.000
Complexity	232.621	1	232.621	114.383	.000
Scheme	5.294	1	5.294	2.603	.111
Complexity * Scheme	.519	1	.519	.255	.615
Error	150.495	74	2.034		
Total	4339.000	78			
Corrected Total	389.962	77			

a. R Squared = .614 (Adjusted R Squared = .598)

Hasil ANOVA setelah memasukkan faktor target kinerja (Menggunakan 8 cell)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Performance

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	465.902 ^a	7	66.557	36.670	.000
Intercept	8683.053	1	8683.053	4783.998	.000
Complexity	420.132	1	420.132	231.475	.000
Scheme	.053	1	.053	.029	.864

Target	23.589	1	23.589	12.997	.000
Complexity * Scheme	1.354	1	1.354	.746	.389
Complexity * Target	1.033	1	1.033	.569	.452
Scheme * Target	12.083	1	12.083	6.657	.011
Complexity * Scheme *	.022	1	.022	.012	.913
Target					
Error	266.808	147	1.815		
Total	9489.000	155			
Corrected Total	732.710	154			

a. R Squared = .636 (Adjusted R Squared = .619)

Multiple Comparisons						
(I) Cell	(J) Cell	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-.690	.435	1.000	-2.07	.69
	3	-1.160	.435	.238	-2.54	.22
	4	-.773	.406	1.000	-2.07	.52
	5	3.318*	.406	.000	2.03	4.61
	6	2.957*	.435	.000	1.57	4.34
	7	1.781*	.435	.002	.40	3.17
	8	2.593*	.411	.000	1.29	3.90
2	1	.690	.435	1.000	-.69	2.07
	3	-.471	.462	1.000	-1.94	1.00
	4	-.083	.435	1.000	-1.47	1.30
	5	4.008*	.435	.000	2.62	5.39
	6	3.647*	.462	.000	2.18	5.12
	7	2.471*	.462	.000	1.00	3.94
	8	3.283*	.440	.000	1.88	4.68
3	1	1.160	.435	.238	-.22	2.54
	2	.471	.462	1.000	-1.00	1.94
	4	.388	.435	1.000	-1.00	1.77
	5	4.479*	.435	.000	3.09	5.86
	6	4.118*	.462	.000	2.65	5.59
	7	2.941*	.462	.000	1.47	4.41
	8	3.754*	.440	.000	2.35	5.15
4	1	.773	.406	1.000	-.52	2.07
	2	.083	.435	1.000	-1.30	1.47
	3	-.388	.435	1.000	-1.77	1.00
	5	4.091*	.406	.000	2.80	5.38
	6	3.730*	.435	.000	2.35	5.11
	7	2.553*	.435	.000	1.17	3.94
	8	3.366*	.411	.000	2.06	4.67
5	1	-3.318*	.406	.000	-4.61	-2.03
	2	-4.008*	.435	.000	-5.39	-2.62
	3	-4.479*	.435	.000	-5.86	-3.09
	4	-4.091*	.406	.000	-5.38	-2.80
	6	-.361	.435	1.000	-1.75	1.02
	7	-1.537*	.435	.015	-2.92	-.15
	8	-.725	.411	1.000	-2.03	.58
6	1	-2.957*	.435	.000	-4.34	-1.57
	2	-3.647*	.462	.000	-5.12	-2.18
	3	-4.118*	.462	.000	-5.59	-2.65
	4	-3.730*	.435	.000	-5.11	-2.35
	5	.361	.435	1.000	-1.02	1.75
	7	-1.176	.462	.334	-2.65	.29
	8	-.364	.440	1.000	-1.76	1.03
7	1	-1.781*	.435	.002	-3.17	-.40
	2	-2.471*	.462	.000	-3.94	-1.00
	3	-2.941*	.462	.000	-4.41	-1.47
	4	-2.553*	.435	.000	-3.94	-1.17
	5	1.537*	.435	.015	.15	2.92
	6	1.176	.462	.334	-.29	2.65
	8	.812	.440	1.000	-.59	2.21
8	1	-2.593*	.411	.000	-3.90	-1.29
	2	-3.283*	.440	.000	-4.68	-1.88
	3	-3.754*	.440	.000	-5.15	-2.35
	4	-3.366*	.411	.000	-4.67	-2.06
	5	.725	.411	1.000	-.58	2.03
	6	.364	.440	1.000	-1.03	1.76
	7	-.812	.440	1.000	-2.21	.59

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.



LAMPIRAN 2. EXPERIMENTAL TASK**(INSTRUMEN PENELITIAN)****KODE:**

C = Complex Task

LC = Less Complex Task

HT = Have Target Performance

NT = No Target Performance

FR = Flat-Rate Scheme

PR = Piece-Rate Scheme

INSTRUMEN PENELITIAN
KODE: LC-NT-FR

Kode responden: _____

Tranlasi untuk simbol menjadi huruf:

☆ = A	☉ = H	* = O	↶ = V
◁ = B	⊗ = I	↓ = P	↷ = W
▷ = C	⊙ = J	↶ = Q	↵ = X
▲ = D	⊖ = K	⇒ = R	↷ = Y
★ = E	← = L	↑ = S	↶ = Z
▽ = F	→ = M	↓ = T	
⊙ = G	↑ = N	* = U	

Translasikan simbol-simbol berikut:

1. ↑ ▷ ☉ ↷ ☆ ⇒ ↓ ↶ = _____
2. ▲ ★ ↶ ⊗ ↑ ⊖ ↷ ↓ = _____
3. ◁ * ⊙ ↷ ☉ → * ▽ = _____
4. ⊙ ⊗ ← ↶ * * ↵ ↑ = _____
5. ▽ ☆ ⊖ ★ ⇒ ↷ ↶ ⊗ = _____
6. ↓ ↑ ★ ↷ ↓ ☉ * → = _____
7. ↶ ⊗ ↶ * ↵ ▷ ☉ ↶ = _____
8. ↷ ↶ ⊖ ↷ ↓ → ⇒ = _____
9. ☆ ↶ ▲ ◁ ⊗ ▽ ☉ ↷ = _____
10. → ⊖ ▲ ↑ ← ▷ ↶ ↑ = _____

Instruksi:

1. Anda akan diberikan waktu selama 4 menit untuk mentranslasikan **SIMBOL-SIMBOL** dalam soal menjadi **HURUF**.
2. Anda akan diberikan insentif sebesar Rp. 10.000,- setelah waktu pengerjaan dinyatakan selesai.

INSTRUMEN PENELITIAN

KODE: LC-NT-PR

Kode responden: _____

Tranlasi untuk simbol menjadi huruf:

☆ = A	☉ = H	* = O	↖ = V
↙ = B	☼ = I	↓ = P	↗ = W
➤ = C	☽ = J	↔ = Q	↘ = X
▲ = D	☾ = K	⇨ = R	↻ = Y
★ = E	← = L	↑ = S	↺ = Z
▼ = F	→ = M	↓ = T	
☪ = G	↑ = N	* = U	

Translasikan simbol-simbol berikut:

1. ↑ ➤ ☉ ↗ ☆ ⇨ ↓ ↺ = _____
2. ▲ ★ ↖ ☼ ↑ ☾ ↻ ↓ = _____
3. ↙ * ☪ ↗ ☉ → * ▼ = _____
4. ☽ ☼ ← ↔ * * ↘ ↑ = _____

5. $\nabla \star \cup \star \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

6. $\downarrow \uparrow \star \rightarrow \downarrow \rightarrow \star \rightarrow$ = _____

7. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

8. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

9. $\star \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

10. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

Instruksi:

1. Anda akan diberikan waktu selama 4 menit untuk mentranslasikan **SIMBOL-SIMBOL** dalam soal menjadi **HURUF**.
2. Anda akan diberikan insentif sebesar Rp. 1.000,- untuk setiap soal yang berhasil anda translasikan dengan benar.

INSTRUMEN PENELITIAN

KODE: LC-HT-FR

Kode responden: _____

Tranlasi untuk simbol menjadi huruf:

☆ = A	☉ = H	* = O	↶ = V
↵ = B	⊗ = I	↓ = P	↷ = W
➤ = C	⦿ = J	↔ = Q	↧ = X
▲ = D	⦿ = K	⇨ = R	↶ = Y
★ = E	← = L	↑ = S	↷ = Z
▼ = F	→ = M	↓ = T	
⦿ = G	↑ = N	* = U	

Translasikan simbol-simbol berikut:

1. $\uparrow \triangleright \ominus \nwarrow \star \rightarrow \downarrow \swarrow$ = _____

2. $\blacktriangle \star \nwarrow \oplus \uparrow \ominus \searrow \downarrow$ = _____

3. $\leftarrow * \ominus \nwarrow \ominus \rightarrow * \blacktriangledown$ = _____

4. $\ominus \oplus \leftarrow \nwarrow * * \swarrow \uparrow$ = _____

5. $\nabla \star \cup \star \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

6. $\downarrow \uparrow \star \rightarrow \downarrow \rightarrow \star \rightarrow$ = _____

7. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

8. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

9. $\star \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

10. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

Instruksi:

1. Anda akan diberikan waktu selama 4 menit untuk mentranslasikan **SIMBOL-SIMBOL** dalam soal menjadi **HURUF**.
2. Anda akan diberikan insentif sebesar Rp. 12.000,- jika berhasil menjawab benar minimal 70% dari soal yang diberikan. Jika jumlah jawaban benar < 70%, maka insentif tidak diberikan.

INSTRUMEN PENELITIAN

KODE: LC-HT-PR

Kode responden: _____

Tranlasi untuk simbol menjadi huruf:

☆ = A	☉ = H	* = O	↖ = V
↙ = B	⊗ = I	↓ = P	↗ = W
➤ = C	⦿ = J	↔ = Q	↘ = X
▲ = D	⦿ = K	⇨ = R	↻ = Y
★ = E	← = L	↑ = S	↺ = Z
▼ = F	→ = M	↓ = T	
⦿ = G	↑ = N	* = U	

Translasikan simbol-simbol berikut:

1. ↑ ➤ ☉ ↗ ☆ ⇨ ↓ ↺ = _____

2. ▲ ★ ↖ ⊗ ↑ ⦿ ↻ ↓ = _____

3. ↙ * ⦿ ↗ ☉ → * ▼ = _____

4. ⦿ ⊗ ← ↖ * * ↘ ↑ = _____

5. $\nabla \star \cup \star \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

6. $\downarrow \uparrow \star \rightarrow \downarrow \rightarrow \star \rightarrow$ = _____

7. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

8. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

9. $\star \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

10. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ = _____

Instruksi:

1. Anda akan diberikan waktu selama 4 menit untuk mentranslasikan **SIMBOL-SIMBOL** dalam soal menjadi **HURUF**.
2. Anda akan diberikan insentif sebesar Rp. 1.200,- untuk setiap soal yang berhasil anda translasikan dengan benar dan jumlah jawaban benar minimal 70% dari soal yang disediakan. Jika jumlah jawaban benar < 70% maka insentif tidak diberikan.

INSTRUMEN PENELITIAN

KODE: C-NT-FR

Kode responden: _____

Tranlasi untuk simbol menjadi huruf dan angka:

☆ = 1 = A	☉ = 8 = H	* = 15 = O	☞ = 22 = V
◀ = 2 = B	⊗ = 9 = I	↓ = 16 = P	↗ = 23 = W
➤ = 3 = C	⦿ = 10 = J	↔ = 17 = Q	☒ = 24 = X
▲ = 4 = D	⓪ = 11 = K	⇨ = 18 = R	↘ = 25 = Y
★ = 5 = E	← = 12 = L	↑ = 19 = S	↖ = 26 = Z
▼ = 6 = F	→ = 13 = M	↓ = 20 = T	
⊙ = 7 = G	↑ = 14 = N	* = 21 = U	

Translasikan simbol-simbol berikut:

1. ➤☉↗☆⇨↓↖↑ = _____
2. ★☞⊗↑⓪↘↓▲ = _____
3. *⊙↗☉→*▼◀ = _____
4. ⊗←↔*☒↑⦿ = _____
5. ☆⓪★⇨↘↖⊗▼ = _____
6. ↑★↗↓☉*→↓ = _____
7. ⊗↔*☒➤☉↘☞ = _____

8. $\curvearrowright \cup \curvearrowright \downarrow \rightarrow \Rightarrow \curvearrowright$ = _____

9. $\Leftarrow \blacktriangleleft \blacktriangleleft \blacktriangledown \curvearrowright \curvearrowright \star$ = _____

10. $\cup \blacktriangleleft \uparrow \Leftarrow \blacktriangleright \Leftarrow \uparrow \rightarrow$ = _____

Instruksi:

1. Anda akan diberikan waktu selama 4 menit untuk mentranslasikan **SIMBOL-SIMBOL** dalam soal menjadi **ANGKA** dan **HURUF**.
2. Anda akan diberikan insentif sebesar Rp. 10.000,- setelah waktu pengerjaan dinyatakan selesai.

INSTRUMEN PENELITIAN

KODE: C-NT-PR

Kode responden: _____

Tranlasi untuk simbol menjadi huruf dan angka:

$\star = 1 = A$	$\blacktriangledown = 6 = F$	$\cup = 11 = K$	$\downarrow = 16 = P$
$\Leftarrow = 2 = B$	$\bullet = 7 = G$	$\Leftarrow = 12 = L$	$\Leftarrow = 17 = Q$
$\blacktriangleright = 3 = C$	$\curvearrowright = 8 = H$	$\rightarrow = 13 = M$	$\Rightarrow = 18 = R$
$\blacktriangleleft = 4 = D$	$\blacktriangleleft = 9 = I$	$\uparrow = 14 = N$	$\uparrow = 19 = S$
$\star = 5 = E$	$\blacktriangleleft = 10 = J$	$\star = 15 = O$	$\downarrow = 20 = T$

* = 21 = U

♠ = 23 = W

♣ = 25 = Y

♣ = 22 = V

♠ = 24 = X

♣ = 26 = Z

Translasikan simbol-simbol berikut:

1. ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

2. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

3. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

4. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

5. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

6. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

7. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

8. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

9. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____

10. ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ = _____



Instruksi:

1. Anda akan diberikan waktu selama 4 menit untuk mentranslasikan **SIMBOL-SIMBOL** dalam soal menjadi **ANGKA&HURUF**.
2. Anda akan diberikan insentif sebesar Rp. 1.000,- untuk setiap soal yang berhasil anda translasikan dengan benar.

INSTRUMEN PRETEST**KODE: C-HT-FR**

Kode responden: _____

Tranlasi untuk simbol menjadi huruf dan angka:

☆ = 1 = A	☉ = 8 = H	* = 15 = O	☞ = 22 = V
◀ = 2 = B	⊗ = 9 = I	↓ = 16 = P	↗ = 23 = W
➤ = 3 = C	⦿ = 10 = J	↔ = 17 = Q	☛ = 24 = X
▲ = 4 = D	⓪ = 11 = K	⇒ = 18 = R	↘ = 25 = Y
★ = 5 = E	← = 12 = L	↑ = 19 = S	↖ = 26 = Z
▼ = 6 = F	→ = 13 = M	↓ = 20 = T	
☉ = 7 = G	↑ = 14 = N	* = 21 = U	

Translasikan simbol-simbol berikut:

1. $\triangleright \ominus \curvearrowright \star \Rightarrow \downarrow \curvearrowright \uparrow$ = _____
2. $\star \curvearrowright \oplus \uparrow \cup \curvearrowright \downarrow \wedge$ = _____
3. $\star \ominus \curvearrowright \ominus \rightarrow \star \vee \triangleleft$ = _____
4. $\oplus \leftarrow \leftarrow \star \star \curvearrowright \uparrow \uparrow$ = _____
5. $\star \cup \star \Rightarrow \curvearrowright \curvearrowright \oplus \vee$ = _____
6. $\uparrow \star \curvearrowright \downarrow \ominus \star \rightarrow \downarrow$ = _____
7. $\oplus \leftarrow \star \curvearrowright \triangleright \ominus \curvearrowright \curvearrowright$ = _____
8. $\curvearrowright \cup \curvearrowright \downarrow \rightarrow \rightarrow \triangleright \curvearrowright$ = _____
9. $\leftarrow \wedge \triangleleft \oplus \vee \ominus \curvearrowright \star$ = _____
10. $\cup \wedge \uparrow \leftarrow \triangleright \leftarrow \uparrow \rightarrow$ = _____

Instruksi:

1. Anda akan diberikan waktu selama 4 menit untuk mentranslasikan **SIMBOL-SIMBOL** dalam soal menjadi **ANGKA&HURUF**.

2. Anda akan diberikan insentif sebesar Rp. 12.000,- jika berhasil menjawab benar minimal 70% dari soal yang diberikan. Jika jumlah jawaban benar $< 70\%$ maka insentif tidak diberikan.

INSTRUMEN PENELITIAN
KODE: C-HT-PR

Kode responden: _____

Tranlasi untuk simbol menjadi huruf dan angka:

☆ = 1 = A	☉ = 8 = H	* = 15 = O	↻ = 22 = V
◀ = 2 = B	⊗ = 9 = I	↓ = 16 = P	↷ = 23 = W
➤ = 3 = C	⊖ = 10 = J	↵ = 17 = Q	↶ = 24 = X
▲ = 4 = D	⊙ = 11 = K	⇒ = 18 = R	↷ = 25 = Y
★ = 5 = E	← = 12 = L	↑ = 19 = S	↶ = 26 = Z
▼ = 6 = F	→ = 13 = M	↓ = 20 = T	
⊙ = 7 = G	↑ = 14 = N	* = 21 = U	

Translasikan simbol-simbol berikut:

1. ➤☉↷☆⇒↓↶↑ = _____
2. ★↷⊗↑⊙↷↓▲ = _____
3. *⊙↷☉→*▼◀ = _____
4. ⊗←↵*★↶↑⊖ = _____
5. ☆⊙★⇒↷↶⊗▼ = _____
6. ↑★↷↓☉*→↓ = _____
7. ⊗↵*↶➤☉↷↷ = _____
8. ↷⊙↷↓→⇒➤↷ = _____
9. ↵▲◀⊗▼☉↷☆ = _____
10. ⊙▲↑←➤↵↑→ = _____

Instruksi:

1. Anda akan diberikan waktu selama 4 menit untuk mentranslasikan **SIMBOL-SIMBOL** dalam soal menjadi **ANGKA & HURUF**.
2. Anda akan diberikan insentif sebesar Rp. 1.200,- untuk setiap soal yang berhasil anda translasikan dengan benar dan jumlah jawaban benar minimal 70% dari soal yang disediakan. Jika jawaban benar < 70% maka



Pengaruh Moderasi Strategi Perusahaan terhadap Hubungan Antara Mekanisme Monitoring dan Kinerja Perusahaan

VISKA ANGGRAITA*
Universitas Indonesia

Abstract

This study examines whether there are differences in the effect of monitoring mechanism on corporate performance between the company with product differentiation and low cost strategy. Monitoring variables used in this study are the composition of the board of directors, managerial ownership and debt levels. The results showed that the board of commissioners and managerial ownership negatively affect the company's performance while the level of debt is positively related to company's performance. For the model with variable interaction between monitoring and strategy variables, there is no difference in the effect of board composition and level of debt on performance between companies with product differentiation and low cost strategies. There is differences in the negative influence of managerial ownership on the company's performance between firms with product differentiation with a low cost strategy, where in company with a product differentiation strategy the negative effect of managerial ownership on the performance is greater compare to companies with low cost strategy.

Keywords: strategy, corporate governance, manajerial ownerhip, leverage, performance

* Author can be contacted at: viskaviska257@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Corporate governance adalah seperangkat aturan yang saling berkaitan yang menjadi dasar bagi perusahaan, pemegang saham, dan manajemen mengelola perilaku mereka (DTI Economic Paper No.13, 2005). Isu *Corporate Governance* semakin mendominasi penelitian akademik dan perdebatan didunia bisnis terutama setelah terjadinya skandal terkait *corporate governance* perusahaan perusahaan besar di US seperti Enron dan Wordcom. Peningkatan masalah-masalah terkait skandal laporan keuangan serta etika ini disinyalir sebagai tanda kegagalan tata kelola dan sistem akuntabilitas dan pengendalian perusahaan-perusahaan terbuka. Sebagai akibatnya regulator diberbagai dunia, termasuk di Indonesia, bereaksi dengan meningkatkan standar dan aturan-aturan terkait *corporate governance*.

Penelitian-penelitian mengenai *corporate governance* pada umumnya dilakukan berdasarkan teori keagenan (*agency theory*). Premis utama dari teori keagenan adalah manajer sebagai agen pemegang saham (*principals*) dapat berlaku oportunistik untuk memaksimalkan utilitasnya yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip maksimisasi kesejahteraan pemegang saham. Untuk membatasi tindakan oportunistik manajer, pemilik perusahaan dapat menggunakan berbagai mekanisme *corporate governance* (internal dan eksternal) untuk memonitor manajemen. Perusahaan mengkombinasikan berbagai mekanisme *corporate governance* baik mekanisme *governance* internal dan eksternal untuk mengurangi *agency cost* dan menyamakan tujuan agen dan prinsipal (Rediker dan Seth, 1995). Selain menggunakan mekanisme *corporate governance*, perusahaan dapat menggunakan mekanisme kontrak hutang untuk membatasi perilaku oportunistik manajer dengan mengurangi kas yang tersedia untuk pengeluaran diskresioner manajer (Simerly dan Li, 2000).

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Penelitian mengenai mekanisme *corporate governance* banyak yang meneliti pengaruh efektifitas dewan komisaris seperti independensi,

kompetensi, aktifitas, dan jumlah dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai dampak komisaris independen terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif pada kinerja (Yermack, 1996; Daily dan Dalton, 1993), bukan faktor dari kinerja (Kesner dan Johnson, 1990), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Kosnik dan Turk, 1991; Goodstein dan Boeker, 1991). Begitu juga dengan penelitian mengenai peranan hutang sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer. Penelitian-penelitian tersebut ada yang menemukan hubungan positif antara tingkat hutang dan kinerja (Spence, 1985 dan Ghosh et al., 2000) namun ada pula yang menemukan hubungan yang negatif (Gleason et al., 2000).

Penelitian-penelitian tersebut meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* dan hutang terhadap kinerja secara langsung. Menurut teori kontijensi struktural diperlukan adanya kecocokan (*fit*) antara struktur dengan konteks agar organisasi dapat berjalan baik. Sesuai dengan teori ini maka mekanisme *corporate governance* dan penggunaan hutang sebagai struktur pengendalian perusahaan juga harus disesuaikan dengan konteks perusahaan. Menurut Hutchinson dan Gul (2004) dalam Gani dan Jermias (2006) pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja harus diinvestigasi bersama-sama dengan variabel kontekstual perusahaan.

Penelitian diluar negeri telah meneliti mengenai pengaruh *fit* antara *corporate governance* perusahaan dengan konteks strategi yang diadopsi perusahaan terhadap kinerja. Gani dan Jermias (2006) menemukan bahwa pengaruh positif dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan lebih besar pada perusahaan dengan strategi *costleadership* dibandingkan *product differentiation*. Jermias(2008) menemukan pengaruh antara tingkat hutang dengan kinerja tergantung dari strategi yang diadopsi unit bisnis. Hal ini menarik untuk diteliti

apakah fit antara kombinasi mekanisme monitoring (*corporate governance* dan hutang) dan strategi yang diadopsi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh dari strategi perusahaan terhadap hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan penggunaan hutang dengan kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada karakteristik dewan komisaris dan kepemilikan manajerial. Karakteristik dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan komisaris independen mengenai bisnis perusahaan, independensi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ *corporate governance* perusahaan yang salah satu tugasnya adalah memonitor dan memberi nasehat kepada direktur eksekutif yang menjalankan operasional sehari-hari perusahaan sehingga peranan dewan komisaris sangat penting dan mempengaruhi perilaku direktur eksekutif dalam menjalankan operasi perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* dan hutang terhadap kinerja dengan mempertimbangkan adanya perbedaan pengaruh antar perusahaan dengan strategi yang berbeda. Penelitian ini menguji apakah fit antara kombinasi mekanisme monitoring (*corporate governance* dan hutang) dan strategi yang diadopsi perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Perbedaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penelitian terhadap literatur yang telah ada mengenai hubungan antara *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dan memiliki implikasi kebijakan bagi praktisi. Dimana dalam meneliti hubungan antara mekanisme monitoring dan kinerja perusahaan perlu mempertimbangkan strategi yang diadopsi perusahaan. Bagi praktisi (perusahaan) perlu menyesuaikan mekanisme monitoring yang digunakan dalam perusahaan dengan strategi yang diadopsi perusahaan untuk memperoleh kinerja yang optimal.

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, dan ruang lingkupnya. Sedangkan bagian kedua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis yang akan membahas mengenai teori struktur CG internal yang berkaitan dengan dewan komisaris, diantaranya pengetahuan komisaris mengenai bisnis perusahaan, komisaris independen dan ukuran dewan komisari. Dibagian ini juga dibahas mengenai teori hutang selaku mekanisme monitoring. Pada bagian ketiga akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang berkaitan dengan pemilihan sampel, model empiris yang digunakan, operasionalisasi variabel, dan pengujian modelnya. Sedangkan bagian empat akan membahas mengenai hasil penelitian ini. Akhirnya dibagian lima akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan potensi bagi riset dimasa mendatang.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan Mekanisme Monitoring

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan antara manajemen dan pemilik dijelaskan dalam kerangka hubungan keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan merupakan kontrak, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (prinsipal) meminta orang lain (agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal, termasuk didalamnya pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen. Dalam konteks perusahaan, prinsipal adalah pemilik perusahaan dan manajer adalah agen. Adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen), kontrak yang tidak lengkap serta adanya asimetri informasi antara manajer (prinsipal) dan pemilik perusahaan (agen) dapat menyebabkan masalah keagenan (*agency problem*) dimana manajer berperilaku oportunistik untuk memaksimalkan utilitasnya dengan mengorbankan kesejahteraan pemilik perusahaan.

Untuk mengatasi membatasi perilaku oportunistik manajer, perusahaan dapat menggunakan kombinasi berbagai mekanisme *corporate governance* antara lain: 1) mekanisme internal *corporate governance* seperti dewan komisaris (Fama dan Jensen, 1983), 2) monitoring pemegang saham mayoritas (Demsetz dan Lehn, 1985), 3) berbagai insentif manajerial dalam bentuk kompensasi berbasis ekuitas insentif untuk menyamakan tujuan manajer dan pemilik perusahaan (Jensen dan Murphy, 1990); dan 4) Faktor eksternal seperti ancaman pengambil alihan (Grossman dan Hart, 1988) dan tingkat persaingan produk (Jensen, 1983) dan pasar tenaga kerja (Fama, 1980). Rediker dan Seth (1995) menyatakan bahwa kombinasi mekanisme internal dan eksternal *corporate governance* dapat mengurangi biaya keagenan dan menyamakan tujuan prinsipal dan agen. Selain menggunakan mekanisme *corporate governance*, perusahaan dapat menggunakan mekanisme kontrak hutang untuk membatasi perilaku oportunistik manajer dengan mengurangi kas yang tersedia untuk pengeluaran diskresioner manajer (Simerly dan Li, 2000).

Strategi perusahaan, dewan komisaris, dan kinerja perusahaan

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme CG yang salah satu tugasnya memonitor dan memberi nasehat direktur dalam menjalankan tugasnya serta memastikan bahwa direktur telah menerapkan *good corporate governance*. Menurut Mirzruchi (1983) dalam Wardhani (2007), dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang (Louden 1982). Penelitian terdahulu pada umumnya meneliti mengenai karakteristik dewan komisaris seperti tingkat independensi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

Komisaris independen secara umum dipercaya lebih efektif dalam melakukan pengendalian manajemen. Dalam kerangka kerja teori keagenan, direktur independen memiliki insentif untuk tidak melakukan kolusi dengan manajer karena nilai *human capital*

dari direktur independen sebagian ditentukan oleh kinerja *monitoring* mereka (Fama, 1980 dan Fama dan Jensen, 1983 dalam Ahmed, 2007). Sehingga dengan adanya komisaris independen akan mendorong manajer untuk menjalankan perusahaan dengan efisien.

Dari sudut pandang *resource dependence* jumlah komisaris yang besar akan menguntungkan perusahaan (Wardhani, 2007). Chaganti *et al.* (1985) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar berharga karena luasnya pengetahuan yang dimiliki dan jasa yang dapat mereka sediakan. Jensen (1993) menyatakan bahwa kapasitas dewan komisaris untuk melakukan *monitoring* meningkat seiring dengan besarnya dewan komisaris. Namun demikian ukuran dewan komisaris yang terlalu besar akan menyebabkan menurunnya kinerja *monitoring* dewan komisaris karena penurunan kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi dan *monitoring* (Jensen dan Yermack 1996)

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak komisaris independen dan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Yermack (1996) dan Agrawal and Knoeber (1996) menemukan pengaruh negatif dari direktur independen terhadap kinerja namun demikian hasilnya tidak konsisten antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Sedangkan Rosenstein and Wyatt (1990) menemukan pasar bereaksi positif terhadap peningkatan jumlah komisaris independen. Penelitian mengenai pengaruh dari ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan juga menemukan hasil yang berbeda-beda. Yermack (1996) dan Eisenberg *et al.* (1998) menemukan hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dan nilai perusahaan, dengan mengontrol ukuran perusahaan. Sedangkan Adam dan Mehran (2002) menemukan perusahaan pada perbankan dengan jumlah dewan yang besar memiliki kinerja yang lebih baik.

Kebanyakan penelitian-penelitian ini meneliti pengaruh langsung dewan komisaris terhadap kinerja tanpa mempertimbangkan strategi yang diadopsi perusahaan sehingga

hasilnya tidak konsisten. Menurut teori kontinjensi struktur dan proses dari suatu organisasi haruslah sesuai dengan keadaan yang dihadapinya seperti lingkungan, budaya perusahaan, teknologi, ukuran atau tugas agar perusahaan tersebut dapat bertahan atau efektif. Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme corporate governance internal perusahaan, maka berdasarkan teori kontinjensi pengaruh dewan komisaris tergantung pada apakah karakteristik dewan komisaris fit dengan strategi perusahaan. Porter (1985) menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki strategi yang jelas agar dapat bersaing dengan efektif dan memperoleh keunggulan bersaing jangka panjang. Dengan kata lain strategi yang diterapkan perusahaan menentukan kinerja perusahaan sekarang dan akan datang. Porter mengidentifikasi dua strategi dimana unit bisnis bisa mendapatkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan yaitu strategi biaya rendah (*low-cost*) dan strategi pembedaan produk (*product differentiation*). Menurut Porter (1985) strategi *low cost* menekankan pada kebutuhan untuk menciptakan biaya rendah sedangkan strategi *product differentiation* menekankan pada pemberian kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan salah satu atau lebih atribut dalam produknya yang dianggap penting bagi pelanggan sehingga produk tersebut memiliki posisi yang unik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan teori kontinjensi komposisi dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yaitu banyaknya komisaris independen dan pengetahuan dewan komisaris mengenai bisnis perusahaan serta ukuran dewan komisaris dalam bentuk saham tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris

Komisaris Independen

Pertanyaan yang penting mengenai komposisi dewan komisaris adalah mengenai persentase komisaris independen yang ideal. Komisaris independen lebih independen, tetapi umumnya memiliki pengetahuan yang kurang mengenai bisnis dan proyek perusahaan

dibandingkan komisaris internal perusahaan. Komisaris dari internal perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai bisnis dan proyek perusahaan berpotensi untuk memiliki insentif yang kurang baik karena kurang independen. Pada perusahaan dengan strategi *low cost outside director* akan berpengaruh positif terhadap kinerja karena aktivitas manajer-monitoring akan lebih efektif (Jensen, 1993). Pada perusahaan dengan strategi produk diferensiasi *outside director* (direktur independen) dapat menghambat peningkatan kinerja perusahaan karena dapat menghambat inovasi manajer disebabkan karena keterbatasan pengetahuan mengenai bisnis perusahaan (Gani dan Jermias, 2006). Gani dan Jermias (2006) menemukan pengaruh komisaris independen lebih positif pada perusahaan dengan strategi *low cost* dibandingkan perusahaan dengan strategi inovasi.

Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H1a: Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja akan lebih positif pada perusahaan dengan strategi *low cost* dibandingkan strategi *product differentiation*

Dewan komisaris independen dengan pengetahuan mengenai bisnis perusahaan

Zahra dan Hayton (1992) meneliti isue perbedaan komposisi dewan direksi pada tiap tahapan siklus hidup perusahaan dan bagaimana komposisi dewan komisaris mempengaruhi kinerja inovasi dan kinerja keuangan pada perusahaan dengan teknologi tinggi. Mereka menemukan perwakilan *outside director* meningkat dengan semakin *maturnya* perusahaan dan semakin bervariasi dari sisi latar belakang pendidikan dan fungsional daripada perusahaan yang baru berdiri. Perusahaan dengan strategi *product differentiation* menekankan pada kepuasan pelanggan dengan menawarkan produk-produk dan layanan berkualitas tinggi, fitur desain khusus, pengiriman cepat dan handal, dan pelayanan pasca-penjualan yang efektif (Lynn, 1994). Dengan fokus utama pada keunikan dan eksklusifitas, perusahaan dengan strategi *product differentiation* cenderung untuk melakukan banyak inovasi produk (Porter, 1980) dibandingkan perusahaan dengan strategi *low cost* sehingga

kebutuhan akan dewan komisaris yang memiliki pengetahuan mengenai bisnis perusahaan akan lebih besar untuk membantu direktur dalam mengambil keputusan yang terspesialisasi (Fama dan Jensen, 1983). Sehingga hipotesis yang dibentuk adalah:

H1b: Pengaruh pengetahuan dewan komisaris independen atas bisnis perusahaan terhadap kinerja akan lebih positif pada perusahaan dengan strategi *product differentiation* dibandingkan strategi *low cost*

Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris dengan ukuran yang lebih kecil memiliki keuntungan karena biaya koordinasi yang lebih rendah dan jumlah *free riding* yang lebih sedikit, tetapi kerugiannya adalah lebih sedikit sumber daya yang ada untuk memonitor dan memberi nasehat kepada manajemen. Perusahaan dengan strategi *product differentiation* perlu melakukan banyak inovasi agar dapat bersaing dengan kompetitor. Perusahaan dengan strategi diferensiasi membutuhkan dewan komisaris dengan ukuran yang lebih besar karena kebutuhan informasi spesifik yang lebih besar.

Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H1c: Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja akan lebih positif pada perusahaan dengan strategi *product differentiation* dibandingkan strategi *low cost*

Strategi Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Perusahaan

Kepemilikan manajerial akan mengurangi tindakan oportunistik manajer karena meyakinkan kepentingan manajer dengan pemilik perusahaan. Semakin banyak ekuitas yang dimiliki manajer, insentif mereka untuk bekerja keras karena mereka akan memperoleh porsi yang lebih besar dari kesuksesan perusahaan. (Warfield et al., 1995). Kepemilikan manajerial juga akan mengurangi mencegah manajer untuk melakukan *shirking* (Cheng et al., 2003; Chow et al., 1997).

Perusahaan dengan strategi *product differentiation* cenderung untuk melakukan investasi yang besar pada aktivitas R&D dan *intangible assets* untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mempertahankan kemampuan mereka untuk bersaing (Porter, 1980). Dengan fokus utama pada keunikan dan eksklusivitas, perusahaan dengan strategi diferensiasi produk cenderung untuk melakukan banyak inovasi produk (Porter, 1980) dibandingkan perusahaan dengan strategi *low cost* dan karena itu perlu berinvestasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Miller (1987) berpendapat bahwa investasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk baru yang lebih baik dan membantu untuk mengikuti inovasi dari pesaing dan perubahan lingkungan. Biggadike (1979) berpendapat bahwa perusahaan dengan penekanan kuat pada produk-produk baru akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi, karena mereka terlibat dalam kegiatan berisiko dan bertaruh pada produk yang keberhasilannya belum terbukti.

Pada perusahaan dengan strategi diferensiasi maka akan cenderung menggunakan kepemilikan manajerial untuk memberikan insentif bagi manajer untuk menyamakan tujuannya dengan tujuan perusahaan karena hasil dari R&D dan *intangible asset* sulit untuk diamati dan umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu yang panjang

Sehingga hipotesis yang diajukan:

H2: Perusahaan dengan strategi diferensiasi produk, penggunaan kepemilikan manajerial, akan berpengaruh lebih besar terhadap kinerja dibandingkan perusahaan dengan strategi *cost leadership*

Strategi, tingkat hutang, dan kinerja perusahaan

Menurut *agency theory* kontrak hutang adalah salah cara untuk mekanisme kontrol untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer (Jensen, 1989). Hutang mengikat manajer untuk membayarkan sejumlah arus kas dimasa yang akan datang. Hutang juga berfungsi sebagai

mekanisme alternatif monitoring untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer dengan mengurangi arus kas yang tersedia untuk pengeluaran yang sifatnya diskresioner. Beberapa penelitian empiris membuktikan hubungan positif antara tingkat hutang dengan kinerja perusahaan (Spence, 1985 dan Ghosh et al., 2000). Namun ada juga penelitian yang menemukan hubungan negatif antara tingkat hutang dan kinerja perusahaan (Barton dan Gordon, 1988). Ketidakkonsistenan hasil mungkin disebabkan karena penelitian terdahulu dalam meneliti hubungan ini tidak mempertimbangkan strategi.

Pada perusahaan dengan strategi diferensiasi hutang yang terlalu tinggi akan menghambat kreativitas dan inovasi yang merupakan aspek penting untuk mempertahankan keunggulan bersaing perusahaan (Simerly dan Li, 2000). Sedangkan pada perusahaan dengan strategi *low cost* yang menekankan pada kebutuhan untuk menciptakan biaya terendah dalam industri dengan berbagai cara (Porter, 1980) akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari penggunaan hutang karena akan mengurangi perilaku oportunistik manajer dalam bentuk inefisiensi penggunaan sumber daya (Jensen, 1986). Jermias (2008) dengan menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat menemukan biaya hutang pada perusahaan dengan *product differentiation* lebih besar dibandingkan bagi perusahaan dengan strategi *cost leadership*.

Sehingga hipotesis yang diajukan:

H3: Pada perusahaan dengan strategi *low cost*, semakin besar tingkat hutang akan berhubungan dengan kinerja yang lebih baik

METODE PENELITIAN

Data dan Pemilihan sampel

Sampel penelitian ini adalah perusahaan publik yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode pengamatan 1 tahun

yaitu tahun 2009. Industri manufaktur dipilih dalam penelitian ini karena perusahaan-perusahaan dalam industri manufaktur memiliki strategi yang berbeda-beda untuk dapat bersaing dan menghadapi persaingan yang ketat (Gani dan Jermias, 2006). Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Data sampel perusahaan yang diambil harus lengkap untuk semua variabel yang digunakan antara lain informasi mengenai dewan komisaris perusahaan, informasi keuangan yang meliputi laporan posisi laporan keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, data nilai kapitalisasi pasar, harga saham dan informasi lain yang dibutuhkan untuk pengolahan data dalam model penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh final sampel sebanyak 72 perusahaan.

Model dan Operasionalisasi Variabel

Model yang digunakan untuk menguji hipotesa 1-3 adalah sebagai berikut:

$$\text{PERFORM}_{it} = a_0 + a_1 \text{STRA}_{it} + a_2 \text{INDBOC}_{it} + a_3 \text{COMBOC}_{it} + a_4 \text{BOCSIZE}_{it} + a_5 \text{MOWN}_{it} + a_6 \text{LEV}_{it} + a_7 \text{STRA}_{it} * \text{INDBOC}_{it} + a_8 \text{STRA}_{it} * \text{COMBOC}_{it} + a_9 \text{STRA}_{it} * \text{BOCSIZE}_{it} + a_{10} \text{STRA}_{it} * \text{MOWN}_{it} + a_{11} \text{STRA}_{it} * \text{LEV}_{it} + a_{12} \text{FAMOWN}_{it} + a_{13} \text{SIZE}_{it} + e$$

Dimana:

PERFORM_{it} = kinerja perusahaan i pada tahun t diukur dengan ROI

STRA_{it} = Strategi perusahaan, diberi nilai 1 untuk perusahaan dengan kecenderungan strategi *product differentiation*, dan 0 untuk *low cost*

LEV_{it} = tingkat hutang perusahaan i pada tahun t diukur dengan total hutang dibagi total aset

INDBOC_{it} = persentase komisaris independen perusahaan i pada tahun t

COMBOC_{it} = Kompetensi anggota BOC diukur dengan persentase komisaris independen yang memiliki pengetahuan memadai mengenai perusahaan

FAMOWN_{it} = persentase kepemilikan keluarga di perusahaan *i* pada tahun *t*

SIZE_{it} = Ukuran perusahaan *i* pada tahun *t* diukur dengan menggunakan ln total aset

Pengujian hipotesis dilakukan dengan memasukan interaksi antara variabel strategi (STRA) dengan variabel mekanisme monitoring yaitu: 1) persentase komisaris independen (INDBOC), jumlah dewan komisaris independen yang memiliki pengetahuan mengenai bisnis perusahaan (COMBOC), ukuran dewan komisaris (BOCSIZE), kepemilikan manajerial (MOWN) dan tingkat hutang (LEV). Ekspektasi hasil dari masing masing hipotesis adalah: H1a diterima jika koefisien α_7 negatif; H1b diterima jika koefisien α_8 positif; H1c diterima jika koefisien α_9 positif; ; H2 diterima jika koefisien α_{10} positif; dan H3 diterima jika koefisien α_{11} negatif.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Kinerja Perusahaan (PERFORM)

Ada berbagai pengukuran kinerja yang digunakan dalam berbagai literatur. Keunggulan dari pengukuran kinerja pasar adalah pengukuran ini lebih objektif karena bebas dari manipulasi manajer dan juga menangkap investasi perusahaan dalam R&D dan aset tak berwujud. Namun demikian kinerja pasar kurang efisien karena terlalu *noisy*. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan kinerja akuntansi yaitu dengan menggunakan ROI (*Return on Investment*).

Strategi Perusahaan (STRA)

Strategi bersaing perusahaan dalam penelitian ini mengikuti pembagian strategi Porter (1985) yaitu strategi *product differentiation* dan *low cost*. Mengikuti penelitian Jermias dan Gani (2006) klasifikasi perusahaan dengan kecenderungan strategi *product differentiation* dan *low cost* berdasarkan indikator berikut: 1) *Marketing Intensity Ratio* (yaitu rasio beban marketing terhadap total penjualan); 2) *Asset Utilization Efficiency* (yaitu rasio total

penjualan terhadap total aktiva); dan 3) *Premium Price Capability* (yaitu rasio *gross margin* terhadap total penjualan).

Pada Gani dan Jermias (2006) digunakan *Research and Development Intensity Ratio*, namun karena banyak perusahaan di Indonesia tidak memiliki dan mengungkapkan biaya R&D maka digunakan *Marketing Intensity Ratio*. Perusahaan dengan kecenderungan strategi akan lebih gencar melakukan promosi untuk menanamkan keunikan produk mereka ke benak pelanggan dibandingkan perusahaan dengan kecenderungan strategi *low cost*. *Asset utilization efficiency* menunjukkan secara stratejik seberapa penting efisiensi operasional bagi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan strategi *low cost* akan memiliki aset *utilization efficiency* yang lebih tinggi karena mereka cenderung beroperasi pada lingkungan yang stabil, menghasilkan produk yang standar, dan menggunakan SOP yang standar sehingga perusahaan –perusahaan ini cenderung menikmati stabilitas yang tinggi dan rasio *asset utilization efficiency* yang tinggi (Gani dan Jermias, 2006). *Premium Price Capability* menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengenakan harga premium. Perusahaan dengan kecenderungan strategi *product differentiation* cenderung produk dan jasa yang unik sehingga memungkinkan mereka untuk mengenakan harga tersebut kepada konsumen.

Perusahaan sampel diperingkat (untuk *asset utilization ratio* peringkatnya dibalik) kemudian dirata-ratakan. Perusahaan yang rata-rata peringkatnya berada diatas median akan diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kecenderungan strategi *product differentiation* dan perusahaan dengan peringkat dibawah median akan diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kecenderungan kepada strategi *low cost*.

Pengetahuan Komisaris Independen mengenai bisnis perusahaan (COMBOC)

Persentase komisaris independen yang memiliki pengetahuan mengenai bisnis perusahaan. Komisaris independen dikatakan memiliki pengetahuan jika sebelumnya pernah

memiliki pengalaman di bisnis perusahaan atau menjadi direktur diperusahaan lain dalam industri yang sama dimana perusahaan berada.

Komisaris Independen (INDBOC)

Diukur dengan menggunakan persentase komisaris independen dengan total jumlah dewan komisaris.

Ukuran Dewan Komisaris (INDBOC)

Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan berapa jumlah dewan komisaris pada akhir tahun brjakan

Variabel kontrol

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (SIZE) dan kepemilikan keluarga (FAM). Ukuran perusahaan (SIZE) dimasukan sebagai variabel kontrol karena literatur terdahulu menemukan bahwa ukuran perusahaan mungkin mempengaruhi struktur, kemampuan mengambil keputusan, dan akhirnya kinerja (Bluedorn 1993 dalam Simerly dan Li 2000). Kepemilikan keluarga terbukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Morck et al. (1998) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilika keluarga dan kinerja perusahaan. Sedangkan menurut *incentive alignment hypothesis* kepemilikan keluarga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif variabel yang digunakan dalam model. Rata-rata persentase komisaris independen perusahaan sampel 38.6% dimana sekitar 40.78% dari komisaris independen memiliki pengetahuan mengenai bisnis perusahaan. Ukuran rata-rata dewan komisaris perusahaan sampel adalah 4. Kepemilikan direktur (manajerial) secara rata-rata kecil yaitu 0.84%. Rata-rata kepemilikan keluarga perusahaan sampel cukup tinggi

yaitu 32.5%. 48.6% perusahaan sampel cenderung menerapkan strategi *product differentiation*. Rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat hutang yang cukup tinggi yaitu diatas 50%.

Tabel 1

Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan independen yang digunakan dalam model

	LEV	COMBOC	BOCSIZE	INDBOC	MOWN	STRA	SIZE	ROI	FAMOWN
Mean	0.512083	0.407870	4.152778	0.386273	0.00846	0.48611	13.79622	0.073210	0.325887671
Median	0.515000	0.333333	3.000000	0.333333	0.00000	0.00000	13.71996	0.051850	0.348500
Maximum	0.970000	1.000000	11.00000	0.750000	0.14730	1.00000	18.30345	0.445300	0.9818
Minimum	0.010000	0.000000	2.000000	0.000000	0.00000	0.00000	10.18750	-0.1743	0.000000
Std. Dev.	0.214607	0.436607	1.925805	0.122698	0.02699	0.50331	1.640822	0.107105	7.396144
Observations	72	72	72	72	72	72	72	72	72

Hasil uji korelasi dapat dilihat pada lampiran 1. Berdasarkan uji korelasi ukuran dewan Komisaris (BOCSIZE) berhubungan positif dengan SIZE yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan memiliki ukuran dewan komisaris yang semakin besar. Kinerja (ROI) berhubungan positif dengan ukuran perusahaan (SIZE), tingkat hutang, dan Strategi (STRA). Ini berarti perusahaan besar, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi dan perusahaan dengan strategi *product differentiation* memiliki kinerja yang lebih tinggi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian langsung pengaruh variabel monitoring tanpa dimoderasi strategi dapat dilihat pada tabel 2. Ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan kinerja perusahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil temuan Pudjiastuti and Mardiyah (2006) yang menemukan hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE dan Tobin's-q. Hal ini mengindikasikan ukuran dewan komisaris yang terlalu besar akan mengurangi efektifitas monitoring kemungkinan disebabkan karena kesulitan koordinasi.

Kepemilikan manajerial tidak sesuai ekspektasi, berhubungan negatif dengan kinerja perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan karena: 1) rata-rata kepemilikan manajerial perusahaan sampel rendah sehingga tidak cukup memberikan insentif bagi direktur untuk menyamakan tujuan direktur dengan tujuan perusahaan dan 2) Kebanyakan perusahaan yang direkturnya memiliki kepemilikan diperusahaan adalah perusahaan keluarga (70% perusahaan sampel yang direkturnya memiliki saham diperusahaan adalah perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih dari 30%). Hal ini justru berpengaruh negatif bagi perusahaan karena ketika perusahaan dikelola oleh direktur yang ada hubungan dengan pemegang saham keluarga pengendali ada resiko direktur menggunakan pendekatan manajerial yang tidak profesional untuk melindungi kepentingan keluarga (Claessens et al. 2000) sehingga berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 2

Hasil Regresi Variabel Monitoring dan Strategi terhadap Kinerja Perusahaan

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Prob (1-tail)</i>
C	-0.280977	0.0369
COMBOC	-0.013815	0.32055
BOCSIZE	-0.016590	0.03065**
INDBOC	-0.083169	0.2257
MOWN	-0.534368	0.0875***
LEV	-0.145492	0.0105**
STRA	0.073652	0.0052*
FAMOWN	-0.000188	0.26955
SIZE	0.036553	0.0003*
<i>R-squared</i>	0.349638	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.267052	
<i>F-statistic</i>	4.233642	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000415	

Tingkat hutang berhubungan negatif dengan kinerja yang berarti perusahaan dengan tingkat hutang yang lebih tinggi memiliki kinerja yang lebih rendah. Temuan ini konsisten dengan temuan Gleason et al., 2000 dan Balakrishnan dan Fox, 1993 yang menemukan

hubungan negatif antara tingkat hutang dan kinerja perusahaan. Hubungan negatif ini mungkin disebabkan karena: 1) tingkat hutang yang tinggi menyebabkan manajer tidak berani mengambil proyek yang beresiko walaupun menguntungkan (Jermias 2008) dan 2) tingkat hutang yang tinggi membatasi fleksibilitas manajer untuk mengambil peluang yang ada ataupun menghadapi lingkungan bisnis dengan ketidakpastian yang tinggi (Simerly dan Li 2000).

Tabel 3 menunjukkan hasil regresi interaksi variabel-variabel monitoring dengan strategi terhadap kinerja perusahaan. Untuk komposisi dewan komisaris tidak ada koefisien interaksi dengan strategi yang signifikan. Hal ini mungkin disebabkan karena: 1) dewan komisaris pada perusahaan-perusahaan di Indonesia hanyalah untuk formalitas saja untuk memenuhi peraturan sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ; atau 2) peran dewan komisaris hanya sampai pada peran monitoring direktur tidak sampai pada fungsi memberikan nasehat kepada direktur dalam aktivitas operasional sehari-hari sehingga tidak ada perbedaan pengaruh ukuran dewan komisari dan tingkat pengetahuan dewan komisaris pada perusahaan dengan kecenderungan strategi *product differentiation* dan *low cost*.

Tabel 3
Hasil Regresi Variabel Monitoring terhadap Kinerja Perusahaan dengan Moderasi strategi

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Prob-1 tail</i>
C	-0.308946	0.0173
COMBOC	0.016823	0.2512
BOCSIZE	-0.017748	0.0345*
INDBOC	-0.209048	0.0092*
MOWN	0.608103	0.1515
LEV	-0.240114	0.0036*
STRA	-0.014340	0.4587
FAMOWN	5.42E-05	0.4285
SIZE	0.044547	0.000*
STRINDBOC	0.168784	0.224
STRCOMBOC	-0.047800	0.194
STRAMOWN	-1.398675	0.036*
STRALEV	0.177403	0.102***
STRBOCSIZE	-0.027701	0.358

<i>R-squared</i>	0.404255
<i>Adjusted R-squared</i>	0.270726
<i>F-statistic</i>	3.027469
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.001883

Interaksi kepemilikan manajerial dengan strategi negatif signifikan. Ini berarti pada perusahaan dengan kecenderungan strategi *product differentiation* pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap kinerja lebih besar dibandingkan pada perusahaan dengan strategi *low cost*. Seperti dijelaskan sebelumnya sebagian besar perusahaan sampel dengan kepemilikan manajerial adalah perusahaan keluarga tinggi dimana kemungkinan besar yang menjadi direktur perusahaan dan menjadi manajer perusahaan adalah relasi dari keluarga dengan kepemilikan yang signifikan. Akibatnya direktur akan cenderung melakukan manajerial yang sifatnya kurang profesional karena akan cenderung mementingkan kepentingan keluarga. Pada perusahaan dengan kecenderungan strategi *product differentiation* pengaruh negatifnya akan lebih besar dibandingkan perusahaan dengan strategi *low cost* karena perusahaan dengan strategi *product differentiation* harus banyak melakukan inovasi dan berada pada lingkungan dengan ketidakpastian yang tinggi. Perusahaan ini memerlukan manajer yang profesional, adanya direktur yang memiliki relasi dengan pemilik keluarga mayoritas (pendiri perusahaan) yang mana pemikirannya sudah terpetakan dengan *cumulative knowledge* dari pendiri perusahaan dapat menjadi penghambat strategi yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi perubahan dan persaingan (Daily dan Dalton, 1992).

Interaksi strategi dengan *leverage* tidak signifikan ini berarti tidak ada perbedaan pengaruh tingkat hutang terhadap kinerja antara perusahaan dengan strategi *product differentiation* dan strategi *low cost*. Hal ini mungkin disebabkan karena dalam penelitian ini tidak dimasukkan variabel dinamisme lingkungan bisa saja pada perusahaan dengan strategi differensiasi produk tapi tidak menghadapi lingkungan dengan dinamisme yang

terlalu tinggi sehingga penggunaan hutang tidak terlalu membatasi fleksibilitas perusahaan dengan strategi ini selama tingkat hutang yang digunakan adalah tingkat yang optimal.

Untuk menguji model interaksi telah dilakukan pengujian satu persatu untuk interaksinya (hasil tidak ditampilkan) dan hasilnya konsisten dengan pengujian sekaligus (yang ditampilkan pada tabel 3) hanya moderasi strategi dengan kepemilikan manajerial dan strategi dengan tingkat hutang yang signifikan. Variabel interaksi lainnya tidak signifikan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah terdapat perbedaan pengaruh mekanisme monitoring terhadap kinerja perusahaan antara perusahaan dengan strategi *product differentiation* dan *low cost*. Variabel monitoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan tingkat hutang. Hasil penelitian menunjukkan secara langsung ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja sedangkan tingkat hutang berhubungan positif dengan kinerja. Untuk model dengan interaksi variabel monitoring dan strategi, tidak terdapat pengaruh komposisi dewan komisaris dan tingkat hutang terhadap kinerja antara perusahaan dengan strategi *product differentiation* dan strategi *low cost*. Pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap kinerja pengaruhnya berbeda antara perusahaan dengan strategi *product differentiation* dengan strategi *low cost*, dimana pada perusahaan dengan strategi *product differentiation* pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan lebih besar. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya kemungkinan bahwa dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya hanya sampai pada sejauh mekanisme monitoring namun tidak sampai pada memberikan nasehat pada direktur dalam menjalankan strategi dan operasional

perusahaan. Perlunya bagi perusahaan untuk memberdayakan peran dewan komisaris lebih jauh lagi.

Keterbatasan penelitian dan saran penelitian potensial dimasa yang akan datang

1. Dalam menentukan kompetensi dewan direksi ada kemungkinan hasilnya kurang akurat terutama bila dalam laporan keuangan latar belakang dewan komisaris tidak diungkapkan dengan lengkap. Penelitian ini hanya memasukan kompetensi dari komisaris independen dengan asumsi komisaris yang tidak independen memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bisnis perusahaan. Dalam penelitian selanjutnya mungkin bisa juga memasukan pertimbangan apakah komisaris dependen memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bisnis perusahaan.

2. Penelitian hanya menggunakan pengukuran kinerja akuntansi yang bisa saja mengandung bias dari manajemen dan tidak mencakup pengaruh terhadap kinerja dari investasi R&D yang pengaruhnya baru akan kelihatan dalam jangka panjang. Penelitian yang akan datang bisa menggunakan pengukuran akuntansi jangka panjang dan pengukuran kinerja pasar.

3. Penelitian ini tidak memperhitungkan adanya kemungkinan pengaruh dari hutang terhadap kinerja perusahaan terhadap kinerja tidak linear tetapi parabola dimana ada tingkat optimal penggunaan hutang yang pengaruhnya positif terhadap kinerja. Selain itu penelitian ini juga tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan dinamisme pasar (tingkat persaingan pasar) dapat menjadi substitusi monitoring dari hutang. Penelitian selanjutnya dapat memasukan unsur tingkat persaingan pasar selaku alternatif mekanisme monitoring.

4. Dalam penelitian ini strategi diestimasi pada level perusahaan dan menggunakan rasio yang diduga menjadi karakteristik perusahaan dengan strategi product differentiation dan low cost bisa saja terdapat bias dalam pengukuran strategi. Idealnya

pengukuran menggunakan unit bisnis dalam perusahaan, sehingga mungkin saja sebenarnya ada satu perusahaan yang unit bisnisnya memiliki strategi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushman, R., Qi C., Ellen E., Abbie, S. 2004. Financial accounting information, organizational complexity and corporate governance systems. *Journal of Accounting and Economics*, 37, 167-201.
- Biggadike, R., 1979. The risky business of diversification. *Harvard Business Review*, 57 (3), 103-111.
- Cheng, M.M., Schultz, P.F. Lockett, and P. Booth. 2003. The effects of hurdle rates on the level of escalation of commitment in capital budgeting. *Behavioral Research in Accounting*, 15, 63-85.
- Chow, C., J. P. Harrison, T. Lindquist, and A. Wu. 1997. Escalating commitment to unprofitable projects: replications and cross-cultural extension. *Management Accounting Research*, 8 (3), 347-361.
- Demsetz, H., and Lehn, K. 1985. The structure of corporate ownership: causes and consequences. *Journal of Political Economy*, 93, 1155-1177.
- Fama, E., Jensen, M. 1983. Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26, 301-325.
- Gani, L., and J. Jermias. 2006. Investigating the effect of board independence on performance across different strategies. *The International Journal of Accounting*, 41, 295-314.
- Govindarajan, V., and J. Fisher. 1990. Strategy, control systems, and resource sharing: effects on business unit performance. *Academy of Management Journal*, 33, 259-285.
- Ghosh, C., Nag R., Sirmans, C.F. 2000. The pricing of seasoned equity offerings: evidence from REITs. *Real Estate Economics*, 28, 363-384.
- Gleason, K.C., Mathur, L.K., Mathur, I. 2000. The interrelationship between culture, capital structure, and performance: evidence from European retailers. *Journal of Business Research*, 50, 185-191.
- Gupta, A.K., V. Govindarajan, 1984. Business unit strategy, managerial characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation. *Academy of Management Journal* 27, 25-41.
- Igor Filatotchev. The Firm's Life-cycle and the Dynamics of Corporate Governance: Overcoming Governance "Thresholds". Presented in

Jensen, M. 1993. The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *Journal of Finance*, 48 (3), 831-880.

Jermias, J. 2008. The relative influence of competitive intensity and business strategy on the relationship between financial leverage and performance. *The British Accounting Review*, 40, 71-86.

Jensen, M. C. 1986. Agency cost of free cash flow, corporate finance and takeovers. *American Economics Review Papers and Proceedings*, 76, 323-329.

Jensen, M.C., W.H. Meckling. 1976. Theory of the firm, managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360

Jensen, M.C., and K.J. Murphy. 1990. Performance pay and top management incentives. *Journal of Political Economy*, 98, 225-264.

Miller, D. 1987. The structural and environmental correlates of business strategy. *Strategic Management Journal*, 8, 55-76.

Porter, M.E. 1980. *Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors*. New York: Free Press.

Porter, M. E. 1985. *Competitive advantage: creating and sustaining superior performance*. New York: Free Press.

Spence, M. 1985. *Capital structure and the corporation's product market environment*. Chicago: University of Chicago Press.

Simerly, R.L., Mingfang, L. 2000. Environment dynamism, capital structure and performance: A theoretical integration and an empirical test. *Strategic Management Journal*, 21, 31-49.

Wardhani, R. 2007. Mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4 (1), 95-114.

Warfield, T.J., J.J. Wild, and K.L. Wild. 1995. Managerial ownership, accounting choices, and informativeness of earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 20, 61-91.

LAMPIRAN

Analisis korelasi antar variabel penelitian

		Correlation	Probability
COMBOC	COMBOC	0.693856	0.0000
COMBOC	COMBOC	1.000000	-----
INDBOC	COMBOC	0.151166	0.2083
INDBOC	BOCSIZE	-0.028678	0.8123
INDBOC	INDBOC	1.000000	-----
SIZE	COMBOCIND	-0.059935	0.6195
SIZE	BOCSIZE	0.634418	0.0000
SIZE	INDBOC	0.115227	0.3386
SIZE	SIZE	1.000000	-----
ROI	COMBOC	-0.120459	0.3170
ROI	BOCSIZE	0.134752	0.2625
ROI	INDBOC	0.055859	0.6436
ROI	SIZE	0.347721	0.0030
ROI	ROI	1.000000	-----
LEV	COMBOCIND	0.162852	0.1748
LEV	BOCSIZE	-0.016700	0.8901
LEV	INDBOC	-0.168643	0.1598
LEV	SIZE	0.121625	0.3123
LEV	ROI	-0.219171	0.0663
LEV	LEV	1.000000	-----
FAMOWN	COMBOC	0.022835	0.8501
FAMOWN	BOCSIZE	0.052316	0.6648
FAMOWN	INDBOC	0.001501	0.9901
FAMOWN	SIZE	0.081456	0.4995
FAMOWN	ROI	-0.051198	0.6715
FAMOWN	LEV	0.105569	0.3809
FAMOWN	PBV	-0.044352	0.7134
FAMOWN	FAMOWN	1.000000	-----
MOWN	COMBOC	0.210623	0.0779
MOWN	BOCSIZE	-0.190853	0.1109
MOWN	INDBOC	-0.024022	0.8424
MOWN	SIZE	-0.112658	0.3496
MOWN	ROI	-0.093917	0.4360
MOWN	LEV	-0.093188	0.4395
MOWN	PBV	-0.079844	0.5080
MOWN	FAMOWN	-0.035883	0.7664

MOWN	MOWN	1.000000	-----
STRA	COMBOC	0.084121	0.4855
STRA	BOCSIZE	0.110853	0.3574
STRA	INDBOC	0.126918	0.2916
STRA	SIZE	0.034258	0.7767
STRA	ROI	0.339506	0.0038
STRA	LEV	-0.076821	0.5243
STRA	PBV	-0.032512	0.7878
STRA	FAMOWN	-0.122815	0.3076
STRA	MOWN	0.075517	0.5314
STRA	STRA	1.000000	-----

**Analisis Publikasi Artikel Pajak pada *Jurnal the Accounting Review*,
Journal of Accounting and Economics, dan *Journal of Accounting Research*
Tahun 2008-2012**

RAHMATUSIFA AL IRSYAD¹

DWI MARTANI

Universitas Indonesia

Abstract: *The purpose of this study is to shed light on taxation research development recently relative to prior studies. This paper use the content analysis method on the number of papers published, methodology utilized, and on the authors' attributes. The results suggest that there is no consistent growth on tax papers during last 5 years. Additionally, the taxation research area employed appears to be homogenous with archival/empirical methodology being the most utilized and the most of authors on the papers are U.S. co-authors.*

Keywords : *Content Analysis, Tax Research Analysis, Methodology Analysis, Author Analysis.*

¹ Corresponding author: x.697273796164@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan riset akuntansi internasional tercermin di dalam hasil studi sebelumnya. Studi Oler et al. (2010) menunjukkan bahwa jumlah paper yang dipublikasikan di jurnal akuntansi terbaik meningkat signifikan dari tahun 1960 sampai 2007. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya jurnal-jurnal baru yang diresmikan dan kemudian diakui sebagai jurnal elit (Oler et al., 2010). Perkembangan riset akuntansi tersebut juga diikuti oleh peningkatan jumlah jurnal akuntansi sejak tahun 1980-an yang didokumentasikan di dalam studi Zeff (1996).

Sudah banyak peneliti yang menganalisis jurnal-jurnal elit dengan beragam penggunaan metodologi. Oler et al. (2010) berargumen bahwa dengan menggunakan jurnal akuntansi terbaik, hal tersebut dapat merefleksikan representasi sampel dari riset akuntansi. Banyaknya studi yang memilih untuk menginvestigasi peran jurnal-jurnal akademik di dalam penyebaran ilmu akuntansi dikarenakan hal tersebut telah terbukti menjadi cara utama untuk difusi pengetahuan riset di dalam ilmu pengetahuan sosial (Campenhout dan Caneghem, 2010).

Berdasarkan pengamatan, belum ditemukan adanya studi yang membahas khusus topik perpajakan dengan analisis statistik pada jurnal-jurnal akuntansi terbaik. Padahal analisis yang berfokus pada salah satu topik merupakan hal penting di dalam mengevaluasi kinerja akademisi akuntansi (Bonner et al., 2006). Studi terdahulu yang mereview paper perpajakan dilakukan dengan analisis deskriptif (contoh: Shevlin, 1999; Shackelford dan Shevlin, 2001; Hanlon dan Heitzman, 2010; dan Graham et al., 2012). Meskipun review dilakukan dengan komprehensif, namun kurangnya analisis statistik menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi mengenai perkembangan riset pajak.

Berbeda dengan paper sebelumnya, paper ini menganalisis perkembangan artikel khusus di area perpajakan pada jurnal akuntansi internasional terbaik untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan riset perpajakan. Sedangkan analisis paper ini dibatasi hanya pada jurnal *The Accounting Review* (TAR), *Journal of Accounting and Economics* (JAE), dan *Journal of Accounting Research* (JAR) yang merupakan jurnal akuntansi terbaik termasuk pada topik perpajakan (Bonner et al., 2006; Chan et al., 2009; Graham et al., 2012). Penggunaan jurnal *mainstream* alih-alih jurnal perpajakan (JATA, NTJ) dimaksudkan supaya ada perbandingan riset perpajakan terhadap riset di area penelitian lain.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat proporsi paper perpajakan selalu di bawah proporsi paper akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan audit. Hal tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan dibandingkan hasil studi yang ditunjukkan oleh Bonner et al. (2006), Coyne et al. (2010), dan Oler (2010). Area riset yang diteliti pada paper perpajakan cenderung homogen pada isu perpajakan di U.S. dan metodologi *archival/empirical* digunakan di dalam sebagian besar riset pajak. Homogennya isu perpajakan dapat dijelaskan oleh dominasi penulis dari U.S., yang sebagian besar melakukan *joint work (co-author)* di dalam mengerjakan paper mereka (Lukka dan Kasanen, 1996).

Di samping menggunakan data terbaru, yakni hingga tahun 2012, analisis paper ini juga menggunakan kombinasi berbagai metodologi dan pengklasifikasian berdasarkan studi-studi sebelumnya agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif mengenai perkembangan riset perpajakan. Dengan melakukan analisis penghitungan (*counting analysis*) seperti yang dicontohkan oleh Coyne et al. (2010) dan Falk (1989) paper ini diharapkan ikut berkontribusi di dalam memberikan informasi mengenai kecenderungan akademisi akuntansi di dalam melakukan riset perpajakan dibandingkan riset di bidang lain dan mengenai area perpajakan

yang paling menarik perhatian dan diteliti oleh mereka, serta memahami karakteristik riset perpajakan di jurnal akuntansi perpajakan dalam 5 tahun terakhir.

Sistematika penulisan paper ini adalah sebagai berikut. Tinjauan literatur yang akan digunakan di dalam analisis paper dijelaskan di Bab 2. Kemudian di Bab 3 dijelaskan mengenai kerangka dan model analisis serta sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan untuk analisis dan pembahasan pada Bab 4. Sedangkan Bab 5 memuat kesimpulan dari pembahasan di Bab 4 serta keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

2. KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR

2.1 Analisis Riset Akuntansi

Berdasarkan studi terdahulu, riset akuntansi telah mengalami perkembangan sejak era 1960-an. Oler et al. (2010) mendokumentasikan peralihan dari riset normatif ke riset positif pada pertengahan 1970-an. Prather dan Rueschhoff (1996) juga mendokumentasikan peralihan metode riset yang digunakan dari survey/deskriptif dan review/historis pada awal 1980-an menjadi riset pengembangan teori dan *field studies*. Hasil riset tersebut mengindikasikan bahwa riset yang berhubungan dengan penetapan kebijakan dan standar akuntansi internasional meningkat pada waktu itu. (Prather dan Rueschhoff, 1996). Sifat *interdisciplinary* dari riset akuntansi bahkan telah menjangkau disiplin ilmu pengetahuan alam, seperti yang dikemukakan oleh Moser (2012) bahwa di samping berkembangnya penggunaan konsep ekonomi perilaku (*behavioral economics*) dan psikologi pada riset akuntansi, riset di bidang *neuroaccounting* sudah semakin sering ditemukan di dalam jurnal akuntansi (Dickhaut et al. 2010; Bimberg dan Ganguly, 2012 di dalam Moser, 2012).

Di samping evolusi dari riset akuntansi, Moser (2012) juga mencatat indikasi stagnansi pada riset akuntansi, antara lain: 1) terbatasnya kelompok isu yang diangkat (hanya seputar *earnings management*, ramalan analis atau manajemen, kompensasi, regulasi, tata kelola, atau penganggaran/ *budgeting*); 2) penggunaan metodologi yang homogen (sebagian besar riset akuntansi menggunakan metodologi *archival*); 3) sebagian besar riset hanya merupakan perluasan minor dari hasil riset sebelumnya, kecilnya penekanan pada hipotesis (menguji sesuatu yang sudah hampir pasti benar), dan memiliki implikasi yang terbatas (riset dilakukan tanpa memperdulikan siapa yang tertarik pada hasil riset tersebut). Di samping Moser (2012), Hopwood (2007) juga mengemukakan bahwa riset akuntansi telah menjadi kurang inovatif (picik), *self-referential*, terlalu berhati-hati dan konservatif, terlalu kaku dan tradisional, dan kurang menyesuaikan untuk berhadapan wawasan dan pengetahuan yang baru. Hasil studi Biehl et al. (2006) juga menunjukkan sedikitnya riset yang melakukan *cross-disciplinary*.

Karakteristik lain dari perkembangan riset akuntansi juga ditunjukkan dari hasil studi Lukka dan Kasanen (1996), bahwa bahkan yang dianggap sebagai segmen paling internasional dari publikasi publikasi riset akuntansi memiliki sifat dasar yang sangat lokal. Sifat lokal dari riset akuntansi dapat dilihat dari kecenderungan penggunaan data domestik di kalangan peneliti (Lukka dan Kasanen, 1996).

2.2 Teknik Analisis Riset Akuntansi

Teknik analisis riset akuntansi yang digunakan untuk menilai produktivitas riset staf pengajar/ program akademik dan untuk merangking jurnal terdiri dari teknik penghitungan (*counting*), analisis rujukan (*citation analysis*), dan survey (Hasselback et al., 2003; Reinstein dan Calderon, 2006).

Teknik penghitungan memerlukan beberapa keputusan subjektif, termasuk identifikasi jurnal representatif dan relevan yang potensial, menjustifikasi penyertaan jurnal-jurnal tersebut, dan justifikasi pengecualian jurnal lainnya (Hasselback et al., 2003; Reinstein dan Calderon, 2006). Teknik penghitungan sering digunakan untuk membantu mengevaluasi produktivitas ilmiah atau memastikan standar untuk promosi dan masa jabatan (Reinstein dan Hasselback, 1997). Karena teknik penghitungan sering menggunakan jurnal bergengsi saja sebagai tolak ukur penilaian, di samping mengurangi manfaat dari temuan mereka (Hasselback et al., 2003), hal tersebut juga menimbulkan permasalahan lebih jauh, yaitu: 1) semakin jelasnya hierarki jurnal yang dianggap tingkat teratas sehingga memunculkan tekanan untuk mempublikasikan di jurnal-jurnal tersebut dan berdampak pada sifat penelitian yang dilakukan; 2) mendorong peneliti untuk fokus pada penelitian yang lebih mungkin diterima oleh jurnal dengan peringkat teratas; dan 3) resiko instrumentalisme karir (Campenhout dan Caneghem, 2010).

Analisis rujukan mengukur tingkat keseringan suatu artikel, penulis, atau jurnal dirujuk di dalam artikel lainnya, dengan mengadopsi asumsi pokok bahwa artikel dengan kualitas lebih tinggi akan lebih sering dirujuk daripada artikel dengan kualitas lebih rendah (Hasselback dan Reinstein, 1995; Hasselback et al., 2003; Reinstein dan Calderon, 2006). Teknik ini menghitung seberapa sering artikel lain menyebutkan atau merujuk artikel yang sedang dipelajari (Hasselback dan Reinstein, 1995; Hasselback et al., 2003; Reinstein dan Calderon, 2006).

Beberapa studi telah menggunakan survey untuk menilai kualitas jurnal akuntansi dan jurnal terkait lainnya (Hasselback dan Reinstein, 1995; Reinstein dan Hasselback, 1997; Hasselback et al., 2003; Reinstein dan Calderon, 2006). Survey dilakukan dengan meminta staf pengajar atau administrator untuk meranking jurnal relatif terhadap jurnal “*anchor*”,

seperti yang dilakukan oleh Howard dan Nikolai (1983) dan Smith (1994) (Reinstein dan Hasselback, 1997; Hasselback et al., 2003; Reinstein dan Calderon, 2006).

2.3 Penggunaan Jurnal Akuntansi Terbaik

Hasil studi Glover et al. (2006) menunjukkan bahwa staf pengajar yang telah dipromosikan menjadi profesor di sekolah riset terbaik lebih memusatkan usahanya di dalam mempublikasikan hasil studinya ke dalam jurnal akademik yang memiliki kualitas tinggi, daripada mempublikasikan artikel dengan jumlah yang lebih banyak di jurnal akademik professional atau jurnal dengan kualitas lebih rendah. Hasil studi Glover et al. (2006) sejalan dengan Oler et al. (2010) yang menganjurkan bahwa pendekatan sederhana untuk mendeskripsikan dan mengkonseptualisasikan riset akuntansi adalah dengan melihat paper yang dipublikasikan di jurnal akuntansi terbaik. Oler et al. (2010) mengasumsikan bahwa paper yang dipublikasikan di jurnal akuntansi terbaik merupakan representasi yang terpercaya bagi literatur akuntansi.

Berdasarkan hasil perbandingan antara hasil studi yang dilakukan oleh Bonner et al. (2006), Chan et al. (2009), dan Glover et al. (2006), dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1980-an jurnal TAR, JAE, dan JAR relatif lebih konsisten di dalam menempati posisi lima jurnal terbaik dibandingkan jurnal lainnya.

Evaluasi dengan tolak ukur jurnal terbaik juga memiliki kekurangan, yaitu: 1) tidak semua artikel di jurnal elit merupakan “artikel terbaik”, dan tidak semua artikel terbaik muncul di jurnal elit (Smith, 2004 di dalam Campenhout dan Caneghem, 2010); 2) jurnal akuntansi terbaik tidak mempublikasikan semua tipe riset akuntansi secara proporsional (Pickerd et al., 2011); 3) sifat “elit” dari jurnal terbaik menyebabkan staf pengajar “elit” biasanya menghindari untuk melakukan publikasi di jurnal “non-elit” atau bekerja sama dengan staf pengajar “non-elit” (Reinstein dan Calderon, 2006); 4) sebagian besar jurnal elit

memiliki cakupan isu yang sempit, fokus di dalam memeriksa pasar modal, teori positif, dan peramalan (*forecasting*) dengan dampak minimal di praktek akuntansi, dan sering mengabaikan sumber jurnal non-elit, sehingga menimbulkan sistem tertutup yang dapat merusak inovasi dan pertumbuhan di domain akuntansi (Reinstein dan Calderon, 2006).

2.4 Analisis Riset Perpajakan

Analisis riset perpajakan pada studi sebelumnya berupa review deskriptif sehingga sulit untuk menyimpulkan bagaimana perkembangan riset perpajakan (contoh: Shevlin, 1999; Shackelford dan Shevlin, 2001; Hanlon dan Heitzman, 2010; dan Graham et al., 2012). Selain analisis pada jurnal *mainstream*, satu-satunya studi yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan riset perpajakan adalah studi yang dilakukan oleh Goode (1997).

Berdasarkan hasil review NTJ oleh Goode (1997), jumlah halaman yang dikhususkan untuk paper dan catatan telah meningkat dua kali (dari 1,035 menjadi 2,107) di antara periode 1948-1950 dan 1994-1996. Jumlah paper juga meningkat dari 99 menjadi 135, dan panjang rata-rata paper juga meningkat hampir 20 persen (Goode, 1997). Sementara total halaman yang dikhususkan untuk *review* buku dan catatan buku (*book notes*) meningkat dari 53 menjadi 72 halaman (Goode, 1997). Perubahan lain yang terjadi di antara periode 1948-1950 dan 1994-1996 adalah: 1) peningkatan kontribusi oleh penulis dengan afiliasi institusi akademik dan munculnya penulis yang berasal dari institusi riset independen; 2) meningkatnya frekuensi *co-author* paper dan *notes*; dan 3) di periode pertama, paper dipublikasikan mengenai perpajakan di Jerman, Jepang, Australia, Meksiko, dan Cuba, serta paper yang membandingkan antara *depreciation allowance* dengan perubahan pada pajak penghasilan individu pasca perang di berbagai negara yang menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di periode kedua pusat perhatian utama paper terletak pada interaksi sistem pajak U.S. dan asing dan dampaknya terhadap arus investasi dan lokasi produksi (Goode, 1997).

Di samping studi *empirical inventory costing*, riset pajak oleh akuntan sebelum pertengahan 1980-an dapat didikotomikan menjadi dua bentuk, yaitu: (a) *legal research*, yaitu riset yang mengevaluasi efek pajak pada transaksi *exogenous*, dan biasanya dipublikasikan pada jurnal hukum; dan (b) *policy studies*, yaitu riset yang mengevaluasi distribusi atau efisiensi efek pajak, biasanya dipublikasikan di jurnal akuntansi publik (Shackleford dan Shevlin, 2001). Kemudian pada pertengahan 1980-an, paradigma Scholes-Wolfson yang mengadopsi pendekatan positif dan menyatukan ilmu mikroekonomi dan hukum perpajakan untuk menjelaskan peran pajak di dalam organisasi menjadi pusat paradigma untuk riset pajak empiris terkini di dalam akuntansi (Shackleford dan Shevlin, 2001).

Hasil riset Bonner et al. (2006) menunjukkan bahwa artikel di kategori perpajakan dan sistem memiliki frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan artikel di kategori audit, keuangan, manajemen, dan lainnya di 5 jurnal akuntansi selama tahun 1984-2003. Englebrecht et al. (2008) juga mendokumentasikan bahwa tingkat *co-authorship* pada artikel perpajakan lebih kecil daripada artikel dari akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan audit pada jurnal terbaik selama periode 1979-2004. Di samping itu, Chan et al. (2009) juga menunjukkan bahwa artikel perpajakan dan sistem juga paling sedikit digunakan sebagai kutipan di dalam disertasi akuntansi yang dihimpun oleh ProQuest selama tahun 1999-2003. Studi Oler et al. (2010) juga menunjukkan bahwa proporsi paper perpajakan menurun di tahun 2000-an relatif terhadap dekade sebelumnya. Selain itu, rujukan dari paper perpajakan juga semakin sedikit (Oler et al., 2010). Namun hal yang berbeda diungkapkan Shackleford dan Shevlin (2001), yang berpendapat bahwa di kalangan komunitas peneliti, pajak menyaingi akuntansi manajemen dan audit di urutan kedua setelah akuntansi keuangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Riset Akuntansi

Sebagian besar studi-studi analisis riset akuntansi terdahulu menggunakan pengklasifikasian topik akuntansi yang serupa yang meliputi kategori topik akuntansi keuangan (*financial*), manajemen, audit, perpajakan, dan kategori lainnya yang belum termasuk ke dalam keempat kategori tersebut (Adhikari et al., 2002; Bonner et al., 2006; Chan et al., 2009; Coyne et al., 2010; Dykxhoorn dan Sinning, 2010; Falk, 1989; Oler et al. 2010; Pickerd et al., 2011; Prather dan Rueschhoff, 1996).

Campenhout dan Caneghem (2010) melakukan klasifikasi paper berdasarkan judul, abstrak dari artikel, dan kata kunci dari EbscoHost. Untuk cakupan analisis paper, Falk (1989) menggunakan naskah utama, catatan, komentar, dan diskusi. Berbeda dengan cakupan analisis Oler et al. (2010) yang mengecualikan surat, laporan komite, review buku, catatan, dan artikel lain yang tidak berhubungan dengan riset. Prahter dan Rueschhoff (1999) juga melakukan pengecualian pada review buku, komentar, dan sambutan editorial. Bonner et al. (2006) justru hanya memasukkan naskah utama di luar diskusi dan *commentary*.

Ada dua pemahaman di dalam melakukan klasifikasi topik akuntansi pada paper yang membahas lebih dari satu kategori topik akuntansi. Pemahaman pertama adalah seperti yang dicontohkan oleh Falk (1989) yang mengklasifikasikan paper ke dalam kategori dengan dasar topik yang merupakan isu utama paper menurut pemahaman subjektifnya. Falk (1989) mengakui kemungkinan klasifikasi berbeda oleh peneliti lain. Pemahaman kedua adalah seperti yang dicontohkan Coyne et al. (2010) di mana satu artikel dapat diklasifikasikan lebih dari satu klasifikasi area topik akuntansi. Sebagai contoh adalah paper yang ditulis oleh Prawitt et al. (2009) yang berjudul "*Internal Audit Quality and Earnings Management*" diklasifikasikan ke dalam topik "audit" dan "keuangan" (Coyne et al., 2010).

2.5.2 Riset Perpajakan

Studi yang mereview riset khusus topik perpajakan telah dilakukan oleh Shevlin (1999), Shackelford dan Shevlin (2001), dan Hanlon dan Heitzman (2010). Graham et al. (2012) juga melakukan review atas paper pajak tetapi ruang lingkup studi mereka dibatasi pada AFIT (*accounting for income tax*).

Menurut Shevlin (1999), sebagian besar penelitian pajak dapat diklasifikasikan ke dalam satu dari tiga bidang, yaitu: (1) riset kebijakan pajak, yaitu paper yang menilai efek atau efektivitas dari perubahan aturan pajak; (2) riset perencanaan pajak, yaitu paper yang memeriksa bagaimana perusahaan atau individu merespon peraturan pajak; dan (3) riset kepatuhan pajak, yaitu paper yang menganalisis faktor yang menentukan kepatuhan terhadap undang-undang pajak. Sedangkan metodologi yang dapat ditemukan di penelitian pajak tersebut adalah *experimental markets*, *behavioral/judgement and decision making*, *analytical*, dan *archival empirical* (Shevlin, 1999).

Menurut Shackelford dan Shevlin (2001), terdapat tiga area utama penyelidikan di dalam riset perpajakan, yaitu: (1) *tradeoff* pajak dan non pajak, yaitu paper yang memeriksa koordinasi pajak dengan faktor lain di dalam keputusan bisnis, dengan penekanan pada pajak yang tidak dapat diminimalisasi tanpa mempengaruhi tujuan organisasi lainnya; (2) pajak dan harga aset, yaitu paper yang memeriksa seberapa jauh harga mempertimbangkan faktor pajak; dan (3) *multijurisdictional*, yaitu paper yang memeriksa peraturan perpajakan yang kompleks terkait perdagangan *multijurisdictional*.

Sedangkan menurut Hanlon dan Heitzman (2010) area perpajakan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 area utama riset, yaitu: (1) peran informasi beban pajak penghasilan untuk akuntansi keuangan – menjelaskan mengenai isu seputar perbedaan antara pendapatan buku dengan pendapatan kena pajak terkait dengan implikasinya terhadap

pelaporan keuangan; (2) *tax avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan; (3) efek pajak terhadap pengambilan keputusan perusahaan termasuk investasi, struktur modal, dan bentuk organisasi, serta kebijakan pajak mana yang efektif dilihat dari implikasi nyatanya terhadap keputusan perusahaan. Area utama kelompok literatur ini adalah investasi, struktur modal, dan bentuk organisasi; dan (4) pajak investor (*investor level taxes*) dan penilaian aset (*asset pricing*) – riset mengenai dampak dari pajak dividen untuk investor dan pajak atas *capital gains* terhadap nilai saham.

2.5.3 Metodologi Paper dan Atribut Penulis

Beberapa paper yang mereview mengenai riset akuntansi juga mengklasifikasikan riset yang dianalisis berdasarkan metodologi riset yang digunakan (Adhikari et al., 2002; Coyne et al, 2010; Dykxhoorn dan Sinning, 2010; Falk, 1989; Prather dan Rueschhoff, 1996; Oler et al., 2010). Kategori metodologi *archival*/empiris dapat ditemukan di semua studi, sedangkan kategori metodologi lainnya bervariasi pada tiap-tiap studi.

Klasifikasi berdasarkan atribut penulis dilakukan oleh Prather dan Rueschhoff (1996); Prather dan Rueschhoff (1999); Adhikari et al. (2002); Lindquist dan Smith (2009); dan Dykxhoorn dan Sinning (2010). Adhikari et al. (2002) menganalisis atribut penulis berdasarkan asal penulis, status penulis, dan status institusi penulis. Model analisis *authorship* yang dilakukan Prather dan Rueschhoff (1999) dilakukan dengan lebih komprehensif dibandingkan dengan Adhikari et al. (2002), yaitu dengan menggunakan tabel silang antara nama penulis, status penulis, metode yang digunakan, jumlah paper, universitas, periode tahun, dan jurnal penerbit. Sementara analisis atribut penulis yang dilakukan oleh Prather dan Rueschhoff (1996) hanya berdasarkan asal institusi penulis, sama dengan model yang digunakan oleh Dykxhoorn dan Sinning (2010). Lindquist dan Smith (2009) menganalisis atribut penulis berdasarkan status penulis (*non accounting professional, accounting*

professional, graduate student, dan undergraduate student), afiliasi sekolah, dan sekolah di mana penulis mendapatkan gelar doktoral.

3. KERANGKA PENELITIAN, SUMBER DATA, DAN METODE PENGUMPULAN DATA

3.1 Kerangka Penelitian

Di dalam menganalisis paper pajak pada jurnal akuntansi terbaik (TAR, JAE, JAR), penelitian ini menggunakan alat analisis statistik seperti yang telah digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penyesuaian metodologi dilakukan di dalam melakukan pengklasifikasian, yaitu paper yang dianalisis lebih mendalam pada penelitian ini hanya paper yang termasuk ke dalam kategori area riset perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga relevansi analisis dengan tujuan penelitian.

Kerangka penelitian ini terdiri dari empat analisis utama. Analisis pertama dilakukan dengan pengklasifikasikan seluruh artikell riset di dalam jurnal TAR, JAE, dan JAR berdasarkan topik riset akuntansi yang terdiri dari: 1) akuntansi keuangan (*financial*); 2) akuntansi manajerial; 3) audit; 4) perpajakan; 5) sistem informasi; 6) nirlaba dan pemerintahan; 7) tatakelola perusahaan (*corporate governance*); dan 8) kategori lainnya. Klasifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi isu utama yang dibahas di dalam paper dilihat dari judul, abstrak, dan kata kunci. Isu utama yang teridentifikasi kemudian dirujuk ke masing-masing definisi kategori topik menurut paper sebelumnya (lihat Tabel 1). Satu paper dapat diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu kategori topik (*non-exclusive*). Sedangkan jika isu utama yang diangkat tidak dapat dimasukkan ke dalam satupun definisi topik, maka klasifikasikan berdasarkan penilaian subjektif. Dari analisis tersebut, proporsi dan perkembangan antara paper perpajakan dibandingkan dengan proporsi dan perkembangan paper di area topik lainnya.

Analisis kedua adalah pengklasifikasian paper yang termasuk di dalam area topik perpajakan ke dalam kategori berdasarkan area riset pajak menurut Shevlin (1999), Shackelford dan Shevlin (2001), dan Hanlon dan Heitzman (2010). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui area riset pajak yang paling diminati oleh peneliti akuntansi di jurnal akuntansi terbaik. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan kemiripan isu yang diungkapkan di dalam contoh analisis paper masing-masing kategori area riset pajak, di samping mempertimbangkan penjelasan definisi masing-masing kategori. Satu paper pajak hanya dapat masuk ke dalam satu kategori untuk masing-masing model klasifikasi. Meskipun masing-masing kategori belum tentu eksklusif satu sama lain, namun penulis dari ketiga model tersebut telah menyebutkan bahwa penekanan isu yang diangkat masing-masing kategori adalah berbeda satu sama lain. Paper pajak yang bersifat review, yaitu Hanlon dan Heitzman (2010) dan Graham et al. (2012) sehingga kedua paper tersebut dikecualikan di dalam analisis ini.

Analisis ketiga adalah pengklasifikasian paper yang termasuk di dalam area topik perpajakan berdasarkan metodologi yang digunakan di dalam riset. Kategori metodologi yang digunakan terdiri dari: 1) eksperimen; 2) analitik; 3) *archival/empirical*; 4) survey; dan 5) review. Hasil analisis metodologi paper pajak kemudian dibandingkan dengan hasil analisis metodologi riset akuntansi pada paper sebelumnya. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui metodologi yang paling sering digunakan oleh peneliti akuntansi di dalam paper pajak dan masing-masing area riset perpajakan.

Analisis keempat adalah pengklasifikasian paper yang termasuk di dalam area topik perpajakan berdasarkan atribut penulis yang terdiri dari: 1) asal penulis; 2) status penulis; dan 3) status institusi penulis. Data penulis paper di dalam penelitian ini berdasarkan *database "A Directory of Accounting Faculty"* edisi ke-34 yang dikompilasi oleh James R. Hasselback. Untuk menjamin keakuratan data, semua data penulis tersebut diverifikasi ulang menurut

database yang disediakan masing-masing universitas afiliasi penulis atau sumber lain dari internet. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penulis yang berkontribusi di dalam paper perpajakan pada jurnal TAR, JAE, dan JAR selama 5 tahun terakhir.

3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang berupa 717 artikel berupa naskah utama dan paper diskusi yang dipublikasikan di jurnal TAR, JAE, dan JAR selama lima tahun terakhir, yaitu pada periode 2008-2012.

Data diperoleh melalui akses jurnal online yang disediakan oleh Universitas Indonesia. Layanan jurnal online tersebut adalah EBSCOHost, ScienceDirect, JStor, dan Proquest. Sementara untuk artikel yang tidak tersedia di layanan jurnal online Universitas Indonesia, maka data yang dianalisis merupakan paper *forthcoming issue* dari *website* SSRN. Paper yang tidak dapat diunduh dari SSRN, kemudian diunduh dari situs-situs berikut: 1) drake.edu; 2) chicagobooth.edu; 3) stanford.edu; 4) illinois.edu; 5) liras.kuleuven.be; 6) econ.au.dk; 7) nhh.no; 8) nd.edu; 9) temple.edu; 10) efmaefm.org; 11) umich.edu; 12) utexas.edu; 13) upstegal.ac.id; 14) uiuc.edu; 15) nyu.edu; 16) d-ddaily.com; dan 17) tau.ac.il.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Topik Akuntansi

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah paper akuntansi yang dipublikasikan di jurnal TAR, JAE, dan JAR selama 5 tahun terakhir secara konsisten mengalami peningkatan. Meskipun demikian, hasil penelitian Bonner et al. (2006) dan Oler et al. (2010) yang menggunakan cakupan waktu lebih panjang tidak menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten mengenai jumlah paper yang dipublikasikan di jurnal TAR, JAE, dan JAR. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa proporsi paper perpajakan tidak mengalami perubahan dari hasil

studi yang dilakukan oleh Bonner et al. (2006), Coyne et al. (2010) dan Oler et al. (2010), yaitu selalu lebih kecil dibandingkan paper akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan audit. Pertumbuhan jumlah paper pajak juga berfluktuasi selama periode 2008-2012, seperti yang disajikan pada Grafik 1.

Berbeda dengan yang dikemukakan Oler et al. (2010), hasil studi ini tidak menemukan adanya adanya indikasi bahwa riset akuntansi semakin menjauhi topik audit dan perpajakan. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan data pada Tabel 2 dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oler et al. (2010) dan hasil penelitian Bonner et al. (2006). Proporsi paper perpajakan di jurnal TAR, JAE, dan JAR justru cenderung mengalami peningkatan dibandingkan periode awal, meskipun konsisten berada di bawah 12% dari jumlah paper (Bonner et al., 2006; Oler et al., 2010).

Pergerakan jumlah paper yang dapat diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu kategori dapat dilihat melalui Tabel 3. Untuk menyederhanakan diagram, pada kolom 2 topik akuntansi keuangan, nirlaba dan pemerintahan (N&P), dan tatakelola perusahaan (CG) digabung ke dalam satu himpunan. Pada kolom 3, anggota himpunan tersebut kemudian dipisahkan untuk melihat bagaimana proporsi sesungguhnya topik akuntansi keuangan, nirlaba dan pemerintahan, dan tatakelola perusahaan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa anggota himpunan dari paper pajak, audit, dan akuntansi manajerial selalu memiliki irisan dengan anggota himpunan dari paper keuangan, N&P, dan CG. Sementara di kolom 3, anggota himpunan dari paper N&P dan paper CG juga selalu memiliki irisan dengan anggota himpunan dari akuntansi keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa riset akuntansi relatif terpusat pada topik akuntansi keuangan, di mana setiap tahunnya, isu yang dibahas di dalam beberapa paper selain akuntansi keuangan juga mengangkat isu mengenai topik akuntansi keuangan.

4.2 Analisis Area Riset Perpajakan

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penulis paper pajak lebih tertarik di dalam meneliti respon dan perilaku manajer perusahaan di dalam menanggapi aturan pajak yang berlaku (riset perencanaan pajak) daripada meneliti efektivitas pemberlakuan aturan pajak tersebut (riset kebijakan pajak) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (riset kepatuhan pajak). Meskipun Shevlin (1999) tidak banyak melihat adanya riset kebijakan pajak pada jurnal *mainstream*, namun hasil analisis pada Tabel 4 justru menunjukkan bahwa area riset tersebut memiliki proporsi yang cukup besar (18.37 persen) dari total paper.

Jika dilihat dari sudut pandang metode klasifikasi Shackelford dan Shevlin (2001), paper perpajakan sebagian besar membahas mengenai *trade-off* antara faktor pajak dan faktor non pajak. Paper perpajakan yang termasuk ke dalam area riset ini tersebar ke dalam klasifikasi area riset “peran informasi beban pajak penghasilan untuk akuntansi keuangan”, “penghindaran pajak”, dan “pengambilan keputusan perusahaan” berdasarkan metode klasifikasi Hanlon dan Heitzman (2010).

Berdasarkan metode klasifikasi Hanlon dan Heitzman (2010), area riset “penghindaran pajak” mengalami peningkatan jumlah dan proporsi paper yang termasuk ke dalam selama 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan, area riset penghindaran pajak juga memiliki proporsi terbesar dibandingkan area riset lainnya. Area riset “penghindaran pajak” relatif lebih banyak mengangkat isu khusus topik perpajakan dibandingkan area riset lainnya. Dari dua belas paper pajak yang tidak beririsan dengan topik lain pada Tabel 3, tujuh di antaranya merupakan paper di area riset “penghindaran pajak”.

4.3 Analisis Metodologi Riset Perpajakan

Berdasarkan data pada Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peneliti pajak menggunakan metodologi *archival/empirical* (Arc/emp). Dominasi penggunaan metodologi *archival/empirical* di jurnal TAR, JAE, dan JAR juga didokumentasikan oleh Coyne et al. (2010) dan Oler et al. (2010). Hasil studi Oler et al. (2010) juga menunjukkan adanya pergeseran penggunaan metodologi di jurnal TAR, JAE, dan JAR dari normatif ke *archival* sejak era 1970-an, sedangkan tidak ada indikasi pergeseran pada metodologi analitik, survey, dan review.

Data pada Tabel 5 juga terdapat data yang tidak konsisten dengan studi sebelumnya. Hasil studi Coyne et al. (2010) menunjukkan bahwa urutan proporsi metodologi pada paper khusus topik perpajakan adalah: 1) *archival* (58%); 2) eksperimen (19%); 3) analitik (13%); dan lainnya (10%).

4.4 Analisis Atribut Penulis

Dari 49 paper pajak yang dipublikasikan di dalam jurnal TAR, JAE, dan JAR selama tahun 2008-2012, secara keseluruhan terdapat 82 penulis yang beberapa diantaranya mencantumkan lebih dari satu afiliasi universitas atau lembaga penelitian. Secara keseluruhan, Jennifer Blouin merupakan peneliti paling aktif di topik perpajakan selama 5 tahun terakhir dengan total kontribusi paper pajak sebanyak 6 paper di jurnal TAR, JAE, dan JAR. Penulis paper pajak lain yang hasil studinya juga dipublikasikan di ketiga jurnal tersebut adalah Michelle Hanlon, Terry Shevlin dan Ryan J. Wilson. Sedangkan penulis yang berkontribusi paling banyak secara keseluruhan adalah: Jennifer Blouin (6 paper); Michelle Hanlon dan Richard Sansing (5 paper); Leslie A. Robinson, Terry Shevlin, dan Ryan J. Wilson (4 paper). Meskipun Richard C. Sansing lebih sedikit kontribusinya dibandingkan Jennifer Blouin, namun Richard C. Sansing menduduki peringkat pertama di dalam dunia riset pajak selama 6

tahun terakhir dan memiliki nilai *Individual's Contribution to their Institutions's* (ICI) tertinggi dibandingkan peneliti lainnya menurut byuaccounting.net.

Berdasarkan data pada Tabel 6, dari 49 paper pajak terdapat: 5 paper yang ditulis oleh satu penulis yang semuanya berasal dari U.S.; 14 paper dengan dua *co-author* U.S. dan 2 paper dengan dua *co-author* campuran; 20 paper dengan tiga *co-author* U.S., 1 paper dengan tiga *co-author* non-U.S., dan 2 paper dengan tiga *co-author* campuran; serta 4 paper dengan empat *co-author* U.S. dan 1 paper dengan empat *co-author* non-U.S. Karena peneliti cenderung lebih menyukai penggunaan data domestik seperti yang dipaparkan oleh Lukka dan Kasanen (1996), maka dominasi peneliti U.S. ikut menjelaskan karakteristik dari paper pajak yang lebih banyak menjelaskan isu perpajakan di U.S. Berdasarkan hasil identifikasi di dalam pengurutan nama penulis paper *co-author*, sebagian besar nama penulis diurutkan berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis. Hanya ada 2 paper yang urutan nama penulis tidak sesuai abjad nama belakang penulis.

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi paper pajak di TAR, JAE, dan JAR didominasi oleh kalangan *full professor*, *associate professor*, dan *assistant professor* (97 persen). Adhikari et al. (2002) dan Prather dan Rueschhoff (1999) juga mendokumentasikan dominasi kontribusi riset dari kalangan *full professor*, *associate professor*, dan *assistant professor*. Dari total 82 penulis, terdapat 26 penulis yang berstatus sebagai *assistant professor*, 23 penulis yang berstatus sebagai *associate professor* dan 2 di antaranya menjabat sebagai *chairman*, dan 28 penulis yang berstatus sebagai *full professor*. Dari 28 *full professor* tersebut, 4 menjabat sebagai *chairman*, 3 menjabat sebagai *head faculty*, dan 1 menjabat sebagai *director*.

Dari 82 penulis paper pajak, terdapat 59 institusi afiliasi yang sebagian besar merupakan universitas yang memberikan gelar doktoral (lihat Tabel 7). Dari total 138

kontribusi institusi, hasil identifikasi menunjukkan bahwa 100 di antaranya merupakan kontribusi institusi yang memberikan gelar doktoral. Di samping itu, dari 26 institusi yang berkontribusi lebih dari 2 paper pajak, hanya 5 institusi yang teridentifikasi tidak memberikan gelar doktoral. Keberadaan universitas non-doktoral pada Tabel 7 dapat dijelaskan dengan hasil studi Cargile dan Bublitz (1986) yang menunjukkan bahwa publikasi riset merupakan faktor terpenting untuk kompensasi, promosi, dan keputusan perekrutan pada universitas doktoral dan non-doktoral (Pickerd et al., 2011).

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui perkembangan riset pajak di jurnal TAR, JAE, dan JAR selama periode 2008-2012 dan melihat bagaimana perhatian peneliti akuntansi terhadap topik perpajakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu kalangan baik akademisi maupun profesional untuk lebih memahami kondisi perkembangan riset pajak selama 5 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil analisis pada Bab 4, maka penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum adanya indikasi meningkatnya ketertarikan para peneliti akuntansi di dalam topik perpajakan. Hasil analisis menunjukkan belum adanya peningkatan jumlah proporsi paper perpajakan pada jurnal TAR, JAE, dan JAR dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Bonner et al. (2006) dan Oler et al. (2010). Perhatian komunitas peneliti akuntansi masih terpusat pada topik akuntansi keuangan dan belum ada indikasi pergeseran ke topik perpajakan selama 5 tahun terakhir.

2. Area riset di dalam topik perpajakan yang paling diminati kalangan peneliti pajak adalah: 1) riset mengenai bagaimana subjek pajak merespon aturan pajak yang berlaku; 2) koordinasi pajak dengan faktor lain di dalam keputusan bisnis; dan 3) isu seputar penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan.
3. Penulis yang berasal dari U.S. mendominasi kontribusi paper pajak selama 5 tahun terakhir, terutama yang bergelar *full professor*, *associate professor*, dan *assistant professor*. Sedikitnya kontribusi penulis non-U.S. ikut menjelaskan sifat kelokalan paper pajak belakangan ini. Penulis paper pajak yang berkontribusi di jurnal TAR, JAE, dan JAR sebagian besar berasal dari universitas yang menawarkan program studi doktoral (*Ph.D. granting institutions*). Hal tersebut menunjukkan bahwa mempublikasikan riset di jurnal dengan kualitas tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi para staf pengajar dari universitas doktoral.
4. Metodologi yang paling sering digunakan di dalam riset pajak adalah *archival/empirical* yang merupakan salah satu karakteristik dari riset positif. Sayangnya arah penelitian sangat terpusat ke isu perpajakan di Amerika Serikat. Kurangnya variasi dan inovasi dari isu yang diangkat, metodologi yang digunakan, dan area riset yang dipilih, serta tidak adanya pertumbuhan konsisten pada kuantitas paper pajak yang dipublikasikan tiap tahunnya menunjukkan paper pajak selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami stagnansi.

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Di samping cakupan periode waktu yang dianalisis terlalu pendek dan sedikitnya jurnal akuntansi terbaik yang menjadi bagian dari analisis, keterbatasan lainnya dari studi ini adalah tidak tercakupnya jurnal dari perpajakan (NTJ atau JATA) sebagai bagian dari analisis untuk menutupi kelemahan penggunaan top jurnal akuntansi sebagai sampel seperti yang

dicontohkan oleh Coyne et al. (2010). Keterbatasan-keterbatasan tersebut memperbesar kemungkinan penelitian ini kurang dapat merefleksikan fenomena perkembangan riset perpajakan dewasa ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hasil studi, diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan cakupan waktu yang lebih luas dan menggunakan jurnal perpajakan sebagai tambahan referensi di dalam menganalisis perkembangan riset perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Adhikari, Ajay, Tondkar, R.H., & Hora J.A. (2002). An analysis of international accounting research in Journal of International Accounting Auditing & Taxation: 1992–2001. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 11, 39–49.
- Biehl, M., Kim, H., & Wade, M. (2006). Relationships among the academic business disciplines: A multi-method citation analysis. *Omega*, 34, 359-371.
- Bonner, S.E., Hesford, J.W., Van der Stede, W.A., & Young, S.M. (2006). The most influential journals in academic accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 31, 663–685.
- Campenhout, G.V., & Caneghem, T.V. (2010). Article contribution and subsequent citation rates: Evidence from European Accounting Review. *European Accounting Review*, 19, 837–855.
- Cargile, B.R., & Bublitz, B. (1986). Factors contributing to published research by accounting faculties. *The Accounting Review*, 61, 158-178.
- Chan, K.C., Chan, K.C., Seow, G.S., & Tam, K. (2009). Ranking accounting journals using dissertation citation analysis: A research note. *Accounting, Organizations and Society*, 34, 875–885.
- Coyne, J.G., Summers, S.L., Williams, B., & Wood, D.A. (2010). Accounting program research rankings by topical area and methodology. *Accounting Education*, 25, 631-654.
- Dykxhoorn, H.J., & Sinning, K.E. (2010). A review and analysis of international accounting research in JIAAT: 2002–2010. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 19, 137–153.
- Englebrecht, T.D., Hanke, S.A., & Kuang, Y. (2008). An assessment of patterns of co-authorship for academic accountants within premier journals: Evidence from 1979–2004. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 24, 172–181.
- Falk, H. (1989). Contemporary Accounting Research: The first five years. *Contemporary Accounting Research*, 5, 816-826
- Glover, S.M., Prawitt, D.F., & Wood D.A. (2006). Publication records of faculty promoted at the top 75 accounting research programs. *Accounting Education*, 21, 195-218.
- Goode, R. (1997). The National Tax Journal in 1948-50 and 1994-96. *National Tax Journal*, 50, 707-718.
- Graham, J.R., Raedy, J.S., & Shackelford, D.A. (2012). Research in accounting for income taxes. *Journal of Accounting and Economics*, 53, 412–434.

- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.
- Hasselback, J. R. (2011). *A Directory of Accounting Faculty Academic Year 2011-2012*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
- Hasselback, J.R., & Reinstein, A. (1995). A Proposal for measuring scholarly productivity of accounting faculty. *Accounting Education*, 10, 1995.
- Hasselback, J.R., Reinstein, A., & Schwan, E.S. (2003). Prolific authors of accounting literature. *Advances in Accounting*, 20, 95–125.
- Hopwood, A.G., (2007). Whither Accounting Research?. *The Accounting Review*, 82, 1365-1374.
- Lindquist, T.M., & Smith, G. (2009). Journal of Management Accounting Research: Content and citation analysis of the first 20 years. *Journal of Management Accounting Research*, 21, 249-292.
- Lukka, K., & Kasanen, E. (1996). Is accounting a global or a local discipline? Evidence from major research journals. *Accounting, Organization and Society*, 21, 755-773.
- Moser, D.V. (2012). Is accounting research stagnant?. *Accounting Horizons*, 26, 845-850.
- Oler, D.K., Oler, M.J., & Skousen, C.J. (2010). Characterizing accounting research. *Accounting Horizons*, 24, 635-670.
- Pickerd, J., Stephens, N.M., Summers, S.L., & Wood, D.A. (2011). Individual accounting faculty research rankings by topical area and methodology. *Accounting Education*, 26, 471-505.
- Prather, J., & Rueschhoff, N. (1996). An analysis of international accounting research in U.S. academic accounting journals, 1980 through 1993. *Accounting Horizons*, 10, 1-17.
- Prather-Kinsey, J., & Rueschhoff, N. (1999). An analysis of the authorship of international accounting research in U.S. journals and AOS: 1980 through 1996. *The International Journal of Accounting*, 34, 261-282.
- Reinstein, A., & Calderon, T.G. (2006). Examining accounting departments' rankings of the quality of accounting journals. *Critical Perspectives on Accounting*, 17, 457–490.
- Reinstein, A., & Hasselback, J.R. (1997). A literature review of articles assessing the productivity of accounting faculty members. *Journal of Accounting Education*, 15, 425-455.
- Shackelford, D.A., & Shevlin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 31, 321–387.
- Shevlin, T. (1999). Research in taxation. *Accounting Horizons*, 13, 427-441.
- Zeff, S.A. (1996). A study of academic research journals in accounting. *Accounting Horizons*, 10, 158-177.

APPENDIX

Tabel 1: Definisi Topik Akuntansi

Topik	Definisi (meliputi)
Keuangan	OOS: isu pelaporan keuangan eksternal (termasuk analisis dan ramalan analisis), serta efek informasi akuntansi terhadap keputusan investasi pengguna eksternal di pasar modal.
	CSWW: akuntansi keuangan, pasar keuangan, dan <i>decision making</i> berdasarkan informasi akuntansi keuangan.
	F: isu pelaporan eksternal, isi dari informasi yang tersedia untuk publik, pilihan akuntansi, permasalahan informasi asimetris dan <i>adverse selection</i> dalam konteks <i>shareholders / bondholder / kontrak manajemen</i> dan pembagian resiko, dsb.
Manajerial	OOS: paper yang berhubungan dengan pelaporan dan evaluasi internal, penganggaran internal, dan <i>transfer pricing</i> , serta hubungan antara informasi akuntansi dengan pengguna internal.
	CSWW: isu terkait penganggaran, kompensasi, <i>decision making</i> di dalam enterprise, insentif, dan alokasi sumber daya di dalam enterprise.
	F: isu pelaporan internal, evaluasi kinerja, skema kompensasi dan isu keagenan dalam konteks <i>managerial contracting</i> perusahaan.
Audit	OOS: paper yang berhubungan dengan audit dan auditor (termasuk pengendalian internal atas pelaporan), serta fungsi audit, yang terletak di antara informasi akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan dengan pasar modal.
	CSWW: studi mengenai lingkungan audit (eksternal dan internal), <i>decision making</i> auditor, independensi auditor, efek audit di dalam proses pelaporan laporan keuangan, biaya audit.
	F: fungsi audit, pertimbangan profesional, standar audit, liabilitas profesional, resiko audit, hubungan auditor dan klien, dsb.
Perpajakan	OOS: isu pajak penghasilan Negara dan Negara bagian, perencanaan pajak, strategi pajak, dan dampak pajak terhadap pasar modal, serta hubungan antara informasi akuntansi dengan otoritas perpajakan, dan juga pasar modal.
	CSWW: isu terkait <i>decision making</i> pembayar pajak, alokasi pajak, perhitungan pajak, struktur transaksi akuntansi untuk mencapai <i>tax goals</i> , insentif pajak, dan reaksi pasar terhadap pengungkapan pajak.
	F: isu pajak pendapatan dan pajak lainnya, serta isu akuntansi terkait dengan insentif pajak.
Sistem Informasi	CSWW: isu terkait sistem dan pengguna sistem yang mengoleksi, menyimpan, dan menghasilkan informasi akuntansi. Riset mencakup ilmu perancangan, informasi <i>ontological</i> , <i>expert systems</i> , penjaminan proses, keamanan, pengendalian, <i>system usability</i> , dan kinerja sistem.
	F: manajemen data, sistem pelaporan internal, <i>artificial intelligence</i> , <i>expert systems</i> , dan <i>office automation</i> .
Nirlaba dan Pemerintahan	F: isu akuntansi dan audit yang berhubungan dengan organisasi nirlaba dan semua tingkatan organisasi pemerintahan.
Tatakelola Perusahaan	OOS: keseluruhan tatakelola perusahaan dan pengendalian (contoh: struktur dewan/ <i>board</i> , hak pemegang saham).

Keterangan: OOS = Oler et al., 2010; CSWW = Coyne et al., 2010; F = Falk, 1989.

Tabel 2: Distribusi Paper Berdasarkan Topik Akuntansi

Topik	2008		2009		2010		2011		2012		Rata-rata	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Keuangan	110	80.88%	101	73.19%	100	70.92%	111	76.55%	113	71.97%	107	74.70%
Manajerial	26	19.12%	29	21.01%	28	19.86%	17	11.72%	27	17.20%	25.4	17.78%
Audit	14	10.29%	20	14.49%	26	18.44%	19	13.10%	20	12.74%	19.8	13.81%
Perpajakan	9	6.62%	8	5.80%	11	7.80%	6	4.14%	15	9.55%	9.8	6.78%
IS	0	0.00%	0	0.00%	1	0.71%	1	0.69%	0	0.00%	0.4	0.28%
Nir/Pem	2	1.47%	1	0.72%	0	0.00%	4	2.76%	3	1.91%	2	1.37%
CG	11	8.09%	12	8.70%	15	10.64%	10	6.90%	14	8.92%	12.4	8.65%
Lainnya	2	1.47%	3	2.17%	2	1.42%	2	1.38%	3	1.91%	2.4	1.67%
Jml Paper	136		138		141		145		157		143.4	

Tabel 4: Klasifikasi Berdasarkan Area Riset

Tahun		2008		2009		2010		2011		2012		Jumlah	
		J. Paper	%	J. Paper	%	J. Paper	%	J. Paper	%	J. Paper	%	J. Paper	%
Shevlin (1999)	Riset kebijakan pajak	3	6.38%	1	2.13%	2	4.26%	0	0.00%	3	6.38%	9	19.15%
	Riset perencanaan pajak	6	12.77%	7	14.89%	7	14.89%	6	12.77%	10	21.28%	36	76.60%
	Riset kepatuhan pajak	0	0.00%	0	0.00%	1	2.13%	0	0.00%	1	2.13%	2	4.26%
Shackelford dan Shevlin (2001)	Trade off pajak dan non pajak	8	17.02%	5	10.64%	8	17.02%	2	4.26%	9	19.15%	32	68.09%
	Pajak dan harga aset	1	2.13%	2	4.26%	2	4.26%	3	6.38%	1	2.13%	9	19.15%
	Multijurisdictional	0	0.00%	1	2.13%	0	0.00%	1	2.13%	4	8.51%	6	12.77%
Hanlon dan Heitzman (2010)	peran informasi beban pajak penghasilan untuk akuntansi keuangan	4	8.51%	0	0.00%	2	4.26%	1	2.13%	2	4.26%	9	19.15%
	tax avoidance	1	2.13%	3	6.38%	4	8.51%	1	2.13%	8	17.02%	17	36.17%
	pengambilan keputusan perusahaan	3	6.38%	3	6.38%	2	4.26%	2	4.26%	3	6.38%	13	27.66%
	pajak dan asset pricing	1	2.13%	2	4.26%	2	4.26%	2	4.26%	1	2.13%	8	17.02%
Jumlah paper pajak		9		8		11*		6		15*			

Keterangan: 1) paper Hanlon dan Heitzman (2010) yang berjudul "A Review of Tax Research" dan paper Graham et al. (2012) yang berjudul "Research in Accounting for Income Taxes" dikeluarkan dari pengklasifikasian sehingga jumlah paper masing-masing metode tahun 2010 dan 2012 tidak sama dengan jumlah paper pajak tahun yang bersangkutan; 2) persentase berdasarkan jumlah seluruh paper pajak selama 5 tahun.

Tabel 3: Diagram Venn Antar Topik Akuntansi

Tahun	Keuangan, N&P, dan CG digabung	Keuangan, N&P, dan CG dipisah
2008	<p>n=136</p>	<p>n=113</p>
2009	<p>n=138</p>	<p>n=104</p>
2010	<p>n=141</p>	<p>n=104</p>
2011	<p>n=145</p>	<p>n=117</p>
2012	<p>n=157</p>	<p>n=117</p>

Tabel 5: Klasifikasi Paper Pajak Berdasarkan Metodologi

Tahun	Jurnal	Eksperimen	Analitik	Arc/emp	Survey	Review
2008	TAR	0	0	2	0	0
	JAE	0	0	7	0	0
	JAR	0	0	0	0	0
2009	TAR	0	0	5	0	0
	JAE	0	0	1	0	0
	JAR	0	0	2	0	0
2010	TAR	0	2	5	1	0
	JAE	0	0	2	0	1
	JAR	0	0	0	0	0
2011	TAR	0	0	4	0	0
	JAE	0	0	0	0	0
	JAR	0	0	1	1	0
2012	TAR	1	4	6	0	0
	JAE	0	0	1	0	1
	JAR	0	0	2	0	0
Total		1	6	38	2	2
%		2.04%	12.24%	77.55%	4.08%	4.08%

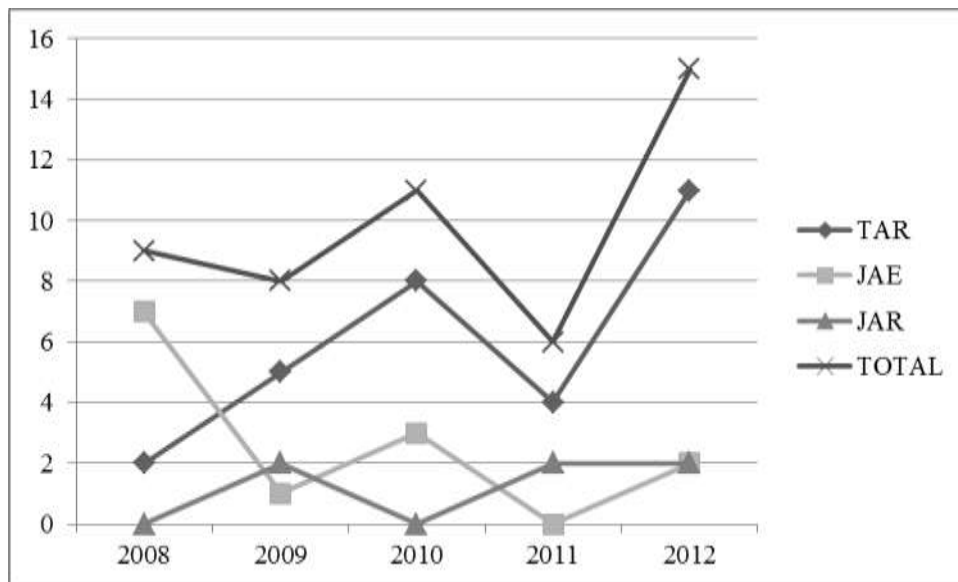
Tabel 6: Distribusi Paper Pajak Berdasarkan Asal Penulis

Tahun	Asal	U.S.	Non-U.S.	Co U.S.	Co Non-US.	Mix
2008	TAR	0	0	2	0	0
	JAE	1	0	6	0	0
	JAR	0	0	0	0	0
2009	TAR	1	0	4	0	0
	JAE	0	0	1	0	0
	JAR	0	0	2	0	0
2010	TAR	2	0	6	0	0
	JAE	0	0	2	1	0
	JAR	0	0	0	0	0
2011	TAR	1	0	2	1	0
	JAE	0	0	0	0	0
	JAR	0	0	2	0	0
2012	TAR	0	0	8	0	3
	JAE	0	0	2	0	0
	JAR	0	0	1	0	1
Total		5	0	38	2	4
%		10.20%	0.00%	77.55%	4.08%	8.16%

Tabel 7: Peringkat Institusi Berdasarkan Kontribusi Paper Pajak

No	Institusi	Status	J. Paper	No	Institusi	Status	J. Paper
1	University of Pennsylvania	Ph.D. granting	12	31	Gradient Analytics, Inc.	N/A	1
2	Dartmouth College	non-Ph.D granting	8	32	Harvard Business School	Ph.D. granting	1
3	The University of Iowa	Ph.D. granting	8	33	Idaho State University College of Business	non-Ph.D granting	1
4	Tilburg University	N/A	6	34	Indiana University	non-Ph.D granting	1
5	Duke University	Ph.D. granting	5	35	Louisiana State University	Ph.D. granting	1
6	National Bureau of Economic Research, Cambridge	N/A	5	36	Memorial University of Newfoundland	non-Ph.D granting	1
7	The University of North Carolina at Chapel Hill	Ph.D. granting	5	37	Oklahoma State University	Ph.D. granting	1
8	The University of Texas, Austin	Ph.D. granting	5	38	Prairie View A&M University	Ph.D. granting	1
9	University of Oregon	Ph.D. granting	5	39	Purdue University	Ph.D. granting	1
10	Massachusetts Institute of Technology	Ph.D. granting	4	40	Stanford University	Ph.D. granting	1
11	Texas A&M University, USA	Ph.D. granting	4	41	The Chinese University of Hong Kong	Ph.D. granting	1
12	University of Washington	Ph.D. granting	4	42	The Hong Kong Polytechnic University	Ph.D. granting	1
13	Baruch College-CUNY	Ph.D. granting	3	43	The Ohio State University	Ph.D. granting	1
14	Lingnan University	non-Ph.D granting	3	44	The University of Georgia	Ph.D. granting	1
15	University of Arkansas	Ph.D. granting	3	45	The University of Waterloo	Ph.D. granting	1
16	University of Michigan	Ph.D. granting	3	46	University of Arizona	Ph.D. granting	1
17	University of North Carolina, Chapel Hill	Ph.D. granting	3	47	University of California, Davis	Ph.D. granting	1
18	University of Toronto	non-Ph.D granting	3	48	University of California, Irvine	Ph.D. granting	1
19	Arizona State University	Ph.D. granting	2	49	University of California, Los Angeles	Ph.D. granting	1
20	Florida State University	Ph.D. granting	2	50	University of Connecticut	Ph.D. granting	1
21	George Mason University	non-Ph.D granting	2	51	University of Houston	Ph.D. granting	1
22	Michigan State University	Ph.D. granting	2	52	University of Notre Dame	non-Ph.D granting	1
23	University of Chicago	Ph.D. granting	2	53	University of Pittsburgh	Ph.D. granting	1
24	University of Illinois at Urbana-Champaign	Ph.D. granting	2	54	University of Rochester	Ph.D. granting	1
25	University of Virginia	non-Ph.D granting	2	55	University of Saskatchewan	non-Ph.D granting	1
26	Yale University School of Management	Ph.D. granting	2	56	University of Southern Maine	non-Ph.D granting	1
27	Brigham Young University	Ph.D. granting	1	57	University of Utah	Ph.D. granting	1
28	Carnegie Mellon University	Ph.D. granting	1	58	VU University	Ph.D. granting	1
29	College of William and Mary	non-Ph.D granting	1	59	Wuhan University	Ph.D. granting	1
30	Copenhagen Business School	N/A	1		Total		138

Grafik 1: Jumlah Paper Pajak Berdasarkan Judul Jurnal



Praktik Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno (Studi Etnoarkeologi)

I GUSTI AYU NYOMAN BUDIASIH*
Universitas Udayana

Abstrak: Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik akuntabilitas perpajakan di Indonesia khususnya pada jaman Bali kuno (IX-XV Masehi). Melalui studi etnoarkeologi dengan penggabungan data arkeologi dan etnografi, beberapa gambaran jelas tentang keberadaan praktik akuntabilitas pajak pada masa itu dapat ditelusuri. Praktik akuntabilitas perpajakan bisa dilihat dari peninggalan sejarah baik tertulis (prasasti), maupun bukan tulisan (relief, stupa, dan uang logam). Sejarah di Bali tidak banyak bisa diungkap karena budaya Bali yang sangat mengagungkan dan mengkramatkan prasasti tersebut sehingga sampai kini prasasti masih banyak tersimpan dan dipuja di Pura tempat prasasti ditemukan.

Praktik akuntabilitas perpajakan dalam riset ini mencakup aktivitas pertanggung jawaban pajak dari masyarakat terhadap pihak kerajaan. Akuntabilitas perpajakan telah dipahami pada masa itu dari segi pencatatan, pelaporan dan pertanggung jawaban pajaknya dengan model sederhana. Pembayaran pajak “rotting banyu”, semacam pajak bagi orang yang melakukan pengolahan sawah/irigasi (Subak) ditentukan sebesar 1 masaka. Berbagai jenis kebijakan pajak diberikan pihak Raja bagi golongan masyarakat tertentu dalam meringankan beban rakyatnya. Selain pajak atas tanah baik secara langsung dan hasil buminya maupun pajak yang dikenakan pada para pengrajin tembaga (“tikasan ing pande wsi, pande mas, macaka 1 ku 1 ing sawanguna”), di bidang kesenian juga dikenakan pajak.

Berdasarkan beberapa prasasti diungkapkan bahwa pada jaman Bali kuno telah dikenal sistem pajak dimana masyarakat dipungut pajak oleh kerajaan melalui pemungut pajak (Sang mangnalila drbya haji) sesuai aturan yang berlaku berdasarkan perhitungan tertentu. Selain itu ada daerah tertentu (Swatantra) yang dibebaskan dalam pembayaran pajak (Sima) karena sesuatu hal. Pencatatan berbagai jenis pajak yang ditetapkan oleh kerajaan hingga pelaporan dan pertanggung jawaban oleh bendahara kerajaan pada Raja telah dilakukan walaupun dengan cara yang sangat sederhana.

Kata Kunci: Akuntabilitas perpajakan, Sima, Etnoarkeologi

* Corresponding author: iganbudiasih@yahoo.com

1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dan praktik industri negara maju menjadi perhatian utama peneliti akuntansi saat ini. Hal tersebut dijadikan sebagai tolok ukur perkembangan akuntansi di masa depan, serta mengabaikan fakta bahwa akuntansi sebenarnya telah terjadi di masa lalu dengan konteks sosialnya pada masa itu. Sukoharsono (1995) menunjukkan bahwa akuntansi yang muncul di masyarakat, bukan hanya karena adanya perkembangan ekonomi dan praktik industri, namun lingkungan budaya dan agama juga berpengaruh. Akuntansi dapat memberikan suatu makna berarti apabila tidak terlepas dari pembentukan akuntansi di masa lampau dengan realitas organisasi dan sosial (Hopwood, 1987), serta memiliki makna yang jelas apabila akuntansi ditelaah dalam lingkup politik (Jaruga, 1988), ekonomi dan sosial (Burchell, Clubb dan Hopwood, 1985; Hopwood, 1987) serta budaya masyarakatnya (Miller dan Napier, 1993) di mana akuntansi tersebut dipraktikkan. Praktik-praktik akuntansi di masa lampau bukan hanya semata-mata berperan dalam menentukan praktik akuntansi tertentu pada masa itu, namun memiliki peranan cukup penting dalam memengaruhi pengambilan keputusan akuntansi dari masa kini ke masa mendatang baik dalam hal teori maupun praktiknya, serta berfungsi sebagai kesadaran tentang bagaimana masa lalu dapat digunakan untuk memengaruhi transisi tanggung jawab etis dari masa kini ke masa depan (Young dan Mouck, 2006).

Manusia memiliki perkembangan kehidupan sampai akhirnya menjadi manusia modern seperti sekarang ini tentunya berasal dari sejarah kehidupan masa lampau. Walaupun merupakan sebuah sejarah, ada baiknya perlu menengok ke belakang dan mengetahui apa yang terjadi pada masa itu sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Seperti halnya sejarah nasional Indonesia yang terbagi atas beberapa jaman (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993), yaitu jaman prasejarah (sebelum Masehi, selanjutnya disingkat M),

jaman kuno (awal M-1500), jaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (1500-1800), abad kesembilanbelas (1800-1900), jaman kebangkitan nasional dan masa akhir Hindia Belanda (1900-1942), jaman Jepang dan Republik Indonesia (1942-1984).

Jaman kuno sebagai tonggak awal sejarah di Indonesia merupakan perkembangan awal dari berakhirnya jaman prasejarah atau jaman batu. Bukti sejarah hanya bisa dikaji kembali berdasarkan data-data sejarah baik tertulis seperti prasasti-prasasti maupun bukan dalam bentuk tulisan tapi berupa benda-benda sejarah seperti relief, candi, stupa, nekara perunggu, dan mata uang logam emas, perak maupun tembaga. Apabila di suatu daerah sedikit atau tidak didapatkan sama sekali sumber-sumber sejarah terutama yang tertulis, maka historiografinya tidak banyak bisa diketahui, karena prasasti (Suarbhawa, 2009) merupakan salah satu sumber tertulis berkualitas sangat tinggi untuk merekonstruksi sejarah kuno karena dalam isinya dapat memberikan gambaran tentang berbagai hal yang sejaman dengan penulisan prasasti itu.

Bali sebagai bagian dari kepulauan Indonesia juga perlu mendapat perhatian walau letak pulau Bali yang dianggap kurang penting kalau dilihat dalam kitab-kitab sejarah dinasti Cina maupun berita dari bangsa asing lainnya (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993). Pada jaman kuno khususnya di Bali atau sering disebut jaman Bali kuno memiliki perkembangan akuntansi yang dapat dilihat dari segi pertumbuhan perekonomiannya saat itu. Penggunaan berbagai bahasa, huruf dan angka menggambarkan bahwa akuntansi itu telah ada saat itu karena dasar akuntansi adalah adanya sarana formulir yang berisi tentang angka, huruf dan bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan transaksi.

Akuntansi yang sudah tumbuh pesat sampai saat ini adalah merupakan perkembangan dari sejarah akuntansi di Indonesia yaitu pada jaman kuno. Sejak jaman prasejarahpun sebenarnya akuntansi itu sudah dikenal walaupun sangatlah sederhana, seperti perhitungan

yang menggunakan taring binatang, kerang, dan manik-manik sebagai alat tukar (Suarbhawa, 2009) selain dengan pertukaran barang dengan barang yang dikenal dengan barter. Perkembangan angka Hindu-Arab mempermudah timbulnya akuntansi modern seperti sekarang ini. Akuntansi dalam pemakaian angka Hindu-Arab yang dibawa oleh muslim Spanyol ke Eropa Barat ketika pelajar Eropa mengadopsi matematika muslim. Perkembangan angka Hindu-Arab ini di Eropa Barat kemudian menyebar ke seluruh dunia (Sukoharsono, 2005). Hal ini juga memengaruhi perkembangan akuntansi ke Indonesia termasuk pulau Bali. Hubungan perdagangan yang dilakukan baik antar daerah maupun pulau, adanya pasar beserta alat pertukaran yang digunakan dan komoditas yang diperdagangkan, ketentuan pajak yang dikenakan oleh penguasa pada masa itu, memperlihatkan bahwa pada jaman itu akuntansi telah dikenal masyarakat Bali kuno walaupun masih sangat sederhana.

Praktik akuntabilitas perpajakan pada jaman Bali kuno dianggap penting karena dalam setiap prasasti yang dikeluarkan masa itu menyebutkan tentang perpajakan yang berhubungan dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Adanya berbagai pencatatan dan pelaporan serta pertanggung jawaban perpajakan dari masyarakat kepada kerajaan dan sebaliknya yang dapat diukur dengan nilai uang pada masa itu mengindikasikan bahwa aktivitas tersebut mengandung nilai akuntansi. Praktik akuntabilitas pajak yang terbentuk pada jaman Bali kuno dapat digambarkan dari sistem pemungutan pajaknya berdasarkan atas ketentuan jenis dan tarif pajak yang sesuai dengan aturan kerajaan pada jaman itu. Penentuan ini pastilah memerlukan suatu perhitungan dan administrasi yang tidak sederhana, yang sebenarnya merupakan suatu dasar dari akuntansi.

Berdasarkan hal itu, diperlukan eksplorasi secara mendalam melalui studi etnoarkeologi, yaitu perpaduan antara metoda etnografi dan arkeologi. Penggunaan etnoarkeologi dianggap paling tepat karena meninjau tentang sejarah diperlukan studi

arkeologi untuk mengupasnya, sedangkan sejarah di Bali khususnya banyak yang masih terbawa budayanya hingga saat ini sehingga diperlukan metoda etnografi untuk menelusurinya. Jadi dengan studi etnoarkeologi diharapkan beberapa gambaran jelas tentang keberadaan praktik akuntabilitas perpajakan dapat ditelusuri.

1.2 Motivasi Riset

Riset-riset sejarah akuntansi berbagai negara di dunia makin memperlihatkan perkembangannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Riset sejarah akuntansi di Amerika (Wootton dan Kemmerer, 2007), Italia (Lee, 2002), Inggris (Coombs dan Edwards, 1994), Prancis (Lacombe dan Saboly, 1999), Jepang (Someya, 1988), Peru (Jacobsen, 1964), Mesir (Scorgie, 1994), Cina (Philip Fu, 1971) dan berbagai negara lainnya menunjukkan bahwa begitu bermanfaatnya riset di lingkup ini yang diperlukan untuk perkembangan riset akuntansi di masa mendatang.

Riset mengenai sejarah akuntansi di Indonesia sangat sedikit dilakukan, sehingga diperlukan riset di lingkup ini agar dapat memberikan suatu pemaknaan jelas atas pemikiran awal tentang akuntansi yang nantinya dapat berguna sebagai perintis jalan ke perkembangan riset akuntansi di masa depan. Hal inilah sebagai motivasi untuk meneliti tentang praktik akuntabilitas perpajakan di Indonesia khususnya di Bali yaitu pada jaman Bali kuno melalui studi etnoarkeologi.

1.3 Pertanyaan Riset

Pada masa Bali kuno, perkembangan praktik akuntabilitas perpajakannya dapat dikaji melalui penjelasan berbagai prasasti, kajian tertulis, benda peninggalan kuno maupun dari jejak budayanya yang berhubungan dengan akuntansi. Praktik akuntabilitas perpajakan yang dieksplorasi secara mendalam dalam riset ini menggunakan pendekatan etnoarkeologi

sehingga pertanyaan penelitiannya adalah bagaimanakah praktik akuntabilitas perpajakan pada masa Bali kuno melalui pendekatan etnoarkeologi?

1.4 Tujuan Riset

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik akuntabilitas perpajakan yang terjadi pada masa Bali kuno dengan menggunakan pendekatan etnoarkeologi. Praktik akuntabilitas perpajakan pada masa Bali kuno dapat dikaji dan ditelusuri dari ditemukannya berbagai prasasti pada masa itu, catatan-catatan sejarah dan berbagai benda peninggalan sejarah yang mengungkapkan tentang hal tersebut. Selain itu dengan menggunakan data dari hasil riset lapangan mengenai jejak budaya praktik perpajakan di situs terkait dapat lebih memperdalam pemahaman terhadap praktik akuntabilitas perpajakan masyarakatnya.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis riset kualitatif yang menggunakan metode etnoarkeologi dalam menganalisis permasalahan yang diajukan. Metode etnoarkeologi ini biasanya digunakan untuk mengeksplorasi penggunaan benda-benda kuno seperti tembikar (Mundardjito, 1981). Riset ini menggunakan metode etnoarkeologi agar dapat memahami praktik akuntabilitas perpajakan yang diterapkan di masa lalu. Hal ini dilakukan karena praktik akuntansi masa lalu di berbagai daerah di Indonesia perlu dikaji kembali untuk memperoleh suatu gambaran jelas mengenai dasar perkembangan akuntansi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai landasan perkembangan akuntansi di masa mendatang.

Jadi untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas mengenai praktik akuntabilitas perpajakan di Indonesia pada masa lalu, maka diperlukan riset-riset akuntansi di bidang ini untuk berbagai daerah di Indonesia yang salah satunya adalah Bali. Apabila meninjau sejarah Bali di masa lalu, maka jaman Bali kuno (IX-XV M) adalah masa yang perlu dikaji karena merupakan masa kerajaan di Bali dengan Raja-Rajanya yang termasyur.

2.1 **Prosedur Pengumpulan Data Arkeologi dan Etnografi**

2.1.1 **Penentuan Konteks, Situs dan Informan Penelitian**

Penentuan konteks dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan representasi data yang bertujuan sebagai generalisasi temuan, tetapi dimaksudkan untuk menghasilkan deskripsi temuan yang luas dan mendalam mengenai suatu fenomena yaitu konstruksi praktik akuntabilitas pajak pada masa Bali kuno. Penentuan konteks dilakukan terhadap beberapa prasasti dan catatan-catatan sejarah kuno sebagai bukti tertulis yang dapat mendukung gambaran terhadap fenomena tersebut, benda-benda peninggalan sejarah pada masa itu serta jejak budaya masa lalu yang masih tersisa pada masa kini di situs yang sama.

Seluruh data baik data arkeologi maupun data etnografinya diperoleh dari situs penelitian yang dilakukan di desa Bedahulu sebagai situs kerajaan Bali kuno dan di desa Trunyan. Desa trunyan merupakan salah satu desa *Bali Mula* atau *Bali Aga* atau masyarakat Bali asli (*Mula*) yang tidak mau menerima pengaruh kekuasaan dari kerajaan Majapahit pada saat berhasil menguasai Bali, sehingga saat itu masyarakatnya terdesak dan tinggal di pegunungan (*Aga*). Masyarakat *Bali Aga* itu sampai sekarang masih ada dan tetap mempertahankan budaya aslinya walaupun begitu banyak budaya luar yang ingin masuk untuk memengaruhinya.

Informan penelitian ini terdiri dari para Sejarawan kuno, dan Arkeolog seperti tim ekskavasi dari BALAR Denpasar. Selain itu juga dari ahli epigrafi (Epigrafer) yaitu mereka yang dapat membaca secara baik atas bukti tertulis berupa prasasti.

2.1.2 **Teknik Pengumpulan Data Arkeologi dan Etnografi**

Dalam rangka menghasilkan konstruksi praktik akuntabilitas perpajakan pada masa Bali kuno berdasarkan serpihan-serpihan data yang belum memiliki konteks jelas, maka diperlukan teknik-teknik dalam pengumpulan datanya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan:

2.1.2.1 Wawancara Mendalam dengan Sejarawan Kuno, Arkeolog dan Epigrafer

Wawancara secara mendalam ini dilakukan terhadap para Sejarawan kuno yang memang mengetahui dan paham betul dengan berbagai kehidupan sejarah pada masa Bali kuno, para Arkeolog yang memiliki segudang pengalaman dalam terjun ke situs-situs dimana prasasti ataupun benda-benda sejarah lainnya ditemukan. Wawancara terhadap Epigrafer dalam keahliannya membaca prasasti berhubungan dengan fenomena yang diteliti karena prasasti-prasasti tersebut menggunakan bahasa maupun huruf yang tidak dikenal secara umum tapi dapat dibaca oleh mereka yang telah memiliki keahlian akan hal tersebut.

Pada penelusuran jejak budaya masa lalu di desa Bedahulu sebagai situs kerajaan Bali kuno dan desa Trunyan sebagai situs desa *Bali Aga*. Hal ini untuk memperoleh data etnografi dari jejak budaya masyarakat pada masa Bali kuno yang masih tersisa dan terbawa sampai saat ini di situs tersebut.

2.2.2.2 Pengamatan Langsung ke BALAR Denpasar dan Museum Purbakala

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan para Arkeolog dan pengamatan terhadap bukti-bukti fisik sejarah atau artefak yang didapatkan berhubungan dengan praktik akuntabilitas perpajakan yang terjadi pada masa Bali kuno. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung ke Balai Arkeologi Denpasar (BALAR) maupun ke Museum Purbakala Gianyar.

2.2.2.3 Observasi Berpartisipasi di Situs Terkait

Teknik pengumpulan data ini digunakan agar dapat mengeksplorasi lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan cara ikut serta dalam kegiatan ekskavasi ke situs di mana prasasti dan benda bersejarah ditemukan. Juga ikut serta dalam acara penurunan prasasti yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat dimana prasasti itu disimpan.

Berbaaur dengan masyarakat juga dilakukan di situs kerajaan Bali kuno (desa Bedahulu Gianyar) dan desa Trunyan yang termasuk salah satu desa *Bali Aga*. Cara ini juga merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi berpartisipasi yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami kehidupan masyarakat pada masa itu yang masih terbawa sampai saat ini di situs tersebut.

2.2 Analisis Data dan Penjelasan Kontekstual

Data-data yang diperoleh dari sumber data baik berupa data dokumentasi, hasil wawancara mendalam atau dialog, observasi ke situs terkait, serta berbagai artefak fisik lainnya haruslah dijelaskan secara kontekstual agar selanjutnya lebih memudahkan dalam penginterpretasian data. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh temuan berharga tentang praktik akuntabilitas perpajakan pada masa itu yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan riset-riset akuntansi dan pengambilan keputusan mengenai praktik akuntabilitas pajak di masa mendatang.

Data yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis dan dibahas secara lebih mendalam agar memperoleh suatu pemahaman atau interpretasi dan pemaknaan terhadapnya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis kualitatif dengan pisau analisis etnoarkeologi. Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, agar memperoleh suatu pemahaman lebih mendalam dan komprehensif maka diperlukan suatu penginterpretasian terhadap data yang ditemukan.

Interpretasi dilakukan terhadap data arkeologi dan data etnografi. Interpretasi atas arkeologi (artefak) dan etnografi (realitas) tersebut terhadap praktik akuntabilitas perpajakannya kemudian diinterpretasikan kembali oleh peneliti untuk memperoleh temuan praktik akuntabilitas perpajakan pada jaman Bali kuno.

2.3 Model Penelitian

Gambaran mengenai metode penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya digunakan dalam mendesain riset ini. Adapun desain penelitiannya dirangkum dalam model penelitian seperti terlihat pada Lampiran 1.

Model penelitian ini menggunakan pendekatan etnoarkeologi sebagai pisau analisisnya dalam menginterpretasikan praktik akuntabilitas perpajakan pada masa Bali kuno. Oleh karena mengupas tentang kejadian atau sejarah masa lalu maka digunakan data arkeologi atau artefak baik yang tertulis berupa prasasti-prasasti serta kajian sejarah, dan tidak tertulis berupa benda-benda peninggalan kuno. Data arkeologi ini diperoleh dari teknik pengumpulan data baik melalui pengamatan secara langsung ke BALAR Denpasar dan Museum Purbakala Gianyar, pendokumentasian atas data yang diperoleh, maupun melalui wawancara mendalam dengan para Sejarawan kuno, para Arkeolog serta Epigrafer.

Berdasarkan pengumpulan data arkeologi ini menghasilkan interpretasi atas artefak terhadap praktik akuntabilitas perpajakan yang diteliti. Oleh karena data arkeologi hanya mampu untuk menganalisis data secara teknik dan kontekstualnya saja, maka diperlukan data tambahan yang mampu untuk mengeksplor secara mendalam masalah arkeologi secara eksplanatif yaitu dengan menggunakan data etnografi. Data etnografi diperoleh dengan penelusuran jejak budaya masa lalu yang masih tersisa dan terbawa sampai saat ini di situs terkait dengan cara terjun langsung dan beradaptasi dengan masyarakat desa Bedahulu sebagai situs kerajaan Bali kuno, dan desa Trunyan sebagai situs desa *Bali Aga* yang memiliki budaya masa lalu yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Data etnografi ini menghasilkan interpretasi atas realitas atau masyarakat terhadap praktik akuntabilitas perpajakan yang diteliti. Interpretasi atas artefak dan realitas kemudian diinterpretasikan kembali oleh penulis sehingga menghasilkan interpretasi praktik akuntabilitas perpajakan pada masa itu. Hasil interpretasi dari peneliti kemudian

dikembalikan lagi kepada para informan maupun ke sumber data lainnya untuk mengetahui dan menguji kebenaran hasil interpretasi dari penulis yang disebut sebagai triangulasi. Triangulasi di sini merupakan cara pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk memperoleh kebenaran informasi yang terkumpul.

3. PEMBAHASAN

Praktik akuntabilitas perpajakan sebagai salah satu bentuk praktik akuntansi pada jaman Bali kuno yang terjadi dari abad IX–XV M dapat dikaji dan telusuri dari ditemukannya berbagai prasasti yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Bali kuno (Lampiran 2) pada masa itu yang mengungkapkan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik maupun budaya masyarakat setempat yang berkaitan dengan perpajakan. Hal ini disebabkan karena prasasti merupakan salah satu bukti sejarah yang bisa digunakan untuk mengungkap segala kejadian yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat pada jaman dibuatnya prasasti tersebut (Suarbhawa, 2009).

3.1 Pajak: Pendapatan Terbesar Kerajaan

Pajak sebagai iuran yang dipungut kerajaan kepada rakyatnya pada jaman Bali kuno ternyata sudah amat dikenal, karena banyak diungkapkan dalam berbagai catatan sejarah dan prasasti yang dibuat pada masa itu. Seorang Raja di Bali oleh rakyatnya biasanya dianggap sebagai titisan Dewa yang ada di dunia sebagai penguasa tertinggi kerajaan pada masa itu yang nantinya dapat mensejahterakan rakyat. Jadi Raja dianggap sebagai pemilik semua tanah yang ada sedangkan rakyat sebagai penggarap atau pekerjanya, sehingga Raja merasa berhak untuk memperoleh sebagian dari hasil pengolahan tanahnya. Hasil pengolahan tanah tersebut oleh rakyat harus disetorkan kepada Raja melalui pembayaran pajak, sehingga pajak merupakan pendapatan bagi kerajaan yang nantinya digunakan sebagai anggaran belanja

untuk membiayai seluruh pengeluaran kerajaan dan pengeluaran lainnya terutama untuk pembangunan infrastruktur di masyarakat.

Prasasti yang dikeluarkan Raja Ragajaya dijelaskan bahwa penduduk yang mengerjakan tanah *laba pura* milik Raja haruslah menyerahkan sebagian dari hasil tanahnya itu. Selain itu mereka juga harus menyerahkan satu pikul bawang merah dan satu pikul kasumba setiap tanggal 12 bulan Asuji (September-Oktober), kalau tidak akan dikenai denda lalai (*pramanten*) sebesar 1 ku dan selanjutnya tidak akan dikenakan segala macam pajak (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993).

Disebabkan karena Raja dianggap sebagai pemilik tanah dan rakyat sebagai penggarapnya, maka sudah sewajarnya Raja berhak untuk mengenakan pembayaran pajak atas tanah yang dikelola oleh rakyatnya. Rakyat berkewajiban untuk menyetorkan ke kas kerajaan sebagian dari hasil pengelolaan tanah atau segala kegiatan yang dilakukan di atasnya, baik tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan pertunjukan kesenian maupun kegiatan lainnya. Kewajiban membayar pajak dari rakyat kepada Rajanya menggambarkan adanya konsekuensi hubungan antara Raja dengan rakyatnya. Jadi pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi kerajaan pada masa itu di samping pendapatan lainnya berupa upeti dari Raja bawahan atau daerah bawahan lainnya maupun denda yang dikenakan karena adanya putusan peradilan. Pajak dikatakan pendapatan terbesar kerajaan karena dapat dilihat dari banyaknya jenis pajak yang dipungut, ruang lingkup pungutan pajaknya meliputi tingkat desa sampai di tingkat pusat, maupun dilihat dari objek pajak yang dikenakan.

Rakyat yang menggunakan dan mengelola tanah milik Raja untuk dapat memberikan suatu hasil, maka wajib untuk menyetorkan ke kas kerajaan atas pembagian hasil pengelolaan tanahnya dengan membayar sejumlah uang emas, perak ataupun uang kepeng Cina sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan kerajaan. Kas yang berasal dari penyetoran pajak

tersebut nantinya dipergunakan kembali oleh Raja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya seperti dalam hal perbaikan dan pembuatan bangunan-bangunan suci, perbaikan sistem pengairan sawah (*kasuwakan* atau *subak*) maupun untuk membiayai segala keperluan kerajaan dan lain sebagainya.

Selain pajak, upeti dari rakyat atau Raja bawahan maupun mereka yang menyatakan bentuk kesetiannya dengan menghaturkan upeti pada Raja, juga merupakan salah satu pendapatan cukup penting bagi kerajaan. Bentuk pungutan yang berasal dari upeti biasanya jumlahnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Namun demikian, karena merupakan kewajiban dan wujud kesetiaan rakyat kepada Rajanya maka upeti ini juga menjadi penerimaan kerajaan yang perlu mendapat perhatian. Pendapatan kerajaan lainnya yaitu berasal dari denda karena putusan pengadilan. Denda berasal dari tindakan pelanggaran yang dijatuhkan pada masa itu biasanya dapat digantikan dengan membayar sejumlah uang (emas, perak atau kepeng Cina) disesuaikan dengan berat ringannya kasus pelanggaran yang dihadapi. Selain itu pendapatan kerajaan lainnya berasal dari hasil transaksi jual beli dengan masyarakat, seperti penjualan ternak, pelepasan aset berupa penjualan tanah dan sebagainya.

Jadi dapat diambil suatu simpulan bahwa Raja sebagai penguasa tertinggi kerajaan pada masa itu sangatlah menggantungkan hidup kerajaannya dari hasil pungutan pajak dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari pajak digunakan sebagai anggaran belanja kerajaan untuk membiayai segala jenis pengeluaran kerajaan, seperti: biaya pegawai kerajaan, segala keperluan keluarga Raja, biaya pendirian bangunan-bangunan suci (Pura), berbagai upacara keagamaan maupun untuk keperluan kerajaan lainnya. Demikian besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan kerajaan tidaklah mencukupi bila hanya bersumber dari pajak saja walaupun pajak sebagai pendapatan terbesar kerajaan. Jadi dalam hal ini diperlukan sumber pendapatan lainnya untuk dapat menutupi segala pengeluaran kerajaan seperti pendapatan

dari perkara pengadilan berupa denda, pemberian upeti dari rakyat atau daerah bawahannya, maupun berasal dari transaksi jual beli dengan masyarakat.

Disebabkan karena pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi kerajaan, maka diperlukan suatu mekanisme pajak secara jelas dan teratur agar tujuan pemungutan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk membiayai segala pembelanjaan kerajaan maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara maksimal. Mekanisme atau pengaturan pajak pada masa itu biasanya dibuat sesuai dengan aturan-aturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Raja.

3.2 Mekanisme Pajak

Mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan pada jaman Bali kuno telah diatur sedemikian rupa baik mengenai waktu pembayarannya, besarnya pungutan pajak dan batasan pembebasan pengenaan pajak maupun para petugas pemungut pajak dan sistem pemungutannya. Pengaturan waktu penyetoran pajak disebabkan karena adanya perbedaan waktu hasil panen atau intensitas kegiatan yang dilakukan sehingga pembayaran pajaknya pun dilakukan berbeda-beda disesuaikan dengan jenis pengenaan pajaknya. Demikian juga besarnya pungutan pajak yang dikenakan tergantung dari jenis pajaknya, serta adanya pembatasan pengenaan pajak pada suatu daerah tertentu (*swatantra*) maupun kegiatan atau keahlian tertentu yang dibebaskan pembayaran pajak. Selain membahas mengenai waktu pembayaran pajak dan besarnya pungutan pajak, mekanisme pemungutan pajak juga selalu berhubungan dengan mereka yang bertugas sebagai pemungut pajak (*Sang mangnalila drbya haji*) dan sistem pemungutan pajaknya dari rakyat sampai akhirnya diterima oleh Raja.

Waktu pembayaran atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak biasanya berbeda-beda tergantung dari jenis pajak yang dipungut. Ada pajak yang disetorkan setiap bulan, biasanya disebabkan karena hasil produksinya tidak tergantung pada musim maupun panen, seperti pajak yang dikenakan bagi para pembuat garam, pembuat

anyaman, dan pekerja kerajinan tangan lainnya. Ada juga pajak dipungut sekali dalam setahun, biasanya dilakukan untuk jenis pajak hasil bumi, tanah pertanian, perikanan maupun peternakan, seperti setiap bulan *Phalguna* (sekitar bulan Pebruari-Maret), bulan *Asadha* (Juni-Juli), bulan *Bhadrawada* (Agustus-September), atau bulan *Asuji* (September-Oktober). Jadi dapat dikatakan bahwa jangka waktu penentuan pembayaran pajak pada masa itu tergantung dari jenis pajak yang dipungut.

Mekanisme pengaturan pajak bagi daerah atau orang yang dibebaskan pengenaan pajak karena sesuatu hal juga sudah diatur sedemikian rupa. Seperti terungkap pada prasasti Manik Liu A tahun 955 M yang dikeluarkan oleh Raja Tabanendra Warmadewa (Goris, 1954: 74):

".....anugrahan sang ratu cri haji (taba) nendra warmmadewa, me sang ratu luhur, cri subhadrika da (r) mmadewi umanugrahen samgat juru mangjahit kajang, makadanang balicak, turut (anak) ya bandat sang marumah di pakuwwan me rumah di talun, tani kawakaten tarub blindarah...me tani kawakaten tikasan di pasar di pandhari....."

Artinya:

".....anugerah dari sang Ratu Sri Haji Tabanendra Warmmadewa dan sang rat luhur Sri Subradika darmmadewi menganugerahi ahli pembuat baju kebesaran Raja...dan seluruh karyawannya yang diam di Pakuwwan dan Talun...dibebaskan pembayaran pajak pasar di Pandhar....."

Prasasti itu menyebutkan bahwa Raja membebaskan mereka yang menjabat sebagai *"Samgat juru mangjahit kajang"* atau jabatan *Samgat* yang diduduki oleh seorang ahli dalam urusan pembuatan *kajang* atau tekstil serta karyawan-karyawannya (*bandat*) yang berdiam di desa Pakuwwan dan Talun untuk tidak diwajibkan melakukan kerja bakti atau gotong royong dan

membebaskannya dari pembayaran pajak-pajak tertentu seperti pajak jual beli peternakan kuda, dan tidak perlu membayar cukai pasar di Pandhar.

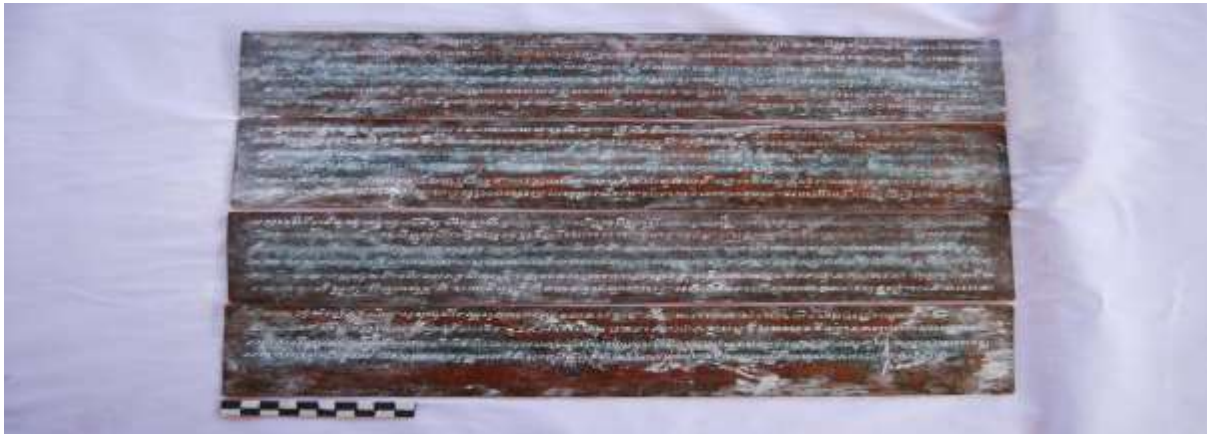
Selain itu dalam prasasti Batuan (Gambar 3.1) dikeluarkan oleh Raja Marakata putra dari Raja Udayana tahun 1022 M disebutkan mengenai kelompok pekerja dikenal dengan sebutan “*pangiket, mangnila, pamangkudu dan acadar*”, yaitu mereka yang memiliki keahlian sebagai penenun ikat, pencelup warna biru, pencelup warna merah dan pembuat cadar dibebaskan dalam pembayaran pajak pembelian bahannya karena Raja menginginkan produksi terhadap pertenunan dan sejenisnya lebih banyak berproduksi dan tidak terhalangi oleh ketidakmampuan penduduk membeli bahan karena pembayaran pajak pembelian bahannya.

“.....pangiket, mangnila, pamangkudu, acadar mwan tan kna pinta palaku mangira bahaning.....”

Artinya:

“.....pembuat tenun ikat, pencelup warna biru, pencelup warna merah, pembuat cadar juga tidak dikenakan pajak pembelian bahan.....”

Gambar 3.1 Prasasti Batuan tahun 1022 M



Bagi daerah yang dibebaskan untuk pembayaran pajak karena tugas tertentu yang diembannya juga terekam dalam beberapa prasasti. Mengenai daerah-daerah tersebut, ada prasasti menyebutkan dengan istilah "sima" atau daerah "swatantra" merupakan daerah perdikan yang bertugas memelihara bangunan suci di daerah itu. Raja Udayana membuat keputusan mengenai penetapan sebuah desa atau daerah menjadi *swatantra* atau daerah perdikan yang keberadaan tanahnya dilindungi oleh kerajaan dan dibebaskan dalam segala bentuk pemungutan pajak. Raja Udayana memberikan kebebasan untuk tidak membayar pajak bagi daerah *swatantra* karena tugas penting yang diemban oleh daerah tersebut seperti terlihat pada prasasti Sembiran AII tahun 975 M (Goris, 1954: 78):

".....kunang yanada durbalan sanghyang paryyangan, me pandem, pancuran, pasibwan, prasada...pahurupangna banwa di julah, di indrapura, buwundalm, hiliran....."

Artinya:

".....bagi penduduk yang bertugas memelihara bangunan suci pemujaaan Sang Hyang Paryyangan, memelihara kuburan, pancuran, permandian, candi...diperbaiki oleh desa Julah, Indrapura, Bondalem, Hiliran....."

Prasasti itu menyebutkan bahwa desa Julah, Indrapura, Bondalem dan desa sekitarnya mempunyai tugas memelihara kerusakan kuburan (*mepandem*), candi (prasada), pancuran dan pemandian, jalan raya serta bangunan suci *Sanghyang Parayyanan*. Oleh karena itu penduduk desa tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak, termasuk pajak yang harus diserahkan pada Raja. Namun, apabila ada kerusakan pada kuil-kuil, pancuran dan sebagainya harus diperbaiki oleh desa bersangkutan.

Sebagai perbandingan juga dapat dilihat pada prasasti Tengkulak A tahun 1023 M (Goris, 1954) dikeluarkan oleh Raja Marakata putra Raja Udayana:

“.....sambandha ni panambahnya, majar an mula kinon haji dewata sang lumah ring air wka sajalu stri, manganwaya ri sanghyang katyagan ing pakrisan mangaran ring amarawati...yata karananya tan pakmitan prasasti...irikanang karaman I songan tambahan sapanambahan, inubhaya sanmata sapanambahnya.....”

Artinya:

“.....sebab mereka menghadap, bahwa asal mula perintah Raja dewata suami istri yang dicandikan di Air Wka, berkaitan dengan Sanghyang Katyagan di Pakerisan bernama Amarawati...itulah sebabnya tidak memiliki prasasti...kepada penduduk Songan Tambahan semuanya, dikabulkan permintaannya.....”

Prasasti tersebut menyatakan bahwa wakil-wakil desa Songan Tambahan menyampaikan kepada Raja Marakata bahwa sejak masa pemerintahan Raja Udayana dan permaisurinya Gunapriyadharmapatni, mereka ditugaskan untuk menyelenggarakan atau memelihara asrama pendeta (*katyagan*) Amarawati di tepi sungai Pakerisan. Sejak tugas tersebut diturunkan,

penduduk desa Songan belum pernah diberikan prasasti yang memuat rincian kewajiban-kewajiban serta hak mereka. Supaya segala sesuatunya menjadi jelas, dan juga mereka dapat meneruskan pengabdianya kepada almarhum Raja Udayana dan Ratu Gunapriyadharmapatni, begitu pula kepada Raja yang tengah memerintah, maka mereka sebagai wakil desa Songan memohon kepada Raja Marakata agar berkenan menganugerahkan prasasti kepada mereka. Rajapun akhirnya memenuhi permohonan penduduk desa itu. Namun demikian, dalam prasasti itu juga ditegaskan bahwa penduduk desa supaya tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana biasanya.

Pajak dipungut dari penduduk di desa-desa oleh petugas pajak yang membawahi desa bersangkutan. Pembayaran pajak yang telah terkumpul kemudian disetorkan ke tingkat pusat melalui petugas pajak yang ada di pusat kerajaan. Mekanisme pembayaran pajak yang ditetapkan oleh Raja yang memerintah pada masa itu sebenarnya telah diatur agar tidak memberatkan penduduknya. Namun demikian, pada pelaksanaannya di lapangan banyak menimbulkan permasalahan disebabkan oleh karena pegawai yang bertugas untuk memungut pajak kadang berbuat sewenang-wenang dengan menaikkan jumlah pembayaran pajaknya. Hal tersebut biasanya dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat, pada akhirnya Raja akan turun tangan untuk menangani permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi terbaik untuk kepentingan rakyat banyak.

Semua aturan tentang pajak tersebut memperlihatkan bahwa pada masa itu telah disebutkan dengan cukup jelas masalah pengaturan atau mekanisme pengenaan pajak yang mencakup waktu pembayaran pajak, besarnya pajak dan pembebasan pengenaan pajaknya. Jadi dapat dikatakan bahwa perhitungan dan administrasi pajak yang merupakan dasar dari akuntansi sudah dikenal serta berjalan cukup baik dan teratur pada masa itu.

3.3 Kebijakan Pajak

Selain mekanisme yang telah ditentukan secara jelas oleh pihak kerajaan untuk pemungutan pajaknya, di pihak lain Raja tetap memberikan berbagai kebijakan yang dipandang perlu pada rakyatnya setelah melalui berbagai pertimbangan ataupun melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan melihat keadaan sebenarnya. Hal tersebut terungkap dalam berbagai prasasti yang dikeluarkan pada masa itu menyebutkan tentang keberatan atau kelemahan penduduk di suatu daerah tertentu karena mengalami persoalan tentang pembayaran pajak yang harus mereka lakukan.

Berbagai kebijakan pajak yang diberikan Raja kepada rakyatnya adalah semata-mata untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di samping sebagai sarana menunjang pengeluaran kerajaan. Hal tersebut dilakukan biasanya dengan meringankan sistem pajak emas bagi orang pribadi dan pembebasan pajak di tempat yang digunakan untuk masyarakat umum. Selain itu masih banyak lagi berbagai kebijakan pajak lainnya yang diberikan oleh Raja sesuai dengan pengungkapan berbagai prasasti yang dikeluarkan pada saat itu. Berikut ini akan dijelaskan berbagai kebijakan pajak yang diberikan oleh Raja kepada rakyatnya sesuai dengan yang tertuang dalam prasasti pada masa itu.

Kebijakan pengenaan pajak terhadap suatu daerah tertentu tergambar pada prasasti Bebetin A II tahun 989 M (Goris, 1954: 80) yang masih menggunakan bahasa Bali kuno, dikeluarkan oleh Raja Udayana dan permaisuri berkenaan dengan desa Bebetin (Bharu):

“.....umanugrahen tu anak banua di banwa bharu, makahakuta jhang banwa tuha, basta, manuratang tayung, hulu lapu kuncang, kulapati sadhyagana, me karaksayanna maghawa, gansar, rahit, ram paras para kanakanna hoka hanang.....”

Artinya:

“.....menganugerahi penduduk desa Bharu, termasuk yang ada dalam benteng semua penduduk desa, kepala desa dijabat Basta, juru tulis dijabat tayung, hulu lapu bernama Kuncang, kulapati bernama Sadhyaguna maghana, Gansar, Rahit, seluruh penduduk desa rapat saling bertatap muka.....”

Mengungkapkan bahwa desa Bharu (sekarang desa Bebetin) kembali mengalami perampokan sehingga kondisi ekonominya menjadi sangat lemah. Raja memberikan keringanan kewajiban maupun pembayaran pajak kepada desa Bharu tersebut. Demikian juga halnya kebijakan pajak bagi daerah perburuan maupun pajak irigasi yang tertuang dalam prasasti Serai A II tahun 993 M masih berbahasa Bali kuno (Goris, 1954: 80):

“.....tatkalan anak mabwatthaji di buru karaksayanna sungsang, rngan pratikaya tihung, manuratang sarma, na raya ajna na, manambah di sang ratu babini maruhani, sang ratu luhur cri gunapriyadharmmapatni sang ratu maruhani cri dharmmodayana warmmadewa sambandha, hentwa mabwatthaji di buru matahilang drwya haji.....”

Artinya:

“.....pada saat itulah penduduk sebagai wajib pajak di daerah perburuan yakni pejabat karaksayan bernama Sungsang dan Pratikaya, juru tulis dijabat Sarma, semua datang menyembah hadapan paduka Raja istri suami, sang Ratu luhur Sri Gunapriyadharmmapatni, sang Ratu lelaki Sri Dharmmodayana Warmmadewa bersabda, penduduk di daerah perburuan melaporkan masalah pajak-pajaknya.....”

Prasasti Serai A II itu menyebutkan bahwa desa Serai sering mengalami perampokan sehingga Raja Udayana dan permaisurinya memberikan ijin keringanan pembayaran pajak

kepada penduduk di daerah perburuan dan juga keringanan dalam sejumlah kewajiban lainnya kepada desa tersebut. Pajak *rot*[†] yang sebelumnya ditetapkan sebesar 9 masaka diturunkan menjadi 7 masaka dan juga dibebaskan dari pajak *caksu*.

Kebijakan pajak lainnya juga dapat dilihat pada prasasti Bwahan A tahun 994 M (Goris, 1954: 83) merupakan prasasti tertua berbahasa Jawa kuno yang isinya begitu menarik perhatian para ahli sejarah:

“.....*yathanyan sutantra I kawakanya...karaman I wingkang ranu kdisan...kna tarub mas macaka 6 ku 1 parcaksu sa 3 blindarah mas macaka 2 sa 3 parcaksu.....*”

Artinya:

“.....agar menjadi daerah otonomi...lepas dari penduduk desa di sekitar danau yaitu Kedisan...kena pajak tarub mas masaka 6 kupang 1, pajak parcaksu 3 saga, pajak blindarah 2 masaka 3 saga.....”

Pada intinya prasasti itu memuat izin dari Raja Udayana kepada desa Bwahan yang terletak di pesisir danau Batur untuk lepas dari desa induknya, yakni desa Kdisan. Desa Bwahan yang tampaknya semakin berkembang kemudian diijinkan memiliki pemerintahan sendiri atau otonomi (“*yathanyan sutantra i kawakanya*”) terlepas dari desa Kdisan. Namun demikian, yang menarik dari isi prasasti itu adalah selain diijinkan untuk memiliki pemerintahan sendiri namun Raja dan permaisuri juga memerintahkan desa Bwahan agar segala kewajiban desa itu kepada kerajaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut penulis, walaupun desa Bwahan telah menjadi suatu daerah otonomi yang terbebas dari daerah induknya, namun tetap memiliki kewajiban untuk membayar segala jenis pajak (pajak tarub, pajak blindarah) ke kas kerajaan.

[†] Pajak *rot* (*rotting banyu*) merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada sistem pengairan sawah atau irigasi.

Berdasarkan ulasan tersebut, dapat dimaknai bahwa suatu daerah *perdikan* (*swatantra*) walaupun dibebaskan dari pembayaran pajak, namun tetap diatur batas-batas ketentuan pembebasan pengenaan pajaknya. Jika di luar batas ketentuan yang dibebaskan pajak, maka pemungutan pajak tetap dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan keuntungan secara sepihak bagi penduduk daerah *swatantra* yang bekerja (bertani, beternak, berdagang, dan sebagainya) mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya tanpa dipungut pajak. Melihat hal itu, maka produk yang dihasilkan daerah *swatantra* di luar batas tidak kena pajak tetap harus membayar pajaknya pada kerajaan yang dipungut oleh petugas pajak.

Prasasti Tamblingan Pura Endek (Gambar 3.2) tanpa rangka tahun (karena rusak) yang ditemukan warga setempat tahun 2006 dapat digunakan untuk melihat kebijakan pajak lainnya pada masa itu.

Gambar 3.2 Prasasti Tamblingan Pura Endek



Prasasti Tamblingan ini ditemukan dalam sebuah guci besar dikeluarkan oleh tiga orang Raja, salah satunya Raja Udayana menyebutkan adanya kebijakan pengenaan jenis pajak yang dikenal dengan sebutan *papilih mas*, *pabhumi* dan *pwasi*:

“.....*tan kna papilih mas, tan kna pabhumi...tan kna pawsi.....*” Artinya:

“.....tidak dikenakan pembayaran *papilih emas*, tidak kena pajak bumi...tidak kena pajak *pawsi.....*”

Menurut Epigrafer (Bapak Suarbhawa) yang ikut dalam pembacaan prasasti Tamblingan menyebutkan bahwa *papilih emas* adalah pajak dalam bentuk emas pilihan, *pabhumi* merupakan pajak bumi dan *pawsi* berupa pajak dalam bentuk *pawsi*. Kebijakan Raja tidak mengenakan ketiga jenis pajak tersebut pada penduduk desa setempat disebabkan karena penduduk desa Tamblingan sejak dulu diberikan kewajiban untuk memperbaiki dan memelihara benteng di Manasa sampai dengan pintu gerbangnya di Puncagiri.

Demikianlah berbagai kebijakan pajak yang diberikan oleh Raja menurut penulisan prasasti yang dikeluarkan pada masa itu. Dilihat dari berbagai prasasti tersebut dapat dikatakan bahwa pihak kerajaan sangatlah bijaksana dalam melaksanakan pemerintahannya terutama dalam mekanisme pembayaran pajak. Walaupun aturan-aturan mengenai pajak telah ditetapkan secara jelas namun berbagai kebijakan diambil dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama yang ingin dicapai Raja pada masa itu.

3.4 Jenis Pajak

Banyaknya jenis pajak yang dikenakan di masa lalu tergantung dari siapa Raja yang memerintah serta kompleksitas kehidupan penduduknya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena sistem perpajakannya lebih mengarah pada pembayaran pajak yang disesuaikan dengan jenis komoditas yang dihasilkan atau pembayaran pajak sesuai dengan jenis kegiatan penduduknya. Namun demikian, rupanya selain adanya pengenaan pajak atas sekelompok penduduk, terdapat juga pembebasan pajak atas sekelompok penduduk atau daerah lainnya. Berikut ini diuraikan mengenai jenis pajak pada masa itu yang diambil dari berbagai prasasti dan catatan sejarah lainnya.

Pajak atas tanah pertanian biasanya dipungut berdasarkan atas jenis tanah, luas tanah maupun tingkat kesuburan tanahnya. Adapun jenis tanah yang dikenakan pajak adalah tanah berproduksi seperti: *huma* atau *uma* (sawah basah), *parlak* (sawah kering), *mmal*

(tegalan), dan *kbwan* (kebun) seperti tergambar pada prasasti Serai AII tahun 993 M (Goris, 1954: 82):

“.....*huma, parlak, padang, mmal...tumahilang hentwa masu 9 ya ta hetuna masu 7.....*” Artinya: “.....sawah basah, sawah kering, padang, tegalan...pajak yang awalnya ditentukan sebesar 9 masa diturunkan menjadi sebesar 7 masa.....”

Besarnya pembayaran pajak atas tanah berdasarkan luasnya tanah ditentukan oleh pegawai pajak yang bertugas untuk mengukur luas tanah yang dikenakan pajak. Berdasarkan tingkat kesuburan tanahnya, besarnya pajak yang dikenakan atas tanah biasanya berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut. Selain pajak yang dikenakan atas tanah secara langsung, juga dikenakan pajak terhadap hasil buminya (padi, palawija, buah-buahan dan sebagainya) maupun peternakan dan perikanan. Kehidupan masyarakat pada masa itu telah berkembang berdasarkan mata pencaharian hidupnya yang sesuai dengan spesialisasi jenis pekerjaannya. Mata pencaharian utama masyarakat pada masa itu adalah bertani dan beternak, namun juga memiliki mata pencaharian lain seperti pengrajin (*pande*) dan pedagang yang juga dikenakan kewajiban untuk membayar pajak (Prasasti Bwahan A tahun 994 M dalam Goris, 1954):

“.....*tikasan ing pande wsi, pande mas, macaka 1 ku 1 ing sawangunan.....*”

Artinya: “.....pajak terhadap pengrajin besi, pengrajin emas, 1 masaka 1 kupang setiap kelompok.....”

Selain pajak atas tanah baik secara langsung dan hasil buminya maupun pajak yang dikenakan pada para pengrajin tembaga, ternyata di bidang kesenian juga dikenakan pajak karena pada waktu berlangsungnya pertunjukan seni, mereka menerima imbalan atau upah.

“.....*mahanawami satikasaning parsangkha, prasuling, parpadaha, ku 2 ing sawangunan mwang tikasan ing apukul, paganding.....*” (Prasasti Bwahan A tahun 994 M dalam Goris, 1954).

Artinya:

“.....semua pajak bagi peniup sungu, peniup suling, pemain kendang, 2 kupang setiap kelompok dan pajak terhadap pemukul gambelan, penyanyi.....”

Perlu untuk diketahui dalam hal pajak pementasan seni bahwa pada masa itu dikenal adanya dua macam pertunjukan kesenian yaitu pertunjukan kesenian untuk Raja dan kesenian untuk rakyat. Perbedaan jenis pertunjukan kesenian ini juga membawa akibat adanya perbedaan jumlah pembayaran pajaknya. Hal ini disebabkan mereka yang melakukan pertunjukan kesenian untuk Raja memperoleh upah lebih tinggi daripada pertunjukan kesenian untuk rakyat. Pembayaran pajaknya otomatis lebih tinggi dikenakan untuk mereka yang melakukan pertunjukan kesenian bagi Raja.

Prasasti Trunyan AI berangka tahun 911 M (Gambar 3.3) menyebutkan tentang pengenaan jenis pajak bagi mereka yang mempunyai suatu keahlian tertentu.

”.....*tarub ma 1 blindarah piling 4 tandasna panekan di bhatara di turunan, pamukul, paganding, suling, bhangsi, pande mas, pande wsi, undahagi kayu, prakara, piling 4 kabaktyanna di harwatan, panekan di sanghyang di turunan, kunang pasanggunung di tapa haji ku 1 pracaksu pi 1 pagajah ku 1 pracaksu pi 1 kunang tahilangna ya di banwana di turunan, angken cetra.....*”

Artinya:

”.....pajak tarub 1 ma, pajak blindarah 4 piling dihaturkan pada Bhatara di Turunan, pemukul gambelan, peniup suling, pengrajin mas, pengrajin besi, pembuat alat dari kayu, membayar 4 piling dihaturkan pada Bhatara di

Turunan, saat pasang gunung kena pajak pracaksu 1 ku pajak pegajah 1 pi pajak pracaksu 1 ku semuanya dibayar di desa Turunan tiap bulan Cetra....”

Gambar 3.3 Prasasti Trunyan AI tahun 911 M



Prasasti ini menyebutkan tentang berbagai kewajiban dan pembayaran pajak bagi masyarakat desa Trunyan. Adapun kewajiban yang harus dibayarkan penduduk desa Trunyan adalah *tarub* sebesar 1 *masaka*, *blindarah* sebesar 4 *piling* tiap kepala keluarga dipersembahkan kepada *Bhatara* atau Dewa "Da Tonta" di Trunyan. Adapun pungutan pajak untuk penabuh gamelan, penyanyi, peniup seruling, pemukul kendang, pande emas, pande besi, tukang kayu dan sejenisnya di desa itu dikenakan 4 *piling* setiap kelompok juga dipersembahkan kepada *Bhatara* "Da Tonta" di Trunyan. Berkenaan dengan *pasang gunung* kepada *tapa haji* dikenakan 1 *kupang*, pajak pengawasan dikenakan 1 *piling*, *pegajah* dikenakan 1 *kupang*, yang semuanya itu supaya dibayar di desa Trunyan setiap bulan *cetra*.

Prasasti Dawan berangka tahun 1053 M (Goris, 1954) dikeluarkan oleh Raja Anak Wungsu putra bungsu Raja Udayana menyebutkan:

".....asing gumawaya sawah bhatara ya samahura rotting banyu ma 1 irikang purusakara makapatih, angken pnah banyu 1 pucuk....." Artinya: ".....setiap orang yang mengerjakan sawah Bhatara agar membayar pajak *rot* untuk air

sejumlah 1 masaka kepada purusakara sebagai patih, untuk setiap sumber air di Pucuk.....”

Prasasti Dawan itu menyebutkan bahwa penduduk desa Lutungan dikenakan jenis pembayaran pajak “*rotting banyu*” atau pajak *rot* yaitu semacam pajak bagi orang yang melakukan pengolahan sawah sebesar 1 masaka, namun juga disebutkan bahwa penduduk desa Lutungan tersebut dibebaskan mengambil air untuk mengairi sawahnya. Selain itu prasasti Dawan juga menyebutkan bahwa masyarakat desa Dawan tidak usah membayar iuran dan *pamegat sigi* dan setiap kepala keluarga bayarannya 1 *kupang* untuk anggota desa laki-laki dan anggota desa perempuan dikenakan pajak 3 *saga* tiap-tiap bulan *Magha*.

Prasasti Bulian A berangka tahun 1181 M dikeluarkan oleh Raja Jayapangus dan permaisurinya dapat juga digunakan sebagai perbandingan dalam hal pembayaran jenis pajak ijin tinggal maupun berdagang bagi penduduk asing. Prasasti ini menyebutkan tentang adanya pemukiman bagi penduduk asing di sekitar kota-kota pelabuhan yang ada di pesisir Bali utara dan selatan. Hal ini diperkuat dengan adanya ungkapan *juru kling (keling)*. *Juru Kling* menurut hasil wawancara dengan Epigrafer diperoleh pengertian sebagai petugas pemerintah lokal yang memiliki tugas khusus untuk mendata atau mencatat penduduk asing berkewarganegaraan India di daerah tersebut. Pencatatan ini kemungkinan ada hubungannya dengan kewajiban bagi penduduk asing (India) untuk membayar sejumlah pajak dan hak mereka untuk mendapatkan ijin tinggal di daerah itu. Selain itu juga berhubungan dengan persyaratan sebagai penduduk asing untuk dapat melakukan transaksi jual-beli maupun transaksi barang-barang dagangan lainnya di Bali pada saat itu.

Berdasarkan penjelasan tentang berbagai jenis pajak yang diungkap prasasti-prasasti tersebut dapat dikatakan bahwa pajak atas tanah merupakan pajak paling kompleks karena selain pengukuran pajaknya ditentukan berdasarkan jenis dan luas tanahnya, pembebanan pajak atas tanah juga merupakan pajak terbesar bagi kerajaan dengan penghitungan lebih

rumit. Sedangkan jenis pajak lainnya, seperti pajak kesenian, pajak peternakan maupun pajak usaha bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu maka perhitungan pajaknya jauh lebih sederhana. Hal tersebut disebabkan oleh karena tanah dari awal telah dianggap sebagai milik Raja yang dikerjakan oleh rakyatnya, maka pembebanan pajaknya otomatis menjadi paling besar dibandingkan jenis pajak lainnya seperti pajak hasil bumi, usaha dagang maupun dari hasil kerajinan karena keahlian tertentu.

Akuntabilitas perpajakan pada masa itu tergambar dari mekanisme pemungutan pajak dari tingkat bawah yaitu rakyat yang membayar pajak melalui pegawai pemungut pajak sampai akhirnya diserahkan pada tingkat teratas yaitu Raja. Pertanggung-jawaban yang dilakukan para pegawai pajak di tingkat desa maupun para pegawai kerajaan yang bertugas sebagai perantara penyetoran pajak sampai akhirnya diterima oleh Raja mencerminkan bahwa praktik akuntansi pada sistem administrasi pajak dan operasionalnya tetap diawasi oleh Raja sebagai penguasa tertinggi kerajaan.

Perpajakan merupakan domain dari praktik akuntansi dan menjadi perhatian penting pada masa itu, karena merupakan input terbesar bagi kerajaan untuk dapat membiayai segala outputnya. Pembayaran pajak selalu menjadi permasalahan di masyarakat baik terjadi di masa lalu maupun sekarang ini. Perbedaannya adalah terletak pada bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut oleh pihak penguasa. Pada jaman Bali kuno, pendapatan (*input*) kerajaan berasal dari berbagai sumber: 1) Pajak dari rakyat, 2) Upeti dari rakyat atau Raja bawahan, 3) Denda dari perkara pengadilan, 4) Transaksi jual beli dengan masyarakat, berupa: a) Subsidi untuk ternak dan b) Pelepasan aset untuk tanah.

Sumber-sumber pendapatan kerajaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran (*output*) kerajaan, berupa: 1) Gaji para pejabat kerajaan, 2) Pemeliharaan istana kerajaan, 3) Pertahanan dan keamanan kerajaan, dan 4) Biaya keperluan Raja lainnya. Selain untuk keperluan kerajaan, pendapatan tersebut terpenting digunakan untuk pembiayaan

pembangunan di masyarakat berupa: 1) Pembangunan bangunan suci (Pura), 2) Pembangunan pasar, 3) Pembangunan jalan, dan 4) Pembangunan permandian, kuburan, dan sebagainya.

Pembayaran pajak merupakan pendapatan terbesar bagi kerajaan pada masa itu. Pendapatan dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan kerajaan dan terpenting digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan di masyarakat. Melihat kondisi tersebut apabila ditarik ke masa sekarang kemungkinan memiliki kesamaan, hanya saja dalam penentuan besarnya pajak tidak disesuaikan dengan kondisi rakyatnya. Pada masa lalu rakyat yang dikenakan pajak tidak mengeluh karena saat menentukan besarnya pajak, Raja terlebih dulu meninjaunya langsung ke lapangan. Apabila ada keluhan maka Raja langsung menyikapinya dan melakukan pengecekan secara langsung kondisi di lapangan. Tidak demikian halnya yang terjadi saat ini, di mana pihak penguasa enggan secara langsung melihat bagaimana kondisi rakyatnya dan menyikapi keluhan dari rakyat. Apabila terjadi masalah atas pembayaran pajak berupa keluhan dan permohonan dari masyarakat atas beban berat yang harus dibayarkan pada Raja, maka pihak kerajaan secara langsung mendengarkan permohonan atas keringanan pembayaran pajak disesuaikan dengan kondisi pemohon. Berbeda halnya dengan mekanisme pembayaran pajak sekarang ini yang ditetapkan secara sepihak oleh penguasa tanpa berusaha melihat kondisi nyata rakyatnya. Selain itu pada jaman Bali kuno, rakyat merasakan manfaat yang diberikan oleh kerajaan dengan pajak yang mereka bayarkan, sehingga masyarakat membayar pajak secara ikhlas bahkan tanpa paksaan menyetorkannya ke kerajaan. Berbeda dengan kondisi sekarang ini, rakyat harus dipaksa untuk membayar pajak oleh pemerintah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena masyarakat sekarang ini tidak merasakan adanya manfaat yang diperoleh dengan pembayaran pajak.

Pendapatan kerajaan selain pajak dapat berupa upeti dari rakyat yang secara tulus ikhlas dihaturkan kepada Rajanya karena telah memberikan kesejahteraan bagi kehidupannya. Upeti juga berasal dari daerah atau Raja bawahan yang telah ditundukkan oleh Raja yang berkuasa pada masa itu, sehingga upeti ini dianggap sebagai persembahan karena tunduk atas perintah penguasa. Pendapatan berupa denda yang berasal dari perkara pengadilan merupakan pendapatan yang diperoleh kerajaan bagi mereka yang bersalah atas putusan pengadilan dan masuk ke kas kerajaan. Pendapatan lainnya adalah berasal dari transaksi jual beli dengan masyarakat, baik dari transaksi penjualan atau pelepasan aset tanah maupun transaksi jual beli ternak.

Seluruh pendapatan (input) kerajaan tersebut digunakan sepenuhnya untuk membiayai segala pengeluaran (output), baik berhubungan dengan biaya keperluan kerajaan maupun membiayai pembangunan masyarakat di segala bidang. Adapun pembiayaan kerajaan dapat berupa pengeluaran dalam hal biaya gaji para pejabat kerajaan, biaya pemeliharaan bangunan istana Raja, biaya keperluan perang atau pertahanan keamanan maupun biaya keperluan Raja dan keluarganya. Selain biaya-biaya untuk keperluan kerajaan, pendapatan juga digunakan sebagai pembiayaan untuk berbagai pembangunan di masyarakat, seperti pembangunan bangunan suci (Pura), pasar, jalan, permandian, kuburan dan pembangunan lainnya.

Akuntabilitas perpajakan merupakan domain dari praktik akuntansi pada jaman Bali kuno. Mekanisme akuntabilitas perpajakan yang bersifat vertikal pada masa itu, di mana Raja melimpahkan wewenangnya pada petugas pajak di pusat (kerajaan) kemudian pelimpahan wewenang ditujukan pada petugas pajak di tingkat bawah (desa) terakhir pada rakyat yang akan dipungut pajak. Rakyat desa bersangkutan membayar pajak yang dikenakan pada petugas pajak di tingkat desa. Petugas pajak di desa bertanggung jawab pada petugas pajak di tingkat pusat, kemudian pejabat tingkat pusat akan bertanggung jawab pada Raja atas pajak yang disetorkan. Raja bertanggung jawab atas pajak yang disetorkan rakyat untuk

menggunakannya sesuai dengan anggaran biaya yang harus dikeluarkan oleh kerajaan dalam rangka kesejahteraan rakyatnya.

Administrasi dan akuntabilitas pajak yang dilakukan pihak kerajaan pada masa itu benar-benar mencerminkan aspirasi dari rakyat. Hal tersebut mungkin dapat digunakan sebagai inspirasi pelaksanaan perpajakan saat ini yang sudah mulai kehilangan kendali atas kesejahteraan rakyatnya. Jadi akuntabilitas pajak seharusnya benar-benar merupakan praktik pertanggung-jawaban penguasa pada rakyatnya, sehingga tidak akan melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki rakyatnya.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Akuntabilitas perpajakan pada masa itu tergambar dari mekanisme pemungutan pajak dari tingkat bawah yaitu rakyat yang membayar pajak melalui pegawai pemungut pajak (*Sang mangnalila drbya haji*) sampai akhirnya diserahkan pada tingkat teratas yaitu Raja. Pertanggung-jawaban yang dilakukan para pegawai pajak di tingkat desa maupun para pegawai kerajaan yang bertugas sebagai perantara penyetoran pajak sampai akhirnya diterima oleh Raja mencerminkan bahwa praktik akuntansi pada sistem administrasi pajak dan operasionalnya tetap diawasi oleh Raja sebagai penguasa tertinggi kerajaan.

Praktik akuntabilitas pada jaman Bali kuno juga terkait dengan administrasi dan akuntabilitas perpajakannya. Pertanggung jawaban atas pencatatan praktik administrasi pembayaran pajak dari rakyat pada kerajaan dilakukan oleh pejabat pajak tingkat desa kepada pejabat pajak tingkat pusat dan selanjutnya bertanggung jawab pada Raja sebagai pimpinan tertinggi melalui bendahara kerajaan. Pendapatan dari setoran pembayaran pajak sebagai penghasilan terbesar kerajaan dipergunakan oleh pihak kerajaan untuk membiayai semua pengeluaran berhubungan dengan kerajaan dan pembangunan sarana prasarana yang

dibutuhkan rakyatnya. Walaupun dikenakan berbagai jenis pajak maupun upeti pada masa itu, namun berbagai kebijakan pajak juga diberikan untuk meringankan pembayaran pajak untuk masyarakat tertentu. Pembayaran pajak yang dilakukan secara ikhlas oleh rakyat membuktikan besarnya tingkat kepercayaan rakyat pada Rajanya. Kepercayaan terhadap administrasi dan akuntabilitas perpajakan maupun kepercayaan rakyat bahwa Raja bertanggung jawab pada pembangunan dan perkembangan kesejahteraan hidup rakyatnya.

Semua aturan tentang pajak tersebut memperlihatkan bahwa pada jaman kerajaan Bali kuno telah diatur dengan begitu jelas masalah pengaturan pengenaan pajak, jenis pajak yang dikenakan, dan besarnya pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa perhitungan dan administrasi pajak yang merupakan dasar dari akuntansi sudah berjalan dengan baik dan teratur. Pengaturan pajaknya sudah diatur sedemikian rupa baik besarnya pajak, ketentuan pajak dan daerah yang dibebaskan pembayaran pajak karena sesuatu hal.

4.2 Keterbatasan Riset

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengolahan data yang berupa artefak yang telah tertanam ribuan tahun yang lalu belum mampu menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk sebenarnya dari praktik akuntabilitas pajak pada saat itu. Arti dari praktik akuntabilitas pajak dalam riset ini dilakukan berdasarkan penafsiran prasasti yang mungkin dianggap belum dijelaskan secara maksimal mengenai bentuk nyata dari praktik akuntabilitas pajak yang terjadi pada jaman Bali kuno.

Keterbatasan lainnya dalam penggunaan sumber data primer berupa prasasti, di mana masyarakat Bali menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral dan disucikan sehingga sulit untuk mengeksplorasi lebih banyak data dari prasasti tersebut. Di sisi lain, prasasti yang ditulis dalam huruf Bali atau Jawa kuno yang tidak umum digunakan, serta banyak dari prasasti tidak utuh, jadi ada beberapa teks dalam prasasti yang tidak dapat dibaca oleh

Epigrapher. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi penulis untuk menggambarkan isi dari prasasti dan interpretasinya secara jelas.

4.3 Implikasi Riset

Menggambarkan secara utuh praktik akuntabilitas pajak yang terjadi di masa lalu, maka diperlukan penelitian di bidang ini lebih banyak dan beragam. Penelitian mengenai *Historical Accounting* di Indonesia baru dilakukan pada riset yang mengupas sejarah akuntansi pada masa kemasinan Singosari. Hal ini diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat mengambil sejarah akuntansi pada periode sama yaitu jaman Bali kuno dengan topik pembahasan akuntansi yang lebih spesifik. Berbagai topik bahasan yang dapat dilakukan seperti, mengupas bentuk-bentuk pelaporan akuntansi keuangannya, maupun teknik akuntansi ke pemerintahannya. Melalui eksplorasi secara mendalam topik-topik akuntansi tersebut diharapkan keutuhan dan kejelasan praktik akuntansi pada masa lalu betul-betul dapat terungkap secara jelas.

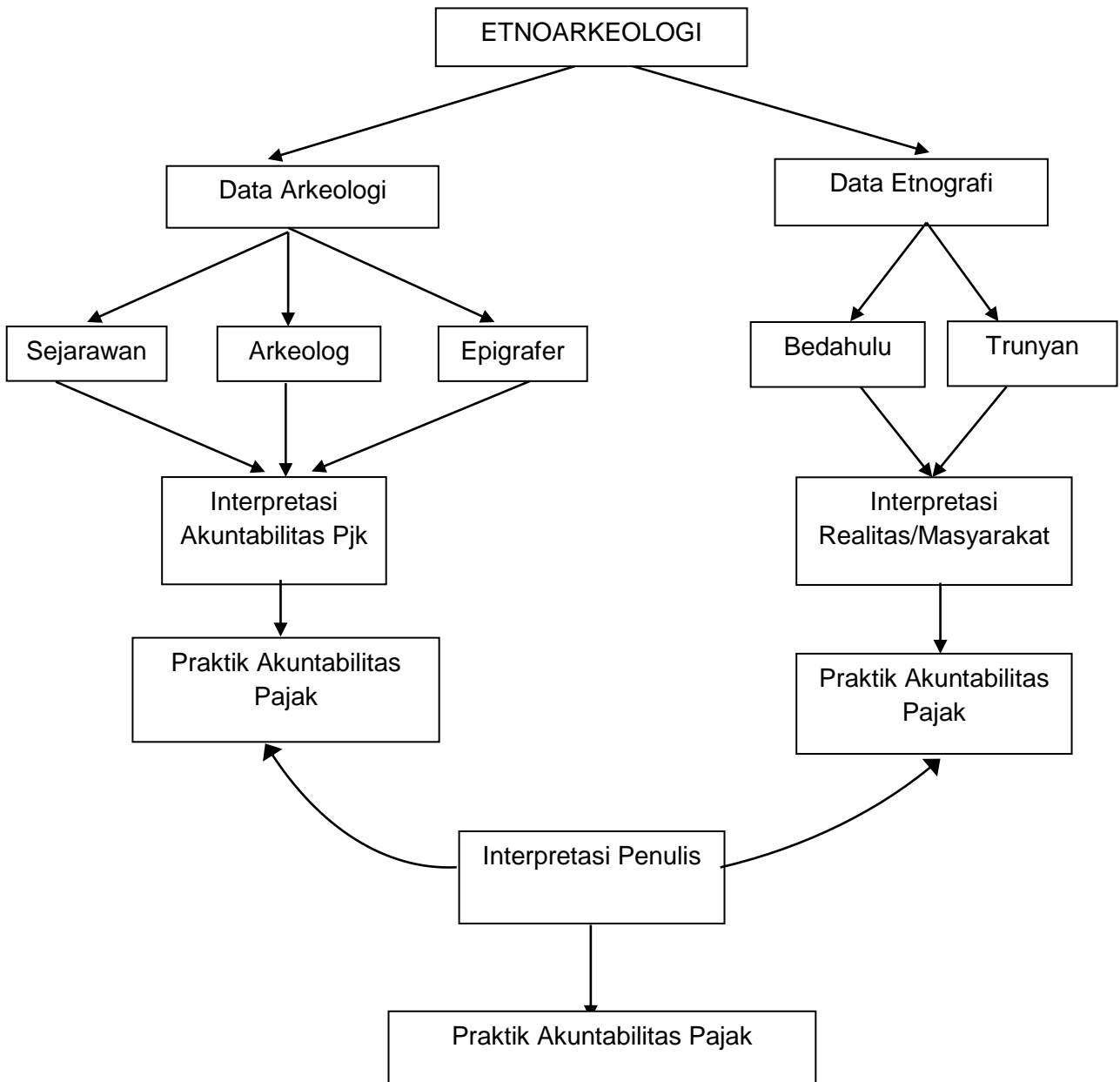
DAFTAR RUJUKAN

- Astra, I Gde Semadi. 1997. *Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII : Sebuah Kajian Epigrafis*. Yogyakarta.
- Burchell, S. C., Clubb., dan Hopwood, A. G. 1985. *Accounting In Its Social Context: Towards A History Of Value Added In The UK*. Accounting, Organization And Society. Vol. 10 No.4, hal 380-410.
- Coombs, Hugh M. dan Edwards, John Richard. 1994. *Record Keeping in Municipal Corporations: A Triumph for Double Entry Bookkeeping*. Accounting, Business and Financial History, Vol. 4, No.1.
- Goris, Roelof. 1954. *Prasasti Bali I dan II*, Lembaga Bahasa dan Budaya (Fakultas Sastra dan Filsafat) Universitas Indonesia, NV. Masa Baru, Bandung.
- Hopwood, 1987. *The Archaeology of Accounting System*. Accounting, Organization and Society, vol.12 No. 3, Hal. 207-234.

- Jacobsen, Lyle E. 1964. *The Ancient Inca Empire of Peru and the Double Entry Accounting Concept*. Capsules and Comments.
- Jaruga, Alicja A. 1988. *The Evolution of Accounting in East European Nations*. The Fifth World Congress of Accounting Historians, The University of Sidney.
- Lacombe dan Saboly. 1999. *The accounting practices of a sixteenth-century pastel merchant from the French region of Toulouse*. Accounting, Business & Financial History. Vol. 9. pp. 291–306.
- Lee, Geoffrey Alan. 2002. *The Development of Italian Bookkeeping 1211-1300*. ABACUS.
- Miller, P dan Napier, C. 1993. *Geneologies of Calculation*. Accounting, Organization and Society. Vol.18, no.7/8, hal 630-647.
- Mundardjito. 1981. *Etnoarkeologi: Peranannya Dalam Pengembangan Arkeologi Di Indonesia*. Majalah arkeologi Vol. 4, no. 1-2, hal. 17-29.
- Philip Fu, 1971. *Governmental Accounting in China During the Chou Dynasty (1122 B.C - 256 B.C.)* Journal of Accounting Research. Spring.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Penerbit Balai Pustaka.
- Prasasti Batuan tahun 1022 M, dikeluarkan oleh Raja Marakata.
- Prasasti Tamblingan Pura Endek tanpa rangka tahun, dikeluarkan oleh Raja Udayana.
- Prasasti Trunyan AI tahun 911 M, dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa.
- Scorgie, Michael E. 1994. *Accounting fragments stored in the Old Cairo Genizah*. Accounting Business and Financial History, Vol. 4, No. 1.
- Someya, Kyojiro. 1988. *Accounting Revolution in Japan*. The Fifth World Congress of Accounting Historians. The University of Sidney.
- Suantika, I Wayan, Suarbhawa, I Gusti Made, Sunarya, I Nyoman, Bagus, A A Gde, Astawa, A A Gde Oka. 2009. *Prasasti Tamblingan*. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.

- Suarbhawa, I Gusti Made. 2009. *Mata Uang Pada Jaman Bali Kuna*. Forum arkeologi. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Arkeologi Denpasar.
- Sukoharsono, E. G. 1995. *A Power And Knowledge Analysis Of Indonesian Accounting History: Social, Political And Economic Force Shaping The Emergence And Development Of Accounting*. Unpublished Phd Dissertation, University of Walonggong.
- Sukoharsono, E. G. 2002. *Accounting in a 'New' History: A Dicipinary Power and Knowledge of Accounting*, The International Journal of Accounting and Business Society.
- Sukoharsono, E. G dan Lutfillah, Qudsi Novrida. 2008. *Accounting in The Golden Age of Singosari Kingdom: A Foucauldian Perspective*. SNA XI Pontianak.
- Wootton, Charles W dan Kemmerer, Barbara E. 2007. *The Emergence of Mechanical Accounting in the U.S., 1880-1930*. Accounting Historians Journal. vol. 34, No. 1.
- Young, Joni J. dan Mouck, Tom. 2006. *Objectivity and the Role of History in the Development and Review of Accounting Standards*. Accounting History. Vol. 2. Sage Library in Business & Management, Sage Publications.

Lampiran 1



Lampiran 2**KRONOLOGI RAJA-RAJA BALI KUNO:**

1. 835-837 S / 913-915 M.....Sri Kesari Warmadewa
2. 837-864 S / 915-942 M..... Sri Ugrasena
3. 877-889 S / 955-967 M..... Sri Haji Tabanendra Warmadewa
4. 882-897 S / 960-975 M..... Jayasingha Warmadewa
5. 897-905 S / 975-983 M.....Sri Janasadhu Warmadewa
6. 905-911 S / 983-989 M.....Sri Wijaya Mahadewi
7. 911-933 S / 989-1011M..... Sri Gunapriyadharmapatni
& suaminya Sri Dharmodayana Warmadewa
8. 933-944 S / 1016-1022 M.....Sri Sang Ajnadewi
9. 944-947S / 1022-1025 M.....Sri Marakata Pangkaja
10. 971-999 S / 1049-1077 M..... Paduka Haji Anak Wungsu
11. 1001-1010 S / 1079-1088 M.....Sri Walaprabhu
12. 1010-1023 S / 1088-1101 M.....Sri Sakalendukirana Wijayottunggadewi
13. 1037-1041 S / 1115-1119M.....Sri Maharaja Sri Suradhipa
14. 1055-1072 S / 1133-1150 M.....Sri Maharaja Sri Jayasakti
15. 1077-1099 S / 1155-1178 M.....Sri Maharaja Sri Jagajaya
16. 1099-1103 S / 1178-1181 M...Haji Jayapangus Arkajacihna & permaisuri
17. 1122-1126 S / 1200-1204M...Sri Maharaja Haji Ekajayalancana & ibu suri
18. 1126-1182 S / 1204-1260 M..Bhatara Parameswara Sri Wirama & ibu suri
19. 1182-1218 S / 1260-1296 M.....Bhatara Parameswara Adidewalancana
20. 1218-1222 S / 1296-1300 M.....Rajapatih Kbo Parud
21. 1246-1247S / 1324-1325 M.....Bhatara Sri Mahaguru & cucunya
22. 1250-1259 S / 1328-1337 M.....Sri Willajayakrtaningrat & ibu suri
23. 1259-.....S / 1337-.....M.....Sri Astasura Ratnabhumibanten

(Sumber: Astra, 1997)

Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Tingkat Agresivitas Pajak serta Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan Jangka Pendek

PURNAMAWATI HELEN WIDJAJA*

CHRISTIAN PRATAMA BUNAIID†

Universitas Tarumanagara

Abstract: *The increase in tax aggressiveness level in Indonesia made it necessary to determine what the factors that influence tax aggressiveness are and what the impact of tax aggressiveness is. The purpose of this research is to analyze the effect of institutional ownership, proportion of independent commissioner, and audit quality on tax aggressiveness and the impact of tax aggressiveness itself on firm value. There are two models built to meet those objectives. First model aims at first objective while second model is used to meet second objective. This research used manufacturing industry listed on Bursa Efek Indonesia in 2010-2011 as the population. Using purposive sampling technique, 177 firm year samples in the first model and 180 firm year samples in the second model are selected before the exclusion of outlier data. The result of multiple regression analysis shows that the impact of institutional ownership towards tax aggressiveness is insignificant while proportion of independent commissioner affects tax aggressiveness negatively and significantly. Audit quality tends to have negative and significant impact on tax aggressiveness proxied by negative of effective tax rate, but it shows no effect on tax aggressiveness proxied by book tax difference and common factor. In addition, it is found that the higher tax aggressiveness level is, the higher firm value will be.*

Keywords : *Institutional Ownership, Proportion of Independent Commissioner, Audit Quality, Tax Aggressiveness, Firm Value.*

* Staf Pengajar tetap FE Universitas Tarumanagara, Jakarta; email korespondensi: helenpww@gmail.com

† Alumnus FE Universitas Tarumanagara, Jakarta; saat ini berkarir sebagai konsultan pajak di PwC Indonesia; email korespondensi: shuitian_25121990@yahoo.com



1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini terlihat dari proporsi pajak terhadap total penerimaan negara yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Nota Keuangan Republik Indonesia 2012 menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara pada tahun 2007 adalah 69,36%, tahun 2008 sebesar 67,10%, tahun 2009 sebesar 73,04%, tahun 2010 sebesar 72,67%, dan tahun 2011 sebesar 75,11%.

Pemerintah yang diwakili oleh pihak fiskus tentu saja menginginkan agar penerimaan dari sektor pajak dapat digali semaksimal mungkin sehingga total penerimaan negara meningkat dan dana yang tersedia untuk pembangunan meningkat. Akan tetapi, hal tersebut ternyata sulit untuk dilakukan karena adanya perlawanan-perlawanan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Suandy (2012:21) menyebutkan bahwa perlawanan dalam pemungutan pajak meliputi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tingkat perlawanan pajak di Indonesia oleh para wajib pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fakta ini ditunjukkan oleh jumlah perkara di pengadilan pajak yang terus meningkat. Suhendro (dalam Maruli, 2011) menyebutkan bahwa pada tahun 2002, berkas perkara yang harus diselesaikan sebanyak 2.120 berkas. Jumlah ini meningkat pada tahun 2009 menjadi 14.473 berkas, dan pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 14.948 berkas.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Penelitian-penelitian tersebut banyak yang bermunculan pada tahun 2009-2012, seperti penelitian Khurana dan Moser (2009), Minnick dan Moga (2010), serta Richardson, Taylor, dan Lanis (2012). Namun, penelitian-penelitian

tersebut baru kebanyakan dilakukan di luar negeri dan hasil-hasilnya kebanyakan bertentangan.

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat agresivitas pajak merupakan hal yang baru. Hal ini terlihat dari sedikitnya penelitian yang dilakukan mengenai hal ini. Sejauh pengetahuan penulis, sampai saat ini, hanya Khurana dan Moser (2009), Moore (2012), serta Sabli dan Noor (2012) yang melakukan penelitian mengenai hal ini. Khurana dan Moser (2009) menemukan bahwa pengaruh kepemilikan institusional dibagi menjadi 2 bagian. Kepemilikan institusional jangka pendek akan berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan institusional jangka panjang berpengaruh sebaliknya. Di lain pihak, Sabli dan Noor (2012) tidak membedakan kepemilikan institusional jangka panjang maupun pendek dan menemukan bahwa kepemilikan institusional secara keseluruhan berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak.

Proporsi komisaris independen sebagai variabel penyebab tindakan pajak agresif juga merupakan variabel baru yang perlu mendapatkan perhatian para peneliti karena jumlah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan variabel ini relatif sedikit (Minnick dan Moga, 2010; Lanis dan Richardson, 2011; Ying, 2011; Sabli dan Noor, 2012). Di samping itu, terdapat pula perbedaan hasil penelitian terkait variabel ini. Penelitian Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak sedangkan penelitian Minnick dan Moga (2010), Ying (2011), Sabli dan Noor (2012) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen bukanlah variabel penentu tingkat agresivitas pajak.

Penelitian Crabbe, Lessius, dan Leuven (2010) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Kualitas audit yang tinggi diduga menyebabkan saran perpajakan yang diberikan lebih baik dan membantu perusahaan

dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara yang legal. Akan tetapi, hasil penelitian Richardson, Taylor, dan Lanis (2012) menyatakan bahwa kualitas audit secara signifikan mampu menekan tingkat agresivitas pajak. Faktor reputasi KAP yang berkualitas menyebabkan pengawasan terhadap tingkat agresivitas pajak meningkat. *Research gap* yang terjadi ini perlu dikaji agar teori yang sudah ada dapat semakin disempurnakan.

Dari sisi manajemen, tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajemen harus pula memperhatikan keuntungan dan kerugian yang mungkin dihadapi dalam bentuk kenaikan atau penurunan nilai perusahaan. Entitas yang melakukan tindakan pajak agresif mungkin dipandang sebagai entitas yang rentan akan risiko litigasi sehingga investor enggan menanamkan modalnya. Namun, entitas tersebut mungkin pula memiliki nilai perusahaan yang tinggi karena dianggap berhasil dalam melakukan perencanaan pajak. Beberapa penelitian mengenai hal ini juga telah dilakukan dan menghasilkan temuan yang berbeda. Desai dan Dharmapala (2009) menemukan bahwa tindakan pajak agresif tidak berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Wang (2010) menyatakan bahwa tindakan pajak agresif berdampak positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji fenomena dan *research gap* yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit terhadap tingkat agresivitas pajak serta menganalisis pengaruh tingkat agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

Dari sisi pengembangan ilmu, penelitian penulis ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi dan sumbangan literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak serta konsekuensi dari tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi penyusun kebijakan perpajakan, penelitian ini memberi masukan bagi para penyusun

peraturan perpajakan agar peraturan perpajakan yang dihasilkan dapat meminimalkan tingkat agresivitas pajak dari para wajib pajak. Dari sisi kebijakan manajerial, penelitian ini bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk memutuskan apakah tindakan pajak agresif yang dilakukan menguntungkan ataukah merugikan perusahaan

2. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan 2 model. Model pertama menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit terhadap tingkat agresivitas pajak dengan mengontrol ukuran perusahaan, *capital intensity*, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan. Model kedua menganalisis pengaruh tingkat agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan dengan mengontrol keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan akrual perusahaan.

2.1 Tingkat Agresivitas Pajak

Sesuai dengan deskripsi yang dipakai dalam beberapa penelitian sebelumnya (Frank, Lynch, dan Rego, 2009; Chen, *et al.*, 2010; Lanis dan Richardson, 2011), dalam penelitian ini, agresivitas pajak didefinisikan sebagai "*downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion*". Terdapat banyak ukuran yang merepresentasikan tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, yaitu *effective tax rate*, *current effective tax rate*, *cash effective tax rate*, *book tax difference*, *permanent book tax difference*, *discretionary permanent tax difference*, *abnormal book tax difference*, dan *tax shelter* (Dunbar *et al.*, 2010:19-20).

Tindakan pajak agresif mendatangkan berbagai keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Terkait dengan keuntungan agresivitas pajak, Chen, *et al.* (2010:44) menuliskan:

“ . . . The most obvious benefit of tax aggressiveness is greater tax savings. While such savings accrue to shareholders, managers also benefit if they are compensated, directly or indirectly, by share- holders for their efforts in effective tax management. Another potential benefit of tax aggressiveness to the decision makers, i.e., managers and family owners, is rent extraction that can be both enabled and masked by opaque tax avoidance activities. Rent extraction refers to non-value maximizing activities decision makers pursue at the expense of shareholders, including aggressive financial reporting, perk consumptions, and related-party transactions”

Dengan kata lain, keuntungan yang didapatkan dari tindakan pajak agresif perusahaan meliputi penghematan pajak yang lebih besar, kompensasi bagi manajer, dan tertutupinya beban *rent extraction* yang dilakukan manajemen.

Adapun kerugian dari tindakan pajak agresif diungkapkan oleh Desai dan Dharmapala (2006:12):

“ . . . Thus, while unexploited opportunities for tax sheltering with little or no risk of penalties could exist, increasing tax avoidance would create greater opportunities for managerial diversion. If managers cannot credibly commit to overlooking those opportunities, then shareholders could prefer that managers not engage in tax sheltering activity. They could indeed infer from the existence of such activity that managers are also engaging in diversion. This could lead to the stock market discounting the value of such a firm, with negative consequences for the manager”

Selain itu, Lim (2011:457) juga menyatakan bahwa “*tax avoidance could cause agency conflicts between management and debtholders, since managerial rent diversions induce information asymmetry and create moral hazard problems*”. Dari kedua pendapat ahli tersebut, kerugian tindakan pajak agresif meliputi menurunnya nilai perusahaan, timbulnya konflik keagenan dan masalah moral.

Tujuan manajemen perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Brigham dan Ehrhardt, 2011:9). Oleh karena itu, dalam memutuskan apakah akan melakukan tindakan pajak agresif atau tidak, manajemen harus memperhitungkan berbagai keuntungan dan kerugian yang dihadapi (Martani dan Sari, 2010:6)

2.2 Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Murwaningsari, 2009:32). Menurut Juniarti dan Sentosa (2009:89), investor institusional meliputi pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, lembaga dan perusahaan lain

Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan (Mursalim, 2009:47). Sebagai konsekuensinya, tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Widjaja dan Kasenda, 2008:142). Secara khusus, Sabli dan Noor (2012:5) menekankan bahwa “*institutional investors play an active role in enhancing firm corporate governance*”.

Salah satu perbuatan yang dapat merugikan pemegang saham adalah tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif yang dilakukan manajemen dapat berpotensi mendatangkan kerugian bagi para pemegang saham dalam bentuk sanksi perpajakan yang dihadapi

perusahaan dan rusaknya citra perusahaan. Sesuai dengan peran kepemilikan institusional yang telah dikemukakan sebelumnya, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi diharapkan akan mampu mengurangi tindakan pajak agresif.

2.3 Proporsi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-41/PM/2003, komisaris independen adalah anggota komisaris yang (1) berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan (4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Komisaris independen ini menurut Rifai (2009:402) berperan untuk mewakili pemegang saham minoritas. Selain itu, komisaris independen juga merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good governance* (Juniarti dan Sentosa, 2009:90)

Terkait dengan proporsi komisaris independen, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Proporsi komisaris independen yang lebih besar diharapkan dapat memonitor perilaku manajemen yang dapat merugikan pemegang saham (Makhdalena, 2012:74). Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Lanis dan Richardson (2010:55) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen yang tinggi akan meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen dan kepatuhan perusahaan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan

bahwa proporsi komisaris independen diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang ada.

2.4 Kualitas Audit

Kualitas audit yang tinggi dapat dilihat dari ukuran besarnya KAP (Fitriyani *et al.*, 2012:7). Ukuran KAP yang direpresentasikan dengan KAP *Big 4* memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan non *Big 4* karena KAP *Big 4* memiliki pengetahuan, pengalaman teknis, kapasitas, dan reputasi yang lebih superior dibandingkan KAP yang lebih kecil (Herusetya, Rosietta, dan Veronica, 2012:3).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Crabbe, Lessius, dan Leuven, 2010; Richardson, Taylor, dan Lanis, 2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Akan tetapi, arah dari pengaruh yang ditemukan berbeda. Pengaruh kualitas audit pada penelitian Crabbe, Lessius, dan Leuven (2010) adalah positif, sedangkan pada penelitian Richardson, Taylor, dan Lanis (2012) adalah negatif. Mengingat reputasi KAP *Big 4* yang akan rusak seandainya terbukti bahwa KAP *Big 4* membantu melakukan tindakan pajak agresif, dapat diduga bahwa perusahaan yang memakai KAP *Big 4* dalam audit laporan keuangannya akan tidak terlalu melakukan tindakan pajak agresif.

2.5 Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Harahap dan Wardhani, 2012:6). Rego dan Wilson (2011:2) berpendapat bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat menderita hukuman reputasi yang berasal dari pemeriksaan pajak serta pemberitaan publik sehingga nilai perusahaannya turun.

Di Indonesia penelitian tentang dampak agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan baru sedikit dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Chasbiandani (2012) yang menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan perlawanan pajak jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan *tax avoidance* jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Tanpa membedakan penghindaran pajak jangka panjang atau pendek, Armstrong *et al.* (2012:10) berpendapat bahwa tindakan perlawanan pajak perusahaan akan menciptakan penghematan pajak yang selanjutnya meningkatkan nilai perusahaan. Pendapat itu sesuai dengan Wang (2010:8) yang menyatakan bahwa “*tax avoidance activities are traditionally viewed as tax saving devices that transfer resources from the state to shareholders and thus should increase after-tax firm value*”.

2.6 Variabel Kontrol

Untuk memperoleh hasil yang valid, beberapa variabel harus dikontrol agar kesimpulan pengaruh parsial benar-benar berasal dari variabel yang diteliti. Berdasarkan alasan tersebut, penulis mengontrol beberapa variabel, yaitu ukuran perusahaan, *capital intensity*, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan pada model 1 serta keputusan investasi dan keputusan pendanaan di model 2.

2.6.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dan tingkat agresivitas pajak merupakan hal yang menarik perhatian para peneliti. Hal ini terlihat dari banyaknya penelitian yang dilakukan terkait dengan interaksi antara kedua variabel ini, seperti Kim dan Limpahyom (1998), Lanis dan Richardson (2007), dan Hsieh (2012). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Di samping itu, penelitian-penelitian yang menganalisis penentu tingkat agresivitas pajak juga cenderung mengontrol variabel ukuran perusahaan. Sebagai contoh, penelitian Chen *et al.* (2010), Martani (2010), dan Moore (2012). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini juga mengontrol variabel ukuran perusahaan.

2.6.2 *Capital Intensity*

Capital intensity memicu peningkatan dalam perencanaan pajak secara keseluruhan (Dunbar *et al.*, 2011:25). Hal ini terjadi karena perbedaan aturan pajak dan akuntansi yang ada terkait dengan depresiasi yang ditimbulkan oleh jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan (Moore, 2012:256).

Capital intensity merupakan variabel yang banyak menjadi variabel kontrol di banyak penelitian (Chen, *et al.*, 2010; Martani, 2010; Moore, 2012). Penelitian-penelitian yang menjadikan *capital intensity* sebagai variabel independen pun menghasilkan kesimpulan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak (Lanis dan Richardson, 2007; Noor, Fadzillah, dan Mastuki, 2010; Hsieh, 2012).

2.6.3 Profitabilitas

Perusahaan yang mendapatkan laba yang tinggi memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengurangi pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi (Dunbar *et al.*, 2011:24). Hal ini menurut Dunbar disebabkan oleh beban pajak yang besar pada perusahaan yang mendapatkan laba tinggi.

Banyak penelitian yang menjadikan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Hasil sampingan dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan (Minnick dan Moga, 2010; Irawan dan Farahmita, 2012; Sabli dan Noor, 2012)

2.6.4 Pertumbuhan Perusahaan

Perusahaan yang sedang bertumbuh memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengalokasikan investasi yang mampu menciptakan *timing difference* (Phillips dalam Chen *et al.*, 2010:49). Dengan kata lain, peluang perencanaan pajak lebih besar pada perusahaan yang sedang bertumbuh (Dunbar *et al.*, 2010:25).

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel kontrol dalam menganalisis determinan agresivitas pajak. Penelitian-penelitian tersebut antara lain Martani (2010), Irawan dan Farahmita (2012), dan Moore (2012). Semua penelitian tersebut menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan merupakan variabel yang layak dikontrol dalam meneliti faktor-faktor yang tingkat mempengaruhi agresivitas pajak karena berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.

2.6.5 Keputusan Investasi

Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi (Purnamasari, *et al.*, 2009:4). Manajer membuat keputusan investasi berkaitan dengan jenis produk dan jasa yang diproduksi (Wijaya, Bandi, dan Wibawa, 2010:5).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati (2005), Wijaya, Bandi, dan Wibawa (2010), Efni *et al.* (2011), serta Rohman dan Afzal (2012) semuanya menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Martani dan Chasbiandani (2012) dalam penelitiannya yang menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan menjadikan salah satu ukuran keputusan investasi, yaitu *earning to price ratio* sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan harus mengontrol dampak dari variabel ini agar kesimpulan yang diambil tidak bias.

2.6.6 Keputusan Pendanaan

Brigham dan Ehrhardt (2011:613-614) menyatakan bahwa struktur modal perusahaan menentukan nilai perusahaan. Dengan berpedoman pada teori Modigliani dan Miller, Brigham dan Ehrhardt menjelaskan bahwa semakin banyak hutang yang digunakan oleh perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Alasannya, perusahaan yang menggunakan banyak hutang dalam struktur keuangannya akan mendapatkan manfaat pajak dari bunga yang dibayarkan. Konsekuensinya, di mata para investor nilai perusahaan akan meningkat.

Efni *et al.* (2012) dan Setiawan (2009) menyatakan bahwa keputusan pendanaan adalah salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Rohman dan Afzal (2012) juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Lebih lagi, Martani dan Chasbiandani (2012) juga mengontrol salah satu proksi keputusan pendanaan, yaitu *leverage*, dalam penelitiannya tentang *tax avoidance* dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, keputusan pendanaan adalah variabel yang harus dikontrol ketika suatu penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.

2.6.7 Akrua

Akrua, yang merupakan selisih antara laba perusahaan dan arus kas operasi, merupakan salah satu ukuran manajemen laba (Desai dan Dharmapala, 2009:540; Wahab dan Holland, 2012:117). Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengontrol faktor akrua ini ketika meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2009; Wahab dan Holland, 2012). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga mengontrol akrua agar kesimpulan yang diambil tidaklah bias.

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk mempermudah pemahaman, gambaran visual tentang model dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 merepresentasikan model 1 penelitian, sedangkan gambar 2 mewakili model 2 penelitian.

Sisipkan Gambar 1 di Sini

Sisipkan Gambar 2 di Sini

Sekaran dan Bougie (2010:87) mengatakan bahwa “*a hypothesis can be defined as a tentative, yet testable, statement, which predicts what you expect to find in your empirical data*” Dengan kata lain, hipotesis adalah pernyataan sementara peneliti tentang hasil akhir penelitian yang diharapkan. Mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H1** : *Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan*
- H2** : *Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan*
- H3** : *Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak*
- H4** : *Tingkat agresivitas pajak perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan*

3 Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2011. Dari populasi tersebut, sejumlah sampel diambil dan diteliti.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah “a nonprobability sample that conforms to certain criteria” (Cooper dan Schindler, 2011:385). Kriteria seleksi sampel yang digunakan dalam model 1 penelitian adalah:

- a. laporan keuangan perusahaan tersedia di *www.idx.co.id*,
- b. perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, karena penelitian ini memerlukan data yang terpercaya,
- c. tahun buku laporan keuangan perusahaan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk meningkatkan komparabilitas dalam penelitian,
- d. perusahaan tidak mengalami rugi sebelum pajak, karena hal ini akan mendistorsi model penelitian,
- e. perusahaan tidak mendapatkan *income tax benefit* pada tahun laporan keuangan yang diteliti, karena *income tax benefit* akan mendistorsi model penelitian,
- f. mata uang laporan keuangan perusahaan adalah Rupiah
- g. tarif pajak efektif observasi kurang dari atau sama dengan 1, agar distorsi model penelitian tidak terjadi,
- h. data persentase kepemilikan institusional dan atau nilai perusahaan dapat ditentukan, dan
- i. data komisaris independen tersedia di laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan.

Model 2 penelitian menggunakan kriteria seleksi sampel yang sama, kecuali poin i karena persyaratan tersebut tidak diperlukan untuk menganalisis variabel-variabel yang ada di model

2. Hasil dari seleksi sampel yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat di tabel 1

Sisipkan Tabel 1 di Sini

3.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel menggambarkan cara suatu variabel diukur dalam suatu penelitian. Berikut ini disajikan operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2.1 Model 1 Penelitian

3.2.1.1 Tingkat Agresivitas Pajak

Penelitian ini menggunakan 2 proksi dari agresivitas pajak, yaitu *-effective tax rate*, dan *book tax difference*. Proksi pertama, *-effective tax rate*, merupakan ukuran yang digunakan oleh Lanis dan Richardson (2010), sedangkan proksi kedua merupakan ukuran yang dipakai oleh Moore (2012).

Ukuran pertama, *-effective tax rate*, merupakan negatif dari perbandingan antara beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak (Lanis dan Richardson, 2010:67).

$$- \text{Effective Tax Rate} = - \frac{\text{Beban Pajak Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran kedua, *book tax difference*, merupakan perbandingan antara perbedaan laba akuntansi dan pajak dengan total aset perusahaan di awal tahun (Moore, 2012:5).

$$\text{Book Tax Difference} = \frac{\text{Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal}}{\text{Total Aset Perusahaan Awal Tahun}}$$

3.2.1.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan persentase saham beredar perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional pada tanggal 31 Desember (Khurana dan Moser, 2009:14).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Investor Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar Perusahaan}}$$

3.2.1.3 Proporsi Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Tiswiyanti, Fitriyani, dan Wiralestari, 2012:62).

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

3.2.1.4 Kualitas Audit

Kualitas audit dalam penelitian diukur dengan pendekatan dikotomi. Sesuai dengan penelitian Richardson *et al.* (2011:4), apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, dan Ernst and Young), maka skor kualitas auditnya adalah 1 sedangkan jika laporan keuangan tidak diaudit oleh KAP Big 4, skor kualitas audit yang diberikan adalah 0.

$$\text{Kualitas Audit} = 1 \text{ jika diaudit KAP Big 4, } 0 \text{ jika diaudit KAP Non-Big 4}$$

3.2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total asset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun (Liu dan Cao, 2007:57).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Asset})$$

3.2.1.6 Capital Intensity

Pengukuran *capital intensity* dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara aset tetap bersih dan total aset perusahaan pada tanggal 31 Desember (Hsieh, 2012:1179).

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3.2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan *return on asset* perusahaan. *Return on asset* perusahaan dihitung melalui perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset akhir tahun (Liu dan Cao, 2007:57)

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.2.1.8 Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 2 proksi, yaitu *Price to Book Value* dan *Asset Growth*. *Price to Book Value* merupakan proksi pertumbuhan perusahaan menurut Martani (2010), sedangkan *Asset Growth* merupakan proksi pertumbuhan perusahaan menurut Moore (2012).

$$\text{Price to Book Value} = \frac{\text{Kapitalisasi Pasar Saham Perusahaan di Akhir Tahun}}{\text{Nilai Buku Ekuitas Saham Perusahaan}}$$

$$\text{Asset Growth} = \frac{\text{Aset Perusahaan Akhir Tahun} - \text{Aset Perusahaan Awal Tahun}}{\text{Aset Perusahaan Awal Tahun}}$$

3.2.2 Model 2 Penelitian

Variabel tingkat agresivitas pajak dalam model 2 penelitian menggunakan proksi yang sama dengan yang yang digunakan di model 1. Cara pengukuran variabel-variabel lainnya, yaitu nilai perusahaan, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan akan diuraikan sebagai berikut.

3.2.2.1 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan diproksikan dengan Ln(Tobin q). Rumus Tobin q yang dipakai dalam penelitian ini mengikuti ukuran dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2009:539), yaitu perbandingan antara penjumlahan total asset dan *market value added* dengan total aset perusahaan.

$$\text{Ln(Tobin } q) = \text{Ln}\left(\frac{\text{Total Aset} + \text{Nilai Pasar Ekuitas} - \text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Total Aset}}\right)$$

3.2.2.2 Keputusan Investasi

Keputusan investasi sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini diproksikan dengan *earnings to price ratio* seperti pada beberapa penelitian sebelumnya (Hasnawati, 2005; Martani dan Chansbiandani, 2012). Menurut Martani dan Chasbiandani, *earning to price ratio* merupakan “*ratio* dari *net income* perusahaan dibandingkan dengan harga saham perusahaan”. Terbalik dengan *price to earning ratio*, nilai yang tinggi dari rasio ini menandakan bahwa keputusan investasi perusahaan merupakan keputusan yang buruk.

$$\text{Earnings to Price Ratio} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Harga Saham Perusahaan}}$$

3.2.2.3 Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* sesuai dengan proksi yang dipakai oleh Setiawan (2009:44).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.2.2.4 Akrua

Akrua dalam penelitian ini diukur dengan mengurangkan arus kas operasi dari laba bersih perusahaan dan kemudian membaginya dengan total aset perusahaan pada awal tahun (Desai dan Dharmapala, 2009:541-542).

$$\text{Akrua} = \frac{\text{Laba Bersih} - \text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Aset Awal Tahun}}$$

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data di penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran umum tentang nilai variabel penelitian. Analisis regresi berganda bertujuan untuk pengujian hipotesis.

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan baku. Analisis regresi berganda diawali dengan pengujian asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Setelah pengujian asumsi-asumsi klasik tersebut dilakukan, uji F dan uji t lalu diproses untuk melihat apakah hipotesis penelitian ditolak atau diterima. *Adjusted R Square* pun dianalisa untuk menentukan persentase variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model penelitian. Persamaan-persamaan yang diregresikan dalam penelitian ini ada 2 persamaan. Persamaan pertama mengacu pada model 1 dan persamaan kedua mengacu pada model 2.

Persamaan 1

$$\text{Tax_Agg} = \beta_0 + \beta_1.\text{Inst_Own} + \beta_2.\text{Prop_Kom} + \beta_3.\text{Big_4} + \beta_4.\text{Firm_Size} + \beta_5.\text{Cap_Ins} \\ + \beta_6.\text{ROA} + \beta_7.\text{PBV} + \beta_8.\text{Asset_Growth} + \varepsilon$$

Persamaan 2

$$\text{Firm_Value} = \beta_0 + \beta_1.\text{Tax_Agg} + \beta_2.\text{EPR} + \beta_3.\text{Lev} + \beta_4.\text{Accrual} + \varepsilon$$

Keterangan:

Tax_Agg	= tingkat agresivitas pajak
Inst_Own	= persentase kepemilikan insitusal
Prop_Kom	= proporsi komisaris independen
Big_4	= kualitas audit
Firm_Size	= ukuran perusahaan
Cap_Ins	= <i>capital intensity</i>
ROA	= <i>return on asset</i>
PBV	= <i>price to book value</i>
Asset Growth	= pertumbuhan asset perusahaan
Firm_Value	= nilai perusahaan
EPR	= <i>earnings to price ratio</i>
Lev	= <i>debt to assets ratio</i>
Accrual	= total akrual perusahaan
ε	= residual

Untuk analisis sensitivitas, dilakukan ekstraksi faktor dari ukuran *-effective tax rate* dan *book tax difference*. Faktor itu, yang merupakan *common factor*, dijadikan sebagai ukuran

baru tingkat agresivitas pajak. Tujuan analisis sensitivitas ini adalah memeriksa konsistensi hasil penelitian.

4 Analisa Data dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Sisipkan Tabel 2 di Sini

Nilai minimum, maksimum, mean, dan deviasi standar variabel-variabel di model 1 dapat dilihat pada tabel 2. Beberapa hal yang patut diperhatikan dari nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut.

Dari tabel 2 terlihat bahwa variabel -ETR memiliki nilai minimum -0,9249 dan nilai maksimum -0,0280. Nilai rata-ratanya adalah -0,2669 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan tidak terlalu agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

Variabel BTD di model 1 ini memiliki nilai minimum -0,0417 dan nilai maksimum 0,2553. Angka deviasi standar yang lebih besar daripada rata-rata menunjukkan bahwa variasi dalam variabel ini cukup besar.

Hal yang perlu dicermati adalah nilai proporsi komisaris independen sebesar 0,25 yang berada di bawah proporsi komisaris independen minimum yang disyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang belum mematuhi ketentuan tersebut.

Sisipkan Tabel 3 di Sini

Statistik deskriptif untuk variabel-variabel dalam model 2 dapat dilihat pada tabel 3. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua variabel memiliki standar deviasi yang lebih

besar daripada nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel-variabel yang digunakan dalam model ini cukup bervariasi.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Karena alat analisis statistik yang digunakan merupakan regresi berganda, maka terdapat beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi agar kesimpulan yang diambil tidak salah, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

4.2.1 Uji Normalitas

Sisipkan Tabel 4 di Sini

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan *software* SPSS 19.0. Dari tabel 4, terlihat bahwa sampel yang ada di model 1 dan model 2 semuanya telah lolos uji normalitas. Hal tersebut terlihat dari nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang kesemuanya lebih besar daripada 0,05. Khusus untuk model 1 dengan variabel dependen - ETR, jumlah sampel adalah 169, karena terdapat 8 *outlier* yang harus dikeluarkan agar asumsi normalitas terpenuhi. Adapun Uji *outlier* dilakukan dengan menggunakan pendekatan standar, yaitu mengeluarkan observasi yang nilai *standardized residual*-nya lebih besar dari 3 (Yan dan Su, 2009:134).

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Sisipkan Tabel 5 di Sini

Tabel 5 menunjukkan bahwa model 1 dan model 2 seluruhnya terbebas dari gangguan multikolinearitas. Hal ini terlihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang semuanya kurang dari 10.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Sisipkan Tabel 6 di Sini

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas yang tampak pada tabel 5 menunjukkan bahwa model 1 dengan variabel dependen –ETR terbebas dari gangguan heteroskedastisitas. Fakta ini tampak dari nilai *Sig.* semua variabel yang lebih besar dari 0,05.

Akan tetapi, model 1 dengan variabel dependen BTD dan model 2 mengalami gangguan heteroskedastisitas. Hal ini tampak dari nilai *Sig.* beberapa variabelnya yang kurang dari 0,05. Agar kesimpulan yang diambil valid, maka untuk model 1 variabel dependen BTD dan model 2, digunakan alat statistik *White Heteroscedasticity Consistent Standard Errors & Covariance* yang menyesuaikan nilai t statistik yang diperoleh.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Sisipkan Tabel 7 di Sini

Uji autokorelasi dilakukan dengan *Langrange Multiplier* karena jumlah sampel yang digunakan lebih dari 100. Menurut Ghozali (2011:10), uji *Langrange Multiplier* lebih tepat digunakan apabila jumlah sampel lebih dari 100. Uji *Langrange Multiplier* dilakukan dengan meregresikan unstandardized residual dengan variabel independen model dan lag unstandardized residual. Model terdeteksi mengandung autokorelasi apabila nilai *Sig.* lag unstandardized residual kurang dari 0,05.

Dari tabel 6 terlihat bahwa kedua model penelitian terbebas dari gangguan autokorelasi. Nilai *Sig. Res_2* yang semuanya lebih besar dari 0,05 menunjukkan hal ini.

4.3 Hasil Regresi dan Pembahasan

4.3.1 Model 1

Sisipkan Tabel 8 di Sini

Hasil regresi model pertama dapat dilihat pada tabel 8. Dari tabel tersebut terlihat bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak, baik yang diukur dengan -ETR maupun BTD. Dengan kata lain, **hipotesis 1 penelitian ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepemilikan institusional sebagai pengawas eksternal perusahaan belum berjalan dengan optimal. Para investor institusional kurang mencurahkan perhatiannya pada pengawasan terhadap tindakan pajak agresif perusahaan investasinya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sabli dan Noor (2012) dan bertentangan dengan penelitian Khurana dan Moser (2009) serta Moore (2012).

Variabel proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak, baik yang diproksikan dengan -ETR maupun BTD. Artinya, **hipotesis 2 penelitian diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa peran komisaris independen di Indonesia sebagai salah satu mekanisme pengawasan internal perusahaan telah berjalan dengan efektif sehingga tindakan pajak agresif perusahaan dapat ditekan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Lanis dan Richardson (2011) namun bertentangan dengan penelitian Minnick dan Moga (2010), Ying (2011), serta Sabli dan Noor (2012).

Variabel kualitas audit mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak yang diproksikan dengan -ETR. Dengan kata lain, **hipotesis 3 penelitian diterima untuk tingkat agresivitas pajak yang diukur dengan -ETR**. Akan tetapi, **apabila tingkat agresivitas pajak perusahaan diukur dengan BTD, hipotesis 3 penelitian ditolak**. Fakta ini menunjukkan bahwa KAP *Big 4* lebih mengawasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai ukuran tingkat agresivitas pajak dan tidak terlalu memperhatikan perbedaan buku

pajak perusahaan sehingga pemakaian KAP *Big 4* hanya berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak yang diukur dengan negatif dari tarif pajak efektif. Temuan ini sesuai dengan penelitian Richardson, Taylor, dan Lanis (2012) namun tidak sesuai dengan penelitian Crabbe, Lessius, dan Leuven (2010).

Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam model 1 penelitian juga dapat dikatakan sesuai karena pengaruh variabel-variabel itu terhadap variabel dependen adalah signifikan. Pengecualian hanya terjadi pada variabel pertumbuhan perusahaan, yang ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap *book tax difference* perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan yang sedang bertumbuh menggunakan cara-cara di luar pemanfaatan perbedaan buku pajak dalam melakukan tindakan pajak agresif.

Dari tabel 8 juga terlihat bahwa *adjusted R square* untuk model 1 dengan variabel dependen -ETR adalah 0,232 dan untuk model 1 dengan variabel dependen BTM adalah 0,219. Artinya variabel-variabel independen dan kontrol penelitian mampu menjelaskan 23,2% variasi -ETR dan 21,9% variasi BTM perusahaan.

4.3.2 Model 2

Sisipkan Tabel 9 di Sini

Tabel 9 menunjukkan hasil analisis regresi untuk model 2. Dari tabel ini, terlihat bahwa tingkat agresivitas pajak, baik yang diukur dengan -ETR maupun BTM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, **hipotesis 4 diterima**. Hal ini dikarenakan para investor memandang tingkat agresivitas pajak sebagai suatu penghematan pajak (*tax saving*), sehingga mereka memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif.

Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat dikatakan sesuai karena hampir semua variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, baik untuk model 2 yang memakai -ETR sebagai pengukur tingkat agresivitas pajak, maupun model 2 yang memakai BTD sebagai pengukur tingkat agresivitas pajak. Pengecualian hanya terjadi pada variabel *accrual* yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada model 2 yang memakai BTD sebagai pengukur tingkat agresivitas pajak. Hal ini disebabkan pengaruh akrual terhadap nilai perusahaan telah ditutupi oleh *book tax difference* perusahaan.

Dari tabel 9 juga terlihat bahwa *adjusted R square* untuk model 2 yang memakai -ETR sebagai pengukur tingkat agresivitas pajak adalah 0,1117 dan untuk model 2 yang memakai BTD sebagai pengukur tingkat agresivitas pajak adalah 0,1876. Artinya, variabel-variabel independen dan kontrol di model 2 dengan proksi agresivitas pajak -ETR mampu menjelaskan 11,17% variasi nilai perusahaan, sedangkan variabel-variabel independen dan kontrol di model 2 dengan BTD sebagai pengukur agresivitas pajak mampu menjelaskan 18,76% variasi nilai perusahaan.

4.3.3 Analisis Sensitivitas

Dengan menggunakan reduksi dimensi data, diperoleh 1 *common factor*. *Common factor* ini memiliki korelasi sebesar 0,790 terhadap *-effective tax rate* dan *book tax difference*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *common factor* ini berbanding lurus dengan tingkat agresivitas pajak. Setelah *common factor* ini diperoleh, *common factor* ini selanjutnya menjadi proksi bagi tingkat agresivitas pajak. Hasil analisis sensitivitas ini dapat dilihat pada tabel 10.

Sisipkan Tabel 10 di Sini

Dari tabel 10, terlihat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *common factor*, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *common factor*, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *common factor*. Hal ini sesuai dengan hasil analisis model 1 sebelumnya yang menggunakan BTD sebagai proksi dari tingkat agresivitas pajak.

Pada analisis sensitivitas model 2, terlihat bahwa tingkat agresivitas pajak yang diwakili oleh *common factor* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini konsisten dengan hasil regresi model 2 pada pembahasan bagian sebelumnya yang menggunakan -ETR dan BTD sebagai proksi agresivitas pajak.

5 Simpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di bab 4 diperoleh beberapa kesimpulan penelitian. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diuraikan pada paragraf-paragraf berikut.

Kesimpulan pertama adalah kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil ini mencerminkan bahwa peran kepemilikan institusional dalam menurunkan tingkat agresivitas pajak di perusahaan manufaktur Indonesia belum efisien.

Kesimpulan kedua adalah proporsi komisaris independen berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan tingkat agresivitas pajak. Fakta ini menunjukkan bahwa peran komisaris independen sebagai *internal monitoring* sudah efektif di perusahaan manufaktur Indonesia.

Kesimpulan ketiga adalah kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak yang diukur dengan -ETR, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak yang diukur dengan BTD dan *common factor*. Pemakaian KAP *Big*

4 yang menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan hanya dapat ditangkap oleh proksi - ETR.

Kesimpulan terakhir penelitian adalah tingkat agresivitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menandakan bahwa investor bursa mendukung tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur Indonesia.

5.2 Implikasi

Temuan penelitian ini menimbulkan beberapa implikasi praktis bagi penyusunan kebijakan dan sosialisasi perpajakan. Implikasi-implikasi tersebut akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut.

Pertama, proporsi komisaris independen yang terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak yang diprosikan oleh -ETR, BTD, dan *common factor* menimbulkan konsekuensi bahwa penyusunan parturan perpajakan harus memperhatikan syarat proporsi komisaris independen. Syarat proporsi komisaris independen sebesar 30% perlu ditingkatkan untuk menekan tingkat agresivitas pajak.

Kedua, kualitas audit yang berpengaruh signifikan hanya untuk tingkat agresivitas pajak yang diukur dengan -ETR menimbulkan implikasi bahwa kualitas audit belum perlu dipandang sebagai salah satu syarat prioritas dalam menyusun peraturan perpajakan. Faktor-faktor lain yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketiga proksi tingkat agresivitas pajak perlu lebih diperhatikan.

Ketiga, temuan bahwa tingkat agresivitas pajak yang tinggi meningkatkan nilai perusahaan. Implikasinya, manajer perusahaan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan pajak agresif karena nilai perusahaannya akan meningkat oleh tindakan tersebut. Bagi penyusun kebijakan perpajakan, hal ini perlu mendapat perhatian. Publikasi mengenai

buruknya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui *tax evasion* perlu dilakukan agar investor tidak terlalu mendukung tindakan pajak agresif tersebut.

5.3 Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar penelitian dilakukan terhadap industri lainnya di luar manufaktur. Saran ini bertujuan agar pengembangan ilmu di bidang agresivitas pajak ini menjadi lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi.

Di samping itu, penelitian di masa depan tentang topik ini dapat pula menambah jumlah tahun pengamatan. Penelitian ini hanya menggunakan 2 tahun karena keterbatasan data pasca perubahan tarif pajak penghasilan badan. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menganalisis lebih banyak tahun observasi karena jumlah data laporan keuangan tahun 2012 dan seterusnya akan tersedia.

Penulis juga menyarankan agar untuk penelitian selanjutnya, dilakukan penambahan jumlah variabel yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dan variabel yang menjadi dampak dari tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini disebabkan dalam penelitian model-model yang dikembangkan hanya mampu menjelaskan sekitar 20% dari variasi variabel dependen model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Daftar Referensi

- Afzal, Arie dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2): 1-9
- Ajija, Shochrul R *et al.* 2010. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anderson, David R.; Dennis J. Sweeney; dan Thomas A. Williams. 2011. *Statistics for Business and Economics. Eleventh Edition*. Ohio: South Western

- Aris, Achmad. 2009. Perusahaan Besar Hindari Pajak. http://www.pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5232
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga
- Armstrong, Christopher S *et al.* 2012. Governance, Incentives, and Tax Avoidance. http://lcb.uoregon.edu/app_themes/content/docs/actg/Jagolinzer.pdf
- Bursa Efek Indonesia. 2012. *IDX Fact Book 2012*. Jakarta : Bursa Efek Indonesia.
- _____. 2011. *IDX Fact Book 2011*. Jakarta : Bursa Efek Indonesia.
- Brigham, Eugene F dan Michael C. Ehrhardt. 2011. *Financial Management Theory and Practice. Thirteenth Edition*. Ohio : South Western
- Chen, Shuping *et al.* 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95(1): 41-61
- Cooper, Donald R dan Pamela Schindler. 2011. *Business Research Methods. Eleventh Edition*. New York : McGraw-Hill Higher Education
- Crabbe, Lessius, dan K.U. Leuven. 2010. The Impact of Auditor and Tax Advice on The Effective Tax Rate. <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=1740408>
- Desai, Mihir A dan Dhammika Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1): 145-179
- _____. 2009. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3): 537-546
- Dunbar *et al.* 2011. What Do Measures of Tax Aggressiveness Measure?. *National Tax Association Proceedings from the 103rd Annual Conference in Chicago*
- Fitriyani *et al.* 2012. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Perusahaan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*
- Frank, Mary Margaret., Luann J. Lynch, dan Sonja Olhoft Rego. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2): 467-496.
- Gerber, Susan B dan Kristin Voelkl Finn. 2005. *Using SPSS for Windows: Data Analysis dan Graphics*. New York : Springer
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Lima*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasnawati, Sri. 2005. Dampak Set Peluang Investasi terhadap Nilai Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 9(2): 117-126
- Herusetya, Antonius., Hilda Rosietta, dan Sylvia Veronica. 2012. Analisis Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba Akuntansi : Studi Pendekatan Composite Measure versus Conventional Measure. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*
- Harahap, Ludwina dan Ratna Wardhani. 2012. Analisis Komprehensif Pengaruh Family Ownership, Masalah Keagenan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Corporate Governance, dan Opportunity Growth terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*



- Hirsch, Barry T dan Terry G. Seaks. 1993. Functional Form in Regression Models of Tobin's q. *The Review of Economics and Statistics*, 75(2): 381-385
- Hsieh, Yao-Chih. 2012. New Evidence on Determinants of Corporate Effective Tax Rates. *African Journal of Business Management*, 6(3): 1177-1180
- Huseynov, Fariz dan Bonnie K. Klamm. 2012. Tax Avoidance, Tax Management, and Corporate Social Responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4): 804-827
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*
- Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa. 2009. Pengaruh Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2): 88-100
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*
- Kementerian Keuangan. 2012. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Khurana, Inder K dan William J. Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*
- Kim, Kenneth A dan Piman Limpaphayom. 1998. Taxes and Firm Size in Pacific-Basin Emerging Economies. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, 7(1): 47-68.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson. 2007. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6): 689-704
- _____. 2011. The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1): 50-70
- Lim, Youngdeok. 2011. Tax Avoidance, Cost of Debt, and Shareholder Activism : Evidence from Korea. *Journal of Banking and Finance*, 35(2): 456-470
- Liu, Xing dan Shujun Cao. 2007. Determinants of Corporate Effective Tax Rates : Evidence from Listed Companies in China., *The Chinese Economy*, 40(6): 49-67
- Makhdalena. 2012. Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Earning Management. *Jurnal Akuntansi*, 16(1): 71-82
- Martani, Dwi dan Kartika Dewi Sari. 2010. Ownership Characteristics, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness. *The 3rd Accounting & The 2nd Doctoral Colloquium Bridging the Gap between Theory, Research and Practice : IFRS Convergence and Application*
- Martani, Dwi dan Tryas Chasbiandani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*
- Maruli, Aditia. 2011. Jumlah Perkara di Pengadilan Pajak Meningkat. <http://www.antaraneews.com/berita/1320523781/jumlah-perkara-di-pengadilan-pajak-meningkat>.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance*, 16(5): 703-718
- Moore, Jared A. 2012. Empirical Evidence on The Impact of External Monitoring on Book-Tax Differences. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 28(2): 254-269



- Mursalim. 2009. Persamaan Struktural : Aktivisme Insitusi, Kepemilikan Institusional dan Manajerial, Kebijakan Dividen dan Utang. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 13(1): 43-59
- Murwaningsari, Ety. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1): 30-41
- Noor, Rohaya Md., Nur Syazwani M. Fadzillah, dan Nor'Azam Mastuki. 2010. Corporate Tax Planning : a Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics, and Finance*, 1(2): 189-193
- Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-41/PM/2003* tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Purnamasari *et al.* 2009. Interdependensi antara Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Keputusan Dividen. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(1): 106-119
- Rego, Sonja Olhoft dan Ryan Wilson. 2012. Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3): 775-810
- Richardson, Grant., Grantley Taylor, dan Roman Lanis. 2012. The Impact of Risk Management and Audit Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy Conference at the London School of Economics*.
- Rifai, Badriyah. 2009. Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum*, 16(3): 396-412
- Sabli, Nurshamimi dan Rohaya Md Noor. 2012. Tax Planning and Corporate Governance. *3rd International Conference on Business and Economic Research Proceeding*.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. *Research Method for Business : A Skill Building Approach. Fifth Edition*. New Jersey : John Wiley and Sons
- Setiawan, Stevanus Adree Cipto. 2009. Pengaruh Keputusan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 9(1): 39-54
- Suandy, Erly. 2012. *Hukum Pajak. Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat
- Supranto, J. 2008. *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 1. Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2009. *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 2. Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga
- Tiswiyanti, Wiwik., Dewi Fitriyani, dan Wiralestari. 2009. Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 14(1): 61-66
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008* tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Wahab, Nor Shaipah Abdul dan Kevin Holland. 2012. Tax Planning, Corporate Governance, and Equity Value. *The British Accounting Review*, 44(2): 111-124
- Wang, Xiaohang. 2010. Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1716474
- Widjaja, Indra dan Faris Kasenda. 2008. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Aktiva Berwujud, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi di BEI. *Jurnal Manajemen*, 12(2): 139-150

Wijaya, Lihan Rini Puspo., Bandi, dan Anas Wibawa. 2010. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*

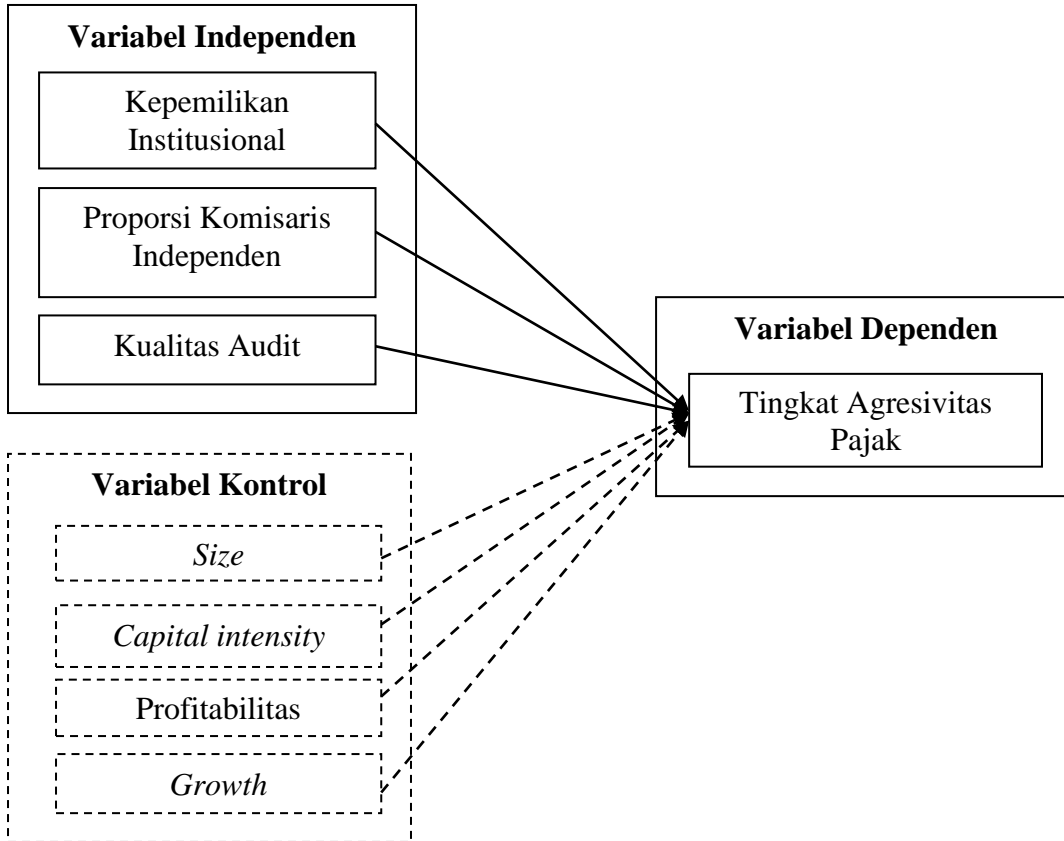
Yan, Xin dan Xiao Gang Su. 2009. *Linear Regression Analysis: Theory and Computing*. Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte, Ltd

Ying, Zhou. 2011. Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Aggresiveness. *Disertasi*. Lingnan University

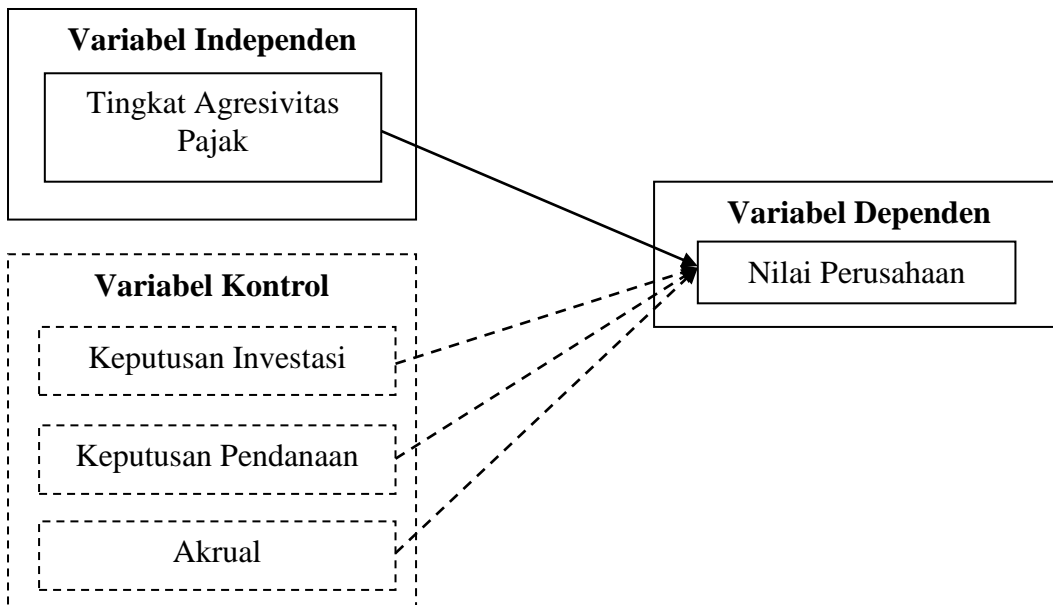
www.idx.co.id

Lampiran

Gambar 1 Model 1 Penelitian



Gambar 2 Model 2 Penelitian



Tabel 1 Seleksi Sampel

Keterangan	Model 1	Model 2
Jumlah observasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011	268	268
Laporan keuangan perusahaan tidak tersedia di www.idx.co.id	(8)	(8)
Laporan keuangan perusahaan tidak lengkap dan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik	(4)	(4)
Tahun buku laporan keuangan perusahaan bukan 1 Januari sampai dengan 31 Desember	(2)	(2)
Perusahaan mengalami rugi sebelum pajak	(41)	(41)
Perusahaan mendapatkan <i>income tax benefit</i> pada tahun laporan keuangan yang diteliti	(7)	(7)
Mata uang laporan keuangan perusahaan adalah non-rupiah	(21)	(21)
Tarif pajak efektif perusahaan lebih dari 1	(3)	(3)
Data kepemilikan institusional dan nilai perusahaan tidak dapat ditentukan	(2)	(2)
Data komisaris independen tidak tersedia di laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan	(3)	bukan kriteria
Total Sampel Sebelum Pembuangan <i>Outlier</i>	177	180

Tabel 2 Statistik Deskriptif Model 1

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
-ETR	177	-0,9249	-0,0280	-0,2669	0,1081
BTD	177	-0,0417	0,2533	0,0292	0,0576
Inst_Own	177	0%	100%	71,50%	18,65%
Prop_Kom	177	0,2500	1,0000	0,4010	0,1177
Big_4	177	0	1	0,42	0,495
Size	177	20,1861	32,7012	27,7850	1,7788
Cap_Ins	177	0,0104	0,7637	0,3396	0,1895
ROA	177	0,0000	0,4927	0,0984	0,0940
PBV	177	-1,15	167,56	3,2867	13,0685
Asset Growth	177	-0,9984	0,8536	0,1682	0,2047

Catatan : -ETR = *-effective tax rate*, BTD = *book tax difference*, Inst_Own = kepemilikan institusional, Prop_Kom = proporsi komisaris independen, Big_4 = kualitas audit, Size = ukuran perusahaan, Cap_Ins = *capital intensity*, ROA = *return on asset*, PBV = *price to book value*, Asset Growth = pertumbuhan aset perusahaan



Tabel 3 Statistik Deskriptif Model 2

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln (Tobin q)	177	-1,4396	1,9112	0,2913	0,5825
-ETR	177	-0,9249	-0,0280	-0,2663	0,1088
BTD	177	-0,0417	0,2533	0,0292	0,0576
EPR	177	-0,12	2,86	0,1481	0,3305
DER	177	-27,05	9,57	0,8537	2,6289
Accrual	177	-0,40	1,21	0,0153	0,1338

Catatan : Ln (Tobin q) = logaritma natural dari Tobin q, -ETR = *-effective tax rate*, BTD = *book tax difference*, EPR = *earning to price ratio*, DER = *debt to equity ratio*, Accrual = akrual

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*

Keterangan		N	Kolmogorov Smirnov Z	Asymp. Sig (2-tailed)
Model 1	Variabel dependen = - ETR	169	1,185	0,120
	Variabel dependen = BTD	177	1,131	0,155
Model 2	Variabel independen = - ETR	177	1,312	0,064
	Variabel independen = BTD	177	1,322	0,061

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas dengan *Variance Inflation Factor*

Keterangan	Nilai <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF)			
	Model 1 Dengan Y = - ETR	Model 1 dengan Y = - BTD	Model 2 dengan X1 = -ETR	Model 2 dengan X1 = - BTD
Inst_Own	1,110	1,112	-	-
Prop_Kom	1,091	1,085	-	-
Big_4	1,465	1,465	-	-
Size	1,253	1,256	-	-
Cap_Ins	1,103	1,093	-	-
ROA	1,413	1,422	-	-
PBV	1,260	1,053	-	-
Asset Growth	1,049	1,260	-	-
-ETR	-	-	1,111	-
BTD	-	-	-	1,050
EPR	-	-	1,649	1,642
DER	-	-	1,412	1,417
Accrual	-	-	1,351	1,326
N	169	177	177	177

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser test*

Keterangan	Nilai Sig. di Output SPSS dengan Regresi Terhadap Absolut Residual Model			
	Model 1 dengan Y = - ETR	Model 1 dengan Y = BTD	Model 2 dengan X1 = - ETR	Model 2 dengan X1 = BTD
Constant	0,379	0,172	0,000	0,000
Inst_Own	0,253	0,866	-	-
Prop_Kom	0,084	0,429	-	-
Big_4	0,772	0,144	-	-
Size	0,526	0,008	-	-
Cap_Ins	0,890	0,000	-	-
ROA	0,061	0,000	-	-
PBV	0,854	0,603	-	-
Asset Growth	0,854	0,000	-	-
-ETR	-	-	0,023	-
BTD	-	-	-	0,018
EPR	-	-	0,730	0,566
DER	-	-	0,084	0,218
Accrual	-	-	0,104	0,337
N	169	177	177	177

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi dengan *Langrange Multiplier test*

Keterangan		N	Nilai Sig. Res_2
Model 1	Variabel dependen = - ETR	169	0,154
	Variabel dependen = BTD	177	0,721
Model 2	Variabel independen = - ETR	177	0,451
	Variabel independen = BTD	177	0,697

Tabel 8 Hasil Regresi Model 1

$$\text{Tax_Agg} = \beta_0 + \beta_1.\text{Inst_Own} + \beta_2.\text{Prop_Kom} + \beta_3.\text{Big_4} + \beta_4.\text{Firm_Size} + \beta_5.\text{Cap_Ins} + \beta_6.\text{ROA} + \beta_7.\text{PBV} + \beta_8.\text{Asset_Growth} + \varepsilon$$

Keterangan	Variabel Dependen – Model 1	
	-ETR	BTB (White HCC)
Constant	-0,462 (-3,461)***	-0,182 (-2,097)**
Inst_Own	0,000 (0,418)	-0,004 (0,224)
Prop_Kom	-0,092 (-2,509)**	-0,057 (-2,013)**
Big_4	-0,026 (-2,564)**	-0,012 (-1,312)
Size	0,006 (2,332)**	0,008 (2,692)***
Cap_Ins	-0,038 (-1,666)*	-0,054 (-2,755)***
ROA	0,275 (5,344)***	0,252 (4,126)***
PBV	-0,001 (-1,741)*	-0,000 (-5,473)***
Asset Growth	0,057 (2,847)***	0,017 (1,062)
Adjusted R ²	0,232	0,219
F Statistics	7,343	7,158
p value (F Statistics)	0,000	0,000
N	169	177

*menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 10%
 ** menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 5%
 *** menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 1%
 Nilai dalam kurung merupakan nilai *t-statistics*
 Dari hasil regresi awal, diperoleh 8 *outlier* untuk model dengan variabel dependen –ETR dan 0 *outlier* untuk model dengan variabel dependen BTB (White HCC)

-ETR = *-effective tax rate*, BTD = *book tax difference*, Inst_Own = persentase kepemilikan institusional, Prop_Kom = proporsi komisaris independen, Big_4 = kualitas audit, Size = ukuran perusahaan, Cap_Ins = *capital intensity*, ROA = *return on asset*, PBV = *price to book value*, Asset Growth = pertumbuhan aset perusahaan.

Nilai t yang dilaporkan untuk regresi dengan variabel dependen BTD merupakan nilai t yang telah disesuaikan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Consistent Standard Errors & Covariance* karena model penelitian mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 9 Hasil Regresi Model 2

$$\text{Firm_Value} = \beta_0 + \beta_1.\text{Tax_Agg} + \beta_2.\text{EPR} + \beta_3.\text{Lev} + \beta_4.\text{Accrual} + \varepsilon$$

Keterangan	Variabel Dependen = Ln Tobin q	
	Variabel bebas = -ETR (White HCC)	Variabel bebas = BTB (White HCC)
Constant	0,720 (6,830)***	0,310 (5,734)***
-ETR	1,101 (3,806)***	
BTB		3,478 (4,004)***
EPR	-0,567 (-3,404)***	-0,504 (-3,679)***
DER	-0,073 (-5,431)***	-0,066 (-5,720)***
Accrual	0,724 (1,816)*	0,621 (1,557)
Adjusted R ²	0,1117	0,1876
F Statistics	6,534	11,164
p value (F Statistics)	0,000	0,000
N	177	177

*menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 10%

** menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 5%

*** menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 1%

Dari hasil regresi awal, diperoleh 3 *outlier* untuk semua model

Ln Tobin q = Nilai ln dari Tobin q, -ETR = *-effective tax rate*, BTB = *book tax difference*, EPR = *earning to price ratio*, DER = *debt to equity ratio*, Accrual = *net income* – arus kas operasi/total aset awal tahun

Nilai t yang dilaporkan untuk semua model merupakan nilai t yang telah disesuaikan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Consistent Standard Errors & Covariance* karena seluruh model penelitian mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 10 Hasil Regresi untuk Analisis Sensitivitas

Keterangan	Model 1	Model 2
Constant	-3,459 (-3,098)***	0,424 (8,213)***
Inst_Own	0,000 (0,108)	-
Prop_Kom	-1,541 (-2,807)**	-
Big_4	-0,211 (-1,389)	-
Size	0,141 (3,594)***	-
Cap_Ins	-1,000 (-2,919)***	-
ROA	5,019 (6,373)***	-
PBV	-0,016 (-2,909)*	-
Asset Growth	0,770 (2,475)**	-
Com_fac	-	0,210 (4,805)***
EPR	-	-0,552 (-3,795)***
DER	-	-0,070 (-5,926)***
Accrual	-	0,464 (1,149)
Adjusted R ²	0,322	0,1931
F Statistics	11,447	11,536
p value (F Statistics)	0,000	0,000
N	177	177

*menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 10%

** menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 5%

*** menandakan signifikan pada tingkat signifikansi 1%

Nilai dalam kurung merupakan nilai *t-statistics*. Definisi tiap variabel sama dengan tabel sebelumnya dengan tambahan definisi *com_fac = common factor*.

Dari hasil regresi awal, untuk memenuhi asumsi normalitas diperoleh 0 *outlier* untuk model 1 (dengan variabel dependen *common factor*) dan 3 *outlier* untuk model 2 (dengan variabel dependen Ln(Tobin q) dan prosedur koreksi White HCC). Model 1 dan 2 lolos uji asumsi multikolinearitas dan autokorelasi.

Nilai t yang dilaporkan untuk regresi analisis sensitivitas ini merupakan nilai t yang telah disesuaikan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Consistent Standard Errors & Covariance* karena model penelitian mengandung heteroskedastisitas.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan *e-Filing* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di Kota Padang)

ALTAHIDA IRHASH PUTRA

FIRDAUS

FAUZAN MISRA*

Universitas Andalas

Abstract: *This research aims was to investigate the factors that influenced the taxpayer's behavioral intention for using e-filling (electronic filing system). Dependent variables in this research is behavioral intention for the e-filling usage while independent variables are perceived usefulness, perceived ease of use, complexity, voluntariness, experience, security and privacy.*

Data used in this research is primary data obtain through a questionnaire. Respondent is the Entity Taxpayers who use e-filling in Padang. Sample collection methods used in this research was simple random sampling. Data analysis in this research uses the Technology Acceptance Models (TAM) that combined with Theory of Reasoned Action (TRA).

The result of this research are as follows: (1) perceived usefulness significantly positive influence to behavioral intention for the e-filling usage, (2) perceived ease of use significantly positive influence to behavioral intention for the e-filling usage, (3) Complexity significantly influence to behavioral intention for the e-filling usage, (4) Voluntariness significantly positive influence to behavioral intention for the e-filling usage, (5) The experience significantly positive influence to behavioral intention for the e-filling usage, (6) Security and Privacy significantly positive influence to behavioral intention for the e-filling usage.

Keywords: *Electronic Filing System, Technology Acceptance Models (TAM), Theory Of Reasoned Action (TRA), Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Complexity, Voluntariness, Experience, Security And Privacy.*

* Corresponding author: fauzan_maestro@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik dan akurat. Penyederhanaan sistem perpajakan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin, terlebih di negara dengan tingkat kepatuhan relatif rendah seperti di Indonesia (Setiyaji dan Amir, 2005).

Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu tindakan pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak (Novarina, 2005). Perubahan paling besar yang terkait dengan modernisasi perpajakan terjadi pada tahun 2005 yaitu dengan dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan dan penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan melalui elektronik (*e-Filing*) (Dewi, 2009). Pengertian *e-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-Filing*) yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. Penggunaan *e-Filing* ini bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Selain itu, penggunaan *e-Filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Dewi, 2009).

Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) dilakukan melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal pengaturannya lebih lanjut terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

Menurut Wiyono (2008), *e-Filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jenderal Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Menurut Dewi (2009), tujuan utama dari pelaporan *e-Filing* adalah memangkas biaya dan waktu Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Sistem *e-Filing* ini juga memberikan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan dan akurasi data, distribusi serta pengarsipan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan *e-Filing* karena di samping kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak juga mungkin Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Menurut Dewi (2009), jika partisipasi Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing* masih rendah maka akan mengakibatkan *return* yang diterima Direktorat Jenderal Pajak juga rendah. Hal ini akan merugikan Direktorat Jenderal Pajak yang sudah mengeluarkan biaya yang tentu tidak sedikit untuk

menciptakan sistem informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan.

Peneliti terdahulu juga menganalisis perilaku penerimaan suatu teknologi informasi baru dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan hasil yang bervariasi. Davis F.D (1989) mengembangkan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk meneliti faktor-faktor determinan dari penggunaan sistem informasi oleh pengguna. Hasil penelitian Davis menunjukkan bahwa minat penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*.

Penelitian yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para Wajib Pajak yang telah mencoba atau menggunakan *e-Filing* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa kewajiban menggunakan *e-Filing* akan menyebabkan tidak signifikannya pengaruh minat perilaku terhadap penggunaan senyatanya. Selain itu kerumitan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan senyatanya, demikian pula jenis kelamin juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Winna (2011) yang melakukan studi empiris terhadap minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan kesukarelaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*. Sedangkan kompleksitas, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, dan kecepatan tidak berpengaruh positif terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*. Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-Filing* ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan Wiyono (2008) yaitu penerimaan Wajib Pajak terhadap *e-Filing* di Indonesia dengan menggunakan model kesuksesan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Amroso dan Gardner.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah teori tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* dengan objek penelitian berbeda akan memperoleh hasil yang sama atau berbeda. Penelitian mengenai minat perilaku penggunaan *e-Filing* di Indonesia masih sedikit. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna *e-Filing* masih relatif sedikit. Padahal *e-Filing* memberikan fasilitas yang lebih memudahkan bagi Wajib Pajak, yang seharusnya memberikan respon yang bagus dengan banyaknya Wajib Pajak yang menggunakannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* ini menarik untuk diteliti.

1.2 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan teknologi informasi yang diterapkan. Hal tersebut juga terkait dengan penelitian ini yang juga menganalisis kesuksesan teknologi informasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *e-Filing*. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kesuksesan *e-Filing* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap minat Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di Kota Padang untuk menggunakannya. Selanjutnya, rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kegunaan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*?
2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*?
3. Apakah kompleksitas penggunaan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*?
4. Apakah kesukarelaan penggunaan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*?

5. Apakah pengalaman untuk menggunakan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*?
6. Apakah keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*?

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel-variabel dependen seperti dijelaskan di atas terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-filing.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Electronic Filing System (E-Filing)*

Definisi *e-Filing* menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi, yaitu suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.

E-Filing merupakan bagian dari reformasi perpajakan dibidang administrasi perpajakan, yang dimulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak (*e-Registration*), pembayaran pajak (*e-Transaction and e-Payment*) dan pelaporan pajak dengan SPT (*e-Filing*). Sedangkan e-SPT sendiri yaitu Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time* (Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 dan KEP-

05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

Pada dasarnya, tujuan dari *e-Filing* ini adalah untuk memberikan alternatif pilihan layanan kepada Wajib Pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selain dengan cara manual yang seperti pada umumnya telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan pemanfaatan teknologi melalui internet yang secara keseluruhan cenderung lebih akurat dan dengan proses yang lebih cepat sehingga bisa lebih efektif dan efisien (Dewi, 2009). Namun demikian, bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan jasa elektronik ini, penyampaian Surat Pemberituannya masih dilakukan dengan cara menyampaikan kembali bukti penerimaan SPT elektronik (*print out*) Induk SPT Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Hal ini menjadikan sistem ini yang seharusnya efisien menjadi tidak efisien, karena Wajib Pajak harus kerja dua kali (Novarina, 2005).

2.2 Teori Keperilakuan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi

Penerapan suatu sistem dan teknologi informasi tidak terlepas dari aspek perilaku karena pengembangan sistem terkait dengan masalah individu dan organisasional sebagai pengguna sistem tersebut, sehingga sistem yang dikembangkan harus berorientasi pada penggunanya (Pratama, 2008). Novarina (2005) menyatakan bahwa keberhasilan penerimaan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut bisa memproses suatu informasi dengan baik, tapi juga ditentukan oleh tingkat penerimaan individu terhadap penerapan sistem informasi tersebut.

Teknologi informasi terkait dengan internet telah digunakan dalam banyak aspek kehidupan, seperti perdagangan/bisnis (*e-Commerce*), pendidikan (*e-Education*), dan bahkan pada bidang pemerintahan (*e-Government*). Sistem dan teknologi informasi terus berkembang

mengikuti kebutuhan yang berasal dari permasalahan individu dan organisasional yang menjadi pengguna dari sistem tersebut. Menurut Dewi (2009), berdasarkan teori keperilakuan, diajukan teori yang mengatakan bahwa teknologi informasi mampu mengubah hirarki dari pengambilan keputusan pada organisasi dengan cara menekan biaya yang diperlukan oleh informasi dan memperluas distribusi informasi. Terkait dengan *e-Filing*, dengan diciptakannya *e-Filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat merampingkan posisi-posisi dalam organisasi tersebut. Teknologi informasi mampu membawa informasi langsung dari unit-unit operasi ke atasan, dengan demikian mengurangi pekerja data yang terkait. Teknologi informasi juga dapat mendistribusikan informasi secara langsung kepada para pekerja di level yang lebih rendah.

Menurut Firmawan (2009), aspek perilaku dalam penerapan teknologi informasi merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan karena berhubungan langsung dengan pengguna, disebabkan oleh interaksi antara pengguna dan perangkat komputer yang digunakan sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, afeksi sebagai alat keperilakuan yang melekat pada diri manusia sebagai *user*. Maka dari itu, berbagai usaha terkait dengan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan (*tax reform*) yang terus dilakukan secara berkesinambungan, dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

2.2.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna (Winna, 2011). *Technology Acceptance Model (TAM)* awalnya dikembangkan oleh Davis F.D (1989) yang merupakan salah satu model yang paling

banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi karena model ini lebih sederhana dan mudah diterapkan. Model ini sebenarnya mengacu pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) dalam menerangkan dan memprediksi perilaku pengguna teknologi informasi. *Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut (Winna, 2011).

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kemanfaatan atau kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Davis F.D, 1989). Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan sistem, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri. Oleh karena itu, *Technology Acceptance Model* ini dapat menjelaskan aspek keperilakuan pengguna bahwa alasan pengguna dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi informasi menyebabkan tindakan pengguna tersebut dapat menerima penggunaan teknologi informasi.

2.2.2 *Theory of Reasoned Action* (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) adalah suatu teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) teori tindakan beralasan adalah teori yang menjelaskan bahwa minat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku. Seseorang akan memanfaatkan atau menggunakan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya (Dewi, 2009).

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), teori tindakan beralasan menjelaskan tahapan manusia melakukan perilaku. Pada tahap awal, perilaku diasumsikan ditentukan oleh minat. Pada tahap berikutnya minat dapat dijelaskan dalam bentuk sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif. Tahap ketiga mempertimbangkan sikap dan norma subjektif dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan tentang konsekuensi melakukan perilakunya dan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang yang direferensi (*referent*) yang relevan. Secara keseluruhan, berarti perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaannya. *Theory of Reasoned Action* (TRA) merupakan model khusus yang telah terbukti berhasil untuk memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam memanfaatkan suatu teknologi dengan beragam bidang (Pratama, 2008).

2.3 Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Persepsi Kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan sistem, maka pengguna akan dapat meningkatkan kinerja mereka (Davis F.D, 1989). Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan sistem yang dimaksud adalah *e-Filing*. Persepsi Kegunaan disini mengacu pada manfaat untuk organisasi atau badan, karena penelitian ini melakukan studi empiris pada Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di Kota Padang.

Persepsi pengguna terhadap kegunaan teknologi dapat diukur dari beberapa faktor yaitu: penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna; penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna; dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

2.4 Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*)

Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri (Davis F.D, 1989). Persepsi Kemudahan Penggunaan berkaitan erat dengan faktor persepsi pengguna terhadap kegunaan atau manfaat teknologi informasi atau sistem, dalam hal ini adalah *e-Filing*.

Persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama berfokus pada teknologi itu sendiri, misalnya pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi sejenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi baru yang disediakan, begitu pula sebaliknya. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan pengguna akan kemudahan penggunaan teknologi tersebut, demikian pula sebaliknya. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme pendukung yang handal. Mekanisme pendukung (*support*) yang terpercaya akan mempengaruhi kepercayaan pengguna akan kemudahan teknologi misalnya pengguna merasa yakin bahwa terdapat mekanisme pendukung yang handal jika menemukan kesulitan dalam menggunakan teknologi. Maka hal ini akan mendorong persepsi pengguna ke arah positif, dan demikian pula sebaliknya.

2.5 Kompleksitas (*Complexity*)

Kompleksitas (*Complexity*) adalah ukuran kemampuan pengguna yang mempersepsikan suatu sistem itu mudah dipahami atau sulit dipahami (Winna, 2011). Wiyono (2008) mengemukakan kompleksitas sebagai tingkatan persepsi terhadap teknologi komputer yang dipersepsikan sebagai suatu hal yang relatif sulit dipahami dan digunakan. Sesuatu dikatakan kompleks apabila hal tersebut melebihi keterbatasan kognitif manusia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas (*complexity*) mempunyai pengaruh negatif terhadap penggunaan suatu sistem yang baru.

Menurut Winna (2011), kompleksitas muncul ketika Wajib Pajak mempersepsikan bahwa penggunaan *e-Filing* dapat menyita waktu, sulit untuk dipadukan dengan pekerjaan, dan dapat membahayakan data Wajib Pajak. Maka hal ini menjadikan Wajib Pajak cenderung untuk tidak menggunakan *e-Filing*.

2.6 Kesukarelaan (*Voluntariness*)

Tingkat kesukarelaan didefinisikan sebagai keputusan untuk mengadopsi bukanlah suatu paksaan, melainkan keinginan yang timbul dari diri sendiri (Venkantesh and Davis, 2000). Pada sistem *e-Filing*, kesukarelaan merupakan bentuk persepsi pengguna untuk menggunakan *e-Filing* tanpa paksaan (undang-undang terkait).

2.7 Pengalaman (*Experience*)

Dalam suatu Teknologi Informasi (TI), pengalaman dapat didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan pengguna (*user*) yang diperolehnya ketika pengguna telah pernah menggunakan teknologi informasi tersebut sebelumnya. Maka dalam hal ini pengguna dapat memutuskan apakah dia berminat untuk menggunakan teknologi informasi tersebut.

Pratama (2008) menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara seseorang yang mempunyai pengalaman terhadap suatu teknologi dan perilakunya terhadap teknologi yang mirip. Adanya perbedaan yang signifikan antara pengguna berpengalaman dan yang tidak berpengalaman terhadap teknologi yang sejenis. Pengguna yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara minat menggunakan suatu teknologi dan perilaku penggunaan suatu teknologi bagi pengguna yang berpengalaman (Fishbein dan Ajzen, 1980).

2.8 Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Privacy*)

Salah satu alasan lain mengapa pengguna memilih untuk menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi adalah karena jaminan keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*) telah dicatat dalam berbagai penelitian perbankan (Winna, 2011). Keamanan (*security*) berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian (*hacking*) rendah. Sedangkan kerahasiaan (*privacy*) berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya (Hamlet and Strube, 2000).

Pengguna tidak mengetahui seberapa kuatnya keamanan dan kerahasiaan sistem informasi dalam hal ini adalah *e-Filing*. Maka dari itu pihak Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) perlu untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan teknologi tersebut guna mendapatkan kepercayaan dari pengguna *e-Filing*. Jadi suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini harus terjaga kerahasiaannya sehingga pihak lain tidak dapat mengakses data pengguna secara bebas (Dewi, 2009). Dalam *e-Filing* ini, keamanan dapat dilihat dari tersedianya *username* (ID) dan *password* bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara

online. *Digital certificate* juga dapat digunakan sebagai proteksi keamanan data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu.

2.9 Minat Perilaku Penggunaan *E-Filing* (*Behavioral Intention for the E-filing Usage*)

Minat (*intention*) adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Minat perilaku adalah suatu ukuran tentang kekuatan tujuan seseorang untuk melakukan tindakan khusus (Fishbein dan Ajzen, 1975). Jadi, minat perilaku penggunaan *e-Filing* adalah ukuran kekuatan dari minat seseorang untuk menunjukkan perilaku terhadap adanya sistem *e-Filing*. Menurut Teori Tindakan Beralasan atau *Theory of Reasoned Action* (TRA), minat dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku, dalam hal ini adalah perilaku dalam menggunakan *e-Filing*. Sistem *e-Filing* ini harus memberikan banyak manfaat dan mudah dipahami sehingga Wajib Pajak akan tertarik atau berminat terhadap *e-Filing*.

2.10 Penelitian Terdahulu

Davis (1989) mengembangkan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk meneliti faktor-faktor determinan dari penggunaan sistem informasi oleh pengguna. Hasil penelitian Davis ini menunjukkan bahwa minat penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*.

Wiyono (2008) melakukan penelitian mengenai penerimaan Wajib Pajak terhadap penggunaan *e-Filing* dengan model *Technology Acceptance Model* (TAM) yang berbeda variabel. Penelitian yang dilakukan Wiyono terhadap Wajib Pajak yang telah mencoba atau menggunakan *e-Filing* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa sikap penggunaan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*. Kerumitan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan senyatanya, sedangkan kerumitan tidak berpengaruh

signifikan terhadap persepsi kegunaan. Pengalaman tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan maupun minat perilaku. Jenis kelamin hanya berpengaruh signifikan pada persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap dan persepsi kegunaan. Sedangkan persepsi kegunaan terhadap penggunaan aktual tidak signifikan pada 8 tingkat kepercayaan. Persepsi kegunaan berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 90% terhadap sikap Wajib Pajak. Sedangkan minat perilaku, persepsi kegunaan, dan kesukarelaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing*.

Dewi (2009) juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *perceived usefulness, perceived ease of use, complexity, voluntaries* berpengaruh positif terhadap minat pengguna *e-Filing*. Sedangkan *experience, attitude, security and privacy, design and content, speed* berpengaruh negatif terhadap minat pengguna *e-Filing*.

Penelitian juga dilakukan Gita (2010) tentang perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap penggunaan *e-Filing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, dan penggunaan sistem secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Kualitas informasi, kualitas sistem, dan kepuasan pengguna berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan sistem. Sedangkan penggunaan sistem dan kepuasan pengguna secara signifikan berpengaruh positif terhadap dampak individual. Dampak individual secara signifikan berpengaruh positif terhadap dampak organisasional.

Penelitian yang dilakukan Winna (2011) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-Filing* menunjukkan ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan kesukarelaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku penggunaan *E-Filing*. Sedangkan kompleksitas, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, dan Kecepatan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*.

2.11 Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu minat perilaku penggunaan *e-Filing* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, dan keamanan dan kerahasiaan.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1:** *Persepsi kegunaan e-Filing berpengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-Filing.*
- H2:** *Persepsi kemudahan penggunaan e-Filing berpengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-Filing.*
- H3:** *Kompleksitas penggunaan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-Filing.*
- H4:** *Kesukarelaan untuk menggunakan e-Filing berpengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-Filing.*
- H5:** *Pengalaman berpengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-Filing.*
- H6:** *Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-Filing.*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di Kota Padang. Alasan melakukan penelitian ini adalah karena ingin mengetahui keefektifan penerapan *e-Filing* di Kota Padang. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan perusahaan manufaktur yang telah dan belum menggunakan *e-Filing* di Kota Padang. Alasan memilih Wajib Pajak Badan adalah karena Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat sedikit yang sudah mengenal *e-Filing*. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara probabilitas yaitu *Simple Random Sampling*.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah minat perilaku penggunaan *e-Filing*. Dalam penelitian ini, minat perilaku penggunaan *e-Filing* merupakan ukuran kekuatan dari minat seseorang untuk menunjukkan perilaku terhadap adanya sistem pelaporan pajak secara *e-Filing*. Variabel ini diukur dengan beberapa item pertanyaan yang menggunakan skala Likert 5 poin.

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, dan keamanan dan kerahasiaan. Semua variabel dependen juga diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 5 poin. Berikut definisi operasional masing-masing variabel independen:

1. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Persepsi Kegunaan disini mengacu pada manfaat untuk organisasi atau badan, karena penelitian ini melakukan studi empiris pada Wajib Pajak Badan di Kota Padang. Persepsi pengguna terhadap kegunaan teknologi dapat diukur dari beberapa faktor yaitu:

penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna; penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna; dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan

Kemudahan penggunaan dalam hal ini tidak hanya kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual (Pratama, 2008).

3. Kompleksitas

Kompleksitas adalah ukuran kemampuan pengguna yang mempersepsikan suatu sistem itu mudah dipahami atau sulit dipahami (Winna, 2011). Wiyono (2008) menyatakan kompleksitas sebagai suatu hal yang relatif sulit dipahami dan digunakan.

4. Kesukarelaan

Dalam hal *e-Filing*, kesukarelaan merupakan bentuk persepsi pengguna untuk memutuskan menggunakan *e-Filing* tanpa paksaan (undang-undang terkait).

5. Variabel Pengalaman

Pratama (2008) menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara seseorang yang mempunyai pengalaman terhadap suatu teknologi dan perilakunya terhadap teknologi yang mirip. Adanya perbedaan yang signifikan antara pengguna berpengalaman dan yang tidak berpengalaman terhadap teknologi yang sejenis.

6. Variabel Keamanan dan Kerahasiaan

Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan

oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini harus terjaga kerahasiaannya sehingga pihak lain tidak dapat mengakses data pengguna secara bebas (Dewi, 2009).

3.3. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sekaran, 2003). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh responden Wajib Pajak Badan di Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Sebelum dikirimkan kepada responden, dilakukan *pretest* atas kuesioner terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa kalimat yang ada dalam kuesioner mudah dipahami oleh responden. Setelah dilakukan *pretest*, kuesioner dikirimkan secara langsung ke perusahaan sebagai responden.

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini menggunakan *confirmatory factor analysis*. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi variabel.

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat mengungkapkan ketepatan gejala yang dapat diukur. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama. Tingkat reliabilitas adalah lebih besar dari 0,7 walaupun bukanlah suatu ukuran mati (Ferdinand, 2006). Nunnally (1967) mengemukakan bahwa suatu instrumen yang reliabel jika memiliki koefisien *cronbach alpha* di atas 0,60.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian meliputi (1) Uji multikolinearitas dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF), (2) Uji Heteroskedastisitas, dimana jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas atau yang terjadi Heteroskedastisitas, dan (3) Uji Normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini digunakan cara analisis plot grafik histogram dan uji *kolmogorov-smirnov* (uji K-S).

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan perhitungan regresi linier berganda, dengan melihat pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, dan keamanan dan kerahasiaan terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*.

Model analisis regresi dalam penelitian ini dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Minat Perilaku untuk menggunakan *E-Filing*

α : Konstanta Regresi

X1 : Persepsi Kegunaan

- X2 : Persepsi Kemudahan penggunaan
X3 : Kompleksitas
X4 : Kesukarelaan
X5 : Pengalaman
X6 : Keamanan dan Kerahasiaan
 β : Koefisien Regresi
 ε : error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

Pada tabel 4.1 dijelaskan bahwa kuesioner yang dikirim sebanyak 108 kuesioner. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 94 kuesioner. Kuesioner yang rusak atau tidak lengkap sebanyak 5 kuesioner. Jadi jumlah sampel pengamatan sebanyak 89 pengamatan.

Tabel 4.1

Distribusi Penyebaran Kuesioner

4.2 Deskripsi Responden menurut Sumber Perolehan Informasi *e-Filing*

Tabel 4.2 menyajikan informasi berupa data Sumber Perolehan Informasi *e-Filing* yang diperoleh responden meliputi sosialisasi langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (SL), media elektronik (ME), media cetak (MC), dan atau informasi perorangan (IP).

Tabel 4.2

Sumber Informasi Responden Terhadap *e-Filing*

4.3 Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), kompleksitas (*complexity*), kesukarelaan (*voluntariness*), pengalaman (*experience*), keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*) dan minat perilaku penggunaan *e-Filing* disajikan dalam tabel statistik deskriptif yang menunjukkan angka kisaran teoritis dan sesungguhnya, rata-rata standar deviasi yang dapat dilihat dalam tabel 4.3. Pada tabel tersebut disajikan kisaran teoritis yang merupakan kisaran atas bobot jawaban yang secara teoritis didesain dalam kuesioner dan kisaran sesungguhnya yaitu nilai terendah sampai nilai tertinggi atas bobot jawaban responden yang sesungguhnya.

Tabel 4.3

Deskripsi Variabel Penelitian

Apabila nilai rata-rata jawaban pada kisaran sesungguhnya di bawah rata-rata kisaran teoritis maka dapat diartikan bahwa penilaian responden terhadap variabel yang sedang diteliti mempunyai kecenderungan pada level yang rendah. Begitu pula sebaliknya jika nilai rata-rata kisaran sesungguhnya diatas rata-rata kisaran teoritis, maka penilaian responden terhadap variabel yang diteliti mempunyai kecenderungan pada level yang tinggi.

4.4 Pengujian Instrumen

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen atau uji kualitas data. Pengujian instrumen atau uji kualitas data ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih sah (*valid*) dan andal (*reliabel*) secara empiris. .

Berikut adalah rangkuman hasil uji validitas untuk masing–masing variabel yang diuji. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.4**Rangkuman Hasil Uji Validitas**

Dari hasil pengujian instrumen yang peneliti lakukan pada responden, seluruh pernyataan mengenai variabel-variabel penelitian berjumlah 23 item dinyatakan valid.

Hasil analisis reliabilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5**Hasil Uji Reliabilitas**

Berdasarkan tabel rangkuman hasil uji reliabilitas diatas, nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel yang diteliti memiliki nilai $> 0,60$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item mendukung instrumen (item yang reliabel atau andal) sehingga dapat digunakan untuk tahapan pengujian hipotesis).

4.5 Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik pertama yaitu uji normalitas menunjukkan hasil analisis berupa Normal P-Plot sebagai berikut :

Gambar 4.1**Hasil Uji Normalitas**

Pada grafik 4.1 terlihat bahwa titik – titik pada garis menyebar dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan grafik tersebut mengikuti pola distribusi normal, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji Multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.6**Hasil Uji Multikolinearitas**

Dari tabel 4.6 terlihat hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Dan dari hasil perhitungan *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 sehingga disimpulkan dalam model regresi tidak ada Multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan memplotkan grafik antara SRESID dengan ZPRED di mana gangguan heteroskedastisitas akan tampak dengan adanya pola tertentu pada grafik. Berikut adalah uji heteroskedastisitas pada keempat model dalam penelitian ini:

Gambar 4.2**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing*.

4.6 Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9 berikut:

Tabel 4.8**Hasil Uji t****Tabel 4.9****Hasil Uji F**

Dari hasil uji F atau uji Anova diketahui nilai f hitung sebesar 52,454 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *complexity* (kompleksitas), *voluntariness* (kesukarelaan), *experience* (pengalaman) dan *security and privacy* berpengaruh secara signifikan terhadap minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing*.

Tabel 4.11

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dari tabel 4.10 diperoleh angka R^2 sebesar 0,793 atau 79,3%. Namun untuk variabel penelitian yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen, maka analisis koefisien determinasi menggunakan *adjusted R²* yaitu nilai R^2 yang telah disesuaikan. Dari hasil analisis diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *complexity* (kompleksitas), *voluntariness* (kesukarelaan), *experience* (pengalaman) dan *security and privacy* terhadap minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* adalah sebesar 77,8%. Atau dapat dikatakan variasi variabel independen yang digunakan dalam model (*perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *complexity* (kompleksitas), *voluntariness* (kesukarelaan), *experience* (pengalaman) dan *security and privacy* mampu menjelaskan 77,8% variasi variabel minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing*. Sedangkan sisanya sebesar 22,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel dan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.7 Pembahasan dan Diskusi

Pengujian terhadap enam hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini seluruhnya diterima. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa persepsi kegunaan *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filing*. Hal ini mengindikasikan bahwa

sudah efektifnya penggunaan *e-Filing* dalam meningkatkan performa pelaporan pajak, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pelaporan pajak serta dapat menyederhanakan proses pelaporan pajak.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Davis F.D (1989), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) bahwa dengan menggunakan sistem dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna sehingga pengguna akan dapat meningkatkan kinerja mereka. Teori ini juga mendukung teori keperilakuan yang dikemukakan oleh Dewi (2009), bahwa teknologi informasi mampu mengubah hierarki dari pengambilan keputusan pada organisasi dengan cara menekan biaya yang diperlukan oleh informasi dan memperluas distribusi informasi. Terkait dengan *e-filling*, dengan diciptakannya *e-filling* dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat merampingkan posisi-posisi dalam organisasi tersebut.

Disamping itu Firmawan (2009) mengemukakan bahwa aspek perilaku dalam penerapan TI merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan karena berhubungan langsung dengan pengguna, disebabkan oleh interaksi antara pengguna dan perangkat komputer yang digunakan sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, afeksi sebagai alat keperilakuan yang melekat pada diri manusia sebagai *user*.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filing*. Teori Davis F.D (1989) mengungkapkan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan (*perceived ease of use*) merupakan tingkat kepercayaan pengguna bahwa system dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri. Kemudahan Penggunaan *e-filling* tidak hanya kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual seperti yang dikemukakan oleh Pratama (2008).

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan *e-Filling* memiliki pengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wiyono (2009) dan Dewi (2009). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Winna (2011).

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa *voluntariness* (kesukarelaan) penggunaan *e-Filling* memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wiyono (2009) dan Dewi (2009). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Winna (2011). Teori yang dikemukakan Venkatesh dan Davis (2000) mengenai tingkat kesukarelaan menyatakan bahwa tingkat kesukarelaan sebagai perluasan pengadopsi-pengadopsi potensial mempersepsikan keputusan mengadopsi bukanlah suatu paksaan. Moore dan Bensabat (1991) menyarankan bahwa tidak perlu kesukarelaan senyatanya tetapi cukup persepsi kesukarelaan. Sun dan Zhang (2003) dalam Dewi (2009) menemukan bahwa kesukarelaan dipertimbangkan sebagai faktor pemoderasi dalam membentuk Minat Perilaku.

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa *experience* (pengalaman) penggunaan *e-Filling* memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wiyono (2009) tetapi tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Winna (2011) dan Dewi (2009). Pengalaman merupakan bentuk pengetahuan pengguna (*user*) yang diperolehnya ketika pengguna telah pernah menggunakan teknologi informasi tersebut sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) menemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengguna berpengalaman dan yang tidak berpengalaman dalam mempengaruhi penggunaan senyatanya. Pengguna yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara minat menggunakan suatu

teknologi dan perilaku penggunaan (*behavioral usage*) suatu teknologi bagi pengguna yang berpengalaman. Pratama (2008) juga menemukan bahwa ada hubungan kuat antara seseorang yang mempunyai pengalaman terhadap suatu teknologi dan perilakunya terhadap teknologi yang mirip.

Hipotesis keenam (H6) menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*) penggunaan *e-filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filing*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Poon, et al. (2008) yang menyimpulkan bahwa keamanan dan kerahasiaan wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat penggunaannya *e-banking*. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Winna (2011) dan Dewi (2009). Keamanan (*security*) berarti bahwa penggunaan SI itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian (*hacking*) rendah. Sedangkan kerahasiaan (*privacy*) berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Dalam hal penggunaan *e-Filing*, kebanyakan pengguna (*user*) tidak memahami betul resiko keamanan dan kerahasiaan dari *e-Filing*. Pengguna beranggapan bahwa pihak Penyedia Jasa Aplikasi telah memperhatikan keamanan dan kerahasiaan mereka, padahal pengguna tidak mengetahui seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk keamanan dan kerahasiaan sistem informasi dari *e-Filing*. Dalam hal penggunaan *e-Filing*, keamanan dan kerahasiaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat perilaku.

5. SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi minat perilaku penggunaan *e-filing*, sedangkan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar

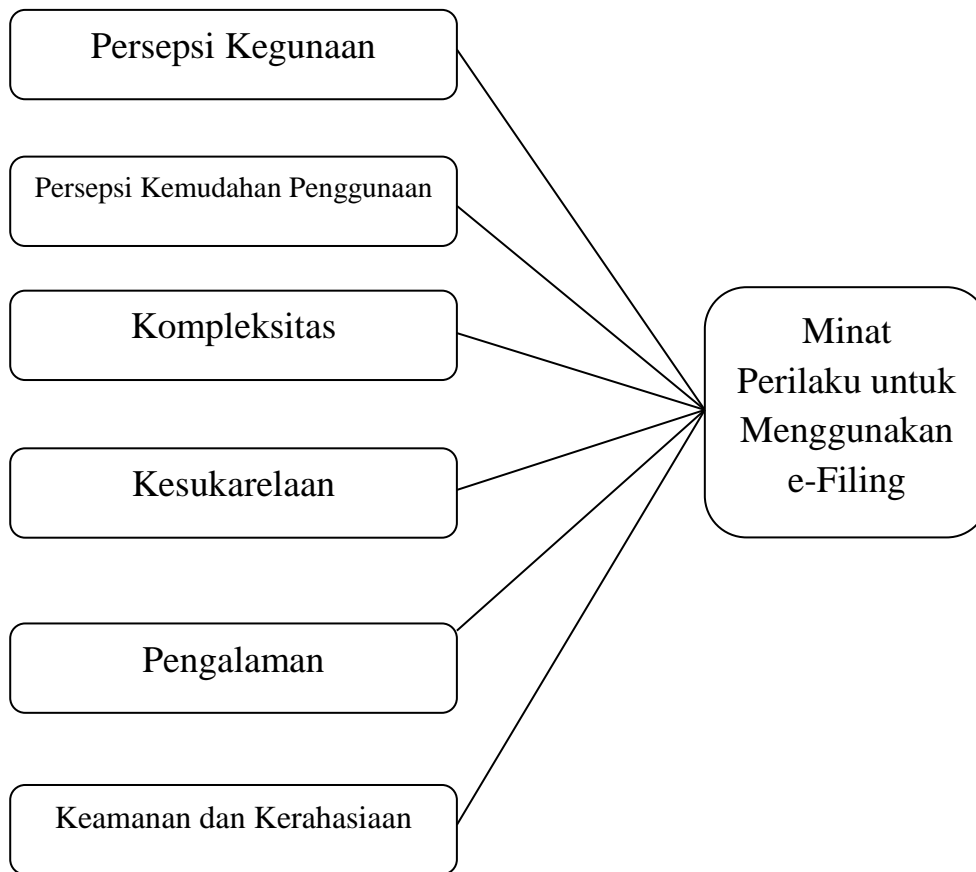
77,8% yang menunjukkan bahwa 77,8% persepsi wajib pajak mengenai kegunaan, kemudahan penggunaan *e-Filing*, kompleksitas penggunaan *e-Filing*, kesukarelaan untuk menggunakan *e-Filing*, pengalaman dan keamanan dan kerahasiaan mempengaruhi minat Wajib Pajak untuk menggunakan *e-filling*. Sedangkan sisanya 22,2% dipengaruhi oleh variabel dan faktor lain. Secara umum, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemakaian e-filling sudah dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak dan oleh karenanya peningkatan kualitas layanannya perlu menjadi perhatian bagi fiskus.

DAFTAR REFERENSI

- Agustyan, Pratama. (2008). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pemakai Sistem Informasi Berbasis Komputer. *Undergraduate Thesis*.
- Davis, F.D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Acceptance of Information System Technology*. MIS Quarterly. Vol. 13, No. 3, h. 319- 339.
- Departemen Keuangan (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007*, Jakarta.
- Dewi, A.A. Ratih Khomalyana. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filling. *Undergraduate Thesis*.
- Direktorat Jenderal Pajak (2004). *Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2005). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (E-Filling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi*. Jakarta.
- Ferdinand, Augusty. (2006). *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen : Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ISBN 979.9156.75.0.
- Firmawan, Frimario. (2009). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Penggunaan Sistem Informasi (System Usage). *Undergraduate Thesis*.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior : An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley, Boston MA.

- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamlet C, Strube M. (2000). *Community banks go online*. ABA Banking Journal's 2000 White Paper/Banking on the Internet, March, 61-65.
- Kirana, Gita Gowinda. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filling*. Undergraduate Thesis.
- Lina. (2007). *Pengaruh Perbedaan Individual dan Karakteristik Sistem Informasi pada Penerimaan Penggunaan Teknologi Informasi dalam e-library*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 22, No. 4, h. 447-465.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Novarina, Ayu Ika. (2005). *Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.
- Nunnally, J.C. (1967). *Psychometric Theory (1st ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis), Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiyaji, G., dan Amir, H. (2005). *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Tunggal.
- Sudjana. (1996). *Statistika: Untuk Ekonomi dan Niaga, Edisi 2*. Bandung: Tarsito.
- Sugihanti, Winna Titis. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-filling*. Undergraduate Thesis.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Venkatesh, V. and F.D. Davis. (2000). *A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal Field Studies*. Management Science, Vol. 46, No 2, February 2000, 186-204.
- Wiyono, Adrianto Sugiarto. (2008). *Evaluasi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filling sebagai Sarana Pelaporan Pajak secara Online dan Realtime*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 11, No. 2, h. 117-132.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Tabel 4.1
Distribusi Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jmlh	%
Kuesioner dikirim	108	100%
Kuesioner yang kembali	94	87%
Kuesioner yang tidak kembali	14	13%
Kuesioner yang tidak lengkap	5	4,6%
Sampel pengamatan	89	82,4%

Sumber : Data diolah, 2012

Tabel 4.2
Sumber Informasi Responden Terhadap e-Filing

Keterangan	Sumber Informasi	Jumlah	Persentase
Sumber perolehan Informasi e-filling	Sosialisasi langsung	38	22,2 %
	Media Elektronik	55	32,2 %
	Media Cetak	27	15,8 %
	Informasi Perorangan	51	29,8 %

Sumber : Data diolah, 2012

Tabel 4.3
Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Teoritis		Sesungguhnya		Standar Deviasi
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	
<i>Perceived Usefulness</i>	3 – 15	9	5 - 15	11,66	1,983
<i>Perceived Ease of Use</i>	5 – 25	15	10 - 23	17,83	2,621
<i>Complexity</i>	3 – 15	9	5 - 15	10,91	1,940
<i>Voluntariness</i>	3 – 15	9	7 - 15	11,51	1,804
<i>Experience</i>	3 – 15	9	6 - 14	9,57	1,959
<i>Security and Privacy</i>	2 – 10	6	4 - 20	7,62	1,511
<i>Intention to Use</i>	4 – 20	12	10 - 19	15,17	1,914

Tabel 4.4
Rangkuman Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah item	Kisaran rhitungan	rtabel	Ket
<i>Perceived Usefulness</i>	3	0,471 – 0,696	0,3	Valid
<i>Perceived Ease of Use</i>	5	0,729 – 0,837	0,3	Valid
<i>Complexity</i>	3	0,479 – 0,660	0,3	Valid
<i>Voluntariness</i>	3	0,424 – 0,550	0,3	Valid
<i>Experience</i>	3	0,389 – 0,610	0,3	Valid
<i>Security and Privacy</i>	2	0,822	0,3	Valid
<i>Intention to Use</i>	4	0,342 – 0,549	0,3	Valid
Jumlah item	23			

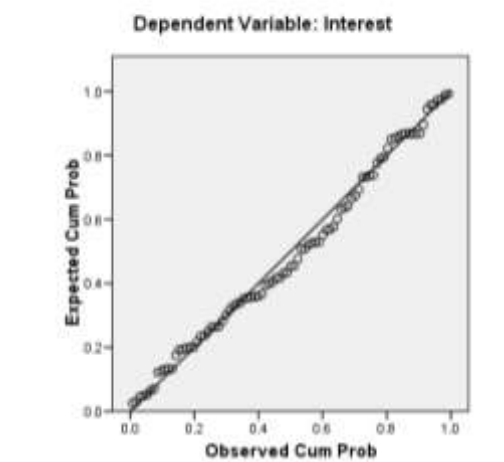
Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel penelitian	Jumlah item	Cronbach Alpha	Ket
<i>Perceived Usefulness</i>	3	0,756	Reliabel/ handal
<i>Perceived Ease of Use</i>	5	0,911	Reliabel/ handal
<i>Complexity</i>	3	0,748	Reliabel/ handal
<i>Voluntariness</i>	3	0,639	Reliabel/ handal
<i>Experience</i>	3	0,710	Reliabel/ handal
<i>Security and Privacy</i>	2	0,902	Reliabel/ handal
<i>Intention</i>	4	0,662	Reliabel/ handal
Jumlah item	23		

Sumber : data diolah, 2012 (lampiran)

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

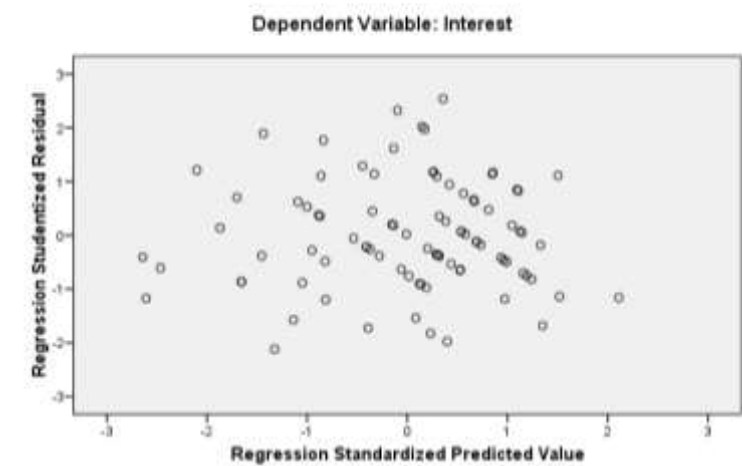
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Perceived Usefulness	,620	1,612
	Perceived Ease of Use	,540	1,851
	Complexity	,398	2,510
	Voluntariness	,456	2,194
	Experience	,690	1,449
	Security and Privacy	,597	1,676

a. Dependent Variable: Interest

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012

Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas
Scatterplot



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Variabel	T hitung	Signifikansi	Keterangan
<i>Perceived Usefulness</i>	3,595	0,001	H1 diterima
<i>Perceived Ease of Use</i>	2,229	0,029	H2 diterima
<i>Complexity</i>	3,150	0,002	H3 diterima
<i>Voluntariness</i>	3,482	0,001	H4 diterima
<i>Experience</i>	2,033	0,045	H5 diterima
<i>Security and Privacy</i>	2,554	0,013	H6 diterima

Sumber : Data diolah, 2012

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15,989	6	2,665	52,454	,000 ^a
	Residual	4,166	82	,051		
	Total	20,154	88			

- a. Predictors: (Constant), Security and Privacy, Perceived Usefulness, Experience, Voluntariness, Perceived Ease of Use, Complexity
- b. Dependent Variable: Interest

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Variabel</i>	<i>r²</i>	<i>R²</i>	<i>Adjusted R²</i>
<i>Perceived Usefulness</i>	0,136	0,793	0,778
<i>Perceived Ease of Use</i>	0,057		
<i>Complexity</i>	0,108		
<i>Voluntariness</i>	0,129		
<i>Experience</i>	0,048		
<i>Security and Privacy</i>	0,073		

Sumber : Data diolah, 2012

The Use of Financial Ratios to Predict Financial Distress in Indonesia

KARTIKA SUSANTI
SOEGIHARTO*
STIE YKPN Yogyakarta

Abstract: *This thesis advances our understanding of financial ratios that may predict firms' financial distress. The sample used in this study consist of 192 companies (63 distress companies, 63 non-distress companies from LQ45 and 63 non-distress companies which have similar size to distress companies) for the period of 2004 to 2011. Based on logistic regression results, it is found that more than one models proposed are significant and have a high classification power in predicting financial distress. These results are found for the pair of delisted-LQ45 and the pair of delisted-delisted counterparts. Further analysis also finds that the proposed models have a better performance than Altman Z-Score and Ohlson O-Score in predicting financial distress in Indonesia.*

Keywords: *Altman Z-Score, delisted companies, financial distress, financial ratios, logistic regression, LQ45 companies, Ohlson O-Score*

* Corresponding author: egisoegiharto@gmail.com

INTRODUCTION

This thesis advances our understanding of factors that may predict firms' financial distress. Financial distress—a situation where a firm's operating cash flows is not sufficient to satisfy current obligations—may lead to default on a contract or even a bankruptcy. Investors/creditors must take into account this potential risk before and after making investment and credit decisions. To curtail this risk, it is important for them to build a prediction regarding the future of their existing or prospective companies of interest.

The importance of financial distress information has led many academicians/practitioners e.g. Altman (1968), Beaver (1966) and Ohlson (1980) conducting researches on this issue. Their researches produce various models and scores to measure financial distress risk of a company. Altman (1968) and Ohlson (1980) use real bankruptcy data as a measure of the financial distress. On the other hand, some other researcher e.g. Pindado et al. (2007; Pranowo et al. (2010) employs negative cash flow, net loss and delisted company as determinants of financial distress.

This study selects delisted company data as the variable used in measuring financial distress. Some researchers e.g. Almilia (2004) and Brahmana (2007) argue that the use of delisted company data better reflects the real condition of financial distress. This might be due to the delisting criteria set by the Jakarta Stock Exchange (No: Kep-308/BEJ/07-2004) are already in accordance with the definition of financial distress. In contrast, negative cash flows and net losses are less appropriate to be used as a proxy of financial distress because either of these variables does not always represent firms' financial distress. For example, a significant amount of investment in a fixed asset or a big drop in sales revenue due to a catastrophe may result in negative cash flows or net losses for a company. Therefore, it is argued that the delisted data better reflects the financial distress than other negative cash flow and net losses.

Delisted data consists of companies that do not meet the criteria set by the IDX. These companies are delisted from the IDX mainly due to their poor financial condition. According to the regulation issued by PT Jakarta Stock Exchange (No: Kep-308/JSE/07-2004), a company is to be delisted subjected to conditions or events which negatively affect the company either financially or legally and it cannot demonstrate a sufficient indication of recovery.

The focus of this study is to predict company's future financial condition using financial distress prediction models. This study proposes a new model which is based on delisted company data. The companies selected are those delisted due to bankruptcy, bad business continuity, stock suspension, granted disclaimer opinion, and the absence of operational activity. Financial ratios used in previous studies e.g. Atmini (2005) and Campbell et al. (2010) will be employed in this study in order to obtain better financial distress prediction model. Most of these studies use profitability, liquidity, and solvency in constructing financial distress prediction model. The results of these earlier studies, which employed identical ratios, are generally inconsistent. This study attempts to further examine the predictive values of delisted company's financial ratios in order to obtain a better financial distress prediction model.

FINANCIAL DISTRESS

Financial distress can be defined as a declining financial condition that occurs before bankruptcy or liquidation Platt and Platt (2002). Deng (2006) defines financial distress as an abnormal financial condition i.e., when a company suffers from a net loss during the last two years or if the company receives an adverse or disclaimer audit opinion. Hill et al. (1992) in Munthe (2008) consider financial distress as company's inability to meet their obligations, marked with loss during three years or more.

Financial distress risk is a company failure risk in running their business (Altman, 1968). The financial factor is derived from a company's own performance. Financial distress or bankruptcy risk comes before bankruptcy itself. Bankruptcy risk should be used as an alert by all stakeholders so that they can avoid potential loss in the future.

FINANCIAL RATIOS

Financial ratio is widely used in financial analysis. Financial ratio analysis can be used as a guide by investors and creditors to help them in making a decision. The ratios examined may indicate company's achievements and prospects. Generally, financial ratio analysis is employed to assess the firms' risks and opportunities in the future. One ratio can be related to the other ratios in order to get a meaningful conclusion regarding a company's financial health. Generally speaking, financial ratios can be classified into three groups i.e., liquidity, solvability and profitability. The classification of these ratios may lead to easier interpretation of financial ratio analysis. Some studies have been conducted to review the advantage of financial ratios.

ALTMAN Z-SCORE

Altman (1968) applies multivariate discriminant analysis to derive a linear combination of the ratios which "best" discriminate between financially distressed and non-distressed groups. Altman uses a sample of 33 bankruptcies filed between 1946 and 1965 and matches them with 33 non-distressed firms from the same industry and of similar size. After numerous statistical tests of the interrelations among variables as well as tests of statistical significance and predictive accuracy, Altman is able to specify five ratios which are the most significant indicators of distress risk. An overall score, known as Altman Z-Score, can be computed from the following discriminant function:

$$Z = 0,012X_1 + 0,014X_2 + 0,033X_3 + 0,006X_4 + 0,999X_5$$

Where $Z = Z\text{-Score}$ (overall index)

$$X_1 = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Assets}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Assets}}$$

$$X_3 = \frac{\text{Earning Before Tax}}{\text{Total Assets}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Market Value of Equity}}{\text{Book Value of Total Liabilities}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}$$

The score from the equation above can be interpreted as follows:

- A company faces a high bankruptcy risk if its Z-Score is less than 1.81.
- A company faces a low bankruptcy risk if its Z-Score is more than 2.675.
- A company with Z-score of 1.81 to 2.675 neither faces high nor low bankruptcy risk (grey area).

OHLSON O-SCORE

Ohlson (1980) uses logistic regression in predicting distress and non-distress firms. In his study, he examines 105 bankrupt companies during the period of 1970 to 1976. The independent variables selected are those which frequently examined in prior literatures. He finds recent company size, financial structure, performance and liquidity as variables that may predict financial distress. Ohlson finally comes up with the following equation, named as O-Score, to measure bankruptcy risk probability:

$$\begin{aligned} O\text{-Score} = & -1,32 - 0,407\log X_1 + 6,03X_2 - 1,43X_3 + 0,076X_4 - 1,72X_5 - 2,37X_6 - 1,83X_7 + \\ & 0,285X_8 - 0,521X_9 \end{aligned}$$

$$\text{Where } X_1 = \frac{\text{Total Assets}}{\text{GNP Price}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

$$X_3 = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Assets}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

$$X_5 = \text{dummy (1 if total liabilities} > \text{total assets, else 0)}$$

$$X_6 = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

$$X_7 = \frac{\text{Funds from Operations}}{\text{Total Liabilities}}$$

$$X_8 = \text{dummy (1 if net loss for the last two years, else 0)}$$

$$X_9 = \frac{\text{Net Income}_t - \text{Net Income}_{t-1}}{|\text{Net Income}_t + \text{Net Income}_{t-1}|}$$

The higher the O-Score, the higher the bankruptcy risk. Ohlson finds that a cutoff of 0.038 can be used to distinguish high and low bankruptcy risk. If the O-Score is less than the cutoff point the bankruptcy risk is high. In contrast, if the O-Score is more than the cutoff point, the bankruptcy risk is low.

HYPOTHESES DEVELOPMENT

Financial ratio may indicate a company's past performance. Stakeholders, especially investors, use an analysis of financial ratios as a tool to predict the feasibility of their investment in the future. The ability of financial ratios to predict companies' future prospect

can also be used to predict the financial distress they may confront. Hence, this study formulates the first hypothesis as follow:

H1: Financial ratios can be used to predict financial distress

Financial ratios are composed of different types of ratios. Therefore, it is necessary to also look at the financial ratio which has the best ability to predict the financial distress condition in this research.

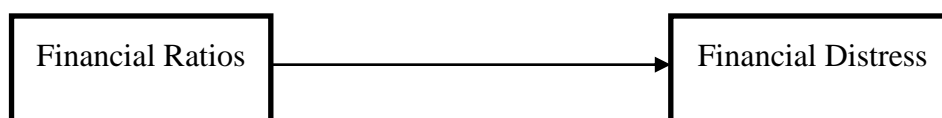
Altman (1968) uses a sample of 33 bankruptcies filed between 1946 and 1965 and matches them with 33 non-distressed firms from the same industry and of similar size in United States. Similarly Ohlson (1980) use 105 bankrupt companies during the period of 1970 to 1976 in United States. While Altman and Ohlson employ US data, this study uses Indonesian company's data which may offer different conclusion when analyzed. For this reason, this study is expected to provide a model that may be appropriate to be used to analyzed Indonesian companies that confront financial distress. Hence, this study formulates the second hypothesis as follow:

H2: The models formulated better explain the financial distress for Indonesian companies compared to Altman Z-Score and Ohlson O-Score.

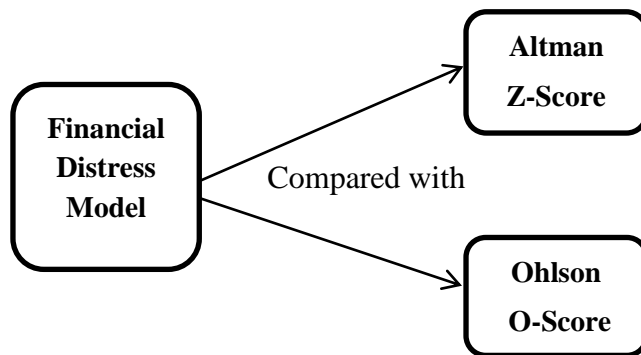
RESEARCH MODEL

Based on the research questions, research objectives and hypothesis development than research model can be described as follows:

1. Financial Distress Model



2. Financial Distress Model Compared with Altman Z-Score and Ohlson O-Score



RESEARCH METHOD

The population of this study are all companies that experience financial distress (those delisted from IDX). The criteria of samples selected from the entire population are as follows:

1. Companies which are delisted due to the reason bankruptcy, bad business continuity, stock suspension on regular market, granted a disclaimer opinion by the auditor and the absence of operational activity.
2. Companies that have complete financial statements for three years prior to delisting period.

Financial statement data for delisted companies are available from 2004 to 2011. In empirical test, financial data of distress companies will be accompanied by the healthy one. The selections of companies which do not experience financial distress are selected based on the following criteria:

1. Companies belong to LQ45 group in the same delisting period.
2. Companies listed on the IDX and have similar size to delisted companies.

A. Dependent Variable

The dependent variable in this study is a dummy variable that takes value of 1 for companies experiencing financial distress and 0 for companies not experiencing financial distress. Companies are classified as having financial distress if they are delisted from the Indonesian Stock Exchange and those classified as free from financial distress if they are remain listed on Indonesian Stock Exchange at the same period of time.

B. Independent Variables

This study uses financial ratios as independent variables to predict financial distress. Several financial ratios selected as a result of factor analysis test are:

1. Liquidity Ratios

Liquidity shows company's ability to meet their long terms obligation to creditor. The ratios would be expected to be critical immediately prior to failure, since only liquid assets can generate cash to cover obligations. Some researcher employed these ratios in their study e.g. Almilia and Kristijadi (2003), Murty and Misra (2004) and Ohlson (1980).

- a.
$$\frac{\text{Current Asset (CA)}}{\text{Total Liabilities (TL)}}$$
- b.
$$\frac{\text{Working Capital (WC)}}{\text{Total Assets (TA)}}$$
- c.
$$\frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities (CL)}}$$
- d.
$$\frac{\text{Market Value of Equity (MVE)}}{\text{Total Liabilities}}$$

2. Cash Flow Ratios

Prior studies provided some evidence that operating cash flow-related variables may add to the explanatory power of bankruptcy prediction models e.g. Murty and Misra (2004). Beaver (1966) carried out a univariate study of 30 ratios and concluded that cash flow to total debt is the best single ratio predictor. This reflects a higher probability of a firm to go bankrupt if it has cash flow problems, compared to a firm which has easier access to its internal finance.

- a.
$$\frac{\text{Operating Cash Flows (OCF)}}{\text{Total Liabilities}}$$
- b.
$$\frac{\text{Operating Cash Flows}}{\text{Total Assets}}$$
- c.
$$\frac{\text{Operating Cash Flows}}{\text{Sales (S)}}$$

3. Leverage Ratios

This ratio shows the ability of the firm to meet its debts in the long run and the ability to raise new capital through borrowing. A major concern is whether the firm can service its debts or generate enough profit to be able to pay the interest on its loans. Leverage ratios therefore indicate the level of financial risk in addition to the business risk a firm might face.

- a.
$$\frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$
- b.
$$\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$
- c.
$$\frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Sales}}$$
- d.
$$\frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Market Value of Equity}}$$

e. Total Liabilities > Total Assets

4. Profitability Ratios

This ratio shows company's ability in generating profit from its operation. Most of prior studies suggest that profitability has important influence, since companies with low profitability are likely to become less liquid and more highly geared. We initially choose variables to reflect the strength of the company's profitability. This helps to identify whether the earnings are sensitive to changes in a firm's operating health.

a.
$$\frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}$$

b.
$$\frac{\text{Earnings before Tax (EBT)}}{\text{Total Assets}}$$

c.
$$\frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

d.
$$\frac{\text{Earnings before Tax}}{\text{Sales}}$$

e.
$$\frac{\text{Net Income}}{\text{Market Value of Equity}}$$

f.
$$\frac{\text{Retained Earnings (RE)}}{\text{Total Assets}}$$

g. Years Loss

5. Efficiency Ratio

The efficiency ratios measure how effectively a firm is exploiting its assets. They could also indicate whether a firm is keeping adequate levels of assets, which could in turn affect its performance in the long run. Capital-turnover ratio is a standard financial ratio illustrating the sales generating ability of the firm's assets. It is one measure of management's capability in dealing with competitive conditions.

a.
$$\frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}$$

b.
$$\frac{\text{Sales}}{\text{Current Assets}}$$

c.
$$\frac{\text{Sales}}{\text{Working Capital}}$$

6. Growth Ratio

$$\text{Ohl} = \frac{\text{Net Income}_t - \text{Net Income}_{t-1}}{|\text{Net Income}_t + \text{Net Income}_{t-1}|}$$

This formula indicates that NI_t is net income for the most recent period. The variable intended to measure change in net income. Ohlson (1980) is one of the researchers that used this ratio in predicting financial distress.

7. Others

a.
$$\text{Annual Return} = \frac{\text{Closing Price}_t - \text{Closing Price}_{t-1}}{\text{Closing Price}_{t-1}}$$

b.
$$\frac{\text{Log Total Assets (Log TA)}}{\text{Gross National Product (GNP)}}$$

The data in this study are tested using the following methods: factor analysis, independent and paired sample t-test, logistic regression, and manual comparison. Firstly, factor analysis

is conducted to reduce the number of variables (selecting the most significant variables). In this analysis, all variables relation will be observed (inter-dependent variable), so that it will produce a group of many variables into a few variables or factors. In addition to grouping variable becomes smaller, analysis factor is also used to select which factor is the most dominant, which is marked by its factor score. The highest score show the most dominant variable.

Independent and paired sample t-test is used to test whether there is a difference in financial ratios examined between LQ 45 and delisted companies; and similar size companies and delisted companies. This test relates the difference between the average values of the ratios in each group to the variability of values of the ratios within each group.

The third step is the use of logistic regression. Logistic regression will produce a score to measure the formulated model ability in predicting financial distress. On the next step, the score will be compared to the scores obtained by Altman Z-Score and Ohlson O-Score. Capabilities of the Z-Score and O-Score in predicting financial distress will be performed with the manual calculation of scores from each sample. After that, each model score will be compared each other to find which model has the highest ability to predict financial distress.

EMPIRICAL ANALYSIS

The sample of this study consists of a total of 189 observations which comprises 63 observations for distress companies, 63 observations for non-distress companies from LQ 45 and 63 observations for non-distress companies which have similar size to distress companies for the period of 2004 to 2011. Each distress companies will be compared to each of non-distress companies. Hence, these distress companies will be used twice in the analysis.

The financial ratios from each of group of the companies are taken based on prior literatures e.g. Altman (1968). Each ratio selected presents the financial condition of each

sample. Tables below show more detail information about the descriptive statistics of distress and non-distress companies. It indicates mean and standard deviation for all variables which used in this study.

From descriptive statistic results, it can be seen LQ45 company's ratios have a higher ratio value of profitability, liquidity and cash ratios than the ratios of other groups (delisted companies and their counterparts). On the other hand, the leverage ratios of delisted companies are higher than the ratios of other groups (LQ45 and the counterparts of delisted companies). It indicates that the ratios of LQ45 companies reflect a better financial condition than the ratios of delisted companies and their counterparts. Most of all ratios value for similar size companies are in between the ratios value of the delisted and LQ45 companies. Table 4.1 indicates that the value for growth and efficiency ratio categories for similar size companies are higher than those of delisted and LQ45 companies.

Factor analysis is used to reduce number of independent variables employed in this study. The Principal Component Analysis (PCA) method for factor analysis is used to factorially arrange the inter-correlation between twenty five variables. This study also conducts PCA method for all variables in one time (non-categorized) in order to ensure the effectiveness of the above classification (twenty five variables into seven groups). After loading factors at 0.50 and rotating them through varimax technique, nine and eight significant variables from pre-categorized and non-categorized variables, respectively, are selected and described in the following table.

Table 1. PCA Results

No.	Pre-Categorized Ratio		Non-categorized Ratio	
	1	OCF/TL*	Cash	OCF/TL*
2	S/TA*	Efficiency	S/TA*	Efficiency
3	CL/TA*	Leverage	CL/TA*	Leverage
4	CA/TL*	Liquidity	CA/TL*	Liquidity
5	NI/S*	Profitability	NI/S*	Profitability
6	Return*	Others	Return*	Others
7	RE/TA	Profitability	Ohl	Growth
8	log TA/GNP	Others	MVE/TL	Liquidity
9	Ohl	Growth		

*identical variables selected from two factor analysis

This study uses two types of t-test, i.e., independent sample t-test and paired sample t-test. Both of them are used to identify the ratios differences between delisted and LQ45 companies and the ratios similarities between the delisted companies and their counterpart (companies with similar size). The independent sample t-test results indicate that at t-1, half of financial ratios examined are significantly different. Moreover, at t-2 and t-3, more than 50% of financial ratios employed are significantly different. These results demonstrate that the financial ratios data between delisted and LQ45 companies are different, indeed. On the other hand, paired sample t-test results show that at all times (t-1, t-2, and t-3), almost 90% of financial ratios examined are not significantly different. Therefore, it can be concluded that financial ratios data between delisted companies and their counterparts are similar. It suggests that the counterpart companies are selected properly.

Table 2. Logistic Regression Result for Delisted vs LQ45 Companies at t-1

	LQModel 1 t-1		LQModel 2 t-1		LQModel 3 t-1		LQModel 4 t-1		LQModel 5 t-1		LQModel 6 t-1		LQModel 7 t-1	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
Return	5.452	1.000	-2.095	1.000	-0.321	0.401	0.352	0.576	-0.282	0.435	8.784	0.999	0.354	0.541
CLTA	-25.144	0.999	16.871	1.000	9.125	0.142	11.132	0.141	9.619	0.094*	-23.910	0.999	11.838	0.088*
RETA	-10.093	1.000	-14.766	0.999	-1.473	0.271	-2.498	0.190						
CATL	-25.324	0.998	-8.509	0.999	0.227	0.495	0.526	0.249	0.196	0.556	-31.942	0.996	0.480	0.268
NIS	17.082	1.000	15.357	0.999	2.627	0.281	3.727	0.198	2.841	0.209	27.126	0.998	3.952	0.142
logTAGNP	-89.499	0.997	-49.003	0.998							-111.841	0.995		
OCFTL	17.440	0.999	35.985	0.999	-1.089	0.381	0.647	0.738	-1.366	0.267	19.508	0.998	0.266	0.889
STA	-52.836	0.998	-23.837	0.999	0.135	0.890	0.668	0.598	-0.083	0.928	-64.868	0.997	0.358	0.748
Ohl	-7.136	0.999	-11.274	0.998	0.895	0.380	1.620	0.131	0.882	0.370	-11.591	0.999	1.629	0.128
MVETL			-4.577	0.999			-0.777	0.032**					-0.687	0.052*
Constant	-143.325	0.997	-90.413	0.998	-3.423	0.150	-4.301	0.174	-3.728	0.105	-187.591	0.994	-4.972	0.097*
Hosmer and Lemeshow (Sig.)		1.0000*		1.0000*		0.9622*		0.0017		0.9622*		1.0000*		0.1122
Nagelkerke R Square		1.0000		1.0000		0.5984		0.7420		0.5662		1.0000		0.6978
Cox & Snell R Square		0.7500		0.7500		0.4488		0.5565		0.4246		0.7500		0.5233
Daya Classification Listed		100%		100%		85%		90%		90%		100%		85%
Daya Classification Delisted		100%		100%		75%		95%		70%		100%		95%
Overall Classification		100%		100%		80%		93%		80%		100%		90%

Note: *, **, and *** indicate statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels, respectively

Table 3. Logistic Regression Result for Delisted vs LQ45 Companies at t-2

	LQModel 1 t-2		LQModel 2 t-2		LQModel 3 t-2		LQModel 4 t-2		LQModel 5 t-2		LQModel 6 t-2		LQModel 7 t-2	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
Return	-18.494	0.998	-18.231	0.997	-2.899	0.026**	-2.881	0.047**	-1.504	0.045**	-28.659	0.996	-1.491	0.052*
CLTA	-17.044	1.000	-19.005	0.999	7.916	0.067*	8.262	0.080*	6.034	0.097*	-32.121	0.999	6.518	0.081*
RETA	-23.727	0.997	-22.382	0.999	-3.344	0.047**	-3.223	0.063*						
CATL	-11.411	0.999	3.289	1.000	0.004	0.989	0.076	0.796	0.750	0.907	-11.242	1.000	2.639	0.684
NIS	-20.078	1.000	-11.649	0.998	0.708	0.893	1.662	0.760	0.128	0.631	-26.214	0.996	0.191	0.485
logTAGNP	-44.809	0.998	-21.531	0.999							-131.267	0.996		
OCFTL	-19.931	0.999	7.115	0.999	-3.921	0.081*	-3.484	0.147	-3.074	0.108	15.894	0.999	-2.733	0.188
STA	2.703	1.000	-23.655	0.996	-0.441	0.671	-0.767	0.501	-0.596	0.557	-36.127	0.997	-0.728	0.495
Ohl	7.179	0.999	0.182	1.000	1.822	0.075*	2.128	0.045**	1.568	0.132	-29.004	0.999	1.734	0.056*
MVETL			-45.234	0.997			-0.543	0.284					-0.492	0.227
Constant	-87.899	0.998	-88.658	0.998	-1.042	0.595	-0.623	0.756	-1.675	0.400	-274.400	0.997	-1.431	0.468
Hosmer and Lemeshow (Sig.)		1.0000*		1.0000*		0.5542*		0.6683*		0.1697		1.0000*		0.5802*
Nagelkerke R Square		1.0000		1.0000		0.7076		0.7274		0.6262		1.0000		0.6548
Cox & Snell R Square		0.7500		0.7500		0.5307		0.5455		0.4697		0.7500		0.4911
Listed Classification		100%		100%		83%		83%		78%		100%		78%
Delisted Classification		100%		100%		83%		83%		87%		100%		83%
Overall Classification		100%		100%		83%		83%		83%		100%		80%



Note: *, **, and *** indicate statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels, respectively

Table 4. Logistic Regression Result for Delisted vs LQ45 Companies at t-3

	LQModel 1 t-3		LQModel 2 t-3		LQModel 3 t-3		LQModel 4 t-3		LQModel 5 t-3		LQModel 6 t-3		LQModel 7 t-3	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
Return	-2.578	0.999	-2.538	1.000	-1.198	0.183	-1.349	0.174	-0.978	0.214	-0.945	1.000	-0.957	0.220
CLTA	-20.660	0.998	-24.326	0.999	14.728	0.135	14.575	0.166	13.867	0.145	-20.885	0.999	13.065	0.164
RETA	-17.047	1.000	-17.788	1.000	-1.146	0.548	-1.925	0.385						
CATL	-20.117	0.998	-21.618	0.998	2.383	0.116	3.286	0.081*	2.210	0.138	-25.309	0.998	2.759	0.130
NIS	8.753	0.999	8.810	0.999	-16.023	0.274	-20.000	0.217	-14.853	0.338	5.501	1.000	-17.133	0.313
logTAGNP	-57.372	0.997	-60.371	0.999							-65.070	0.996		
OCFTL	-9.202	1.000	30.350	1.000	-15.743	0.048**	-16.091	0.039**	-14.584	0.034**	-16.248	0.999	-13.748	0.034**
STA	-14.666	0.999	-7.480	1.000	0.468	0.740	0.704	0.599	0.629	0.660	-19.511	0.998	0.778	0.574
Ohl	-10.626	0.998	-9.170	0.999	1.746	0.135	2.901	0.121	1.763	0.121	-8.499	0.998	2.424	0.142
MVETL			-2.269	1.000			-0.632	0.358					-0.393	0.540
Constant	-109.156	0.997	-116.837	0.999	-6.134	0.095*	-6.870	0.086*	-6.282	0.086*	-127.638	0.997	-6.760	0.076*
Hosmer and Lemeshow (Sig.)		1.0000*		1.0000*		0.9961*		0.9934*		0.9964*		1.0000*		0.9882*
Nagelkerke R Square		1.0000		1.0000		0.8072		0.8182		0.8006		1.0000		0.8056
Cox & Snell R Square		0.7500		0.7500		0.6054		0.6137		0.6004		0.7500		0.6042
Listed Classification		100%		100%		90%		90%		90%		100%		90%
Delisted Classification		100%		100%		90%		95%		85%		100%		90%
Overall Classification		100%		100%		90%		93%		88%		100%		90%

Note: *, **, and *** indicate statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels, respectively

Table 5. Logistic Regression Result for Delisted Companies vs Their Counterparts at t-1

	SSModel 1 t-1		SSModel 2 t-1		SSModel 3 t-1		SSModel 4 t-1		SSModel 5 t-1		SSModel 6 t-1		SSModel 7 t-1	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
Return	0.129	0.815	0.159	0.780	0.070	0.892	-2.881	0.047**	0.121	0.804	0.000	0.999	0.177	0.741
CLTA	5.671	0.035**	5.491	0.047**	5.804	0.035**	8.262	0.080*	4.647	0.047**	4.960	0.051*	4.584	0.060*
RETA	0.784	0.156	0.728	0.224	0.761	0.174	-3.223	0.063*						
CATL	0.108	0.743	0.109	0.742	0.138	0.665	0.076	0.796	0.177	0.575	0.217	0.504	0.166	0.596
NIS	1.679	0.156	1.632	0.171	1.660	0.173	1.662	0.760	1.340	0.163	1.309	0.203	1.275	0.224
Ohl	-0.246	0.582	-0.219	0.638	-0.201	0.648	2.128	0.045**	-0.124	0.762	-0.078	0.860	-0.130	0.766
logTAGNP	-0.351	0.752	-0.310	0.787							0.563	0.486		
OCFTL	-0.076	0.954	-0.013	0.992	-0.075	0.955	-3.484	0.147	0.517	0.684	0.475	0.710	0.538	0.673
STA	-0.339	0.189	-0.336	0.192	-0.313	0.183	-0.767	0.501	-0.258	0.228	-0.231	0.283	-0.296	0.211
MVETL			-0.050	0.830			-0.543	0.284					-0.130	0.588
Constant	-3.197	0.392	-2.947	0.453	-2.126	0.149	-0.623	0.756	-2.113	0.112	-0.336	0.906	-1.751	0.217
Hosmer and Lemeshow(Sig.)		0.6133*		0.1871		0.8891*		0.6683*		0.8562*		0.9193*		0.1357
Nagelkerke R Square		0.4597		0.4610		0.4575		0.7274		0.3712		0.3834		0.4217
Cox & Snell R Square		0.3448		0.3458		0.3432		0.5455		0.2784		0.2875		0.3163
Listed Classification		70%		75%		75%		83%		85%		85%		85%
Delisted Classification		75%		75%		70%		83%		60%		60%		65%





Overall Classification	73%	75%	73%	83%	73%	73%	75%
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Note: *, **, and *** indicate statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels, respectively



Table 6. Logistic Regression Result for Delisted Companies vs Their Counterparts at t-2

	SSModel 1 t-2		SSModel 2 t-2		SSModel 3 t-2		SSModel 4 t-2		SSModel 5 t-2		SSModel 6 t-2		SSModel 7 t-2	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
Return	-0.154	0.582	-0.154	0.595	-0.157	0.566	-0.156	0.582	-0.237	0.347	-0.189	0.493	-0.135	0.627
CLTA	1.449	0.132	1.449	0.139	1.454	0.128	1.454	0.136	1.103	0.188	1.083	0.199	1.065	0.200
RETA	0.480	0.212	0.480	0.244	0.484	0.198	0.483	0.235						
CATL	-0.008	0.973	-0.008	0.973	-0.012	0.957	-0.012	0.958	-0.009	0.967	0.027	0.909	0.013	0.954
NIS	0.278	0.863	0.278	0.864	0.296	0.850	0.295	0.851	0.345	0.799	0.163	0.910	0.155	0.913
Ohl	-0.708	0.151	-0.708	0.153	-0.707	0.151	-0.707	0.153	-0.735	0.142	-0.743	0.141	-0.703	0.154
logTAGNP	0.050	0.961	0.050	0.961							0.435	0.647		
OCFTL	-2.093	0.178	-2.093	0.182	-2.069	0.161	-2.069	0.163	-1.759	0.211	-1.994	0.187	-1.712	0.227
STA	-0.249	0.401	-0.249	0.401	-0.254	0.361	-0.254	0.361	-0.276	0.367	-0.224	0.454	-0.269	0.368
MVETL			0.000	0.999	0.000	0.997	0.000	0.997					-0.036	0.643
Constant	0.550	0.878	0.550	0.878	0.382	0.678	0.382	0.679	0.467	0.613	1.930	0.563	0.444	0.628
Hosmer and Lemeshow Test (Sig.)		0.1834		0.1835		0.1817		0.1813		0.4246		0.0162		0.0999
Nagelkerke R Square		0.3557		0.3557		0.3556		0.3556		0.3123		0.3170		0.3230
Cox & Snell R Square		0.2668		0.2668		0.2667		0.2667		0.2343		0.2378		0.2423
Listed Classification		70%		70%		70%		70%		70%		74%		70%
Delisted Classification		70%		70%		70%		70%		74%		74%		74%
Overall Classification		70%		70%		70%		70%		72%		74%		72%

Note: *, **, and *** indicate statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels, respectively

Table 7. Logistic Regression Result for Delisted Companies vs Their Counterparts at t-3

	SSModel 1 t-3		SSModel 2 t-3		SSModel 3 t-3		SSModel 4 t-3		SSModel 5 t-3		SSModel 6 t-3		SSModel 7 t-3	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
Return	0.182	0.551	0.197	0.505	0.181	0.534	0.199	0.478	0.128	0.654	0.128	0.656	0.117	0.681
CLTA	0.046	0.953	0.330	0.725	-0.010	0.989	0.189	0.830	-0.251	0.714	-0.245	0.723	-0.207	0.768
RETA	0.662	0.146	1.191	0.054*	0.637	0.160	1.143	0.062*						
CATL	-0.376	0.258	-0.767	0.060*	-0.342	0.264	-0.711	0.063	-0.273	0.351	-0.277	0.365	-0.446	0.179
NIS	-1.151	0.353	-1.693	0.265	-1.078	0.367	-1.508	0.311	-1.262	0.309	-1.271	0.312	-1.571	0.279
Ohl	-1.375	0.151	-1.101	0.263	-1.411	0.134	-1.207	0.207	-1.465	0.114	-1.461	0.117	-1.388	0.135
logTAGNP	-0.483	0.716	-0.926	0.525							-0.065	0.958		
OCFTL	-5.435	0.101	-9.007	0.047**	-5.870	0.061*	-9.924	0.022**	-5.141	0.069*	-5.082	0.094*	-6.438	0.035**
STA	-0.276	0.448	-0.358	0.526	-0.237	0.479	-0.254	0.584	-0.244	0.478	-0.250	0.492	-0.298	0.518
MVETL			0.726	0.058*	0.709	0.061*	0.709	0.061*					0.383	0.181
Constant	0.193	0.969	-1.547	0.783	1.946	0.136	1.891	0.204	1.744	0.164	1.510	0.746	1.576	0.245
Hosmer and Lemeshow Test (Sig.)		0.2675		0.3008		0.3737		0.6690*		0.1425		0.1406		0.1385
Nagelkerke R Square		0.5236		0.6133		0.5209		0.6058		0.4718		0.4719		0.5141
Cox & Snell R Square		0.3927		0.4600		0.3906		0.4543		0.3539		0.3539		0.3856
Listed Classification		75%		85%		80%		85%		75%		75%		80%
Delisted Classification		70%		80%		65%		75%		65%		65%		70%
Overall Classification		73%		83%		73%		80%		70%		70%		75%

Note: *, **, and *** indicate statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels, respectively

Based on the result of logistic regression, there are several models founded at each $t-1$, $t-2$ and $t-3$. LQModel indicates each model for LQ45 companies vs delisted companies. On the other hand, SSModel indicates each model for delisted companies vs its similar size companies.

Based on tables above, it is found that more than one models proposed are significant and have a high classification power in predicting financial distress. These results are found for the pair of delisted-LQ45 and the pair of delisted-delisted counterparts. In delisted-LQ45 result sections it can be seen that most of the new models proposed are to pass the goodness of fit test and have a high classification power to predict the dependent variable. Similarly, the same results are also found for the pair of delisted-delisted counterparts.

To accept hypothesis 1, at least one of the models proposed should pass the goodness of fit test and be fairly powerful in predicting financial distress. Although there only less new model proposed that pass the goodness of fit test for the pair of delisted-delisted counterparts, the financial ratios in the model can remain be used to predict financial distress. Therefore, from the explanation above, it can be concluded that hypothesis 1 is accepted.

After calculating Altman Z-Score and Ohlson O-Score for each sample, the predictive ability of both score in predicting financial distress condition are measured. The models included in this comparison are those that pass goodness of fit test in logistic regression analysis. The result of these Altman Z-Score and Ohlson O-Score than be compared with new models predictive ability. The results of comparison for those models are presented on the next six tables.

Table 8. LQ 45 ($t-1$) Classification Table

	Delisted	Listed	Overall
LQModel 1_{t-1}	100%	100%	100%
LQModel 2_{t-1}	100%	100%	100%
LQModel 3 _{t-1}	75%	85%	80%

LQModel 5 _{t-1}	70%	90%	80%
LQModel 6_{t-1}	100%	100%	100%
Altman	100%	0%	46%
Ohlson	95%	25%	60%

Table 9. LQ 45 (t-2) Classification Table

	Delisted	Listed	Overall
LQModel 1_{t-2}	100%	100%	100%
LQModel 2_{t-2}	100%	100%	100%
LQModel 3 _{t-2}	82.6%	82.6%	82.6%
LQModel 4 _{t-2}	82.6%	82.6%	82.6%
LQModel 6_{t-2}	100%	100%	100%
LQModel 7 _{t-2}	82.6%	78%	80.4%
Altman	100%	0%	49%
Ohlson	100%	22%	61%

Table 10. LQ 45 (t-3) Classification Table

	Delisted	Listed	Overall
LQModel 1_{t-3}	100%	100%	100%
LQModel 2_{t-3}	100%	100%	100%
LQModel 3 _{t-3}	90%	90%	90%
LQModel 4 _{t-3}	95%	90%	92.5%
LQModel 5 _{t-3}	85%	90%	87.5%
LQModel 6_{t-3}	100%	100%	100%
LQModel 7 _{t-3}	90%	90%	90%
Altman	95%	0%	49%
Ohlson	100%	30%	65%

Table 11. Similar Size Company (t-1) Classification Table

	Delisted	Listed	Overall
SSModel 1_{t-1}	75%	70%	73%
SSModel 3_{t-1}	70%	75%	73%
SSModel 4_{t-1}	83%	83%	83%
SSModel 5_{t-1}	60%	85%	73%
SSModel 6_{t-1}	60%	85%	73%
Altman	100%	10.5%	55%
Ohlson	95%	25%	60%

Table 12 Similar Size Company ($t-3$) Classification Table

	Delisted	Listed	Overall
SSModel 4 $t-3$	75%	85%	80%
Altman	94.4%	11.1%	49%
Ohlson	100%	20%	58%

Based on this summary, it is plausible to conclude that the proposed models have a better performance than Altman Z-Score and Ohlson O-Score because the new proposed model might be much more suitable for Indonesian companies. The summary of LQ45 presented above indicates that the highest classification power for each classification groups (delisted, listed and overall) is derived from the new models proposed. Moreover, from delisted counterparts companies' tables, it is also found that the highest classification power for overall classification groups comes from the new models proposed. Although the new models do not have a better classification power than Altman Z-Score and Ohlson O-Score in every classification group as shown in tables above, hypothesis 2 is remain accepted because the results from the group of LQ45 have better classification power than Altman Z-Score and Ohlson O-Score.

CONCLUSION AND LIMITATION

Based on research question and research objectives presented in earlier section, this study examines whether financial ratios can be used to predict financial distress in Indonesia. Moreover, it is also expected that the new models from this study would be better than Altman Z-Score and Ohlson O-Score models. The conclusions of this study are as follow:

1. Financial ratios can be used to predict financial distress in Indonesia. In general, several financial ratios can be simultaneously used to predict financial distress. The power of the combined financial ratios is much higher than that of individual ratio.

2. The new models proposed in this study could better explain the financial distress for Indonesian companies compared to Altman Z-Score and Ohlson O-Score. This may be due to—based on the data employed—the two models are more suitable for US companies while the new models are suitable for Indonesian companies.
3. The differences between delisted and LQ45 financial ratios are higher than the differences between delisted and their counterparts' financial ratios. This may be due to the financial condition of the counterparts of delisted companies are not really healthy.
4. The more different the dependent variable of distress and non-distress companies, the more significant and the higher the classification power of the model formulated. See the logistic regression and manual comparison results in section 4.4 and 4.5.
5. LogTA/GNP has a high influence in making the models to become more significant and to have higher classification power in predicting financial distress. On the other hand, MVE/TL has an inconsistent influence in making the models to be better or worse in predicting financial distress. CL/TA is the financial ratio which most frequently shown as a significant ratio in predicting financial distress. The second highest ratio which frequently appears is MVE/TL. See the logistic regression result in section 4.4.
6. Altman Z-Score and Ohlson O-Score have a high classification power in predicting financial distress. But they have less power to separate distress from non-distress companies. Therefore, it can be concluded that the cut-off point from each of these score is not perfect enough. See the manual comparison result in section 4.5.

There are also some limitations in this study which are presented below:

1. Due to the incomplete year to year data, this study can only use 23 delisted companies during 2004-2011. These are the only data which meet the financial distress characteristic.

2. There are no real bankruptcy data in Indonesia so they cannot be used as the dependent variables. Therefore, this study use delisted companies' data as the dependent variable.

For the future study, it is expected that there will be more financial data that can be used to conduct a study of financial distress prediction. Future study may also add independent variables other than financial ratios. The macro-economic indicator sensitivity from each company could be an interesting additional variable to be examined. Future study may also calculate the cut-off point between the distress companies and non-distress companies score. Hence, a new score like Altman Z-Score and Ohlson O-Score can be formulated.

REFERENCES

- Almilia, L. S. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress Suatu Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. STIE Perbanas Surabaya.
- Almilia, L. S., and Kristijadi. 2003. Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress.
- Altman, E. I. 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance* Vol XXIII (No. 4):589-608.
- Atmini, S. 2005. Manfaat Laba dan Arus Kas untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress pada Perusahaan Textile Mill Products.
- Beaver, W. H. 1966. Financial Ratios as Predictors of Failure, Empirical Research in Accounting. *Journal of Accounting Research*:71-102.
- Brahmana, R. K. 2007. Identifying Financial Distress Condition in Indonesia Manufacture Industry. Birmingham Business School, University of Birmingham (United Kingdom).
- Brigham, E. F., and Louis C. Gapenski. 2003. *Financial Management: Theory dan Practice*. The Dryden Press Eight Edition:1034-1067.
- Campbell, J. Y., J. Hilscher, and J. Szilagyi. 2010. Predicting Financial Distress and the Performance of Distressed Stocks.
- Deng, X. d. Z. W. 2006. Ownership Structure dan Financial Distress: Evidence from Public Listed Companies in China. *International Journal of Management* 23(3):486-5023.
- Foster, G. 1986. *Financial Statement Analysis*. Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey.
- Gunawan, K. 2008. Prediksi Kondisi Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Menggunakan Analisis Diskriminan.

- Hill, N. T., S. E. Perry, and S. Andes. 1992. Evaluating Firms in Financial Distress: An Event History Analysis. *Journal of Applied Business Research* Vol. 12 (3):60-71.
- Munthe, K. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Makro Ekonomi, dan Kinerja Keuangan Terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di BEI. *Media Unika* Edisi ke 4.
- Murty, A. V. N., and D. P. Misra. 2004. Cash Flow Ratios as Indicators of Corporate Failure. *Finance India* Vol XVIII (No. 3):1315-1325.
- Ohlson, J. A. 1980. Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. *Journal of Accounting Research* Vol 18 (No. 1):109-131.
- Pindado, J., L. Rodrigues, and C. d. l. Torre. 2007. Estimating Financial Distress Likelihood.
- Platt, H., and M. B. Platt. 2002. Predicting Financial Distress. *Journal of Financial Service Professionals* Vol. 56:12-15.
- Pranowo, K., N. A. Achsani, A. H. Manurung, and A. H. Manurung. 2010. Determinant of Corporate Financial Distress in an Emerging Market Economy: Empirical Evidence from the Indonesian Stock Exchange 2004-2008.
- Sari, R. P. 2009. Analisis Rasio Keuangan sebagai Prediktor Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI. Tesis S2 Universitas Gajah Mada.
- Subagyo, R. I. 2007. Model Prediksi Financial Distress di Indonesia Era Globalisasi

The Enhancement Decision Through IOS: Evidence to Leverage, Debt Maturity, and Protective Covenant

YULLIANA EKANINGRUM
ZAENAL FANANI*
KHUSNUL PRASETYO
AGUS WIDODO MARDIJUWONO
Universitas Airlangga

Abstract: *The existences of investment opportunity that lead to deal in financing decisions are potential appearing agency conflicts. Some of the former empirical evidences revealed that the consideration of investment opportunity in the choice of leverage, debt maturity and protective covenant can be one of efforts in controlling agency conflict respectively. This study investigates the influence of investment opportunity set (IOS) towards leverage, debt maturity and protective covenant. The sample of the research is non-financial companies that are listed in Indonesia Stock Exchange, issuing and publishing bond instrument, and having positive equity for the year 2009 until 2011. This research uses confirmatory factor analysis (CFA) in the measurement of IOS and protective covenant in accordance providing more accurate and comprehensive measurement in these variables. By using linear regression method, the findings of this research are, IOS has a negative significant effect towards leverage. Meanwhile, IOS has no significant effect towards debt maturity. Moreover, IOS has a positive influence towards protective covenant.*

Keywords: *investment opportunity set, leverage, debt maturity, protective covenant.*

JEL Classification: *G14, M41*

* Corresponding author: fanani_unair@yahoo.com



I. INTRODUCTION

The main company goal is increasing the value of the company. The investment decision and financing decision has the important role in the enhancement of company value. The investment opportunity involves investments in short-term and long-term. The return of investment in short-term is expected to be received within a period of less than one year and received simultaneously. Meanwhile, return of investment in long-term is expected to be received in more than one year and accepted gradually. Generally, company needs funds to finance the investment decision. The numerous financing decisions are vital for the financial welfare of the company. An incorrect decision about the capital structure may lead to significant financial distress, then in all likelihood eventually result in bankruptcy.

Concerning the financing activities of a company, it can obtain the fund whether from internal and external source. First, it comes from the internal sources, such as the issuance of stock and retained earnings. Second, it is derived from external sources of the company in the form of a debt to a third party. Regardless the size of the company, usually the companies choose to use the fund from outside the company in the form of debt because it is cheaper than equity.

Debt is being a cheaper source of fund as compared to equity ordinarily enables value enhancement of the company. Generally, by dealing on debt through issuance of bonds is cheaper than raising equity through a share issue. A major advantage is that the return on debt (interest) is tax-deductible, whereas the return on equity (dividends) is paid out of a company's profits, which are taxed before dividend payments can be made to stockholders. Financing by raising debt is a useful way of monitoring a corporation's overall health, as the ability to repay the debt reflects the overall financial stability of the company (QFinance, 2012).

Regarding investment decision, if the company has improper decision in dealing investment opportunity, then it can cause overinvestment problem or underinvestment problem. Generally, overinvestment problem occurs in the company that has low investment opportunity have low growth level, but have large free cash flow and assets in place. The main problem is in the different perspectives between manager and stockholder in allocating the capital excess (Myers, 1986). The agency conflict of outside equity between manager and stockholder has appeared. Manager tends to invest the capital excess to risky projects while stockholders insist that the capital excess should be distributed as dividends (Jensen 1986). The improper decision in exercising the investment opportunities and financing the investment could bring harmful for the company. These faults could stimulate the agency conflict within company that can decrease the firm value and leads to financial distress.

Otherwise, underinvestment problem generally occur in the company that has high investment opportunities, high growth rates, active conducting investment, low cash flow and smaller assets in place. Myers (1986) explains that the underinvestment problem occurs when firm with high investment opportunities is facing opportunities to invest in positive NPV projects that require the higher usage of funds, whereas the company only has low cash flow and assets in place. In addition, if company takes the new project by dealing on debt as financing, that is also susceptible in appearing agency conflict of debt between stockholders and bondholders. Stockholders insist that profits should be distributed as dividend, while bondholders want that profits should be used to pay off debt. As consequences, the mix of assets in place and investment opportunities influence a firm's capital structure, especially for debt policy.

This research investigate the influence of investment opportunity towards debt policy that is classified into three components: leverage, the debt maturity and covenant structure of its debt contracts. Leverage is commonly described as the use of borrowed money to make an

investment (Bhatti et al., 2010). Debt Maturity is the period of time for which a bond remains outstanding (Investopedia, 2012). Covenants are contracts aimed at borrowers by creditors to limit activities that may damage the value of loans and recovery loans (Cochran, 2001). In Indonesia, covenants must be involved in trusteeship agreement, trusteeship agreement is agreement between the issuers (companies that issue the bonds) and trustee regarding the issuance of bond in the form of notary deed (Kep-412/BL/2010). The trustees act as a party representing the interests of bondholders as well as providing protection to them (UU No. 8 Year. 1995 about Capital Market, art. 1).

Some researchers have investigated the enhancement decision in financing and controlling the agency conflicts. Billett et al. (2007) and Fatmasari (2010) investigates the influence of growth opportunity towards the choice of leverage, debt maturity and covenants. They also observe whether covenant could attenuate the relation between investment opportunity and leverage as well as debt maturity.

Billett et al. (2007), Fatmasari (2011), Goyal et al. (2002), Sari (2011), as well as Singhanian and Seth (2010) find that direct effect of growth opportunities on leverage is negative. In addition, Awan et al. (2010) and Bulan (2008) investigate that there is a positive correlation between the growth opportunities and debt levels for the segments of firms with low and medium growth opportunity, and negative relation between debt level and high growth opportunity.

Barclay and Smith (1995), Barclay et al. (2001), Billett et al. (2003) and Fatmasari (2011) find that investment opportunity has strong negative influence towards debt maturity, this concludes that firms with high investment opportunity use larger proportions of short-term debt in their capital structures. Otherwise, Dang (2010), Abdullah (2005), Childs, et al (2010) find that investment opportunity does not have significant influence towards debt

maturity. Billett et al. (2007), Fatmasari (2011) and Sari (2011) find a positive relation between growth opportunities interacted with covenant protection.

This research is encouraged by the reasons of there are inconsistencies in the research finding, hence the researcher want to reexamine the influence of investment opportunity set (IOS) towards leverage, debt maturity, and protective covenants by using more accurate and comprehensive indicators through confirmatory factor analysis (CFA). The sample of this research is non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2009 until 2011.

This research uses confirmatory factor analysis in measuring investment opportunity set and protective covenant in accordance confirming the measured variables for a latent variable. It is a statistical approach involving finding a way of condensing the information contained in a number of original variables into smaller set of dimensions (factors) (Jairo, 2001). Thus, in measuring investment opportunity set and protective covenants, these research models use more than one indicator in construction of a variable in accordance obtaining results that are more accurate. Ecker et al. (2006) in Fanani (2009) asserts that any various single measurements can be the less accurate measurement in research settings. By using various indicators through confirmatory factor analysis, hence the measurement be more accurate and comprehensive.

Investment opportunity set is typically unobservable by outsiders, hence investment opportunity rely on various proxy variables (Adam and Goyal, 2007). The proxy of investment opportunity set is different among researches. Billett et al. (2007) measured the growth opportunity by using market-to-book asset ratio and Fatmasari (2010) used capital-expenditures-to-total-assets (CAXBVA) ratio. Moreover, Adam and Goyal (2007) used four investment opportunity measurements, which are market-to-book asset (MBA) ratio, market-to-book equity (MBE) ratio, earnings-price ratio, and capital-expenditure-to-plant-property-

and-equipment (CAXNPPE) ratio. From those proxies, this research is strongly motivated to use market-to-book asset ratio and market-to-book equity ratio, because these are the most of two significant proxies related to growth opportunity (Adam and Goyal, 2007). Then, MBA and MBE ratio are composited to construct investment opportunity set as independent variable.

Moreover, most of companies also involve many covenants in their trusteeship agreement. Billett et al. (2007) list 15-covenants, moreover Fatmasari (2010) lists 24-covenants. This research use 15-covenants that are adapted from the combination of Billett et al. (2007) and the covenant listed in trusteeship agreement. These 15-covenants are composited become five classifications: 1) Restrictions on Payouts to Equity holders and Others, 2) Restrictions on Financing Activities, 3) Restriction on Changing Business Form and Structural, 4) Event-Driven Covenant, 5) Restriction on Investment and Asset Sales. If all classifications fill the requirement of confirmatory factor analysis, hence the five classifications are composited to construct protective covenant as dependent variable (Y3.)

The difference economic conditions in different countries motivate the researcher to replicate the previous research of Billett et al. (2007), based on the economic condition and fluctuation of Indonesia Stock Exchange. The researcher also want to examine the consistency of the prior research result with take the research object from non-financial companies. Hence, this research is expected can obtain results that applicable in Indonesia.

Based on the problems background described above, the formulation of the problem are: Does the investment opportunity set have an influence towards leverage? Does the investment opportunity set have an influence towards debt maturity? Does the investment opportunity set have an influence towards covenants?

II. CONCEPTUAL FRAMEWORK AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT

2.1. Conceptual Framework

Investment opportunities set (IOS) plays an important role in financing corporate. IOS is typically unobservable by outsiders, a common practice is to rely on proxy variables. This research uses two-proxy variables, which significant towards IOS that consist of MBA ratio and MBE ratio (Adam and Goyal, 2007). Then, both of those ratios are composed to be IOS by conducting confirmatory factor analysis.

IOS theory enhances the decision in which the investments in place have been financed. This research emphasizes the financing decision in debt policy. Whether the company has high leverage, whether with short-term debts, as well as involving covenants in the trusteeship agreement, in accordance the agency conflict and cost that perhaps to be appeared can be eliminated. Hereby, investment opportunities shall be one of considered indicator that can influence a firm's capital structure specifically for leverage, the debt maturity and protective covenants of its bond contracts (Billett et al. 2007). Therefore, this research investigates the association among those variables to hinder agency conflicts.

This research use 15-covenants that are adapted from the combination of Billett et al. (2007) and the covenant listed in trusteeship agreement. These 15-covenants are composited become five classifications: 1) Restrictions on Payouts to Equity holders and Others, 2) Restrictions on Financing Activities, 3) Restriction on Changing Business Form and Structural, 4) Event-Driven Covenant, 5) Restriction on Investment and Asset Sales. If all classifications fill the requirement of confirmatory factor analysis, hence the five classifications are composited to construct protective covenant as dependent variable. Conceptual framework is summarized in Figure 2.1.

The aim of learning theoretical review and prior research results is developing proper hypotheses. Three hypotheses are offered to solve the research problem. First, based on

agency theory and the investment opportunity set theory, investment opportunity has negative relation towards leverage. Second hypothesis, when a company having abundance growth opportunities and experiencing underinvestment problem that appearing the agency conflict between managers and stockholders about the divergence perspective of the allocation of excess capital. As a result, shortening debt maturity can decline this problem. Hereby, growth opportunity has positive relation towards debt maturity. Third, firms with significant growth opportunities will include covenants in their indenture agreements. Therefore, there is positive relation between growth opportunities towards protective covenant.

2.4.1. The Influence of Investment Opportunity Set towards Leverage

Leverage is reflecting the proportion of the usage of debt compared to assets. This variable is measured by the ratio between the book value of total debt to the market value of the company asset.

Based on investment opportunity set, Jensen (1986) and Myers (1986) elucidate that a company with high investment opportunity will suffer underinvestment problem when facing the positive NPV projects, due to the low free cash flow in the company. Nevertheless, taking on debt to finance the project will be more costly, because there are different perspectives between stockholders and bondholders, whether the profit must be used to pay dividends or pay the debt, hence company will tend to use internal financing or take on less debt and shortening debt maturity.

In the contrary, companies with low investment opportunities will suffer overinvestment problem. Overinvestment problem is caused by the excess capital, which will lead to conflict between the divergence perspectives between the managers and stockholders. Managers argue that the excess in capital shall be used to invest in project, meanwhile stockholders insist to distribute the capital excess as dividends. By using debt this problem can be solved, the company can carry out a new project, while managers able to provide

assurance to stockholders that existing excess capital will divide as dividends. In addition, debt collection will put the company on the part of external oversight, thereby reducing tendency of managers to invest in projects that are not profitable. Hereby, company will be more effective to deal with debt when the company has low investment opportunity (Jensen, 1986).

These theories predict an inverse relation between investment opportunities and leverage. Billett et al. (2007), Fatmasari (2011), Goyal et al. (2002), Sari (2011), as well as Singhania and Seth (2010) find that investment opportunity has negative influence towards leverage. Based on theories and previous research results the hypothesis is

H₁: *Investment opportunity set has negative influence towards leverage*

2.4.2. The Influence of Investment Opportunity Set towards Debt Maturity

Debt maturity refers to a finite time-period at the end of which the bond instrument will cease to exist and the principal is repaid with interest. To show the average of debt maturity in each sample company, the debt maturity is measured by the weighted average of the term-to-maturity of all the debt instruments outstanding (Investopedia, 2012).

Jensen (1986) and Myers (1986) elucidated that a company with high investment opportunity will suffer underinvestment problem when facing the positive NPV projects, due to the low free cash flow in the company. When the company is willing to take debt as financing source for the new project, then it will susceptible in the appearance of agency conflict of debt, between shareholder and bondholder. The main conflict due to the different allocation of profits between shareholder and bondholder, whether the profit must be used to pay dividends or pay off the debt.

Myers (1977) argues if debt matures after the expiration of the firm's investment option, it reduces the incentives of the shareholder-management coalition in control of the firm to invest in positive net-present-value investment projects since the benefits accrue, at

least partially, to the bondholders rather than accruing fully to the shareholders. Myers (1977) argues that to control the underinvestment problem is to shorten the maturity of the firm's debt. If the debt matures before the firm has the opportunity to exercise its real investment options, the firm's potential disincentive to invest is eliminated. Hence, firms whose investment opportunity sets contain more growth options should employ a higher proportion of short-term debt (Barnea et al., 1980). Since when short-term debt matures before growth options are exercised, there is an opportunity for firms to re-contract and for debt to be re-priced, so that gains from new investment do not accrue to bondholders.

A change in a firm's investment opportunities has a direct effect on its choice of debt maturity. An increase in growth options increases the firm's use of short-term debt. The negative relation between debt maturity and investment opportunity set predicted by the theory is examined in Barclay and Smith (1995), Barclay et al. (2001), Billett et al. (2003) and Fatmasari (2010). They find that investment opportunity has negative influence towards debt maturity, this concludes that firms with high investment opportunity use larger proportions of short-term debt in their capital structures.

H₂: *Investment opportunity set has negative influence towards debt maturity*

2.4.3. The Influence of Investment Opportunity Set towards Protective Covenants

Protective covenants are contracts aimed at borrowers by creditors to limit activities that may damage the value of loans and recovery loans (Cochran, 2001). The company with high investment opportunities has high growth rates, active conducting investment, then low cash flow and smaller assets in place (Jensen 1986). In these circumstances, firms facing potential underinvestment problem, when firms with high investment opportunities facing opportunities to invest in positive NPV projects that also require the higher usage of funds. In the low free cash flow condition and the small assets in place, stockholders assume that profits should be distributed as dividend. While bondholders assume that profits should be

used to pay off debt. In such circumstances, the company will choose to leave the project with a positive NPV and lost growth opportunities. If the company wants to continue the positive NPV projects, companies with high investment opportunities use a small amount of debt (Myers, 1986).

Myers (1977) argues that firms with an abundance of growth opportunities will reduce the underinvestment problem by including covenants in their indenture agreements. In principle, bondholders involve of various covenants in the indenture provisions, to limit the managerial behavior, which results in reductions in the value of the bonds. The covenants impose voluntary constraints on management's activities that prevent corporate managers from taking certain actions. At the same time, these covenants provide bondholders assurance that the firm's management will not expropriate their wealth once. Billett et al. (2007) argue that firms use covenants to control stockholder-bondholder conflicts over the exercise of growth options. This prediction is consistent with Billett et al. (2007), Bradley and Roberts (2004), and Yu (2010). Hereby, the hypothesis is,

H₃: *Investment opportunity set has positive influence towards protective covenants*

III. RESEARCH METHODOLOGY

3.1. Operational Definition and Variable Measurement

Table 1 and Table 2 shows research's variables and measurement.

3.2. Population and Sampling Method

The population used in this research is all the listed non-financial companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2009 until 2011, the numbers of population is 1030 companies. Sample of this research is picked based on the purposive sampling method with these requirements:

1. Non-financial company listed in Indonesia Stock Exchange

2. Issuing obligation during 2009 until 2011
3. Having positive equity along 2009 until 2011

The sample is limited only for the non-financial company. This boundary is made to control the variance of asset, which cause by the difference industry characteristic. When the characteristic is different, consequently it cannot represent the growth of the company precisely. There are 75 of non-financial companies, which involve to those required criteria. The sample selection procedure is shown in Table 3.

3.3. Model of Analysis

This research uses 3-models of analysis. First model is used to test the effect of investment opportunity set (IOS) towards the choice of leverage. Second, construct model to test the influence of IOS towards debt maturity. The third model is used to test the effect of IOS to protective covenants. The analysis steps are as follow:

$$\text{Model (1): } \text{LEV}(Y1)_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \text{IOS}(X1)_{it} + \beta_2 \text{FAR}(X2)_{it} + \beta_3 \text{PROFIT}(X3)_{it} + \beta_4 \text{SIZE}(X4)_{it} + e_1$$

$$\text{Model (2): } \text{MAT}(Y2)_{it} = \alpha_2 + \beta_5 \text{IOS}(X1)_{it} + \beta_6 \text{FAR}(X2)_{it} + \beta_7 \text{PROFIT}(X3)_{it} + \beta_8 \text{SIZE}(X4)_{it} + e_2$$

$$\text{Model (3): } \text{COV}(Y3)_{it} = \alpha_3 + \beta_9 \text{IOS}(X1)_{it} + \beta_{10} \text{FAR}(X2)_{it} + \beta_{11} \text{PROFIT}(X3)_{it} + \beta_{12} \text{SIZE}(X4)_{it} + e_3$$

notes:

$\alpha_1 - \alpha_3$: Constants
$\beta_1 - \beta_{12}$: Coefficients
$e_1 - e_3$: Error
LEV	: Leverage
IOS	: Investment Opportunity Set
FAR	: Fixed Asset
PROFIT	: Profitability
SIZE	: Firm Size
MAT	: Debt Maturity
COV	: Protective Covenants

IV. RESULT AND DISCUSSION

4.1. Descriptive Statistic

Descriptive statistic explains the highest, lowest, mean and standard deviation for variables that to be used in this research. The variables are, market-to-book assets (MBA) ratio and market-to-book equity (MBE) ratio as the construction variables of investment opportunity (X1), fixed-asset (X2), profitability (X3), firm size (X4), leverage (Y1), debt maturity (Y2), and protective covenant (Y3). The statistic descriptive is depicted in Table 4.

4.2. The Results of Confirmatory Factorial Analysis

The detailed result of investment opportunity set (first order) and protective covenant (second order) confirmatory factorial analysis is shown in Table 5, Table 6&7 (first order and Table 8 (second order). If the indicator has a factor loading ≥ 0.4 , it is included in the model (Ferdinand, 2002:131). It is perceived to be able to form a variable. Based on the result of confirmatory analysis factor, shows that investment opportunity set (IOS) is composited from two-proxies are market-to-book asset (MBA) ratio and market-to-book equity (MBE) ratio. Protective Covenant is constructed by four composite variables: 1) Restrictions on Payouts to Equity holders and Others, 2) Restrictions on Financing Activities, 3) Restriction on Changing Business Form and Structural, 4) Restriction on Investment and Asset Sales. The output of Event-Driven Covenant that has zero variance. The event-driven covenants is constructed from cross-default provision, rating or net worth triggered and poison-put provision. Zero variance means that there is no sample of company that involving any composite variables of Event-Driven Covenant in the trusteeship agreement. Hereby, the Event-Driven Covenant must be excluded from the variable construction of Protective Covenant

4.2. Classical Assumption Test

The test of regression's classical assumptions is conducted before executing multiple regressions. The results of classical assumptions tests in detail are shown in Table 9 (Multicollinearity Test), Table 10 (Autocorrelation Test), Table 11 (Heteroscedasticity Test) and Table 12 (Normality Test).

4.3. Analysis of Hypothesis Testing

Table 13 shows the results of regression of H_1 , H_2 , and H_3 . The variables are IOS (X1), Leverage (Y1), Debt Maturity (Y2), Protective Covenant (Y3), Fixed Asset (X2), Profitability (X3), and Firm Size (X4). Model 1 shows that investment opportunity has negative and significant influence towards leverage. Model 1 has constant 0,752, this depicts that if the independent variable is considered to be constant, hence the average of leverage of non-financial companies is 0,752. The coefficient of IOS (X1) is -0,152 indicates negative influence, means that when the IOS increases in one scale, then leverage (Y1) will decrease for 0,152. R-Square is 0,608, this confirms that the changing in leverage for 60,8% is influenced by investment opportunity set (IOS) and control variables, and 39,2% is influenced by other factor. The probability of t-test in model 1 is 0,000 by meaning that IOS (X1) has significant influence towards leverage (Y1) in the significance level of 1%. The other independent variables that have function as control variable show that Fixed Asset (X2) and profitability (X3) has probability for 0,075 and 0,034 this means that Fixed Asset is significant in 10% and profitability has significance influence in level 5%. While, firm size (X4) has probability of 0,542.

Model 2 shows that investment opportunity does not have significant influence towards debt maturity. Model 2 has constant -13,314, this result confirms that if IOS (X1) becomes constant, thus the weighted-average of debt maturity (Y2) is -13,314. The coefficient of investment opportunity set (X1) is -0,230, indicates negative influence, this confirms that in one scale incremental of IOS can make the weighted-average of debt

maturity decreases for 0,230. R-Square is 0,311 elucidating the changing in debt maturity for 31,1% is influenced by IOS, and 68,9% is caused by others. The probability of t-test in model 2 is 0,340 by meaning that IOS does not have significant influence towards debt maturity (Y2). The other independent variables that have function as control variable show that Fixed Asset (X2) and firm size (X4) have probability 0,046 and 0,000 this means that Fixed Asset has significance influence in level 5% and firm size in level 1%. Moreover, profitability (X3) has probability for 0,826.

Model 3 shows that investment opportunity has positive and significant influence towards protective covenants. Model 3 has constant -0,376, this output explains that if IOS (X1) is being constant, hence the average of protective covenant index (Y3) is -0,376. The coefficient of IOS (X1) 0,211 indicates positive influence, explains that in one scale incremental of IOS will influence the covenant index increase for 21,1%. R-Square is 0,100 elucidating the changing in covenants for 10% is influenced by IOS (X1) and the rest 90% is influenced by others. The probability of t-test in model 3 is 0,091 confirms that IOS has significant influence towards protective covenants (Y3) in the significance level of 10%. The other independent variables that have function as control variable show that probability of Fixed Asset (X2) is 0,058, Fixed Asset has significance in level 10%. Meanwhile, profitability has probability for 0,842 and firm size (X4) has probability for 0,774.

4.4. Discussion of the Result

4.4.1. The Influence of Investment Opportunity Set towards Leverage

Leverage is reflecting the proportion of the usage of debt compared to assets. This variable is measured by the ratio between the book value of total debt to the market value of the company asset. The finding of this research is investment opportunity (IOS) has negative influence towards leverage, thus the hypothesis (H_1) is not rejected. The negative influence of

IOS indicates that company will take less on debt when the company has a higher investment opportunity.

Based on investment opportunity set, Jensen (1986) and Myers (1986) elucidate that a company with high investment opportunity will suffer underinvestment problem when facing the positive NPV projects, due to the low free cash flow in the company. Nevertheless, taking on debt to finance the project will be more costly, because there are different perspectives between stockholders and bondholders, whether the profit must be used to pay dividends or pay the debt, hence company will tend to use internal financing or take on less debt and shortening debt maturity.

In the contrary, companies with low investment opportunities will suffer overinvestment problem. Overinvestment problem is caused by the excess capital, which will lead to conflict between the divergence perspectives between the managers and stockholders. Managers argue that the excess in capital shall be used to invest in project, meanwhile stockholders insist to distribute the capital excess as dividends. By using debt this problem can be solved, the company can carry out a new project, while managers able to provide assurance to stockholders that existing excess capital will divide as dividends. In addition, debt collection will put the company on the part of external oversight, thereby reducing tendency of managers to invest in projects that are not profitable. Hereby, company will be more effective to deal with debt when the company has low investment opportunity (Jensen, 1986).

These theories predict an inverse relation between investment opportunities and leverage. Billett et al. (2007), Fatmasari (2011), Goyal et al. (2002), Sari (2011), as well as Singhania and Seth (2010) find that investment opportunity has negative influence towards leverage.

4.4.2. The Influence of Investment Opportunity Set towards Debt Maturity

Debt maturity refers to a finite time-period at the end of which the bond instrument will cease to exist and the principal is repaid with interest. To show the average of debt maturity in each sample company, the debt maturity is measured by the weighted average of the term-to-maturity of all the debt instruments outstanding. The finding is investment opportunity does not have influence towards debt maturity, thus the hypothesis (H_2) is rejected.

Myers (1977) argues if debt matures after the expiration of the firm's investment option, it reduces the incentives of the shareholder-management coalition in control of the firm to invest in positive net-present-value investment projects since the benefits accrue, at least partially, to the bondholders rather than accruing fully to the shareholders. Myers (1977) argues that to control the underinvestment problem is to shorten the maturity of the firm's debt. If the debt matures before the firm has the opportunity to exercise its real investment options, the firm's potential disincentive to invest is eliminated. Hence, firms whose investment opportunity sets contain more growth options should employ a higher proportion of short-term debt (Barnea et al., 1980). Since when short-term debt matures before growth options are exercised, there is an opportunity for firms to re-contract and for debt to be re-priced, so that gains from new investment do not accrue to bondholders. Barclay and Smith (1995), Barclay et al. (2001), Billett et al. (2003) and Fatmasari (2011) find that investment opportunity has strong negative influence towards debt maturity, this concludes that firms with high investment opportunity use larger proportions of short-term debt in their capital structures.

The results, however, do not support the prediction that firms also actively shorten the maturity of their debt to alleviate underinvestment, due to liquidity risk constrains the use of a short-term debt maturity strategy. Stohs and Mauer (1996) find that investment opportunities

do not have a significantly negative effect on maturity. They suggest that firms with high growth have low leverage and therefore little incentive to shorten the maturity of their debt to alleviate underinvestment problems. A reduction in leverage generally leads to the loss of interest tax shields, and so firms will only lower leverage until the benefit of the reduced agency problem can offset the loss of the tax shields.

Childs et al.'s (2005) theoretical model of the interaction between corporate financing and investment provides a more plausible explanation for the insignificant relation between growth opportunities and debt maturity. It posits that when firms have little financial flexibility to change their capital structure and debt maturity structure, they will lower leverage but will not shorten the maturity of their debt. While using short-term debt maturity can mitigate the agency cost of underinvestment, it may considerably increase the cost of suboptimal liquidation, hence it will no longer be beneficial for a firm to shorten the maturity of its debt.

4.4.3. The Influence of Investment Opportunity Set towards Protective Covenants

Protective covenant is constructed from five classifications of 15-restrictions then composited to be one by using confirmatory factor analysis. The finding is investment opportunity has positive influence towards protective covenant, thus the hypothesis (H₃) is not rejected.

The company with high investment opportunities has high growth rates, active conducting investment, then low cash flow and smaller assets in place (Jensen 1986). In these circumstances, firms facing potential underinvestment problem, when firms with high investment opportunities facing opportunities to invest in positive NPV projects that also require the higher usage of funds. In the low free cash flow condition and the small assets in place, stockholders assume that profits should be distributed as dividend. While bondholders assume that profits should be used to pay off debt. In such circumstances, the company will

choose to leave the project with a positive NPV and lost growth opportunities. If the company wants to continue the positive NPV projects, companies with high investment opportunities use a small amount of debt (Myers, 1986).

Loans are more likely to include protective covenants when the borrower is small, has high growth opportunities or is highly levered (Bradley and Roberts, 2004). Myers (1977) argues that firms with an abundance of growth opportunities will reduce the underinvestment problem by including covenants in their indenture agreements. In principle, bondholders involve of various covenants in the indenture provisions, to limit the managerial behavior, which results in reductions in the value of the bonds. The covenants impose voluntary constraints on management's activities that prevent corporate managers from taking certain actions. At the same time, these covenants provide bondholders assurance that the firm's management will not expropriate their wealth once. Billett et al. (2007) argue that firms use covenants to control stockholder-bondholder conflicts over the exercise of growth options. This result is consistent with Billett et al. (2007), Bradley and Roberts (2004), and Yu (2010).

V. CONCLUSIONS, SUGGESTIONS, AND IMPLICATIONS

This chapter explains about the conclusions and suggestions of this research. According to the research result that based on this research objective and the result of hypothesis testing from the previous chapter, the conclusion is as follows:

5.1. Conclusions

This research analyses the influence of investment opportunity set towards leverage, debt maturity and protective covenants in the non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange for 2009-2011. The empirical evidences find that investment opportunity set has negative influence towards leverage and debt maturity. Moreover, investment opportunity has positive influence towards protective covenants. The details are explained as follows: 1)

The empirical evidence shows that investment opportunity set has negative influence towards leverage. Company that has high investment opportunity tends to leave the new project of investment opportunity, due to the avoidance of conflict between shareholders and bondholders regarding the allocation of low free cash flow. Hence, not need to deal with debt or just use small debt for financing the new project, 2) Investment opportunity set does not have significant influence towards debt maturity. Company that has high investment opportunity and low free cash flow will have less incentive to deal in shorter maturity, due to the threat of suffering suboptimal liquidity risk and 3) Investment opportunity set has positive influence towards protective covenants. Company with high investment opportunity is potentially facing the underinvestment problem, hence to reduce it, company will involve more protective covenants.

5.2. Limitations

There are several limitations of this research: 1) Poison-put-provision, cross-default provision, and rating or net worth triggered has zero variance in the trusteeship agreement. Hence, the analysis of these indicators can not be continued, and must be exclude from the construction of protective covenants as dependent variable and 2) This research has no involved the consideration of the liquidity risk, regarding the findings of insignificant influence of investment opportunity towards debt maturity due to the existences of suboptimal liquidity risk.

5.3. Suggestions

Based on the research limitation, this research gives some suggestion as follows, 1) The next research should not consider the poison-put-provision, cross-default provision, and rating or net worth triggered in the construction model of protective covenant, since these indicators has zero variance respectively and 2) The next research can add the measurement

associated to suboptimal liquidity risk in accordance strengthen the empirical evidence of the insignificance influence of investment opportunity set towards debt maturity.

REFERENCES

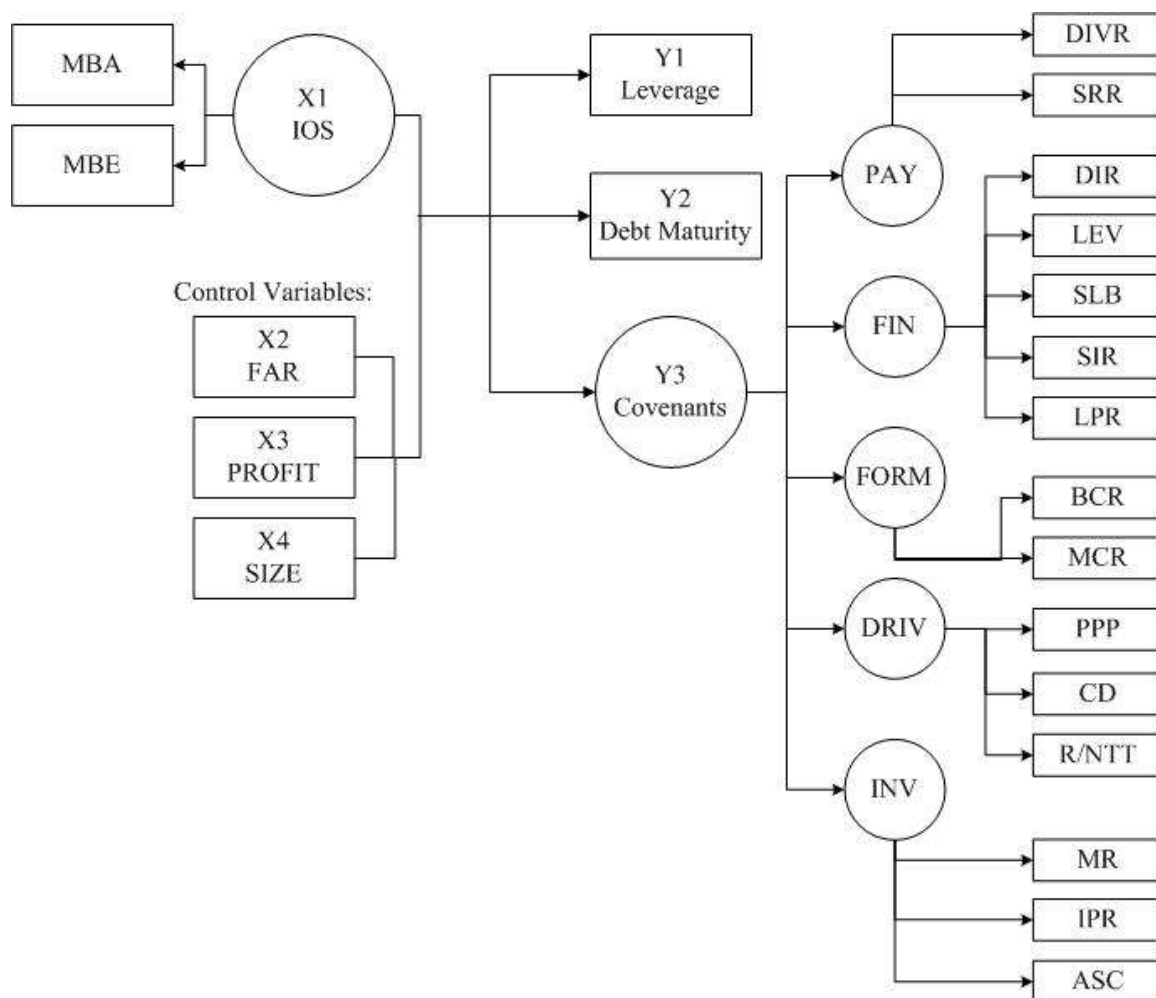
- Adam, T. and V. K. Goyal. 2007. The Investment Opportunity Set and Its Proxy Variables. *Journal of Financial Research*, Vol. 31, Issue 1
- Aivazian, V.A., Y. Ge, and J. Qiu. 2005. Debt Maturity Structure and Firm Investment. *Financial Management*: 107 – 119.
- Alcock, J., F. Finn, and K.J.K. Tan. 2011. Debt Covenants, Agency Cost and Debt Maturity. *A&F Research Forum*, University of Queensland Business School.
- Awan H.M., M. I. Bhatti, R. Ali, A. Qureshi. 2010. How Growth Opportunities are Related to Corporate Leverage Decisions? *Investment Management and Financial Innovations*, Vol. 7, Issue 1.
- Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 412/Bl/2010 Tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang*. 2010. Jakarta : BAPEPAM
- Barclay, M.J., L.M. Marx, and C.W. Smith Jr. 2001. The Joint Determination of Leverage and Maturity. *Journal of Corporate Finance* 9: 149-167.
- Barnea, A., R.A. Haugen, and L.W. Senbet. 1980. A Rationale for Debt Maturity Structure and Call Provisions in the Agency Theoretic Framework. *The Journal of Finance*, Vol. 35, No. 5, pp. 1223-1243.
- Berlin, M. 2006. Debt Maturity: What Do Economics Say? What Do CFOs Say?. *Business Review* Q1.
- Billett, M.T., T.H.D. King, and D.C. Mauer. 2007. Growth Opportunities and The Choice of Leverage, Debt Maturity, and Covenants. *The Journal of Finance*, Vol. 57, No. 2.
- Bradley, M. and M.R. Roberts. 2004. The Structure and Pricing of Corporate Debt Covenants. *SSRN eLibrary*, (Online), (<http://ssrn.com/abstract=466240> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.466240>, accessed on October 18, 2012).
- Bulan, L.T. and P.Sanyal. 2008. Leverage, Growth Opportunities and Deregulation of U.S. Electric Utilites, (Online), (Accessed at: http://people.brandeis.edu/~psanyal/Elec_Restruc_Lev_Gwth, on December 2, 2012)
- Creswell, J.W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 2nd Edition. USA: Sage Publications, Inc.
- Dang, V. A. 2010. Leverage, Debt Maturity and Firm Investment: An Empirical Analysis. *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol. 38, Issue 1-2, pp. 225-258.
- Diamond, D.W. 1993. Seniority and Maturity of Debt Contracts. *Journal of Financial Economics*, 33, pp. 341-368.
- Elliott, W.B., J. Koeter-Kant, and R.S. Warr. 2008. Market Timing and the Debt-Equity Choice. *Journal of Financial Intermediation*, Vol. 18, Issue 2, pp. 175-197.

- Fakultas Ekonomi. 2009. *Pedoman Penulisan Pembimbingan dan Ujian Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Farlex Financial Dictionary. 2012. *Investment Opportunity Set*, (Online) (Accessed at: <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Investment+Opportunity+Set>, on December 15, 2012). Farlex, Inc.
- Fatmasari, R. 2011. The Relation between Growth Opportunity, Leverage Policy and Function of Covenant to Control the Agency Conflict between Shareholders and Debtholders. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*.
- Ferdinand, A. 2002. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. 5th Edition. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, C.H. 2009. *Financial Reporting and Analysis Using Financial Accounting Information*. 11th Edition. USA: South-Western Cengage Learning.
- Global Development Finance. 2012. *Debt Maturity*, (Online) (Accessed at: <http://data.worldbank.org/indicator/DT.MAT.DPPG>, on December 8, 2012). US: World Bank.
- Goyal, V.K, K. Lehn, and S. Racic. 2002. Growth Opportunities and Corporate Debt Policy: The Case of the U.S. Defense Industry. *Journal of Financial Economics*, Vol. 64, Issue 1, Pages 35 – 39.
- Investopedia. 2012. *Maturity*, (Online) (Accessed at: <http://www.investopedia.com/terms/m/maturity.asp>, on December 1, 2012).
- Iqbal, A., I. Hameed and N. Ramzan. 2012. The Impact of Debt Capacity on Firm's Growth. *American Journal of Scientific Research*, ISSN 1450-223X, Issue 59, pp. 109–115.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 5, No.4, pp. 305 – 360.
- Korner, P. 2007. The Determinants of Corporate Debt Maturity Structure: Evidence from Czech Firms. *Czech Journal of Economic and Finance*, 57, no.3-4.
- Lang, L., E. Ofek and R.M. Stulz. 1995. Leverage, Investment and Firm Growth. *NBER Working Paper*, No.5165.
- Megginson, W.L., S.B. Smart, and L.J. Gitman. 2007. *Corporate Finance*. 2nd Edition. Canada: Thomson South-Western.
- Myers S.C. 1977. Determinants of Corporate Borrowing. *Journal of Financial Economics* 5, 147-175.
- Nikolaev, V. 2006. Debt Covenants and Accounting Conservatism: Complements OR Substitutes?. *Job Market Paper*.
- Reisel, N. 2010. On the Value of Restrictive Covenants: An Empirical Investigation of Public Bond Issues. *SSRN eLibrary* (Online), (<http://ssrn.com/abstract=644522> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.644522>, accessed on November 18, 2012).
- Research and Product Development Division. 2009. *IDX Fact Book*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.

- Research and Product Development Division. 2009. *Indonesia Bond Market Directory*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.
- Research and Product Development Division. 2010. *IDX Fact Book*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.
- Research and Product Development Division. 2010. *Indonesia Bond Market Directory*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.
- Research and Product Development Division. 2011. *IDX Fact Book*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.
- Research and Product Development Division. 2011. *Indonesia Bond Market Directory*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.
- Research and Product Development Division. 2012. *IDX Fact Book*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.
- Research and Product Development Division. 2012. *Indonesia Bond Market Directory*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.
- Ross, S.A., R.W. Wasterfield, and J.Jaffe. 2008. *Corporate Finance*. 3rd Edition. New York: Mc Graw Hill Company, Inc.
- Santoso, S. 2009. *Business Forecasting Metode Peramalan Bisnis Masa Kini dengan Minitab dan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sari, I.P. and I. Januarti. 2011. *Pengaruh Growth Opportunity terhadap Leverage dengan Debt Covenant sebagai Variabel Moderating*. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan. Semarang: Faculty of Economic, University of Muhammadiyah
- Sekaran, U. 2002. *Research Methods for Business*. 4th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Singhania, M. and A. Seth. 2010. Financial Leverage and Investment Opportunities in India: An Empirical Study. *International Research Journal of Finance and Economics*, ISSN 1450 – 2887, Issue 40.
- Smith, C.W. and J. B. Warner. 1979. On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants. *Journal of Financial Economics* 7, pp. 117 – 161.
- Taleb, G.A.I, and F. N. Al Shubiri. 2011. Capital Structure Decisions and Debt Maturity Structure: An Empirical from Jordan. *The Journal of Commerce*, Vol. 3, No. 4, ISSN: 2218-8118, 2220-6043.
- Yu, J. 2010. The Value of Debt Covenants: A Quantitative Framework. *Job Market Paper*.

Attachment

Figure 2.1. Conceptual Framework



Notes:

- | | | | |
|--------|--|-------|---------------------------------|
| MBA | Market-to-Book Asset ratio | SRR | Share Repurchase Restriction |
| MBE | Marker-to-Book Equity ratio | DIR | Debt Issue Restriction |
| IOS | Investment Opportunity Set | LEV | Total Leverage Test |
| FAR | Fixed Asset Ratio | SLB | Lease and Sale-and-lease back |
| PROFIT | Profitability | SIR | Stock Issue Restriction |
| SIZE | Firm Size | LPR | Loan Provider Restriction |
| PAY | Restrictions on Payouts to Equityholders and Others | BCR | Business Changing Restriction |
| FIN | Restrictions on Financing Activities | MCR | Managerial Changing Restriction |
| FORM | Restriction on Changing of Form and Structural of Business | PPP | Poison Put Provision |
| DRIV | Event-Driven Covenants | CD | Cross-Default Provision |
| INV | Restrictions on Investment and Asset Sales | R/NTT | Rating or Net worth Trigger |
| DIVR | Dividend Restriction | MR | Merger Restriction |
| | | IPR | Investment Policy Restriction |
| | | AS | Asset Sales |

Table 1. Operational Definition and Variable Measurement

No	Variable	Operational definition	Measurement
1	Investment Opportunity Set (IOS)	all of the investments that a company is able to make at a given point in time. The determinants of a company investment opportunity set is largely depend on its financing ability to deal with new project, whether through equity financing, debt financing or even personal savings	<p>Variable of investment opportunity set will be constructed from both MBA and MBE by using confirmatory factor analysis</p> $MBA_{it} = \frac{MVA_{it}}{BVA_{it}}$ <p>In which:</p> $MVA_{it} = SMP_{it} \times SO_{it} + PS_{it} + SDEBT_{it} + LDEBT_{it} - DTAX_{it} - ITAXC_{it}$ $MBE_{it} = \frac{SMP_{it} \times SO_{it}}{COMEQ_{it}}$ <p>MBA_{it}= Market-to-book assets ratio of company i period t</p> <p>MBE_{it}= Market-to-book equity ratio of company i period t</p> <p>MVA_{it}=Market value of asset of company i period t</p> <p>BVA_{it} = Book value of asset of company i period t</p> <p>SMP_{it} = Share market price of company i period t</p> <p>SO_{it}= Shares outstanding of company i period t</p> <p>PS_{it}= Preferred stock of company i period t</p> <p>SDEBT_{it}= Short term debt of company i period t</p> <p>LDEBT_{it}= Long term debt of company i period t</p> <p>DTAX_{it} = Deffered taxes of company i period t</p> <p>ITAXC_{it}= Investment credit tax of company i period t</p> <p>COMEQ_{it}= Common equity of company i period t</p>
2	Leverage (LEV)	commonly described as the use of borrowed money to make an investment and return on that investment	$LEV = \frac{BVD_{it}}{MVA_{it}}$ <p>In which,</p> $MVA_{it} = BVA_{it} - BVE_{it} + MVE_{it}$ <p>notes:</p> <p>LEV_{it} = Leverage of company i period t</p> <p>BVD_{it} = Book value of total debt of company i period t</p> <p>MVA_{it} = Market value of total assets of company i period t</p> <p>BVA_{it} = Book value of total assets of company i period t</p> <p>BVE_{it} = Book value of equity of company i period t</p>

			MVE_{it} = Market value of equity of company i period t
3	Debt Maturity (MAT)	the period of time for which a bond instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid with interest	$WADM_{it} = \sum WDM_{xit}$ $WDM_{xit} = \frac{DM_{xit}}{TBOND_{it}} \times TM_{xit}$ <p>notes: $WADM_{it}$ = Weighted-Average Debt Maturity of company i period t WDM_{xit} = Weighted Debt Maturity of bond x in company i period t DM_{xit} = Debt Maturity of bond x in company i period t $TBOND_{it}$ = Total Bonds of company i period t TM_{xit} = Term of Maturity of bond x in company i period t</p>
4	Fixed Assets (FAR)	the ratio of net fixed assets to total assets	$FAR_{it} = \frac{NFA_{it}}{BVA_{it}}$ <p>Notes: FAR = Fixed Asset of company i period t FA_{it} = Total net fixed asset of company i period t BVA_{it} = Total book-value-asset of company i period t</p>
5	Profitability (PROFIT)	the ability of the firm to generate earnings	$PROFIT = \frac{EBITDA_{it}}{BVA_{it}}$ <p>Notes: $PROFIT_{it}$ = Profitability of company i period t $EBITDA_{it}$ = Earnings before tax, interest, depreciation and amortization of company i period t BVA_{it} = Total book-value-asset of company i period t</p>
6	Firm Size (SIZE)	a measure of the size of the companies	Ln total assets
7	Protective Covenant (COV)	contracts aimed at borrowers by creditors to limit activities that may damage the value of loans and recovery loans	Table 2

Table 2. Types of Protective Covenants

No.	Covenant Indicator	Abbreviation
Restrictions on Payouts to Equity holders and Others (PAY)		
1.	Dividend Restriction	DIVR
2.	Share Repurchase Restriction	SRR
Restrictions on Financing Activities (FIN)		
3.	Debt Issue Restriction	DIR
4.	Total Leverage Test	LEV

5.	Lease and Sale-and-lease back	SLB
6.	Stock Issue Restriction	SIR
7.	Loan Provider Restriction	LPR
Restriction on Changing Business Form and Structural (FORM)		
8.	Business Changing Restriction	BCR
9.	Managerial Changing Restriction	MCR
Event-Driven Covenants (DRIV)		
10.	Poison Put Provision	PPP
11.	Rating or Net Worth Trigger	R/NWT
12.	Cross-Default Provision	CD
Restriction on Investment and Asset Sales (INV)		
13.	Merger Restriction	MR
14.	Investment Policy Restriction	IPR
15.	Asset Sales	AS

This research uses the 15 covenants or restrictions that construct the Protective Covenant as the third dependent variable. Each of 15 covenants has value of 1 or 0, the criteria are,

- 1 = The covenant is listed in the trusteeship agreement between company and bondholders.
- 0 = The covenant is not listed in the trusteeship agreement between company and bondholders.

The steps of construction of protective covenant variable are:

1. Listing 15-covenant-indicators, a covenant is equal 1 if the covenant is listed in the trusteeship agreement between company and bondholders, and 0 for otherwise.
2. Those 15-indicators are classified to be five classifications based on table 3.1 by using confirmatory factor analysis.
3. Five classifications of covenant are composited becoming one variable, by using confirmatory factor analysis, then the result is protective covenants (Y3).

Table 3. The Determination of Sampling

No.	Requirement Condition	2011	2010	2009	Total
1.	Non-financial companies listed in IDX	343	345	342	1030
2.	Non-financial companies do not issue bonds	(316)	(318)	(315)	(949)
3.	Non-financial companies which has negative equity	(2)	(2)	(2)	(6)
Total		25	25	25	75

Source: Processed Secondary Data

Table 4. Statistic Descriptive of Research Variables

Variables	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev.
MBA	0,43	2,55	1,2300	0,47085
MBE	0,06	4,51	1,5443	1,17329
Fixed Asset (X2)	0,03	0,87	0,3723	0,26772
Profitability (X3)	-0,06	0,57	0,1300	0,08678
Firm Size (X4)	20,15	24,77	22,7365	1,31230
Leverage (Y1)	0,21	0,98	0,5447	0,21772

Debt Maturity (Y2)	0	12,46	3,4247	2,25587
Protective Covenant (Y3)	0	0,67	0,3012	0,24441

Table 5. Confirmatory Factor Analysis of Investment Opportunity Set

Factor	Indicator	MSA	Communalities	Loading Factor
1	MBA	0,500	0,973	0,986
	MBE	0,500	0,973	0,986
	KMO-MSA = 0,500; Significance = 0,000			

Source: Processed Secondary Data

Figure 6. The Result of Confirmatory Factor Analysis of Event-Driven Covenant Warnings

There are fewer than two cases, at least one of the variables has zero variance, there is only one variable in the analysis, or correlation coefficients could not be computed for all pairs of variables. No further statistics will be computed.

Source: Processed Secondary Data

Table 7. Confirmatory Factor Analysis for 5-Classifications of Covenant Indicators

Factor	Covenant Indicator	MSA	Communalities	Loading Factor
I	Restrictions on Payouts to Equity holders and Others (PAY)			
	Dividend Restriction	0,500	0,818	0,904
	Share Repurchase Restriction	0,500	0,818	0,904
	KMO-MSA= 0,500; Significance = 0,000			
I	Restrictions on Financing Activities (FIN)			
	Debt Issue Restriction	0,707	0,774	0,880
	Total Leverage Test	0,679	0,296	0,544
	Sale-and-lease back	0,715	0,720	0,848
	Stock Issue Restriction	0,729	0,413	0,643
	Loan Provider Restriction	0,822	0,370	0,608
KMO-MSA= 0,722; Significance = 0,000				
I	Restriction on Changing Business Form and Structural (FORM)			
	Business Changing Restriction	0,500	0,881	0,938
	Managerial Changing Restriction	0,500	0,881	0,938
	KMO-MSA= 0,500; Significance = 0,000			
I	Event-Driven Covenants (DRIV)			
	Poison Put Provision	Zero variance	Zero variance	Zero variance
	Rating or Net Worth Trigger			
	Cross-Default Provision			
Restriction on Investment and Asset Sales (INV)				
	Merger Restriction	0,702	0,299	0,547

I	Investment Policy Restriction	0,533	0,773	0,879
	Asset Sales	0,539	0,703	0,838
	KMO-MSA= 0,552; Significance = 0,000			

Source: Processed Secondary Data

Table 8. Confirmatory Analysis Factor Second Order of Protective Covenants

Factor	Indicator	MSA	Communalities	Loading Factor
I	Restrictions on Payouts to Equity holders and Others	0,856	0,619	0,787
	Restrictions on Financing Activities	0,741	0,805	0,897
	Restriction on Changing Business Form and Structural	0,722	0,834	0,913
	Restriction on Investment and Asset Sales	0,821	0,594	0,771
	KMO-MSA = 0,771; Significance = 0,000			

Source: Processed Secondary Data

Table 9. Multicollinearity Test

Variable	Model 1	Model 2	Model 3	Decision
IOS (X1)	1.145	1.145	1.154	No Multicollinearity
FAR (X2)	1.276	1.276	1.283	No Multicollinearity
PROFIT (X3)	1.174	1.174	1.175	No Multicollinearity
SIZE (X4)	1.285	1.285	1.286	No Multicollinearity

Source: Processed Secondary Data

Table 10. The Result of Durbin-Watson Test

Model	1	2	3
Durbin-Watson Statistic	1,502	0,968	1,867
Critical value	$-2 \leq DW \leq 2$	$-2 \leq DW \leq 2$	$-2 \leq DW \leq 2$
Decision	No autocorrelation	No autocorrelation	No autocorrelation

Source: Processed Secondary Data

Table 11. White's Test

Model	R ²	n	c ²	χ ²
H ₁ model 1	0,102	75	7,65	96,22
H ₂ model 2	0,259	75	19,425	96,22
H ₃ model 3	0,102	75	7,65	96,22

Source: Processed Secondary Data

Table 12. Kolmogorov-Smirnov Z Test

Model	1	2	3
Kolmogorov-Smirnov Z	0,482	0,683	1,049
Significance	0,974	0,740	0,221
Test Distribution	Normal	Normal	Normal

Source: Processed Secondary Data

Table 13. The Results of Regression

Independent Variable	Dependent Variable		
	Model 1: Leverage (Y1)	Model 2: Debt Maturity (Y2)	Model 3: Protective Covenant (Y3)
Constant	0,752	-13,414	-0,376
IOS (X1)	-0,152^a	-0,230	0,211
	-8,718^b	-0,961	1,715
	0,000^{c***}	0,340	0,091[*]
Fixed Asset (X2)	0,124	1,922	-0,927
	1,809	2,035	-1,926
	0,075[*]	0,046^{**}	0,058^{**}
Profitability (X3)	-0,426	0,615	0,285
	-2,168	0,220	0,201
	0,034^{**}	0,826	0,842
Firm Size (X4)	-0,009	0,706	0,030
	-0,612	3,649	0,289
	0,542	0,001^{***}	0,774
F value	27,195	7,893	1,882
Sig. F value	0,000	0,000	0,124
R Square	0,608	0,311	0,100

Source: Processed Secondary Data

- a) coefficient *** significant at α 1%
- b) t-value ** significant at α 5%
- c) significance * significant at α 10%

From the output of SPSS, the results of the regression as well,

Model 1 Y= 0,752 – 0,152 X + 0,124X – 0,426X + 0,009X + e

Model 2 Y= - 13,414 – 0,230 X + 1,922X + 0,615X + 0,706X + e

Model 3 Y= - 0,376 + 0,211 X - 0,927X + 0,285X – 0,030X + e

Determinants of Risk Disclosure Level: Case of Indonesia

AKHIR SYABANI
SYLVIA VERONICA SIREGAR
Universitas Indonesia

ABSTRACT

This research aims to examine the determinants of risk disclosure level of public listed firms in Indonesia Stock Exchange. Risk disclosure level is divided into three types, i.e. mandatory, voluntary, and total risk disclosure. The results show that generally firm size and product or service diversification has positive effect on risk disclosure level, whereas geographic diversification positively affects only voluntary risk disclosure. Based on industry type, firms in certain sectors such as: infrastructure, mining, agriculture, and property, have higher level of risk disclosure than miscellaneous industries.

Keywords: Risk Disclosure, Firm Size, Leverage, Profitability, Firm Diversification

Introduction

For the last two decades, cases and scandals involving large firms like Enron had increased international public awareness toward the importance of comprehensive, reliable, and relevant reporting system to reduce asymmetric information. One of the main aspects that is currently under the scrutiny is the ability of firms' reports in informing their risk exposure to their stakeholders.

On the other side, researches related to risk disclosures or reporting has been relatively limited, especially in Indonesia. Most of the published articles are studies from European countries. Linsley & Shrive (2005) research risk reporting in non-financial public firms in the UK that were listed in FTSE 100 for the year 2001, when the debates on risk reporting started arising especially after the issuance of discussion documents about risk reporting by Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) for the year 1997. The results of their research is strategic risks are the most reported and the level of risk does not affect risk reporting.

Linsley & Shrive (2006) continued their research and examine two additional variables that represents environmental risk. The result of this research shows consistent result with their previous research for the same variables use. Meanwhile, the additional variables have positive correlation with risk disclosures.

Helbok and Wagner (2006) took larger samples in North America, Asia, and Europe but only focused on the relation of equity ratio and profitability toward operational risk reporting. The result shows that both variables affect risk disclosures negatively. Risk disclosures for financial sectors also conducted by Horing & Grundl (2011) on insurance firms in Europe and reveals that firm size, risk level, ownership dispersion, cross-listing, and bancassurance activities have positive effect while profitability has negative effect toward risk disclosures.

One of the few researches conducted in Asia was done by Amran et al. (2008) related to risk management disclosure in 100 public firms listed in Bursa Malaysia by taking several independent variables into account, i.e. firm size, leverage, product diversification, geographic diversification, and industry type using content analysis structured by Linsley & Shrives (2005). Firm size is proven to have positive effect, while leverage and diversification level do not. For industry type, infrastructure and technology sectors tend to disclose more risk information.

Research in Malaysia was again conducted by Ismail & Rahman (2011) on 150 non-financial public firms in Bursa Malaysia as further development of the former researches done by Amran et al. (2008) and Abraham & Cox (2007) related to ownership and board characteristics. This research also divides risk disclosures into mandatory, voluntary, and total disclosures. The findings from this researches is there are significant effect of institutional investors, board education background, firm size and industry type of industrial products and plantation on risk disclosures.

We have not found similar research in Indonesia, hence our research will extend previous researches using Indonesia setting. Our research is focused on non-financial public firms for the year 2010. Non-financial public firms are selected since there is no regulation related to risk disclosures in specific and comprehensive form and the related rules are not yet as tight as in banking and financial institutions. This research is also aimed to understand how far the risk reporting practices in Indonesia is. Meanwhile, the year selected for the research is 2010 because previous research by Kajuter and Winkler (2003) indicates that there's an upward trend or risk reporting over the years. By using sample from recent period, it is expected that the result can be more significant and representative to current condition.

Literature Review and Hypotheses Development

Firm size has been perceived as the most affecting variable when it comes to company's disclosure level. As the size of the company increases, stakeholders involved are also getting much bigger. Firms have higher pressure for disclosing information to meet the expectation and supervision from increasing parties of interest. Firms with larger size also have higher resources to be able to disclose more information. Related to risk disclosures, Linsley & Shrivess (2006), Abraham & Cox (2007) and Amran et al. (2008) find that firm size have positive and significant effect on risk disclosures.

H₁: Firm size has positive effect on risk disclosure level.

Leverage is also commonly used in researches related to disclosures. Based on stakeholder theory, firms are expected to improve their risk disclosures as a justification and explanation on what has happened within the firms. Large proportion of debt in capital structure can also encourage creditors to demand more disclosures on related risk information (Ahn & Lee, 2004 within Amran et al., 2008).

H₂: Leverage level has positive effect on risk disclosure level.

Diversification can also increase the probability for encountering new risk exposures (Frenkel et al., 2000). Firm diversification is divided into two parts, product/service diversification and geographic diversification. With the additions of product types or doing geographic diversification, firms should exercise more efforts to achieve their target. This diversification effort can also increase the risk of failure or bankruptcy on certain business segment or geographic location. Hendriksen & Breda (1992) states that the demand and need for more disclosures as diversification level increases is caused by the increasing variety of growth trend, operation variability, and risks within each geographic and business segment that can not be aggregately evaluated.

In line with signaling theory, management will try to disclose more adequate information to ensure the trust of shareholders toward the improving ability to manage risks caused by diversification and to show the performance of each business and geographic segment. With this reason, company diversification will tend to increase risk disclosure or, in other words, has positive effect.

H₃: Product/service diversification has positive effect on risk disclosure level.

H₄: Geographic diversification has positive effect on risk disclosure level.

Profitability shows firm's capability in managing the company, generating capital, and safeguarding the value equity at its best. Firms with high profitability will reduce risk disclosures to avoid negative perceptions, while firms with low profitability will try to disclose more about their risk management as a mean of justification and responsibility toward all the stakeholders regarding all the risks and uncertainties faced by the firms. Helbok & Wagner (2006) and Horing & Grundl (2011) find the negative effect of profitability on risk disclosure level.

H₅: Profitability has negative effect on risk disclosure level.

Industry type differences bring the company into different characteristics and risk levels that in turn, will affect risk disclosures for each industry. Amran et al. (2008) find that certain industries tend to have higher risk disclosures, in line with findings of Watson et al. (2002) who find that industry type is an important indicator to explain voluntary risk disclosures (Abraham & Cox, 2007). Ahmed & Courtis (1999) also suggests that different industry classifications used in research is able to explain the variety of testing results.

H₆: Industry type has significant effect on risk disclosure level.

Research Design

Model used in this research is adapted and modified Helbok & Wagner (2006) and Amran et al. (2008):

$$DISC_i = \alpha_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 DIPROD_i + \beta_4 DISEG_i + \beta_5 PROF_i + \sum_{n=1}^7 (IND)_i + \varepsilon_i$$

- DISC** : risk disclosure level of a company:
1. mandatory risk disclosures (*MANDATORY*)
 2. voluntary risk disclosures (*VOLUNTARY*)
 3. total risk disclosures (*TOTAL*)
- SIZE** : firm size
- LEV** : leverage
- DIPROD** : production diversification
- DISEG** : geographic diversification
- PROF** : profitability
- IND** : industry types based on Indonesia Stock Exchange excluding financial sectors.

Risk Disclosure Level

Dependent variable is measured using content analysis, i.e. by identifying sentences and counting words as a proxy. Word count method was used by Helbok & Wagner (2006) and also Abraham & Cox (2007). Selection on words and not sentences is based on some considerations. Sentence is still used as the basis for coding or identification. Identification of sentence is perceived as a reliable method for disclosure (Milne & Adler, 1999), that was also conducted by Beretta & Bozzolan (2004) and Linsley & Shrivs (2006). However, unlike Beretta & Bozzolan (2004) and Linsley & Shrivs (2006), input used is number of words within sentences. Milne & Adler (1999) within Abraham & Cox (2007) state that the use of word can improve precision in measurement, although the selection on word or sentence will not materially differ eventually. This method is also selected because of technical consideration to simplify the calculation and input process.

Content analysis is also conducted only on Indonesian version of the reports. Calculation of number of words was done by converting or copying contents of identified risk

disclosures within annual and financial reports into the format of Microsoft Word that has word count feature.

To obtain the relevant number of words that can be input into the model, identification of sentences indicating risk disclosures based on certain criteria was done beforehand, and the number of words was then counted. Within this research, risk disclosure is the disclosure that indicates there's an existence of risk within the company, directly (by mentioning the word 'risk' explicitly) or indirectly (based on evaluation criteria). Risk disclosures related to policy, organization structure and general procedures that are vague are not included as risk disclosures within this research, since they cannot give specific information on risks faced by the firms.

The dependent variables will be divided into three, i.e. mandatory, voluntary, and total disclosures as follows:

- a) **Mandatory Risk Disclosure:** obtained from identification and calculation of risk disclosures using the aforementioned content analysis, based on Indonesia accounting standards (PSAK 50 *Financial Instruments: Presentation and Disclosure*) and Indonesia Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) regulation that explicitly state risk disclosure rules for Indonesian firms.
- b) **Voluntary Risk Disclosure:** obtained from identification and calculation of risk disclosures with the aforementioned content analysis, excluded from mandatory risk disclosures. Identification process and calculation for voluntary risk disclosures were done thoroughly on the narrative sections within annual and financial reports. Aligned with Abraham & Cox (2007), keywords are used to maintain the validity and consistency of risk disclosure identification. The keywords include: '*ketidakpastian*' (uncertainty), '*dampak*' (impact), '*peluang*' (opportunity),

'*tantangan*'(challenge), '*ancaman*'(threat), '*bahaya*'(danger), '*prospek*'(prospect), etc., with the respective derivatives. Thorough identification was done repeatedly.

We divide risk into six main categories (Appendix 1). In each category, there are several risk types. With this model as a basis, coding on sentence from narrative or non-financial section in annual or financial report indicating risk disclosures was then performed.

- c) Total Risk Disclosure: is the sum of mandatory and voluntary risk disclosures that were done beforehand.

Independent Variables

- a) Firm Size: natural logarithm of total assets (Ismail & Rahman, 2011).
- b) Leverage: total liabilities/total assets (Amran et al., 2008).
- c) Production Diversification: entropy index (Apostu, 2010).
- d) Geographic Diversification: 1 if firms that have significant operations in other countries (geographically diversified) and 0 if otherwise.
- e) Profitability: Return on Equity (ROE) (Horing & Grundl, 2011).
- f) Industry Types: based on Amran et al. (2008), industry types are operated using dummy variable by giving the score of 1 if the company is within certain related industry and 0 if not categorized in the rest of industry types. The industry types are based on Indonesia Stock Exchange classification excluding the financial sectors. There are 8 industry sectors: agriculture (IAGRI), mining (*IMIN*), basic industries and chemicals (*IBAS*), consumer goods (*ICON*), property, real estate, construction (*IPROP*), infrastructure, utilities, transportation (*IINF*), trading, service, investment (*ITRA*), and Miscellaneous industries (IMISC). IMISC is used as the base industry.

Sample Selection

Our samples are the non-financial public firms listed in Indonesia Stock Exchange for the year 2010. We focus on large firms because these firms are assumed to have more stakeholders that supervise the performance of the firms, hence resulted in more comprehensive reports and disclosures for them (Linsley & Shrivess, 2006 and Abraham & Cox, 2007). Based on sample selection criteria, we have 89 firms as our samples.

Results

Below in Table 2 is the summary for descriptive statistics analysis. Average total risk disclosure is 1,999 words, with mandatory risk disclosure amounting 1,444 words, far higher than voluntary risk disclosures with the average of 555 words. From total samples, 30% (27 firms) have risk disclosure level above the average for mandatory risk disclosure category, while for voluntary and total disclosure, the percentage is 38% (38 firms) and 31% (28 firms) respectively.

Table 2 Descriptive Statistics

Variable	Maximum	Minimum	Mean	StdDev
MANDATORY	12,298	204	1,444	1,640
VOLUNTARY	1,993	105	555	391
TOTALDISC	13,233	433	1,999	1,829
SIZE (RpMilyar)	99,758	336	10,782	16,538
LEV	0.9146	0.0049	0.4640	0.1724
PROF	0.8124	-0.2466	0.1484	0.1548
DIPROD	1.8168	0.0000	0.5607	0.4120

MANDATORY = mandatory risk disclosure level with number of words as proxy, VOLUNTARY = voluntary risk disclosure level with number of words as proxy, TOTALDISC = mandatory plus voluntary risk disclosure level, SIZE = total assets, LEV = leverage, PROF = return on equity, DIPROD = entropy index, DISEG = 1 if firms that have significant operations in other countries (geographically diversified) and 0 if otherwise

Generally, Indosat (total 13,233) and Telekomunikasi Indonesia (total 11,859) become two firms with the highest risk disclosure level, far exceeding other firms' risk disclosure

level. This may due to the fact that both firms are also listed in New York Stock Exchange, enforcing them to oblige the Securities and Exchange Commission (SEC) Form 20-F. Not only it causes more disclosures, the rules also make the contents of their disclosures become more comprehensive. Therefore, we will have additional testing to exclude both firms to find out how much the effect of those firms is on the results, which will be explained in later section of this paper.

Firms within mining and infrastructure sectors tend to disclose risks and the related mitigations much more than other sectors do. This is aligned with the characteristics of those two sectors. Mining and infrastructure are known to be industries that require very huge amount of investments, and this makes them have high risk high return profile. The scale of both industries are also relatively higher than other industries. Consequently, there are more stakeholders involved within operational and strategic activities of those firms, ranging from the government to the related societies. This increases the supervisions of those firms that in turn, can increase higher demand of reporting—resulting in higher risk disclosure level.

For the mandatory risk disclosure proportion, the average risk disclosures based on Bapepam-LK Regulation (800 words, 52% is higher than the average risk disclosures based on PSAK No. 50 (697 words, 48%). This is because the scope of risk disclosures based on Bapepam-LK Regulation is broader to narrate in annual reports compared to PSAK No. 50 that is limited to financial risks that are generally elaborated in notes to financial statements. The characteristics of the industries included in this research is also one of the causes why there is less disclosures on PSAK No. 50, since financial institutions having more financial instruments with its risks are excluded.

Table 3 Results

$$DISC_i = \alpha_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 DIPROD_i + \beta_4 DISEG_i + \beta_5 PROF_i + \sum_{n=1}^7 (IND)_i + \varepsilon_i$$

Variable	Expected Sign	Mandatory			Voluntary			Total		
		Coeff.	t-statistics	Prob.	Coeff.	t-statistics	Prob.	Coeff.	t-statistics	Prob.
C		0.5867	0.3776	0.7067	1.8075	1.0055	0.3178	1.5784	0.97469	0.3328
SIZE	+	0.2116	3.85	0.0001 ***	0.1145	1.7668	0.0407 **	0.1814	3.07226	0.0015 ***
LEV	+	-0.162	-0.4406	0.3304	-0.127	-0.2978	0.3834	-0.107	-0.2971	0.3836
PROF	-	-0.037	-0.085	0.4663	0.3958	0.9537	0.1717	0.0995	0.2636	0.3964
DIPROD	+	0.3663	2.2004	0.0154 **	0.3633	2.1182	0.0187 **	0.3796	2.47655	0.0078 ***
DISEG	+	-0.016	-0.0897	0.4644	0.5076	2.8559	0.0028 ***	0.1305	0.77555	0.2202
IAGRI		0.4413	1.1707	0.2454	0.7092	2.0123	0.0477 **	0.5954	2.241	0.0279 **
IMIN		0.2301	0.6795	0.4989	1.0269	5.9059	0 ***	0.5237	2.47966	0.0154 **
IBAS		0.0406	0.1233	0.9022	0.2932	1.3337	0.1863	0.1313	0.52549	0.6008
ICON		-0.299	-0.8893	0.3767	-0.073	-0.3788	0.7059	-0.177	-0.8469	0.3997
IPROP		-0.111	-0.3056	0.7607	0.5391	2.3694	0.0204 **	0.1088	0.411	0.6822
IINF		0.6384	1.6894	0.0952 *	0.7981	2.9875	0.0038 ***	0.7629	2.70009	0.0085 ***
ITRA		0.0998	0.2862	0.7755	0.4083	1.8251	0.0719 *	0.219	0.96842	0.3359
Adjusted R-squared				0.2760			0.2848			0.3592
F-Statistic				3.7949			3.9201			5.1113
Prob (F-Statistic)				0.0002 ***			0.0001 ***			0.0000 ***

DISC = risk disclosure level with number of words as proxy, SIZE = total assets, LEV = leverage, PROF = return on equity, DIPROD = entropy index, DISEG = 1 if firms that have significant operations in other countries (geographically diversified) and 0 if otherwise, IAGRI (agriculture), IMIN (mining), IBAS (basic industry & chemicals), ICON (consumer goods), IPROP (property, real estate, building construction), IINF (infrastructure, utilities, transportation), ITRA (trading, services, investment)

***, **, * significant at 1%, 5%, 10%

Total risk disclosures in voluntary category are 49,415 words consisting of 21,647 for strategic risks (43.81%), 19,984 for operational risks (40.44%), 5,971 for financial risks (12.08%), 1,107 for empowerment risks (2.24%), 554 for information and technology (1.12%), and 152 for integrity risks (0.31%) that are related to fraud or illegal acts jeopardizing firms' reputation. These findings are quite similar with Linsley & Shrides (2006), where three highest risk disclosures fall into strategic, operational, and financial risks. The difference exists in later categories, where integrity, empowerment, and information and technology risks become three risks with the lowest disclosures.

For strategic risks, the most common disclosures are related to environmental scan (32.01%) which is related to global condition analysis including uncertainties in macro environment related to the firms. Meanwhile for operational risks, the most frequently discussed disclosures are related to sourcing (42.53%) which is closely related to daily operations. Firm size has significant positive effect on mandatory, voluntary, and total risk disclosures (H1 is not rejected). The larger the size of a firm, the more disclosures the firms will provide as they have more resources to produce more comprehensive reports.. This result is consistent with Linsley & Shrides (2005), Linsley & Shrides (2006), Abraham & Cox (2007), Amran et al. (2008), Horing & Grundl (2011), and Ismail & Rahman (2011).

The result also shows that leverage do not have significant effect on risk disclosure level. This finding is similar with Abraham & Cox (2007), Amran et al. (2008), and also Ismail & Rahman (2011). Firms with high leverage do not necessarily have the burden to highly disclose their risk management. This may occur because there are other media beside disclosures that are used to communicate relevant information to the parties of interest (Ahmed & Courtis, 1999) or there are other sources of information implying risk information, such as in websites, stock exchanges announcements and through mass media. Firms are also able to communicate their risks directly to the parties related to their liabilities—such as

bank. On the other hand, firms with lower leverage still have the potential to disclose their risk information openly either because of the prevailing regulations or as a voluntary deed to their stakeholders.

Production diversification have positive effect on risk disclosures. This finding supports Frenkel et al. (2000) which suggests that the diversification performed by the company will increase their exposures to new risks. Consequently, demands and needs of disclosures will also peak since the growth trend, operational variability, and each geographic and segment's risk are different and cannot be aggregately evaluated (Hendriksen & Breda, 1992). Related to the signaling theory, risk disclosure is intended as means to show the improved ability in handling risks caused by diversification to all stakeholders.

Meanwhile, geographic diversification is only have positive effect on voluntary risk disclosures. This shows that, generally, risk disclosures related to geographic area are least likely to be presented. Risk disclosures related to geographic area are more related to environmental condition and local regulations that are elaborated in general terms voluntarily, spread about in many sections within the annual reports. This is different with risk disclosures related to product segmentation that are highly elaborated in specific and special manner within certain parts in annual reports, either voluntarily or related to mandatory disclosures, such as within the operational and performance review section related to Bapepam-LK regulations. From our samples, firms that are diversified geographically only form for about 48.33% or less than a half.

For profitability, the result shows that profitability does not affect any risk disclosures. Firms with low profitability or perceived as having higher probability of failure do not necessarily have higher incentive to report their risks and how they manage those risks to guard their credibility and public expectations. On the other side, firms with low profitability have incentives to conceal the negative information. This is in line with the

finding from Ahmed & Courtis (1999) that profitability has no association with disclosure level within annual report, consistent with Abraham & Cox (2007) as well. The probable cause is that disclosures within annual reports are not the only media that can be used by the firms to convey information to the public, including information related to the risks owned by the firms with low profitability.

For industry type, generally it can be concluded that infrastructure industry has the most dominant effect on risk disclosure level, followed by mining sector. For infrastructure, this is consistent with the finding from Amran et al. (2008) which states that this industry is the determining for risk disclosures in Malaysia. Firms which characteristics are more susceptible to higher risk exposure, such as those in infrastructure, will have more information to disclose.

From the descriptive statistics, Indosat and Telekomunikasi Indonesia have risk disclosures that are far higher than the other firms included in observation. This may raise a conjecture on the existence of bias within the research results caused by the inclusion of both firms. To comprehend how far the effect of those two firms to the research, sensitivity analysis was performed by comparing the main results with results excluding these two firms (Table 4).

Table 3 Sensitivity Results

$$DISC_i = \alpha_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 DIPROD_i + \beta_4 DISEG_i + \beta_5 PROF_i + \sum_{n=1}^7 (IND)_i + \varepsilon_i$$

Variable	Expected Sign	Mandatory			Voluntary			Total		
		Coeff.	t-statistic	Prob.	Coeff.	t-statistic	Prob.	Coeff.	t-statistic	Prob.
C		2.2926	1.5129	0.1346	2.6448	1.3704	0.1747	3.1252	2.20248	0.0307
SIZE	+	0.1517	2.8333	0.003 ***	0.0852	1.2337	0.1106 **	0.1271	2.42452	0.0089 ***
LEV	+	-0.119	-0.3471	0.3648	-0.088	-0.2013	0.4205	-0.068	-0.1807	0.4286
PROF	-	-0.11	-0.2698	0.3941	0.3354	0.7708	0.2217	0.0321	0.08617	0.4658
DIPROD	+	0.273	1.7368	0.0433 **	0.3129	1.8612	0.0334 **	0.2947	2.08566	0.0203 ***
DISEG	+	0.0828	0.4855	0.3144	0.5527	2.9623	0.0021 ***	0.2203	1.40335	0.0824
IAGRI		0.4176	1.1939	0.2363	0.6928	1.9238	0.0582 **	0.5737	2.15301	0.0346 **
IMIN		0.2592	0.825	0.412	1.0382	6.0726	0 ***	0.5499	2.73988	0.0077 **
IBAS		0.0137	0.0447	0.9644	0.2761	1.2753	0.2062	0.1067	0.45349	0.6515
ICON		-0.245	-0.7838	0.4357	-0.045	-0.2365	0.8137	-0.128	-0.7068	0.4819
IPROP		-0.041	-0.1206	0.9043	0.5686	2.4793	0.0154 **	0.1725	0.70107	0.4855
IINF		0.462	1.3049	0.196	0.7086	2.6139	0.0108 ***	0.6028	2.39957	0.0189 ***
ITRA		0.1798	0.5549	0.5806	0.4449	1.9501	0.0549 *	0.2914	1.40885	0.1631
Adjusted R-squared				0.1404			0.2696			0.2715
F-Statistic				2.1707			3.6451			3.6714
Prob (F-Statistic)				0.0219 **			0.0003 ***			0.0002 ***

DISC = risk disclosure level with number of words as proxy, SIZE = total assets, LEV = leverage, PROF = return on equity, DIPROD = entropy index, DISEG = 1 if firms that have significant operations in other countries (geographically diversified) and 0 if otherwise, IAGRI (agriculture), IMIN (mining), IBAS (basic industry & chemicals), ICON (consumer goods), IPROP (property, real estate, building construction), IINF (infrastructure, utilities, transportation), ITRA (trading, services, investment)

***, **, * significant at 1%, 5%, 10%



All of the regression results in Table 3 show only a slight change from the the main regression results. By excluding two extreme observations that have far more risk disclosures caused by dual-listing factor, firm size and product and geographic diversification still have positive association with risk disclosure level. Meanwhile, certain types of industry, such as mining and infrastrucure, are significantly disclose more risk information than the other industries. This shows that different industry type creates the difference in risk disclosure level.

Conclusion

Mandatory risk disclosures are generally more disclosed than voluntary risk disclosures. For voluntary risk disclosures, risk categories that are most dominantly disclosed are strategic and operational risks. While the highest risk disclosures are generally owned by firms in mining and infrastructure, utilities and transportation sector.

Firm size has positive correlation with all risk disclosures – amandatory, voluntary, and total. This indicates that risk disclosures will increase as the firm is getting larger. This is caused by the increasing demand for information transparency as the stakeholders involved are increasing as well—supported by the improving ability of the firms to spend more reporting expenses to produce more comprehensive reports as demanded.

Product or service diversifications have positive association with risk disclosures. As the production segments increase, risk area will multiply and demand for disclosures related to the evaluation of each risk will increase as well. This is because the evaluation cannot be performed aggregately considering the characteristics and risk variability of each segment tend to be different from each other. Meanwhile, geographic diversification has positive association only with voluntary risk disclosures. Geographically-diversified firms tend to disclose their risk information voluntarily and spread about within their annual and financial

reports, and generally, not specifically elaborate risk disclosures affected by geographic area. This is different from the disclosures related to product segment diversification.

For the industry types, infrastructure, utilities, transportation becomes the industry with the most risk disclosures. Industry sectors that are also affecting the increasing risk disclosure level are mining, agriculture, property, real estate, and construction and trading, services, and investment. This means that firms within those sectors have higher disclosure level than miscellaneous industries used as the base industry within this research.

Further study may identified other variables, in addition to firm size, leverage level, profitability, production and geographic diversifications, and industry types, and examine the association with risk disclosure level. Our study have limitation in regard with testing the risk disclosure quantity by using word count. There is probable existence of subjectivity in the content analysis process. Further study can also examine the qualitative aspect of risk disclosures in Indonesia, similar to that of Beretta & Bozzolan (2004), with more number of observations and periods.

References

- Abraham, S. dan Cox, P. (2007). Analysing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports. *The British Accounting Review* 39, 227-248.
- Ahmed, K. & Courtis, J.K. (1999). Associations between corporate characteristics and disclosure levels in annual reports: a meta-analysis. *The British Accounting Review* 31, 35-61.
- Ahn, T. S. & Lee, J. (2004). Determinants of voluntary disclosures in management discussion and analysis (MD&A): Korean evidence. *Paper presented at the 16th Asian Pacific Conference on International Accounting Issues*, Seoul, November 7-10.
- Amran, A., Bin, A.M.R., & Hassan, B.C.H.M. (2008). Risk reporting: an explanatory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal* Vol. 24, No.1, 39-57.
- Apostu, A. (2010). The effects of corporate diversification strategies on capital structure: an empirical study on European companies. *Unpublished Thesis Aarhus School of Business, Aarhus University*.
- Beretta, S., & Bozzolan, S. (2004). A framework for the analysis of firm risk communication. *The International Journal of Accounting* 39, 265-288.
- Frenkel, M., Hommel, U., & Rudolf, M. (2000). *Risk Management*. Springer-Verlag, Heidelberg.

- Helbok, G., &Wagner, C. (2006). Determinants of operational risk reporting in the banking industry. *The Journal of Risk*, 9(1), 49-74.
- Hendriksen, E. S.,&Breda, M. F. V. (1992). *Accounting Theory*. United States of America: McGraw-Hill.
- Horing, D., & Grundl, H. (2011). Investigating risk disclosure practices in the European insurance industry. *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Palgrave Macmillan*, Vol. 36(3), 380-413.
- Ismail, R., &Rahman, R.A. (2011). Institutional investors and board of directors' monitoring role on risk management disclosure level in Malaysia. *The IUP Journal of Corporate Governance*, Vol. X, No.2.
- Kajuter, P., &Wrinkler, C. (2003). Die risikoberichterstattung der DAX100-unternehmen im zeitvergleich. *Zeitschrift fur internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung*, 3(5), 217-228.
- Linsley, P. M., &Shrives, P.J. (2005). Examining risk reporting in UK public companies. *The Journal of Risk Finance* Vol. 6, No.4,292-305.
- Linsley, P. M., &Shrives, P.J. (2006). Risk reporting: a study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. *The British Accounting Review* 38, 387-404.
- Milne, M. J., &Adler, P.J. (1999). Exploring the reliability of social and environmental disclosures content analysis. *Accounting, Auditing and Accountability* 12(2), 237-256.
- Watson, A., Shrives, P., &Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK. *British Accounting Review* 34, 289-313.

Appendix 1: Risk Types on Each Category for Voluntary Risk Disclosures

No	Risk Category	Risk Type
1	Financial risk	Interest risk
		Exchange risk
		Commodity
		Liquidity
		Credit
2	Operations risk	Customer satisfaction
		Products development
		Efficiency and performance
		Sourcing
		Stock obsolence and shrinking
		Product and service failure
		Environment
		Health and safety
3	Empowerment risk	Brand name erosion
		Leadership and management
		Outsourcing
		Performance incentives
4	Information processing and technology risk	Change readiness
		Communications
		Integrity
		Access
5	Integrity risk	Availability
		Infrastructure
		Management and employee fraud
6	Strategic risk	Illegal acts
		Reputation
		Environmental scan
		Industry
		Business portfolio
		Competitors
		Pricing
		Valuation
		Planning
		Life cycle
Performance measurement		
Regulatory		
Sovereign and political		

Source: Linsley & Shives (2005)

Meta-Analysis: a Decade Study about the Determinants of Earnings Response Coefficient (ERC) in Indonesia

FITRIA PRANANDARI
ZAENAL FANANI*
KHUSNUL PRASETYO
AGUS WIDODO MARDIJUWONO
Universitas Airlangga

Abstract: This research try to study the determinants of earnings response coefficients (ERC) with 10 year data from published and unpublished journals in Indonesia. The purpose of this research is to examine the association between earnings growth, earnings predictability, earnings persistence, industry type, capital structure, auditor quality, income smoothing, timeliness, firm size, gain/loss of foreign currency transaction, beta risk, voluntary disclosure, CSR disclosure, and audit committee with the ERC. This research applies the meta-analysis technique developed by Hunter et al. (1982) to a sample of 20 articles published from 2002 until 2011 for the purpose of cumulating and integrating across studies. The articles used are selected studies from five publicly accredited journal in Indonesia and Simposium Nasional Akuntansi (SNA) as the representative of unpublished journal. This research shows that earning persistence, earnings growth, earnings predictability, beta risk, industry type, audit quality, CSR disclosure, timeliness, audit committee, and transaction gains (losses) are the factors which significantly associate with the ERC. Meanwhile, capital structure, firm size, income smoothing, and voluntary disclosure are found to be not significantly associate with the ERC. Thus, there are 10 variables that found to be the robust test determinants of ERC. This research is an integrated studies that never done before in the ERC research.

Keywords: Earnings Response Coefficients, Meta-Analysis, Determinants of Earnings Response Coefficient.

*Corresponding Author : fanani_unair@yahoo.com

JEL Classification: G14, M41

I. INTRODUCTION

The external users have lack of authority to prescribe financial information directly from the company. Hence, financial statement is functioned as the communication tools from the management to the external users. Investors, as one of the external users, need the information stated in the financial statement to help them in making investment decision. Investors are interested in assessing the company's ability to generate net cash inflows and management's ability to protect and enhance their investments (Kieso et al., 2011: 8).

Earnings information is considered as the relevant information for the investors. Information perceived as relevant if it is capable in making difference in decisions. It helps users both for predicting the outcome of past, present, and future event, and confirming prior expectations. Thus, SFAC 2 (FASB, 1980) stated that the components of relevant information are the feedback value and predictive value. Relevant information contains value relevance. Value relevance theories use securities market reaction to measure the extent to which financial statement information assists investors to predict future firm performance. (Beaver, 2002)

The value relevance theory absolutely opens the possibility for other factors influencing the market response. It is closely related with the concept of earnings quality, because change in security price surrounding earnings releases assist investor to make an investment decision. Then, it brings to the next important direction of Ball and Brown's study called as Earning Response Coefficient (ERC) theory. ERC measures the extent of a security's abnormal market return in response to the unexpected component of reported earnings of the firm issuing that security. Improved understanding of market response

suggests a further improvement to the decision usefulness of financial statement. (Scott, 2012:168)

Some researchers have been tried to examine the factors that affect the different market response by using ERC. The determinants factors have been examined to the values of ERC. They are earning persistence (Kormendi and Lipe, 1987 and Collins and Kothari, 1989), growth opportunities (Collins and Kothari, 1989), beta risk (Collins and Kothari, 1989, Chambers et al., 2005 and Dhaliwal and Reynolds, 1994), capital structure (Dhaliwal et al., 1991), firm size (Chaney and Jeter, 1991), auditor quality (Teoh and Wong, 1993), industry effect (Biddle and Seow, 1991), timeliness (Jaswadi, 2004), and accounting method (Chandrarin, 2003). However, the results of the researches about the factors influencing ERC are inconsistent.

Hence, the first motivation of this research is to reconcile the inconsistent research findings. This different results can be determined by many factors, one of its factor can be the different sample size. According to the Suhardianto (2011), a comprehensive study is really needed to find the robustest variable that associate with the ERC. Thus, a meta-analysis study can be the most suitable method to address this problem. As mentioned by Ahmed et al. (2012), meta-analysis is a statistical technique allowing researchers to overcome the shortcomings of the narrative aspects of empirical reviews and thereby accumulates the statistical findings of related research in an attempt to make quantitative generalizations and reduce the limited statistical power of studies with small sample sizes.

Second motivation in conducting this research is to expand factors that may associate with the earnings response coefficient (ERC). Commonly, researches in accounting only used certain variables in testing the determinants of ERC, like what have been studied by Jang et al. (2006), Mulyani et al. (2007) and Setiati and Kusuma (2004).

Finally, the objective of this research is to analyze the association of earnings growth (EGrw), earnings predictability (EPrdc), earnings persistence (EPrst), dummy industry (INDUSTRY), capital structure (CS), auditor quality (RepAud), income smoothing (IS), timeliness (TIME), firm size (SIZE), gain/loss of foreign currency transaction (TG/L), beta risk (β RISK), voluntary disclosure (VDisc), CSR disclosure (CSRDisc), and audit committee (AudCom) toward the ERC.

II. THEORITICAL REVIEW, CONCEPTUAL FRAMEWORK AND HYPOTHESIS

DEVELOPMENT

According to Scott (2012:163), Earnings Response Coefficient (ERC) measures the extent of a security's abnormal market return in response to the unexpected component of reported earnings of the firm issuing that security. ERC has potential use in valuation and fundamental analysis (Kothari 2001). It is used as the indicator of investor responsiveness to the released earnings. The unexpected increases of earnings represent new information in the market. Thus, it led to the assumption that the earnings information is useful. The usefulness of earning information reflected its quality. More reactive the investors to the earnings information, more increase the earning quality.

Many researchers have been conducted the studies about ERC. This research has been expanding from the first conducted study until now. Ball and Brown (1968) began an empirical capital market research in accounting that continues until nowadays. They brought an idea that the share prices would adjust to reflect the information of unexpected earnings released by the companies. They used US firms for the period 1946-1966 to examine the price impact from unexpected profit announcements. Ball and Brown (1968) finally found that the average abnormal security market return for those firms with good news earning

announcements (unexpected increase in earnings) is strongly positive, while those with bad news (unexpected decrease in earnings) have strongly negative abnormal return.

According to the inconsistencies problem in the previous researches, this research will analyze 14 variables from 20 articles, which examine the relation between some factors to the ERC, in order to determine the robustest factors that can influence the ERC. These factors used as the independent variables are earnings growth (EGrw), earnings predictability (EPrdc), earnings persistence (EPrst), dummy industry (INDUSTRY), capital structure (CS), auditor quality (RepAud), income smoothing (IS), timeliness (TIME), firm size (SIZE), gain/loss of foreign currency transaction (TG/L), beta risk (β RISK), voluntary disclosure (VDisc), CSR disclosure (CSRDisc), and audit committee (AudCom). And absolutely, the dependent variable is the earnings response coefficients (ERC). The model of this research variables is depicted in Figure 1.

2.1. The effect of Earnings Persistence to ERC

Bonny et al. (2004), Chandrarin (2003), Jang et al. (2006), Jaswadi (2004), Mulyani et.al (2007), Mayangsari (2004), Naimah and Utama (2007), Riduwan (2004), and Setiati and Kusuma (2004) found that earnings persistence has positive association with the ERC. It is in line with the study held by Kormendi and Lipe (1987) and Easton and Zmijweski (1989). Surprisingly, Rahayu (2011) resulted negative influence of earning persistence to the ERC. Harahap (2004) and Murwaningsari (2011) found that this association is rather insignificant.

The ability of company to persist the earnings in each year will bring GN for investors when this company announced their earnings to the market. Investors will more responsive, by buying the company's stocks, the companies which have the steady earnings. Thus, the market price and stock return in response to the GN will be higher, if otherwise. So, this research suggests that earnings persistence has positive association with to the ERC.

H1: *Earnings persistence has positive association with the ERC.*

2.2. The effect of Earnings Growth to ERC

Some of studies held in Indonesia include earning growth as one of the factors that can influence the ERC, except Chandrarin (2003) who found that the result is not significant. Jaswadi (2004), Mayangsari (2004), Mulyani et al. (2007), Murwaningsari (2011), Midiastuty and Machfoedz (2003), Rahayu (2011), Sayekti and Wondabio (2007), Setiati and Kusuma (2004), and Syafudin (2004) found that earnings growth had positive influence to the ERC. Contrary, Jang et al. (2006) and Harahap (2004) demonstrated that earnings growth was negatively affect the ERC.

High earnings growth can reflect the increasing value of the company. Thus the stock demand of GN company stock will be higher for growth company. Higher demand implies the increase of market price and stock return in response to the GN, hence higher ERC.

H2: *Earnings growth has positive association with the ERC.*

2.3. The effect of Earnings Predictability to ERC

Bonny et al. (2004), Jaswadi (2004), Setiati and Kusuma (2004) demonstrated no significant association between earnings predictability and ERC. However, Chandrarin (2003) and Harahap (2004) found positive association between earnings predictability and ERC. As earnings predictability increases, the current earnings information becomes more useful in predicting future earnings. Investors will response it more when companies that have higher earnings predictability announce GN in the market, thus a higher ERC.

H3: *Earnings predictability has positive association with the ERC*

2.4. The effect of Beta Risk to ERC

Research by Chandrarin (2003), Harahap (2004), Mayangsari (2004), Mulyani et al. (2007), Sayekti and Wondabio (2007), Setiati and Kusuma (2004), and Syafrudin (2004) also shown the negative association between beta risk and ERC. Meanwhile, Bonny et al. (2004) and Rahayu (2011) demonstrated positive association between beta risk and the ERC. Another research by Jaswadi (2004) showed no significant association between beta risk and ERC, the judgement for this result came from the possibility of bias from the beta used before the correction.

According to the theory and previous researches, this research hypothesized that beta risk has influence to ERC. Suppose that investors are typically risk-averse, they want to maximize their expected return and minimize the risk of return of the portfolio. Higher beta of the company will increase the portfolio risk, thus the investors will consider this as one of the factors for decreasing the decision of buying the security in the market. GN from the companies that have higher beta will cause less ERC, other things equal.

H4: *Beta risk has negative association with the ERC.*

2.5. The effect of Capital Structure to ERC

Chandrarin (2003) and Jaswadi (2004) showed insignificant association between leverage and ERC. However, other researches such as Mulyani et al. (2007), Midiastuty and Machfoedz (2003), Murwaningsari (2011), Setiati and Kusuma (2004) found that capital structure has negative association with the ERC. Contrary, Dewi (2010), Jang et al. (2006), Harahap (2004), Mayangsari (2004), Pradipta and Purwaningsih (2012), Rahayu (2011), Riduwan (2004) proved a positive association with the the ERC.

This research hypothesizes that capital structure has association with the the ERC. The capital structure, proxied by leverage, can derive a higher or a lower ERC. Highly leverage firms will have lower ERC. The GN of highly leverage firms will improve the

strength and safety of bonds and other outstanding debts, this information will go to the debtholders instead of shareholders. For highly leverage firms, the demand of the GN firm's stock will be lower, so the increase of market price and stock return in response to GN will be lower too. Hence, it implies the lower ERC, if otherwise. Then, it is expected that leverage will reduce the magnitude of ERC as shown as the negative association with the the ERC.

H5: *Capital structure, proxied by leverage, has negative association with the ERC.*

2.6. The effect of Industry Type to ERC

Chandrarin (2003) and Jaswadi (2004) showed significantly positive association between industry types with the ERC. Chandrarin (2003) and Jaswadi (2004) use the dummy variable to separate between manufacture and non-manufacture industry. This research hypothesize that industry type has an association with the ERC. Since, the investors usually more responsive in certain industry compared with another industry.

H6 : *Industry type has positive association with the ERC.*

2.7. The effect of Firm Size to ERC

Firm size is the proxy for stock's price informativeness. Big firms are considered as more informative than small firms. Big firm has more business activities, business resources, business units, employees, capitals, and higher revenues than small firm. Thus, big firm has to disclose more information rather than the small ones.

Earlier study held by Easton and Zmijweski (1989) showed that firm size is insignificant explanatory variables for ERC, this result same with what found by Bonny et al. (2004), Chandrarin (2003), Jaswadi (2004), and Murwaningsari (2011). Yet, some researchers found a different result about the association between firm size and ERC. Dewi (2010), Midiastuty and Machfoedz (2003), Rahayu (2011) found that there are a negative

association between firm size and the ERC Harahap (2004), Jang et al. (2006), Mayangsari (2004), Mulyani et al. (2007), Pradipta and Purwaningsih (2012), Riduwan (2004), Setiati and Kusuma (2004), and Syafrudin (2004) elaborated that firm size positively influence the ERC.

H7:*Firm size has positive association with the ERC.*

2.8.The effect of Income Smoothing to ERC

Income smoothing is defined as the management effort in reducing the variability of earnings for certain periods in order to decrease the earnings fluctuation. The income smoothing will increase the investor's ability in predicting the future earnings. Thus, the earnings become more informative and relevant to the investors.

Bonny et al. (2004) found a positive association between income smoothing and the ERC. However, Harahap (2004) found negative association. When the company did an income smoothing, the earnings will comply with the investor's expectation. Thus, the good news come from the earnings will be response by the market as the increasing of market price and stock returns. Hence, a higher ERC will be reached.

H8:*Income smoothing has a positive association with the ERC.*

2.9.The effect of Audit Quality to ERC

Teoh and Wong (1993) examined the association between audit quality and ERC. They grouped the sample into two, Big 8 clients and Non-big 8 clients, and they found that the Big 8 clients have statistically significantly larger ERCs than Nonbig 8 clients. It reflects the conclusion that larger auditor will affect the greater ERCs than smaller auditors. However, the research conducted by Mulyaniet al.(2007) to 51 companies in Indonesia result insignificant association between auditor quality and ERC. In measuring the audit quality,

Mulyaniet al.(2007) used market share of the audit firm as a proxy. Contrary, Setiawati (2006) examined 64 Indonesian companies and found that audit quality, proxied by audit firm size, does influence the firm's ERC. It significantly has positive association with the ERC. Audit firm size is measured by the Big 5 and Nonbig 5 categories. Interestingly, she also found that there is no significant difference of ERC between firms audited by big audit firms and small audit firms. Setiawati (2006) assumed that it happened since the investors did not looking at the audit firm who conduct the audit for the financial statement, because of many other factors, such as political events, social events, etc that can influence the investor's decisions. Same as Setiawati (2006), Mayangsari (2004) found that audit quality, proxied with auditor specialist, positively influence the ERC. The specialization of auditors is measured with the criteria of minimum audit 15% of the total companies. Both of Setiawati (2006) and Mayangsari (2004) use the association between audit quality and UE regressed with the CAR to test the association between independent variable and dependent variable. Differently, Mulyaniet al.(2007) use the direct association between audit quality variable and the ERC. They found that the association is not significant.

According to the theory and research results above, this research hypothesizes that auditor quality has association to the ERC. High quality of auditor will give the best effort in auditing the company's financial statement in order to defense their reputation. Thus, the good news come from the companies that have high audit quality will be responded by high buying level of company stock. This condition will increase the market price and stock return response to GN, so a higher ERC will be reached.

H9: *Auditor quality has positive association with the ERC.*

2.10. The effect of Voluntary Disclosure to ERC

Dewi (2010), Murwaningsari (2011), and Widiastuti (2002) found a positive association between voluntary disclosure and the ERC. Contrary, Kartadjumena et al. (2011) and Rahayu (2011) found that voluntary disclosure has negatively association with the ERC. This research hypothesize that voluntary disclosure has positive association with the ERC. Because the high discloser firms usually have agood news, thus investors will be more responsive to this kind of firms.

H10: *Voluntary disclosure has positive association with the ERC.*

2.11.The effect of CSR Disclosure to ERC

Sayekti and Wondabio (2007) found that there were a negative association between CSR disclosure and ERC. Yet, Kartadjumena et al. (2010) found insignificant association between this variables. This result indicate that investors appreciate CSR information disclosed in the company's financial report. CSR disclosure has an impact toward the company, because this information can increase company's reputation. This research hypothesized that the CSR disclosure has negative association with the ERC. As the increase of company's informative, the earnings announcement becomes irrelevant to the investors. Thus, the ERC will be lower.

H11: *CSR disclosure has negative association with the ERC.*

2.12.The effect of Timeliness to ERC

Timeliness means having information available to the decision-makers before it loses its capacity to influence decisions. (Kieso et al., 2011:47) Having relevant information sooner can enhance its capacity to influence decisions. Timeliness become one of the enhancing qualities of fundamental characteristics for financial reporting.

In another research, the term “timeliness” also called as “reporting lags”. It is the gap between the announcement date and the publication date of financial statement. The publication date in Indonesia can be varies, such as the BAPEPAM delivering date, newspaper advertisement date, and PRPM registration date. Jaswadi (2004) examined the reporting lag of financial statement in Indonesia. He divided his research became two, semi-annual data and annual-data. Finally, he found that the relationship between timeliness and ERC is negative.

Syafrudin (2004) examined the influence of un-timeliness to the ERC. He found that un-timeliness had negative association with the credibility and earnings quality (measured by ERC). Un-timeliness is perceived as the information comes from the financial statement containing noise. Another research by Murwaningsari (2011), used timeliness as the intervening variable between independent (firm size) and control variables (audit opinion) to the ERC. She found that timeliness has significant positive association with the ERC.

Based on the theory and previous research, this research hypothesize that timeliness has an association with the ERC. The earlier submissions are considered as the good news and the delay of submissions are the bad news. When company delayed to announce the earnings information, investors will not respond to this information by buying this company's shares, thus the market response for the bad news will be lower, hence lower ERC.

H12: *Timeliness has positive association with the ERC.*

2.13. The effect of Audit Committee to ERC

The role of audit committee is really important in a company. Investors, as the outsider party, need to get credible information in assessing the investment decisions. Audit committee performance will influence the investor valuation for assessing company's earnings quality. (Dewi, 2010)

Anderson et al. (2003) found that audit committee characteristics, such as: independencies, activities, and size of the audit committee, have association with the ERC. The audit committee's role is controlling the company to do an effective and efficient performance and make sure that the company reports their financial condition in compliance with the financial accounting standard. In line with this findings, Suaryana (2005) also found positive association between audit committee and ERC. The good news from the firms that have audit committee in their organizational structure will be more responded by the investors, thus, higher ERC. Surprisingly, Dewi (2010) found that audit committee has insignificant effect to the ERC. It happened because in her sampling period (2005-2006) all of the company is already have the audit committee.

H13: *The audit committee has positive association with the ERC.*

2.14. The effect of Transaction Gain/Losses to ERC

The two accounting methods of transaction gain (losses) issued by Indonesian Capital Market Supervisory Agency and Indonesian Institute of Accountant provide an interesting and important glimpse of economic consequences in action (Chandrarin, 2003). This two different treatment of accounting methods will lead to the difference response in the market. The proposed new accounting standard usually will impact to the ERC (Suwardjono, 1997).

Further, Chandrarin (2003) did panel regression analysis to test whether treatment of transaction gain (losses) under three standards did influence the ERC or not. Her research showed that in Panel A, transaction gain (losses) has significantly negative effect to the ERC. However, Panel B and C showed that the effect of transaction gain (losses) on ERC is not statistically significant.

According to the theory and research results above, this research hypothesizes that transaction gain (losses) has association to the ERC.

H14: *Transaction gain (losses) has negative association with the ERC.*

III. RESEARCH METHODOLOGY

In testing the hypotheses and explaining the result, the approach used in this research is meta-analysis method. Meta-analysis is a quantitative review method for standardizing and aggregating findings across empirical studies (Greenberg, 1992).

The population included in this research is all of the articles published in five accredited journals and *Simposium Nasional Akuntansi* (SNA) that used earnings response coefficient as the dependent variable. This research use published and unpublished ERC articles in Indonesia for 10 years since 2002 until 2011. It is assumed that 10 years observations will be able to arrest the development process of ERC researches along the period.

Sampling technique used is purposive sampling technique. It draws the sample according to certain criteria. In controlling the quality of the journals being researched, the criteria is set first. The criteria of these journals are:

- a) The journal should have B grade minimum for 2 years until 2011, based on the SK Dirjen Dikti. This criterion is used to control the quality of the ERC articles.
- b) The journal should only publish accounting research articles. As it only focused on serving the result of accounting and finance researches.

The appropriate journals for the criteria above are:

1. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI) has been issued by Ikatan Akuntansi Kompartemen Akuntan Pendidik, Universitas Gajah Mada. This journal has been issued since 1998 and has been accredited B until 2012 based on Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) No. 83/Dikti/Kep./2009.
2. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI) has been issued by Accounting Department Universitas Indonesia since 2004. This journal has been accredited B until 2012 based on Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) No. 110/Dikti/Kep./2009.
3. Jurnal Akuntansi (JAK) has been issued by Economic Faculty, Universitas Tarumanegara Jakarta since 1997. This journal has been accredited B until 2012 based on Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) No. 83/Dikti/Kep./2009.
4. Akuntabilitas issued by Accounting Department of Universitas Pancasila Jakarta. This journal has been issued since 2001 and has been accredited B until 2012 based on Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) No. 110/Dikti/Kep./2009.
5. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) has been issued by Economic Faculty of Universitas Islam Indonesia since 2007. This journal has been accredited B until 2011 based on Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) No. 65a/Dikti/Kep./2008.

The only one accredited accounting national conference in Indonesia is Simposium Nasional Akuntansi (SNA) that held annually by the Ikatan Akuntansi Indonesia – Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) since 1997 until now. The papers produced there are considered as the representative for the unpublished journals. According to the

Anwar (2005), the unpublished journals should be included in order to avoid the publication bias.

This research uses the meta-analysis method in Soussii and Khlif (2010) and Ahmed et al. (2012). Both of them use the method conducted by Hunter et al. (1982).

The first step according to Hunter et al. (1982) is to determine the mean correlation (\bar{r}) and the estimate of the population variance as follows.

The mean correlation is computed as:

$$\bar{r} = \frac{\sum(N_i r_i)}{\sum N_i} \dots\dots\dots (18)$$

where N_i is the sample size for study i and r_i the Pearson correlation coefficient for study i .

The unbiased estimate of the population variance S_p^2 is represented by:

$$S_p^2 = S_r^2 - S_e^2 \dots\dots\dots (19)$$

where:

S_r^2 = the observed variance and equals to $(\sum[N_i(r_i - \bar{r})^2]) / \sum N_i$.

S_e^2 = the estimate of sampling error variance and equals to $((1 - \bar{r}^2)^2 K) \sum N_i$ where K is the number of individual studies included in the analysis.

Ahmed and Courtis (1999) in Soussii and Khlif (2011) assume that the observed variance S_r^2 is totally explained by the variance estimate of sampling errors S_e^2 , which implies that S_p^2 is reduced to zero.

Effect size (r) is used to denote the magnitude of relationship between the dependent variable (for example ERC) and a specific independent variable (for example earnings persistence) (Ahmed and Courtis, 1999). Every single study contributes varied effect sizes in the relationship between each independent variable and dependent variable (ERC).



In the implementation step of the meta analysis, sometimes the empirical studies do not report Pearson’s coefficient (r) but include other statistics such as t-statistics. The following expression allows for the conversion into r statistics:

$$r_{y,x} = \sqrt{\frac{t^2}{(t^2+df)}} \dots\dots\dots (20)$$

After being converted, the original sign (+/ -) of t-statistics should be put on the $r_{y,x}$. So, the direction of relationship among variables can be determined (Table 2).

The second step is to determine the 95 percent confidence interval. As the sample sizes are larger than 30, the z -statistic are determined as follows:

$$[\bar{r} - S_p Z 0.975, \bar{r} + S_p Z 0.975] \approx [\bar{r} - S_p (1.96), \bar{r} + S_p (1.96)] \dots\dots\dots (21)$$

The confidence interval is used to test whether the relationship is significant or not. When the mean correlation is between the minimum and maximum area of confidence interval, and the values are all positive or all negative, then the relationship is significant. If one value is negative and other is positive then we can say the mean correlation is not significant. For example, if the mean r is 0.20 and then 95% confidence level varies between -0.10 and +0.30 we cannot say mean r is significant even if 0.20 is significant. In order to confirm the hyptheses, both values should be positive (+).

Hunter et al. (1982) have proposed the following statistic of χ^2 to test for the statistical validity of the model:

$$\chi^2_{k-1} = \frac{N s_{\bar{r}}^2}{(1-\bar{r}^2)^2} = K \frac{S_{\bar{r}}^2}{S_e^2} \dots\dots\dots (22)$$

The association investigated is unmoderated when this statistic is found to be trivial, but a high value, generally superior to $\chi^2_{(k-1,0.05)}$, indicates the need to perform tests using subgroups meta-analysis, which represents the third and ultimate step of this approach.

The subgroup meta-analysis is also used in order to reduce heterogeneity. Related studies are classified according to proxies used to measure the dependent and explanatory



(independent) variables. These sub-groups depend on the method use to compute Earning Response Coefficient (ERC), including direct computation for ERC (ERC Direct) and use the relationship between CAR and UE (CAR & UE Relationship). Furthermore, the capital structure or leverage is divided into total debt to total equity (D/E) and total debt to total assets (D/A). Firm size includes the market value of equity (MVE), firm total assets (TA), and log of market capitalization (MC). And the last, timeliness is divided into time lag (TIME) and dummy variable for un-timeliness (DM).

IV. RESULT AND DISCUSSION

4.1. Earnings Persistence

The result of total sample meta analysis indicates that earnings persistence is significantly associated with the ERC ($\bar{r} = 0.2946$), with 95% confidence interval between 0.1717 and 0.4175 (Table 3). This result reflects a positive effect between earnings persistence and ERC. The computed chi-square statistic confirms the strong empirical validity of this finding by shown the number of 121.935. It is higher than the value of chi-square table that showed 32.000 for 0.01 significant levels. Then, subgroup meta-analysis is undertaken to reduce heterogeneity. The relationship is found to be statistically significant when the ERC is computed by CAR&UE Interaction ($\bar{r} = 0.2741$, with 95% confidence interval of [0.2320; 0.3162]). Additionally, the computation using ERC Direct also supports the significant association between earnings persistence and ERC. From all of the meta analysis's result, it can be concluded that H1 is accepted.

4.2. Earnings Growth

The total sample meta-analysis based on 18 articles indicates the existence of significant association between earnings growth and ERC (Table 3). This variable is

positively associated with a mean association of $\bar{r} = 0.1208$ and 95% confidence interval of [0.1006; 0.1410].

To test the heterogeneity, the chi-square statistic amounts to 38.527, higher than chi-square table ($\chi^2_{0,01} = 33.409$) indicating that sub-group meta analysis is needed in testing the moderator variables that may influence the association between earnings growth and ERC. When ERC is measured using direct computation, it shows significant association with a confidence interval between 0.1006 and 0.1410. The same result is also shown when ERC computed using CAR and UE Interaction with sample from five studies, the mean association is 0.1719. At all, the hypothesis (H2) is accepted.

4.3. Earnings Predictability

The evidence from the meta-analysis testing the linkage between ERC and earnings predictability is significant. In fact, the total sample meta-analysis provides support for the significant association between ERC and earnings predictability (Table 3). The mean association for this variable is 0.1438 with 95% confidence interval of [0.0524; 0.2353]. Furthermore, the computed chi-square statistic confirms the strong empirical validity of this finding ($54.250 > \chi^2_{0,01} 23.209$). Since, all of the studies that include this variable have the same measurement for both the dependent variable and explanatory variable, so no sub group test be undertaken. H3 is accepted because the result shows positive association between earnings predictability and ERC.

4.4. Beta Risk

The beta risk variable is associated with a mean association of $\bar{r} = -0.0988$ and a confidence interval of [-0.1295; -0.0681] (Table 3). This evidence suggests that beta risk is significantly associate with the ERC. If further test generated to compute the value of r statistic using the original sign of each article's results, beta risk's mean association is negative. So, the association between beta risk and ERC is negative and H4 is accepted.

The chi-square statistic amounts to 39.717, higher than chi-square table $X_{0.01}^2 = 30.578$. Similar results are obtained from the subgroup meta-analysis, all of the group show strong association and negative confidence interval (-0.0940; -0.349) ,(-0.1774; -0.1774), respectively.

4.5. Capital Structure

The total sample meta-analysis based on 17 studies indicates insignificant association between ERC and capital structure proxied by leverage. The capital structure variable has very low mean association of $\bar{r} = -0.0417$ with a 95% confidence interval between -0.0841 and 0.006 (Table 3). Since the meta analytic result include the positive area of confidence interval, the association became insignificant.

The computed chi-square statistic equals to 59.885(chi square table is 32.000) and the error variance only 28.39% of the total observed variance, so subgroup meta-analysis is conducted. The association is found to be statistically not significant when ERC is measured by ERC Direct or TD/TE, resulting the mean association of -0.0452 and -0.0531, respectively. However, when the capital structure is measured by CAR&UE Interaction or TD/TE, the result is significant with $\bar{r} = 0.1240$ and $\bar{r} = -0.0288$, respectively. The different sign of mean association in CAR&UE Interaction measurement is caused by limited number of empirical study used this measurement. Two studies from Mayangsari (2004) and Rahayu (2011) have a contradictive result of r statistic. In which Mayangsari (2004) have r statistic as 0.15 and Rahayu (2011) -0.0698, this condition cause \bar{r} become positive (following the significant value from Mayangsari (2004)). Hence, to generalize this result, researcher needs more empirical studies to be tested.

Finally, the meta analysis did not accept the hypothesis of H5.

4.6. Industry Type

The total sample meta-analysis based on six articles indicates the existence of a significant association between ERC and industry type (Table 3). This variable is associated with a mean association of $\bar{r}= 0.1493$ and 95% confidence interval of [0.0699; 0.2287]. The positive sign of \bar{r} indicate that earnings growth has positive association with the ERC. The chi-square statistic amounts to 29.051, higher than chi-square table ($X^2_{0,01}=15.086$). Even though chi-square statistic indicates the moderator variable may exist, no different measurement in six studies, so subgroup cannot be conducted. Finally, the H6 is accepted.

4.7. Firm Size

The evidence from all sample in the meta-analysis do not show significant linkage between ERC and firm size by computed nearly zero mean association of 0.0114 and include negative value in the confidence interval [-0.0424; 0.0653] (Table 3).

Given the significant X^2_{k-1} value of 80.567 (above the chi square table ($X^2_{0,01}$) of 36.191), the subgroup meta-analysis is undertaken to reduce heterogeneity. The association is found to be statistically significant when the ERC is measured by CAR & UE Interaction or TA, resulting in the mean values of 0.2416 and 0.0358, respectively. However different results are obtained when firm size is measured by ERC Direct and MVE, the association are not significant with mean values of -0.0288 and -0.0039. This different result provides evidence that different measurement of firm size can influence the association between firm size and ERC. Then, general meta analysis supports that H7 is not accepted.

4.8. Income Smoothing

The total sample meta analysis indicates that there is no significant relation between ERC and income smoothing. Since, a mean association shows number of -0.0104 and confidence interval of [-0.0732; 0.0523] (Table 3). The chi square for this variable only significant at 0.05 by showing the amount of 6.5463 (the chi square table ($X^2_{0,05}= 3.841$)).

This insignificant result is because only two studies testing the association between income smoothing and ERC. So, general meta analysis concludes H8 is not accepted .

4.9. Audit Quality

Total three studies using audit quality variable indicate a mean association of 0.1889 and 95% confidence interval between 0.1389 and 0.2389. This result represents the significant and positive association between audit quality and ERC. In deepen our analysis, and because the total sample from 467 companies result chi square value of 15.8120, higher than chi square table ($X^2_{0.01} = 9.210$), heterogeneity test is conducted by sub-grouping the data. The subgroup analysis for ERC Direct results significant association between audit quality and ERC by 0.0956 mean association and confidence interval between 0.0712 and 0.1200 (Table 3).

Finally, general and subgroup meta-analysis support the acceptance of positive association between audit quality and ERC. Hence, H9 is accepted.

4.10. Voluntary Disclosure

The voluntary disclosure variable has low mean association of $\bar{r} = 0.0385$ and a confidence interval of [-0.0370; 0.1140] (Table 3). This evidence suggests that voluntary disclosure is not necessarily conducive to increase ERC. Furthermore, chi square amounts to 25.0910 ($X^2_{k-1} > X^2_{0.1} = 13.277$), indicating that the sub-group analysis is needed to test more specific consideration.

The sub-group analysis supports this finding by showing insignificant association for ERC Direct and CAR&UE Interaction measurements shows insignificant association, judging from the confidence interval of [-0.0066; 0.1044] and [-0.1630; 0.1507], respectively. It probably because of nearly zero mean association resulted in the meta analysis, thus the maximum area of confidence interval become positive.

At the end, this research cannot prove the association between voluntary disclosure and ERC, hence H10 is not accepted.

4.11.CSR Disclosure

Based on two articles as the sample of meta analysis, the association between CSR Disclosure and ERC is negative and significant with mean association of -0.0701 and 95% confidence interval between -0.0701 and -0.0701. Given the chi square statistic X^2_{k-1} of 0.0542 (Table 3), the sub group is not needed. Then H11 is accepted.

4.12.Timeliness

The evidence from the meta-analysis testing the linkage between ERC and timeliness is significant. In fact, the total sample meta-analysis provides support for the significant association between ERC and timeliness by showing mean association of -0.1586 and confidence interval of [-0.2316; -0.0855] (Table3).

From total sample 318 companies the chi square value is 17.4668, higher than chi square table ($X^2_{0,01} = 13.277$). Furthermore, the subgroup analysis support the significant association between timeliness and ERC for CAR&UE Interaction and DM. This result supports the fact that H12 is accepted.

4.13.Audit Committee

Total sample of meta analysis indicates a significant association between audit committee and ERC. The mean association for this variable is positive with value of 0.0386 and confidence interval of [0.0227; 0.0545]. Computed chi square is 5.3349 (Table 3), higher than chi square table at 0.1 significance level ($X^2_{0,1} = 4.609$). So, this meta analysis accept H13.

4.14.Transaction Gains (Losses)

The evidence from the total sample of meta analysis suggest that there is a negative and significant association between transaction gains (losses) and ERC. It shows a mean association (\bar{r}) of -0.1262 with 95% confidence interval between -0.1685 and -0.0840 (Table 3). The error variance accounts for less than 75% of the observed variance, then a moderator variable may exist due to the different sample size. This result indicates that H14 is accepted.

4.15.Sensitivity Analysis

Avoiding the publication bias, this research includes both published (i.e. appearing in five accredited journal) and unpublished studies (i.e. available on SNA) in conducting the meta analysis. Actually, Hunter et al. (1982:30) suggest that most of the difference between the average effect size of the published and unpublished studies is due to differences in the methodological quality. In order to know whether published and unpublished studies have association with the relationship between variables, this research sub-divide the overall sample into published versus unpublished studies to assess if publication status is a moderating factor.

When focused only for the SNA (unpublished studies), earning persistence variable results a mean association of 0.1103 representing significantly positive association between earnings persistence and ERC. Thansub group meta analysis results 0.3153 mean associations refer to the relationship between variables for accredited journals (published studies) category. This suggests that publication status has not moderated the earnings persistence effect on ERC, since both of the results showed the same finding with general meta-analysis.

The results for sub grouping the earnings growth, coincidentally be spread evenly. Nine studies represent the SNA category and the same amount of studies for accredited journals. Both of their mean associations show positive and significant relationship between earnings

growth and ERC, 0.1049 and 0.1342, for SNA and accredited journals respectively. This finding became an evidence that publication status has not moderated the variables.

For the earnings predictability, \bar{r} are computed for 0.1298 (SNA) and 0.1504 (accredited journals) respectively. This amount shows the same result with general meta analysis, that is significantly positive relationship between earnings predictability and ERC. Generally, beta risk also result indifferently after being sub grouped for SNA and accredited journals, the mean association generated the value of -0.1075 and -0.0676 stand for significantly negative association. Thus, the moderator variable is not exist for both variables.

Furthermore, the voluntary disclosure also result the same with general meta analysis that shows insignificant association for both SNA and accredited journals category. The means association are 0.0116 (-0.0176; 0.2500) and 0.0047 (-0.0384; 0.0477) for SNA and accredited journals, respectively. Thus, the publication status is not moderated variables.

Differently, the variable of capital structure show significantly negative result when sub-grouped only for SNA studies ($\bar{r} = -0.0741$). It contradicts the result from general meta-analysis that suggests no significant association between capital structure and ERC. However, the sub group of accredited journals shows insignificant association among variables ($\bar{r} = -0.0249$ and confidence interval of -0.0622; 0.0124). It is probably caused by the variation on the effect size (r_i) of the studies. SNA group has less variety if it is compared to accredited journals group (see Appendix 6) This variation is due to the different amount of sample, period used, or probably the industry type. Other variables that not mentioned in this section do not have different publication status or the source of publication is homogeneous (whether all come from accredited journals or all from SNA).

V.CONCLUSION AND SUGGESTIONS

5.1. Conclusion

Using meta-analysis to test the association among variables, this research found that there are ten variables that can be considered as the determinant variables of ERC. Earning persistence, earnings growth, earnings predictability, beta risk, industry type, audit quality, CSR disclosure, timeliness, audit committee, and transaction gains (losses) are the factors which significantly associate with the earnings response coefficient (ERC). Meanwhile, capital structure, firm size, income smoothing, and voluntary disclosure are found to be not significantly associate with the ERC.

The magnitude of relationship between independent variables and ERC, called as effect size, differ across studies. The factors that associate with this heterogeneous result is moderating variable. Moderating variable can be the measurement of ERC, measurement of independent variables, or publication status.

5.2. Suggestions

Answering the research limitation, researcher suggests some actions should be undertaken for the next meta analysis research about ERC. It can be explained as follows. 1) In order to expand the meta analysis result on determinants of ERC, the next researcher should use not only studies from Indonesia but also from all over the world, such as *Journals of Accounting and Economics*, *Journal of Accounting Research*, *the International Journal of Accounting*, *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, etc. However, specific criteria should be built to keep the quality of studies used as the sample. The expansion of period taken as the sample criteria also can be the alternative to be done in order to get more studies. If many studies used as the sample of the meta analysis, the next researcher will get more variables to be tested in investigating the determinants of investor's response to the earnings information. 2) Since no previous research using meta analysis in

determining the factors that associate with ERC, the next researcher can use this research as the basis to conduct the meta analysis and determine the sub group category. The next researcher also can use the meta analysis studies conducted by Ahmed et al. (1999,2012) and Klif and Soussii (2011) as they have the similar model of meta analysis with this research.

REFERENCES

*studies used in meta-analysis

- Afego, P. 2011. Stock Price Response to Earnings Announcements: Evidence from the Nigerian Stock Market. *MPRA Paper*.
- Ahmed, K. and J. K. Courtis. 1999. Associations between Corporate Characteristics and Disclosure Levels in Annual Reports: A Meta-Analysis. *British Accounting Review* 31: 35-61.
- Ahmed, K., K. Chalmers, and H. Kliff. 2012. A Meta-analysis of IFRS Adoption and Financial Reporting Quality. *Paper presented in American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting*.
- Atiase, R. 1985. Predisclosure Information, Firm Capitalization, and Security Price Behavior Around Earnings Announcements. *Journal of Accounting Research*: 21-36.
- Ambarwati, S. 2008. Earnings Response Coefficient. *Akuntabilitas* 7 (2): 128-134.
- Anwar, R. 2005. Meta Analisis. *Paper presented in Fertilitas Endokrinologi Reproduksi bagian Obstetridan Ginekologi RSHS Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung meeting*.
- Ariff, M. and C.F. Fah. 2011. Accounting Earnings Response Coefficient: An Extension to Banking Shares in Asia Pacific Countries. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 27 (2011) 346-354.
- Ball, R. and P. Brown. 1968. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. *Journal of Accounting Research (Autumn)*: 159-178.
- Barth, M.E. W.H. Beaver, and W.R. Landsman. 2000. The Relevance of Value Relevance Research. *Working Paper*. <http://cs.trinity.edu/~rjensen/readings/barth.pdf>
- Beaver, W. H. 1969. The Information Content of Annual Earnings Announcements. *Journal of Accounting Research* 6 (Supplement): 67-92.
- Beaver, W. H. 1982. Discussion of Market-Based Empirical Research in Accounting: A Review, Interpretation, and Extension. *Journal of Accounting Research* 20 (Supplement): 23-331.
- Beaver, W. H. 2002. Perspectives on Recent Capital Market Research. *The Accounting Review* 77 (2): 453-474.
- Beaver, W., R. Lambert and D. Morse. 1980. The Information Content of Security Prices. *Journal of Accounting and Economics* 2 (March): 3-28.
- Billings, B. K. 1999. Revisiting the Relation between The Default Risk of Debt and The Earnings Response Coefficient. *The Accounting Review*, 74(4), 509-522.
- Bonny, M. 2004*. Pengaruh Perataan Laba terhadap Earnings Response Coefficient pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ Periode 1999-2004. *Akuntabilitas* 4(1): 19-27.
- Brown, P. 1994. *Capital Market Research-Based in Accounting: An Introduction*. Coopers and Lybrand: Australia.
- Chandrarini, G. 2003*. The Impact of Accounting Methods for Transaction Gains (losses) on Earnings Response Coefficients: The Indonesian Case. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 6(3): 217-231.
- Cheng, F.F and M. Ariff. 2007. Abnormal Returns of Bank Stocks and Their Factor-Analyzed Determinants. *Journal of Accounting, Business & Management*, Vol. 14, September 2007.
- Cho, J.Y. and K. Jung. 1991. Earnings Response Coefficients: A Synthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature* 10: 83-116
- Collins, D.W. and S.P. Kothari. 1989. An Analysis of Intertemporal and Cross-sectional Determinants of Earnings Response Coefficient. *Journal of Accounting and Economics* 11: 143-182.
- Collins, D. and W. Salatka. 1993. Noisy accounting earnings signals and earnings response coefficients: the case of foreign currency accounting. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 10: 119-159.

- Dewi, S. 2010*. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage, Komite Audit, dan Disclosure terhadap Earnings Response Coefficient pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*(14): 75-87.
- Dhaliwal, D.S., and S.S. Reynolds. 1994. The Effect of The Default Risk of Debt on The Earnings Response Coefficient. *Accounting Review*: 412-419.
- Donnelly, R. 2002. Earning Persistence, Losses and the Estimation of Earning Response Coefficients. *ABACUS*, Vol. 38, No.1, 2001.
- Dumontier, P., and B. Raffournier. 2002. Accounting and Capital Markets: A Survey of the European Evidence, *The European Accounting Review* 11 (1): 119-151.
- Easton, P.D. and M. Zmijewski. 1989a. Cross-sectional Variation in The Stock Market Response to Accounting Earnings Announcements. *Journal of Accounting and Economics* 11: 117-141.
- Cheng, F.F. and M. Ariff. 2007. Abnormal Returns of Bank Stocks and Their Factor-Analyzed Determinants. *Journal of Accounting, Business & Management*, Vol. 14, September 2007.
- Financial Accounting Standard Board. 1978. Statement of Financial Accounting Concept No. 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises.
- Glass, G.V. 1976. Primary, Secondary, and Meta-Analysis of research. *Educ Researcher* 10: 3-8.
- Glautier, M.W.E and B. Underdown. 2001. *Accounting Theory and Practice*. Canada: Pearson Education Ltd.
- Godfrey, J.M., A. Hodgson, S. Holmes. 2010. *Accounting Theory 7th Edition*. Australia: John Wiley & Sons.
- Greenberg, P. 1992. The Use of Meta-Analysis Techniques in Developing Dissertation Proposals: Guidelines to Aid Supervising Faculty. *Accounting Education* 7(2): 145-163.
- Harahap, K. 2004*. Asosiasi Antara Praktik Perataan Laba dengan Koefisien Respon Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Holthausen, R. W., and R. L. Watts. 2001. The Relevance of the Value-Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting. *Journal of Accounting and Economics* 31: 3-75.
- Hunter, J.E. 1982. *Meta-Analysis: Cumulating Research Findings Across Studies*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Hunter, J. E., and F. L. Schmidt. 1990. *Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings* (Beverly Hills, CA: Sage).
- Hunter, J. E., and F. L. Schmidt. 2004. *Method of Meta-Analysis Correcting Error and Bias in Research Finding*. California: Sage Publications
- Jang, L., B. Sugiharto, D. Siagian. 2006*. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. *Akuntabilitas* 6 (2): 142-149.
- Jaswadi. 2004*. Dampak Earnings Reporting Lags terhadap Koefisien Respon Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 7 (3): 295-315.
- Jones, C. 2002. *Investments: Analysis and Management*. Massachusetts: John Wiley & Sons.
- Kallapur, S. 1994. Dividend payout ratios as determinants of earnings response coefficients: A test of the free cash flow theory. *Journal of Accounting and Economics*, 17(3): 359-375.
- Kartadjuma, E., S. Anindita, A. Sobana. 2011*. Pengaruh Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Koefisien Respon Laba dan Implikasinya terhadap Harga Saham. *Jurnal Akuntansi*(15): 262-275.
- Khlif, H. and M. Souissi. 2010. The Determinants of Corporate Disclosure: A Meta-Analysis. *International Journal of Accounting and Information Management* Vol. 18 No. 3: 198-219.
- Kothari, S. P. 2001. Capital Markets Research in Accounting. *Journal of Accounting and Economics* 31: 105-231.
- Kormendi, R. and R. Lipe. 1987. Earning Innovations, Earning Persistence, and Stock Return. *Journal of Business* 60: 323-345.

- Lev, B., and J. A. Ohlson. 1982. Market-Based Empirical Research in Accounting: A Review, Interpretation, and Extension. *Journal of Accounting Research* 20 (Supplement): 249-322.
- Lev, B. and R. Thiagarajan. 1993. Fundamental Information Analysis. *Journal of Accounting Research*, Vol. 31, No. 2, Autumn: 190-215.
- Lipe, R.C. 1986. The Information Contained in the Components of Earnings. *Journal of Accounting Research*. Supplement 24: 37-64.
- Lipe, R.C. 1990. The Relation Between Stock Returns and Accounting Earnings Given Alternative Information. *The Accounting Review* Vol. 65 No. 1: 49-71.
- Mayangsari, S. 2004*. Bukti Empiris Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Earnings Response Coefficient. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 7 (2): 154-178.
- Midiastuty, P.P. and M. Machfoedz. 2003*. Analisis Hubungan Mekanisme dalam Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Mulyani, S., N.F. Asyik, and Andayani. 2007*. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficients pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 11 (1): 35-45.
- Murwaningsari, E. 2011*. Pengujian Simultan: Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient (ERC). *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.
- Naimah, Z. and S. Utama. 2007*. Pengaruh Persistensi Laba dan Laba Negatif terhadap Koefisien Respon Laba dan Koefisien Respon Nilai Buku Ekuitas pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 10 (3): 287-302
- Pimentel, R. C. 2009. Accounting Earnings Properties and Determinants of Earnings Response Coefficient in Brazil. *Dissertation on University of Sao Paulo*.
- Pomeroy, B., and Thornton, D.B. 2008. Meta-Analysis and The Accounting Literature: The Case of Audit Committee Independence and Financial Reporting Quality. *European Accounting Review*, 17(2), 305-30.
- Rahayu, S.I. 2011*. Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib dan Luas Pengungkapan Sukarela terhadap Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur). *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.
- Rosenthal, R. 1991. *Meta-Analytic Procedures for Social Research*. Applied Social Research Methods Series, 6. Newbury Park: Sage.
- Ross, S.A., R.W. Westerfield, and B.D Jordan. 2005. *Corporate Finance*. Seventh Edition. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Riduwan, A. 2004*. Pengaruh Alokasi Pajak Antarperiode Berdasarkan PSAK No. 46 terhadap Koefisien Respon Laba Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Saputra, I. 2010. Risiko Keuangan sebagai Determinant Hubungan antara Earnings dan Return pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Tesis, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Sayekti, Y. and L.S. Wondabio. 2007*. Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earnings Response Coefficient (Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ). *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Scott, W. R. 2012. *Financial Accounting Theory Sixth Edition*. USA: Pearson Prentice Hall.
- Sekaran, U. 2003. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. Fourth edition. John Wiley & Sons.
- Setiati, F. and I. W. Kusuma. 2004*. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koefisien Respon Laba pada Perusahaan Bertumbuh dan Tidak Bertumbuh. *Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Setiawati, L.W. 2006*. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Earnings Response Coefficients (ERC) pada Perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). *Jurnal Akuntansi* 10 (3): 224-243.
- Suaryana, A. 2005*. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Suhardianto, N. 2011. Satu Dekade Penelitian Akuntansi Berbasis Pasar Modal di Indonesia: Suatu Permodelan Deskriptif. *Tesis, Universitas Brawijaya*.

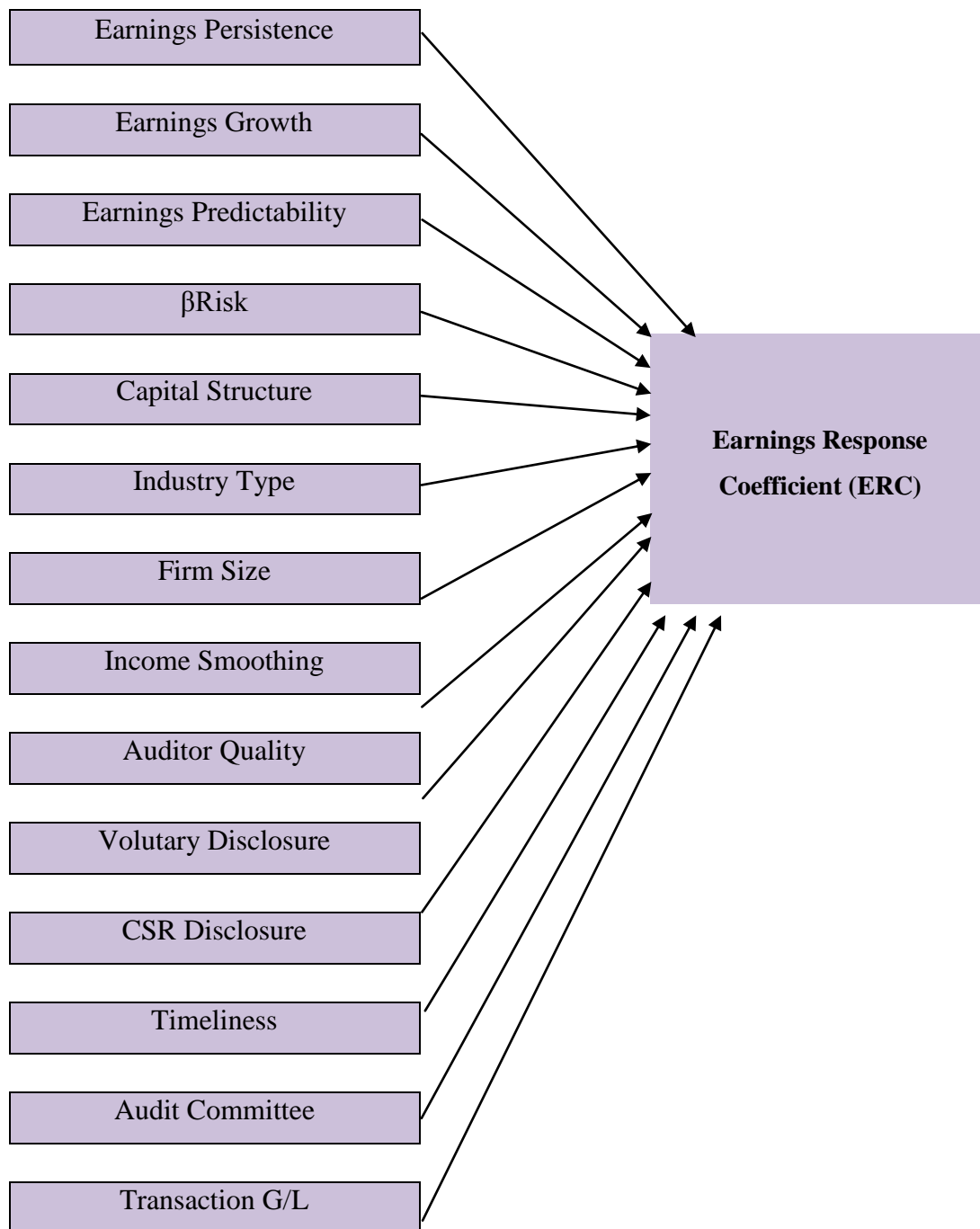
Syafrudin, M. 2004*. PengaruhKetidaktepatwaktuanPenyampaianLaporanKeuanganpada Earnings Response Coefficient: Studi di Bursa Efek Jakarta. *SimposiumNasionalAkuntansi VII*.

Widiastuti, H. 2002*. PengaruhLuasUngkapanSukareladalamLaporanTahunanterhadap ERC. *SimposiumNasionalAkuntansi V*.

Wolk, H.I. and M.G. Tearney. 1997. *Accounting Theory*. Ohio: International Thompson Publishing.

Attachment

Figure1. Conceptual Framework



Meta Analysis

Table 1. Sample Selection Procedure

Sample Criteria		Amount
1.	Total ERC articles published in five accredited journals in year 2002-2011	16
2.	Total ERC articles in SNA V – SNA XIV	<u>13</u>
TOTAL		29
3.	The journals used data from the countries outside Indonesia	(3)
4.	Journals eliminated due to only one data found for each variable	<u>(6)</u>
TOTAL SAMPLE		20

Source: Processed data.

Table 2. Effect Size (*r*)

No.	Authors	Publisher	Dependent Variables	Sample	Effect Size (<i>r</i>)				
					TG/L	EPrst	EGrw	Eprdc	βRisk
1	Bonny et.al. (2004)	Akuntabilitas (1): 19-27	<i>ERC Direct</i>	60		0,1309		0,4284	0,2783
2	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	225	-0,1895	0,1496	0,0309	0,2253	0,0444
3	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	134	-0,1826	0,2065	-0,0057	-0,2600	-0,3419
4	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	60	-0,1764	-0,0004	0,0185	0,1300	-0,0832
5	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	31	0,2143	-0,2362	0,0439	0,9668	-0,0196
6	Dewi (2010)	JAK (14): 75-87	<i>ERC Direct</i>	312					
7	Harahap (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	82		-0,0666	-0,1572	0,2610	-0,0466
8	Jang et.al. (2006)	Akuntabilitas 6 (2): 142-149	<i>ERC Direct</i>	44		0,3487	0,4734		
9	Jaswadi (2004)	JRAI 7 (3): 295-315	<i>ERC Direct</i>	47		0,1101	0,3203	0,2006	0,1459
10	Jaswadi (2004)	JRAI 7 (3): 295-315	<i>ERC Direct</i>	47		0,7599	0,1676	0,0451	0,0743
11	Kartadjuma et al. (2011)	JAK (15):262-275	<i>ERC Direct</i>	50					
12	Mayangsari (2004)	JRAI 7 (2): 154-178	<i>CAR & UE Interaction</i>	148		0,1800	0,2100		-0,1340
13	Midiastuty and Machfoedz (2003)	SNA VI	<i>ERC Direct</i>	300			0,0739		
14	Mulyani et.al. (2007)	JAAI 11 (1): 35-45	<i>ERC Direct</i>	255		0,6585	0,1939		-0,1327
15	Murwaningsari (2011)	SNA XIV	<i>ERC Direct</i>	60		-0,1593	0,5578		
16	Naimah and Utama (2007)	JRAI 10 (3): 287-302	<i>CAR & UE Interaction</i>	122		0,4686			
17	Rahayu (2011)	SNA XIV	<i>CAR & UE Interaction</i>	31		-0,0422	0,0052		0,2580
18	Riduwan (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	111		0,1925		0,0563	
19	Sayekti and Wondabio (2007)	SNA X	<i>CAR & UE Interaction</i>	108			0,2120		-0,2010
20	Setiati and Kusuma (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	46		0,4600	-0,1213	0,0743	-0,0358
21	Setiati and Kusuma (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	46		0,3315	0,0906	0,1288	-0,2804
22	Setiawati (2006)	JAK 10 (3): 224-243	<i>ERC Direct</i>	64					
23	Suaryana (2005)	SNA VIII	<i>CAR & UE Interaction</i>	97					
24	Syafudin (2004)	SNA VII	<i>CAR & UE Interaction</i>	82			0,1637		-0,3325
25	Syafudin (2004)	SNA VII	<i>CAR & UE Interaction</i>	82			0,1217		-0,2341
26	Widiastuti (2002)	SNA V	<i>CAR & UE Interaction</i>	67					

Table 2. Effect Size (*r*)(cont.)

No.	Authors	Publisher	Dependent Variables	Sample	Effect Size (<i>r</i>)				
					CS	INDUSTRY	SIZE	RL	IS
1	Bonny et.al. (2004)	Akuntabilitas (1): 19-27	<i>ERC Direct</i>	60			0,0222		0,2405
2	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	225	0,0216	0,0715	-0,0736		
3	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	134	-0,0204	0,3451	-0,1410		
4	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	60	-0,1844	-0,1901	-0,1926		
5	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	31	-0,0083	-0,3099	-0,1803		
6	Dewi (2010)	JAK (14): 75-87	<i>ERC Direct</i>	312	-0,0360		-0,0290		
7	Harahap (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	82	-0,2265		0,2889		-0,1941
8	Jang et.al. (2006)	Akuntabilitas 6 (2): 142-149	<i>ERC Direct</i>	44	0,6458		-0,6387		
9	Jaswadi (2004)	JRAI 7 (3): 295-315	<i>ERC Direct</i>	47	-0,1783	0,3384	-0,2118	-0,1771	
10	Jaswadi (2004)	JRAI 7 (3): 295-315	<i>ERC Direct</i>	47	-0,2159	0,5107	-0,1806	-0,2036	
11	Kartadjumena et al. (2011)	JAK (15):262-275	<i>ERC Direct</i>	50					
12	Mayangsari (2004)	JRAI 7 (2): 154-178	<i>CAR & UE Interaction</i>	148	0,1500		0,3350		
13	Midiastuty and Machfoedz (2003)	SNA VI	<i>ERC Direct</i>	300	0,1286		0,0267		
14	Mulyani et.al. (2007)	JAAI 11 (1): 35-45	<i>ERC Direct</i>	255	-0,1730		0,1407		
15	Murwaningsari (2011)	SNA XIV	<i>ERC Direct</i>	60	-0,2788		-0,3336		
16	Naimah and Utama (2007)	JRAI 10 (3): 287-302	<i>CAR & UE Interaction</i>	122					
17	Rahayu (2011)	SNA XIV	<i>CAR & UE Interaction</i>	31	-0,0698		0,2692		
18	Riduwan (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	111	-0,2035		-0,1420		
19	Sayekti and Wondabio (2007)	SNA X	<i>CAR & UE Interaction</i>	108					
20	Setiati and Kusuma (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	46	-0,3277		-0,0376		
21	Setiati and Kusuma (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	46	-0,2947		0,4160		
22	Setiawati (2006)	JAK 10 (3): 224-243	<i>ERC Direct</i>	64					
23	Suaryana (2005)	SNA VIII	<i>CAR & UE Interaction</i>	97					
24	Syafrudin (2004)	SNA VII	<i>CAR & UE Interaction</i>	82			0,1815		
25	Syafrudin (2004)	SNA VII	<i>CAR & UE Interaction</i>	82			0,1226		
26	Widiastuti (2002)	SNA V	<i>CAR & UE Interaction</i>	67					

Table 2. Effect Size (r)(cont.)

No.	Authors	Publisher	Dependent Variables	Sample	Effect Size (r)				
					Rep.Aud	VDisclosure	CSRIndx	TIME	AudCom
1	Bonny et.al. (2004)	Akuntabilitas (1): 19-27	<i>ERC Direct</i>	60					
2	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	225					
3	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	134					
4	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	60					
5	Chandradarin (2003)	JRAI 6 (3):217-231	<i>ERC Direct</i>	31					
6	Dewi (2010)	JAK (14): 75-87	<i>ERC Direct</i>	312		0,0710			-0,0250
7	Harahap (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	82					
8	Jang et.al. (2006)	Akuntabilitas 6 (2): 142-149	<i>ERC Direct</i>	44					
9	Jaswadi (2004)	JRAI 7 (3): 295-315	<i>ERC Direct</i>	47					
10	Jaswadi (2004)	JRAI 7 (3): 295-315	<i>ERC Direct</i>	47					
11	Kartadjumena et al. (2011)	JAK (15):262-275	<i>ERC Direct</i>	50		-0,4094	-0,0443		
12	Mayangsari (2004)	JRAI 7 (2): 154-178	<i>CAR & UE Interaction</i>	148	0,3900				
13	Midiastuty and Machfoedz (2003)	SNA VI	<i>ERC Direct</i>	300					
14	Mulyani et.al. (2007)	JAAI 11 (1): 35-45	<i>ERC Direct</i>	255	0,0272				
15	Murwaningsari (2011)	SNA XIV	<i>ERC Direct</i>	60		0,3160		0,2543	
16	Naimah and Utama (2007)	JRAI 10 (3): 287-302	<i>CAR & UE Interaction</i>	122					
17	Rahayu (2011)	SNA XIV	<i>CAR & UE Interaction</i>	31		-0,4721			
18	Riduwan (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	111					
19	Sayekti and Wondabio (2007)	SNA X	<i>CAR & UE Interaction</i>	108			-0,0820		
20	Setiati and Kusuma (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	46					
21	Setiati and Kusuma (2004)	SNA VII	<i>ERC Direct</i>	46					
22	Setiawati (2006)	JAK 10 (3): 224-243	<i>ERC Direct</i>	64	0,3680				
23	Suaryana (2005)	SNA VIII	<i>CAR & UE Interaction</i>	97					0,2431
24	Syafrudin (2004)	SNA VII	<i>CAR & UE Interaction</i>	82				-0,3105	
25	Syafrudin (2004)	SNA VII	<i>CAR & UE Interaction</i>	82				-0,2722	
26	Widiastuti (2002)	SNA V	<i>CAR & UE Interaction</i>	67		0,2094			

Table 3.Result of Meta Analysis

Independent Variable	∑ Ni	K studies	\bar{r}	S_e^2	S_r^2	S_p^2	% S_e^2/S_r^2	Confidence Interval	X_{k-1}^2
General E.Persistence	1467	17	0.2946	0.0728	0.0102	0.0627	13.942	0.1717 ; 0.4175	121.935 *
ERC Direct	1166	14	0.2634	0.0732	0.0097	0.0635	13.277	0.1390 ; 0.3878	105.448 *
CAR&UE Interaction	301	3	0.2741	0.0300	0.0085	0.0215	28.424	0.2320; 0.3162	10.554 *
General E.Growth	1828	18	0.1208	0.0205	0.0102	0.0103	49.624	0.1006; 0.1410	38.527 *
ERC Direct	1377	13	0.1040	0.0250	0.0092	0.0157	36.997	0.0732; 0.1348	35.138 *
CAR&UE Interaction	451	5	0.1719	0.0032	0.0104	-0.0072	100.00	0.1719; 0.1719#	15.526
General E.Predictability	889	11	0.1438	0.0585	0.119	0.0467	202.767	0.0524 ; 0.2353	54.250 *
General Beta Risk	1484	16	-0.0988	0.0262	0.0106	0.0157	402.852	-0.1295;- 0.0681	39.717 *
ERC Direct	1033	11	-0.0645	0.0256	0.0106	0.0151	411.772	-0.0940; -0.349	26.714 *
CAR&UE Interaction	451	5	-0.1774	0.0187	0.0104	0.0083	100.00	-0.1774;-0.1774#	90.078
General Cap.Structure	1979	17	-0.0417	0.0302	0.0086	0.0216	28.388	-0,0841; 0.006	59.885 *
ERC Direct	1800	15	-0.0452	0.0300	0.0083	0.0217	27.643	-0.0878; -0.0026	54.264 *
CAR&UE Interaction	179	2	0.1240	0.0006	0.0108	-0.0103	100.00	0,1240; 0.1240#	0.1030
TD/TA	927	6	-0.0288	0.0260	0.0065	0.0195	24.842	-0,0671; 0.0095	24.153 *
TD/TE	1052	11	-0.0531	0.0335	0.0104	0.0231	31.011	-0,0985; -0.0078	35.471 *
General Industry Type	544	6	0.1493	0.0510	0.0105	0.0405	20.653	0.0699; 0.2287	29.051 *
General Firm Size	2203	20	0.0114	0,0366	0,0091	0,0275	24,824	-0.0424; 0.0653	80,567 *
ERC Direct	1860	16	-0.0288	0,0302	0,0086	0,0217	28,386	-0.0712; 0.0137	56,366 *
CAR&UE Interaction	343	4	0.2416	0,0081	0,0103	-0,0023	100	0.2416; 0.2416	3,1263
MVE	1352	13	-0.0039	0,0432	0,0096	0,0336	22,274	-0.0696; 0.0619	58,363 *
TA	851	7	0.0358	0,0251	0,0082	0,0169	32,684	0.0027; 0.0689	21,417 *
General I.Smoothing	142	2	-0.0104	0.0461	0.0141	0.0320	30,552	-0.0732; 0.0523	6.546 *
General Audit Quality	467	3	0.1889	0.0315	0.0060	0.0255	18.97	0.1389; 0.2389	15.812 *
ERC Direct	319	2	0.0956	0.0186	0.0062	0.0125	33.05	0.0712; 0.1200	6.051 **
CAR&UE Interaction	148	1	0.3900	0.0000	0.0049	-0.0049	~	~	0.0000
General V.Disclosure	520	5	0.0385	0.0481	0.0096	0.0385	19.928	-0.0370; 0.1140	25.091 *
ERC Direct	422	3	0.0489	0.0354	0.0071	0.0283	19.994	-0.0066; 0.1044	15.004 *
CAR&UE Interaction	98	2	-0.0062	0.1004	0.0204	0.0800	20.318	-0.1630; 0.1507	9.843 *
General CSR Disclosure	158	2	-0.0701	0.0003	0.0125	-0.0122	100.000	-0.0701; 0.0701#	0.5471
General Timeliness	318	5	-0,1586	0,0522	0,0149	0,0373	28,6258	-0.2316; -0.0855	17,467 *
ERC Direct	154	3	-0,0171	0,0471	0,0195	0,0276	41,3219	-0.0713; 0.0371	7,2601
CAR&UE Interaction	164	2	-0,2914	0,0004	0,0102	-0,0098	100	-0.2914; -0.2914	0,0718
TL	154	3	-0,0171	0,0471	0,0195	0,0276	41,3219	-0.0713; 0.0371	7,2601
DM	164	2	-0,2914	0,0004	0,0102	-0,0098	100	-0.2914; -0.2914	0,0718
General Aud.Committe	409	2	0.0386	0.0130	0.0049	0.0081	0.3749	0.0227; 0.0545	5.3349 *
General TG/L	450	4	-0.1262	0.03448	0.0129	0.0216	37.4511	-0.1685; -0.0840	8.0104

*significant at 0.01

#since error variance (S_e^2) is higher than observed variance (S_r^2), a zero residual variance (S_p^2) is used to determine the confidence interval

Source: Processed secondary data

Penolakan Pengguna (*User Resistance*) terhadap Perilaku Berbagi Pengetahuan melalui Pemanfaatan Situs Jejaring Sosial

ALBERTUS FANI PRASETYAWAN*
Universitas Multimedia Nusantara

Abstract: *This research/study basically assesses/measures the factors which affect the user's resistance behavior for knowledge sharing through the use of Youtube social networking. The literature of Technology Acceptance Model (TAM) and Theory of Planned Behavior (TPB) is employed in this research in order to assess/measure the user's resistance behavior. This model is designed to keep three dominant beliefs of TPB which are behavior belief, normative belief, and control belief. Empirical data of this research are collected from 54 participants/respondents which are then assessed by using partial least square with the help of SmartPLS version 2.0. application.*

The result of this empirical study shows that the perceived ease of use, self efficacy, perceived value, and switching cost are the factors which affect the user's resistance behavior for knowledge sharing through the use of Youtube social networking. On the other hand, subjective norm does not have any influence to the user's resistance behavior. This condition appears because the interpersonal motivation has more informational characteristics rather than the normative ones.

Keywords : *Knowledge sharing, user resistance, perceived ease of use, self efficacy, subjective norm, perceived value, switching cost, Youtube.*

* Author can be contacted at: albertusfani@gmail.com

1. Pendahuluan

Berbagi pengetahuan berbasis internet merupakan sebuah proses yang menarik karena tidak hanya melibatkan beberapa pengguna saja, akan tetapi jutaan pengguna baik itu yang memanfaatkan media tersebut untuk berbagi atau memperoleh pengetahuan. Duffy (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa teknologi Web 2.0 baru dan website termasuk blog, wiki atau Youtube memberikan tuntutan baru pada pembelajaran, dan menyediakan dukungan untuk belajar, bahkan media tersebut telah terlepas dari proses pembelajaran yang bergantung pada proses masa lalu. Fakta tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa media berbasis internet dapat digunakan sebagai alat untuk berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan merupakan suatu aktivitas peningkatan ide, pengalaman dengan penuh pertimbangan untuk membuat pengetahuan baru (Bartol dan Srivastava, 2002). Kwakye dan Nor (2011) menyatakan bahwa dalam proses berbagi pengetahuan, individu dapat berperan sebagai penghasil pengetahuan dan *receptor* pengetahuan. Individu dapat menghasilkan pengetahuan dengan meningkatkan pengalaman dan ide mereka melalui sosialisasi. Sebagai *receptor* pengetahuan mereka harus mencari dan menginterpretasikan pengetahuan tersebut sebelum ditransfer (Nonaka dan Takeuchi, 1995).

Kwakye dan Nor (2011) menunjukkan bahwa berbagi pengetahuan merupakan salah satu bagian utama proses membuat pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi pada setiap individu. Peningkatan pengetahuan individu saat ini merupakan keharusan dalam rangka menghadapi perkembangan jaman di era globalisasi yang semakin maju. Untuk mendukung pemenuhan pengetahuan yang memadai individu diharapkan bisa memanfaatkan media berbasis internet. Youtube merupakan media komunikasi berbasis internet yang dapat diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap pengguna baik itu *uploader* maupun *downloader*. Experian Hitwise (14 April 2012) sebuah perusahaan periset dibidang internet

menyatakan bahwa Youtube merupakan website sosial yang mempunyai peringkat kedua setelah Facebook dalam hal “*visits share*” (kunjungan dan berbagi). Data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa banyak pengguna memanfaatkan Youtube sebagai media yang dapat memfasilitasi kebutuhan mereka. Breen (2007) menyatakan bahwa salah satu penyebab pertumbuhan Youtube menjadi semakin pesat adalah kemudahan dalam menggunakan website tersebut.

Kemudahan dalam menggunakan Youtube sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai media berbagi pengetahuan. Breen (2007) dalam risetnya menunjukkan bahwa Youtube pada awalnya dibuat sebagai jasa berbagi video bagi personal, namun saat ini media tersebut digunakan untuk tujuan periklanan secara global. Perusahaan yang menggunakan Youtube sebagai media periklanan akan memperoleh banyak manfaat meskipun mereka mengeluarkan biaya. Hal tersebut terbukti karena sampai saat ini Youtube telah menjadi media yang populer untuk diakses individu maupun organisasi di seluruh dunia.

Pemanfaatan Youtube sebagai media berbagi pengetahuan merupakan suatu hal yang penting dan perlu dipertimbangkan. Konsep berbagi pengetahuan merupakan sebuah gagasan yang bisa diakui sebagai transmisi pemikiran secara bersama-sama. Proses transmisi pemikiran tersebut menggunakan media dimana ide dan pengalaman ditransmisikan dari satu ujung spektrum ke ujung yang lain, yang kemudian pemikiran dan ide tersebut diterjemahkan untuk memahami makna dan pembelajaran yang berdasarkan pengalaman (Davenport dan Prusak, 1998). Dalam dunia pembelajaran saat ini, individu diharapkan semakin kreatif supaya gagasan (dalam hal ini pengetahuan) dapat tersampaikan dengan baik. Media Youtube merupakan inovasi baru Web 2.0 yang merujuk pada generasi komunitas online dan layanan web, dengan penekanan pada partisipasi individual, kolaborasi, inovasi dan berbagi (O’Reilly dalam Yang dan Lai, 2009).

Munculnya inovasi baru Web 2.0 diharapkan bisa diterima sebagai media berbagi pengetahuan, akan tetapi sampai saat ini masih terdapat banyak individu yang enggan untuk menggunakan Youtube. Penolakan pengguna (*user resistance*) pada media ini dapat dilihat dari rendahnya motivasi individu untuk berbagi. Yu *et al.* (2009) menyatakan individu yang memiliki pengetahuan tidak dapat dipaksakan untuk berbagi pengetahuan, tetapi dimotivasi untuk berbagi. Motivasi untuk berbagi baik praktisi ataupun akademisi akuntansi masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari observasi yang dilakukan dengan menyetik akun akuntansi dan manajemen sebagai pembandingan pada media Youtube. Hasil penelusuran yang muncul untuk akuntansi adalah sekitar 1420 dan untuk manajemen sekitar 3080. Data tersebut menunjukkan bahwa motivasi berbagi pengetahuan individu di bidang akuntansi lebih rendah dibandingkan dengan individu di bidang manajemen.

Szulanski (1995) menyatakan terdapat hambatan dalam mewujudkan perilaku berbagi pengetahuan secara efektif antara lain keandalan sumber pengetahuan, motivasi untuk berbagi, kemampuan belajar, dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan baru. Hambatan-hambatan dalam diri individu memang dapat menyebabkan perilaku untuk cenderung melakukan penolakan berbagi pengetahuan. Fokus dalam penelitian ini terkait dengan penolakan pengguna terhadap media Youtube yang merupakan media komunikasi untuk berbagi pengetahuan. Sanford dan Oh (2010) dalam penelitiannya, mereka lebih memberikan perhatian pada pengujian peranan penolakan pengguna secara khusus atau secara umum terhadap faktor-faktor yang menghambat penggunaan teknologi informasi. Dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa selama ini penggunaan dan adopsi teknologi informasi telah lama dilakukan dan sudah merupakan tradisi penelitian dengan mengecualikan beberapa bidang penelitian yang terisolasi. Penggunaan teknologi informasi baru merupakan kombinasi dari lepasnya cara kerja yang lama dan penerimaan teknologi informasi baru yang telah diaktifkan, akan tetapi dalam dunia penelitian peranan penolakan

pengguna jarang digunakan dibandingkan dengan model adopsi dan penggunaan teknologi informasi yang kontemporer seperti model penerimaan teknologi (TAM).

1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perilaku penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media situs jejaring sosial Youtube. Dua teori dasar penerimaan teknologi (TAM dan TPB) digunakan dalam model penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena penolakan pengguna tersebut.

1.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial. Pengujian terhadap model penelitian ini, dapat memberikan tilikan (*insight*) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penolakan pengguna. Tilikan tersebut bermanfaat bagi pelaku intelektual dan praktisi terutama di bidang akuntansi.

1.3 Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut. Bab pertama membahas pendahuluan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab kedua membahas landasan teoritis model penelitian beserta pengkonstruksian hipotesisnya. Bagian ketiga membahas metoda penelitian yang meliputi metoda pengumpulan dan sampel data, skala pengukuran, dan pengukuran. Bagian keempat membahas hasil analisis dari model penelitian yang dibangun untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui situs jejaring social Youtube. Bab kelima yang

merupakan bab terakhir membahas tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

2. Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Konstruk yang diajukan dalam penelitian ini berfokus pada penolakan pengguna (*user resistance*) terhadap perilaku berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube. Literatur tentang penerimaan teknologi digunakan dalam penelitian ini untuk menguji penolakan pengguna (Kim dan Kankanhalli, 2007). Penelitian tentang penerimaan teknologi dipertimbangkan dalam penelitian ini karena mempunyai beberapa perspektif teoritis termasuk model penerimaan teknologi (TAM) dan teori perilaku rencana (TPB).

TAM (Davis, 1989) menyatakan bahwa dua kepercayaan (*beliefs*) yaitu kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian memprediksi niat penggunaan teknologi oleh individu. Sedangkan TPB (Ajzen, 1991) dipertimbangkan sebagai dasar yang komprehensif untuk menjelaskan pengaruh utama pada perilaku penerimaan. Terdapat tiga kepercayaan TPB yang perlu dipertimbangkan terkait dengan perilaku manusia (seperti penerimaan sebuah sistem informasi) yaitu: kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*); kepercayaan-kepercayaan normatif (*normatif beliefs*); dan kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*). Kepercayaan-kepercayaan perilaku yaitu tentang *outcomes* perilaku dan evaluasi *outcomes* tersebut. Kepercayaan-kepercayaan normatif yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang-orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi-ekspektasi tersebut. Kepercayaan-kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor yang akan memfasilitasi atau merintangai kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut.

Penelitian ini pada dasarnya menjaga tiga kepercayaan dominan TPB yang juga dilakukan oleh Brown dan Venkatesh (2005). Dalam membangun sebuah model adopsi teknologi dalam rumah tangga (*Model of Adption of technology in Household*) mereka memasukan ketiga kelompok konstruk utama yaitu kepercayaan perilaku, kepercayaan normatif, dan kepercayaan kontrol. Kepercayaan perilaku dalam penelitian ini diwakili oleh nilai persepsian (*perceived value*). Kepercayaan normatif penelitian ini merujuk pada norma subyektif (*subjective norm*) dengan menggunakan *referents* yang relevan terkait fenomena yang akan diteliti. Sedangkan kepercayaan kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*), keyakinan sendiri (*self efficacy*) dan kos peralihan (*switching cost*).

2.1 Kemudahan Penggunaan Persepsian

Model penerimaan teknologi (TAM) telah menjadi model yang kuat saat ini untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi (Hwang dan Yi, 2002). Davis (1989) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian merupakan dua elemen penting dalam model penerimaan teknologi (TAM) yang mempengaruhi perilaku menggunakan teknologi (*behavior*). Pemakai teknologi akan mempunyai niat menggunakan teknologi apabila merasa bahwa sistem teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk kemudahan penggunaan persepsian mempengaruhi penggunaan sesungguhnya (*behavior*) (Hartono, 2007). Pengguna akan menggunakan sistem informasi (dalam hal ini Youtube) sebagai media yang dapat memfasilitasi proses berbagi pengetahuan apabila mereka merasa bahwa sistem informasi mudah digunakan untuk berbagi pengetahuan. Sebaliknya, pengguna akan menolak (*resist*)

untuk menggunakan sistem informasi sebagai media yang dapat memfasilitasi proses berbagi pengetahuan apabila mereka merasa bahwa sistem informasi tersebut sulit digunakan untuk berbagi pengetahuan.

Berdasarkan dari penalaran di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H1 :*Kemudahan penggunaan persepsian mempunyai pengaruh negatif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.*

2.2 Keyakinan Sendiri

Azjen (2002) mendefinisikan keyakinan sendiri sebagai persepsi individual terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku atau keyakinan terhadap kemampuan sendiri untuk melakukannya. Bandura dalam Hartono (2007) mendefinisikan keyakinan sendiri sebagai pertimbangan-pertimbangan manusia tentang kemampuan-kemampuannya untuk mengorganisasikan dan melakukan sekumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kinerja-kinerja yang direncanakan.

Pengguna yang merasa yakin mampu menggunakan sistem informasi (dalam hal ini Youtube) sebagai media yang dapat memfasilitasi proses berbagi pengetahuan akan cenderung untuk menggunakannya. Sebaliknya, pengguna yang merasa yakin kurang mampu berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi akan cenderung untuk menolak (*resist*) menggunakan sistem informasi. Kim dan Kankanhalli (2009) menyatakan bahwa keyakinan sendiri yang rendah akan meningkatkan tingkat penolakan pengguna sistem informasi. Oleh karena itu penelitian ini berhipotesis sebagai berikut.

H2 :*Keyakinan sendiri mempunyai pengaruh negatif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.*

2.3 Norma Subyektif

Norma subyektif (*subjective norm*) dalam teori perilaku rencana (*theory of planned behavior*) merupakan suatu perilaku yang digambarkan sebagai suatu penilaian untuk melakukan atau tidak melakukan bagi orang yang merasakan perilaku harus dilakukan (Ajzen, 1991). Norma subyektif pada dasarnya dibedakan menjadi pengaruh interpersonal dan pengaruh eksternal (Bhattacharjee, 2000). Pengaruh interpersonal merupakan pengaruh dari teman-teman, anggota-anggota keluarga, teman-teman kerja, atasan-atasan dan individual-individual berpengalaman yang dikenal sebagai pengadopsi potensial. Sedangkan pengaruh eksternal merupakan pengaruh dari pihak luar organisasi seperti laporan-laporan eksternal di media masa, laporan-laporan dan opini-opini pakar, dan informasi nonpersonal lainnya yang dipertimbangkan oleh individual-individual dalam melakukan perilakunya (Hartono, 2007).

Dalam penelitian ini, norma subjektif dinilai dengan menggunakan *referents* yang relevan seperti keluarga, teman-teman dekat, dan teman-teman kerja. Motivasi individu untuk berperilaku mengacu pada seberapa besar *referent* mendukung untuk berperilaku. Individu akan termotivasi untuk berperilaku berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi (dalam hal ini Youtube) apabila mereka merasa bahwa orang-orang yang ada disekitar mereka mendukung dan memberikan dorongan. Sebaliknya, individu akan cenderung menolak untuk berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi apabila mereka merasa bahwa orang-orang disekitar mereka tidak mendukung atau mendorong untuk berbagi pengetahuan. Dari penalaran tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H3 :*Norma subyektif mempunyai pengaruh negatif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.*

2.4 Nilai persepsian

Individu dalam menggunakan sistem informasi terutama jaringan berbasis online dimotivasi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memotivasi individu dalam menggunakan sistem informasi adalah keharusan untuk mendapatkan nilai persepsian termasuk nilai hiburan dan manfaat. Kim dan Kankanhalli (2009) mengkonseptualisasikan nilai persepsian sebagai manfaat bersih persepsian (manfaat persepsian relatif terhadap kos) dari perubahan sistem informasi baru. Samuelson dan Zeckhauser (1988) menunjukkan bahwa menurut teori *status quo bias*, nilai persepsian mengevaluasi apakah manfaat berasal dari kos yang digunakan untuk melakukan perubahan dari *status quo* ke situasi yang baru.

Kaplan dan Haenlein (2010) menyatakan bahwa tujuan utama komunitas konten dalam sistem informasi jejaring sosial adalah berbagi konten media antar pengguna. Individu akan menggunakan jejaring sosial dan bergabung dalam komunitas konten apabila mereka memperoleh nilai persepsian. Samuelson dan Zeckhauser (1998) berdasarkan teori *status quo bias* menyatakan bahwa pengguna akan menolak untuk berubah apabila nilai yang diperoleh dari perubahan adalah rendah. Dengan kata lain, apabila tingkat nilai persepsian yang diperoleh rendah maka pengguna akan cenderung untuk menolak menggunakan sistem informasi (dalam hal ini Youtube) sebagai media untuk berbagi informasi. Sebaliknya, apabila tingkat nilai persepsian yang diperoleh pengguna tinggi maka ia akan cenderung untuk menggunakan sistem informasi sebagai media untuk berbagi pengetahuan. berdasarkan penalaran tersebut hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H4 : *Nilai persepsian mempunyai pengaruh negatif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.*

2.5 Kos peralihan

Kos peralihan (*switching cost*) pada dasarnya merujuk pada ketidakbermanfaatan persepsian pengguna yang akan dirasakan pada saat beralih dari *status quo* ke sistem informasi yang baru dan terdiri dari tiga komponen *transition costs*, *uncertainty cost*, dan *sunk costs* (Samuelson dan Zeckhauser, 1988). *Transition costs* termasuk beban sementara dan kerugian permanen yang berhubungan dengan perubahan, individu akan cenderung menolak berubah karena dimotivasi untuk mengurangi kerugian. Brown dan Venkatesh (2005) menyatakan bahwa orang cenderung menolak ketidakpastian dalam perilaku dan pengambilan keputusan mereka karena perasaan tidak kompeten dalam situasi yang tidak jelas. *Sunk cost* juga merupakan salah satu penyebab penolakan pengguna karena orang tidak ingin meninggalkan investasi masa lalu yang telah dibuat dalam *status quo* (Samuelson dan Zeckhauser, 1988). Yang dan Peterson (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kos peralihan tidak hanya bersifat ekonomis akan tetapi bersifat psikologi dan emosional.

Kos peralihan dalam penelitian ini merupakan salah satu variabel penting yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penolakan pengguna pada sistem informasi (Kim dan Kankanhalli, 2009). Tingkat kos peralihan yang tinggi pada proses perubahan, akan cenderung mempengaruhi individu untuk menolak menggunakan sistem informasi (dalam hal ini Youtube) sebagai media untuk berbagi pengetahuan. Sebaliknya, tingkat kos peralihan yang rendah akan cenderung mempengaruhi individu untuk menerima menggunakan sistem informasi sebagai media untuk berbagi pengetahuan.

Kim dan Kankanhalli (2009) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kos peralihan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi penolakan pengguna terhadap sistem informasi baru. Pengaruh yang muncul dalam penelitian tersebut adalah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh nilai persepsian. Sesuai dengan prinsip-

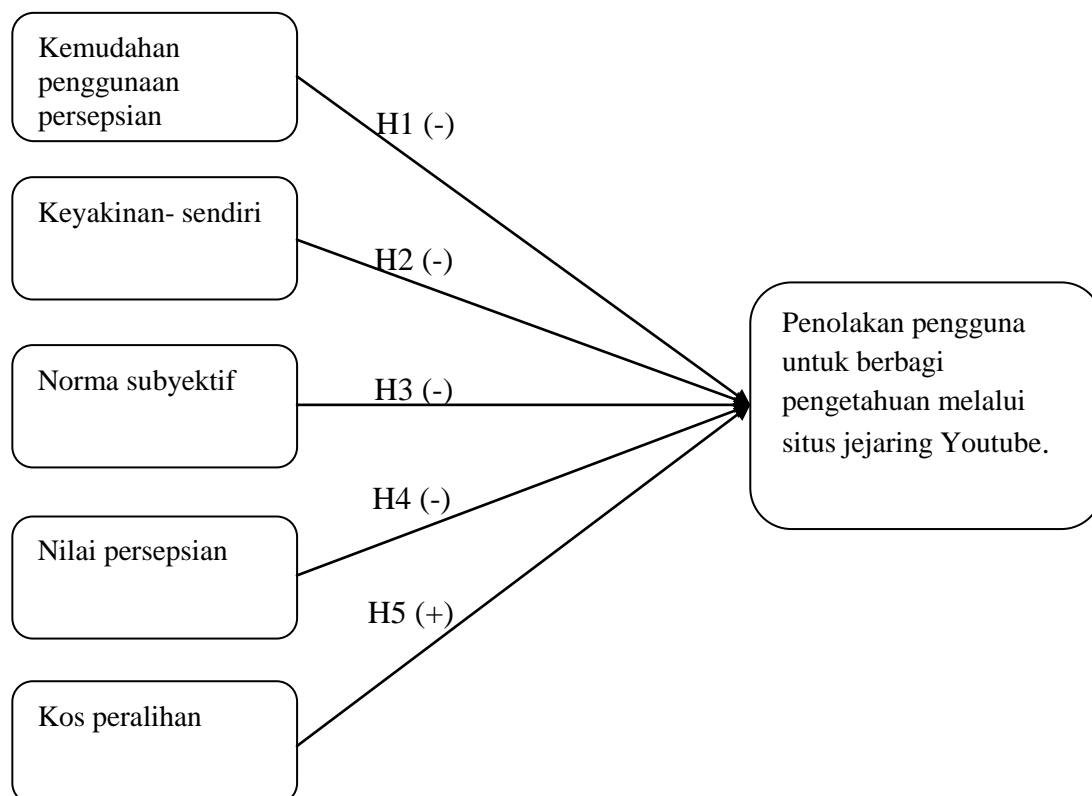
prinsip pengambilan keputusan rasional, kos peralihan yang tinggi akan mengurangi manfaat bersih atau nilai persepsian dari perubahan pengguna, karena manfaat dinilai dari besarnya manfaat relatif terhadap biaya perubahan (Kim dan Kankanhalli, 2009). Tingginya kos peralihan pada penggunaan sistem informasi untuk berbagi pengetahuan akan meningkatkan penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan menggunakan situs jejaring sosial Youtube. Hipotesis yang diajukan berdasarkan penalaran tersebut adalah sebagai berikut.

H5 :*Kos peralihan mempunyai pengaruh positif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.*

2.6 Model Penelitian

Konstruk-konstruk yang telah diuraikan menjadi kelima hipotesis diatas, dimodelkan dalam gambar 1 berikut.

Gambar 1 Model Penelitian



3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode gabungan (*mixed method*). Creswell dan Vicki (2006) menyatakan bahwa metode gabungan merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan survei secara langsung kepada responden dengan membagikan kuesioner penelitian, sedangkan data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari wawancara terstruktur yang dilakukan setelah melakukan pengujian terhadap data kuantitatif.

Sebelum membangun model penelitian, analisis isi (*content analysis*) dilakukan untuk memastikan apakah variabel-variabel yang diajukan telah menggambarkan kondisi sebenarnya dari responden potensial. Analisis isi pada dasarnya merupakan salah satu teknik dalam metode kualitatif untuk mendapatkan data nyata yang diperoleh dari diskusi kelompok fokus (*focus group discussion*) dan wawancara. Hasil dari analisis isi data nyata akan diperoleh beberapa variabel yang benar-benar menggambarkan kondisi penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan menggunakan situs jejaring.

3.1 Pengumpulan dan Sampel Data

Responden dalam penelitian ini merupakan individu yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan pernah mempunyai pengalaman mengunggah konten berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan situs jejaring sosial. Kuesioner dibagikan kepada 132 mahasiswa program pendidikan profesi akuntansi Universitas Gadjah Mada (PPAK UGM), dan semuanya kembali. Akan tetapi terdapat 78 kuesioner yang tidak memenuhi kualifikasi untuk diuji, sehingga hanya terdapat 54 kuesioner yang bisa diolah karena diisi oleh mahasiswa yang pernah berbagi pengetahuan di situs jejaring sosial. Jumlah kuesioner tersebut telah memenuhi syarat untuk diuji menggunakan *Partial Least Square*, karena dalam metode tersebut mensyaratkan minimal 10 responden untuk setiap jalur (*path*).

3.2 Skala Pengukuran

Skala pengukuran untuk masing-masing konstruk penelitian diadopsi dari artikel terdahulu yang berbeda-beda. Skala pengukuran kemudahan penggunaan persepsian diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh (2000). Skala pengukuran keyakinan sendiri, nilai persepsian, kos peralihan, dan penolakan pengguna diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Kankanhalli (2009). Sedangkan skala pengukuran norma subyektif diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Lee (2004). Bahasan tentang skala pengukuran untuk masing-masing konstruk tersaji sebagai berikut.

Penggunaan kemudahan persepsian terdiri dari tiga pernyataan yaitu, (1) belajar berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial merupakan suatu hal yang mudah; (2) kesulitan untuk berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring social; (3) berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial dapat mempermudah proses untuk berbagi.

Keyakinan sendiri terdiri dari tiga pernyataan yaitu, (1) Berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan saya sendiri, berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial akan menjadi mudah; (2) Saya dapat berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial tanpa bantuan orang lain; (3) Saya dapat berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial dengan baik.

Norma subyektif terdiri dari dua pernyataan yaitu, (1) Teman-teman, akan merasa senang jika saya berbagi pengetahuan dengan orang lain melalui sistem informasi jejaring social; (2) Rekan kerja akan mendukung jika saya berbagi pengetahuan dengan orang lain melalui sistem informasi jejaring sosial.

Nilai persepsian terdiri dari tiga pernyataan yaitu, (1) Berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial itu memberikan manfaat bagi saya; (2) Berbagi pengetahuan menggunakan

sistem informasi jejaring sosial memberikan nilai baik bagi saya; (3) Berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial menguntungkan bagi saya.

Kos peralihan terdiri dari tiga pernyataan yaitu, (1) Saya akan mengeluarkan banyak waktu dan usaha untuk berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring social; (2) Berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial memerlukan banyak waktu dan usaha; (3) Saya akan kehilangan banyak dalam aktivitas saya jika berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial.

Penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan terdiri dari tiga pernyataan yaitu, (1) Saya tidak akan menggunakan sistem informasi jejaring sosial untuk berbagi pengetahuan; (2) Saya menentang untuk berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring social; (3) Saya tidak setuju sistem informasi jejaring sosial digunakan untuk berbagi pengetahuan.

3.3 Pengukuran

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas model penelitian yang dibangun. Properti pengukuran untuk reliabilitas dan validitas dilakukan dengan metoda dan prosedur sebagai berikut.

1. Validitas konvergen diukur dengan faktor *loading* lebih besar dari 0,7, *Average variance extracted* (AVE) dan *communality* yang keduanya harus lebih besar dari 0,5.
2. Validitas diskriminan diukur dengan akar AVE dan korelasi variabel (akar AVE > korelasi variabel), dan cross loading yang nilainya harus diatas 0,7 untuk masing-masing variable.
3. Reliabilitas diukur dengan *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*. *Rule of thumb* nilai *alpha* atau *Composite reliability* harus lebih besar dari 0,6.

Langkah selanjutnya, penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dan mengevaluasi model struktural yang telah dibangun. Adapun metode pengukurannya sebagai berikut.

4. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan dengan nilai *t-statistic*.
5. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R^2 untuk konstruk dependen.

4. Hasil Analisis dan Temuan

Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung. Total kuesioner yang dibagikan berjumlah 132 lembar untuk tiga kelas. Terdapat 78 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria untuk diuji, sehingga hanya terdapat 54 kuesioner yang bisa diolah atau 41% dari kuesioner yang dibagikan. 54 kuesioner tersebut diperoleh dari responden yang pernah berbagi pengetahuan dengan mengunggah konten video melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa jawaban responden pada masing-masing konstruk mengindikasikan hasil yang baik. Hasil tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standard deviation*). Nilai simpangan baku dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, hal tersebut mengindikasikan bahwa sebaran data yang merupakan cerminan persepsi responden atas jawaban kuesioner adalah baik. **Tabel 1** dibawah ini menggambarkan uraian data secara lengkap responden.

Table 1 Statistik deskriptif.

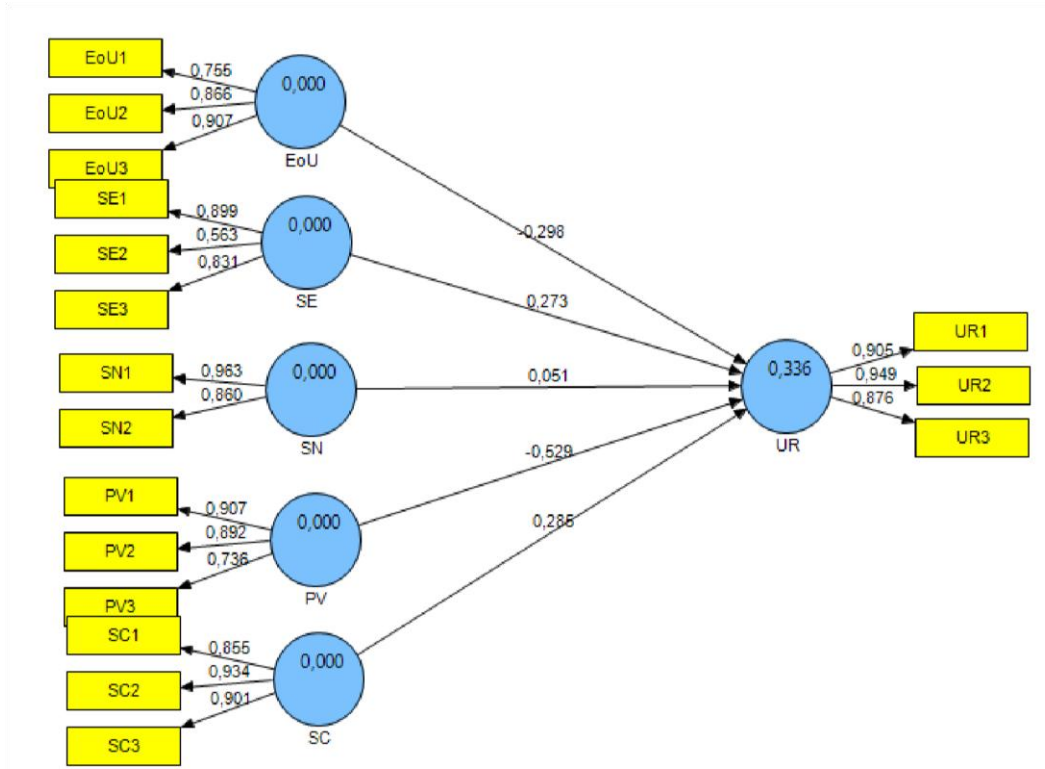
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EOU1	54	2.00	5.00	4.3519	.61911
EOU2	54	3.00	5.00	4.3333	.54944
EOU3	54	4.00	5.00	4.4074	.49597
SE1	54	3.00	5.00	4.3333	.54944
SE2	54	1.00	5.00	4.1481	.85578

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SE3	54	3.00	5.00	4.3148	.54337
SN1	54	1.00	5.00	3.8704	.75351
SN2	54	2.00	5.00	3.8889	.76889
PV1	54	3.00	5.00	4.4444	.53787
PV2	54	3.00	5.00	4.3889	.56357
PV3 SC1	54	3.00	5.00	4.2407	.51157
	54	1.00	4.00	2.4815	1.02314
SC2	54	1.00	5.00	2.4074	.94207
SC3	54	1.00	5.00	2.3704	.95752
UR1	54	1.00	4.00	1.4630	.63582
UR2	54	1.00	3.00	1.3889	.52903
UR3	54	1.00	4.00	1.4815	.63664
Valid N (listwise)	54				

4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model penelitian yang dibangun. Adapun determinasi model dan koefisien jalur untuk model penelitian dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Gambar 1 Output Smart PLS 2.0 (Loading Factor)



4.1.1 Uji Validitas

Validitas konstruk dalam penelitian ini menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono, 2008). Dalam penelitian ini validitas konstruk diperoleh dengan menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Pengujian validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). *Loading factor* pada dasarnya menunjukkan korelasi antara skor item/ skor komponen dengan skor konstruk. Semakin tinggi nilai *loading factor*, maka semakin baik pula tingkat validitasnya. **Tabel 2** berikut ini menunjukkan nilai *loading factor* untuk masing-masing indikator.

Tabel 2 *Outer Loading*

	EoU	PV	SC	SE	SN	UR
EoU1	0,755017					
EoU2	0,865591					
EoU3	0,907175					
PV1		0,907176				
PV2		0,892226				
PV3		0,736356				
SC1			0,855415			
SC2			0,933978			
SC3			0,900795			
SE1				0,899357		
SE2				0,562994		
SE3				0,830817		
SN1					0,963097	
SN2					0,860148	
UR1						0,905183
UR2						0,948867
UR3						0,876069

Selain *loading factor*, untuk mengukur validitas konvergen diperlukan juga AVE dan *communality* untuk masing masing-masing konstruk. **Tabel 3** di bawah ini menunjukkan nilai AVE dan *communality* untuk masing-masing konstruk dalam penelitian ini.

Tabel 3 *Average Variance Extracted dan Communalilty*

	AVE	Communalilty
Perceived Ease of Use	0,714088	0,714088
Perceived Value	0,720418	0,720418
Switching Cost	0,805161	0,805161
Self Efficacy	0,605354	0,605354
Subjective Norm	0,833706	0,833706
User Resistance	0,829067	0,829067

Berdasarkan kedua tabel diatas (**tabel 2** dan **tabel 3**), dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai AVE diatas 0,5 dan nilai *communalilty* diatas 0,5.

Validitas diskriminan merupakan validitas kedua yang perlu dipertimbangkan untuk menguji validitas konstruk dalam penelitian ini. Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi (Jogiyanto, 2008). Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruknya.

Tabel 4 *Cross Loading*

	EoU	PV	SC	SE	SN	UR
EoU1	0,755017	0,254254	-0,114078	0,591685	0,346521	-0,179154
EoU2	0,865591	0,511194	0,064447	0,622000	0,449869	-0,254921
EoU3	0,907175	0,285827	-0,028675	0,745019	0,380076	-0,284304
PV1	0,376465	0,907176	-0,009436	0,507426	0,412600	-0,487387
PV2	0,439477	0,892226	-0,008308	0,596953	0,518902	-0,403832
PV3	0,227029	0,736356	-0,147211	0,398374	0,361540	-0,304866
SC1	-0,022272	-0,029077	0,855415	-0,089175	0,129859	0,164648
SC2	0,031756	-0,091467	0,933978	-0,054230	0,154811	0,302937
	EoU	PV	SC	SE	SN	UR
SC3	-0,069969	-0,007499	0,900795	-0,211003	0,136497	0,275293
SE1	0,774302	0,570978	-0,128894	0,899357	0,497560	-0,272316
SE2	0,348044	0,235318	-0,305658	0,562994	0,102824	-0,182407
SE3	0,621360	0,534312	0,118229	0,830817	0,481335	-0,195580
SN1	0,460149	0,532314	0,059471	0,508726	0,963097	-0,196961
SN2	0,373957	0,353207	0,310437	0,343520	0,860148	-0,103938
UR1	-0,266284	-0,475922	0,258798	-0,289115	-0,178585	0,905183
UR2	-0,283228	-0,411818	0,337060	-0,225524	-0,171679	0,948867
UR3	-0,239254	-0,426836	0,182246	-0,269605	-0,131050	0,876069

Tabel 4 di atas merupakan tabel *cross loading* untuk melihat skor masing-masing indikator suatu konstruk dengan indikator di konstruk lain dan mengumpul pada konstruk yang dimaksud. Membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model dapat juga dilakukan untuk menguji validitas diskriminan. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model

(Chin dalam Jogiyanto dan Abdilah, 2009).

Tabel 5 Average Variance Extracted (AVE) dan akar AVE

	AVE	Akar AVE
EoU	0,714088	0,845037
PV	0,720418	0,848774
SC	0,805161	0,897307
SE	0,605354	0,778045
SN	0,833706	0,913075
UR	0,829067	0,910531

Tabel 6 Latent Variable Correlations

	EoU	PV	SC	SE	SN	UR
EoU	1,000000					
PV	0,418885	1,000000				
SC	-0,019812	-0,051448	1,000000			
SE	0,776064	0,593832	-0,132783	1,000000		
SN	0,463999	0,507200	0,157579	0,486946	1,000000	
UR	-0,289833	-0,480619	0,289785	-0,285594	-0,177706	1,000000

Kedua tabel di atas (**tabel 5** dan **tabel 6**) menunjukkan bahwa nilai akar AVE lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (yang ditunjukkan pada tabel *latent variable correlations*). Nilai tersebut memberikan bukti bahwa konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi validitas diskriminan.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian model pengukuran selain digunakan untuk menguji validitas konstruk juga digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas pada dasarnya digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga

digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian (Jogiyanto dan Abdilah, 2009). Nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* pada tabel dibawah ini merupakan dua metode dalam PLS yang digunakan untuk menguji reliabilitas.

Tabel 7 *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Perceived Ease of Use	0,801021	0,881650
Perceived Value	0,805840	0,884610
Switching Cost	0,882338	0,925269
Self Efficacy	0,651658	0,816232
Subjective Norm	0,817357	0,909050
User Resistance	0,896750	0,935630

Nilai *cronbach's alpha* untuk masing-masing konstruk dalam penelitian ini secara keseluruhan lebih besar dari 0,7, kecuali untuk konstruk keyakinan sendiri yang berada pada nilai diantara 0,6 sampai dengan 0,7. Akan tetapi, nilai *cronbach's alpha* untuk konstruk keyakinan sendiri masih dapat diterima untuk mengukur reliabilitas. Selain *cronbach's alpha*, nilai *composite reliability* juga mempunyai *rule of thumb* lebih besar dari 0,7 (Jogiyanto dan Abdilah, 2009). Dengan ukuran tersebut dapat dibuktikan bahwa semua konstruk penelitian memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keenam konstruk penelitian ini memenuhi uji reliabilitas.

4.2 Uji Model Penelitian

Model evaluasi struktural dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan nilai R^2 untuk konstruk dependennya. R^2 pada dasarnya menunjuk seberapa besar variansi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R^2 bernilai 0 maka variabel independen tidak dapat

menjelaskan sedikitpun terhadap variansi variabel dependen, sedangkan R^2 bernilai 1 maka variabel independen menjelaskan 100% variansi variabel dependen.

Tabel 8 Nilai R^2 (R-square)

	R Square
Perceived Ease of Use	
Perceived Value	
Switching Cost	
Self Efficacy	
Subjective Norm	
User Resistance	0,336191

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai R^2 pada konstruk penolakan pengguna (*user resistance*) untuk berbagi pengetahuan menggunakan situs jejaring sosial Youtube adalah 0,336191. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa variansi penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube dapat dijelaskan oleh konstruk kemudahan penggunaan persepsian, keyakinan sendiri, norma subyektif, nilai persepsian, dan kos peralihan sebesar 33,62% sedangkan 66,38% dipengaruhi oleh variabel lain diluar konstruk.

4.3 Uji Pengaruh

Pengujian signifikansi antar konstruk dalam model struktural dapat dilihat dari nilai *T-statistic*. Pengukuran signifikansi antar konstruk tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *T-statistic* dengan nilai *T-table*. Skor koefisien jalur atau *inner model* yang ditunjukkan haruslah di atas nilai *T-table*. Penelitian ini menggunakan hipotesis satu ekor (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis dengan tingkat keyakinan 95%, sehingga nilai

T-statistic harus di atas 1,64. **Tabel 9** di bawah ini menunjukkan nilai koefisien jalur untuk model struktural.

Tabel 9 Nilai Koefisien Jalur Pada Pengujian Model Struktural

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ((O/STERR))
EoU -> UR	-0,297978	-0,273281	0,126667	0,126667	2,352463
PV -> UR	-0,529075	-0,525239	0,102951	0,102951	5,139115
SC -> UR	0,284800	0,289042	0,084441	0,084441	3,372759
SE -> UR	0,272708	0,229116	0,159354	0,159354	1,711335
SN -> UR	0,051230	0,058692	0,110794	0,110794	0,462387

Berdasarkan nilai koefisien beta dan *T*-statistic di atas, maka hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing konstruk sebagai berikut:

Tabel 10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang Diajukan	Hasil Pengujian Hipotesis	Kesimpulan
H1 : Kemudahan penggunaan persepsian mempunyai pengaruh negatif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.	Koefisien beta: -0,297978 T-statistic: 2,352463	Terdukung
H2 : Keyakinan sendiri mempunyai pengaruh negatif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.	Koefisien beta: 0,272708 T-statistic: 1,711335	Tidak Terdukung
H3 : Norma subyektif mempunyai pengaruh negatif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.	Koefisien beta: 0,051230 T-statistic: 0,462387	Tidak Terdukung
H4 : Nilai persepsian mempunyai pengaruh negatif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.	Koefisien beta: -0,529075 T-statistic: 5,139115	Terdukung
H5 : Kos peralihan mempunyai pengaruh positif terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui media komunikasi Youtube.	Koefisien beta: 0,284800 T-statistic: 3,372759	Terdukung

Berdasarkan pengujian hipotesis pada **tabel 10** di atas dapat disimpulkan bahwa dari kelima hipotesis yang diajukan, terdapat tiga hipotesis yang terdukung yaitu H1, H4, dan H5 terdukung, sedangkan untuk hipotesis yang tidak terdukung yaitu H2 dan H3.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa kemudahan penggunaan persepsian mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap perilaku penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media komunikasi Youtube. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur yang ditawarkan dalam Youtube memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengunggah konten (seperti menuangkan ide atau gagasan pemikiran) ataupun mengunduh konten video berbagi pengetahuan. Breen (2007) memberikan dukungan terhadap kemudahan

penggunaan Youtube, yang ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa saat ini Youtube merupakan tujuan utama (baik perusahaan atau individu) untuk mengunggah konten video secara global.

Hipotesis 2 dalam penelitian ini tidak terdukung karena dari hasil pengujian menggunakan Smart PLS menunjukkan pengaruh yang positif signifikan. Individu yang merasa yakin akan kemampuannya sendiri untuk berbagi pengetahuan dia akan cenderung menolak untuk berperilaku berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube. Hal tersebut menunjukkan bahwa individu akan mempunyai perilaku menolak berbagi pengetahuan meskipun dia mampu untuk berbagi pengetahuan. Dari hasil pengujian tersebut muncul dugaan bahwa individu mempunyai kecenderungan menolak untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube apabila tidak bersifat *mandatory*. Selain itu individu menolak untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media komunikasi Youtube dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap pihak lain yang akan memahami pengetahuan yang dia miliki. Kekhawatiran tersebut terkait dengan pemerolehan pengetahuan yang membutuhkan pengorbanan (baik dalam segi waktu, biaya, kesempatan, dll), sehingga memunculkan keengganan bagi individu untuk membagikan pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Smart PLS untuk menguji pengaruh antara norma subyektif dengan penolakan pengguna, dapat diketahui nilai T-statistic lebih kecil dibandingkan dengan nilai T-table dan nilai koefisien beta positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 tidak terdukung. Norma subyektif tidak memiliki pengaruh terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media komunikasi Youtube. Kondisi itu membuktikan bahwa perilaku individu untuk menolak berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media komunikasi Youtube tidak dipengaruhi secara interpersonal (seperti pengaruh teman dan rekan kerja). Pengaruh interpersonal dalam

penelitian ini lebih bersifat informasional dan bukan bersifat normatif (misalnya pemaksaan). Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Burnkrant dan Cousineau (1975) yang menyatakan bahwa pendapat kolega merupakan representasi dari sebuah pengaruh informasional dan bukan pengaruh normatif pada perilaku dan pengambilan keputusan seseorang. Sehingga individu akan mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain.

Hipotesis 4 menunjukkan bahwa nilai persepsian mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap perilaku penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media komunikasi Youtube. Individu pada dasarnya akan menggunakan sistem jejaring sosial Youtube dan bergabung dalam komunitas tersebut apabila mereka memperoleh nilai persepsian yang tinggi. Penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media komunikasi Youtube akan rendah apabila individu mempunyai nilai persepsian yang tinggi baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Peranan media komunikasi Youtube secara tidak langsung dapat memberikan dorongan kepada individu untuk berbagi pengetahuan. Individu yang mempunyai perilaku berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media tersebut memiliki persepsi nilai yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Nilai tersebut dapat berupa nilai *entertainment* maupun nilai manfaat lain, dimana individu dapat menikmati nilai persepsian setelah berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan Youtube maupun di waktu yang akan datang.

Hipotesis 5 menunjukkan bahwa kos peralihan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap perilaku penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media komunikasi Youtube. Tingginya kos peralihan untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan media komunikasi Youtube akan meningkatkan penolakan pengguna. Kos peralihan pada dasarnya tidak hanya bersifat ekonomik akan tetapi bersifat

psikologis dan emosional (Yang dan Peterson, 2004). Dalam sifat ekonomiknya individu tidak ingin terjadi adanya peningkatan kerugian atau biaya, sehingga seseorang mempunyai kecenderungan menolak berubah karena termotivasi untuk menurunkan kerugian (Kim dan Kankanhalli, 2009). Pandangan tersebut menunjukkan penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube disebabkan karena individu tidak ingin terjadi adanya peningkatan kerugian dan biaya. Dari aspek psikologis dan emosional, seseorang akan mempunyai kecenderungan menolak kondisi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan berperilaku. Penolakan tersebut terjadi karena perasaan yang tidak kompeten dalam situasi ketidakpastian (Brown dan Venkatesh, 2005). Individu yang tidak kompeten akan mempunyai kecenderungan berusaha untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube. Dalam konteks penelitian ini, individu akan menolak berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube apabila dia merasa dalam kondisi ketidakpastian tinggi.

4.4 Analisis Tambahan

Penelitian ini pada dasarnya mengkombinasikan teori penerimaan dan penolakan teknologi untuk menguji bagaimana pengguna menolak berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube. Teori penerimaan teknologi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah model penerimaan teknologi (TAM) dan teori perilaku rencana (TPB). Pada kenyataannya kedua teori tersebut tidak dapat menjelaskan sepenuhnya fenomena penelitian ini. Oleh karena itu wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk membantu menjelaskan fenomena penelitian yang akan diungkap. Wawancara tidak terstruktur merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed method*) antara metode kuantitatif dan metode kualitatif.

Wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada para responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hasil pengujian antar konstruk penelitian yang dihipotesiskan. Dari kelima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis yang terdukung dan dua hipotesis yang tidak terdukung. Hasil pengujian data kuantitatif tersebut digunakan sebagai dasar pertanyaan untuk memperoleh data nyata yang diambil melalui wawancara.

Hipotesis yang terdukung dalam penelitian ini adalah H1, H4, dan H5. Berdasarkan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan kepada responden, hasil pengujian penelitian dari ketiga hipotesis tersebut telah sesuai dengan rasionalitas dan teori yang diajukan untuk membangun hipotesis. Hipotesis yang tidak terdukung dalam penelitian ini menjadi perhatian utama peneliti, karena berdasarkan pengujian data kuantitatif hasilnya tidak sesuai dengan rasionalitas dan teori yang diajukan untuk membangun hipotesis. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar untuk mengkonfirmasi kembali pengaruh keyakinan sendiri dan norma subyektif terhadap penolakan pengguna. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa keyakinan sendiri yang tinggi untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube akan menurunkan penolakan pengguna. Berdasarkan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan, muncul berbagai macam tanggapan yang mencoba menjelaskan fenomena penelitian yang akan diungkap. Kesimpulan dari data nyata yang diperoleh menunjukkan bahwa Youtube pada dasarnya bukan merupakan situs jejaring sosial yang cocok untuk berbagi pengetahuan. Meskipun dapat digunakan sebagai media berbagi pengetahuan, Youtube biasa digunakan untuk berbagi konten pengetahuan yang bersifat umum dan bukan bersifat akademik. Sehingga meskipun individu mempunyai keyakinan sendiri yang kuat belum tentu mereka menerima berbagi pengetahuan melalui Youtube. Selain itu mereka juga berpikir bahwa dalam metode pembelajaran akademik saat ini masih jarang menggunakan video yang memuat ilmu pengetahuan yang mereka pelajari.

Karena metode pembelajaran yang terjadi saat ini seperti sumber-sumber pengetahuan berasal dari buku, artikel, dan lainnya yang notabene berupa susunan kata. Berbicara mengenai berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial, visualisasi menjadi hal penting dalam berperilaku dan perlu dipertimbangkan sebagai aspek yang mempengaruhi penolakan pengguna.

Norma subyektif dihipotesiskan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak terdukung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada responden, ketidakterdukungan tersebut terjadi karena pengaruh interpersonal lebih bersifat informasional dan bukan pengaruh normatif (seperti perintah dari atasan). Pengaruh normatif bisa mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku penolakan, sedangkan pengaruh informasional (seperti dorongan dari rekan kerja) mempunyai dampak pada penolakan pengguna dengan dimediasi oleh suatu konstruk tertentu (Kim dan Kankanhalli, 2009).

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini pada dasarnya menguji faktor-faktor (kemudahan penggunaan persepsian, keyakinan sendiri, norma subyektif, nilai persepsian, dan kos peralihan) yang mempengaruhi penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube. Teori penerimaan teknologi seperti model penerimaan teknologi (TAM) dan teori perilaku rencana (TPB) digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan fenomena penolakan pengguna.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan persepsian, keyakinan sendiri, nilai persepsian, dan kos peralihan merupakan faktor yang berpengaruh dalam memprediksi perilaku penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube. Perilaku penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui Youtube tidak terlepas dari kemudahan penggunaan persepsian dan keyakinan sendiri. Nilai persepsian dan kos peralihan juga merupakan dua faktor yang mempengaruhi penolakan pengguna secara langsung. Hal itu terjadi karena pada saat individu memutuskan berperilaku menolak berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube, mereka akan mempertimbangkan nilai persepsian yang akan diperoleh dan kos peralihan yang diperlukan.

Norma subyektif dalam penelitian ini tidak mempunyai pengaruh terhadap penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube. Kondisi tersebut disebabkan karena pengaruh interpersonal (seperti pengaruh teman dan rekan kerja) yang terjadi bersifat informasional, sehingga individu memiliki kecenderungan mengabaikan informasi yang ada.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis berupa pengembangan teori sistem informasi dan manajemen pengetahuan. Pengembangan teori tersebut terutama terkait perilaku individu terhadap sistem jejaring sosial yang dapat digunakan sebagai media untuk berbagi pengetahuan. Secara khusus perilaku penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial Youtube.

Selain memberikan kontribusi secara teoritis penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi organisasi (seperti lingkungan bisnis maupun akademik) atau

individu untuk lebih memahami perilaku penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini hanya berasal dari responden pada satu bidang ilmu pengetahuan saja. Sehingga apabila model penelitian digunakan untuk bidang yang berbeda akan mempengaruhi kekuatan (*robustness*) model penelitian.
2. Responden penelitian ini hanya terbatas pada pengguna yang pernah berbagi pengetahuan menggunakan Youtube saja, sehingga akan mengurangi kemampuan dalam mengeneralisir hasil penelitian.

5.4 Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan penelitian:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori (seperti teori sistem berpasangan) yang bisa menjelaskan secara jelas motivasi individu untuk berperilaku menolak berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan situs jejaring sosial. Dari pengembangan tersebut diharapkan muncul konstruk utama yang secara khusus dapat menjelaskan penolakan pengguna.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan media komunikasi sistem jejaring sosial seperti 4shared, blog, dan lainnya yang dapat memfasilitasi individu untuk berbagi pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., (1991), "The theory of planned behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2): 79-211.
- Alavi, M. and D. E. Leidner., (2001), "Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues," *MIS Quarterly*, 25(1): 107-136.
- Bartol, K. dan Srivastava, A., (2002), "Encouraging knowledge sharing: The role of organisational rewards", *Journal of Leadership and Organisation Studies*, vol. 9, no. 1, pp. 64-76.
- Bhattacharjee, A., (2001), "Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model", *MIS Quarterly*, Vol. 25 No. 3, pp. 351-370.
- Breen, Jason C., (2002), "YouTube or YouLose: Can YouTube Survive a Copyright Infringement Lawsuit?", *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 16.
- Brown, S.A. dan Venkatesh, V. (2005), "Model of Adoption of Technology in Households: A baseline model test and extension incorporating household life cycle", *MIS Quarterly*, 29(3): 399-426.
- Burnkrant, R. E., and Cousineau, A, (1975), "Informational and Normative Social Influence in Buyer Behavior," *Journal of Consumer Research*, vol. 2, hal. 206-214.
- Chai, Sangmi., Sanjukta Das., dan H. Raghav Rao, (2011), "Factor Affecting Bloggers Knowledge Sharing: An Investigation Across Gender", *Journal of Management Information Systems*, Vol. 28, No. 3, pp. 309-341.
- Cho, Namjae; Zheng Li Guo; dan Su Chen-Jen, (2007), "An Empirical Study on The Effect of Individual Factors on Knowledge Sharing by Knowledge Type", *Computer and Information Science Business*, Vol: 3, Issue: 2.
- Choi, Sue Young., Heeseok Lee., dan Youngjin Yoo, (2010), "The Impact Of Information Technology And Transactive Memory Systems On Knowledge Sharing, Application, And Team Performance: A Field Study" *MIS Quarterly*, Vol. 34 No. 4 pp. 855-870.
- Cohen, Wesley, M. dan Levinthal, Daniel A., (1990), "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 35, hal 128-152.
- Cooper, D.R. and P.S. Schindler., (2008), *Business Research Methods*, 10th Ed. Boston, McGraw-Hill.
- Creswell, John W. And Vicki L. Plano-Clark, (2006), "Designing and Conducting Mixed Methods research", SAGE Publications, California.
- Davenport, T.H., dan Prusak, L., (2000), "Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know", Boston: harvard Business School Press.
- Davenport, T.H. and Prusak, L. (1998) "Working Knowledge: How organizations manage what they know", Boston MA, Harvard Business School Press, pp. 3-6.
- Davis, F.D., (1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", *MIS Quarterly*, 13, 318-339,.
- Davis, F.D., Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R., (1989), "User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models", *Management Science*, 35, 982- 1003.

- Duffy, P., (2008), “Engaging the Youtube Google-Eyed Generation: Strategies for Using Web 2.0 in Teaching and Learning”, *The Electronic Journal of e-Learning*, vol. 6; 119-130.
- Elita, Yessy., (2010), “Pengaruh Rasa Saling Percaya Diantara Kolega Terhadap Perilaku Berbagi Pengetahuan: Meta-Analisis”, *Humanitas*, vol. VIII.
- Hsu, M.H., Ju, T.L., Yen, C.H., dan Chang, C.M., (2007), “Knowledge Sharing Behavior in Virtual Communities: The Relationship between Trust, Self-efficacy, and Outcome Expectations,” *International Journal of Human-Computer Studies* (65:2), 153-169.
- Jiang Jj., Muhanna Wa., dan Klein G., (2000), “User resistance and strategies for promoting acceptance across system types”, *Information & Management*, vol. 37: 25–36.
- Jogiyanto, H.M. (2007), *Sistem Informasi Keprilakuan*, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Jogiyanto, H.M. (2008), *Metodologi penelitian sistem informasi*. Edisi I, Andi Offset, Yogyakarta.
- Jogiyanto, H.M., dan Abdillah, Willy., (2007), *Konsep dan Aplikasi PLS untuk Penelitian Empiris*. BPFE. Yogyakarta.
- Kim, Hee-Woong., dan Atreyi Kankanhalli., (2009), “Investigating User Resistance to Information System Implementation: A Status Quo Bias Perspective”, *MIS Quarterly*, Vol. 33, No. 3, pp. 567-582.
- Klaus, Tim dan J. Ellis Blanton., (2010), “User Resistance Determinants and the Psychological Contract in Enterprise System Implementations”, *European Journal of Information Systems*, vol. 25, hal. 91-106.
- Klaus, T.; S.C. Wingreen, dan J.E. Blanton., (2010), “User Groups in Enterprise System Implementations: A Q-Methodology Examination of Resistance and Management Strategy Expectations”, *Journal of Information Technology*, vol. 25, hal. 91 – 106.
- Kostova, T., (1999), “Transnational transfer of strategic organizational practices: A contextual perspective,” *Academy of Management Review*, 24 (2): 308-324.
- Kwakye, Eugene Okyere, dan Khalil Md. Nor., (2011), “ Individual Factor and Knowledge Sharing”, *American Journal of Economics and Business Administration*, 3(1): 66-72.
- Lapointe, L. dan Rivard, S., (2005), “A multiple model of resistance to information technology implementation,” *MIS Quarterly*, vol. 29, hal. 461-491.
- Lehman, Carol M; Debbie D. DuFrene; dan Mark W. Lehman., (2010), “Youtube Video Project: A “Cool” Way to Learn Communication Ethics”, *Business Communication Quarterly*.
- Lin, H, F., dan G, G, Lee., (2004), “Perception of Senior Manager Toward Knowledge Sharing Behavior”, *Management Decision*, 42, pp.108.
- Manzoni, J., dan Angehrn, A., (1997), “Understanding organization dynamics of IT-enabled change: A multimedia simulation approach”, *Journal of Management Information Systems*, 14(3), 109–141.
- Markus M. L., (1983), “Power, Politics, and MIS Implementation,” *Communications of the ACM* , vol.26, hal. 430-444.
- Namjae, Cho., Zheng Li Guo., dan Su Che-Jen, (2007), “An Empirical Study On The Effect Of Individual Factors On Knowledge Sharing By Knowledge Type”, *Computer and Information Science*, vol. 3.
- Nonaka, I. dan Takeuchi, H., (1995), “The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation”, Oxford: Oxford University Press.

- Rahab., Sulistyandari., dan Sudjono., (2011), “The Development of Innovation Capability of Small Medium Enterprises Through Knowledge Sharing Process: An Empirical Study of Indonesian Creative Industry”, *International Journal of Business and Social Science*, vol. 2 (12).
- Ravitz, Guy; Mei-Ling Shyu; and Mark D. Powell., (2010), “Integrating Multimedia Semantic Content Analysis of Youtube Videos With Hurricane Wind Analysis For Public Situation Awareness and Outreach”, *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, vol. 20: 155-172.
- Salim, Muhammad., Nida Javed., Kiran Sharif., dan Adnan Riaz, (2011), “Antecedents of Knowledge Sharing Attitude and Intentions”, *European Journal of Scientific Research*, vol. 56: 44-50.
- Samuelson, William, dan Richard Zeckhauser, (1998), “Status Quo Bias in Decision Making”, *Journal of Risk and Uncertainty*, vol 1: 7-59.
- Sanford, Clive. and Hyunok Oh., (2010), “The Role of User Resistance in the Adoption of a Mobile Data Service”, *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 13(6): 663-672.
- Shohet, Lauren., (2010), “YouTube, Use, and the Idea of the Archive”, *Shakespeare Studies*, vol. 38.
- Sweeney, Jillian C, dan Geoffrey N. Soutar., (2001), “Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale”, *Journal of Retailing*, 77: 203-220.
- Szulanski, G., (1995), “Unpacking Stickiness: An Empirical Investigation of The Barriers to Transfer Best Practice Inside The Firm”, *Academy of Management Journal*, pp. 437-441.
- Turban, E., King, D. dan Volonino., (2010), “Electronic Commerce 2010”. Prentice Hall: New York.
- Van Den Hooff, Bart., dan Ridder, Jan A, (2004), “Knowledge Sharing in Context: The Influence of Organizational Commitment, Communication Climate and CMC Use on Knowledge Sharing”, *Journal of Knowledge Management*, vol. 8: 117-130.
- Venkatesh, V., (2000), “Determinants of perceived ease of use: integrating control, intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model”, *Information Systems Research*, vol. 11, hal.342–365.
- Venkatesh, V, dan Brown, S.A, (2001), “A longitudinal investigation of personal computers in homes: Adoption determinants and emerging challenges”, *MIS Quarterly*, 25(1): 71-102.
- Weimann, Gabriel., (2010), “Terror on Facebook, Twitter, and Youtube”, *The Brown Journal of World Affairs*, vol. XVI.
- Wu, W., dan Sukoco, B.M., (2010), “Why should I share? Examining consumer’s motives and trust on knowledge sharing”, *Journal of Computer Information Systems*, 50, 4, 11–19.
- Yang, Heng-Li., dan Cheng-Yu Lai., (2011), “Understanding Knowledge Sharing Behaviour in Wikipedia”, *Behaviour & Information Technology*, vol. 30: 131-142.
- Yang, Zhilin dan Robin T. Peterson., (2004), “Customer Perceived Value, Satisfaction, and Loyalty: The Role of Switching Costs”, *Psychology and Marketing*, vol. 21 (10): 799-822.
- Yi, Mun Y., dan Yujong Hwang., (2003), “Predicting the use of web-based information systems: self-efficacy, enjoyment, learning goal orientation, and the technology acceptance model”, *Human-Computer Studies*, vol. 59, hal. 431–449.
- Yu, T. K., Lu, L. C. dan Liu, T. F., (2009), “Exploring Factors that Influence Knowledge Sharing Behavior via Weblogs”, *Computers in Human Behavior*, In Press.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Responden

Kuesioner ini dirancang untuk memperoleh data dari responden yang menjadi subjek penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari beberapa item pertanyaan yang perlu dijawab untuk memenuhi tujuan penelitian yang sedang berjalan. Tujuan penelitian adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan pengguna (*user resistance*) terhadap perilaku berbagi pengetahuan melalui pemanfaatan sistem informasi jejaring sosial. Sistem informasi jejaring sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah Youtube.

Berbagi pengetahuan merupakan isu utama dalam penelitian ini. Karakteristik pengetahuan yang dapat dibagikan dalam penelitian ini berupa:

1. Informasi dari berbagai sumber yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan.
2. Opini, pendapat para pakar, isi seminar yang dibuat dalam rangka pengembangan pengetahuan.
3. Materi tertulis (materi kuliah, seminar, dll) terkait dengan pengembangan pengetahuan.

Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda Pilih

* Opsional

Identitas Responden

1. Nama*

2. Jenis kelamin

Pria

Wanita

3. Umur

	<input type="text"/>		<input type="text"/>	35 - 45
	<input type="text"/>	Tahun	≤ 18 Tahun	
18	<input type="text"/>	- 25 Tahun	≥ 45	<input type="text"/>
25	<input type="text"/>		- 35 Tahun	Tahun

4. Pendidikan

<input type="text"/>	terakhir		
<input type="text"/>		SMA	Diploma
<input type="text"/>	Sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Pasca
	Doktoral		

Penggunaan Internet

5. Saya mengunggah konten di Youtube

<input type="text"/>	Pernah	<input type="text"/>	Tidak pernah
----------------------	--------	----------------------	--------------

6. Saya pernah mengunggah konten di Youtube dalam rangka

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Berbagi Pengetahuan	Iklan
Berbagi konten pribadi	Lainnya.....

7. Saya terakhir mengunggah konten di Youtube untuk berbagi pengetahuan

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<	1
Bulan yang lalu	4	<input type="text"/>	- 6 Bulan yang lalu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	- 2
<input type="text"/>	Bulan yang lalu	>	6 Bulan yang lalu
2 - 4 Bulan yang lalu			

8. Saya telah berbagi pengetahuan dengan mengunggah konten di Youtube sebanyak

1 kali	3 kali	<input type="text"/>
2 kali	≥ 4 kali	<input type="text"/>

9. Saya telah berinteraksi dengan internet selama

Tahun

< 1 Tahun

4 – 5

1 – 3 Tahun

> 5 Tahun

3 – 4 Tahun

Petunjuk untuk menjawab pertanyaan berikut ini adalah:

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda Pilih

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

	<p style="text-align: center;"><i>Sangat</i> <i>Sangat</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Tidak</i> <i>Setuju</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Setuju</i></p>				
Kemudahan Penggunaan Persepsian					
Menurut saya, belajar berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial merupakan suatu hal yang mudah.	1	2	3	4	5
Saya merasa tidak mengalami kesulitan untuk berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial.	1	2	3	4	5
Saya merasa berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial dapat mempermudah proses untuk berbagi.	1	2	3	4	5
Keyakinan Sendiri					

Berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan saya sendiri, berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial akan menjadi mudah bagi saya.	1	2	3	4	5
Saya dapat berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial tanpa bantuan orang lain.	1	2	3	4	5
Saya dapat berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial dengan baik.	1	2	3	4	5
Norma Subyektif					
Teman-teman, akan merasa senang jika saya berbagi pengetahuan dengan orang lain melalui sistem informasi jejaring sosial.	1	2	3	4	5
	<i>Sangat Tidak Setuju</i>		<i>Sangat Setuju</i>		
Rekan kerja akan mendukung jika saya berbagi pengetahuan dengan orang lain melalui sistem informasi jejaring sosial.	1	2	3	4	5
Nilai Persepsian					
Berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial itu memberikan manfaat bagi saya.	1	2	3	4	5
Berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial memberikan nilai baik bagi saya.	1	2	3	4	5
Berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial menguntungkan bagi saya.	1	2	3	4	5
Kos Peralihan/ Switching Cost					
Saya akan mengeluarkan banyak waktu dan usaha untuk berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial.	1	2	3	4	5
Berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial memerlukan banyak waktu dan usaha.	1	2	3	4	5

Saya akan kehilangan banyak dalam aktivitas saya jika berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial.	1	2	3	4	5
Penolakan pengguna untuk berbagi pengetahuan					
Saya tidak akan menggunakan sistem informasi jejaring sosial untuk berbagi pengetahuan.	1	2	3	4	5
Saya menentang untuk berbagi pengetahuan menggunakan sistem informasi jejaring sosial.	1	2	3	4	5
Saya tidak setuju sistem informasi jejaring sosial digunakan untuk berbagi pengetahuan	1	2	3	4	5

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EOU1	54	2.00	5.00	4.3519	.61911
EOU2	54	3.00	5.00	4.3333	.54944
EOU3	54	4.00	5.00	4.4074	.49597
SE1	54	3.00	5.00	4.3333	.54944
SE2	54	1.00	5.00	4.1481	.85578
SE3	54	3.00	5.00	4.3148	.54337
SN1	54	1.00	5.00	3.8704	.75351
SN2	54	2.00	5.00	3.8889	.76889
PV1	54	3.00	5.00	4.4444	.53787
PV2	54	3.00	5.00	4.3889	.56357
PV3	54	3.00	5.00	4.2407	.51157
SC1	54	1.00	4.00	2.4815	1.02314
SC2	54	1.00	5.00	2.4074	.94207
SC3	54	1.00	5.00	2.3704	.95752
UR1	54	1.00	4.00	1.4630	.63582
UR2	54	1.00	3.00	1.3889	.52903
UR3	54	1.00	4.00	1.4815	.63664
Valid N (listwise)	54				

PLS

Quality Criteria

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
EoU	0,714088	0,881650		0,801021	0,714088	
PV	0,720418	0,884610		0,805840	0,720418	
SC	0,805161	0,925269		0,882338	0,805161	
SE	0,605354	0,816232		0,651658	0,605354	
SN	0,833706	0,909050		0,817357	0,833706	
UR	0,829067	0,935630	0,336191	0,896750	0,829067	0,069294

Outer Loadings

	EoU	PV	SC	SE	SN	UR
EoU1	0,755017					
EoU2	0,865591					
EoU3	0,907175					
PV1		0,907176				
PV2		0,892226				
PV3		0,736356				
SC1			0,855415			
SC2			0,933978			
SC3			0,900795			
SE1				0,899357		
SE2				0,562994		
SE3				0,830817		
SN1					0,963097	
SN2					0,860148	
UR1						0,905183
UR2						0,948867
UR3						0,876069

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
EoU1 <- EoU	0,755017	0,749295	0,113413	0,113413	6,657248
EoU2 <- EoU	0,865591	0,871348	0,037528	0,037528	23,065120
EoU3 <- EoU	0,907175	0,895446	0,041944	0,041944	21,628306
PV1 <- PV	0,907176	0,908111	0,027750	0,027750	32,690819
PV2 <- PV	0,892226	0,894183	0,033018	0,033018	27,022407
PV3 <- PV	0,736356	0,726308	0,072508	0,072508	10,155448
SC1 <- SC	0,855415	0,838043	0,086907	0,086907	9,842832
SC2 <- SC	0,933978	0,930087	0,038786	0,038786	24,080120
SC3 <- SC	0,900795	0,892838	0,043262	0,043262	20,821610
SE1 <- SE	0,899357	0,871791	0,091989	0,091989	9,776798

SE2 <- SE	0,562994	0,551419	0,198983	0,198983	2,829361
SE3 <- SE	0,830817	0,807189	0,097122	0,097122	8,554403

45

SN1 <- SN	0,963097	0,932765	0,135843	0,135843	7,089767
SN2 <- SN	0,860148	0,815031	0,165854	0,165854	5,186171
UR1 <- UR	0,905183	0,906888	0,024915	0,024915	36,331373
UR2 <- UR	0,948867	0,948234	0,013964	0,013964	67,950507
UR3 <- UR	0,876069	0,876043	0,045884	0,045884	19,093029

46



Cross Loadings

	EoU	PV	SC	SE	SN	UR
EoU1	0,755017	0,254254	-0,114078	0,591685	0,346521	-0,179154
EoU2	0,865591	0,511194	0,064447	0,622000	0,449869	-0,254921
EoU3	0,907175	0,285827	-0,028675	0,745019	0,380076	-0,284304
PV1	0,376465	0,907176	-0,009436	0,507426	0,412600	-0,487387
PV2	0,439477	0,892226	-0,008308	0,596953	0,518902	-0,403832
PV3	0,227029	0,736356	-0,147211	0,398374	0,361540	-0,304866
SC1	-0,022272	-0,029077	0,855415	-0,089175	0,129859	0,164648
SC2	0,031756	-0,091467	0,933978	-0,054230	0,154811	0,302937
SC3	-0,069969	-0,007499	0,900795	-0,211003	0,136497	0,275293
SE1	0,774302	0,570978	-0,128894	0,899357	0,497560	-0,272316
SE2	0,348044	0,235318	-0,305658	0,562994	0,102824	-0,182407
SE3	0,621360	0,534312	0,118229	0,830817	0,481335	-0,195580
SN1	0,460149	0,532314	0,059471	0,508726	0,963097	-0,196961
SN2	0,373957	0,353207	0,310437	0,343520	0,860148	-0,103938
UR1	-0,266284	-0,475922	0,258798	-0,289115	-0,178585	0,905183
UR2	-0,283228	-0,411818	0,337060	-0,225524	-0,171679	0,948867
UR3	-0,239254	-0,426836	0,182246	-0,269605	-0,131050	0,876069

Latent Variable Correlations

	EoU	PV	SC	SE	SN	UR
EoU	1,000000					
PV	0,418885	1,000000				
SC	-0,019812	-0,051448	1,000000			
SE	0,776064	0,593832	-0,132783	1,000000		
SN	0,463999	0,507200	0,157579	0,486946	1,000000	
UR	-0,289833	-0,480619	0,289785	-0,285594	-0,177706	1,000000

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
EoU -> UR	-0,297978	-0,273281	0,126667	0,126667	2,352463
PV -> UR	-0,529075	-0,525239	0,102951	0,102951	5,139115
SC -> UR	0,284800	0,289042	0,084441	0,084441	3,372759
SE -> UR	0,272708	0,229116	0,159354	0,159354	1,711335
SN -> UR	0,051230	0,058692	0,110794	0,110794	0,462387

Komitmen Profesi Akuntan dan Komitmen Kantor Akuntan Publik Determinan terhadap Kualitas Audit¹

MATHIUS TANDIONTONG^{2*}

Universitas Kristen Maranatha Bandung

Abstract: *Quality audit is the output of the Public Accountant (KAP) in providing audit services to the user. Demands are high quality by stakeholders. However, it is ironic, because many KAPs are not optimal to meet the expectations of service users. Various financial scandals are rife involving public accounting practitioners. This result, employers doubt the integrity of public accounting audit. This study aims to obtain empirical evidence to evaluate the influence of the accounting profession's commitment and organizational commitment on the implications for audit quality. This study used a survey method explanation, although the description also contains a description, but as a relational research focus is on the explanation of the relationship between variables is verification. Variables were operationalized in this study, namely: professional commitment, organizational commitment, and audit quality is more fundamental to the indicators. Data collected through the distribution of questionnaires to the target respondents, as well as limited interviews and documentation studies in an attempt to add an explanatory element of the survey results. The unit of analysis is the Public Accountant (KAP) in Indonesia with a population of 417 KAP. Proportional sampling method is simpler random on 79 KAP with the target response is sent 347 questionnaires accountant. Technical analysis and test data analysis performed by Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that: (1) the accounting profession's commitment significantly affect the quality of the audit, (2) public accounting firm commitment to significantly affect the quality of the audit, and (3) commitment to the accounting profession and organizational commitment KAP simultaneously affect audit quality*

Keywords: *Professional commitment, organizational commitment, audit quality*

¹Survei terhadap Akuntan yang bekerja sebagai Auditor pada KAP di Indonesia

* Author can be contacted at: m_tandiontong@yahoo.in

I. PENDAHULUAN

Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam penyediaan jasanya disadari bahwa meningkatnya persaingan yang semakin tajam antar KAP, telah mendorong jasa Akuntan Publik dalam kategori "sulit" untuk berperilaku profesional. Akibatnya, terdapat KAP yang mementingkan klien dan laba yang besar, sehingga Etika Profesi Akuntan Publik tidak lagi dapat ditegakkan secara baik. Pelanggaran demi pelanggaran menjadi catatan yang dapat menurunkan citra Profesi Akuntan, khususnya profesi Akuntan Publik, seperti manipulasi laporan keuangan dengan sengaja disusun agar saham perusahaan tetap diminati Investor. Berbagai skandal akuntansi yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ternyata tidak pernah lepas dari peran akuntan. Pengguna Jasa Audit meragukan integritas Akuntan Publik, Setidaknya 10 KAP mendapat sanksi dari pemerintah karena kurang berhasil mengemban misinya melindungi kepentingan akuntan yang dinilai memiliki kontribusi dalam banyak kasus kebangkrutan perusahaan. Pengguna Jasa Audit meragukan integritas Akuntan Publik, Menurunnya kepercayaan publik terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik, dan belum optimalnya kepuasan pengguna jasa audit.

Arens, Elder dan Beasley (2010) menyatakan profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan masyarakat, Setidaknya: (1) kewajiban kepada klien, kewajiban kepada hukum biasanya muncul karena adanya kegagalan dalam melaksanakan penugasan audit sesuai dengan waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal dalam menemukan kesalahan dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik; (2) Kewajiban perdata bagi pihak ketiga (pemegang saham & calon investor, pemasok, kreditur, karyawan dan pelanggan), kewajiban ini biasanya timbul karena pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pengambilan keputusan yang salah, karena mengandalkan laporan keuangan hasil audit yang menyesatkan; (3) Kewajiban pidana bagi pihak ketiga, kewajiban ini biasanya muncul karena akuntan publik ikut terlibat secara langsung bersama-sama dengan klien dalam melakukan tindakan kriminal.

Komitmen profesi sangat diperlukan bagi semua profesi karena jasa profesi dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat tidak dirugikan atas jasa yang diberikan oleh profesi tersebut (Boreham, 2000). Profesi akuntan publik harus memiliki integritas, independen dan bebas dari semua kepentingan tersebut, menegakkan kebenaran, kemampuan teknis dan profesionalisme, dan komitmen profesi harus selalu dijaga dengan menempatkan aspek moralitas ditempat yang tertinggi (Gibbins dan Webb, 2001). Akuntan

bukan hanya sekedar ahli tetapi harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan menerapkan standar profesi yang disepakati, menjaga akuntabilitas profesi, dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada (Whan, et al., 2004). Profesi akuntan publik dituntut untuk mengenali kepentingan stakeholder, namun etika profesi tetap terjaga, dalam hal ini tidak terlepas dari komitmen organisasi dimana profesi akuntan publik bekerja, yakni Kantor Akuntan publik (McPhail, 2001).

Skandal akuntansi yang marak terjadi akhir-akhir ini, berakibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan kualitas audit yang dihasilkan. Namun demikian belum jelas benar apakah komitmen profesi akuntan publik dan komitmen KAP dapat mempengaruhi kepuasan Auditor (Akuntan publik) maupun implementasi Audit Independen atas Laporan Keuangan, yang diduga akan berimplikasi pada kualitas audit yang dijalankan. Banyak pihak yang mendefinisikan kualitas audit, namun tidak ada definisi yang pasti tentang kualitas audit itu sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusun kualitas audit dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit (Sutton, 1993).

Penelitian ini didasarkan pada model yang diperoleh dari fenomena di lapangan yang terbentuk didasarkan pada teori-teori parsial antar model, sehingga dari beberapa teori pendukung tersebut diperoleh suatu bentuk model, seperti penelitian Ahmad, Anantharaman dan Ismail (2012) yang mengkaji komitmen profesi dengan menggunakan dimensi orientasi etik, karakteristik profesi, dan kode etik profesi. Selanjutnya penelitian Rosnidah (2008) mengkaji kualitas audit dengan menggunakan dimensi (1) Kualitas teknis, (2) Kualitas jasa, (3) Hubungan auditor-klien, dan (4) Independensi.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah **sejauhmana komitmen profesi akuntan dan komitmen organisasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit.**

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Komitmen Profesi Akuntan

Ahmad, Anantharaman, dan Ismail (2012) menyatakan komitmen profesional penting bagi profesi akuntansi karena mengarah ke sensitivitas yang lebih besar terhadap isu-isu etika dan keterlibatan meningkat pekerjaan. Komitmen profesional terhadap profesi akuntansi sebaiknya dikembangkan selama pendidikan tersier atau pada tahap sosialisasi antisipatif. Hasil penelitian Sweeney, Quirin, Fisher (2003) terhadap 349 auditor yang

mewakili perusahaan-perusahaan internasional, nasional dan regional menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berbanding terbalik dengan komitmen profesional, namun komitmen profesi erat kaitannya dengan ketaatan akuntan pada Standar Profesi, Akuntabilitas Profesi yang harus diperhatikan sebagai wujud dari komitmen profesinya, dan etika profesi.

Tidak mudah bagi akuntan publik untuk memenuhi harapan para *stakeholder*-nya tetapi tetap harus ditingkatkan agar profesi ini mendapat kepercayaan masyarakat. Hal tersebut dinyatakan oleh Kell (2000) sebagai berikut: *Ethics is a topic that receiving a great deal of attention throughout our society today. This attention is an indication of both the importance of ethical behavior to maintaining a civil society, and a significant number of notable instances of unetical behavior. The authors believe that ethical behavior is the backbone of the practice of public accounting and deserving of serious study by all accounting student.*

Pada penelitian ini menelusuri komitmen profesi akuntan dari dimensi: (1) **Ketaatan akuntan pada standar profesi**, meliputi: (a) Patuh pada standar auditing, (b) Kebijakan Pengendalian Mutu, (c) Standar Umum dan Standar Audit, (d) Memahami hak-hak istimewa Akuntan Publik, dan (e) Memahami Tanggung Jawab atas pernyataan keuangan; (2) **Akuntabilitas Profesi**, meliputi: (a) Tanggungjawab pada Perencanaan dan Pelaksanaan audit, (b) Tanggung jawab terhadap profesi, (c) Komitmen atas kebenaran dan keadilan, (d) Komitmen pada citra akuntan, (d) Komitmen pada perilaku Akuntan, (e) Menghindari konspirasi dengan klien, (f) Pengungkapan rahasia informasi klien, (g) Kewajaran penentuan fee profesi, (h) Bebas dari target yg tidak realistis, (i) Komunikasi tertulis dengan akuntan terdahulu, dan (j) Terhindar dari Related Party (hubungan khusus); (3) **Etika Profesi**, meliputi: (a) Tanggung jawab profesi, (b) Kepentingan Umum, (c) Integritas, (d) Objektif, (e) Independensi, (f) Kompetensi dan kehati-hatian Profesional, (h) Kerahasiaan, (i) Snadar Teknis (Konrad, 2002; Chen, Silverthorne, dan Hung, 2006; Bryant, Moshavi, dan Nugen, 2007; Gary, Bennie dan Chen, 2007; Povel dan Winton, 2007; Francis, 2009; Marshall, Smith, Armstrong, 2010; Arens, Elder, dan Beasley, 2010; McDowall, dan Jackling, 2010).

2. Komitmen Organisasi Kantor Akuntan Publik

Robbins dan Judge (2009) mendefinisikan *organizational commitment* sebagai “*the degree to which an employee identifies with a particular organization and its goals and wishes to maintain membership in the organization*”. *Organizational Commitment* telah didefinisikan dan diukur dengan berbagai cara seperti Yousef (2002), Bryant, Hunton dan Stone (2004), Biggs dan Swailes (2005), dan Cetin (2006), dalam pandangan mereka

memiliki kesamaan makna dalam ikatan antara karyawan dengan organisasinya (*bond or linking of the employee to the organization*), sedangkan berbeda terletak pada bagaimana ikatan itu terbentuk. Hasil penelitian mengukur “*attitudinal commitment*”. *Attitudinal commitment* didefinisikan sebagai berikut: “*the relative strength of an individual’s identification with and involvement in a particular organization*”. Hal tersebut tercermin dalam beberapa indikator yaitu: (1) *strong belief in and acceptance of the organization’s goals and values*, (2) *willingness to exert effort on the organization’s behalf*, (3) *a desire to maintain membership*.

Windsor (1995), Weiner dan Vardi (1998), Cuverson (2002), dan Pamell & Crandall (2003) menganjurkan bahwa *organizational commitment* terdiri dari tiga komponen yang dapat dibedakan, yaitu: (a) *Affective Commitment*, (b) *Continuance Commitment*, dan (c) *Normative Commitment*. Hasil penelitian para ahli tersebut menunjukkan: (1) Komitmen Afektif (*Affective Commitment*) didefinisikan sebagai komitmen yang didasari perasaan secara emosional untuk selalu terlibat dalam organisasi; karyawan dengan *affective commitment* yang kuat (*strong affective commitment*) akan terus bekerja pada perusahaan yang bersangkutan karena mereka secara emosional sangat menginginkannya; (2) *Continuance Commitment*, didefinisikan sebagai keinginan untuk tetap tinggal atau bergabung dengan organisasi karena pertimbangan *cost and benefit*; (3) *Normative Commitment* mengemukakan bahwa individu tersebut tetap tinggal di dalam organisasi karena adanya paksaan dari pihak lain (*refers to a person’s feelings of obligation to stay with an organization because of pressures from others*).

Dengan demikian komitmen organisasi (*Organizational Commitment*) merupakan keinginan seorang auditor dalam hal ini akuntan publik secara sukarela untuk selalu terlibat atau loyal terhadap suatu kantor Akuntan Publik dengan tujuan tertentu. Komitmen Kantor Akuntan dari 3 dimensi, yaitu: (1) **Komitmen Afektif**, meliputi: (a) Kepedulian dalam karir Akuntan Publik, (b) Identifikasi dengan pekerjaan Akuntan Publik, (c) Rasa Memiliki Akuntan Publik, (d) Keterikatan emosional Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik, (e) Akuntan Publik bagian dari Kantor Akuntan Publik, (f) Makna pribadi pekerjaan Akuntan Publik; (2) **Komitmen Kontinum**, meliputi: (a) Kebutuhan Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik, (b) Tanggung Jawab Kantor Akuntan Publik, (c) Stabilitas Kehidupan, (d) Pilihan Pekerjaan Lain, (e) Pengorbanan Pribadi, (f) Tersedia alternatif pekerjaan lain selain Akuntan Publik; (3) **Komitmen Normatif**, meliputi: (a) Kewajiban pada Organisasi, (b) Kewajiban Moral, (c) Perasaan Bersalah saat meninggalkan Kantor Akuntan Publik, (d) Kesetiaan (loyalitas) organisasi, (e) Merasa berhutang budi

(Feather dan Rauter, 2004; Biggs dan Swailes, 2005; Chen, Silverthorne, dan Hung, 2006; Kreitner dan Kinicki, 2007; Bryant, Moshavi, dan Nugen, 2007; Robbins dan Judge, 2009).

2. Konsep Kualitas Audit (*Audit Quality*)

Kualitas audit (*Audit Quality*) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (Aldhizer, Miller dan Moraglio, 1995). Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan (Arrunada, 2000). Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Nasution, 2007). Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self-interest* maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi (Beasley, Jiambalvo, dan Subramanyam, 1998; Li Dang et al, 2004).

Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena itu wajar jika kemudian kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah dan masyarakat serta para investor. Benh (1997) dalam Agoes (2003) mengatakan ada 12 atribut kualitas jasa audit yaitu: (1) Pengalaman tim audit dan CPA *firm* dengan klien; (2) pengalaman di bidang industri klien; (3) Tingkat responsif auditor (CPA *firm*) atas kebutuhan klien; (4) Tingkat kepatuhan CPA *firm* dengan SPAP-kompetensi teknis; (5) Tingkat kepatuhan CPA *firm* dengan standar umum (*general audit standar*)- independensi; (6) Tingkat kepatuhan CPA *firm* dengan standar umum (*general audit standard-due care*); (7) Komitmen CPA *firm* terhadap kualitas; (8) Keterlibatan (*involvement*) pimpinan pelaksana (*executive*); (9) Pelaksanaan pekerjaan lapangan; (10) Keterlibatan dengan komite audit; (11) Kode etik profesi akuntan publik dan pengetahuan auditing; (12) Staf CPA *firm* yang tetap mempertahankan sikap skeptis.

Kualitas audit sulit diukur secara objektif, sehingga para peneliti menggunakan berbagai dimensi kualitas audit yang berbeda-beda. Seperti Duff (2004) dan Rosnidah

(2008), menggunakan dimensi kualitas teknis, terdiri dari indikator: (a) reputasi; (b) kemampuan; (c) jaminan; dan (d) hubungan auditor-klien. Dimensi kualitas jasa terdiri dari indikator: (a) empati; (b) daya tanggap; dan (c) jasa non-audit. Sedangkan dimensi hubungan auditor-klien, terdiri dari indikator: (a) keahlian; (b) pengalaman; dan (c) status. Dimensi independensi hanya terdiri dari satu indikator yaitu obyektivitas. Dimensi-dimensi dan indikator-indikator kualitas audit ini digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini kualitas audit dipandang dari dimensi: **(1) Orientasi masukan (*Input Orientation*)**, meliputi: (a) Penugasan personel; (b) untuk melaksanakan perjanjian; (c) Konsultasi; (d) Supervisi; (e) Pengangkatan; (f) Pengembangan profesi; (g) Promosi; dan (h) Inspeksi. **(2) Orientasi Proses (*Processes Orientation*)**, meliputi: (a) Independensi; (b) Kepatuhan pada standar audit; (c) Pengendalian audit; dan (d) Kompetensi auditor. **(3) Orientasi Keluaran (*Output Orientation*)**, meliputi: (a) Kinerja auditor; (b) Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien; dan (c) *Due professional care*. **(4) Tindak lanjut atas rekomendasi audit**, meliputi: (a) Jajaran manajemen klien mendukung implementasi rekomendasi Auditor; (b) Peraturan internal klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit; (c) Sistem di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit; (d) Budaya di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Auditor; dan (e) Fasilitas fisik di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari auditor (Gerrald, dan Keith, 1994; Ramy dan Failk, 1996; Herrbach, 2001; Hay dan Davis, 2002; Duff, 2004; Fleming dan Romanus, 2007).

Keterkaitan antar Variabel

Akuntan publik dalam menjalankan praktik profesionalnya sepenuhnya harus mengikuti aturan etika yang telah ditetapkan dengan berbagai konsekuensinya. Namun demikian, pada umumnya masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan yang harus diikuti oleh akuntan publik sehingga terdapat kesenjangan (*gap*) antara harapan masyarakat dan aturan-aturan yang membatasi praktik akuntan publik. *Gap* ini terkadang dapat memunculkan persepsi yang salah dari masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Salah satu contoh klasik adalah pengguna jasa akuntan publik belum dapat secara tegas memilah pengertian “*Audit Failure*” dan “*Business Failure*” (Windsor, 2003, William, 2003 dan Wyman, 2003).

Selain masalah *Professional Commitment* dan *Organizational Commitment*, masalah lain yang dihadapi akuntan publik di Indonesia atau diduga mempunyai kontribusi terhadap bisnis akuntan publik di Indonesia adalah kepuasan kerja (*Job Satisfaction*). Beberapa

penelitian terdahulu (Messmer, 2002 dan Camp, 2003) mengemukakan bahwa kinerja dan Kepuasan Kerja mempunyai hubungan, meskipun hubungannya belum konsisten, auditor yang mengalami *organizational-professional conflict* cenderung mempunyai kinerja yang rendah dan cenderung mempunyai keinginan berpindah (*turnover intention*) yang tinggi (Harrel, 1986). Penelitian lain (Gregson, 1992) dalam *Behavioral Research in Accounting* meneliti keterkaitan antara *job satisfaction*, *organizational commitment* dan *turnover dan performance* hasilnya menunjukkan adanya keterkaitan antara *organizational commitment* dan *turnover*. Auditor yang mempunyai *organizational commitment* tinggi memiliki *turnover intention* yang rendah, demikian pula sebaliknya. Auditor yang mempunyai *organizational commitment* dan *job satisfaction* tinggi juga cenderung mempunyai kinerja yang lebih baik. Peneliti lain yang melakukan penelitian dan hasilnya serupa antara lain: Backman, 2000; dan Aizzat et al, 2001.

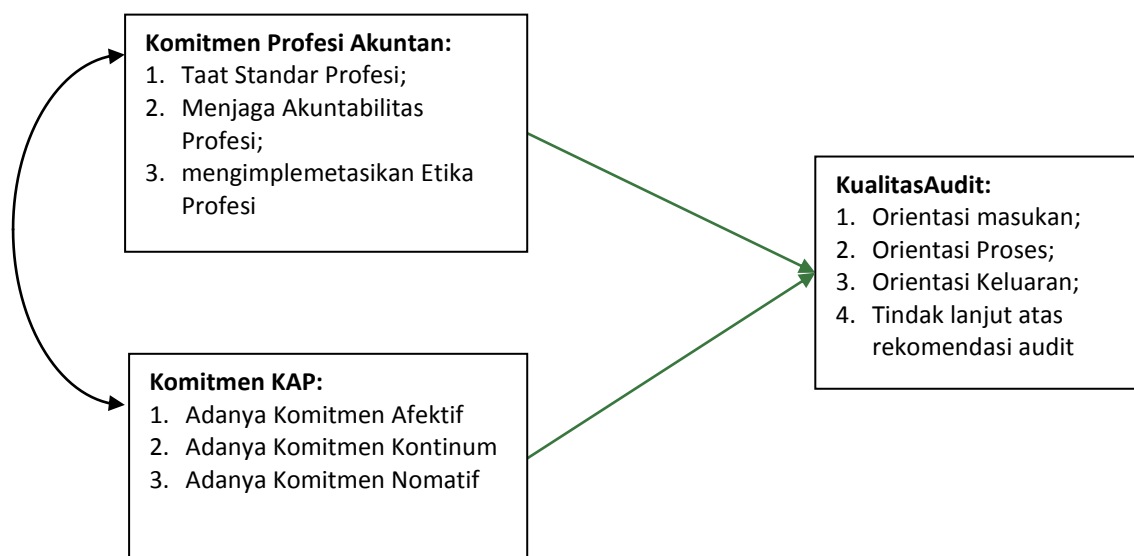
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa audit yang dilakukan akuntan tidak dapat secara langsung mempengaruhi kepercayaan pengguna jasa audit. Salah satu penelitian tersebut terkait dengan kontribusi proses audit terhadap keputusan manajemen keuangan perusahaan dapat dijelaskan melalui penelitian Wood (2005). Wood berkesimpulan bahwa auditor memberikan kontribusi bagi manajer keuangan berupa pemberian informasi tentang bagaimana melakukan standar akuntansi yang baik dan mengimplementasikan pengawasan. Dengan kata lain pelaksanaan auditing oleh auditor memberikan kontribusi kepada manajer keuangan berupa arahan bagaimana melakukan akuntansi yang benar dan implementasi pengawasan, sedangkan saran-saran yang lain masih belum dapat diimplementasikan karena adanya anggapan bahwa akuntan bukanlah ahli bisnis atau *stakeholder*. Dengan demikian saran yang diterbitkan oleh auditor eksternal belum tentu dapat dilaksanakan, termasuk oleh manajer keuangan. Hal ini mengindikasikan, proses audit tidak begitu saja mempengaruhi kepercayaan pengguna jasa akuntan.

Penelitian Bruynseels, Knechel dan Willekens (2005) menunjukkan adanya dukungan bahwa auditor spesialis lebih disukai untuk memenuhi kebutuhan *going concern* perusahaan yang akan bangkrut. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para spesialis tidak terikat pada inisiatif operasional. Bahkan terdapat temuan menarik bahwa kantor akuntan yang menggunakan metodologi risiko bisnis cenderung tidak disukai terkait dengan isu *going concern*. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pada perusahaan yang akan bangkrut adanya auditor cenderung tidak akan banyak memberikan banyak perubahan pada perusahaan.

Dengan kata lain rekomendasi dari auditor lebih sesuai untuk berperan sebagai tindakan preventif dan bukan tindakan kuratif. Hal tersebut sejalan dengan bukti empiris lain yang menunjukkan bahwa *high quality audits* diharapkan oleh pasar untuk melindungi reputasi perusahaan, menurunkan *cost of capital*, menghindarkan diri dari *legal liability* dan menghindarkan biaya agensi. Hamilton dan Stoke (2002) menjelaskan peran standar audit sebagai sekumpulan ketentuan *best practice*. Standarisasi proses audit memungkinkan auditor menjalankan *best practice* dan memberikan arahan kepada perusahaan yang diaudit.

Dengan demikian, inti manfaat pemeriksaan bukan pada informasi dan rekomendasi saja, melainkan juga pada implementasi rekomendasi audit yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa. Dengan kata lain aspek implelementasi rekomendasi audit dinilai sangat penting dalam mendorong entitas pemeriksaan untuk memenuhi rekomendasi yang diharapkan, sebagai salah satu dimensi dari kualitas audit. Namun demikian *agent* tidak serta merta dapat menjalankan rekomendasi audit, jika pemahaman tentang manfaat audit independen atas laporan keuangan dinilai kurang memadai dan berdampak pada kualitas audit yang diterima. Terkait dengan hal tersebut dalam penelitian ini ingin diketahui secara lebih jelas bagaimana sesungguhnya pengaruh **komitmen profesi akuntan dan komitmen kantor akuntan publik terhadap kepuasan kerja auditor dalam implementasi audit independen atas laporan keuangan dan implikasinya terhadap kualitas audit.**

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat digambarkan paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual dan paradigma penelitian ini, maka dapat diajukan hipotesis bahwa: (1) Komitmen profesi akuntan secara parsial berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit; (2) Komitmen Kantor Akuntan Publik secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit; dan (3) komitmen profesi akuntan dan komitmen organisasi kantor akuntan publik secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Survei Penjelasan (*Explanatory Survey Method*). Bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian kuantitatif fokusnya terletak pada penjelasan hubungan antar variabel. Konsekuensi penelitian ini diperlukan operasionalisasi variabel yang lebih mendasar kepada indikator-indikatornya. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, penelitian ini digunakan *Structural Equation Modeling* (SEM), dengan alasan bahwa model ini merupakan pendekatan terintegrasi antara *Factor Analysis*, *Path Analysis*, dan *Structural Model*, dan merupakan analisis data dengan konstruksi konsep.

Variabel penelitian dioperasionalkan mengacu pada semua variabel dalam hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu: (1) **Variabel Komitmen Profesi Akuntan**, yaitu keinginan akuntan (individu) secara sukarela untuk selalu taat pada **Standar Profesi**, yang meliputi: patuh pada standar auditing, kebijakan pengendalian mutu, standar umum dan standar audit, memahami hak-hak istimewa Akuntan, dan memahami tanggung jawab atas pernyataan keuangan; menjaga **Akuntabilitas Profesi**, yang meliputi: tanggung jawab pada perencanaan dan pelaksanaan audit, tanggung jawab terhadap profesi, komitmen atas kebenaran dan keadilan, komitmen pada citra Akuntan, komitmen pada perilaku Akuntan, menghindari konspirasi dengan klien, pengungkapan rahasia informasi klien, kewajaran penentuan *fee* profesi, bebas dari target yg tidak realistis, komunikasi tertulis dengan akuntan terdahulu, dan terhindar dari *Related Party* (hubungan khusus); mengimplemetasikan **Etika Profesi**, yang meliputi: tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, objektif, independensi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan standar teknis; (2) **Variabel Komitmen Organisasi Kantor Akuntan Publik (KAP)**, merupakan keinginan seorang auditor dalam hal ini akuntan secara sukarela untuk selalu terlibat atau loyal terhadap KAP dengan tujuan tertentu. Komitmen organisasi KAP tercermin dari: adanya **Komitmen Afektif**, yang meliputi: kepedulian dalam karir akuntan, identifikasi dengan pekerjaan

akuntan, rasa memiliki akuntan, keterikatan emosional akuntan dengan organisasi KAP, Akuntan bagian dari KAP, makna pribadi pekerjaan akuntan; adanya **Komitmen Kontinum**, yang meliputi: kebutuhan akuntan dalam KAP, tanggung Jawab KAP, stabilitas kehidupan, pilihan pekerjaan lain, pengorbanan pribadi, tersedia alternatif pekerjaan lain selain akuntan; adanya **Komitmen Normatif**, meliputi: kewajiban pada organisasi KAP, kewajiban moral, perasaan bersalah saat meninggalkan KAP, kesetiaan (loyalitas) organisasi, merasa berhutang budi;(3)**Kualitas audit**, merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Kualitas audit ini tercermin dari:(a) **Orientasi masukan**, meliputi: Penugasan personel oleh KAP, untuk melaksanakan perjanjian, Konsultasi, Supervisi, Pengangkatan, Pengembangan profesi, Promosi dan Inspeksi; (b) **Orientasi Proses**, meliputi: Independensi, Kepatuhan pada standar audit, Pengendalian audit, dan Kompetensi auditor; (c) **Orientasi Keluaran**, meliputi: Kinerja auditor, Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien; dan Due professional care;(d) **Tindak lanjut atas rekomendasi audit**, meliputi: Jajaran manajemen klien mendukung implementasi rekomendasi Auditor; Peraturan internal klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit; Sistem di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit; Budaya di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Auditor; dan Fasilitas fisik di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari auditor.

Unit analisis penelitian adalah Kantor Akuntan Publik, sebagai sumber informasi adalah Akuntan yang berkerja pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Ukuran populasi penelitian ini adalah 417 Kantor Akuntan Publik. Ukuran sampel penelitian ditentukan oleh bentuk analisis sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan teknik *proportional simple random sampling*, diperoleh ukuran sampel 79 KAP. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Komunikasi Tidak langsung menggunakan Kuesioner sebagai instrumen, dan Teknik Komunikasi Langsung dilakukan dengan cara wawancara terbatas. Pengujian kesesuaian model, dilakukan dengan menggunakan beberapa indeks *goodness of fit test* (GFT), yaitu: nilai probabilitas (*p-value*) statistik *chi-square*, nilai *Root Means Square Error of Approximation* (RMSEA), *Goodness-of-fit Index* (GFI), *Adjusted Goodness-of-fit Index* (AGFI), *Normed Fit Index* (NFI), *Tucker-Lewis Index* (TLI) atau *Non Normed Fit Indeks* (NNFI), dan *Comparative Fit Indeks* (CFI). Pengujian dan kriteria kesesuaian model diringkaskan seperti terlihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 1.
Ukuran Goodness of Fit Test

UKURAN GOF	KRITERIA KESESUAIN MODEL	KRITERIA PENGUJIAN	IMPLIKASI PADA H ₀	KEPUTUSAN
P-value	1,00 (model <i>fit</i> sempurna)	$\geq 0,05$	Diterima	Model <i>fit</i>
RMSEA	0,00 (model <i>fit</i> sempurna)	$\geq 0,08$	Diterima	Model <i>fit</i>
GFI, AGFI, NFLTLI, dan CFI	0,00 (model tidak <i>fit</i>); 1,00 (model <i>fit</i> sempurna)	$\geq 0,90$	Diterima	Model <i>fit</i>

Sumber :Hair, et al (2006), dan Wijanto (2008).

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *Statistic F* dan uji *Statistic Student's t*. Untuk pengujian simultan dilakukan dengan uji *statistic F* dengan Kriteria: (1) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 *Riject*, sehingga H_1 diterima; (2) Jika nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 *Not Riject*, sehingga H_1 ditolak. Sedangkan untuk pengujian parsial, dilakukan dengan menggunakan statistik *student's t*, dengan kriteria: (1) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 *Riject*, sehingga H_1 diterima; (2) Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 *Not Riject*, sehingga H_1 ditolak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

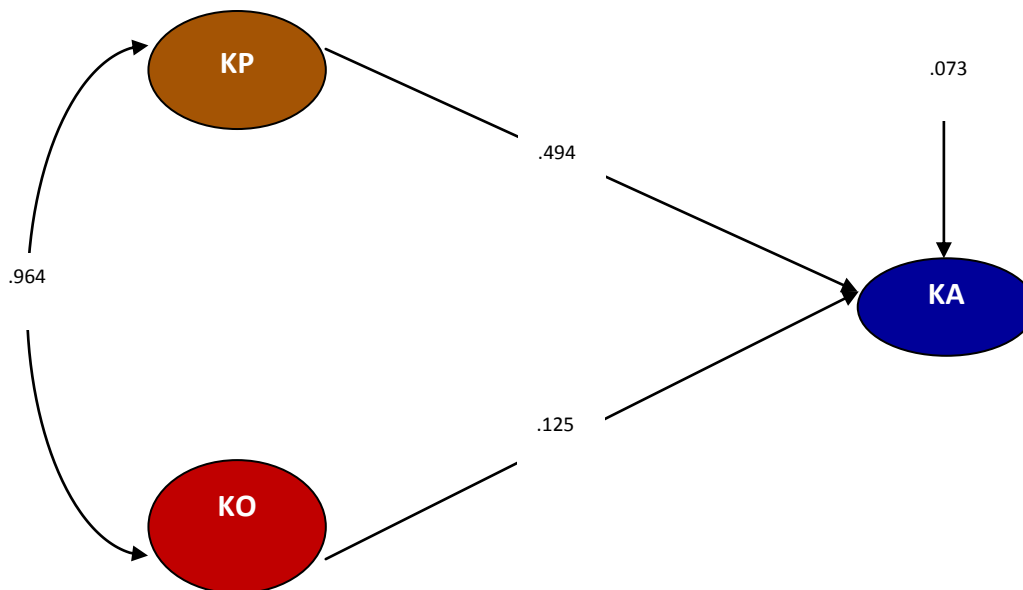
Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan tanggapan responden, yaitu 347 Akuntan dari 117 KAP selaku Auditor yang berpraktik pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia, dapat diringkaskan ke dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel2.
Rekapitulasi Hasil yang Dicapai
Masing-masing Variabel Laten/Variabel Teramati

VARIABEL LATEN/ VARIABEL TERAMATI		SKOR DICAPAI	SKOR IDEAL	(%)
1.	Komitmen Profesi Akuntan (KP)	31.607	41.640	75.91
a.	Ketaatan pada Standar profesi	6.531	8.675	75.29
b.	Akuntabilitas Profesi	14.509	19.085	76.02
c.	Etika Profesi	10.567	13.880	76.13
2.	Komitmen Organisasi KAP (KO)	22.013	29.495	74.63
a.	Komitmen Afektif	7.653	10.410	73.52
b.	Komitmen Kontinum	7.904	10.410	75.93
c.	Komitmen Normatif	6.456	8.675	74.42
3.	Kualitas Audit (AQ)	24.377	32.965	73.95
a.	Orientasi Masukan (<i>Input Oriented</i>)	8.579	12.145	70.64
b.	Orietasi Proses (<i>Process Oriented</i>)	5.090	6.940	73.34
c.	Orietasi Keluaran (<i>Outcome Oriented</i>)	4.001	5.205	76.87
d.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit	6.707	8.675	77.31

Sumber: Hasil Perhitungan WMS, 2012

Pengaruh komitmen profesi akuntan dan komitmen organisasi KAP terhadap kepuasan kerja auditor dalam implementasi audit independen atas laporan keuangan dan implikasinya terhadap kualitas audit. Secara rinci akan diuraikan berdasarkan hipotesis yang diajukan, secara keseluruhan model yang dihasilkan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.
Model Struktural Pengaruh
Komitmen Profesi (KP) dan Komitmen Organisasi (KO) terhadap Kualitas Audit (KA)

Uji *Goodness of fit Statistics*

Hasil ketepatan model yang diperoleh (pengujian model secara simultan atau keseluruhan) ditunjukkan oleh ukuran kesesuaian model (*Goodness of fit statistics*) dapat diringkaskan seperti terlihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Evaluasi Kriteria *Goodness of Fit Indices*

Kriteria	Hasil	Nilai Kritis	Evaluasi Model
χ^2 (CMIN) Df = 3557	3998,169	Diharapkan kecil	Marginal
Significance Probability	0,0000	$\geq 0,05$	Marginal
CMIN/DF	1,124	$\leq 2,00$	Baik
RMSEA	0.0640	$\leq 0,08$	Baik
Goodness of Fit Index (GFI)	0,89	$\geq 0,90$	Marginal
Normed Fit Index (NFI)	0,97	$\geq 0,90$	Baik

Sumber : Data primer diolah, 2012

Hasil pengujian model dengan memperhatikan nilai χ^2 , maka diperoleh nilai χ^2 besar dengan *Significance Probability* (0,000) lebih kecil dari 0,05. Tetapi karena rasio CMIN dengan DF masih kurang dari 2, maka dapat dinyatakan model struktural yang terbentuk dapat diterima (*fit* dengan data). Ukuran *Goodness of Fit Statistics* yang lainnya juga menunjukkan model masih dapat digunakan dimana RMSEA untuk model struktural 0,064 lebih kecil dari nilai kritis 0,8 dan *Normed Fit Index* (NFI) model 0,97 lebih besar dari nilai kritis (0,90). Adapun nilai GFI model masuk dalam kriteria marginal. Berdasarkan ukuran kecocokan model yang diperoleh dapat disimpulkan model struktural yang terbentuk sesuai dengan data dan dapat dikatakan memenuhi kriteria *Goodness of Fit*.

Hasil pengujian hipotesis "Komitmen profesi akuntan dan komitmen kantor akuntan publik secara signifikan **berpengaruh** positif terhadap kualitas audit, menunjukkan hasil yang terlihat pada Tabel 4.31 sebagai berikut:

Tabel 5.
Pengaruh KP dan KO terhadap KA

Koefisien R	p-value	F Change dan t _{Hitung}	R Square (R ²)	Ket
KP dan KO dengan KA = .961	.000	103,699	.924	H ₀ Reject
KP secara parsial terhadap KA = $(\beta_1=.629)*(r=.957)$.000	4.359	.601	H ₀ Reject
KO secara parsial terhadap KA = $(\beta_2=.341)*(r=.947)$.000	2.673	.323	H ₀ Reject

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Komitmen profesi akuntan dan komitmen organisasi kantor akuntan publik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun secara simultan. Persamaan terbentuk sebagai berikut:

$$KA = 0,429KP + 0,341KO + 0,076$$

Pengaruh komitmen profesi akuntan dan komitmen Organisasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh komitmen profesi akuntan dan komitmen Organisasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit sejalan dengan hasil penelitian Lie, Song dan Wong (2005) berkesimpulan bahwa komitmen organisasi KAP yang lebih tinggi cenderung memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Namun penelitian Lie, Song dan Wong tidak menjelaskan kenapa hanya komitmen organisasi yang diamati. Penelitian ini memperlihatkan bahwa komitmen profesi tidak kecil pengaruhnya terhadap kualitas audit. Sebagai anggota dari suatu profesi, akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga ketaatan pada standar perilaku etis mereka yang tertuang dalam standar profesi. Akuntan juga mempunyai tanggung jawab untuk kompeten dan menjaga integritas serta objektivitas mereka, ini menunjukkan perlunya akuntabilitas profesi tertanam pada diri akuntan. Ketaatan dan akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan etika profesi akuntan.

Komitmen profesi akuntan dan komitmen organisasi KAP berpengaruh secara bermakna terhadap kualitas audit, namun belum optimum. Hal ini terlihat bahwa masih ada faktor residu, yaitu faktor selain komitmen profesi akuntan dan komitmen organisasi KAP yang juga turut berpengaruh terhadap kualitas audit. Faktor residu tersebut diduga, adalah faktor fokus pada kepuasan klien, seperti (1) Perilaku auditor yang berorientasi pada klien, klien yang puas adalah prioritas utama auditor, namun tetap pada rambu-rambu (standar

profesi, akuntabilitas, etika profesi, komitmen afektif, komitmen normative, dan komitmen Kontinue), (2) Tujuan pribadi auditor dan organisasi KAP yang konsisten, kebersamaan, pembelajaran, dan berorientasi pada tindakan; (3) Hasrat dan kenikamatan, lingkungan organisasi KAP ditandai oleh adanya hasrat, kenikamatan, motivasi, komitmen, ilham dan semangat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: (1) Komitmen profesi akuntan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit; (2) Komitmen Kantor Akuntan Publik secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit; dan (3) Komitmen profesi akuntan dan komitmen Kantor Akuntan Publik secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian semakin luas peran tinggi komitmen profesi akuntan dan komitmen organisasi Kantor Akuntan Publik, maka akan semakin berimplikasi pada kualitas audit. Meskipun demikian masih ada faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas audit, ini terlihat belum optimalnya Komitmen profesi akuntan dan komitmen organisasi KAP terhadap implementasi audit independen atas laporan keuangan, diduga faktor fokus pada kepuasan klien, seperti: perilaku auditor yang berorientasi pada klien, tujuan pribadi auditor dan organisasi KAP yang konsisten (kebersamaan, pembelajaran, dan berorientasi pada tindakan).

REFERENSI

- Aranya, N., J. Polick, and J. Amemic. 1981. An Examination of Professional Commitment in Public Accounting. *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 6.No.4, pp21-280.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder and Mark S. Beasley. 2010. *Auditing & Assurance Services An Integrated Approach*. 13th Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Beasley, C., M. Defond, J. Jiambalvo, and K. R. Subramanyam, 1998, “ The Effect of Audit on The Quality of Earnings Management”, *Contemporary Accounting Research*, 15 (Spring).
- Becker, C.L. et al., 1998. The Effect of Audit Quality on Earnings Management. *Contemporary Accounting Research* 15 (1): 1-24.
- Besacier, Nathalie Gonthier dan Alain Schatt. 2007. Determinants of Audit Fees for French Quoted Firms. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 22 No. 2, pp. 139-160
- Boynton, William C., and Raymond N. Johnson 2005. *Modern Auditing: Assurance Services and the Integrity of Financial Reporting*. 8th Edition. New York : John Wiley and Sons, Inc.
- BPKP, 2008. *Peraturan BPK Nomor: 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK-RI.
- Bradley, S., Petrescu, A. and Simmons, R., 2004. *The impacts of human resource management practices and pay inequality on workers' job satisfaction* , Working Paper 031, Department of Economics, Lancaster University Management School, available at: <http://www.lums.lancs.ac.uk/publications/viewpdf/000276/>
- Bruynseels, Liesbeth W. Robert Knechel, and Marleen Willekens. 2011. Auditor Differentiation, Mitigating Management Actions, and Audit-Reporting Accuracy for Distressed Firms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*: February 2011, Vol. 30, No. 1, pp. 1-20.

- Bryant S. E., Moshavi, D., and T. V. Nugen, 2007. A Field Study on Organizational Commitment, Professional Commitment and Peer Mentoring. *Database for Advances in Information System*, 38 (2): 61-74
- Bulmer, Janelle, et al, 2004. The Diverse Roles of Professional Accountants in Business, *Working Paper Seminar*, pp. 10-11.
- Castle N G, 2007. Assessing Job Satisfaction of Nurse Aides In Nursing Homes: The Nursing Home Nurse Aide Job Satisfaction Questionnaire. *Journal of Gerontological Nursing*, 33 (5): 41 -47
- Chang, S., and Lee, M. 2006. Relationship Among Personality Traits, Job Characteristics, Job Satisfaction, and Organizational Commitment: An empirical study in Taiwan. *The Business Review*. Vol. 6., No. I, pp. 201-207
- Chen J., Silverthorne, C., and Hung, J. 2006. Organizational Communication, Job Stress, Organizational Commitment, Job Performance of Accounting Professionals in Taiwan and America. *Leadership and Organization Development Journal*, 27 (4): 242-249
- Choi, Jong. Hg., Jeong Bon Kim & Yoonseok Zang. 2006. *The Association between Audit Quality and Abnormal Audit Fees*. Melalui <http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOURResults.cfm?fromname=journalBrowse&journalid=845729>. [23/8/2011].
- DeAngelo, L.E 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*. (Desember) 183-199
- _____, 1981. Auditor Independent, "Low Balling", and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics* 3. Agustus. p. 113-127.
- Deis, D.R and G.A. Groux. 1992. Determinant of Audit Quality in The Public Sector. *The Accounting Review*. Juli. P. 463-479.
- Duff, Angus. 2004. Understanding Audit Quality: The View of Auditors, Auditees and Investors. <http://aaahg.org/AM2005/display.cfm?filename> [20/8/2011].
- Dye, R. 1993. Auditing Standards, Legal Liability and Auditor Wealth, *Journal of Political Economy*, Vol.101. pg 887-914
- Elder, Randal J. 1997. A Comment on Audit Quality in Audits of Federal Programs by Non-Federal Auditors. *Accounting Horizon* Vo.11 No.1. American Accounting Association
- Elitzur Rami dan Haim Failk, 1996. Planned Audit Quality. *Journal of Accounting & Public Policy*, 15.247-269.
- Feltham, G. A., J. S. Hughes, and D. A. Simunic. 1991. Empirical Assessment of The Impact of Auditor Quality on The Valuation Of New Issues. *Journal of Accounting & Economics* 14: 375-399.
- Ferguson, Andrew and Bill Rafuse, 2004. Who Audits the auditors ? The international Peer Review of the office of the auditors general of Canada-International *Journal of Government Auditing*, October.
- Ferris, KR, 1981, Organizational Commitment and Performance in a professional accounting firm. *Accounting Organization and Society*, Vol 6: 317-326
- Fogarty, T. J. 2011. The Social Construction of Research Advice: The American Accounting Association plays Miss Lonely hearts. *Accounting and the Public Interest* (11): 32-51
- Francis and Yu, 2009. Big 4 Office Size and Audit Quality, *The Accounting Review*, 84 (5), 1521.
- Frankel, R., M. Johnson and K. Nelson: 2002, "The Relation between Auditors' Fees for Nonaudit Services and Earnings Management", *The Accounting Review* 77(Suppl.), 71-105.
- Ghosh, Aloke dan Robert Pawlewicz. 2008. The Impact of Regulation on Auditor Fees: Evidence from me Sarbanes-Oxley Act. Melalui <http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOURResults.cfm?fromname=journalBrowse&journalid=845714>. [20/8/2011].
- Goodwin, Jenny dan David Goodwin. 1999. "Ethical Judgments Across Cultures: A Comparison between business Students from Malaysia and New Zealand". *Journal of Business Ethics* 18: 267-281.
- Gregson, T.J. Wendel, and J. Aono, 1994, Role Ambiguity, Role Conflict and Perceived environmental uncertainty: Are the scales measuring separate constructs for accountants?. *Behavioral Research In Accounting Journal*, No 6: pp 144-159.
- Gunther, Jeffery W and Robert and More, 2002. Auditing the auditors: Oversight or Overkill ? Federal Reserve Bank of Dallas *Economic and Financial Policy Review*, Vol 1 No.5
- Guy, M. C., Wayne Alderman and Alan J. Winters, 1996. *Auditing Forth Worth* : The Dryden Press, Hartcourt Brace College Publisher.
- Hall, M., D. Smith, and K. Langfield-Smith. 2005. Accountants' Commitment to Their Profession: Multiple dimensions of professional commitment and opportunities for future research. *Behavioral Research in Accounting*, 17: 89-109.
- Hay, David dan David Davis. 2002. The Voluntary Choice of An Audit of Any Level of Quality: *Auditing: A Journal of Paractice and Theory*. Vo. 23 No.2.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael Van Breda. 2000. *Accounting Theory*. 5th Edition, Irwin-McGraw-Hill
- Herrbach, Olivier. 2001. Audit Quality, Auditor Behaviour and the Psychological Contract. *The European Accounting Review* 2001, 10:4, 787-802
- Hoitash, Rani, Ariel Markelevich dan Charles A. Barragato. 2007. Auditor Fees and Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*. Vol.22 (8). pp. 761-786

- Hunt, Allen K. and Ayalew Lulseged. 2007. "Client importance and non-Big 5 auditors" reporting decisions" *Journal of Accounting and Public Policy*, Volume 26, Issue 2, March-April 2007, Pages 212-248
- Jeffrey, C., and N. Weatherholt. 1996. Ethical Development, Professional Commitment, and Rule Observance Attitudes: A study of CPAS and Corporate Accountants. *Behavioral Research in Accounting*, 8: 8-31.
- Jensen, Kevan L dan Jeff L. Payne, 2005. Audit Procurement: Managing Audit Quality and Audit Fee in Response to Agency Costs. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* Vo. 24 No. 2 Nopember 2005 pp27-48
- Kalbers, Lawrence P. and Timothy J. Fogarty, 1993."Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power". *A Journal of Practice and Theory*.,Vol 12.No. 1.
- Kearney, Edward F, Jeffrey W.Green, Roldan Fenandez and Cornelius E Tierney, 2006. *Federal Government Auditing: Laws, Regulations, Standards, Practices and Sarbanes-Oxley*. John Willey & Sons, Inc.
- Konrath, Laweey F. 2002, *Auditing Concepts and applications, A Risk-Analysis Approach*, 5th Edition, West Publishing Company.
- Krishnan, Jayanthi G. 2003. Audit Quality and the Pricing of Discretionary Accruals. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. 22(1): 109-126.
- _____, 2005. Audit Committee Quality and Internal Control: And Empirical Analysis. *The Accounting Review*.Vol. 80, No.2. pp 649-675.
- Lauwers, Timothy J., Robert Ramsay, David H. Sinosan., Jerry R. Strawser, 2007. *Auditing and Assurance Service*.Second Edition.McGraw-Hill.h-win. New York
- Lok, P., and J. Crawford, 2004. The Effect of Organizational Culture and Leadership Style on Job Satisfaction And Organizational Commitment: A Cross-National Comparison. *Journal of Management Development*, 23 (4): 321-338
- Lowensohn, S., L. E. Johnson., R. J. Elder dan S. P. Davies. 2007. "Auditor Specialization, Perceived Audit Quality, and Audit Fee in the Local Government Audit Market." *Journal Of Accounting and Public Policy*, 26,705-732.
- Malone, Charles F dan Robin W. Roberts. 1996. Factors Associated with the Incidence of Audit Quality. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* Vo. 15 No. 2.
- Marshall, Rex, Malcolm Smith, Robert Armstrong. 2010. *Ethical issues facing tax professionals: A comparative survey of tax agents and practitioners in Australia*. *Asian Review of Accounting*.Volume 18 Issue 3, pp. 197 – 220.
- Mautz, R.K dan H.A. Sharaf. 1993. *The Philosophy of Auditing*. Sarasota: American Accounting Association.
- McDowall, Tracey and Beverley Jackling. 2010. *Attitudes towards the accounting profession: an Australian perspective* *Asian Review of Accounting*. Volume 18 Issue 3, pp. 30-49.
- McPhail, K. J. 2001. The Ethical Challenges of Globalisation: Critical Reflections on the ISBEE 2nd World Congress in Sao Paulo, Brazil', *Business Ethics: A European Review*, 10, 78-82.
- _____, 2011 "A Review of The Emergence of Post-Secular Critical Accounting and a Provocation from Radical Orthodoxy." *Critical Perspectives in Accounting* 10.1016/j.cpa.2011.01.007.
- Meier, H.H dan J. Fuglister. 1992. How to Improve Audit Quality: Perceptions of Auditors and Clients. *The Ohio CPA Journal*.Juni. p. 21-24.
- Meyer JP, et al, 2003, Organizational Commitment and Job Performance: its the nature of the commitment that counts. *Journal of Applied Psychology*, Vol 74: 152-156
- Miller, C.L., D. B. Fedor dan R. J. Ramsay. 2006. Effect Discussion of Audit Reviews on Auditors Motivation and Performance. *Behavioral Research in Accounting*. Vol. 18
- Mills, David. 1993. *Quality Auditing*. First Edition.Capman and Hall.London UK.
- Paulin, Michèle, Ronald J. Ferguson, and Jasmin Bergeron, 2006. Service Climate and Organizational Commitment: The Importance of Customer Linkages. *Journal of Business Research*, Vol. 59, pp. 906–915
- Pemerintah Republik Indonesia, 2011. UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- Robbins, Stephen P., dan Timoty A Judge. 2009. *Organizational Behavior*. 13 Edition. Person Education, Inc. New Jersey.
- Schoeroeder M, S. J Salamon dan D, W, Vickey. 1986. Audit Quality: the Perseption Audit Committee, Chairperson and Audit Partners. *Auditing: A Journal Practice and Theory*. Vol 13 Supplement
- Sutton, S.G. 1993. Toward An Understanding of The Factors Affecting The Quality of The Audit Process. *Decision Sciences*.Vol. 24. p. 88-105.
- Teoh, S.H dan T.J.Wong. 1993. Perceived Audit Quality and The Earnings Response Coefficient. *The Accounting Review*.April. p. 346-366
- Ward, Suzanne Pinac, Dan R. Ward, dan Alan B. Deck. 1993. "Certified Public Accountants: Ethical Perception Skills and Attitudes on Ethics Education". *Journal of Business Ethics* 12: 601-610.

Pengaruh Spesialisasi Auditor, Ukuran KAP, Prediksi Kebangkrutan, dan Ketidakstabilan Profitabilitas Terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraud* pada Laporan Keuangan

RURI AULIA

FITRIANY*

Universitas Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of auditor industry specialization, CPA firms size, company's bankruptcy prediction, and instability of profitability on the probability of fraudulent financial reporting. The probability of fraudulent financial reporting is measured by using M-Score (Beneish, 1999; Beneish, Lee, and Nichols, 2013). The research is conducted by using samples of 240 nonfinancial and non-investment companies listed on Indonesian Stock Exchange in 2007-2011 consisting of 120 companies suspected of committing fraud and 120 companies which allegedly did not commit fraud. The samples are matched based on company size.

The results show that the probability of fraudulent financial reporting is lower when a company uses industry specialist auditor and/or auditor of Big 4 as their external auditor. On the other hand, the probability of fraudulent financial reporting is found to be higher when the company faces a greater likelihood of bankruptcy and when the profitability is unstable.

Keywords: Auditor Industry Specialization, Bankruptcy Prediction, CPA Firms Size, Fraudulent Financial Reporting, M-Score

*Corresponding author: fitri_any@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Tujuan penyajian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam penentuan keputusan ekonomi. Informasi yang disediakan harus dapat diandalkan (*reliable*) karena dapat mempengaruhi ketepatan keputusan yang diambil oleh pengguna laporan. Laporan keuangan akan kehilangan keandalannya jika mengandung salah saji secara material. Hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan yang signifikan antara kondisi perusahaan yang tergambar dari laporan yang disajikan dengan kondisi yang sebenarnya. Menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, salah saji dapat terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja oleh penyaji laporan keuangan (*error*) atau karena adanya manipulasi laporan keuangan (*fraud*).

Fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang ditujukan untuk menghilangkan hak seseorang atau pihak lain (Elder, et al., 2009). Pada suatu entitas, *fraud* dapat dilakukan melalui manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva, maupun dengan cara korupsi (ACFE, 2012). Meskipun merupakan yang paling jarang terjadi, *fraud* yang dilakukan dengan cara manipulasi laporan keuangan terbukti memiliki dampak kerugian yang paling tinggi terhadap suatu entitas dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan oleh dua jenis *fraud* lainnya (ACFE, 2008, 2010 dan 2012).

Terjadinya *fraud* dapat dipicu oleh adanya faktor insentif/tekanan, kesempatan, dan sikap/rasionalisasi atau yang dikenal dengan *The Fraud Triangle* (Elder, et al., 2009). Keberadaan faktor tersebut menyebabkan semua perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, tidak luput dari risiko terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan program anti-*fraud* untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud* dengan cara menekan faktor pemicu tersebut. Pembentukan program anti-*fraud* membutuhkan keterlibatan beberapa pihak, seperti komite audit, dewan komisaris, manajemen perusahaan, auditor internal, auditor independen, spesialis anti-*fraud*, dan karyawan (AICPA, n.d.).

Auditor independen memiliki peran yang penting dalam menilai kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, mereka harus memiliki keahlian yang memadai (kompeten) dan bersifat independen dari perusahaan yang diaudit (Elderet *al.*, 2009). Kompetensi dan independensi ini memiliki keterkaitan dengan kualitas audit yang merupakan probabilitas gabungan dari kemampuan seorang auditor untuk menemukan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut (DeAngelo, 1981). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit dengan kualitas yang lebih baik dapat dihasilkan oleh auditor KAP Big 4 (Francis dan Yu, 2009) dan auditor spesialis (Balsam *et al.*, 2003).

Carcello dan Nagy (2002) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh yang dimiliki oleh spesialisasi industri auditor terhadap perusahaan yang melakukan *fraud* dan menemukan bahwa auditor spesialis mampu menekan terjadinya *fraud*. Dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, hasil yang serupa diperoleh oleh Carcello dan Nagy (2004), yaitu terdapatnya hubungan yang negatif antara spesialisasi industri auditor dengan *fraud*. Dari penelitian Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) tersebut juga dapat diketahui bahwa kecenderungan terjadinya *fraud* lebih rendah pada perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP Big 6 dibandingkan dengan yang diaudit oleh KAP non-Big 6.

Selain faktor auditor, kondisi perusahaan juga dapat mempengaruhi terjadinya *fraud*. Meskipun tidak semua perusahaan yang melakukan *fraud* mengalami kebangkrutan, Deloitte Forensic Center (2008) menemukan bahwa *fraud* lebih cenderung ditemukan pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Selain itu, profitabilitas perusahaan yang tidak konsisten atau memadai dinilai sebagai salah satu faktor yang signifikan untuk memprediksi terjadinya *fraud* (Bell dan Carcello, 2000).

Untuk memprediksi apakah terdapat *fraud* pada laporan keuangan, dapat digunakan model M-Score (Beneish, 2009 dan Beneish, Lee & Nichols, 2013) yang memanfaatkan

rasio-rasio keuangan yaitu: (1) *days in receivables index*, (2) *gross margin index*, (3) *asset quality index*, (4) *sales growth index*, (5) *accruals atau total accruals to total assets*, (6) *depreciation index*, (7) *sales general and administrative expenses index*, dan (8) *leverage index*. Model ini diusulkan oleh Beneish (1999) karena dinilai mampu memprediksi terjadinya *fraud*. Model ini juga digunakan pada penelitian Beneish, Lee & Nichols (2013) untuk mendeteksi *fraud* pada kasus-kasus *fraud* pada tahun 1998-2002 dan mampu mendeteksi adanya *fraud* yang terjadi pada sebagian besar perusahaan sebelum kasusnya diungkapkan ke publik.

Meskipun tidak terdeteksi oleh auditor eksternal dan tidak terungkap ke publik, tetap terdapat kemungkinan bahwa suatu perusahaan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya. Penulis tertarik untuk menggunakan model M-score (Beneish, 1999 dan Beneish, Lee & Nichols, 2013) untuk menilai kemungkinan terjadinya *fraud* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah nilai M-score (Beneish, 1999 dan Beneish, Lee & Nichols, 2013) diperoleh, pada penelitian ini kemudian akan dilakukan pengujian faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* tersebut.

Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada model yang digunakan oleh Carcello dan Nagy (2002). Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara model penelitian ini dengan model tersebut. Variabel dependen yang mereka gunakan adalah *fraud* berdasarkan *Accounting and Auditing Enforcement Releases* (AAERs) yang dirilis oleh *Securities Exchange Commisions* (SEC). Sementara itu, variabel dependen pada penelitian ini menggunakan model M-Score (Beneish, 1999; Beneish, Lee & Nichols, 2013) untuk memprediksi terjadinya *fraud* atau tidak pada laporan keuangan. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian variabel dan penambahan variabel independen. Penyesuaian yang dilakukan di antaranya adalah ukuran KAP dan prediksi kebangkrutan dalam penelitian ini

yang dijadikan sebagai variabel independen. Hal ini dikarenakan hubungan antara variabel tersebut dengan *fraud* dinilai masih jarang diteliti. Variabel independen yang ditambahkan adalah ketidakstabilan profitabilitas. Penambahan ini mengacu pada penelitian Bell dan Carcello (2000) yang menemukan bahwa profitabilitas yang tidak konsisten atau memadai merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Dengan demikian, diharapkan model yang dihasilkan mampu mencapai tujuan penelitian, yaitu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh spesialisasi industri auditor, ukuran KAP, prediksi kebangkrutan, dan ketidakstabilan profitabilitas terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan dapat didefinisikan sebagai kontrak di mana *principal* menunjuk *agent* untuk bertindak atas nama mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam struktur perusahaan, yang berperan sebagai *agent* adalah manajer perusahaan yang ditunjuk dan diberi kepercayaan oleh pemegang saham (*principal*). Salah satu tugas dan wewenang yang dimiliki oleh manajer adalah pengambilan keputusan mengenai hal-hal tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Dengan wewenang tersebut dan motivasi tertentu, terdapat kemungkinan manajer akan mengambil keputusan yang lebih memaksimalkan utilitasnya dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham dikarenakan adanya *moral hazard* (Scott, 2009).

Untuk mengetahui kondisi perusahaan, pemegang saham mewajibkan manajer untuk memberikan laporan, di antaranya adalah laporan keuangan. Meskipun penyajian laporan keuangan dilakukan, tanpa kontrol yang baik dan dengan adanya *moral hazard*, kesalahan yang material dalam laporan keuangan tetap dapat terjadi. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, diperlukan jasa auditor independen yang diharapkan mampu mendeteksi salah saji

2.3 Spesialisasi Industri Auditor dan Pengukurannya

Maletta & Wright (1996) menyatakan bahwa auditor spesialis industri adalah auditor yang memiliki pengetahuan yang spesifik mengenai industri tertentu tersebut sehingga dapat memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai karakteristik perusahaan dalam industri tersebut.

Salah satu proksi spesialisasi yang paling umum digunakan adalah berdasarkan pangsa pasar, di antaranya pada penelitian Hogan dan Jeter (1999), Calcetto dan Nagy (2002 dan 2004), Gul, Fung, & Jaggi (2009), dan Balsam, Krishnan, & Yang (2003). Pengukuran pangsa pasar biasanya melibatkan penjualan klien, total aktiva klien, dan/atau jumlah klien dalam suatu industri. Suatu auditor dikatakan spesialis industri apabila mencapai pangsa pasar tertentu (*dummy variable*) ataupun dengan pengukuran kontinyu (tidak membagi auditor menjadi spesialis dan non-spesialis industri) dengan asumsi semakin besar pangsa pasar yang dimiliki, semakin spesialis auditor tersebut (Carcello dan Nagy, 2002 dan 2004).

2.4 KAP dan Pengukurannya

Audit atas laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Untuk mendapatkan izin tersebut, akuntan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17/PMK.01/2008.

Menurut Adityasih (2010), ukuran KAP dapat dinyatakan berdasarkan jumlah staf profesional yang dimiliki. KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 400 orang dinilai sebagai KAP besar, KAP dengan staf profesional antara 100-400 orang dikelompokkan ke dalam KAP menengah, dan KAP yang memiliki staf profesional yang kurang dari 100 orang termasuk ke dalam KAP kecil. Selain pengelompokan tersebut, KAP juga sering dikelompokkan menjadi KAP Big 4 (PricewaterhouseCooper, Deloitte, KPMG, dan Ernst and Young) dan KAP non-Big 4.

2.5 Pengukuran Prediksi Kebangkrutan

Salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan adalah model Zmijewski (1984) yang menggunakan rasio ROA, *leverage*, dan likuiditas. Model (Zmijewski, 1984) ini menghasilkan skor yang mencerminkan prediksi kebangkrutan. Semakin tinggi skor tersebut, semakin tinggi masalah keuangan yang dihadapi perusahaan sehingga prediksi kebangkrutan juga semakin tinggi. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$ZFC = -4.336 - 4.513(\text{ROA}) + 5.679(\text{FINL}) + 0.004(\text{LIQ})$$

ZFC = Skor model Zmijewski (1984)

ROA = *Return on Assets*, rasio laba bersih terhadap total aktiva

FINL = *Financial Leverage*, rasio total *debt* terhadap total aktiva

LIQ = *Liquidity*, rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraud* pada Laporan Keuangan

Carcello dan Nagy (2002) menyatakan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi pada suatu industri mampu memberikan jasa pengauditan yang lebih berkualitas jika dibandingkan dengan auditor yang tidak spesialis pada industri tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Balsam, *et al.* (2003) yang menemukan hubungan positif antara spesialisasi industri auditor dengan kualitas audit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa auditor spesialis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.

Keahlian yang lebih baik dapat diperoleh dari pemahaman yang lebih baik pula. Menurut Maletta & Wright (1996), auditor spesialis memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik perusahaan dalam industri tertentu. Dengan pemahaman yang komprehensif tersebut, auditor diharapkan akan mampu mendeteksi salah

saji yang material dalam laporan keuangan, baik dikarenakan ketidaksengajaan (*error*) maupun karena upaya manipulasi pada laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan oleh Owoso, Messier, dan Lynch (2002) yang menemukan bahwa auditor spesialis lebih baik dalam mendeteksi *error* dan Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) yang menemukan hubungan yang negatif signifikan antara spesialisasi auditor dengan *fraud*.

Pada penelitian ini, spesialisasi auditor diprediksi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan suatu perusahaan diprediksi akan lebih kecil jika perusahaan tersebut menggunakan jasa auditor spesialis industri. Hal ini dikarenakan keahlian dan pemahaman auditor spesialis yang lebih superior dalam mendeteksi *fraud*. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada laporan keuangan.*

2.6.2 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraud* pada Laporan Keuangan

Auditor yang berasal dari KAP yang tergolong ke dalam kelompok Big 4 memiliki kualitas audit yang lebih baik jika dibandingkan dengan auditor non-Big 4 (Francis dan Yu, 2009). Menurut Francis dan Yu (2009), kemampuan menghasilkan kualitas yang lebih baik tersebut didukung oleh pengalaman dan jumlah *peer* yang lebih banyak untuk melakukan konsultasi auditor yang dimiliki oleh KAP Big 4.

Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) menemukan bahwa ukuran KAP memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa auditor KAP

Big 4 dapat menjalankan tugas pengauditan dengan lebih baik yang salah satunya diindikasikan oleh kemampuan menemukan salah saji yang material sehingga *fraud* pada laporan keuangan dapat dicegah dengan lebih baik pula.

Ukuran KAP diprediksi akan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan suatu perusahaan diprediksi akan lebih kecil jika perusahaan tersebut menggunakan auditor KAP Big 4 sebagai auditor independen. Hal ini dikarenakan kemampuan KAP Big 4 yang lebih baik dalam mendeteksi terjadinya *fraud* yang didukung oleh pengalaman, jumlah *peer* untuk konsultasi, dan keahlian yang lebih superior dibandingkan KAP non-Big 4. Berdasarkan argumen tersebut, penulis akan menguji hipotesis berikut:

H2: *Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada laporan keuangan.*

2.6.3 Pengaruh Prediksi Kebangkrutan terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraud* pada Laporan Keuangan

Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) memprediksi terdapat hubungan yang positif antara kondisi keuangan yang bermasalah dengan *fraud*. Meskipun memiliki koefisien yang positif, hubungan antara kondisi keuangan yang diprosikan oleh skor model Zmijewski (1984) dengan *fraud* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek di Amerika Serikat tersebut ditemukan tidak signifikan. Deloitte Forensic Center (2008) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara kebangkrutan dengan *fraud* pada perusahaan Amerika Serikat dan menemukan bahwa perusahaan yang bangkrut memiliki kecenderungan tiga kali lebih besar diindikasikan melakukan *fraud* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bangkrut.

Kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan suatu perusahaan pada penelitian ini diduga akan lebih tinggi jika prediksi kebangkrutan perusahaan juga lebih tinggi. Hal ini dikarenakan lebih tingginya tekanan yang dihadapi oleh manajemen perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasi perusahaan. Salah satu aktivitas yang mungkin dilakukan oleh manajemen tersebut adalah memanipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Prediksi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada laporan keuangan.*

2.6.4 Pengaruh Ketidakstabilan Profitabilitas terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraud* pada Laporan Keuangan

Bell dan Carcello (2000) menemukan bahwa profitabilitas relatif yang tidak konsisten atau memadai adalah salah satu faktor yang signifikan dalam memprediksi *fraud*. Dengan kata lain, kemungkinan suatu perusahaan melakukan *fraud* akan lebih tinggi jika perusahaan tersebut memiliki profitabilitas yang tidak konsisten atau tidak memadai.

Serupa dengan penelitian Bell dan Carcello (2000), ketidakstabilan profitabilitas pada penelitian ini diekspektasikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Hal ini dikarenakan profitabilitas yang tidak stabil menunjukkan fluktuasi yang kurang *preferable* bagi investor sehingga terdapat tekanan yang lebih besar bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan. Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berdasarkan penjelasan di atas adalah:

H4: *Ketidakstabilan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada laporan keuangan.*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel yang diambil merupakan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang tidak tergolong ke dalam industri keuangan dan industri investasi pernah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2007-2011 dan memiliki data yang lengkap dan dapat digunakan untuk keseluruhan model (diperoleh 633 observasi). Pengecualian industri tersebut dikarenakan rasio laporan keuangan yang tidak relevan dengan pengukuran variabel dependen. Salah satu alasan data tidak dapat digunakan adalah karena adanya nilai variabel laporan keuangan bernilai 0 sehingga tidak bisa menghasilkan rasio yang dibutuhkan untuk pengukuran variabel dependen. Sampel diambil berdasarkan data yang tersedia, yaitu dengan memilih perusahaan yang dinilai memiliki kemungkinan terjadinya *fraud* berdasarkan M-Score (Beneish, 1999; Beneish, Lee & Nichols 2013) dan mengambil pasangan perusahaan yang tidak melakukan *fraud* berdasarkan ukuran perusahaan (total aktiva). Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah observasi yang diperoleh adalah 240 perusahaan yang terdiri dari 120 perusahaan yang diduga melakukan *fraud* dan 120 perusahaan yang diduga tidak melakukan *fraud*.

3.2 Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Carcello dan Nagy (2002) dengan modifikasi berupa penyesuaian dan penambahan variabel. Model penelitian terdiri dari tiga model dengan perbedaan masing-masing model terletak pada pengukuran spesialisasi industri auditor.

Model 1

$$P_FRAUD = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ SPECC} + \alpha_2 \text{ BIG4} + \alpha_3 \text{ ZFC} + \alpha_4 \text{ Un_Profit} + \alpha_5 \text{ SIZE} + \alpha_6 \text{ GRW} + \alpha_7 \text{ YLISTED} + \varepsilon$$

Model 2

$$P_FRAUD = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ SPEC30} + \alpha_2 \text{ BIG4} + \alpha_3 \text{ ZFC} + \alpha_4 \text{ Un_Profit} + \alpha_5 \text{ SIZE} + \alpha_6 \text{ GRW} + \alpha_7 \text{ YLISTED} + \varepsilon$$

Model 3

$$P_FRAUD = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ SPEC20} + \alpha_2 \text{ BIG4} + \alpha_3 \text{ ZFC} + \alpha_4 \text{ Un_Profit} + \alpha_5 \text{ SIZE} + \alpha_6 \text{ GRW} + \alpha_7 \text{ YLISTED} + \varepsilon$$

Definisi Variabel:

P_FRAUD = *Dummy variabel* kemungkinan terjadinya *fraud* dengan menggunakan model Beneish (1999) dan Beneish, Lee & Nichols (2013), bernilai 1 jika diprediksi *fraud* dan bernilai 0 apabila sebaliknya.

SPECC = Merupakan pengukuran spesialisasi industri auditor menggunakan pengukuran kontinyu

SPEC30 = *Dummy variable* spesialisasi industri auditor dengan metode pengukuran SPEC30 yang bernilai 1 apabila perusahaan diaudit oleh auditor spesialis industri dan bernilai 0 apabila sebaliknya

SPEC20 = *Dummy variable* spesialisasi industri auditor dengan metode pengukuran SPEC30 yang bernilai 1 apabila perusahaan diaudit oleh auditor spesialis industri dan bernilai 0 apabila sebaliknya

ZFC = Merupakan nilai model Zmijewski untuk prediksi kebangkrutan

Un_Profit = Merupakan pengukuran ketidakstabilan profitabilitas yang diprosikan oleh nilai mutlak pertumbuhan *Return on Assets* (ROA)

SIZE = Merupakan pengukuran ukuran perusahaan dengan proksi berupa nilai Ln total aktiva perusahaan

GRW = Merupakan nilai pertumbuhan perusahaan yang diprosikan oleh total aktiva

YLISTED = Merupakan umur terdaftarnya perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam tahun

ε = *Error*

3.3 Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan model pendeteksian *fraud* Beneish (1999) dan Beneish, Lee & Nichols (2013) yang terdiri dari rasio-rasio pada laporan keuangan dengan menggunakan nilai -1,78 sebagai nilai *cut-off*. Perusahaan dengan nilai

lebih besar dari nilai *cut-off* diprediksi melakukan *fraud* dan diberi nilai 1, dan sebaliknya diberi nilai 0.

$$\text{M-Score} = -4.84 + .920 \cdot \text{DSRI} + .528 \cdot \text{GMI} + .404 \cdot \text{AQI} + .892 \cdot \text{SGI} + .115 \cdot \text{DEPI} - .172 \cdot \text{SGAI} - .327 \cdot \text{LEVI} + 4.679 \cdot \text{TATA}$$

Definisi Variabel:

DSRI = *Days Sales in Receivables Index*

GMI = *Gross margin Index*

AQI = *Asset quality Index*

SGI = *Sales growth Index*

DEPI = *Depreciation Index*

SGAI = *Sales General and Administrative Expenses Index*

LEVI = *Leverage Index*

TATA = *Total Accrual to Total Assets*

3.3.2 Variabel Independen

Spesialisasi Industri Auditor

Pengukuran spesialisasi industri auditor pada penelitian ini mengacu pada Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) dan Reichelt dan Wang (2009). Spesialisasi industri auditor pada penelitian ini diidentifikasi berdasarkan persentase total aset dari klien yang diaudit oleh suatu KAP di suatu industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam suatu industri tertentu. Industridiklasifikasikan berdasarkan Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA)

$$\text{SPEC} = \frac{\text{Jumlah Klien KAP dalam Industri}}{\text{Jumlah Seluruh Emiten dalam Industri}} \times \frac{\text{Rerata Aset Klien KAP dalam Industri}}{\text{Rerata Aset Seluruh Emiten dalam Industri}}$$

Penelitian ini menggunakan tiga pengukuran spesialisasi industri auditor. Pertama, menggunakan pengukuran kontinyu seperti yang digunakan oleh Carcello dan Nagy (2002 dan 2004), yaitu nilai yang dihasilkan dari rumus di atas. Spesialisasi industri ini diberi kode SPECC. Pengukuran kedua, auditor spesialis adalah auditor memiliki klien dengan persentase total aset lebih besar dari 30% dari total aset keseluruhan perusahaan dalam suatu industri

(Reichelt dan Wang, 2009) . Spesialisasi industri ini diberi kode SPEC30. Pengukuran ketiga serupa dengan pengukuran kedua. Namun, nilai minimum untuk menjadi auditor spesialis adalah 20% seperti yang digunakan oleh Carcello dan Nagy (2002 dan 2004).

Ukuran KAP

Pengukuran ukuran KAP menggunakan *variabel dummy* di mana KAP yang berafiliasi dengan BIG 4, yaitu diberi nilai 1, sedangkan yang lainnya diberi nilai 0.

Prediksi Kebangkrutan

Pengukuran prediksi kebangkrutan pada penelitian ini menggunakan model kebangkrutan Zmijewski (1984). Semakin tinggi skor, semakin tinggi prediksi kebangkrutan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$ZFC = -4.336 - 4.513(\text{ROA}) + 5.679(\text{FINL}) + 0.004(\text{LIQ})$$

Di mana:

ZFC = Skor yang digunakan sebagai proksi variabel prediksi kebangkrutan.

ROA = *Return on Assets*, rasio laba bersih terhadap total aktiva

FINL = *Financial Leverage*, rasio total *debt* terhadap total aktiva

LIQ = *Liquidity*, rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar

Ketidakstabilan Profitabilitas

Variabel ini diproksikan dengan nilai mutlak perubahan *Return on Assets*. Semakin tinggi nilai mutlak yang dihasilkan, semakin tidak stabil profitabilitas perusahaan. Untuk memperoleh nilai tersebut, digunakan rumus:

$$\text{Un_Profit} = |\text{ROA}_t - \text{ROA}_{t-1}|$$

Di mana:

ROA_t = Nilai ROA pada tahun laporan keuangan.

3.3.3 Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan

Pengukuran variabel ini dengan menggunakan nilai *log natural* total aktiva. Ukuran perusahaan diekspektasikan dapat memiliki hubungan yang positif maupun negatif dengan kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Hubungan yang positif berlandaskan pada penelitian Dechow *et al.* (2011). Mereka berpendapat bahwa perusahaan yang besar memiliki bisnis yang kompleks sehingga lebih cenderung terjadi manipulasi laporan keuangan. Sementara itu, hubungan yang negatif diprediksi juga dapat terjadi seperti yang diekspektasikan pada penelitian Carcello dan Nagy (2004). Sistem informasi akuntansi dan kontrol internal yang lebih baik pada perusahaan yang besar diekspektasikan akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*.

Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan dengan variabel dependen pada penelitian ini diprediksikan memiliki hubungan yang positif. Hubungan ini mengacu pada penelitian Carcello dan Nagy (2004) yang menilai adanya faktor *pressure* yang lebih kuat terhadap manajemen pada perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi yang mendorong perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya. Carcello dan Bell (2000) juga menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan yang cepat merupakan faktor yang signifikan untuk memprediksi *fraud*. Pada penelitian ini, pertumbuhan perusahaan diprediksi dengan pertumbuhan total aktiva. Pertumbuhan ini dapat dirumuskan dengan:

$$GRW = (TA_t - TA_{t-1}) / TA_{t-1}$$

Di mana:

TA = Total Aktiva

Umur Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Pengukuran variabel ini menggunakan satuan tahun. Rumus yang digunakan untuk menghitung umur perusahaan yang terdaftar di BEI adalah sebagai berikut:

$$YLISTED = DLISTED/365$$

Dimana:

YLISTED = Jumlah tahun perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

DLISTED = Jumlah hari perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Beneish (1999) menemukan hubungan bahwa sebagian besar perusahaan yang melakukan *fraud* memiliki umur yang lebih muda dalam hal terdaftar di bursa efek. Dari penelitian Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) dapat diketahui bahwa *fraud* memiliki hubungan yang negatif dengan umur perusahaan terdaftar di bursa. Oleh karena itu, umur perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperkirakan memiliki hubungan yang negatif dengan kemungkinan terjadinya *fraud*.

3.3.4 Metode Pengolahan Data

Software yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini antara lain adalah SPSS 20, EVIEWS, dan Ms Excel. Karena variabel dependen penelitian ini merupakan bersifat dikotomi, regresi yang digunakan adalah regresi logistik.

4. PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini, observasi dianggap *outlier* apabila berada diluar rata-rata ± 3 standar deviasi. Observasi yang dianggap *outlier* di-*winsorized*. Data statistik deskriptif setelah setelah dilakukan *winsorization* dapat dilihat pada Tabel 4.1 Statistik Deskriptif (Lampiran)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa rata-rata P_FRAUD adalah 0,5. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang diduga melakukan *fraud* adalah sama dengan jumlah perusahaan yang diduga tidak melakukan *fraud*. Hal ini sesuai dengan

metode pemilihan sampel, yaitu mengambil masing-masing satu perusahaan yang diduga tidak melakukan *fraud* untuk setiap perusahaan yang diduga melakukan *fraud*.

Winsorization dilakukan pada beberapa variabel, antara lain adalah untuk empat *outlier* nilai pengukuran spesialisasi secara kontinyu (SPECC) yang berada di atas rata-rata + 3 standar deviasi, empat *outlier* prediksi kebangkrutan (ZFC) yang berada di atas rata-rata + 3 standar deviasi dan satu *outlier* di bawah rata-rata - 3 standar deviasi, lima *outlier* perbedaan profitabilitas yang berada di atas rata-rata + 3 standar deviasi, dan tiga *outlier* pertumbuhan perusahaan yang berada di atas rata-rata + 3 standar deviasi.

Nilai SPECC terbesar terdapat pada KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekanyang memiliki 69,03% *Miscellaneous Industry* pada tahun 2011. Pangsa pasar yang tinggi ini didukung oleh total aktiva PT Astra International Tbk yang juga jauh lebih besar dibandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama. Namun, karena terdapat *outlier* dalam penelitian ini, dilakukan *Winsorization* untuk pangsa pasar tertinggi tersebut dan beberapa pangsa pasar lainnya sehingga memiliki nilai 0,48 atau 48,02%.

Nilai ZFC yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan sampel berada dalam rentang -10,27 sampai 9,36. Setelah dilakukan *winsorization* nilai ZFC terbesar menjadi 2,58 dan nilai terkecil menjadi -5,39.

Rata-rata perubahan ROA dari suatu tahun dengan tahun sebelumnya hanyalah 0,08 dengan nilai terkecil mendekati angka 0 dan nilai terbesar mencapai 1,51. Setelah dilakukan *winsorization* nilai terbesar menjadi 0,43. Dengan nilai terkecil yang tetap, diperoleh rata-rata yang baru, yaitu 0,06.

Nilai pertumbuhan yang paling rendah adalah -0,59 sementara nilai tertingginya adalah 21,01. Nilai yang sangat tinggi tersebut terjadi pada PT Citra Kebun Raya Agri Tbk yang mengalami peningkatan total aktiva yang cukup tinggi, yaitu dari 58,59 Milyar pada

tahun 2007 menjadi 1,29 Trilyun pada tahun 2008. Setelah di-winsorized nilai terbesar menjadi 1,77.

4.2 Analisis Hasil Regresi

Semua model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki data yang sesuai dengan model sehingga layak untuk dilakukan penelitian. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit* yang melebihi 0,05. Sementara itu, nilai *Omnibus Test of Model Coefficients* memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa terdapat variabel tidak terikat yang mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Kemampuan variabel tidak terikat menjelaskan variabel terikat pada penelitian ini adalah 33,9% pada Model 1, 32,9% pada Model 2, dan 33,7% pada Model 3. Sementara itu keakurasian Model 1 adalah sebesar 73,3%, Model 2 sebesar 71,7%, dan Model 3 sebesar 72,1. Hasil pengujian dengan *software* SPSS untuk pengujian tersebut dirangkum pada tabel 4.1 pada lampiran.

4.2.1 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap P_FRAUD

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai B spesialisasi industri auditor pada tiap model adalah positif. Nilai sig spesialisasi industri auditor Model 1 (SPECC) dan Model 3 (SPEC20) menunjukkan nilai yang lebih rendah dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor dengan menggunakan pengukuran spesialisasi SPECC dan SPEC20 memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan (P_FRAUD) pada tingkat keyakinan 95%. Sementara itu, nilai sig spesialisasi industri auditor Model 2 (SPEC30) lebih tinggi dari 0,05 namun lebih rendah dari 0,10. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel SPEC30 memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel P_FRAUD pada tingkat keyakinan 90%

Berdasarkan hasil yang ditemukan pada Model 1, Model 2, dan Model 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Dengan demikian, dapat

diinterpretasikan bahwa semakin spesialis suatu auditor, semakin rendah kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan yang diaudit (interpretasi Model 1) atau kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan akan lebih rendah jika perusahaan tersebut diaudit oleh auditor spesialis (interpretasi Model 2 dan Model 3). Hubungan ini sesuai dengan penelitian Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) yang menemukan bahwa spesialisasi industri auditor memiliki hubungan negatif dengan *fraud* yang terjadi di bursa efek di Amerika Serikat.

Hubungan tersebut diduga dikarenakan oleh keahlian auditor spesialis yang lebih baik dalam mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh upaya *fraud* sehingga dapat mengurangi *opportunity* manajer untuk melakukan *fraud*. Keahlian tersebut dapat diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai suatu industri yang dihasilkan dari pelatihan-pelatihan maupun dari pengalaman audit yang lebih banyak dikarenakan pangsa pasar yang juga lebih besar.

4.2.2 Pengaruh Ukuran KAP terhadap P_FRAUD

Baik Model 1, Model 2, maupun Model 3 memiliki nilai B pengukuran KAP yang negatif dengan nilai sig berada dibawah 0,00. Hal ini menunjukkan terdapatnya pengaruh negatif dari ukuran KAP terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan perusahaan pada tingkat keyakinan 99%. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan akan lebih rendah jika perusahaan tersebut diaudit oleh auditor KAP Big 4.

Pengaruh negatif ini dari ukuran KAP terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan diduga disebabkan oleh kemampuan auditor KAP Big 4 dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Jumlah perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 juga relatif lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor KAP Big 4 dapat memperoleh

engagement hour yang lebih banyak sehingga dapat memperoleh pengalaman yang juga lebih banyak. Dengan demikian, auditor KAP Big 4 dapat memperoleh pengetahuan dan keahlian yang lebih baik dalam mendeteksi terjadinya *fraud*.

Ketiga model di atas konsisten menyatakan bahwa hubungan ukuran KAP dengan kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) yang menemukan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ukuran KAP dengan *fraud* pada laporan keuangan.

4.2.3 Pengaruh Prediksi Kebangkrutan terhadap P_FRAUD

Dengan mengamati tabel 4.1, dapat diketahui bahwa nilai sig ZFC untuk masing-masing model berada dibawah 0,05. Artinya, variabel ZFC mempengaruhi variabel P_FRAUD secara signifikan. Sementara itu, nilai B Model 1, Model 2, dan Model 3 masing-masing adalah 0,238, 0,243, dan 0,230. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh variabel ZFC dengan variabel P_FRAUD tersebut adalah positif. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari prediksi kebangkrutan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan pada tingkat keyakinan 95%. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai prediksi kebangkrutan (ZFC) suatu perusahaan maka kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangannya juga akan meningkat. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya *pressure* yang semakin kuat jika nilai prediksi kebangkrutannya suatu perusahaan juga semakin tinggi. Manajer menghadapi tekanan untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan dan agar keberlangsungan operasi perusahaan tidak terganggu.

Pengaruh positif dari prediksi kebangkrutan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* tersebut sesuai dengan pendapat Carcello dan Nagy (2004) yang menilai bahwa terdapat hubungan yang positif antara *fraud* dengan permasalahan keuangan. Namun demikian, mereka tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

Hasil ini mendukung Deloitte Forensic Center (2008) yang juga menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kebangkrutan lebih cenderung mengalami kebangkrutan.

4.2.4 Pengaruh Ketidakstabilan Profitabilitas terhadap P_FRAUD

Nilai B yang positif dan nilai sig. yang lebih kecil dari 0,05 pada variabel Un_Profit setiap model mengindikasikan terdapatnya pengaruh positif yang signifikan pada tingkat keyakinan 95% dari variabel Un_Profit terhadap variabel P_FRAUD.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketidakstabilan profitabilitas mempengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan secara positif dan signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Semakin tidak stabil profitabilitas suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan yang diindikasikan melakukan *fraud*. Hubungan ini dapat terjadi karena tekanan dari investor yang tinggi kepada manajemen pada saat profitabilitas tidak stabil. Untuk menghadapi hal tersebut, terdapat kemungkinan manajer akan melakukan manipulasi atas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Bell dan Carcello (2000) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang tidak konsisten atau memadai merupakan faktor yang signifikan dalam memprediksi *fraud*.

4.2.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap P_FRAUD

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap P_FRAUD

Nilai B untuk variabel SIZE pada Model 1 seperti yang terdapat pada tabel 4.15 adalah 0,324. Sementara itu, nilai sig. variabel adalah 0,021 atau lebih rendah dari 0,05. Artinya, variabel ukuran perusahaan tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel P_FRAUD. Semakin tinggi ukuran perusahaan, kecenderungan perusahaan tersebut akan diindikasikan melakukan *fraud* juga akan semakin tinggi.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% untuk keseluruhan model. Penelitian ini

konsisten dengan temuan Dechow, *et al*, (2011) namun bertolak belakang dengan pendapat Carcello dan Nagy (2002 dan 2004). Hubungan negatif yang signifikan tersebut diduga disebabkan oleh kompleksitas yang dimiliki oleh perusahaan yang berukuran besar. Perusahaan besar seringkali memiliki bisnis yang kompleks dan beroperasi dalam berbagai lini bisnis. Hal tersebut dapat menyebabkan *fraud* menjadi lebih sulit untuk dideteksi sehingga dapat meningkatkan peluang manajemen perusahaan untuk melakukan *fraud*.

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap P_FRAUD

Nilai sig. pada setiap model yang lebih rendah dari 0,01 dan nilai B yang positif mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dengan tingkat keyakinan 99%. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai pertumbuhan perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut akan diindikasikan melakukan *fraud* pada laporan keuangannya.

Pengaruh positif ini diduga disebabkan oleh tekanan yang lebih tinggi pada manajer perusahaan, terutama untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan Bell dan Carcello (2000) yang menyatakan *fraud* lebih cenderung terjadi pada perusahaan yang pertumbuhannya cepat. Hasil penelitian ini juga membuktikan pendapat Carcello dan Nagy (2004). Meskipun memprediksi terdapatnya hubungan yang positif, mereka tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan.

Pengaruh Umur Perusahaan Terdaftar di BEI terhadap P_FRAUD

Dengan mengamati tabel 4.1, dapat diketahui bahwa nilai sig. masing-masing model lebih rendah dari 0,05. Nilai B setiap model juga sama, yaitu negatif pada semua model. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh umur perusahaan terdaftar di BEI terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan adalah negatif dengan tingkat keyakinan 95%. Artinya, semakin muda umur perusahaan, semakin tinggi kecenderungan akan tergolong ke dalam perusahaan yang diindikasikan melakukan *fraud*.

Pengaruh negatif dari umur perusahaan terdaftar di BEI terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan diduga diakibatkan oleh perbedaan tekanan yang dihadapi manajemen pada perusahaan yang baru terdaftar dengan yang telah lama terdaftar. Perusahaan yang umur terdaftarnya masih muda berkemungkinan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mencapai target-target tertentu.

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Carcello dan Nagy (2002 dan 2004) dan Beneish (1999). Mereka menemukan bahwa kemungkinan terjadinya *fraud* lebih tinggi pada perusahaan yang lebih muda dalam hal terdaftar di masing-masing bursa efek.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini ditujukan terutama untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh spesialisasi industri auditor, ukuran KAP, prediksi kebangkrutan perusahaan, dan ketidakstabilan profitabilitas terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan dengan menggunakan model M-Score (Beneish, 1999 dan Beneish, Lee & Nichols, 2013).

Spesialisasi industri auditor dan ukuran KAP ditemukan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dengan kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan akan lebih rendah jika perusahaan tersebut menggunakan auditor spesialis dan/atau auditor KAP Big 4 sebagai auditor independennya. Sementara itu, pengaruh prediksi kebangkrutan dan ketidakstabilan profitabilitas terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* ditemukan positif dan signifikan yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya *fraud* akan lebih tinggi pada perusahaan yang prediksi kebangkrutan dan ketidakstabilan profitabilitasnya yang juga tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan dengan tidak terlepas dari adanya beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian-penelitian sejenis yang berikutnya diharapkan mampu meminimalisasi keterbatasan-keterbatasan yang ada. Berikut beberapa keterbatasan dan saran penelitian:

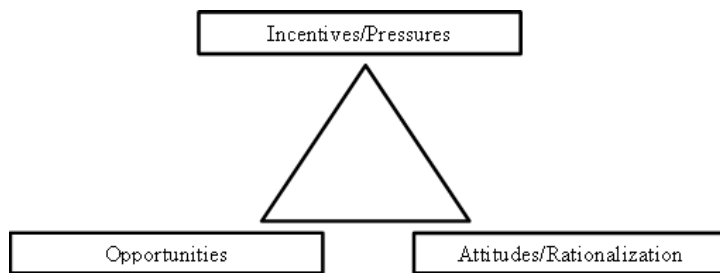
- a. Penelitian ini meneliti pengaruh beberapa faktor terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dalam keuangan. Kemungkinan terjadinya *fraud* itu sendiri diprediksi dengan menggunakan Model M-Score (Beneish, 1999 dan Beneish, Lee & Nichols, 2013). Meskipun model tersebut dinilai mampu memprediksi sebagian besar perusahaan yang melakukan *fraud* di Amerika Serikat, belum terdapat pembuktian empiris model dengan *fraud* yang terjadi di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menguji keakuratan Model M-Score dengan perusahaan yang terbukti *fraud* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Penelitian ini menggunakan pengukuran tertentu untuk mengukur variabel-variabel yang diuji. Terdapat beberapa pengukuran lain yang dapat digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain, misalnya pengukuran *fraud* lainnya, pengukuran spesialisasi industri lainnya, pengukuran prediksi kebangkrutan lainnya, dan lain sebagainya.
- c. Sample pada penelitian ini dinilai masih sedikit dikarenakan terbatasnya data yang bisa diperoleh dan digunakan dalam model. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan industri finansial dan industri investasi sebagai sampel penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperoleh sampel yang lebih banyak dan bisa melakukan pengujian berdasarkan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityasih, Tia. Analisa Pengaruh Pendidikan Profesi, Pengalaman Auditor, Jumlah klien (Audit capacity) dan ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit. *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* 2008.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2008. Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2010. Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2012. Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse.
- Balsam, S., Krishnan, J., & Yang, J. S. 2003. Auditor industry specialization and earning quality. *Auditing: Journal of Practice & Theory*, 22, 71-97.
- Bell, T. B., dan Carcello, J. V. 2000. A decision aid for assessing the likelihood of fraudulent financial reporting. *Auditing: Journal of Practice & Theory*, 19, 1, 169
- Beneish, M.D. 1999. The detection of earnings manipulation. *Financial Analyst Journal*, 55, 5, 24-39
- Beneish, M.D. 1999a. Incentives and penalties related to earnings overstatements that violate GAAP. *The Accounting Review* (74): 425-457.
- Beneish, M.D., Lee, C.M.C., & Nichols, D.G., 2013. Earning Manipulation and Expected Returns. *Financial Analyst Journal*, 69, 2, 57-82
- Carcello, J. V., dan Nagy, A. L. 2002. Auditor industry specialization and fraudulent financial reporting. *Proceedings of the 2002 Deloitte & Touche/University of Kansas Symposium on Auditing Problems*.
- Carcello, J. V., dan Nagy, A. L. 2004. Client Size, Auditor Specialization and Fraudulent Financial reporting. *Managerial Auditing Journal*, 19, 5, pg. 651.
- Deloitte Forensic Center. 2008. Ten things about bankruptcy and fraud.
- Dechow, P. M., Ge, W., Larson, C.R., & Sloan, R.G. 2011. Predicting Material Accounting Misstatements. *Contemporary Accounting Research*, 28, 1 pp. 17-82
- Departemen Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- Elder, R.J., Beasley, M.S., Arens, A.A., dan Jusuf, A.A. 2009. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach An Indonesian Adaptation 12th*, Singapore, Prentice Hall.
- Francis, J.R. & Yu, M.D. 2009. Big 4 Office Size and Audit Quality. *The Accounting Review*, 84, 5, 1521-1552.
- Gul, F.A., Fung, S.Y.K., & Jaggi, B.. 2009. Earnings Quality: Some Evidence on the Role of Auditor Tenure and Auditors' Industry Expertise. *Journal of Accounting and Economics* 47, 265-287.
- Hogan, C.E. dan D.C. Jeter. 1999. Industry specialization by auditors. *Auditing : A Journal of Practice and Theory*, 18: 1, 1-17.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat.
- Jensen, M. C., dan W. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360
- Krishnan, G.V. 2003. Does big 6 auditor industry expertise constrain earnings management? *Accounting Horizons*, 17(supplement), 1-16.
- Maletta, M., & Wright, A. 1996. Audit Evidence Planning: An Examination of Industry Error Characteristics. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 15 (1), 71-86.
- Owhoso, V. E., Messier, W. F., & Linch, J. G. (2002). Error detection by industry-specialized teams during sequential audit review. *Journal of Accounting Research*. 40(3), 883-900.
- Reichelt, K. J. dan D. Wang. 2010. National and office-specific measures of auditor expertise and effects on audit quality. *Journal of Accounting Research* 48 (3): 647-686.
- Scott, W. R. 2009. *Financial Accounting Theory 5th edition*. Toronto: Prentice Hall.
- Zmijewski, M. E. 1984. Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models, *Journal of Accounting Research*, 22, 59-82.

LAMPIRAN

Gambar 2.1 *The Fraud Triangle*



Sumber : Elder, *et al.*, (2009)

Tabel 2.1

Keterangan Variabel M-Score Beneish (1999) dan Beneish, Lee, & Nichols (2013)

Variabel	Variabel & Rumus	Keterangan
DSR	<i>Days Sales in Receivables Index</i> $(\text{Receivables}_t / \text{Sales}_t) / (\text{Receivables}_{t-1} / \text{Sales}_{t-1})$	Menangkap distorsi pada piutang yang dapat diakibatkan oleh penggelembungan pendapatan
GMI	<i>Gross Margin Index</i> $\text{Gross Margin}_{t-1} / \text{Gross Margin}_t$	Memburuknya margin memicu manipulasi laba
AQI	<i>Asset Quality Index</i> $[1 - (\text{PPE}_t + \text{CA}_t) / \text{TA}_t] / [1 - (\text{PPE}_{t-1} + \text{CA}_{t-1}) / \text{TA}_{t-1}]$ PPE = Net PPE, CA=Current Assets, TA=Total Assets	Menangkap distorsi pada <i>other assets</i> yang dapat disebabkan oleh kapitalisasi <i>expenditure</i> yang berlebihan
SGI	<i>Sales growth Index</i> $\text{Sales}_t / \text{Sales}_{t-1}$	Pengelolaan persepsi pertumbuhan yang berkelanjutan dan kebutuhan modal yang memicu manipulasi penjualan dan laba
DEPI	<i>Depreciation Index</i> $\text{Depreciation Rate}_{t-1} / \text{Depreciation Rate}_t$	Menangkap penurunan <i>rate</i> depresiasi yang merupakan bentuk manipulasi laba
SGAI	<i>Sales General and Administrative Expenses Index</i> $(\text{SGA}_t / \text{Sales}_t) / (\text{SGA}_{t-1} / \text{Sales}_{t-1})$ SGA = Sales and General Administrative Expense	Penurunan efisiensi pemasaran dan administrasi yang memicu manipulasi laba
LEVI	<i>Leverage Index</i> $\text{Leverage}_t / \text{Leverage}_{t-1}$	Meningkatkan leverage memperketat <i>constraint</i> utang dan memicu manipulasi laba
TATA	<i>Accrual to Total Assets</i> $(\text{Income Before Extraordinary Items} - \text{Cash from Operations}) / \text{Total Assets}_t$	Menangkap profit akuntansi yang tidak didukung oleh profit kas

Sumber: Beneish (1999) dan Beneish, Lee, & Nichols (2013), telah diolah kembali

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P_FRAUD	240	0	1	0,5000	0,50104
SPECC	240	0	0,48	0,1623	0,15277
SPEC30	240	0	1	0,2792	0,44953
SPEC20	240	0	1	0,4000	0,49092
BIG4	240	0	1	0,4875	0,50089
ZFC	240	-5,93	2,58	-2,9470	1,62032
Un_Profit	240	0	0,43	0,0629	0,09127
SIZE	240	56.711	29.527.466	4.330.253	5.809.953
GRW	240	-0,59	1,77	0,2025	0,37481
YLISTED	240	0,07	34,41	13,9878	7,36834

SPECC = Spesialisasi auditor dengan pengukuran kontinyu, SPEC30 = *dummy variable*, 1 jika memiliki pangsa pasar lebih dari 30%, 0 jika sebaliknya, SPEC20 = *dummy variable*, 1 jika memiliki pangsa pasar lebih dari 20%, 0 jika sebaliknya, BIG4 = *dummy variable*, 1 jika berafiliasi dengan Big 4, 0 jika sebaliknya, ZFC = nilai Zmijewski (1984) untuk memprediksi kebangkrutan, Un_Profit = Nilai mutlak selisih ROA untuk menilai stabilitas profitabilitas, SIZE = ukuran perusahaan yang diprosikan dengan *log natural* dari total aktiva, GRW = pertumbuhan perusahaan yang diprosikan pertumbuhan total aktiva, YLISTED = Umur perusahaan terdaftar di BEI.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian dengan SPSS

Variabel	Expected Sign	MODEL 1			MODEL 2			MODEL 3					
		B	Sig.	Exp(B)	B	Sig.	Exp(B)	B	Sig.	Exp(B)			
Constant		-7,077	0,029	0,001	-5,576	0,069	0,004	-6,070	0,051	0,002			
SPECC	-	-3,332	0,021	**	0,036								
SPEC30	-				-0,674	0,086	*	0,510					
SPEC20	-							-0,814	0,029	**	0,443		
BIG4	-	-1,415	0,000	***	0,243	-1,713	0,000	***	0,180	-1,558	0,000	***	0,211
ZFC	+	0,238	0,016	**	1,269	0,243	0,014	**	1,275	0,230	0,020	**	1,259
Un_Profit	+	4,177	0,022	**	65,154	4,138	0,021	**	62,686	4,274	0,020	**	71,829
SIZE	+/-	0,324	0,012	**	1,382	0,263	0,036	**	1,300	0,280	0,026	**	1,323
GRW	+	1,612	0,002	***	5,015	1,667	0,002	***	5,294	1,625	0,002	***	5,079
YLISTED	-	-0,047	0,036	**	0,954	-0,046	0,041	**	0,955	-0,044	0,048	**	0,957
<i>Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit</i>			Sig.	0,840		Sig.	0,166		Sig.	0,394			
<i>Omnibus Test of Model Coefficients</i>			Sig.	0,000		Sig.	0,000		Sig.	0,000			
<i>Nagelkerke R Square</i>			R ²	0,339		R ²	0,329		R ²	0,337			
Keakurasian Model			Overall %	73.3		Overall %	71.7		Overall %	72.1			

*, **, *** signifikan pada alpha 10%, 5%, 1%

SPECC = Spesialisasi auditor dengan pengukuran kontinyu, SPEC30 = dummy variable, 1 jika memiliki pangsa pasar lebih dari 30%, 0 jika sebaliknya, SPEC20 = dummy variable, 1 jika memiliki pangsa pasar lebih dari 20%, 0 jika sebaliknya, BIG4 = dummy variable, 1 jika berafiliasi dengan Big 4, 0 jika sebaliknya, ZFC = nilai Zmijewski (1984) untuk memprediksi kebangkrutan, Un_Profit = Nilai mutlak selisih ROA untuk menilai stabilitas profitabilitas, SIZE = ukuran perusahaan yang diprosikan dengan log natural dari total aktiva, GRW = pertumbuhan perusahaan yang diprosikan pertumbuhan total aktiva, YLISTED = Umur perusahaan terdaftar di BEI.

Pengaruh *Tenure* Audit dan Rotasi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Ukuran Kantor Akuntan Publik sebagai Variabel Moderasi

**ELIZABETH ROSALINA GULTOM
FITRIANY***

Universitas Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tenure* audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit, pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit, serta pengaruh moderasi ukuran KAP terhadap hubungan *tenure* audit dan kualitas audit. *Tenure* audit dibedakan menjadi *tenure* KAP dan *tenure* audit partner (AP). Rotasi auditor dibedakan menjadi rotasi KAP dan rotasi audit partner (AP). Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 hingga 2011, kecuali perusahaan yang bergerak di industri keuangan. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan kualitas laba dengan menggunakan tingkat akrual diskresioner yang dihitung dengan menggunakan model Kasznic (1999). *Tenure* KAP dan rotasi KAP terbukti tidak berpengaruh kuadrat terhadap kualitas audit. *Tenure* AP dan rotasi AP juga tidak terbukti memiliki hubungan kuadrat dengan kualitas audit. Ukuran KAP terbukti berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas audit. Ditemukan pula bahwa pengaruh ukuran KAP memoderasi hubungan antara *tenure* KAP dan kualitas audit. Akan tetapi, tidak ditemukan adanya pengaruh ukuran KAP dalam memoderasi hubungan antara *tenure* AP dan kualitas audit. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pengkajian lebih lanjut terkait efektivitas peraturan yang membatasi *tenure* audit.

Kata Kunci: *Tenure* Audit, Rotasi Auditor, Kualitas Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik

Abstract: This research aims to examine the effect of audit tenure and auditor rotation on audit quality, the effect of audit firm size on audit quality, and the moderating effect of audit firm size on the relationship between audit tenure and audit quality. Audit tenure refers to audit firm tenure and audit partner tenure. Auditor rotation refers to audit firm rotation and audit partner rotation. The research samples are public companies that are listed in Indonesia Stock Exchange during 2004-2011 periods exclude the companies in financial industry. Audit quality's proxy is earnings quality which is measured by the level of discretionary accrual (Kasznic, 1999). This research finds that audit firm tenure and audit firm rotation have no effect on audit quality. Audit partner tenure and audit partner rotation also have no effect on audit quality. There is a positive of audit firm size on audit quality. But, the evidences that support the moderating effect of audit firm size on the relationship between audit partner tenure and audit quality are insufficient. In the other hand, moderating effect of audit firm size on the relationship between audit firm tenure and audit quality shows that the engagement with Big X auditor will give a positive impact on audit quality. The results of this research show that the regulation that limits the audit tenure is a subject of further evaluation.

Keywords: Audit Tenure, Auditor Rotation, Audit Quality, Audit Firm Size

* Corresponding author: fitri_any@yahoo.com

1. LATAR BELAKANG

Struktur hubungan pemilik dan pengelola perusahaan yang terpisah seperti pada perusahaan terbuka pada umumnya, membawa konsekuensi munculnya ketimpangan informasi (*asymmetric information*) di antara kedua pihak tersebut. Salah satu sarana untuk menjembatani ketimpangan ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh pihak pengelola perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia – IAI, 2009). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi hal yang penting.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan keinginan (*willingness*) auditor untuk melaporkan *accounting breaches* di dalam sistem akuntansi klien auditnya. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan fungsi dari kemahiran teknis / kompetensi dari auditor dan independensi auditor relatif terhadap manajemen perusahaan sehingga membuat ia mampu melaporkan *accounting breaches* tersebut. Maka, peningkatan kualitas audit dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan independensi auditor. Peningkatan kompetensi auditor diperoleh dari pemahaman yang baik atas klien dan lingkungan bisnisnya sehingga memungkinkan auditor untuk mendeteksi adanya kecurangan dan praktik-praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan. Sedangkan independensi merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga oleh auditor agar tetap objektif dalam melakukan proses audit.

Skema pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor menjadi salah satu solusi yang muncul untuk mencapai tingkat kualitas audit yang baik. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan meminimalisasi kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara auditor dan kliennya yang dapat menurunkan independensi auditor. Di Indonesia, pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik, yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Pada tahun 2008, peraturan tersebut direvisi kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008. Peraturan ini merevisi peraturan pada tahun 2002 dengan mengubah batas maksimum bagi KAP untuk mengaudit kliennya dari 5 tahun menjadi 6 tahun berturut-turut.

Pada prakteknya, kewajiban rotasi KAP di Indonesia ini menimbulkan skema rotasi KAP semu. KAP di Indonesia melakukan pergantian komposisi *partner* tanpa melakukan perubahan afiliasi internasionalnya. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP tertentu wajib mengganti KAP-nya setelah

6 tahun jangka waktu perikatan audit. Jika perusahaan mengganti KAP-nya dengan KAP lain yang memiliki afiliasi internasional yang sama dengan KAP sebelumnya maka perusahaan tersebut melakukan rotasi KAP semu. Rotasi ini dikatakan sebagai rotasi KAP semu karena pergantian komposisi *partner* yang dilakukan oleh KAP bertujuan agar terjadi perubahan nama KAP walaupun sebenarnya tidak terjadi perubahan di dalam KAP itu sendiri. Sehingga sebenarnya KAP yang mengaudit perusahaan tersebut masih sama dengan KAP sebelumnya.

Hal yang menjadi pemicu perdebatan atas peraturan pembatasan *tenure* audit melalui rotasi auditor ini adalah tentang bagaimanakah pengaruh pembatasan *tenure* audit melalui rotasi AP dan rotasi KAP terhadap kualitas audit: apakah tujuan peraturan, yakni peningkatan kualitas audit, benar-benar tercapai? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara *tenure* audit dan kualitas audit, di mana *tenure* audit yang semakin panjang akan menurunkan kualitas audit. Semakin panjang *tenure* audit akan membuat terbangunnya kedekatan hubungan antara auditor dan kliennya yang dapat mengerosi aspek independensi auditor (Carey dan Simnett, 2006). Selain masalah independensi, *tenure* audit yang panjang juga akan membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor menjadi sebuah rutinitas belaka. *Tenure* audit yang panjang juga membuat tidak adanya inovasi dalam prosedur audit dan terbangunnya kedekatan antara auditor dan klien yang dapat mengurangi *professional skepticism* (Shockley, 1981) dan menurunkan kewaspadaan auditor dalam menangkap adanya indikasi anomali dalam laporan keuangan klien (Arrunada dan Paz-Ares, 1997). Hal-hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan kualitas audit.

Namun, di sisi lain terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa *tenure* audit dan kualitas audit berhubungan secara positif, di mana semakin panjang *tenure* audit akan meningkatkan kualitas audit. Argumen tentang hubungan positif ini terkait dengan peningkatan kompetensi auditor, di mana semakin panjang *tenure* audit akan meningkatkan pemahaman auditor atas klien dan industrinya sehingga audit yang dilakukan menjadi semakin berkualitas seiring berjalannya waktu (Myers et al., 2003). Hal ini juga didukung oleh Geiger dan Raghunandan (2002) yang menemukan bahwa kegagalan audit paling sering terjadi pada periode awal perikatan audit. Oleh karena itu, *tenure* audit yang semakin panjang akan menurunkan tingkat kegagalan audit dan meningkatkan kualitas audit.

Sejalan dengan hubungan antara *tenure* audit dan kualitas audit, penelitian yang meneliti pengaruh antara rotasi AP dan rotasi KAP dengan kualitas audit juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang mendukung adanya rotasi AP dan rotasi KAP berpendapat bahwa peraturan ini akan mencegah terbentuknya hubungan jangka panjang antara klien dan auditor yang dapat menurunkan independensi (Catanach dan Walker, 1999). Jika *tenure* audit dibatasi dengan rotasi auditor, akan lebih mudah bagi auditor untuk menghadapi tekanan-tekanan dari pihak manajemen (AICPA, 1992). Fitriany (2011) juga menunjukkan adanya hubungan positif antara rotasi AP dan kualitas audit pada perusahaan publik di Indonesia.

Pihak yang tidak mendukung diberlakukannya peraturan rotasi auditor pada dasarnya memahami adanya kemungkinan manfaat dari aturan rotasi auditor tersebut. Namun, pihak ini

mempermasalahkan kemungkinan adanya *excess* biaya implementasi dibandingkan dengan manfaat yang diterima dari kebijakan tersebut, baik oleh auditor ataupun klien (AICPA, 1992). Terkait dengan rotasi AP Arrunada dan Paz-Ares (1997) berpendapat bahwa auditor terdahulu tidak dapat mentransfer seluruh pemahamannya atas klien kepada auditor yang menggantikannya. Hal ini akan mengurangi efektivitas dan efisiensi audit yang dilakukan sehingga menurunkan kualitas audit. Perihal peraturan rotasi KAP, Petty dan Cuganesan (1996) berpendapat bahwa peraturan tersebut akan menimbulkan keengganan bagi KAP untuk melakukan spesialisasi di suatu industri. Hal ini berarti tidak adanya keahlian yang mendalam di industri tertentu, padahal spesialisasi industri telah terbukti menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kualitas audit (O'Kefee, 1994; Owroso, Messier dan Linch, 2002; Dowling dan Moroney, 2008). AICPA (1992) menyatakan bahwa tidak ada bukti-bukti empiris yang memperlihatkan bahwa peraturan yang mewajibkan adanya rotasi KAP akan memberikan manfaat bagi kualitas audit. Senada dengan pernyataan AICPA, praktek di Indonesia juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rotasi KAP dan kualitas audit pascaimplementasi peraturan yang mewajibkan rotasi KAP (Fitriany, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tenure* audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit di Indonesia. Penelitian ini akan melanjutkan penelitian dari Fitriany et al. (2011) tentang pengaruh *tenure* audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit dalam rangka mengevaluasi efektivitas peraturan pembatasan *tenure* audit dengan mewajibkan rotasi AP dan rotasi KAP. Serupa dengan penelitian Chi dan Huang (2005) yang dilakukan di Taiwan, Fitriany et al. (2011) menemukan adanya hubungan kuadrat antara *tenure* audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit yang diprosikan dengan *discretionary accrual* / akrual diskresioner (DAC). Namun, terdapat beberapa perbedaan di antara kedua penelitian ini. Chi dan Huang (2005) menggunakan model *forward-looking* (Dechow et al., 2003) untuk mengukur DAC, sementara Fitriany et al. (2011) menggunakan model Kasznik (1999). Chi dan Huang (2005) mengambil sampel perusahaan dari periode 1998-2001, sementara Fitriany et al. (2011) mengambil sampel dari periode 1998-2008 dengan mengeluarkan periode tahun 2002-2003.

Fitriany et al. (2011) melakukan penelitian pengaruh *tenure* audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit di Indonesia pada periode prapenerapan dan pascapenerapan regulasi yang membatasi jangka waktu perikatan audit sampai tahun 2008. Kualitas audit diprosikan dengan tingkat akrual diskresioner. Penelitian ini akan memperpanjang periode pengamatan sampai tahun 2011. Penelitian ini juga ingin menguji bagaimana pengaruh ukuran KAP memoderasi hubungan antara *tenure* audit terhadap kualitas audit. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Ukuran KAP yang berbeda terbukti menunjukkan kualitas audit yang berbeda (Teoh dan Wong, 1993; Becker et al., 1998, Francis et al., 1999). Selain itu, perbedaan ukuran KAP ini akan berdampak pada seberapa cepat KAP tersebut mampu mencapai tingkat pemahaman klien yang mendalam (Chi dan Huang, 2005). Maka, penggunaan ukuran KAP sebagai variabel moderasi bertujuan untuk melihat apakah hubungan antara *tenure* audit dan rotasi auditor

terhadap kualitas audit dipengaruhi secara tidak langsung oleh efek moderasi ukuran KAP pada model yang bersifat kuadrat.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh *tenure* audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit, Bagaimanakah pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit, bagaimanakah pengaruh ukuran KAP dalam memoderasi hubungan antara *tenure* audit dan kualitas audit?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi auditor dan KAP terkait usaha untuk meningkatkan kualitas audit melalui peningkatan kompetensi dan independensi. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, sebagai pihak yang berperan dalam menetapkan peraturan atas auditor dan Kantor Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi dan membuat peraturan yang terkait dengan auditor, Kantor Akuntan Publik dan isu-isu yang berkembang di dalamnya. Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi apakah peraturan yang membatasi jangka waktu perikatan audit di Indonesia sudah tepat dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi investor dan calon investor dalam menentukan faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan jenis KAP yang digunakan oleh perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh *tenure* audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit, khususnya terkait hubungan yang bersifat kuadrat di antara ketiganya. Melalui penelitian ini juga dapat dikembangkan penelitian-penelitian selanjutnya dalam lingkup *tenure* audit, rotasi AP dan rotasi KAP serta kualitas audit.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.2 Rotasi auditor dan *Tenure* Audit

2.2.1 Regulasi tentang Rotasi auditor *Partner* dan Rotasi Kantor Akuntan Publik di Indonesia

Skandal Enron dan WorldCom yang terjadi di Amerika Serikat turut memberi pengaruh pada pengaturan profesi akuntan publik di Indonesia. Pengaturan atas profesi akuntan publik dan jasa-jasa yang diberikannya dianggap perlu untuk dilakukan demi menjaga kualitas audit dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, meregulasikan pembatasan-pembatasan terkait jasa audit yang dapat diberikan oleh akuntan publik dan KAP. Pemberian jasa-jasa oleh akuntan publik dan KAP diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini kemudian diperbaharui kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KM K.06/2003. Selanjutnya, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang menyempurnakan dan mengakhiri pemberlakuan kedua KMK sebelumnya.

Ketentuan tentang pembatasan masa perikatan audit KAP dan akuntan publik serta komposisi KAP diatur dalam PMK No.17/PMK.01/2008 Pasal 3 (lihat Lampiran 2). Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Batas waktu maksimal pemberian jasa audit (*tenure* KAP) oleh suatu KAP kepada perusahaan adalah 6 tahun berturut-turut. Setelah perusahaan menggunakan jasa suatu KAP selama 6 tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti KAP untuk audit tahun berikutnya (rotasi KAP).
2. Batas waktu maksimal pemberian jasa audit oleh auditor (*tenure* AP) kepada perusahaan adalah 3 tahun berturut-turut. Setelah perusahaan menggunakan jasa seorang auditor selama 3 tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti auditor untuk audit tahun berikutnya (rotasi AP).
3. Perusahaan dapat menggunakan jasa KAP dan/atau auditor yang telah mencapai batas maksimal tersebut kembali setelah perusahaan diaudit oleh KAP dan/atau auditor lain selama satu tahun buku.
4. Peraturan perubahan komposisi akuntan publik pada suatu KAP berimplikasi pada kewajiban rotasi KAP. KAP yang berganti rekan (sehingga berganti nama) dan/atau melakukan perubahan komposisi akuntan publiknya, namun 50% atau lebih akuntan publiknya masih sama, dianggap sebagai KAP yang sama.

Skema ini menimbulkan dua macam rotasi KAP yang mungkin terjadi, yakni rotasi KAP riil dan rotasi KAP semu. Rotasi KAP riil terjadi ketika benar-benar terjadi perubahan KAP yang mengaudit perusahaan. Sedangkan rotasi KAP semu dapat terjadi ketika terdapat perubahan KAP akibat skema perubahan komposisi akuntan publik dan/atau rekan yang membuat seolah-olah KAP tersebut adalah KAP yang berbeda.

Skema rotasi riil dan rotasi semu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Perusahaan X pada tahun 2000 menggunakan jasa audit KAP ABCDE, KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional A. Pada tahun 2006, perusahaan X wajib mengganti KAP yang mengauditnya. Rotasi terjadi ketika perusahaan X mengganti KAP yang mengauditnya menjadi KAP MNOPQ, KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional M. Rotasi ini bersifat riil. Selain itu, rotasi juga terjadi ketika perusahaan A mengganti KAP yang mengauditnya menjadi KAP ABCFG, KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional A. Namun, rotasi ini bersifat semu.

2.3 Kualitas Audit

2.3.1 Definisi Kualitas Audit dan Penelitian Terkait Kualitas Audit

De Angelo (1981) memaparkan definisi kualitas audit dalam dua dimensi. Pertama, audit yang berkualitas harus dapat mendeteksi adanya salah saji material dalam laporan yang diauditnya. Kedua, audit yang berkualitas harus dapat melaporkan salah saji material yang telah ditemukan.

Terdapat berbagai penelitian yang mengangkat tentang kualitas audit dan berbagai hal yang terkait dengannya, di antaranya adalah diferensiasi auditor, kualitas laba, ketepatan opini *going concern* auditor, dan sebagainya. Bagian ini akan menjelaskan mengenai diferensiasi auditor yang

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dan kualitas laba yang akan digunakan sebagai proksi kualitas audit dalam penelitian ini.

a. Diferensiasi Auditor dan Kualitas audit

Penilaian kualitas audit secara *ex ante* merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena satu-satunya produk keluaran yang dapat diobservasi dari proses audit adalah laporan audit, yang pada dasarnya telah memiliki *template* baku dan mayoritas laporan audit menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan telah cukup baik. Secara *ex post*, kualitas audit dapat lebih mudah diobservasi, yakni dengan melihat ada atau tidaknya skema gagal audit yang terjadi. Hasil audit secara *ex post* ini menjadi sangat tergantung kepada siapa yang melakukan audit tersebut. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terkait kualitas audit akan mendasarkan pengamatannya pada premis bahwa perbedaan kualitas audit akan dipengaruhi dan dapat dilihat dengan membandingkan auditor-auditor dari kelompok dan/atau kelas yang berbeda. (Francis, 2004). Diferensiasi yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan ukuran KAP: KAP *Big X* dan KAP *non Big X*. DeAngelo (1981) berpendapat bahwa ukuran KAP merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit (independensi auditor) karena tidak terdapat satu klien dari KAP *Big X* yang cukup penting bagi kelangsungan KAP besar tersebut. Selain itu, auditor dari KAP *Big X* memiliki reputasi yang baik yang harus selalu dijaga dengan memberikan jasa audit yang berkualitas prima. (Simunic dan Stein, 1987; Francis dan Wilson, 1988).

Penelitian-penelitian terdahulu berpendapat bahwa KAP *Big X* pada umumnya memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP *nonBig X*. Namun terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa sesungguhnya KAP *Big X* tidaklah lebih baik dibandingkan KAP *nonBig X*. Mereka hanya memiliki sumber daya yang lebih banyak ketika menghadapi tuntutan hukum dan pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi atas gagal audit yang terjadi. Hal ini terbukti dari banyaknya kegagalan audit yang dialami oleh KAP *Big X* ketika mengaudit klien-klien yang mayoritas merupakan perusahaan berskala besar.

Diferensiasi auditor selanjutnya didasarkan pada spesialisasi auditor di suatu industri. Solomon et al. (1999) berpendapat bahwa auditor yang terspesialisasi di suatu industri memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dibandingkan auditor yang tidak terspesialisasi. Oleh karena itu, auditor yang terspesialisasi akan memberikan jasa audit yang lebih berkualitas dibandingkan auditor yang tidak terspesialisasi. Selain itu, terdapat bukti bahwa kualitas laba dari perusahaan yang diaudit oleh auditor yang terspesialisasi lebih baik dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang tidak terspesialisasi (Balsam et al. 2003).

b. Manajemen laba, Kualitas Laba dan Kualitas Audit

Penelitian pada periode 1990an memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas audit dan kualitas laba perusahaan. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kualitas audit *Big 4* pada periode 1990an menurun akibat penurunan dalam pengimplementasian hukum. Penurunan kualitas audit ini diikuti dengan kenaikan tingkat *abnormal accrual* dan peningkatan aktivitas

manajemen laba (Lee dan Mande, 2003). Lebih lanjut, DeAngelo (1981) berpendapat bahwa kualitas audit merupakan fungsi dari kapabilitas untuk mendeteksi *financial error* dan *fraud* serta independensi untuk melaporkan temuan-temuan audit tersebut. Oleh karena itu, kualitas audit yang lebih baik seharusnya mampu mendeteksi perilaku manajemen laba yang kemudian tergambar dalam kualitas laba perusahaan. Dengan kata lain, semakin baik kualitas audit maka semakin baik pula kualitas laba perusahaan.

Salah satu pengukuran kualitas laba suatu perusahaan adalah dengan melihat tingkat akrual diskresioner (*discretionary accrual*) perusahaan tersebut. Tingkat akrual diskresioner (DAC) terbukti menjadi salah satu indikasi bagaimana tingkat aktivitas manajemen laba perusahaan (Bartov et al., 2001). Tingkat DAC yang tinggi menunjukkan perilaku manajemen labayang aktif di perusahaan. Tingginya manajemen laba akan menurunkan kualitas laba perusahaan, di mana kualitas laba perusahaan berhubungan positif dengan kualitas audit. Terdapat beberapa model perhitungan *akrual diskresioner* yang digunakan dalam penelitian-penelitian terkait kualitas laba, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Kasznic (1999). Model Kasznic (1999) merupakan pengembangan dari Model Jones (1991). Model ini hampir serupa dengan Model Jones (1991) kecuali adanya tambahan perubahan arus kas dari kegiatan operasi (*cashflow from operation* / ΔCFO) sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi variabel dependennya. Model Kasznic (1999) adalah:

$$TA_{it} / A_{i,t-1} = \alpha_1(1/A_{i,t-1}) + \alpha_2(\Delta\text{REV}_{it} - \Delta\text{REC}_{it}) / A_{i,t-1} + \alpha_3\text{PPE}_{i,t} / A_{i,t-1} + \alpha_4\Delta\text{CFO}_{i,t} / A_{i,t-1} + \varepsilon_{it}$$
 di mana $\Delta\text{CFO}_{i,t}$ merupakan perubahan arus kas dari kegiatan operasi antara tahun t dan t-1, serta ε_{it} merupakan nilai residu yang mencerminkan akrual diskresioner (DAC).

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Tenure* Audit dan Rotasi auditor terhadap Kualitas Audit

Penelitian terdahulu terkait *tenure* audit dan kualitas audit menunjukkan adanya inkonsistensi hasil. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara *tenure* audit dan kualitas audit. Sementara penelitian lain menunjukkan hal yang sebaliknya. Pengaruh negatif dapat terjadi karena *tenure* audit yang panjang dinilai akan mengurangi tingkat independensi auditor akibat berkurangnya objektivitas auditor (Mautz dan Shraft, 1961). Berkurangnya objektivitas ini dapat disebabkan karena hubungan yang dekat antara auditor dan manajemen membuat timbul keinginan dari auditor untuk cenderung menuruti keinginan manajemen klien dan berkurangnya *professional skepticism* auditor. Sebagai akibat dari penurunan independensi dan objektivitas ini, kualitas dari proses audit yang dilakukan oleh auditor menjadi menurun.

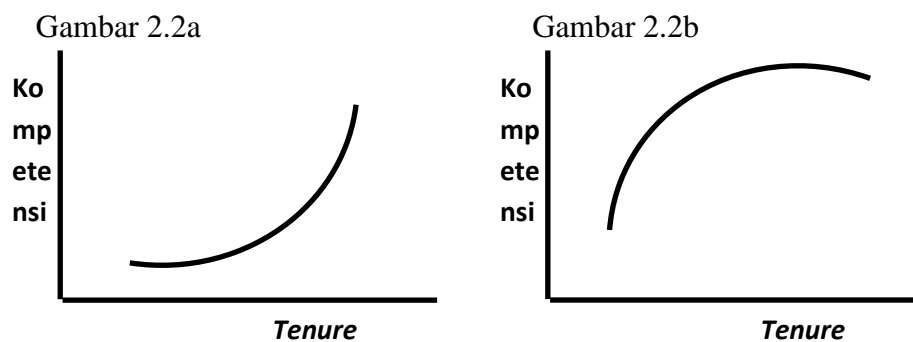
Di lain pihak, penelitian yang menunjukkan hubungan yang positif antara *tenure* audit dan kualitas audit berpendapat bahwa *tenure* audit yang panjang akan meningkatkan pengenalan auditor atas perusahaan dan industrinya sehingga proses audit yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien (Myers, et al., 2003). Semakin panjang *tenure* audit membuat auditor dapat mempelajari kondisi dan risiko perusahaan secara lebih seksama sehingga proses audit yang dilakukan pun akan semakin efektif dari waktu ke waktu. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa kegagalan audit pada

umumnya terjadi pada periode awal perikatan audit (Geiger dan Raghunandan, 2002) karena pada periode awal perikatan audit auditor belum memiliki pengenalan dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi perusahaan kliennya.

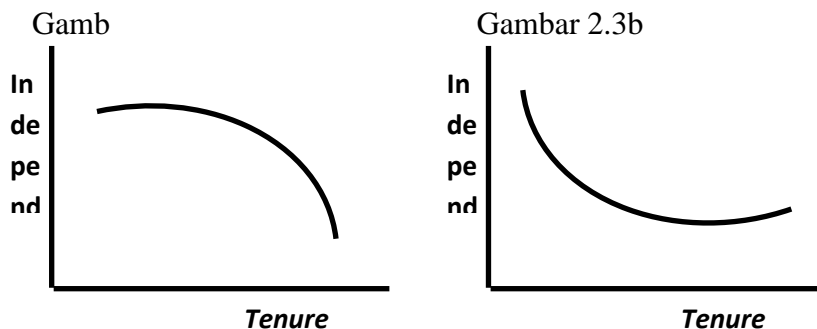
Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya memprediksikan hubungan yang linier antara *tenure* audit dan kualitas audit, baik positif maupun negatif. Penelitian ini akan memprediksikan hubungan yang kuadrat antara *tenure* audit dan kualitas audit (Fitriany et al., 2011). Prediksi ini didasarkan pada konsep kualitas audit yang dikemukakan oleh DeAngelo (1981), di mana kualitas audit merupakan fungsi dari kompetensi auditor dan independensi auditor.

Secara umum, terdapat hubungan yang positif antara *tenure* audit dan kompetensi auditor di mana kompetensi auditor meningkat seiring berjalannya waktu. Hubungan positif ini dapat digambarkan dalam kurva *convex* ataupun kurva *concave*, tergantung pada seberapa besar penambahan kompetensi auditor tersebut relatif terhadap *tenure* audit. Kurva akan berbentuk *concave* jika penambahan kompetensi auditor pada awal periode perikatan audit lebih besar dari pada tahun selanjutnya (Gambar 2.2b), dan demikian pula sebaliknya (Gambar 2.2a).

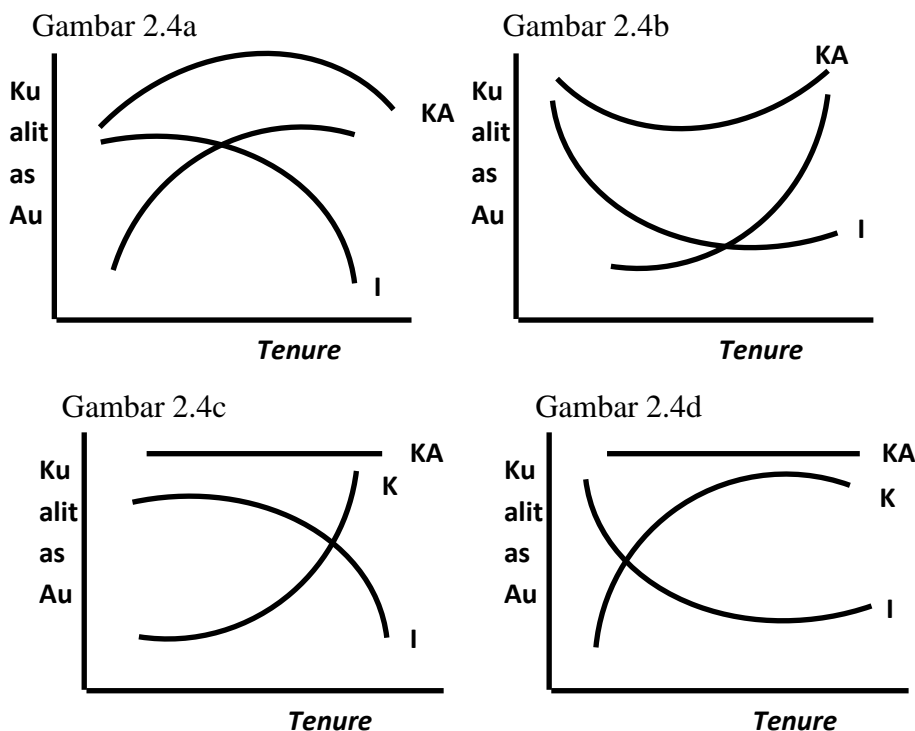
Sementara itu, *tenure* audit dan independensi diprediksikan memiliki hubungan yang negatif. Semakin panjang *tenure* audit akan membuat terbangunnya kedekatan hubungan antara auditor dan kliennya yang dapat mengerosi aspek independensi auditor (Carey dan Simnett, 2006). Hubungan negatif ini juga dapat digambarkan dengan kurva *convex* maupun *concave*. Kurva akan berbentuk *convex* jika penurunan independensi terjadi lebih cepat pada awal periode perikatan audit (Gambar 2.3b) dan demikian pula sebaliknya (Gambar 2.3a)



Gambar 2.2 Hubungan antara *Tenure* Audit dan Kompetensi
Sumber: Fitriany, et al. (2011)



Gambar 2.3 Hubungan antara *Tenure* Audit dan Independensi
 Sumber: Fitriany, et al. (2011)



K = Kompetensi, I = Independensi, KA = Kualitas Audit

Gambar 2.4 Hubungan antara *Tenure* Audit dan Kualitas Audit
 Sumber: Fitriany, et al. (2011)

Sesuai dengan konsep kualitas audit yang dikemukakan oleh DeAngelo (1981), maka hubungan antara *tenure* audit dan kualitas audit dapat ditunjukkan dengan mengkombinasikan antara Gambar 2.5 dan Gambar 2.6. Hasil kombinasi tersebut menghasilkan 4 kemungkinan hubungan antara *tenure* audit dan kualitas audit.

Gambar 2.4a dan Gambar 2.4b menunjukkan hubungan kuadrat di antara *tenure* audit dan kualitas audit. Pada Gambar 2.4a (*concave*), kualitas audit akan meningkat pada mulanya akibat peningkatan kompetensi auditor, namun akan menurun pada suatu titik akibat penurunan independensi auditor. Demikian pula sebaliknya yang terjadi pada Gambar 2.4b (*convex*). Bentuk kurva hubungan ini tergantung pada (1) manakah yang lebih mendominasi antara kompetensi dan independensi dan (2) seberapa banyak penambahan kompetensi auditor dan kecepatan penurunan independensi auditor. Oleh karena itu, dimungkinkan pula kurva berbentuk linier (Gambar 2.4c dan Gambar 2.4d) di mana terdapat dominasi yang seimbang antara kompetensi dan independensi serta banyaknya penambahan kompetensi auditor yang sama kecepatan penurunan independensi auditor.

Penelitian Fitriany et al. (2011) menemukan bahwa kurva hubungan antara *tenure* KAP dan kualitas audit pascaregulasi adalah kurva *concave* dengan titik maksimum 10 tahun. Hal ini berarti kualitas audit akan meningkat pada masa awal perikatan KAP dan turun ketika telah melewati periode 10 tahun. Sementara itu, hubungan antara *tenure* AP dan kualitas audit pascaregulasi berbentuk kurva *convex* dengan titik minimum 2 tahun. Hal ini berarti kualitas audit akan menurun pada masa awal perikatan auditor dan naik ketika telah melewati periode 2 tahun.

Penelitian Chi dan Huang (2005) yang mengambil sampel perusahaan di Taiwan menunjukkan bahwa kurva hubungan antara *tenure* KAP dan kualitas audit berbentuk kurva *concave* dengan titik maksimum 5 tahun. Hubungan antara *tenure* AP dan kualitas audit juga berbentuk kurva *concave* dengan titik minimum 5 tahun. Hal ini berarti kualitas audit akan meningkat pada masa awal perikatan KAP dan auditor, kemudian turun ketika telah melewati periode 5 tahun.

Penelitian Jenkins dan Velury (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuadrat negatif (*concave*) antara *tenure* AP dan kualitas audit pada masa sebelum penerapan Sarbanes Oxley Act di Amerika Serikat. Hal ini berarti kualitas audit akan naik pada masa awal perikatan auditor dan kemudian turun akibat semakin dekatnya hubungan antara auditor dan perusahaan. Namun, Jenkins dan Valury (2012) menemukan bahwa *tenure* AP tidak berpengaruh secara signifikan pada periode setelah penerapan Sarbanes Oxley. Hal ini mungkin terjadi karena persepsi pasar lebih dipengaruhi oleh penerapan regulasi baru tersebut dibandingkan oleh *tenure* AP. Dengan diterapkannya Sarbanes Oxley Act di Amerika Serikat, kontrol internal perusahaan menjadi satu hal yang sangat diperhatikan. Regulasi ini memunculkan suatu skema bahwa pengawasan internal perusahaan harus dikedepankan. Dengan adanya penitikberatan pada kontrol internal, kontrol dari pihak luar (salah satunya dari auditor eksternal) memiliki peran yang lebih kecil dari sebelumnya.

Penelitian Brooks et al. (2012) pada perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuadrat negatif antar *tenure* KAP dengan kualitas audit. Kurva hubungan berbentuk *concave* dengan titik maksimum 12 tahun. Brooks memaparkan bahwa pada awal perikatan kualitas audit meningkat sebagai akibat peningkatan *learning effect*, yaitu peningkatan pemahaman auditor atas kliennya akibat proses pembelajaran. Setelah melewati periode 12 tahun kualitas audit menurun sebagai akibat peningkatan *bonding effect* antara KAP dan kliennya.

Penelitian Wahyuni (2012) menunjukkan hal yang berbeda. Dalam penelitian yang menguji pengaruh *tenure* audit, spesialisasi audit, dan *client importance* terhadap kualitas audit ini, ditunjukkan bahwa *tenure* AP dan *tenure* KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada periode pascapenerapan peraturan yang membatasi *tenure* audit di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini memprediksi bahwa terdapat hubungan yang kuadrat antara *tenure* audit dan kualitas audit. Karena adanya hasil yang berbeda-beda dari setiap penelitian yang menunjukkan hubungan kuadrat antara keduanya, penelitian ini menghipotesiskan bahwa hubungan kuadrat tersebut dapat berupa kurva *convex* maupun kurva *concave*. Maka, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1a: Terdapat pengaruh kuadrat *tenure* audit terhadap kualitas audit.

Serupa dengan penelitian terkait *tenure* audit dan kualitas audit, penelitian yang menghubungkan antara rotasi auditor dan kualitas juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Fitriany et al. (2011) menunjukkan adanya hubungan positif antara rotasi AP dan kualitas audit pada perusahaan publik di Indonesia. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada periode pascaregulasi yang mewajibkan rotasi KAP. Rotasi auditor dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena dengan adanya pergantian auditor, tingkat independensi akan terjaga sehingga kualitas audit akan tetap baik. Hal ini ditunjukkan oleh Hamilton et al. (2005) yang menyatakan bahwa rotasi AP meningkatkan konservatisme dalam proses pelaporan kondisi keuangan. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik ditandai dengan rendahnya *unexpected accrual*. Temuan Hamilton et al. (2005) ini juga didukung oleh penelitian-penelitian lain, di antaranya Simmons dan Lovata (2009) yang dalam penelitiannya yang mengambil sampel universitas-universitas negeri pada negara bagian Illinois, Amerika Serikat menemukan bahwa temuan-temuan audit lebih banyak ditemukan pada periode awal perikatan KAP. Perbedaan antara jumlah temuan periode awal dan periode akhir perikatan semakin signifikan ketika rotasi KAP menjadi hal yang diwajibkan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa rotasi KAP akan bermanfaat bagi proses audit. Daniels dan Booker (2009) meneliti perspektif *bank loan officer* terhadap regulasi yang mewajibkan rotasi KAP. Penelitian ini menunjukkan bahwa 53% responden penelitian setuju bahwa rotasi KAP perlu dilakukan. Sebanyak 51% responden setuju bahwa kewajiban rotasi KAP akan menurunkan praktik-praktik akuntansi yang agresif.

Namun, di sisi lain, rotasi auditor juga berpeluang untuk menurunkan kualitas audit. Pergantian auditor akibat skema rotasi akan membuat auditor baru harus mempelajari kembali kondisi dan risiko perusahaan dari awal. Hal ini ditunjukkan oleh Davis et al. (2002) yang berpendapat bahwa rotasi AP justru meningkatkan biaya audit secara keseluruhan karena auditor harus menghimpun kembali dari awal pemahaman atas klien dan industrinya. Hal ini justru membuat proses audit menjadi tidak efektif dan efisien sehingga kualitas audit menjadi menurun. Jackson et al. (2010) dalam studinya pada perusahaan di Australia menunjukkan hal yang serupa. Ia menunjukkan bahwa manfaat dari kewajiban rotasi KAP tidak sebanding dan sangat minimal jika dibandingkan dengan biaya

tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengganti KAP. Hal serupa juga disampaikan oleh Mara, et al. (2011). Dalam studi literturnya terhadap regulasi rotasi KAP di Uni Eropa, tidak ditemukan cukup bukti adanya manfaat dari kewajiban rotasi KAP.

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, penelitian ini akan menguji apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan memprediksikan bahwa rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1b: Rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan penelitian De Angelo (1981), auditor *Big 4* (KAP besar) menunjukkan kualitas audit yang relatif lebih baik dibandingkan auditor *non Big 4*. Lennox (1999) dalam penelitiannya yang mengambil sampel perusahaan di United Kingdom menunjukkan bahwa laporan audit yang dikeluarkan auditor *Big 4* lebih akurat dibandingkan laporan audit yang dikeluarkan auditor *non Big 4*. Dalam penelitiannya yang menghubungkan reputasi auditor dan pengembalian atas investasi, Beatty (1989) menemukan bahwa auditor dengan reputasi yang baik akan memungkinkan pengusaha mengurangi ketidakpastian akan pengembalian di masa depan dari sebuah investasi baru. Maka, premis bahwa KAP besar (*Big X*) mendemonstrasikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor *non Big X* merupakan suatu hal yang dapat diterima dan terbukti secara empiris.

Terkait dengan kualitas audit yang ditunjukkan dengan *accrual* perusahaan, hasil penelitian Jones (1991) mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big 4* memiliki *abnormal accrual* yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan perilaku manajemen laba pada perusahaan yang diaudit oleh *Big 4* lebih rendah dibandingkan pada perusahaan yang diaudit oleh *non Big 4* dan perusahaan tersebut memiliki kualitas laba yang lebih baik (Becker et al., 1998; Francis et al., 1999). Serupa dengan hasil penelitian Jones (1991), Teoh dan Wong (1993) menunjukkan bahwa laba perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* memiliki nilai yang lebih tinggi di mata investor pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big 4* dipersepsikan memiliki kualitas laba yang lebih baik.

Adanya hubungan positif antara ukuran KAP dan kualitas audit ini dapat didasarkan pada beberapa hal, di antaranya:

1. KAP besar memiliki dan mampu menghimpun sumber daya yang lebih besar dari segi kuantitas dan kualitas sehingga dapat melakukan proses audit yang lebih efektif untuk mendeteksi dan melaporkan adanya perilaku manajemen laba (Bartov et al., 2001).
2. KAP besar memiliki *concern* untuk menjaga reputasi dan nama baiknya di mata klien sehingga mereka akan memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan baik untuk menjamin kualitas (Datar et al., 1991).

3. KAP besar memiliki kemampuan untuk berinvestasi lebih besar untuk menjadi spesialis di suatu industri dibandingkan KAP yang lebih kecil.

Berdasarkan hasil temuan penelitian-penelitian dan hal-hal yang mendasari adanya hubungan positif di antara ukuran KAP dan kualitas audit yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga menghipotesiskan adanya hubungan positif di antara keduanya. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

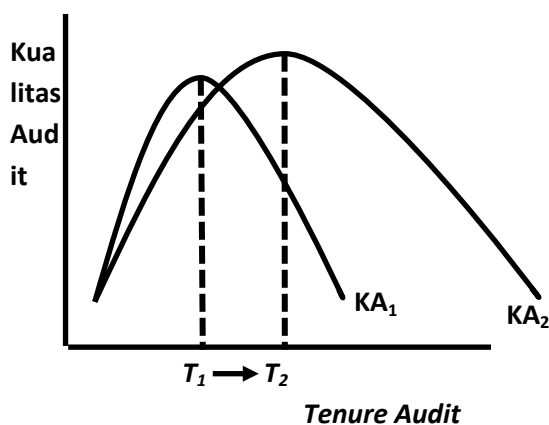
H2: Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.4.3 Pengaruh Moderasi Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Hubungan antara *Tenure Audit* dan Kualitas Audit

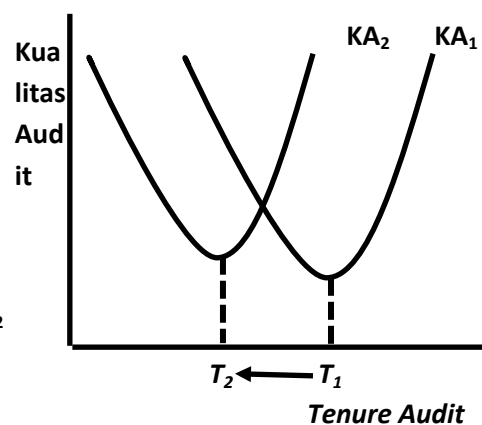
Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, secara umum, KAP *Big X* terbukti menunjukkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP *non Big X*. Hal ini dapat dikarenakan beberapa hal. KAP *Big X* memiliki sumber daya yang lebih baik dari segi kualitas dan segi kuantitas. KAP *Big X* memiliki cukup sumber daya untuk melakukan spesialisasi di industri tertentu dan berinvestasi di teknologi terbaru untuk menunjang proses audit yang lebih baik. Spesialisasi industri terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit (Balsam et al., 2003). Selain itu, KAP *Big X* juga memiliki kepentingan untuk terus menjaga kompetensi dan independensinya demi menjaga nama baiknya (Datar et al., 1991).

Penelitian-penelitian terdahulu telah menguji pengaruh langsung ukuran KAP terhadap kualitas audit dan menemukan hubungan positif di antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung ukuran KAP dalam memoderasi hubungan kuadrat antara *tenure* audit dan kualitas audit. Oleh karena pengaruh langsung ukuran KAP terhadap kualitas audit bersifat positif, maka secara logis, ukuran KAP juga akan memoderasi hubungan kuadrat antara *tenure* audit dan kualitas audit dengan memberikan pengaruh positif bagi kualitas audit. Karena hubungan kuadrat antara *tenure* audit dan kualitas audit dapat berupa kurva *concave* maupaun kurva *convex*, maka terdapat dua kemungkinan pengaruh moderasi ukuran KAP terhadap hubungan di antara keduanya.

Gambar 2.9a



Gambar 2.9b



Gambar 2.9a menunjukkan kurva hubungan kuadratik antara *tenure* audit dan kualitas audit yang berbentuk kurva *concave*. Karena ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, maka pengaruh moderasinya pun dihipotesiskan akan berpengaruh positif bagi kualitas audit. Pada Gambar 2.9a, KA 1 menunjukkan kurva hubungan kualitas audit sebelum dimoderasi oleh ukuran KAP. KA 1 akan mencapai titik maksimum ketika *tenure* audit berada pada titik T_1 . Dengan adanya pengaruh moderasi ukuran KAP, titik maksimum akan bergeser ke kanan (T_2).

Kurva *concave* terjadi akibat peningkatan kompetensi pada awal perikatan audit lebih besar dari penurunan independensi. Kemudian, setelah titik maksimum, penurunan independensi menjadi lebih besar dibandingkan peningkatan kompetensi. Jika KAP yang digunakan adalah KAP besar, pengaruh moderasi ukuran KAP akan berpengaruh sebagai berikut:

1. Moderasi ukuran KAP akan memperkuat peningkatan kompetensi dan memperlemah penurunan independensi pada periode perikatan audit sebelum titik maksimum tercapai, dan
2. Moderasi ukuran KAP akan memperlemah penurunan independensi dan memperkuat peningkatan kompetensi pada periode perikatan audit setelah titik maksimum tercapai.

Kedua pengaruh tersebut akan mengakibatkan pergeseran titik maksimum ke kanan. Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik maksimum, sebelum akhirnya independensi auditor menurun, menjadi lebih lama. Selain itu, pengaruh moderasi ukuran KAP ini juga dapat mengakibatkan pergeseran titik maksimum kualitas audit ke atas (kualitas audit pada titik maksimum menjadi meningkat).

Gambar 2.9b menunjukkan kurva hubungan kuadratik antara *tenure* audit dan kualitas audit yang berbentuk kurva *convex*. Karena ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, maka pengaruh moderasinya pun dihipotesiskan akan berpengaruh positif bagi kualitas audit. Pada Gambar 2.9b, KA 1 menunjukkan kurva hubungan kualitas audit sebelum dimoderasi oleh ukuran KAP. KA 1 akan mencapai titik maksimum ketika *tenure* audit berada pada titik T_1 . Dengan adanya pengaruh moderasi ukuran KAP, titik maksimum akan bergeser ke kiri (T_2).

Kurva *convex* terjadi akibat peningkatan kompetensi pada awal perikatan audit lebih kecil dari penurunan independensi. Kemudian, setelah titik minimum, penurunan independensi menjadi lebih kecil dibandingkan peningkatan kompetensi karena auditor menjadi semakin paham atas industri dan perusahaan klien. Jika KAP yang digunakan adalah KAP besar, pengaruh moderasi ukuran KAP akan berpengaruh serupa dengan pengaruhnya pada hubungan *tenure* audit dan kualitas audit yang berbentuk kurva *concave*, kecuali pada titik minimum yang menjadi pembeda di antara keduanya:

1. Moderasi ukuran KAP akan memperkuat peningkatan kompetensi dan memperlemah penurunan independensi pada periode perikatan audit sebelum titik minimum tercapai, dan

2. Moderasi ukuran KAP akan memperlemah penurunan independensi dan memperkuat peningkatan kompetensi pada periode perikatan audit setelah titik minimum tercapai.

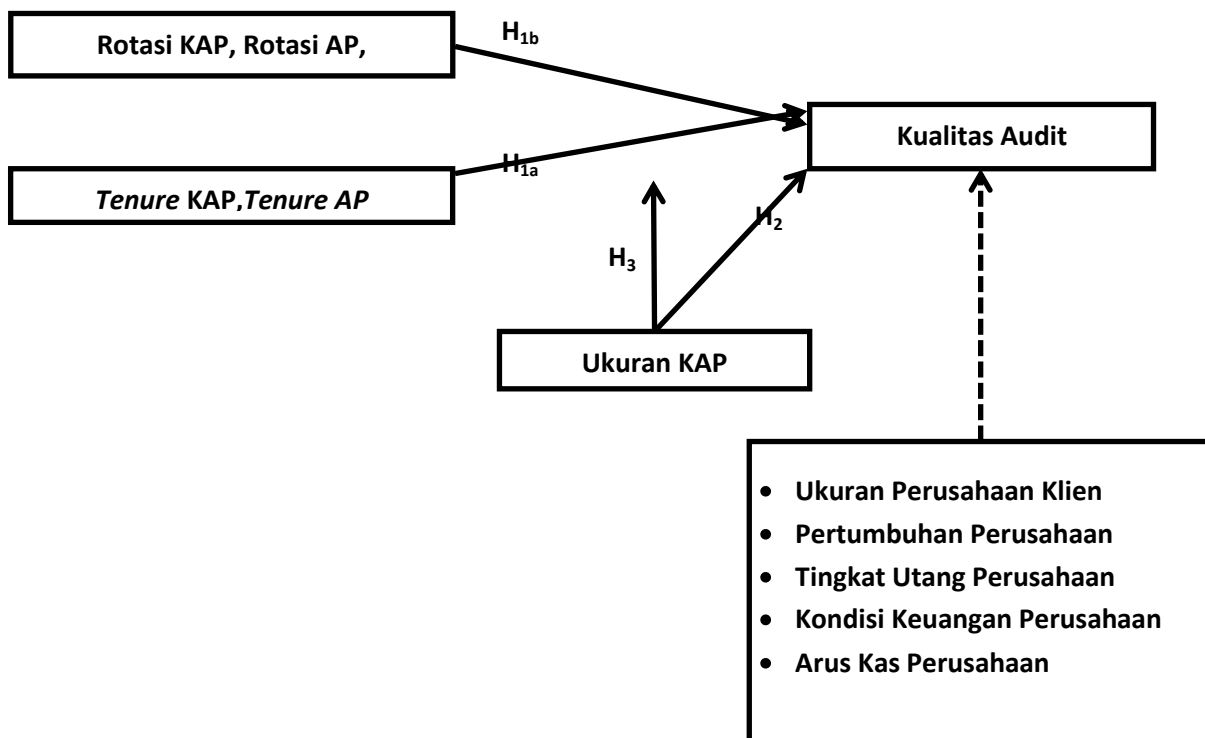
Kedua pengaruh tersebut akan mengakibatkan pergeseran titik minimum ke kiri. Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik minimum, sebelum akhirnya peningkatan kompetensi auditor menjadi lebih besar dibandingkan penurunan independensi, menjadi lebih cepat. Selain itu, pengaruh moderasi ukuran KAP ini juga dapat mengakibatkan pergeseran titik maksimum kualitas audit ke atas (kualitas audit pada titik minimum menjadi meningkat).

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaruh moderasi yang ditimbulkan oleh ukuran KAP diprediksikan akan meningkatkan kualitas audit. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H3: Ukuran KAP akan memoderasi hubungan kuadrat antara *tenure* audit dan kualitas audit di mana kualitas audit akan meningkat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

3.2 Model Penelitian

Hipotesis 1a menyatakan bahwa terdapat hubungan kuadrat antara *tenure* audit (*tenure* AP dan *tenure* KAP) dan kualitas audit serta Hipotesis 1b menyatakan bahwa rotasi auditor (rotasi AP dan rotasi KAP) berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan model berikut

Model 1

$$ABS_DAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 FTENURE_{it} + \alpha_3 FTENURESQ_{it} + \alpha_4 FROTATION_{it} + \alpha_5 BIGX_{it} + \alpha_6 LEV_{it} + \alpha_7 GROWTH_{it} + \alpha_8 SIZE_{it} + \alpha_9 LOSS_{it} + \alpha_{10} CFO_{it} + \epsilon_{it}$$

Model 1 akan digunakan untuk menguji pengaruh *tenure* KAP dan rotasi KAP terhadap kualitas audit. Berikut ini adalah prediksi pengaruh variabel independen dalam Model 1 terhadap akrual diskresioner absolut.

Variabel	Pengaruh terhadap Akrual Diskresioner (DAC)
FTENURE / <i>Tenure</i> KAP	Negatif / Positif
FTENURESQ / <i>Tenure</i> KAP kuadrat	Negatif / Positif
FROTATION / Rotasi KAP	Negatif / Positif
BIGX / Ukuran KAP	Negatif

Sementara untuk menguji pengaruh *tenure* AP dan rotasi AP terhadap kualitas audit digunakan Model 2.

Model 2

$$ABS_DAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 PTENURE_{it} + \alpha_3 PTENURESQ_{it} + \alpha_4 PROTATION_{it} + \alpha_5 BIGX_{it} + \alpha_6 LEV_{it} + \alpha_7 GROWTH_{it} + \alpha_8 SIZE_{it} + \alpha_9 LOSS_{it} + \alpha_{10} CFO_{it} + \epsilon_{it}$$

Berikut ini adalah prediksi pengaruh variabel independen dalam Model 2 terhadap akrual diskresioner absolut.

Variabel	Pengaruh terhadap Akrual Diskresioner (DAC)
PTENURE / <i>Tenure</i> AP	Negatif / Positif
PTENURESQ / <i>Tenure</i> AP kuadrat	Negatif / Positif
PROTATION / Rotasi AP	Negatif / Positif
BIGX / Ukuran KAP	Negatif

Hipotesis 3 menyatakan pengaruh moderasi ukuran KAP yang memperkuat hubungan kuadrat antara *tenure* audit dan kualitas audit serta memperkuat pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit. Hipotesis 3a tentang pengaruh moderasi ukuran KAP terhadap hubungan antara *tenure* KAP dan kualitas audit akan diuji dengan Model 3.

Model 3

$$ABS_DAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 FTENURE_{it} + \alpha_3 FTENURE * BIGX_{it} + \alpha_4 FTENURESQ_{it} + \alpha_5 FTENURESQ_{it} * BIGX_{it} + \alpha_6 BIGX_{it} + \alpha_7 LEV_{it} + \alpha_8 GROWTH_{it} + \alpha_9 SIZE_{it} + \alpha_{10} LOSS_{it} + \alpha_{11} CFO_{it} + \epsilon_{it}$$

Berikut ini adalah prediksi pengaruh varibel independen dalam Model 3 terhadap akrual diskresioner absolut.

Variabel	Pengaruh terhadap Akrual Diskresioner (DAC)
FTENURE / <i>Tenure</i> KAP	Negatif / Positif
FTENURESQ / <i>Tenure</i> KAP kuadrat	Negatif / Positif
FTENURE * <i>BIGX</i> / <i>Tenure</i> KAP * Ukuran KAP	Negatif
FTENURESQ * <i>BIGX</i> <i>Tenure</i> KAP kuadrat * Ukuran KAP	Positif
Ukuran KAP	Negatif

Sedangkan untuk Hipotesis 3b tentang pengaruh moderasi ukuran KAP terhadap hubungan antara *tenure* AP dan kualitas audit akan diuji dengan Model 4.

Model 4

$$ABS_DAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 PTENURE_{it} + \alpha_3 PTENURE * BIGX_{it} + \alpha_4 PTENURESQ_{it} + \alpha_5 PTENURESQ_{it} * BIGX_{it} + \alpha_6 BIGX_{it} + \alpha_7 LEV_{it} + \alpha_8 GROWTH_{it} + \alpha_9 SIZE_{it} + \alpha_{10} LOSS_{it} + \alpha_{11} CFO_{it} + \epsilon_{it}$$

Berikut ini adalah prediksi pengaruh varibel independen dalam Model 3 terhadap akrual diskresioner.

Variabel	Pengaruh terhadap Akrual Diskresioner (DAC)
PTENURE / <i>Tenure</i> AP	Negatif / Positif
PTENURESQ / <i>Tenure</i> AP kuadrat	Negatif / Positif
PTENURE * <i>BIGX</i> / <i>Tenure</i> AP * Ukuran KAP	Negatif
PTENURESQ * <i>BIGX</i> <i>Tenure</i> AP kuadrat * Ukuran KAP	Positif
Ukuran KAP	Negatif

Hipotesis 2 menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis ini akan diuji dengan melihat probabilitas variabel ukuran KAP di setiap model yang digunakan dalam penelitian ini.

Keterangan:

- ABS_DAC_{it} = *Absolute accrual discretioner* (akrual diskresioner absolut) sebagai proksi kualitas audit.
- FTENURE_{it} = *Real audit firm tenure* (*tenure* KAP riil), lama masa pemberian jasa audit oleh suatu KAP yang dihitung dengan akumulasi jumlah tahun periode perikatan perusahaan dengan KAP.
- FTENURESQ_{it} = *Real audit firm tenure* (*tenure* KAP riil) dikuadratkan.
- PTENURE_{it} = *Audit partner tenure* (*tenure* AP), lama masa pemberian jasa audit oleh auditor yang dihitung dengan akumulasi jumlah tahun periode perikatan perusahaan dengan auditor tersebut.
- PTENURESQ_{it} = *Audit partner tenure* (*tenure* AP) dikuadratkan.
- FROTATION_{it} = *Dummy* rotasi KAP, bernilai 1 jika terdapat rotasi KAP dan bernilai 0 jika tidak terdapat rotasi KAP.
- PROTATION_{it} = *Dummy* rotasi AP, bernilai 1 jika terdapat rotasi KAP dan bernilai 0 jika tidak terdapat rotasi KAP.

BIGX_{it}	= <i>Dummy</i> ukuran KAP, bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan bernilai 0 jika sebaliknya.
LEV_{it}	= <i>Leverage</i> , diukur dengan rasio <i>debt-to-total asset</i> .
GROWTH_{it}	= Pertumbuhan perusahaan, <i>price-to-book value</i> .
SIZE_{it}	= Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari nilai buku total aset.
LOSS_{it}	= <i>Dummy</i> kondisi keuangan perusahaan, bernilai 1 jika perusahaan membukukan kerugian dan bernilai 0 jika sebaliknya.
CFO_{it}	= Arus kas operasional perusahaan diskalakan dengan total aset perusahaan.
ε_{it}	= Koefisien <i>error</i> .

3.3 Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Kualitas Audit (Akrual diskresioner / DAC)

Dalam penelitian ini, akrual diskresioner akan diukur dengan menggunakan model Kaznick (1999). Model Kaznick memiliki *adjusted R²* yang paling tinggi dibandingkan model pengukuran akrual diskresioner lainnya (Siregar dan Utama, 2006), sehingga model ini dapat memberikan prediksi yang paling baik. Model Kaznick (1999) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TACC}_{it} / \text{TA}_{i,t-1} = \alpha_1(1/\text{TA}_{i,t-1}) + \alpha_2(\Delta\text{REV}_{it} - \Delta\text{REC}_{it}) / \text{TA}_{i,t-1} + \alpha_3\text{PPE}_{i,t} / \text{TA}_{i,t-1} + \alpha_4\Delta\text{CFO}_{i,t} / \text{TA}_{i,t-1} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

TACC_{it}	= Total akrual perusahaan i pada tahun t, yaitu <i>income before extraordinary items</i> dikurangi dengan arus kas operasional (CFO).
TA_{i,t-1}	= Total aset perusahaan i pada awal tahun t.
ΔREV_{it}	= Perubahan pendapatan perusahaan i antara tahun t dan t-1.
ΔREC_{it}	= Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t dan t-1.
PPE_{i,t}	= Aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t.
ΔCFO_{i,t}	= Perubahan arus kas operasional antara tahun t dan t-1.
ε_{it}	= Akrual diskresioner (DAC).

Perhitungan total akrual (TACC) dilakukan dengan pendekatan arus kas, yakni *income before extraordinary items* dikurangi dengan arus kas operasional (CFO). Total akrual (TACC) terdiri dari non-akrual diskresioner (NDAC) akrual diskresioner (DAC). Non-akrual diskresioner (NDAC) merupakan *fitted value* dari persamaan total akrual di atas. Sementara, akrual diskresioner (DAC) merupakan residunya (ε_{it}). Nilai DAC akan dihitung secara terpisah setiap tahun dalam setiap industri. Penelitian ini menggunakan nilai mutlak / absolut dari DAC (ABS_DAC) karena yang akan diamati adalah besaran DAC tanpa memperhatikan arah.

3.3.2 Tenure Audit

Variabel *tenure* KAP dan *tenure* AP menggambarkan lama tahun secara berturut-turut suatu perusahaan diaudit oleh KAP (dilihat dari nama KAP afiliasi internasionalnya) dan seorang auditor tertentu dalam satuan tahun. *Tenure* KAP dan *tenure* AP akan dihitung secara akumulatif dimulai dari periode awal perikatan audit yang sesungguhnya. Jika KAP (dan auditor) yang mengaudit perusahaan tersebut tidak berubah pada tahun berikutnya, maka variabel *tenure* KAP (dan auditor) akan terus

bertambah secara akumulatif. Jika terjadi perubahan KAP (dan auditor) yang mengaudit perusahaan, maka variabel *tenure* KAP (dan auditor) kembali memiliki nilai 1 jika perikatan audit tersebut merupakan perikatan audit baru atau melanjutkan nilai *tenure* KAP (dan auditor) terakhir KAP (dan auditor) tersebut.

3.3.3 Rotasi auditor

Rotasi auditor (rotasi KAP dan rotasi AP) merupakan *dummy variable*. Variabel ini akan bernilai 1 jika terjadi rotasi auditor (rotasi KAP maupun rotasi AP) dan akan bernilai 0 jika tidak terjadi rotasi auditor (rotasi KAP maupun rotasi AP).

3.3.4 Ukuran KAP

Ukuran KAP merupakan *dummy variable*. Ukuran KAP didiferensiasikan dengan melihat afiliasi suatu KAP dengan KAP internasional. Jika KAP berafiliasi dengan KAP internasional yang termasuk dalam X (dalam hal ini 4) KAP terbesar, maka KAP tersebut dikategorikan sebagai KAP berukuran besar dan memiliki nilai *dummy variable* 1 dan 0 jika sebaliknya. Pada penelitian ini, ukuran KAP diprediksikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3.3.5 Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan klien (SIZE) diukur dengan logaritma natural dari nilai buku total aset perusahaan. Terdapat beberapa pandangan berbeda terkait hubungan antara ukuran perusahaan dan kecenderungan untuk memanipulasi *laba*. Perusahaan yang besar memiliki pengendalian internal yang lebih baik dari perusahaan yang berukuran lebih kecil. Selain itu, tata kelola perusahaan pada perusahaan besar pada umumnya lebih baik dibandingkan tata kelola perusahaan kecil. (Warfield et al., 1995 dan Beasley et al., 2000). Oleh karena itu, perusahaan kecil akan lebih mudah untuk melakukan manipulasi laba. Selain itu, perusahaan besar pada umumnya diaudit oleh KAP besar dengan auditor yang berpengalaman sehingga dapat meminimalisasi praktik-praktik manipulasi laba yang agresif. Di sisi lain, Barton dan Simko (2002) menunjukkan indikasi bahwa perusahaan besar dihadapkan pada tekanan eksternal untuk memenuhi ekspektasi analis terkait kondisi keuangannya. Ekspektasi ini mendorong perusahaan besar untuk melakukan manipulasi laba. Auditor lebih mudah mengesampingkan manipulasi laba yang dilakukan oleh klien-klien besarnya (Nelson et al., 2002). Hal ini membuat perusahaan berukuran besar lebih mudah untuk melakukan manipulasi laba.

Perbedaan pendapat tersebut membuat ukuran perusahaan diprediksikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan manipulasi *laba*, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ukuran perusahaan diprediksikan memiliki pengaruh negatif (positif) ataupun positif (negatif) terhadap DAC (kualitas audit).

3.3.6 Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH)

Pertumbuhan perusahaan (GROWTH) diukur dengan rasio *market-to-book ratio* yang dicerminkan dengan proksi *price-to-book value* (PBV). Perusahaan akan berusaha untuk menjaga tingkat pertumbuhannya. Oleh karena itu, perusahaan yang pertumbuhannya yang diekspektasikan memiliki pertumbuhan yang tinggi akan berusaha untuk memenuhi ekspektasi tersebut dengan

melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya agar tetap dapat menampilkan tingkat pertumbuhan perusahaan yang konsisten (Sweeney dan Summer, 1998). Salah satu caranya adalah dengan melakukan manajemen laba. Velury dan Jenkins (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan perusahaan dan kualitas audit. Berdasarkan argumen tersebut, maka diprediksikan terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan perusahaan dan DAC atau dengan kata lain, terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan perusahaan dan kualitas audit.

3.3.7 Tingkat Utang Perusahaan / *Leverage* (LEV)

Tingkat utang perusahaan / *leverage* (LEV) diukur dengan rasio utang terhadap total aset. Becker et al. (1996) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat utang perusahaan terhadap DAC-nya. Namun, menurut salah satu teori positif akuntansi (*debt covenants hypothesis*), tingkat utang yang tinggi akan menginsentif perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh kreditor, salah satunya dengan melakukan manajemen laba yang akan meningkatkan DAC. Berdasarkan argumen tersebut, maka dalam penelitian ini tingkat utang perusahaan diprediksikan dapat memiliki hubungan yang positif (negatif) maupun negatif (positif) terhadap DAC (kualitas audit)

3.3.8 Kondisi Keuangan Perusahaan (LOSS)

Kondisi keuangan perusahaan (LOSS) merupakan *dummy variable*. Variabel ini akan bernilai 1 jika perusahaan membukukan kerugian dan bernilai 0 jika perusahaan membukukan keuntungan. Perusahaan yang sedang berada dalam kondisi keuangan yang sulit (diindikasikan dengan kerugian) akan terinsentif untuk melakukan modifikasi atas laporan keuangannya agar dapat menampilkan kinerja keuangan yang baik dan demikian pula sebaliknya (Mosebach dan Simko, 2010). Oleh karena itu, variabel kondisi keuangan perusahaan diprediksikan memiliki hubungan positif dengan DAC atau dengan kata lain berhubungan negatif terhadap kualitas audit.

3.3.9 Arus Kas Perusahaan (CFO)

Arus kas perusahaan (CFO) diukur dengan nilai arus kas operasional perusahaan diskalakan dengan nilai total aset. Perusahaan dengan arus kas yang tidak baik kemungkinan memiliki insentif untuk memperbaiki tampilan kinerjanya dengan melakukan manajemen laba dan demikian pula sebaliknya (Hamilton, 2005). Oleh karena itu, pada penelitian ini CFO diprediksikan berhubungan negatif dengan DAC atau dengan kata lain berhubungan positif dengan kualitas audit.

3.4 Data dan Sampel Penelitian

1.4.1 Metode Pemilihan Sampel

Penelitian ini meneliti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004 sampai 2011. Penelitian ini akan mengambil sampel perusahaan pada periode setelah penerapan peraturan pembatasan *tenure* audit (*tenure* KAP). Penelitian ini juga tidak memasukan industri jasa keuangan dan investasi karena industri jasa keuangan dan investasi diregulasi secara ketat dan memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dapat diperbandingkan dengan perusahaan di industri lainnya. Oleh karena itu, populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2004 sampai 2011 kecuali perusahaan yang bergerak pada industri jasa keuangan dan investasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu..

3.5 Teknik Pengujian dan Metode Analisis Data

Teknik pengujian dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian dan analisis statistik dengan menggunakan perangkat lunak statistik *Stata IC 11*. Penelitian ini menggunakan bentuk data panel, yaitu data yang terdiri dari data *cross-section* (data terdiri dari beberapa individu) dan data *time series* (individu diamati dalam beberapa periode). Dengan menggabungkan data *cross-section* dan *time series*, data panel memberikan data yang lebih banyak, lebih efisien dan dengan derajat kebebasan yang lebih tinggi. Model akan terlebih dahulu diuji dengan menggunakan *balanced panel data*. Jika kondisi sampel tidak mendukung untuk menggunakan *balanced panel data*, maka pengujian akan diuji dengan *unbalanced panel data*. Secara umum, terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk mengolah data panel, yaitu *pooled least square* (PLS), *fixed effect* (FE), dan *random effect* (RE). Penentuan teknik pengujian dan metode analisis data yang digunakan akan dilakukan terlebih dahulu. Kemudian data dianalisis secara statistika dengan memperhatikan kriteria BLUE.

2. ANALISIS DATA

1.1 Sampel Penelitian

Penelitian ini meneliti perusahaan-perusahaan dari seluruh industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 sampai 2011. Prosedur pendeteksian *outlier* ini menghasilkan 114 observasi untuk sampel pada semua model. Observasi yang terindikasi sebagai *outlier* ini kemudian dikeluarkan dari sampel yang akan dianalisis karena terbukti mengganggu hasil pengujian statistik setiap model dalam penelitian ini. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi *outlier* adalah sebagai berikut:

- Data yang berada di bawah nilai $\bar{x} - 3S$ dan di atas nilai $\bar{x} + 3S$ adalah *outlier*, di mana \bar{x} = nilai rata-rata data dan S = standar deviasi data.

1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 pada bagian lampiran. Hasil pengujian metode regresi data panel yang akan digunakan untuk setiap model penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Pengujian Metode Regresi Data Panel

Jenis Uji	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Uji Chow (<i>Pooled Least Square</i> atau <i>Fixed Effect</i>) – Prob > F	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Uji Breusch Pagan Lagrange Multiplier (<i>Pooled Least Square</i> atau <i>Random Effect</i>) - Prob > Chi2	0.0004	0.0000	0.0004	0.0000
Uji Hausman (<i>Fixed Effect</i> atau <i>Random Effect</i>) - Prob > Chi2	0.0187	0.0181	0.0132	0.0515
Metode Regresi Data Panel	FE	FE	FE	RE
Keterangan: FE = Fixed Effect				

4.4 Hasil Pengujian Statistik

Berikut ini adalah hasil pengujian statistik untuk setiap model untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan meregresikan model dengan menggunakan metode regresi data panel yang telah diuji sebelumnya. Pengujian dilakukan setelah memenuhi kriteria asumsi klasik. Pengujian akan dilakukan dengan terlebih dahulu melihat tingkat signifikansi keseluruhan variabel dalam model secara serentak yang kemudian dilanjutkan dengan menguji signifikansi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam setiap model penelitian.

4.4.1 *Tenure* Audit, Rotasi auditor dan Kualitas Audit

2.4.1.1 Pengujian Pengaruh *Tenure* KAP terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian Model 1 menghasilkan *output* terkait *tenure* KAP dan kualitas audit dapat dilihat pada Tabel 4.3 pada bagian lampiran. Dengan probabilitas 0.692, *tenure* KAP **tidak berpengaruh** secara signifikan terhadap akrual diskresioner absolut. Dengan probabilitas 0.683, *tenure* KAP **tidak berpengaruh** secara kuadratik terhadap akrual diskresioner absolut.

Dari *output* di atas, dapat terlihat bahwa *tenure* KAP tidak memiliki pengaruh terhadap akrual diskresioner absolut, baik secara linier maupun kuadratik. Hal ini berarti **tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *tenure* KAP dan kualitas audit**. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Wahyuni (2012), namun berbeda dengan hasil penelitian Chi dan Huang (2005) yang menggambarkan hubungan *tenure* KAP dan kualitas audit sebagai kurva *concave*, Brooks, et al. (2012) yang menggambarkan hubungan *tenure* KAP dan kualitas audit sebagai kurva *concave*, dan Fitriany, et al (2011) yang menggambarkan hubungan *tenure* KAP dan kualitas audit sebagai kurva *concave*. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

1. Perbedaan kondisi peraturan antarnegara terkait pembatasan *tenure* audit.

Chi dan Huang (2005) melakukan penelitian di Taiwan, sebuah negara di mana tidak terdapat peraturan yang membatasi *tenure* KAP. Sementara penelitian ini dilakukan di Indonesia yang membatasi *tenure* KAP pada titik maksimum 6 tahun.

Adanya pembatasan *tenure* KAP akan membuat KAP menjadi enggan untuk melakukan spesialisasi pada segmen tertentu (Petty dan Cuganesan, 1996). KAP di Indonesia, yang memiliki kemampuan pembelajaran yang berbeda dengan KAP di Taiwan, diwajibkan untuk menghentikan

proses akumulasi pemahaman dan peningkatan kompetensinya akibat adanya pembatasan *tenure* KAP. Penelitian Fitriany (2011) menunjukkan bahwa batas waktu maksimum perikatan KAP sebelum terjadi penurunan kualitas audit adalah 10 tahun, sementara peraturan di Indonesia mewajibkan pergantian KAP setelah 6 tahun. Pembatasan dini inilah yang mungkin menyebabkan tidak ditemukannya pengaruh *tenure* KAP terhadap kualitas audit tersebut. Oleh karena itu, perbedaan kondisi peraturan antarnegara ini mungkin menjadi penyebab adanya perbedaan hasil penelitian.

2. Dua faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu kompetensi dan independensi, memiliki pengaruh yang sama kuat terhadap kualitas audit

Hubungan kuadratik akan terjadi jika salah satu dari faktor tersebut lebih kuat mempengaruhi kualitas audit dibandingkan yang lainnya. Ketika dua faktor tersebut memiliki pengaruh yang sama kuat terhadap kualitas audit, maka hubungan kuadratik antara *tenure* KAP dan kualitas audit tidak terjadi (Wahyuni, 2012). Kemungkinan lain adalah peningkatan kedua faktor tersebut terjadi di perusahaan-perusahaan yang berbeda dalam sampel penelitian namun dengan perbandingan jumlah yang sama. Kedua faktor yang mempengaruhi kualitas audit tersebut akan mempengaruhi kualitas audit dengan arah yang berlawanan seiring peningkatan *tenure* KAP.

3. Perbedaan periode waktu pengamatan.

Titik awal periode pascaregulasi adalah tahun 2004. Setidaknya, diperlukan waktu minimal 6 tahun (sesuai batas maksimum yang ditetapkan dalam regulasi) untuk melihat lebih jelas dampak dan efektivitas dari penerapan regulasi pembatasan *tenure* KAP. Fitriany, et al. (2011) mengambil sampel hingga periode 2008. Penelitian ini memperpanjang periode sampel tersebut hingga tahun 2011 untuk melihat dampak penerapan peraturan tersebut setelah melewati batas maksimum perikatan KAP dan perusahaan seperti yang diwajibkan dalam peraturan.

Dari pengujian-pengujian yang dilakukan, semua hasil yang didapatkan **tidak mendukung Hipotesis 1a.**

4.4.1.2 Pengujian Pengaruh *Tenure* AP terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian Model 2 dapat dilihat pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa *Tenure* AP dan *Tenure* AP² tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akrual diskresioner absolut. Dari *output* di atas dapat terlihat bahwa *tenure* AP tidak berpengaruh terhadap tingkat akrual diskresioner absolut, baik secara linier maupun kuadratik. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Jenkins dan Velury (2012) dan hasil penelitian Chi dan Huang (2005) yang menggambarkan kurva hubungan antara *tenure* AP dan kualitas audit dalam kurva *concave*, dan berbeda pula dengan hasil penelitian Fitriany, et al. (2011) yang menunjukkan bahwa kurva hubungan antara *tenure* AP dan kualitas audit pascaregulasi yang mewajibkan adanya rotasi KAP adalah kurva *convex* dengan titik minimum 2 tahun. Kurva *convex* menggambarkan kualitas audit akan turun pada awal periode perikatan auditor, kemudian naik setelah melewati periode 2 tahun. Namun, hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Wahyuni (2012) yang menunjukkan bahwa pada periode pascapenerapan regulasi yang membatasi *tenure* audit, *tenure* AP tidak berpengaruh pada kualitas audit. Hal-hal yang mungkin

menjadi penyebab ketidaksignifikan pengaruh *tenure* AP terhadap kualitas audit serupa dengan kemungkinan penyebab ketidaksignifikan pengaruh *tenure* KAP terhadap kualitas audit, yakni perbedaan periode pengamatan, di mana periode pengamatan pada penelitian ini diperpanjang sampai tahun 2011. Dua faktor yang mempengaruhi kualitas audit (kompetensi dan independensi) memiliki pengaruh yang sama kuat terhadap kualitas audit sehingga menghilangkan pengaruh dari *tenure* AP terhadap kualitas audit (Wahyuni, 2012).

4.4.1.2 Pengujian Pengaruh Rotasi KAP terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian Model 1 menghasilkan *output* terkait rotasi KAP dan kualitas audit dapat dilihat pada Tabel 4.3 pada bagian lampiran.

- Dengan probabilitas 0.177, rotasi KAP **tidak berpengaruh** terhadap akrual diskresioner absolut.

Dari *output* tersebut dapat terlihat bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap akrual diskresioner absolut, maka **rotasi KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit**. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Fitriany, et al. (2011), Fitriany dan Rosita (2011), dan Ruiz-Barbadillo, et al. (2009). Carrera, et al. (2007), namun berbeda dengan hasil penelitian Simmons dan Lovata (2009) dan Daniels dan Booker (2009). Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu dapat disebabkan beberapa hal.

1. Perbedaan jenis sampel yang digunakan.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Simmons dan Lovata (2009) dapat disebabkan oleh perbedaan sifat sampel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik sementara Simmons dan Lovata (2009) menggunakan entitas pendidikan (universitas) sebagai sampelnya. Perbedaan sifat sampel ini berpengaruh kepada proksi kualitas audit yang digunakan. Penelitian ini menggunakan akrual diskresioner absolut sebagai proksi kualitas audit, yang notabene merupakan data keuangan. Sementara Simmons dan Lovata (2009) menggunakan jumlah temuan audit sebagai indikator bermanfaat atau tidaknya rotasi KAP. Jumlah temuan audit, seperti yang disebutkan Simmons dan Lovata (2009), merupakan fungsi dari berbagai hal, sehingga tidak cukup relevan untuk diperbandingkan dengan akrual diskresioner absolut sebagai proksi kualitas audit.

2. Perbedaan jenis industri yang menjadi sampel.

Perbedaan hasil penelitian dengan Daniels dan Booker (2009) dapat dikarenakan perbedaan jenis industri yang menjadi sampel penelitian. Daniels dan Booker (2009) meneliti industri keuangan dan persepsinya terhadap rotasi KAP, sementara penelitian ini justru mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan karena karakteristiknya yang spesifik. Perbedaan hasil penelitian ini dapat dipahami karena industri keuangan merupakan industri yang *highly regulated* dan memiliki peraturan-peraturan tersendiri yang berbeda dari industri lain, termasuk dalam hal KAP dan auditor.

Hasil pengujian ini **tidak mendukung Hipotesis 1b** yang menyatakan bahwa rotasi auditor akan mempengaruhi kualitas audit.

4.4.1.3 Pengujian Pengaruh Rotasi AP terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian Model 2 menghasilkan *output* terkait rotasi AP dan kualitas audit dapat dilihat pada Tabel 4.4 pada bagian lampiran.

- Dengan probabilitas 0.540, rotasi AP **tidak berpengaruh** signifikan terhadap akrual diskresioner absolut.

Dari *output* di atas, dapat terlihat bahwa rotasi AP tidak berpengaruh signifikan terhadap akrual diskresioner absolut. Hal ini berarti **rotasi AP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit**. Hasil pengujian ini berbeda dengan hasil penelitian Hamilton, et al. (2005) dan Fitriany, et al (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh positif rotasi AP terhadap kualitas audit. Hasil pengujian ini **tidak mendukung Hipotesis 1b** yang menyatakan bahwa rotasi auditor mempengaruhi kualitas audit.

4.4.2 Pengujian Pengaruh Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit

Dari hasil pengujian Model 1 terbukti bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap akrual diskresioner absolut, yang berarti ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan pernyataan De Angelo (1981) yang menyatakan bahwa KAP *Big X* menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan KAP *non Big X*. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Datar et al. (1991) yang menunjukkan bahwa KAP besar dan prestisius memiliki *concern* untuk melindungi reputasinya, maka ia akan memiliki insentif yang lebih untuk menunjukkan kualitas audit yang baik, dibandingkan KAP lain. Hasil pengujian Model 2 juga menunjukkan hal yang serupa. Oleh karena itu, kedua hasil pengujian ini **mendukung hipotesis 2**

4.4.3 Pengaruh Moderasi Ukuran KAP terhadap Hubungan *Tenure* Audit dan Kualitas Audit

4.4.3.1 Pengaruh Moderasi Ukuran KAP terhadap Hubungan *Tenure* KAP dan Kualitas Audit

Hasil pengujian Model 3 (Tabel 4.5 pada lampiran) Dengan probabilitas 0.0715, moderasi ukuran KAP **berpengaruh secara signifikan** terhadap hubungan *tenure* KAP dan akrual diskresioner absolut pada tingkat signifikansi 10%. Dengan probabilitas 0.0595, moderasi ukuran KAP **berpengaruh secara signifikan** terhadap hubungan kuadratik *tenure* KAP dan akrual diskresioner absolut pada tingkat signifikansi 10%.

Dari *output* di atas dapat terlihat bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara *tenure* KAP dan akrual diskresioner absolut, baik secara linier maupun kuadratik. Hal ini berarti **ukuran KAP memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan antara *tenure* KAP dan kualitas audit**. Dengan pengaruh moderasi ukuran KAP ini, *tenure* KAP menjadi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sesuai dengan ekspektasi awal, pengaruh moderasi ini akan memberikan dampak yang baik bagi hubungan antara *tenure* KAP dan kualitas audit. Namun, karena tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara *tenure* KAP, *tenure* KAP kuadrat dan kualitas audit ketika tidak dipengaruhi oleh moderasi ukuran KAP, maka tidak dapat

diketahui apakah pengaruh moderasi ini akan memperkuat hubungan positif (kurva *concave*) antara *tenure* KAP (*tenure* KAP kuadrat) dan kualitas audit, atau memperlemah hubungan negatif (kurva *convex*) antara *tenure* KAP (*tenure* KAP kuadrat) dan kualitas audit. Hasil pengujian pada Model 3 secara keseluruhan **mendukung Hipotesis 3.**

4.4.3.2 Pengaruh Moderasi Ukuran KAP terhadap Hubungan *Tenure* AP dan Kualitas Audit

Hasil pengujian Model 4 (Tabel 4.6) Dengan probabilitas 0.167, moderasi ukuran KAP **berpengaruh negatif secara signifikan** terhadap hubungan *tenure* AP dan akrual diskresioner absolut.

Dengan probabilitas 0.159, moderasi ukuran KAP **tidak berpengaruh secara signifikan** terhadap hubungan kuadratik *tenure* AP dan akrual diskresioner absolut.

Dari *output* di atas dapat terlihat **pengaruh moderasi ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap hubungan kuadratik antara *tenure* AP dan kualitas audit.** Kemungkinan penyebab ketidaksignifikanan ini serupa dengan penyebab ketidaksignifikanan ukuran KAP terhadap kualitas audit pada Model 2. Analisis Model 2 dan Model 4 ini bertolak dari hasil penelitian Chi dan Chin (2006) yang meneliti tentang spesialisasi audit dan hubungannya terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi dari spesialisasi audit pada tingkat KAP dan spesialisasi audit pada tingkat auditor, bukan hanya spesialisasi audit pada tingkat KAP saja seperti yang selama ini diperlihatkan dalam berbagai penelitian. Dari hasil penelitian ini, kemudian ditarik benang merah bahwa karakteristik KAP dan karakteristik auditor masing-masing memberi kontribusi kepada kualitas audit. Ukuran KAP merepresentasikan karakteristik KAP, di mana KAP besar diasosiasikan dengan kualitas audit yang lebih baik.

Sementara itu, variabel independen dalam Model 4 merepresentasikan karakteristik auditor. Berdasarkan kerangka berpikir yang bertolak dari hasil penelitian Chi dan Chin (2006), adalah sesuatu yang kurang relevan jika dua variabel yang merepresentasikan hal yang berbeda (*tenure* AP = karakteristik auditor dan ukuran KAP = karakteristik KAP) diinteraksikan. Interaksi tersebut kemungkinan tidak akan menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan. Hubungan interaksi mungkin akan lebih relevan dan memperlihatkan pengaruh moderasi yang signifikan signifikan jika variabel *tenure* AP diinteraksikan dengan variabel lain yang sama-sama merepresentasikan karakteristik auditor, misalnya spesialisasi industri pada tingkat auditor atau variabel yang menunjukkan berpengalaman atau tidaknya auditor tersebut.

Selain hal di atas, terdapat dua hal yang juga mejadi kemungkinan penyebab ketidaksignifikanan pengaruh moderasi ukuran KAP, yakni:

1. Penggolongan KAP *Big X* dan Non *Big X*

Penggolongan KAP sebagai KAP *Big X* didasarkan pada afiliasi internasionalnya dengan sejumlah KAP terbesar di dunia. KAP yang tidak berafiliasi internasional dengan KAP besar tersebut dikategorikan sebagai non *Big X* dan dianggap memiliki kualitas audit yang serupa sebagai sesama Non *Big X*. Padahal, di dalam kelompok non *Big X* termasuk pula di dalamnya KAP *second tier* yang

juga berafiliasi dengan KAP internasional, walaupun bukan dengan empat KAP terbesar di dunia. Cassel (2009) dalam penelitiannya pada perusahaan di Amerika Serikat menemukan bahwa KAP *second tier* menunjukkan peningkatan kualitas audit dan kualitas audit tersebut sudah dapat disejajarkan dengan kualitas audit KAP *Big X*.

2. Perkembangan teknologi terkait audit dan *benchmarking*

Perkembangan pesat teknologi terkait audit membuat teknologi tersebut tidak lagi menjadi “barang mewah” yang hanya dapat dimiliki oleh KAP *Big X* saja. KAP *non Big X* pun sudah mulai mengadopsi teknologi terkait audit tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya. Selain itu, semakin banyak pula KAP *non Big X* yang melakukan *benchmarking* dan mengadopsi pendekatan KAP *Big X* dalam melakukan proses auditnya. Dengan mengadopsi pendekatan KAP *Big X*, KAP *nonBig X* dapat meningkatkan kualitas auditnya.

Hasil pengujian lanjutan pertama, kedua dan ketiga terhadap Model 4 menunjukkan hasil yang serupa, di mana tidak terdapat pengaruh moderasi ukuran KAP yang signifikan. Secara keseluruhan, hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh moderasi ukuran KAP terhadap hubungan kuadrat antara *tenure AP* dan kualitas audit. Maka, hasil pengujian Model 3 ini **tidak memberikan cukup bukti untuk mendukung hipotesis 3**.

4.4.4 Pengujian Pengaruh Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit

Dari hasil pengujian pada Model 4, ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan pada akrual diskresioner absolut, yang berarti ukuran KAP tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas. Namun, pada Model 3 terlihat adanya pengaruh positif ukuran KAP terhadap kualitas audit. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, hasil pengujian ini **mendukung hipotesis 2**.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengujian pada periode pascapenerapan peraturan yang mewajibkan pembatasan *tenure* KAP menunjukkan bahwa *tenure* KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengujian dengan mengeluarkan variabel rotasi KAP, *tenure* KAP kuadrat, dan keduanya juga menunjukkan hal yang serupa. Demikian pula ketika *tenure* KAP menjadi satu-satunya variabel independen, hubungan antara *tenure* KAP dan kualitas audit tetap tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara linear maupun kuadrat, *tenure* KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengujian pada periode pascapenerapan peraturan yang mewajibkan pembatasan *tenure* KAP menunjukkan bahwa *tenure* AP tidak berpengaruh secara kuadrat terhadap kualitas audit. Demikian pula ketika pengujian dilakukan dengan mengeluarkan variabel rotasi AP, *tenure* AP kuadrat, dan keduanya, hasil pengujian tetap menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa *tenure* AP tidak berpengaruh secara kuadrat maupun secara linear terhadap kualitas audit.

Pengujian pada periode pascapenerapan peraturan yang mewajibkan pembatasan *tenure* audit menunjukkan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengujian yang dilakukan dengan mengeluarkan variabel *tenure* KAP kuadrat dan pengujian yang menggunakan hanya variabel rotasi KAP sebagai variabel independen menunjukkan hal yang konsisten dengan pengujian utama.

Pengujian pada periode pascapenerapan peraturan yang mewajibkan pembatasan *tenure* audit menunjukkan bahwa rotasi AP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengujian yang dilakukan dengan mengeluarkan variabel *tenure* AP kuadrat dan pengujian yang dilakukan dengan hanya menggunakan variabel rotasi AP sebagai variabel independen menunjukkan hal yang serupa dengan pengujian utama. Seluruh hasil pengujian, yang menguji pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas audit. Selain berpengaruh secara langsung terhadap kualitas audit, ukuran KAP juga terbukti memoderasi hubungan antara *tenure* KAP dan kualitas audit, di mana pengaruh moderasi ini berdampak pada peningkatan kualitas audit.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dalam bidang yang serupa diharapkan dapat meminimalisasi keterbatasan yang ada. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode waktu pengambilan sampel penelitian ini hanya sampai tahun 2011. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat memperkuat analisis yang ada.
2. Perusahaan yang dijadikan sampel hanya berasal dari perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jenis sampel dengan memasukkan perusahaan privat dan/atau entitas ekonomi lainnya selain perusahaan yang juga menggunakan jasa audit.
3. Penelitian ini menggunakan akrual diskresioner (*discretionary accrual*) sebagai proksi kualitas audit. Dalam praktiknya, kualitas audit tidak hanya diukur dari kualitas laba. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi kualitas audit yang lain sebagai perbandingan untuk melihat konsistensi hasil pengujian.
4. Penelitian ini mengeluarkan perusahaan yang bergerak di industri keuangan dari dalam sampel karena karakteristik industrinya yang spesifik. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan industri keuangan sebagai sampel yang diuji secara terpisah untuk melihat perbedaannya dengan industri yang lain.
5. Penelitian ini mendiferensiasikan ukuran KAP sebagai *Big X* dan *non Big X*. Pada kenyataannya, KAP *non Big X* dapat didiferensiasikan lebih lanjut. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya dapat melakukan diferensiasi ukuran KAP secara lebih spesifik untuk melihat hasil yang lebih signifikan.

6. Model dalam penelitian ini memiliki *adjusted R-square* yang kecil. Hal ini berarti banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas audit namun tidak terdapat di dalam model. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain, seperti kualitas tata kelola perusahaan dan penerapan IFRS, sebagai variabel kontrol di dalam model.
7. Penelitian ini tidak mengeluarkan perusahaan dengan nilai ekuitas negatif yang kemungkinan mempengaruhi hasil pengujian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengeluarkan perusahaan dengan nilai ekuitas negatif dan/atau melakukan pengujian terpisah terhadap perusahaan dengan nilai ekuitas negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. 1992. *Statement of Position Regarding Mandatory Rotation of Audit Firms of Publicly Held Companies*. New York: AICPA.
- Ali, A. A., Ream Tawfiq Ibrahim, A. I., & Rana Ahmad, A. B. 2011. Do audit tenure and firm size contribute to audit quality? *Managerial Auditing Journal*, 26(4), 317-334.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. *Komisaris Independen. Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. PT Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Arel, B., Brody, R. G., & Pany, K. 2005. Audit firm rotation and audit quality. *The CPA Journal*, 75(1), 36-39.
- Arens, A. A., R. J. Elder, M. S., dan A. A. Jusuf. 2009. *Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach*. Pearson Prentice Hall.
- Arrunada, B. and C. Paz-Ares. 1997. Mandatory rotation of company auditors: A critical examination. *International Review of Law and Economics* 17, 13-61.
- Balsam, S., J. Khrisnan dan Y. S. Yang. 2003. Auditor Industry Specialization and Earnings Quality. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 22, 71-97.
- Barbara Arel, Richard G. Brody, And Kurt Pany, 2005, Audit Firm Rotation And Audit Quality, *The CPA Journal Online*.
- Barton, J., and P. Simko. 2002. The balance sheet as an earnings management constraint. *Accounting Review* 77 (Supplement): 1-27.
- Bartov, E., F.A. Gul, J.S.L. Tsui. 2001. Discretionary accrual models and audit qualification. *Journal of Accounting and Economics* 30, 421-452.
- Beasley, M. S., J. V. Carcello, D. R. Hermanson, and P. D. Lapedes. 2000. Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. *Accounting Horizon* 14: 441-454.
- Beatty, R. P. 1989. Auditor Reputation and The Pricing Of Initial Public Offering. *The Accounting Review* 64(Oct), 693-709.
- Becker, C., M. Defond, J. Jiambalvo, dan K. R. Subramanyam. 1998. The effect of audit quality on earnings management. *Contemporary Accounting Research* (Spring), 1-24.
- Boynton, W. C., R. N. Johnson, W. Kell. 2001. *Modern Auditing 7th Edition*. John Wiley and Sons, Inc.
- Brooks, L. Z., Agnes Cheng, C. S., & Reichelt, K. J. 2012. Audit firm tenure and audit quality: Evidence from U.S. firms. Rochester, Rochester.
- Cameran, M., Merlotti, E., & Di Vincenzo, D. 2011. The audit firm rotation rule: A review of the literature. Rochester, Rochester: doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.825404>
- Carrera, N., Nieves Gómez-Aguilar, Humphrey, C., & Ruiz-Barbadillo, E. 2007. Mandatory audit firm rotation in Spain: A policy that was never applied. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(5), 671-701.
- Carrey, Peter dan Roger Simnett. 2006. Audit Partner Tenure and Audit Quality. *The Accounting Review*, Vol. 81, No. 3, 653-676.
- Cassell, C. A. 2009. A new era for the big 8? evidence on the association between earnings quality and audit firm type. Disertasi Texas A&M University.
- Catanach Jr, A.H., & Walker, P.L. 1999. The International debate over mandatory auditor rotation: a conceptual research framework. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 8 (1), 43-66.
- Chi, H., & Chin, C. 2011. Firm versus partner measures of auditor industry expertise and effects on auditor quality. *Auditing*, 30(2), 201-229. 17242
- Chi, Wuchun dan Huang. 2005. Discretionary Accruals, Audit-Firm Tenure, and Audit-Partner Tenure: Empirical Evidence from Taiwan. *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 1, 65-92.
- Daniels, B. W., & Booker, Q. 2009. Bank loan officers' perceptions of audit firm rotation. *The CPA Journal*, 79(1), 36-40.
- Daugherty, B., Dickins, D., Higgs, J., & Tatum, K. 2013. The question of mandatory audit firm rotation: Would investors benefit? *The CPA Journal*, 83(1), 28-33.
- Davis, R., B. Soo., dan G. Trompeter. 2002. Auditor tenure, auditor independence and earnings management. Working Paper, Boston College, Boston, MA.
- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics* 3(3), 183-199.
- DeAngelo, L. E. 1986. Accounting numbers as market valuation substitutes: a study of management buyouts of public shareholders. *The Accounting Review* 61, 400-420.
- Dechow, P. dan Dichev I. 2002. The Quality of Accrual and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. *The Accounting Review (Supplement)* 77, 35-39.
- Dechow, P. M. 1994. Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 18, 3-42.

- Dechow, P. M., Sloan, R., dan Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70(2), 193-225.
- Dowling, C. dan R. Moroney 2008. Auditor performance variation: Impact of subspeciality knowledge differences between industry specialists. *Advance in Accounting Behavioral Research* 19, 59-80.
- Eilifsen, Aasmund and Knivsflå, Kjell Henry. 2013. Earnings Management around Large Equity Increases: Do Audit Firm Size and Non-Audit Services Matter? Diunduh dari SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2200346> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2200346>
- Fitriany. 2011. Analisis komprehensif pengaruh kompetensi dan independensi akuntan publik terhadap kualitas audit. *Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Departmen Akuntansi: Depok.*
- Fitriany, Sidharta Utama, Dwi Martani, Hilda Rossieta. 2011. Do Mandatory Audit Firm and Audit Partner Rotation Really Improve Audit Quality? Comparison between Pre and Post Regulation Period in Indonesia. Universitas Indonesia.
- Foroghi, D., & Shahshahani, A. M. 2012. Audit firm size and going-concern reporting accuracy. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(9), 1093-1098.
- Francis, J. dan E. Wilson 1988. Auditor changes: A joint test of theories relating to agency costs and auditor differentiation. *The Accounting Review* 63:4, 663-682.
- Francis, J., E. Maydew dan H. Sparks. 1999. The Role of Big Auditors in the Credible Reporting of Accruals. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 18 (fall), 17-34.
- Francis, J. 2004. What do we know about audit quality?. *The British Accounting Review*, Vol. 36, 345-368.
- Geiger, M. A. and K. Raghunandan. 2002. Auditor tenure and audit reporting failures. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 21 (1), 67-78.
- Gujarati, D.N. 2003. *Basic Econometrics 4th Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Hamilton, J. M., Ruddock, C. M. S., Stokes, D., dan Taylor, S. L. 2005. Audit partner rotation, earnings quality and earnings conservatism. Rochester, Rochester: doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.740846>
- Healy, P.M. 1985. The effects of bonus schemes on accounting decisions. *Journal of Accounting and Economics* 7, 85-107.
<http://www.idx.co.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jackson, A. B., Moldrich, M., & Roebuck, P. 2010. Mandatory audit firm rotation and audit quality. Rochester, Rochester: doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1000076>
- Jenkins, D. S., & Velury, U. K. 2012. Auditor tenure and the pricing of discretionary accruals in the post-SOX era. *Accounting and the Public Interest*, 12, 1-15
- Jensen, M. dan W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Jones, J., 1991, Earning Management During Import Relief Investigation, *Journal of Accounting Research*, Autumn.
- Kaszniak, R. 1999. On the association between disclosure and earnings management. *Journal of Accounting Research* 22, 353-367.
- Keputusan Menteri Keuangan: 359/KMK.06/2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2002.
- Keputusan Menteri Keuangan: 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Knechel, W. Robert dan Ann Vanstraelen. 2007. The Relationship between Auditor Tenure and Audit Quality Implied by Going Concern Opinion. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 26, May, 113-131.
- Lee, H., dan V. Mande. 2003. The effect of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 on accounting discretion of client managers of Big 6 and non-Big 6 auditors. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 22(1): 93-108.
- Lennox, C. 1999. Are large auditors more accurate than small auditors?. *Accounting and Business Research*, Vol. 29, No. 3, 217-227.
- Lind, D.A., William G. Marchal., Samuel A. Wathen. 2008. *Statistical Techniques in Business and Economics with Global Data Sets 13th Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin
- Mautz, R & Sharaf. 1961. *The Philosophy of Auditing*. Sarasota, FL: American Accounting Association.
- Mosebach, Michael & Paul Simko. 2010. Discretionary Accruals and the Emergence of Profitability, *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, Vol. 25, No. 3, July, 351-374.
- Myers, J., Myers, L., & Omer, T. 2003, Exploring the term of the auditor-client relationship and the quality of earnings: A case of mandatory auditor rotation. *The Accounting Review*, Vol. 78, 779-799.
- Nelson, M. W., J. A. Elliott, and R. L. Tarpley. 2002. Evidence from auditors about managers' and auditors' earnings-management decisions. *Accounting Review* 77 (Supplement), 175-202.

- O'Keefe, T., R. King, dan K. Gaver. 1994. Audit Fees, Industry Specialization and Compliance with GAAS Reporting Standards. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 13 (Fall), 42-55.
- Owhoso, V.E., W. F. Meisser, dan J.G. Linch. 2002. Error detection by industry-specialized teams during sequential audit review. *Journal of Accounting Research*, 40(3), 883-900.
- Palmrose, Z. 1988. The Demand for Quality Differentiated Audit Services in an Agency Cost Setting: An Empirical Investigation. *Auditing Research Symposium*, 229-252.
- Palmrose, Z. 1988. An analysis of auditor litigation and audit service quality. *The Accounting Review* 63, 55-73.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Petty, R., and S. Cuganesan. 1996. Auditor rotation: Framing the debate. *Australian Accountant* (May), 40 – 41.
- Ruiz-Barbadillo, E., G3mez-Aguilar, N., & Carrera, N. 2009. Does mandatory audit firm rotation enhance auditor independence? Evidence from Spain. *Auditing*, 28(1), 113-135.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Method for Business 4th Edition*. United States of America: John Wiley & Sons Inc.
- Shockley, R. A. 1981. Perceptions of auditors' independence: An empirical analysis. *The Accounting Review*, 56(4), 785-800.
- Simmons, T. N., Costigan, M. L., & Lovata, L. M. 2009. Mandatory audit firm rotation: Evidence from illinois state universities. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 13(3), 123-132.
- Simunic, D. dan M. Stein. 1987. Production Differentiation in Auditing: A Study of Auditing: A Study of Auditor Choice in The Market for New Issues. *Canadian Certified General Accountants' Research Foundation*.
- Siregar, Sylvia V. N P., Fitriany, Arie Wibowo, dan Viska Anggraita. 2012. Audit Tenure, Audit Rotation, and Audit Quality: The Case of Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 5 (1).
- Siregar, Sylvia V.N.P., dan Sidharta Utama. 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba (*Earnings Management*). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, September, 307-326.
- Solomon, I.M., Shields, M. dan Whittington, O.R. 1999. What do Industry Auditors Know? *Journal of Accounting Research* 37, 1, 191-208.
- Suwardi, Akbar. 2011. Stata: Tahapan dan Perintah (Syntax) Data Panel. *Modul Data Panel Laboratorium Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi FE UI*.
- Teoh, S. H. dan T. J. Wong. 1993. Auditor size and the earnings response coefficient. *The Accounting Review* 68, 346-366.
- Tuanakota, Theodorus M. 2011. *Berpikir Kritis dalam Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Indonesia. 2008. *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*.
- Wallace, W. 1980. The economic role of the audit in free and regulated markets. *The Touche Ross and Co. Aid to Education Program*. Dipublikasikan kembali pada *Auditing Monographs* (New York Macmillan Publishing Co., 1985).
- Warfield, T. D., J. J. Wild, and K. L. Wild. 1995. Managerial Ownership, Accounting choices, and informativeness of earnings. *Journal of Accounting & Economics* 20: 61-92.

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Standar Deviasi
ABS_DAC	1113	0.0000831	0.4474364	0.0779221	0.0717615
FTENURE	1113	1	17	5.163522	3.9339760
SIZE	1113	16.55084	25.43974	20.71085	1.73276
GROWTH	1113	-4.87	10.58	1.418293	1.585767
CFO	1113	-0.3504193	0.4699692	0.0627787	0.1159254
LEV	1113	0.0002	1.3564	0.3290817	0.2248052

Keterangan: **ABS_DAC** = *Absolute Discretionary Accrual*, sebagai proksi kualitas audit; **FTENURE** = *Real audit firm tenure* (*tenure* KAP riil), lama masa pemberian jasa audit oleh suatu KAP yang dihitung dengan jumlah tahun perikatan audit perusahaan dengan KAP; **SIZE** = Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari nilai buku total aset; **GROWTH** = Pertumbuhan perusahaan, *price-to-book value*; **CFO** = Arus kas operasional perusahaan diskalakan dengan total aset; **LEV** = *Leverage*, diukur dengan rasio *debt-to-total asset*.

Variabel	N	Frekuensi		Persentase	
		0	1	0	1
FROTATION	1113	895	218	80.41%	19.59%
LOSS	1113	866	247	77.81%	22.19%
BIGX	1113	630	483	66.67%	51.85%

Keterangan: **FROTATION** = *Dummy* rotasi KAP, bernilai 1 jika terdapat rotasi KAP dan bernilai 0 jika tidak terdapat rotasi KAP; **LOSS** = Kondisi keuangan perusahaan, dilihat dari *income* perusahaan (negatif / positif); **BIGX** = *Dummy* ukuran KAP, bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan bernilai 0 jika sebaliknya.

Tabel 4.1a Statistik Deskriptif Model 1 dan Model 3

$$ABS_DAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 FTENURE_{it} + \alpha_3 FTENURESQ_{it} + \alpha_4 FROTATION_{it} + \alpha_5 BIGX_{it} + \alpha_6 LEV_{it} + \alpha_7 GROWTH_{it} + \alpha_8 SIZE_{it} + \alpha_9 LOSS_{it} + \alpha_{10} CFO_{it} + \epsilon_{it}$$

Tabel 4.1b Statistik Deskriptif Model 2 dan Model 4

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Standar Deviasi
ABS_DAC	1137	0.0000831	0.4474364	0.0779754	0.0718004
PTENURE	1137	1	4	1.800352	0.8452851
SIZE	1137	16.55084	25.43974	20.74948	1.73185
GROWTH	1137	-4.87	10.58	1.418232	1.590498
CFO	1137	-0.3504193	0.4699692	0.0639676	0.1157798
LEV	1137	0.0002	1.3564	0.3284749	0.2277315

Keterangan: ABS_DAC = *Absolute Discretionary Accrual*, sebagai proksi kualitas audit; PTENURE = *tenure AP*, yang dihitung dengan jumlah tahun perikatan audit perusahaan dengan auditor; SIZE = Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari nilai buku total aset; GROWTH = Pertumbuhan perusahaan, *price-to-book value*; CFO = Arus kas operasional perusahaan diskalakan dengan total aset; LEV = *Leverage*, diukur dengan rasio *debt-to-total asset*.

Variabel	N	Frekuensi		Persentase	
		0	1	0	1
PROTATION	1137	635	502	55.85%	44.15%
LOSS	1137	885	252	77.84%	22.16%
BIGX	1137	621	516	54.62%	45.38%

Keterangan: PROTATION = *Dummy* rotasi KAP, bernilai 1 jika terdapat rotasi KAP dan bernilai 0 jika tidak terdapat rotasi KAP; BIGX = *Dummy* ukuran KAP, bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan bernilai 0 jika sebaliknya.

Variabel	<i>Predicted Sign</i>	<i>Actual Sign</i>	Koefisien	t-Stat.	Prob.	Ket.
FTENURE	+ / -	-	-0.0011408	-0.40	0.692	
FTENURESQ	+ / -	+	0.0000722	0.41	0.683	
FROTATION	+ / -	-	-0.0092774	-1.35	0.177	
BIGX	-	-	-0.0214545	-2.18	0.015	**
SIZE	+ / -	+	0.0112839	2.09	0.038	**
LEV	+ / -	+	0.015293	0.91	0.362	
GROWTH	+	+	0.006738	2.43	0.008	***
CFO	-	-	-0.0539198	-1.77	0.0395	**
LOSS	+	+	-0.0033452	-0.39	0.348	
CONS			0.0785881	8.42	0.000	
<i>N (Number of Observations)</i>						1113
<i>Adjusted R-Squared</i>						0.0286
<i>Prob. (F-Statistic)</i>						0.0136
<p>Keterangan: ABS_DAC = <i>Absolute Discretinary Accrual</i>, sebagai proksi kualitas audit; FTENURE = <i>Real audit firm tenure (tenure KAP riil)</i>, lama masa pemberian jasa audit oleh suatu KAP yang dihitung dengan jumlah tahun <i>audit engagement</i> perusahaan dengan KAP; FTENURESQ = <i>Real audit firm tenure (tenure KAP riil) dikuadratkan</i>; FROTATION = <i>Dummy rotasi KAP</i>, bernilai 1 jika terdapat rotasi KAP dan bernilai 0 jika tidak terdapat rotasi KAP; SIZE = <i>Ukuran perusahaan</i>, diukur dengan logaritma natural dari nilai buku total aset; GROWTH = <i>Pertumbuhan perusahaan, price-to-book value</i>; CFO = <i>Arus kas operasional perusahaan diskalakan dengan total aset</i>; LEV = <i>Leverage</i>, diukur dengan rasio <i>debt-to-total asset</i>.; LOSS = <i>Dummy kondisi keuangan perusahaan</i>, dilihat dari <i>income</i> perusahaan; BIGX = <i>Dummy ukuran KAP</i>, bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4.</p> <p>***, **, * menotasikan tingkat signifikansi pada alpha = 1%, 5%, 10%.</p>						

Tabel 4.3 Hasil Regresi Model 1

Tabel 4.4 Hasil Regresi Model 2

$ABS_DAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 PTENURE_{it} + \alpha_3 PTENURESQ_{it} + \alpha_4 PROTATION_{it} + \alpha_5 BIGX_{it} + \alpha_6 LEV_{it} + \alpha_7 GROWTH_{it} + \alpha_8 SIZE_{it} + \alpha_9 LOSS_{it} + \alpha_{10} CFO_{it} + \epsilon_{it}$						
Variabel	Predicted Sign	Actual Sign	Koefisien	t-Stat.	Prob.	Ket.
PTENURE	+ / -	+	-.0326155	-1.25	0.214	
PTENURESQ	+ / -	+	.0075769	1.50	0.136	
PROTATION	+ / -	-	-.0080681	-0.61	0.540	
BIGX	-	-	-.0193215	-2.05	0.021	**
SIZE	+ / -	+	0.0104581	1.86	0.064	*
LEV	+ / -	-	.0169036	0.95	0.341	
GROWTH	+	+	.0070837	2.53	0.006	***
CFO	-	-	-.0534336	-1.76	0.040	**
LOSS	+	+	-.0043475	-0.56	0.289	
CONS			.0790889	7.58	0.000	
<i>N (Number of Observations)</i>			1137			
<i>Adjusted R-Squared</i>			0.0302			
<i>Prob. (F-Statistic)</i>			0.0171			
<p>Keterangan: ABS_DAC = <i>Absolute Discretionary Accrual</i>, sebagai proksi kualitas audit; PTENURE = <i>tenure</i> auditor, lama masa pemberian jasa audit oleh seroang auditor yang dihitung dengan jumlah tahun <i>audit engagement</i> perusahaan dengan auditor; PTENURESQ = <i>tenure</i> auditor dikuadratkan; PROTATION = Dummy rotasi KAP, bernilai 1 jika terdapat rotasi KAP dan bernilai 0 jika tidak terdapat rotasi KAP; SIZE = Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari nilai buku total aset; GROWTH = Pertumbuhan perusahaan, <i>price-to-book value</i>; CFO = Arus kas operasional perusahaan diskalakan dengan total aset; LEV = Leverage, diukur dengan rasio <i>debt-to-total asset</i>. ; LOSS = <i>Dummy</i> kondisi keuangan perusahaan, dilihat dari <i>income</i> perusahaan; BIGX = <i>Dummy</i> ukuran KAP, bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan bernilai 0 jika sebaliknya.</p> <p>***, **, * menotasikan tingkat signifikansi pada alpha = 1%, 5%, 10%.</p>						